LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pendidikan Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dlam Negeri No.050 – 5889 Tentang Hasil erifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerh Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
6. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan:

Maksud penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Lembata di Tahun 2023 – 2026 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023 adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta Kendal dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan.
2. Menjabarkan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata dalambentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untu kmelaksanakan Rencana Kerja.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata adalah :

1 Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2024.
2 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Pendidikan yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4. Sistematika Penulisan;

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata mempunyai sistimatika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyususnan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; hasil Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional; uraian tujuan dan sasaran Renja serta Program dan Kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan perangkat daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 menunjukan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (outcome) yang terealiasasikan melalui kegiatan- kegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kategori capaian; pertama, realisasi kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target.

Dengan capaian kinerja pada Tahun 2022 yang terbagi dalam 3 katagori, yaitu capaian yang tidak memenuhi target, capaian yang telah memenuhi target dan capaian yang melebihi target. Implikasi terhadap potensi capaian kinerja program dan kegiatan pada akhir Tahun 2022 adalah :

a. Program dan kegiatan yang capaian kinerja di bawah target kemungkinan pada Tahun 2022 akan terulang tidak tercapainya target kinerja untuk indikator yang sama;
b. Program dan kegiatan yang capaian sesuai target, pada Tahun 2022 target kinerja untuk indikator yang sama akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen renstra;
c. Program dan kegiatan yang capaian kinerja melebihi target pada Tahun 2022 tidak ada.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan adalah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Pendidikan, tercapainya pelaksanaan dan kegiatan – kegiatan Program telah disusun dan dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berkaitan dengan hal diatas Dinas Pendidikan menyajikan dasar Pengukuran Kinerja, Kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022.

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi pada tahun 2022 (Per Triwulan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		OPD Penanggung jawab
															IV								
1	2					3	4		5		6		7		8		9= (8/7) x 100		10 = 6 + 8		11 = (10/5) x 100		12
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
	1	01																					DISDIK
						DINAS PENDIDIKAN			747,225	179,626,646,680	597,484	147,247,504,968.78	654,502	179,626,646,680	10,472	162,115,849,452	2	90	607,956	309,363,354,421	81	172.23	
						BELANJA LANGSUNG			747,225	179,626,646,680	597,484	147,247,504,968.78	654,502	179,626,646,680	10,472	162,115,849,452	2	90	607,956	309,363,354,421	81	172.23	
	1	01	01			PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah		708,745	124,328,925,863	566,984	120,350,877,734	646,806	124,328,925,863	3,538	122,174,124,030	1	98	570,522	242,525,001,764	80	195.07	
	1	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Terselenggaranya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Serta Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25	48,458,450	20	116,724,140.00	5	48,458,450	5	48,415,650	100	100	25	165,139,790	100	340.79	
	1	01	01	2.01	03	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA,DPA,RDPPA,DPPA SKPD, Jumlah Dokumen Renja	dokumen	25	48,458,450	20	116,724,140	5	48,458,450	5	48,415,650	100	100	25	165,139,790	100	340.79	

						SKPD	yang Tersusun															
	1	01	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD**		**190**	**121,404,006,093**	**152**	**119,795,599,975**	**38**	**121,404,006,093**	**13**	**119,270,194,540**	**34**	**98**	**165**	**239,065,794,515**	**87**	**196.92**	
	1	01	01	2.02	01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	70	120,893,914,523	56	119,429,036,275	14	120,893,914,523	7	118,773,948,106	50	98	63	238,202,984,381	90	197.03	
	1	01	01	2.02	02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrator Pengelola Keuangan SKPD	bulan	60	385,795,640	48	291,569,600	12	385,795,640	3	372,288,160	25	96	51	663,857,760	85	172.07	
	1	01	01	2.02	05	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keu Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang Tersusun	dokumen	60	124,295,930	48	74,994,100	12	124,295,930	3	123,958,274	25	100	51	198,952,374	85	160.06	
	1	01	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**10**	**135,428,260**	**8**	**113,453,710**	**2**	**135,428,260**	**-**	**135,375,900**	**-**	**100**	**8**	**248,829,610**	**80**	**183.74**	
	1	01	01	2.05	06	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Pengguna (LBPT dan LBPS) yang tersedia	dokumen	10	135,428,260	8	113,453,710	2	135,428,260	-	135,375,900	-	100	8	248,829,610	1	183.74	
	1	01	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**702,815**	**134,620,060**	**562,252**	**182,565,798.00**	**645,620**	**134,620,060**	**3,520**	**134,523,380**	**1**	**100**	**565,772**	**317,089,178**	**81**	**235.54**	
	1	01	01	2.06	02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	jenis	260	18,722,060	208	27,295,810	52	18,722,060	52	18,662,890	100	100	260	45,958,700	100	245.48	

	1	01	01	2.06	05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Foto copy Dokumen	lembar	702420	5,785,000	561936	13,855,000	645484	5,785,000	3453	5,780,800	1	100	565,389	19,635,800	80	339.43	
	1	01	01	2.06	09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	dalam dan luar daerah	135	110,113,000	108	141,414,988	84	110,113,000	15	110,079,690	18	100	123	251,494,678	91	228.40	
	1	01	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		5,265	2,436,610,500	4,212	37,829,910	1,053	2,436,610,500		2,425,404,250	-	100	4,212	2,463,234,160	80	101.09	
	1	01	01	2.08	01	Sub Keg. Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Pos, Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	jenis	5170	2,403,060,000	4136	3,500,000	1034	2,403,060,000	259	2,392,216,000	25	100	4,395	2,395,716,000	85	99.69	
	1	01	01	2.08	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Telepon, Listrik an Air	jenis	15	30,919,500	12	31,847,750	3	30,919,500	1	30,557,250	33	99	13	62,405,000	87	201.83	
	1	01	01	2.08	04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan Alat Pembersih Kantor yang Tersedia	jenis	80	2,631,000	64	2,482,160	16	2,631,000	0	2,631,000	-	100	64	5,113,160	80	194.34	
	1	01	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		440	169,802,500	340	104,704,201	88	169,802,500		160,210,310	-	94	340	264,914,511	77	156.01	

	1	01	01	2.09	01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang Layak Operasi Roda Dua	kendaraan	155	14,160,000	124	12,759,510	31	14,160,000	1	4,587,560	3	32		17,347,070	-	122.51	
	1	01	01	2.09	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang Layak Operasi	kendaraan	155	31,477,500	124	76,944,691	31	31,477,500	1	31,470,750	3	100	125	108,415,441	81	344.42	
	1	01	01	2.09	06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Layak Pakai	jenis	115	27,415,000	92	15,000,000	23	27,415,000	0	27,402,000	-	100	92	42,402,000	80	154.67	
	1	01	01	2.09	10	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana yang direhab	unit	15	96,750,000	12	82,405,503	3	96,750,000	1	96,750,000	33	100	13	179,155,503	87	185.17	
	1	01	02			**PROG. PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		37,480	55,001,839,077	29,700	26,785,663,534.78	7,496	55,001,839,077	6,734	39,646,918,062	90	72	36,434	66,432,581,597	97	120.78	
	1	01	02	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memadai Dalam Mendukung Mutu Pendidikan**		17,875	26,976,417,398	14,156	10,957,523,197.76	3,575	26,976,417,398	3,543	21,278,495,265	99	79	17,699	32,236,018,463	99	119.50	

	1	01	02	2.01	02	Sub Keg. Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Terbangun	ruang	30	1,236,524,000	24	1,163,799,260	6	1,236,524,000	6	1,210,260,050	100	98	30	2,374,059,310	100	191.99			
	1	01	02	2.01	03	Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang Terbangun	ruang	45	980,320,000	36	26,030,830	9	980,320,000	9	979404750	100	100	45	1,005,435,580	100	102.56			
	1	01	02	2.01	04	Sub Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehtan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang Terbangun	ruang	30	256,347,000	24	42,974,500	6	256,347,000	6	255730400	100	100	30	298,704,900	100	116.52			
	1	01	02	2.01	05	Sub Keg. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang Terbangun	ruang	35	191,795,000	28	203,959,008	7	191,795,000	7	191737100	100	100	35	395,696,108	100	206.31			
	1	01	02	2.01	06	Sub Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary yang dibangun	jamban	35	681,304,000	28	556,346,850	7	681,304,000	7	680163400	100	100	35	1,236,510,250	100	181.49			
	1	01	02	2.01	07	Sub Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun	mes guru	15	322,313,614	12	173,041,880	3	322,313,614	3	322027000	100	100	15	495,068,880	100	153.60			
	1	01	02	2.01	08	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi,	ruang	35	1,483,204,960	28	704,958,680	7	1,483,204,960	7	1,477,548,830	100	100	35	2,182,507,510	100	147.15			
		01	02	2.01		Sub Keg. Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Mebeler yang diadakan	paket	30	794,830,000	24	564,783,022	6	794,830,000	6	792,422,650	100	100	30	1,357,205,672		170.75			
		01	02	2.01		Sub Keg. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah yang tersedia	paket	5	-	4	1,815,905,746.98	1	-	1	-	100		5	1,815,905,747		#DIV/0!			
	1	01	02	2.01	22	Sub Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Alat Peraga Siswa yang diadakan	paket	185	5,580,638,000	148	4,946,965,035.78	37	5,580,638,000	5	5,579,159,097	14	100	153	10,526,124,133	83	188.62			

	1	01	02	2.01	23	Sub Keg. Penyelengagaaran Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SD/MI yang Mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2021/2022	siswa	16265	49,047,380	13012	86,868,610	3253	49,047,380	3,253	48,971,911	100	100	16,265	135,840,521	100	276.96	
	1	01	02	2.01		Sub Keg.Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Guru yang mengikuti Pendidikan Pelatihan Calon Pengawas SD dan Jumlah Pejabat Fungsional Guru SD yang difasilitasi	orang	180	-	144	95,584,945	36	0	36	0	100		180	95,584,945		#DIV/0!	
	1	01	02	2.01	28	Sub Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedia Dana Dampingan BOS bagi Sekolah di Kab. Lembata,38 SMP, 101 SD	sekolah	190	-	152	175,776,950	38	0	38	0			190	175,776,950			
	1	01	02	2.01	29	Sub Keg Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah SD yang mendapat alokasi dana BOS	sekolah	795	15,400,093,444	636	400,527,880	159	15,400,093,444	159	9741070077	100	63	795	10,141,597,957	100	65.85	
	1	01	02	2.02		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Tercapainya Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Peningkatan Mutu Penidikan Nonformal/Kesetaraan**		18,015	23,386,633,669	14,412	13,561,572,908.02	3,603	23,386,633,669	2,873	15,940,529,653	80	68	17,285	29,502,102,561	96	126.15	
	1	01	02	2.02	03	Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang Terbangun	ruang	45	1,034,118,000	36		9	1,034,118,000	9	782,230,774	100	76	45	782,230,774	100	75.64	
	1	01	02	2.02	04	Sub Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehtan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang Terbangun	ruang	30	521,672,000	24		6	521,672,000	6	323,155,500	100	62	30	323,155,500	100	61.95	
	1	01	02	2.02	06	Sub Keg. Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Terbangun	unit	45	573,778,380	36		9	573,778,380	9	188,018,947	100	33	45	188,018,947	100	32.77	

	1	01	02	2.02	09	Sub Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang direhab	unit	5	666,619,000	4		1	666,619,000	1	645,667,000	100	97	5	645,667,000	100	96.86	
	1	01	02	2.02	12	Sub Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary yang dibangun	jamban	10	1,041,618,000	8		2	1,041,618,000	2	970,978,000	100	93	10	970,978,000	100	93.22	
	1	01	02	2.02	14	Sub Keg. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah yang direhab	ruang	40	2,107,794,680	32	1,337,940,129.27	8	2,107,794,680	8	1,079,013,070	100	51	40	2,416,953,199	100	114.67	
	1	01	02	2.02	15	Sub Keg. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru dengan Tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya yang direhab	ruang	5	1,446,829,025	4	305,292,730	1	1,446,829,025	1	1,282,920,000	100	89	5	1,588,212,730	100	109.77	
	1	01	02	2.02	17	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Ruang Perpustakaan yang Memadai	ruang	5	604,051,610	4	262,673,800	1	604,051,610	1	394,566,800	100	65	5	657,240,600	100	108.81	
	1	01	02	2.02	21	Sub Keg. Rehavbilitasi Sedang/berat Rumag Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru yang Direhab	ruang	45	566,985,620	36		9	566,985,620	9	561,537,000	100	99	45	561,537,000	100	98.52	
	1	01	02	2.02	24	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumah Jamban Siswa/guru degan kerusakan minimal sedang, baik beserta Sanitasrinya atau tanpa Sanitasinya yang direhab	jamban	10	1,331,081,990	8	440,680,150	2	1,331,081,990	2	609,156,300	100	46	10	1,049,836,450	100	78.87	
		01	02	2.02		Sub Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Meubeler yang diadakan	paket	55	1,108,900,000	44	356,105,750	11	1,108,900,000	11	915,409,000	100	83	55	1,271,514,750	100	114.66	

	1	01	02	2.02	35	Sub Keg. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Paket	60	1,880,000,000	48	3,034,017,913.75	12	1,880,000,000	12	1,879,331,940	100	100	60	4,913,349,854	100	261.35	
	1	01	02	2.02		Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah yang tersedia	Paket	5	-	4	436,777,100	1	0	1	-	100		5	436,777,100		#DIV/0!	
	1	01	02	2.02	36	Sub.Keg.Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2021/2022	siswa	17400	42,651,780	13920	66,397,535	3480	42,651,780	2750	42,301,841	79	99	16,670	108,699,376	96	254.85	
	1	01	02	2.02	41	Sub.Keg.Penmbinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya Dana Dampingan BOS bagi Sekolah Jenjang SMP di Kab. Lembata			-				0		-			-	-			
	1	01	02	2.02	42	Sub.Keg.Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang Mendapat Alokasi Dana BOS	Sekolah	255	10,660,533,584	204	7,521,687,800	51	10,660,533,584	51	6,466,243,481	100	61	255	13,787,931,281	100	129.34	
	1	01	02	2.03		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		**315**	**4,354,836,090**	**252**	**1,808,996,369**	**63**	**4,354,836,090**	**63**	**2,359,931,464**	**100**	**54**	**315**	**4,168,927,833**	**100**	**95.73**	
	1	01	02	2.03	02	Sub Keg. Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Toilet (jamban) siswa beserta Sanitasinya	paket	5	1,088,510,940	4	-	1	1,088,510,940	1	1,076,127,614			5	1,076,127,614			
	1	01	02	2.03	3	Sub.Keg.Rehabilitasi/Sedang/Berat Gedung Ruang Kelas PAUD	Jumlah Bangunan Gedung Sekolah TKK yang direhab	ruang	10	0	8	611,826,150	2	0	2	-			10	611,826,150			
	1	01	02	2.03	12	Sub Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktek dan Alat Peraga Siswa yang diadakan	paket	50	3,238,710,000	40	1,148,149,289	10	3,238,710,000	10	1,256,310,000	100	39	50	2,404,459,289	100	74.24	

	1	01	02	2.03	16	Sub.Keg.Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Non Formal	Jumlah Penyelenggara dan Pendidik PAUD yang cakap dlam penyusunan moddel Pembelajaran	orang	175	-	140	17,387,760	35	0	35	-			175	17,387,760		#DIV/0!	
	1	01	02	2.03	17	Sub Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pendampingan Bantuan Operasional Penidikan	lembaga PAUD	75	27,615,150	60	31,633,170	15	27,615,150	15	27,493,850	100	100	75	59,127,020	100	214.11	
	1	01	02	2.04		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		1,275	283,951,920.0	880	457,571,060	255	283,951,920.0	255	67,961,680	100	24	1,135	525,532,740	89	185.08	
	1	01	02	2.04	10	Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Lembaga Kesetaraan yang difasilitasi	lembaga	500	207,200,000	400	428,650,000	100	207,200,000	100	0	100	-	500	428,650,000	100	206.88	
	1	01	02	2.04	12	Sub Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal /Kesetaraan	Jumlah Angka Kelulusan Paket B Kesetaraan SMP	Warga Belajar	600	32,462,030	480	28,921,060	120	32,462,030	120	32,452,030	100	100	600	61,373,090	100	189.06	
	1	01	02	2.04	15	Sub Keg. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Guru PAUD yang Profesionalisme	guru	175	44,289,890	140		35	44,289,890.0	35	35,509,650	100	80	175	35,509,650	100	80.18	
	1	01	04			**PROG. PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia**		1,000	295,881,740	800	110,963,700	200	295,881,740	200	294,807,360	100	100	1,000	405,771,060	100	137.14	

							Sekolah																
	1	01	04	2.01		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah		1,000	295,881,740	800	110,963,700	200	295,881,740	200	294,807,360	100	100	1,000	405,771,060	100	137.14	
	1	01	04	2.01	01	Sub Keg. Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Calon Kepala Sekolah di Kab Lembata yang Terakreditasi, dan Jumlah Tenaga Kependidikan yang terpetakan angka kreditnya	guru	250	69,186,590	200	110,963,700	50	69,186,590	50	68,687,890	100	99	250	179,651,590	100	259.66	
	1	01	04	2.01	02	Sub Keg. Penataan Penistribuian Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru yang mengikuti pendidikan pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas yang di fasilitasi (PAUD,SD,SMP)	guru	750	226,695,150	600		150	226,695,150	150	226,119,470	100	100	750	226,119,470	100	99.75	
																		-	-				

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kegiatan – kegiatan yang memenuhi target dan tidak memenuhi target serta factor penyebab tidak tercapainya target dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan sebagai berikut:

Secara umum tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Dinas Pendidikan sampai dengan Tahun 2022 sebesar **90,25 %** atau dikategorikan **baik** yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan Renja Tahun 2022, terdapat (4) empat sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu :

1. **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"** Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Dinas jabatan, dengan target 31 unit roda dua dan 1 unit roda empat . Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.14.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.587.560.,- atau 32,39%.
2. **PROG. PENGELOLAAN PENDIDIKAN :** Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sub Kegiatan: Keg. Pembangunan Laboratorium dengan target 9 unit atau 32,76%,pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp 573.778.380,-dan terealisasi sebesar Rp.188.018.947,-
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan target 2 (dua) unit dengan pagu anggaran Rp.1.331.081.990,- terealisasi sebesar Rp.609.156.300,- atau 45,76%.
4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sub Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dengan paggu anggaran Rp.3.238.710.000,- terealisasi sebesar Rp.1.256.310.000,- atau 38,79%.

b. Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**

Dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan target 5 dokumen terealisasi

sebanyak 5 dokumen atau 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp.48.458.50,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.415.650,- atau 100%.

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerahdengan Sub Kegiatan terdiri dari :**

  1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 14 bulan terealisasi sebanyak 14 bulan atau 100%. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.120.893.914.523,- dan terealisasi sebesar Rp. 118.773.948.106,- atau 98,24 %.
  2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 33 orang terealisasi sebanyak 33 orang atau 100%, pagu anggaran sebesar Rp.385.795.640,- dan realisasi sebesar Rp. 372.288.160,- atau 96,49%.
  3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100% kegiatan ini mendapat pagu anggaran sebesar RP. 124.295.930,- realisasi sebesar Rp. 123.958.274,- atau 99,72%

- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan**

  Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan target 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumenatau 100% dengan pagu anggaran Rp.135.428.260,- realisasi sebesar Rp. 135.375.900,- atau 99,96%.

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

  1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target 52 Jenis ATK, terealisasi sebanyak 52 jenis ATK, 100%, dengan pagu anggaran Rp.18.722.060,- realisasi sebesar Rp.18.562.890,- atau 99,68%.
  2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target foto copy 10.000 lembar, jumlah jilid 150 buku, terealisasi fc.6.454 lembar dan 150 buku, 100% dengan pagu anggaran Rp.5.785.000,- realisasi sebesar Rp.5.780.800,- atau 99.92%.
  3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target 84 kali dalam daerah, 17 kali luar daerah, dengan realisasi 84 kali dalam daerah, 17

kali luar daerah atau 100% dengan pagu anggaran Rp.110.113.000,- realisasi sebesar Rp.110.079.690,- atau 99.97%.-

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target 3 jenis, realisasi sebesar 3 jenis atau 100%, dengan pagu anggaran Rp. 2.403.060.000,- realisasi Rp.2.392.216.000,-atau 99,54%.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 3 jenis, realisasi 3 jenis atau 100% dengan pagu anggaran Rp.32.425.375,- realisasi 31.847.750,- atau 98,22%.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 16 jenis, realisasi 16 jenis atau 100%, dengan pagu anggaran Rp. 2.631.000,- realisasi Rp.2.631.000,- atau 100%.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;**

1. Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan, dengan target 31 unit realisasi 31 unit atau 100%, dengan pagu anggaran Rp.31.477.500, realisasi sebesar Rp.31.470.750,- atau 99,97%.
2. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan da mesin lainnya, taret 23 jenis, realisasi 23 jenis atau 100%, dengan pagu sebesar Rp.27.415.000,- realisasi sebesar Rp.27.402.000,- atau 99,95%
3. Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 1 unit, realisasi 1 unit atau 100%, dengan pagu Rp.96.750.000,-. Realisasi Rp.96.750.000,- atau 100%.

II. Program Pengelolaan Pendidikan;

- **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;**

1) Sub Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan target 6 ruang kelas baru, realisasi 6 RKB atau 100 %, dengan pagu Rp. 1.236.524.000,-realisasi Rp. 1.210.260.050,- atau 97,87%.
2) Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, target 9 ruang, realisasi 9 ruang atau 100%, dengan pagu Rp.980.320.000, realisasi Rp.979.404.750, atau 99,90%

3) Sub Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehtan Sekolah, target 6 unit, realisasi 6 unit atau 100%, dengan pagu Rp.256.347.000, realisasi Rp.256.730.400,- atau 99,75%
4) Sub Keg. Pembangunan Perpustakaan Sekolah, target 7 ruang, realisasi 7 ruang, dengan pagu Rp.191.795.000, realisasi Rp.191.737.100, atau 99,97%.
5) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana prasarana dan utilitas sekolah, dengan target 7 jamban, realisasi 7 jamban, 100% dengan pagu anggaran Rp. 681.304.000,- realisasi Rp. 680.163.400,- atau 99,83%.
6) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah, denga target 3 mes guru, realisasi 3 mes guru, 100% dengan pagu anggaran Rp. 322.313.614,-realisasi Rp.322.027.000,- atau 99,91%.
7) Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, target 7 ruang, realisasi 7 ruang atau 100%, dengan pagu anggaran Rp.1.483.204.960,- realisasi Rp.1.477.548830,- atau 99,61%.
8) Sub Kegiatan Pengadaan Meubel Sekolah, target 6 paket realisasi 6 paket atau 100%, dengan pagu anggaran Rp. 794.830.000,- realisasi Rp.792.422.650,- atau 99,69%.
9) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan target 5 paket, realisasi 5 paket atau 100%, dengan pagu anggaran Rp.5.580.638.000,- realisasi, Rp.5.579.159.097,-atau 99,97%.
10) Sub Keg. Penyelengagaaran Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, dengan target 3253 siswa, realisasi 3253 siswa dengan pagu Rp.49.047.380,realisasi Rp.48.871.911, atau 99,84%
11) Sub Keg Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar target 159 sekolah, realisasi 159 sekolah atau 100%, dengan pagu Rp.15.400.093.444, realisasi 9.741.070.077, atau 63,25%

- **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;**
  1. Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, target 9 ruang realisasi 9 ruang atau 100%, dengan pagu Rp.1.034.118.000,- realisasi Rp.782.230.77, atau 75,64%.
  4. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan target 8 ruang, realisasi 8 ruang atau 100%, dengan

pagu anggaran Rp.2.107.794.680,- realisasi Rp. 1.337.940.129,27,- atau 99,89%.

5. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah, dengan target 1 ruang, realisasi 1 ruang, atau 100%, dengan pagu anggaran Rp. 1.446.829.025,-realisasi Rp. 1.282.920.000,- atau 88,67 %
6. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan target 1 ruang, realisasi 1 ruang , atau 100%, dengan pagu anggaran Rp. 604.051.610,-realisasi Rp. 394.566.800,- atau 65,32%
7. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan target 2 unit, realisasi 2 unit atau 100%, dengan pagu Rp.1.331.081.990,- realisasi Rp.609.156.300,- atau 45,76%
8. Sub Kegiatan Pengadaan Meubel Sekolah, dengan target 11 paket, realisasi 11 paket atau 100%, dengan pagu anggaran Rp. 1.108.900.000,- realisasi Rp.915.409.000,- atau 82,55%.
9. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa, dengan target 12 paket, realisasi 12 paket, dengan pagu anggaran Rp.1.880.000.000,- realisasi Rp. 1.879.331.940,- atau 99,96%.
10. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik, dengan target 2.750 siswa, realisasi 2.750 siswa atau 100%, dengan pagu anggaran Rp. 42.651.780,- realisasi Rp.42.301.81,- atau 99,18%

- **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**.

1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan target 1 paket, realisasi 1 paket atau 100%, dengan pagu anggaran Rp. 1.088.510.940,- realisasi Rp. 1.076.127.614,-,atau 98,62%.
2. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa, dengan target 10 paket, realisasi 10 paket atau 100%, dengan pagu anggaran Rp.3.238.710.000,- realisasi Rp.1.256.310.000,- atau 38,79%.

3. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, dengan target 197 lembaga, realisasi 197 lembaga dengan pagu anggaran Rp.27.615.150,- realisasi Rp.27.493.850,- atau 99,56%.

- **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan dengan target 100 lembaga, realisasi 100 lembaga atau 100%, dengan pagu anggaran Rp.207.200.000,- realisasi Rp. 0,- atau 0 %.
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan, dengan target 120 warga belajar, realisasi 120 warga belajar atau 100%, dengan pagu anggaran Rp. 32.462.030,- realisasi Rp.32.452.030,- atau 99,96%.
3. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal, dengan target 35 orang, terrealisasi 35 0rang dengan pagu Rp. 44.289.890,- realisasi Rp.35.509.650,- atau 80,17%.

III. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

- **Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**

1) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Daasar,PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan, dengan target, 50 orang, realisasi 50 orang, dengan pagu anggaran Rp.69.186.590,- realisasi Rp.68.587.890,- atau 99,27%.
2) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan target 150 guru, dengan pagu anggaran Rp.226.695.150,- realisasi Rp.226.119.470,- atau 99,74%.

c. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ***(TIDAK ADA).***

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya kinerja program/ kegiatan yaitu :

   - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Dinas Jabatan, dengan target 30 unit roda dua dan 1 unit roda empat atau 32,39 %. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.14.160.000,-,- dan terealisasi sebesar Rp.4.587.560,- atau 32,39%. Hal ini disebabkan oleh karena kendaraan yang tersedia hanya mengalami kerusakan ringan.
   - Pada Tahun 2022, ada kegiatan/pembangunan fisik yang pelaksanaannya tertunda atau gagal salur. Selain kegiatan fisik, kegiatan non fisik seperti Sertifikasi Guru, Peningkatan Kualifikasi dan Rekrutmen guru baru, perlu diupayakan lebih optimal lagi untuk percepatan pemenuhan target-target Renstra di periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut :

- ✓ Terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Lembata pada umumnya.
- ✓ Terhadap program/kegitan yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak pada laporan kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.
- ✓ Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
- ✓ Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan.

2. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :
   - ✓ Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani kegiatan.

- ✓ Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
- ✓ Perencanaan serta pengambilan kebijakan dalam menentukan target program dan kegiatan harus lebih ditingkatkan.

2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**.

Sejauh mana keberhasilan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau sejauh mana kinerja SKPD berdasarkan target dan Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Pendidikan dapat dilihat pada table berikut :

Target dan Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Indikatir	Target Tahun 2022	Realisasi tahun 2022	% Capaian
			2.Tercapainya standar Isi yang menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan standar PAUD	90%	95%	105,5%
			3.Standar Proses mencakup kriteria proses pembelajaran untuk pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan sesuai dengan usia	100%	97%	97%
			4.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup Kriteria Kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	90%	95%	105,5
			5.Standar Sarana dan Prasarana Mendukung penyelnggaraan PAUD secara Holistik da Integratif	80%	83%	103,75%
			6.Standar Pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pada lembaga PAUD	95%	97%	102,10%
			7.Standar Pembiayaan mencakup komponen dan besaran biaya personal serta operasional.	80%	85%	106,6%
			8.Standar Penilaian Mencakup tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan usia anak.	95%	95%	100%
2	Pendidikan Sekolah Dasar	Kurikulum	1.Ketersediaan Kurikulum Nasional	Ada	Ada	100%
			(95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD.MI			
			2.Keteerlaksanaan Kurikulum Nasional	100%	100%	100%

			(Angka Putus Sekolah APS tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah)			
			3.Presentase Kelulusan SD	100%	100%	100%
			(Jumlah Siswa SD/MI perkelas antara 30-40 siswa)			
			4.Presentase Uji Sampel mutu pendidikan standar nasional (TKD dan TPM)	90%	93%	103,33
			(90 persen dari siswa yang mengikuti sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran Bahasa, Matematika, IPA			
			5.Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal	Ada	Ada	100%
			(95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke sekolah Menengah pertama SMP/MTS	Ada	Ada	100%
			6.Keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal	Ada	Ada	100%
			(95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran)			
			7.Presentase daya serap standar kurikulum tingkat satuan pendidikan			
			(90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional	90%	93%	103,33%
			8.Angka Partisipasi Kasar	121%	78,68%	65,02%

			9.Angka Partisipasi Murni	95%	76,28%	80,29%
			10.Angka Pendaftaran Siswa 7-12 tahun	100%	100%	100
			11.Angka Putus Sekolah (APS)	0,04%	0%	0%
			12.Angka Mengulang Kelas (AMK)	2,72%	1,5%	0,55%
			13.Survival Rate	menaik	Menaik	83
			14.Prosentase Kelulusan	100%	100%	100
		Ketenagaan (guru)	1.Kinerja Kepala Sekolah	Baik	Baik	baik
			2.Kinerja Guru	Baik	Baik	baik
			3.Prosentase guru berkualifikasi	90%	79%	87,77
			4.Prosentase guru berkealihan	65%	70%	107,69
			5.Rasio guru dan peserta didik	1:35	1:35	100
		Kependidikan	1.Tenaga Tata Usaha Sekolah	1 orang	1 orang	100
			2.Tenaga Perpustakaan Sekolah	1 orang	1 orang	100
			3.Penjaga Sekolah	1 Orang	1 orang	100
		Sarana Prasarana	1.Lahan	100%	100%	100
			2.Bangunan	90%	90%	100
			3.Pralatan/Lab/Media/UKS/Perpustakaan	Ada	Ada	100

			4.Buku teks peserta didik	1:01	1:01	100
			5.Sarana olahraga.	Ada	Ada	100
			6.Infrasturtur	Ada	Ada	00
		Organisasi	1.Struktur	Ada	Ada	100
			2.Personalia	Ada	Ada	100
			3.Uraian Tugas	Ada	Ada	100
		Pembiayaan	1.Anggaran Pemerintah	Ada	Ada	100
			2.Anggaran Swadaya	Ada	Ada	100
			3.Pengelolaan Dana Pendidikan	Ada	Ada	100
		Manajemen Sekolah	1.Tingkat Kehadiran Guru	95%	97%	102,10
			2.Tingkat Kehadiran Tenaga Administrasi	95%	97%	102,10
			3.Tingkat Kehadiran Siswa	95%	97%	102,10
			4.Tertib Administrasi	95%	97%	102,10
			5.Kinerja Sekolah (Akreditasi)	Baik	Baik	100
		Peran Serta Masyarakat	1.Dukungan Komite Sekolah/Badan/peranserta masyarakat	Baik	Baik	100
			2.Perhatian Orang Tua	Ada	Ada	100

3	Pendidikan SMP/SATAP	Kurikulum	1.Ketersediaan Kurikulum Nasional	Ada	Ada	100
			2.Tersedianya kurikulum lokal	Ada	Ada	100
			3.Ketersediaan kurikulum lokal	Ada	Ada	100
			4.Keterlaksanaan kurikulum nasional	90%	95%	105,5%
			5.Keterlaksanaan kurikulum lokal	90%	90%	100%
			6.Kriteria kenaikan kelas dan ketamatan	Ada	Ada	100
		Peserta Didik	1.Angka Partisipasi Kasar (APK)	Meningkat	Meningkat	
			2.Angka Partisipasi Murni (APM)	Meningkat	Meningkat	
			3.Angka Pendaftaran Siswa	Meningkat	Meningkat	
			4.Angka Putus Sekolah	Menurun	Menurun	
			5.Angka Mengulang	Menurun	Menurun	
			6.Kelangsungan belajar siswa	Meningkat	Meningkat	
			7.Prosentase Kelulusan	100%	100%	100%
		Ketenagaan	1.Kinerja kepala sekolah	Baik	Baik	
			2.Prosentase guru berkualifikasi	85%	79%	%

			3.Prosentase Guru Berkualitas	85%	79%	92,94%
			4.Prosentase Karyawan berkeahlian	90%	80%	88,8%
			5.Rasio Guru dengan siswa	1:28	1:28	
			6.Angka pendaftaran siswa	Meningkat	Meningkat	
			7.Angka Putus sekolah	Menuru	Menurun	
			8.Angka mengulang	Menurun	Menurun	
			9.Kelangsungan belajar siswa	Meningkat	Meningkat	
			10.Prosentase Kelulusan	100%	100%	100%
		Sarana Prasarana	1.Lahan	Cukup	Cukup	
			2.Bangunan	Lengkap	Lengkap	100
			3.Perabot	Lengkap	Lengkap	100
			4.Peralatan Lab/Media	Lengkap	Lengkap	100
			5.Rasio Buku Teks dengan Siswa	1:01	1:014	
			6.Sarana Olahraga	Lengkap	Lengkap	100
			7.Infrastruktur	Lengkap	Lengkap	100
		Organisasi	1.Struktur Organisasi	Ada	Ada	100
			2.Personalia	Ada	Ada	100

			3.Uraian Tugas	Ada	Ada	100
			4.Mekanisme Kerja	Baik	Baik	100
		Pembiayaan	1.Anggaran Pemerintah	Ada	Ada	100
			2.Anggaran Swadaya	Ada	Ada	100
			3.Komponen yang dibiayai	Seluruhnya	Seluruhnya	
		Manajemen Sekolah	1.Pemahaman Visi dan Misi Sekolah	Baik	Baik	
			2.Tingkat kehadiran guru	95%	95%	100%
			3.Tingkat Kehadiran Tenaga Administrasi	95%	95%	100%
			4.Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan Lainnya	95%	95%	100%
			5.Tingkat Kehadiran Siswa	95%	94%	98,94%
			6.Tertib Administrasi	95%	94%	98,94%
			7.Kinerja Sekolah	Baik	Baik	
		Peranserta Masyarakat	1.Dukungan Badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah	Ada	Ada	100
			2.Perhatian Orang Tua	Ada	Ada	100
			3.Peranserta Tokoh Masyarakat	Ada	Ada	100
			4.Peranserta Dunia Usaha/Industri	Ada	Ada	100

4	Pendidikan Kesetaraan	Peserta Didik	1.Tercapainya Penduduk Usia produktif (15-44 tahun) bisa membaca dan menulis	100%	100%	100%
			2.Tercapainya jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun tidak Melebihi 7 persen	1%	0%	0
			3.Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia di atas 44 tahun tidak melebihi 30 persen	3%	0%	0
			4.95% pesereta didik yang mengikuti ujian akhir program Paket A setara	80%	80%	100%
			5.95% peserta didik yang mengikuti ujian akhir program Paket B Setara	80%	80%	100
			6.80 % peserta didik yang mengikuti ujian akhir program paket C setara	80%	80%	100%
			7.80% peserta kusus dapat mengikuti secara tuntas	80%	80%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah:

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab. Lembata, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Lembata mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian untuk lebih di tingkatkan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan:

Permasalahan umum dari semua kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kab.Lembata adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan pemerataan Pendidikan;
2. Peningkatan mutu Pendidikan;

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan diatas, maka Dinas Pendidikan Kab Lembata memiliki beberapa strategi untuk meminimalisir permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
2. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
3. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
4. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
5. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan;

2.3.3 Peluang dan Tantangan :

Peluang bagi Dinas Pendidikan untuk mengatasi tantangan di atas, antara lain :

(1) .Kesiapan Pemerintah untuk membantu memperluas layanan pendidikan melalui program DAK dan dana *block grant serta melalui program Rehab Nasional* untuk membangun RKB, ruang penunjang, ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas, peningkatan kapasitas SDM dan penyaluran biaya operasional satuan pendidikan jenjang SD dan SMP,

(2) .Kemajuan teknologi IT yang memungkinkan proses managemen penyelenggaraan pendidikan lebih efektif khususnya terkait akses layanan data dan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan program - program pendidikan di setiap level penyelenggara sesuai ketentuan dan kewenangan.

Berdasarkan tantangan dan peluang di atas dalam konteks layanan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lembata, catatan penting yang harus diperhatikan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pendidikan yang berkualitas tetap harus menjadi prioritas dan bahkan ditingkatkan volume sasarannya seperti kegiatan perluasan daya tampung melalui pembangunan USB, RKB, Pemberdayaan sekolah-sekolah swasta, penyediaan beasiswa atau Bantuan Pendidikan untuk siswa sekolah swasta dalam mengantisipasi meningkatnya angka putus sekolah dan pencapaian SPM.
2. Layanan PAUD perlu diperluas, terutama di daerah-daerah yang memiliki kantong-kantong pemukiman yang belum tersedia layanan PAUD, baik formal maupun nonformal. Ini perlu dilakukan mengingat APK pendidikan anak prasekolah ini baru mencapai 66,05% pada tahun 2022.
3. Kegiatan pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya pemenuhan standar nasional pendidikan untuk aspek PTK, seperti pemenuhan kualifikasi akademik, kepemilikan sertifikat pendidik, keikutsertaan dalam program diklat berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian.

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dari beberapa isu strategis Dinas Pendidikan yakni,

1. Upaya perluasan dan pemerataan pendidikan masih belum sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat usia sekolah. Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum meratanya pendidikan di Kabupaten Lembata antara lain adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana sekolah negeri dan tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta;

   (2) Ketidakmampuan ekonomi sebagian besar masyarakat untuk membiayai operasional pendidikan individual anaknya dan (3) Sikap budaya sebagian masyarakat yang tidak memandang pendidikan sebagai faktor penting dalam membangun kehidupan anaknya;
2. Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan masih dihadapkan pada persoalan: (1) Banyak gedung sekolah yang rusak, (2) Terbatasnya fasilitas penunjang untuk kegiatan pembelajaran yang efektif, (3) Tingkat profesionalitas tenaga pendidik yang belum merata antar jenis dan satuan pendidikan, (4) Kurang optimalnya pemahaman tenaga pendidik terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berdampak pada lemahnya implementasi Kurikulum dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, (5) Terbatasnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pendidikan kesetaraan fungsional yang menyebabkan sering munculnya tindakan tidak taat asas dan lemahnya hasil proses pembelajaran yang dialami warga belajar.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam proses rancangan awal RKPD 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata membandingkan rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Hal ini dimaksud untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas guna mencapai target Renstra tahun berjalan. Adapun rancangan program kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata dapat dilahat dalam lampiran Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata

No	Program Kegiatan	Rencana Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PENDIDIKAN				177,451,667,582	DINAS PENDIDIKAN				179,456,785,382	
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				177,451,667,582	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179,456,785,382	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				177,451,667,582	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				179,456,785,382	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	20%	119,945,252,300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	20%	122,211,186,100	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	65,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	65,000,000	

3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	10,000,000	

			Perubahan DPA-SKPD					DPA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**116,805,950,500**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**119,071,884,300**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	116,398,105,700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	118,664,039,500	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	393,844,800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	393,844,800	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	7,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset**	**Dokumen**	**142,428,300**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset**	**Dokumen**	**142,428,300**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7,000,000	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	135,428,300	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	135,428,300	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Terselenggaranya manajemen PNS**	**100%**	**10,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Terselenggaranya manajemen PNS**	**100%**	**10,000,000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**115,577,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**115,577,000**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	83,077,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	83,077,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**40,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**40,000,000**	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10,000,000	Pengadaan Mebel	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**2,718,151,500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**2,718,151,500**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,685,232,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,685,232,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30,919,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30,919,500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**48,145,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**48,145,000**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33,145,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33,145,000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	5,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah**		**54,710,254,560**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah**		**54,449,438,560**	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**30,734,954,700**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**30,474,138,700**	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang	1,803,072,000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang	1,803,072,000	

	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang	1,076,920,000.00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang	1,076,920,000.00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	1,076,920,000.00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	1,076,920,000.00	
	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	450,768,000.00	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	450,768,000.00	
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah di rehab.	1 Ruang	205,615,000	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah di rehab.	1 Ruang	205,615,000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	205,615,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	205,615,000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	260,816,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	260,816,000	

	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	355,418,000.00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	355,418,000.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1,344,054,500	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1,344,054,500	
	Rehabilitasi Tolet/Jamban	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Toilet/Jamban yang telah direhabilitasi	1 Paket	500,000,000	Rehabilitasi Tolet/Jamban	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Toilet/Jamban yang telah direhabilitasi	1 Paket	500,000,000	
	Pembangunan Tolet/Jamban	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Toilet/Jamban yang telah dibangun	1 Paket	500,000,000	Pembangunan Tolet/Jamban	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Toilet/Jamban yang telah dibangun	1 Paket	500,000,000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	3,232,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	3,232,000,000	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	2.647 Peserta Didik	56,547,400	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	2.647 Peserta Didik	56,547,400	

	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	100,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	100,000,000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	160 Satuan Pendidikan	41,164,500	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	160 Satuan Pendidikan	41,164,500	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	160 Satuan Pendidikan	14,673,302,800	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	160 Satuan Pendidikan	14,673,302,800	
	Rehab Ruang Guru	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru yang direhab	1 Ruang	500,000,000	Rehab Ruang Guru	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru yang direhab	1 Ruang	500,000,000	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	500,000,000	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	500,000,000	

	Penambahan/Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang	1,803,072,000	Penambahan/Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang	1,803,072,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1,344,054,500	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1,344,054,500	
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah di rehab.	1 Ruang	205,615,000	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah di rehab.	1 Ruang	205,615,000	
	Rehab Rumah Dinas Guru	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru yang direhab	1 Ruang	500,000,000	Rehab Rumah Dinas Guru	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru yang direhab	1 Ruang	500,000,000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Tercapainya Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Peningkatan Mutu Penidikan Nonformal/Kesetaraan**		**22,224,900,660**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**22,224,900,660**	
	Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Junlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	1 Unit	1,000,000,000.00	Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Junlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	1 Unit	1,000,000,000.00	

	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1,101,038,000.00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1,101,038,000.00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	512,592,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	512,592,000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	300,000,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	300,000,000	
	Pembangunan Laboratorium Komputer dan IPA	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	512,592,000.00	Pembangunan Laboratorium Komputer dan IPA	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	512,592,000.00	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	725,139,000.00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	725,139,000.00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	565,578,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	565,578,000	

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	2,307,336,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	2,307,336,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1,602,255,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1,602,255,000.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	640,902,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	640,902,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	435,084,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	435,084,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1,245,336,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1,245,336,000.00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	200,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	200,000,000	

	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	875,000,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	875,000,000.00	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	2000 Peserta Didik	42,651,780	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	2000 Peserta Didik	42,651,780	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	45 Orang	100,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	45 Orang	100,000,000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	57 Satuan Pendidikan	66,939,580	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	57 Satuan Pendidikan	66,939,580	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	57 Satuan Pendidikan	9,992,457,300.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	57 Satuan Pendidikan	9,992,457,300	

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		**1,466,447,300**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		**1,466,447,300**	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	856,836,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	856,836,000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	182,032,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	182,032,000.00	
Pengadaan Mebel PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	200,000,000	Pengadaan Mebel PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	200,000,000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 Paket	75,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 Paket	75,000,000	

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Bidang GTK	68,755,900	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Bidang GTK	68,755,900	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	33,823,400	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Satuan Pendidikan	33,823,400	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	50,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Orang	50,000,000	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		**283,951,900**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		**283,951,900**	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	207,200,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	207,200,000	

Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	32,462,000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	32,462,000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	44,289,900	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	44,289,900
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		**2,796,160,722**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		**2,796,160,722**
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		**2,796,160,722**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**		**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**		**2,796,160,722**

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Dokumen	59,206,000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Dokumen	59,206,000
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Laporan	2,736,954,722	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Laporan	2,736,954,722

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Mendasar pada tabel di atas , dapat disimpulkan bahwa sebagai besar usulan masyarakat yang tertuang lewat hasil musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan maupun Kecamatan merupakan usulan rutin yang ternyata sudah diakomodir dan sudah/akan dilaksankan Dinas Pendidikan di tahun lalu dan mendatang, seperti :

- Pembangunan Ruang Kelas Baru, Laboratorium, Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Rumah Dinas Guru. Perpustakaan.
- Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Guru, Perpustakaan, Sarana dan prasarana utilitas sekolah dan pengadaan meubeler.

Kegiatan lain yang dimunculkan masyarakat lewat musrenbang, dan belum terakomodir dalam RENJA tahun 2024 seperti : Pengadaan alat peraga untuk TK/PAUD, Pengadaan Peralatan Drumband dan Kostum,Pengadaan Komputer, Pembangunan Pagar Sekolah,Pembangunan Talud,Pembangunan pintu gerbang sekolah,Pengurukan/Penggusuran lokasi sekolah, Pembangunan asrama putra/I.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4		6	7	8	9	10
Kecamatan Nubatukan									
				Pembangunan Pagar sekolah SD Inpres Pada	SD Inpres Pada	Desa Pada	500 m		DisDik
				Pembangunan Pagar sekolah SMPN II Pada	SMPN II Pada	Desa pada			DisDik
				Pembangunan Pagar sekolah SLB	SLB	Desa Pada			DisDik
				Pembangunan Pagar sekolah SDN Waijarang	SDN Waijarang	Desa Waijarang			DisDik
				Pembangunan Pagar sekolah SDK Belang	SDK Belang	Desa Watokobu			DisDik
				Pembangunan Pagar sekolah MIS Nur Salam Lewoleba	MIS Nur Salam Lewoleba	Kel. Selandoro	250 m		DisDik
				Pembangunan Pagar sekolah MTsN 2 Nubatukan	MTsN 2 Nubatukan	Kel. Selandoro	500 m		DisDik
				Pembangunan Pagar sekolahSDI Namaweka	SDI Namaweka	Desa Nubamado	1 paket		DisDik
				Pembangunan Pagar sekolah SMPN II Paubokol	SMPN II Paubokol	Desa Paubokol	1 paket		DisDik
				Pembangunan Pagar sekolah SD Lewokukung	SD Lewokukung	Desa Baolangu	1 paket		DisDik
				Pembangunan Pagar sekolah SD Lite	SD Lite	Desa Lite Ulumado			DisDik
				Pembangunan Pagar sekolah SDN Bakalerek	SDN Bakalerek	Desa Bakalerek	1 paket		DisDik
				Pembangunan Pagar Sekolah	Guru/Anak sekolah	Desa Udak Melomata	1 paket		DisDik
				Pembangunan Pagar Sekolah	SMPN 4 Nubatukan	Lewoleba Timur			DisDik
				Pembangunan Gedung TKK Negeri (Ex PAUD St.Lodovikus)	Ex. PAUD St. Lodovikus	Kel. Lewoleba Timur			DisDik
				Lanjutan pembangunan pagar sekolah	SDN Lamahora	Kel. Lewoleba Timur	1 paket		DisDik
				Pembangunan Talud Pengaman Sekolah	SDI Namaweka	Desa Nubamado	1 paket		DisDik
				Penambahan/rehab ruang kelas sekolah SD	Guru/Anak sekolah	Watokobu, Udak Melomata			DisDik
				Pembangunan Gapura SMP	Siswa/Siswi	Desa Paubokol			DisDik
				Pembangunan gedung Lab. Komputer dan Lab. Bahasa	SMPN 4 Nubatukan/L. Timur	Kel. Lewoleba Timur	2 paket		DisDik
				Pembangunan/Penambahan ruang kelas	SMPN 4 Nubatukan/L. Timur	Kel. Lewoleba Timur	3 ruangan		DisDik
				Pembangunan/Penambahan ruang kelas	SDK Belang	Desa Watokobu			DisDik
				Pembangunan 1 lokal ruang kelas	SDN Lite	Desa Lite Ulumado			DisDik
				Penambahan Pembangunan 1 lokal gedung PAUD	Masyarakat	Desa Paubokol			DisDik
				Perekrutan Penjaga Sekolah SD dan SMP	Siswa/Siswi	Desa Paubokol			DisDik
				Pembangunan sarana prasarana olahraga bagi anak SD	Guru/Anak sekolah	Desa Udak Melomata			DisDik

				Pembangunan ruang kerja guru	SDI Waikomo I dan SDI Waikomo II	Lewoleba Barat			DisDik
				Pembangunan Mess Guru	Guru-guru SD	11 Desa, 7 Kelurahan			DisDik
				Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	Guru-guru SD/PAUD	Desa Udak Meiomata			DisDik
				Pengadaan alat dan sarana edukasi	PAUD St. Elisabeth	Lewoleba Utara			DisDik
				Pengadaan tanah dan pembangunan gedung sekolah	SD Waikilok	Lewoleba Utara			DisDik
				Bantuan Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)	Masyarakat	Desa Pada, Watokobu			DisDik
				Fasilitasi pembelajaran paket A, B dan C	Masyarakat	Desa Watokobu			DisDik
				Pembangunan asrama siswa SMPN 6 Nubatukan	Masyarakat	Desa Watokobu			DisDik
Kecamatan Lebatukan									
				Pembangunan Mes Guru / Rumah Jabatan Kepala Sekolah	Masyarakat	17 Desa di Kecamatan Lebatukan	17 Paket	-	Dinas Pendidikan
				Pembangunan /Peningkatan/Rehabilitasi Gedung sekolah dasar dan Ruang Kelas baru	SD, SDN Atakowa	Atakowa, Balurebong, Waienga, Dikesare	2 Unit1 Unit 3 Unit, 1 Unit	-	Dinas Pendidikan
				Pembangunan Pagar dan Gapura Sekolah Dasar dan SMP	SD, SMP, SDI Merdeka, SMPN 7 Maret,SDI Tapobaran, SDI Tana Terekat	Dikesare, Merdeka, Balurebong, Tapobaran, Lamatuka	400 m, 200 m, 1 Paket, 1 unit,700 m, 1 Paket	-	Dinas Pendidikan
				Penambahan Tenaga Guru PNS	Satuan Pendidikan	SDI Tapobaran, Satap Ilewutung, Atakowa, SDN Seranggorang, Banitobo	20 Org	-	Dinas Pendidikan
				Pembangunan dan Rehabilitasi gedung paud dan TKK Negeri	Anak Didik, Tk Kolibuto Merdeka	Lewoeleng, Banitobo, Merdeka, Balurebong	3 Unit, 1 Lokal	-	Dinas Pendidikan
				Pengembangan Karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan	17 Desa se-Kecamatan Lebatukan	17 Paket	-	Dinas Pendidikan
				Perluasan sekolah paralel	Masyarakat Dusun IV Wade dan Dusun Dulupali	Balurebong, Lamalela	2 unit	-	Dinas Pendidikan
Kecamatan Nagawutung									
				Penambahan guru PNS di SDK Atawuwur dan TKK St. Nikolaus	Tersedianya guru PNS	Atawai	2 orang		Dinas Pendidikan
				Peningkatan status TK Yohana Gesien menjadi TK Negeri	Tersedianya TK Negeri	Riabao	1 paket		Dinas Pendidikan
				Pembangunan Ruang kelas SDK Atawuwur	Tersedianya ruang kelas	Atawai	1 paket		Dinas Pendidikan
				Rehabilitasi/renovasi gedung TKK	Tersedianya gedung TKK	Wuakerong	1 unit		Dinas Pendidikan
				Rehabilitasi ruang kelas gedung SDK Baobolak	Tersedianya Gedung SDK	Baobolak	5 ruang		Dinas Pendidikan

				Pembangunan rumah jabatan Kepala Sekolah	Tersedeianya Rujab Kepala Sekolah	Bolibean	1 unit		Dinas Pendidikan
				Pembangunan kantor kepala sekolah	Tersedeianya Rujab Kepala Sekolah	Riabao	1 unit		Dinas Pendidikan
				Pembangunan mess guru	Tersedianya mess Guru	Bolibean	1 unit		Dinas Pendidikan
				Pembangunan mess guru	Tersedianya mess Guru	Ileboli	1 unit		Dinas Pendidikan
				Pembangunan mess guru SDK Lewopenutung	Tersedianya mess Guru	Warawatung	1 unit		Dinas Pendidikan
				Pembangunan gedung SMPS Berdikari	Tersedianya Gedung SMPS	Babokerong	2 unit		Dinas Pendidikan
				Pemeliharaan Gedung SDN Penikenek	Tersedianya Gedung SD layak	Penikenek	1 paket		Dinas Pendidikan
				Pembangunan runag kelas SDI 2 Loang	Tersedianya Gedung SD layak	Riabao	1 lokal		Dinas Pendidikan
				Pembangunan gedung SDN Lolong (ruang TIK, ruang guru, kantor sekolah)	Tersedianya Gedung SD	Lolong	3 unit		Dinas Pendidikan
				Pembangunan Pagar Sekolah SDI 1 Loang dan TK Negeri 2	Tersedianya pagar sekolah	Wuakerong	800m		Dinas Pendidikan
				Pembangunan pagar sekolah SDK Atawuwur	Tersedianya pagar sekolah	Atawai	1 paket		Dinas Pendidikan
				Pembangunan pagar SDI Bata	Tersedianya pagar sekolah	Bolibean	1 paket		Dinas Pendidikan
				Pembangunan Pagar SDK Lewopenutung	Tersedianya pagar sekolah	Warawatung	280m		Dinas Pendidikan
				Pembangunan pagar sekolah SDK	Tersedianya pagar sekolah	Baobolak	1 paket		Dinas Pendidikan
				Pembangunan pagar SDI Lamalewar	Tersedianya pagar sekolah	Ileboli	1 paket		Dinas Pendidikan
				Pembangunan gedung perpustakaan SDI Lamalewar	Tersedianya Gedung Perpustakaan	Ileboli	1 unit		Dinas Pendidikan
				Pembangunan Aula SDI 2 Loang	Tersedianya Aula SD	Riabao	1 unit		Dinas Pendidikan
				Pembuatan Pagar sekolah dan Gapura, SDK,SDI dan SMP	Tersedianya Pagar dan Gapura Sekolah	Pasir Putih	1 paket		Dinas Pendidikan
				Rehabilitasi sekolah (SDK, SDI,SMP)	Tersedianya Sekolah yang layak	Pasir Putih	1 paket		Dinas Pendidikan
				Pengadaan Mebeler SMK Genova	Teredianya Mebeler SMK Genova	Pasir Putih	1 paket		Dinas Pendidikan
				Pengadaan Sarpras SDN Lolong (Kursi, meja, komputer/laptop)	Tersedianya Sarpras SDN Lolong	Lolong	1 Paket		Dinas Pendidikan
Kecamatan Atadei									
				Pembangunan Rumah Dinas Guru	SDI Dulir	Desa Dulir	3 Unit	300.000.000.00	DisDik

					SDI Ile Kimok	Desa Ile Kimok	1 Unit	100,000,000.00	DisDik
					SDI Napor	Desa Katakeja	1 Unit	100,000,000.00	DisDik
					SDI Paulolo	Desa Lebaata	1 Unit	100,000,000.00	DisDik
					SMPN I Atadei	Desa Katakeja	2 Unit	200,000,000.00	DisDik
					SMPN 3 Lewaji	Desa Doripewut	3 Unit	300.000.000..00	DisDik
				Pembangunan Gedung Sekolah	SDN Lewogroma	Desa Lewogroma	4 Lokal	500,000,000.00	DisDik
				Renovasi Gedung Sekolah	SMPN 3 Lewaji	Desa Lewaji	1 Unit	200,000,000.00	DisDik
					SDI Lewaji	Desa Lewaji	1 Unit	200,000,000.00	DisDik
					SDK Bakan	Desa Ile Kerbau	5 Lokal	200,000,000.00	DisDik
				Pembangunan Gedung Perpustakaan	SDI Dulir, SDK Lamanuna	Desa Dulir	1 Unit	150,000,000.00	DisDik
				Pembangunan Asrama Sekolah Putera/i	SMPN 2 Larek	Desa Larek	2 Unit	200,000,000.00	DisDik
					SMPN 3 Lewaji	Desa Doripewut	2 Unit	200,000,000.00	DisDik
				Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah	SDK Waiwejak	Desa Nubahaeraka	1 Paket	150,000,000.00	DisDik
					SDI Mudalerek	Desa Nogodoni	1 Paket	100,000,000.00	DisDik
					SDI Waimuda	Desa Nubaboli	1 Paket	50,000,000.00	DisDik
					SDI Waiwejak dan SDK Watuwawer	Desa Atakore	1 Paket	100,000,000.00	DisDik
					SMPN 4 Ile Kimok	Desa Ile Kimok	1 Paket	100,000,000.00	DisDik
				Pembangunan Ruang Tata Usaha SMP	SMP 3 Lewaji	Desa Doripewut	1 Paket	300,000,000.00	DisDik
				Penempatan Guru Negeri SD, SMP	Murid	15 Desa			DisDik
Kecamatan Omesuri									
				Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas SDN Roma SDK Meluwiting		Desa Meluwiting dan Roma	3 RKB	200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
				Pengadaan Meubeler SMP St Piter Lolon Dolor		Leuwayan	1 Paket	150,000,000.00	
				Penempatan Tenaga Pendidik Guru Kelas SDN Wowong		Desa Wowong	3 Orang		
				Pembangunan Lab. Komputer SMPN 06 Omesuri		Desa Peusawa	135 Meter	125,000,000.00	
				Penambahan Guru Pegawai Negeri Sipil (ASN) di SDN Leudanung		Desa Leudanung	3 Orang	300,000,000.00	

				Pembangunan Gedung Sekolah SDN Wowong		Desa Wowong	2 RKB	150,000,000.00	
				Penambahan Guru Pegawai Negeri Sipil (ASN) di SDN Dolulolong		Desa Dolulolong	1 Paket	300,000,000.00	
				Pembangunan Mes Guru SDN Dolulolong		Desa Dolulolong	1 Unit	150,000,000.00	
				Penempatan Tenaga Pendidik Guru Mata Pelajaran PJOK (Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan) dan Guru Agama Islam, Agama Katolik, Guru Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Guru Matematika, Guru IPA, Guru TIK, GuruPKN, Guru ips Pada SMP Negeri 3 Omesuri Hoelea II		Desa Hoelea II	6 Orang		
Kecamatan Buyasuri									
				Rehab Berat Ruang Kelas		SDI Panama/Desa Panama	1 Unit		**DINAS PENDIDIKAN**
						SDK Tuamado/Desa Panama	1 Unit		
						SMP Satap 92 Bean	1 Unit		
						SDI 92 Bean	1 Unit		
						Mis Bean	1 Unit		
						SDI Aihua Desa Kaohua	2 Lpkal		
						Gedung Mis AL-IHSAN Leuburi	1 Unit		
						Mis Siti Harfan Leuwutung	3 Unit		
						TK/PAUD Desa Benihading	1 Unit		
						SDK Aluroba/Desa Benihading	1 Unit		
						SMPS Sudi Mampir	1 Unit		
						SDK St. Mikhael Leudawan	3 unit		
						SDK Buriwutung	6 Lokal		
				Pembangunan Pagar Sekolah		SDI Leuburi	1 Paket		
						SDI Aihua Desa Kaohua	500 M		
						SMPN 02 Buyasuri	1 Paket		
						SDK Buriwutung	100 M		
						SDK Biarwala	500 M		
						SMPS Sudi Mampir	1 Paket		
						SDI Rumang	700 M		
						SDI Inpres Molelema	150 M		
						SDI Bareng	1 Paket		
						SDI Leuwohung	1 Unit		

						MIS Leuwohung	1 Unit		
						Satap dan SD Tobotani	1 Paket		
						MIS Tamal Haur	1 Unit		
				Agreditasi TK-PAUD Bunga Mawar		Desa Tubungwalang	1 Unit		
				Pembebasan Lahan Tanah		SMPN 02 Buyasuri	1 Paket		
				Pembangunan Taman Baca		Desa Umaleu	1 Unit		
				Penambahan Tenaga Guru		SDK Buriwutung	3 Orang		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah		SMPS Sudi Mampir	1 Paket		
				Mes Guru		SDI Bareng	3 unit		
						SDI Leuwohung	2 Unit		
						SDI Rumang	6 Unit		
				Rehabilitasi MCK Guru dan Siswa		SMPN I Buyasuri	1 Paket		
				Rehabilitasi Perpustakaan dan LAP		SMPN I Buyasuri	1 Paket		
				Rehabilitasi Saluran Air		SMPN II Buyasuri	1 Paket		
				Pembangunan Pagar Sekolah		Satap dan SD Tobotani	1 Paket		
Kecamatan Ile Ape									
			Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan ruang Guru	TKN 1	Waipukang	1 Paket	Rp 150,000,000	DisDik
				Pembangunan Gedung	TKN 3	Dulitukan	1 Paket	Rp 150,000,000	DisDik
			Pendidikan Dasar 9 Tahun	Renovasi Ruang Kelas	SDI Holoriang 6 ruang	Beutaran	6 Ruang	Rp1,200,000,000	DisDik
				Pengadaan Meubeler	SD Holoriang	Beutaran	6 Paket	Rp 180,000,000	
				Pembangunan ruang Kelas	SMPN 1 Ile Ape	Kolontobo	1 Paket	Rp 200,000,000	
				Pembangunan ruang Kelas	SMPN 2 Ile Ape	Beutaran	1 Paket	Rp 200,000,000	
				Pengadaan alat Elektronika dan Informatika	Pengawas	Beutaran	20 Unit	Rp 300,000,000	
				Rekrutmen Calon Pengawas Paud	Pengawas	Ile Ape	1 org	Rp 2,500,000	
				Rekrutmen Calon Pengawas SD	Pengawas	Ile Ape	1 org	Rp 2,500,000	
				Rekrutmen Calon Pengawas SMP	Pengawas	Ile Ape	1 org	Rp 2,500,000	
				Peningkatan Kapasitas Guru TKK	Guru TKK	14 TK/PAUD	28 orang	Rp 42,000,000	
				Peningkatan Kapasitas Guru SD	Guru SD	15 SD/MI	90 orang	Rp 135,000,000	
				Peningkatan Kapasitas Guru SMP	Guru Matapelajaran	5 SMP	55 orang	Rp 82,500,000	
Kecamatan Wulandoni									
				Pembebasan Lokasi SDN Wulandoni	Masyarakat	Wulandoni			Dinas Pendidikan

				Pembangunan TPT di SMP Satap	Sekolah	Tapobali	100 Meter		Dinas Pendidikan
Kecamatan Ile Ape Timur									
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar sekolah	SDK Ebak	Aulesa	1 Paket		Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		SDI Waiwaru	Todanara	1 Paket		
					SDK Atawatun	Lamagute	1 Paket		
					SDI Hamahena	Waimatan	1 paket		
					SDK Tokojaeng	Lamatokan	1 Paket		
					SDN Lamau	Lamaau	1 Paket		Dinas Pendidikan
				Pembangunan Mes Guru	SDK Ebak	Aulesa	1 Unit		
					SDI Waiwaru	Todanara	1 Unit		
					SDK Atawatun	Lamagute	1 Unit		
					SDI Hamahena	Waimatan	1 Unit		
					SDK Tokojaeng	Lamatokan	1 Unit		
					SDN Lamau	Lamaau	1 Unit		
					SDK Baopukang	Jontona	7 Unit		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	SDK Ebak	Aulesa	4 Ruang		Dinas Pendidikan
				PenambahanGuru PNS	SDK Ebak	Aulesa	5 guru PNS		Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Leptop Pendukung lep komputer	SMPN III KIAT	Waimatam	20 unit		Dinas Pendidikan
			Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Sarana, Prasarana Pendidikan TKK	TKN I Ile Ape Timur	Lamawolo	5 unit		Dinas Pendidikan
				Pengadaan Alat Peraga Edukatif (Ape Luar & Dalam)	TKN II	Jontona	1 Paket		Dinas Pendidikan
				Pembangunan Pagar Sekolah	TKN II	Jontona			Dinas Pendidikan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 terjabarkan kerangka besar visi, misi dan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah:

VISI	MISI
Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribaian Melaui Terciptanya Pelajar Pancasila yang Bernalar Kritis, Kreatif, Mandiri, Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia, Bergotong Royong dan Berkebinekaan Global.	1 . Mewujudkan Pendidikan yang Relevan dan Berkualitas Tinggi, Merata dan Berkelanjutan, didukung oleh Infrastruktur dan Teknologi
	2 .Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Serta Pengembangan Bahasa dan Sastra
	3 Mengoptimalkan Peran Serta Seluruh Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Transformasi dan Reformasi Pengelolaan Penidikan dan Kebudayaan.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) *Peningkatan kualitas manusia Indonesia*; nomor (5) *Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa*; dan nomor (8) *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.*,

3.2 Telaahan Telaahan Terhadap Kebijakan Propinsi.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh maka Walikota dan Wakil Walikota Kupang periode 2013-2017 mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA."

b. Misi :

Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua *stakeholders* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitukeberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *Tourism Estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas,terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berikut tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Dinas Pendidikan sebagai berikut :

- Tujuan pendidikan jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata adalah :

- Meningkatkan akses dan mutu pendidikan PAUD Dikmas, Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Meningkatkan profesionalisme, pemerataan dan kesejahteraan pendidik dantenaga kependidikan.
- Meningkatkan mutu pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.

- Sasaran kunci yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah :

1) Meningkatnya APK PAUD menjadi 94,75%
2) Kualifikasi untuk pendidik PAUD Formal (TK) diharapkan 35% S1/DIV, 20% bersertifikat, sedangkan PAUD Non Formal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangya 30%.
3) Tuntasnya Wajar Dikdas 9 tahun dengan :
   APK SD mencapai 118,79%dan SMP mencapai 128,59%,

   APM SD mencapai 116,01%, dan SMP mencapai 108,81%;

4) APK SMA/SMK mencapai 130,25%
5) Berkurangnya angka buta aksara fungsional dari 219 orang menjadi 0 orang
6) Meningkatnya mutu dan daya saing:
   Rata-rata nilai SD/MI 8,00

   Rata-rata nilai SMP/MTs 7,00

   Rata-rata nilai SMA/SMK 7,00

7) Meningkatnya manajemen dan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, pada tahun 2026 :

a. Meningkatnya sistim informasi pendataan yang cepat dan tepat dan akurat (≥ 80% Sekolah memiliki tenaga dan peralatan pendataan pendidikan).
b. Prosentasi temuan-temuan BPKP dan Inspektorat ≤ 6 %
c. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah ≤ 50%

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

1) Standar Pelayanan Minimal (SPM)Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaiantarget sasaran terukur dari *output* kegiatan dan *outcome* program,dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten Lembata terdiri atas:
      a) Pendidikan anak usia dini;
      b) Pendidikan dasar; dan
      c) Pendidikan kesetaraan.
   b. Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkandalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat
      a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
      b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenagakependidikan; dan
      c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
   c. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu WargaNegara dengan ketentuan

a) Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikanmenengah;
b) Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahununtuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
c) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis
pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
d) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk
jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
e) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahununtuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

d. Penerapan dalam kebijakan pembangunan daerah dalam SPM Bidang Pendidikan
   a) Arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penerapan SPM Urusan Pendidikan Daerah Provinsi mencakup;
      1. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah; dan
      2. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus.
   b) Arah kebijakan Pembangunan Daerah mengenai penerapan SPM urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota mencakup:
      1. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untukjenis pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini;
      2. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahununtuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
      3. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahununtuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Selain itu, perumusan kebijakan bidang pendidikan yang perludiperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 antaralain:

a. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan penidikan sebesar 20 persen (diluar belanja Pegawai dan DAK).
b. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam SPM Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

3.4. Program dan Kegiatan

Uraiakan Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program danKegiatan;

Program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan merumuskan 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 85(delapan puluh lima) sub kegiatan yang terdiri dari 1 program 8 kegiatan dan 34 sub kegiatan pada Non Urusan, 2 program 5 kegiatan dan 51 sub kegiatan pada Urusan Wajib Pendidikan dan uraian rencana program/kegiatan pendanaan indikatif Tahun 2024 dengan pagu sebesar : **Rp.177.451.667.582,00**.

Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEMBATA

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEMBATA

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Capaian Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DINAS PENDIDIKAN				177,451,667,582			180,910,020,582	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				177,451,667,582			180,910,020,582	Dinas Pendidikan
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				177,451,667,582			180,910,020,582	Dinas Pendidikan
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		20%	119,945,252,300		20%	122,211,186,100	Dinas Pendidikan
1	01	01	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Tersedianya dokumen perencanaan,		Dokumen	65,000,000		Dokumen	65,000,000	Dinas Pendidika

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**							**n**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	10,000,000		Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5,000,000		Dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	20,000,000		Dokumen	20,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000		Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000		Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	10,000,000		Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan

1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah**		**100%**	**116,805,950,500**		**100%**	**119,071,884,300**	**Dinas Pendidikan**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orang/bulan	116,398,105,700		Orang/bulan	118,664,039,500	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	393,844,800		Dokumen	393,844,800	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	7,000,000		Laporan	7,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	7,000,000		Laporan	7,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset**		**Dokumen**	**142,428,300**		**Dokumen**	**142,428,300**	**Dinas Pendidikan**
1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	7,000,000		2 Dokumen	7,000,000	Dinas Pendidikan

1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	135,428,300		2 Laporan	135,428,300	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya manajemen PNS**		**100%**	**10,000,000**		**100%**	**10,000,000**	**Dinas Pendidikan**
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatam, Semua Kelurahan	Orang	-		Orang	-	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah**		**100%**	**115,577,000**		**100%**	**115,577,000**	**Dinas Pendidikan**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	2,500,000		1 Paket	2,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	1 Paket	20,000,000		1Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	1 Paket	10,000,000		1 Paket	10,000,000	Dinas Pendidikan

1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	-		Dokumen	-	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatam, Semua Kelurahan	1 Laporan	83,077,000		1 Laporan	83,077,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**40,000,000**		**100%**	**40,000,000**	**Dinas Pendidikan**
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	Unit	-		Unit	-	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	5 Unit	10,000,000		Unit	10,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	Unit	30,000,000		Unit	30,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	Unit	-		Unit	-	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	5 Unit			5 Unit		Dinas Pendidikan

1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**2,718,151,500**		**100%**	**2,718,151,500**	**Dinas Pendidikan**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,685,232,000		1 Laporan	2,685,232,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	1 Laporan	30,919,500		1 Laporan	30,919,500	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	1 Laporan	2,000,000		1 Laporan	2,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100%**	**48,145,000**		**100%**	**48,145,000**	**Dinas Pendidikan**
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit			Unit		Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	33,145,000		Unit	33,145,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan,	1 Unit	-		1 Unit	-	Dinas Pendidikan

							Lewoleba						
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	1 Unit	5,000,000		1 Unit	5,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	1 Unit	5,000,000		1 Unit	5,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	1 Unit	5,000,000		1 Unit	5,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Lembata, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba	1 Unit	-		1 Unit	-	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah**			**54,710,254,560**			**55,891,597,260**	**Dinas Pendidikan**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**30,734,954,700**			**30,834,954,700**	**Dinas Pendidikan**
1	01	02	2.01	01	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	SDK Kalikasa (3 Ruang),SDN Wailolong (3 Ruang), SDI Tewaowutung (3 ruang),,SDI Tapobarab (2 ruang).	11 Ruang	1,803,072,000		11 Ruang	1,803,072,000	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.01	02	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	SDK Lamatuka (2 ruang), SDN Wailolong (2 ruang), SDN Lamahora (1 riang), SDI Tewaowutung (1 ruang), SDI Tapobaran (2 Ruang),SDI Leudanung (1 ruang)	9 Ruang	1,076,920,000.00		9 Ruang	1,076,920,000.00	Dinas Pendidikan
				03	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	SDK Kalikasa (1 ruang),SDK Kolilerek (1 Ruang),SDK Tokojaeng (1 Ruang), SDI Dulir (1 ruang), SDI Leudanung (1 ruang), SDI Ohe (1 Ruang),SDI Tanatereket (1 Ruang),SDN wangatoa (1 ruang),SDN wailolong (1 ruang), SDI Tapobaran (1 Ruang)	10 Ruang	1,076,920,000.00		10 Ruang	1,076,920,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	04	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	SDI Bakalerek (1 Ruang),SDI Waiwejak (1 ruang)	2 Ruang	450,768,000.00		2 Ruang	450,768,000.00	Dinas Pendidikan

					Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah di rehab.	SDI waiwejak (1 ruang)	1 Ruang	205,615,000		1 Ruang	205,615,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	SDI Leudanung (1 ruang), SDI Ohe (1 ruang), SDI Tewaowutung (1 unit)	1 Ruang	205,615,000		1 Ruang	205,615,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	SDI Posiwatu, SDI.Lite (1 raung), SDI Riang Dua(2 ruang), , SD Loyobohor (1unit), SDI Aihua (1 unit), SD Tewaowutung (1 unit), SDK Atawuwur, SDI 2 Loang, SDI Lewoleba 1 (1 paket), SDK Waipukang (3 paket)	1 Unit	260,816,000		1 Unit	260,816,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	SDI 2 Waikomo (1 Unit), SDI Bakalerek (1 unit), SDI Dulir (1 unit), SDI Ohe (1 Unit), SDI Tanatereket (1 unit), SDI Lamalera (1 unit), SDI Tapobaran (1 Unit)	1 Unit	355,418,000.00		1 Unit	355,418,000.00	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	SDI Ohe(6)ruang, SDN Bakalerek (2 lokal), SDK Leuwayan (3 ruang), SDN Namaweka, (1 ruang),SDN Normal (2 ruang), SDI Hule (2 ruang), SDK Nubalamatuka(2 ruang),SDK Karangora (2 ruang),SDI 2 Lweoleba (2 ruang), SDI 2 Waikomo (2 unit), SD Dulir (2 Unit), SDI Tanatereket (2 Unit),SDI Waiwejak (2 unit),SDK Kolilerek(2 unit), SDK Tokojaeng (2 Unit).	1 Ruang	1,344,054,500		1 Ruang	1,344,054,500	Dinas Pendidikan
				09	Rehabilitasi Tolet/Jamban	Jumlah Toilet/Jamban yang telah direhabilitasi	SDN Udak (1 unit), SDI 2 Waikomo (1 unit), SDI Bakalerek (1 Unit), SDI Waiwejak (1 unit), SDI ohe (1 unit).	1 Paket	500,000,000		1 Paket	500,000,000	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.01	10	Pembangunan Tolet/Jamban	Jumlah Toilet/Jamban yang telah dibangun	SDI Lewoleba (1 unit), SDN Wangato (1 unit),SDK koilerek (1 Unit), SDK Tokojaeng (1 unit), SDI 2 Lewoleba (2 Unit), SDI 2 waikomo (1 unit), SDI Leudanung (1 unit).	1 Paket	500,000,000		1 Paket	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Semua Kecamatan di Kabupaten Lembata (9 kecamatan)	1 Paket	3,232,000,000		1 Paket	3,232,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Semua Kecamatan di Kabupaten Lembata (9 kecamatan)	2.647 Peserta Didik	56,547,400		2.647 Peserta Didik	56,547,400	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatam, Semua Kelurahan	20 Orang	100,000,000		20 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Semua Kecamatan di Kabupaten Lembata (9 kecamatan)	160 Satuan Pendidikan	41,164,500		160 Satuan Pendidikan	41,164,500	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Semua Kecamatan di Kabupaten Lembata (9 kecamatan)	160 Satuan Pendidikan	14,673,302,800		160 Satuan Pendidikan	14,673,302,800	Dinas Pendidikan
				31	Rehab Ruang Guru	Jumlah Ruang Guru yang direhab	SDI Dulir (12 ruang), SDI ohe (2 ruang)	1 Ruang	500,000,000		1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	SDN Kartini Labala (1 unit),SDI Tapobaran (1 unit).	1 Ruang	500,000,000		1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan
					USULAN SPESIFIK GREN SEKOLAH DASAR								**Dinas Pendidikan**
				01	Penambahan/Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	SDN Wangatoa (2 ruang), SDI wowong (2 ruang),SDI Lite (2 ruang)	11 Ruang	1,803,072,000		11 Ruang	1,803,072,000	Dinas Pendidikan
				02	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	SDK Buriwutung,SDK puor,SDK watuwawer,SDK Meluwiting,SDI Tobotani,SDI Lewaji,SDN Lewokukung,SDI Lodotodokowa	1 Ruang	1,344,054,500		1 Ruang	1,344,054,500	Dinas Pendidikan

				03	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah di rehab.	SDK Melowiting	1 Ruang	205,615,000		1 Ruang	205,615,000	Dinas Pendidikan
				04	Rehab Rumah Dinas Guru	Jumlah Ruang Guru yang direhab	SDK waipukang	1 Ruang	500,000,000		1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**22,224,900,660**			**22,299,900,660**	**Dinas Pendidikan**
	1	01	02		Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)	Junlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	SMPN 2 Nubatukan (1 unit-pokir),SMPN 2 Paubokol, SMPK Ampera Waipukang	1 Unit	1,000,000,000.00		1 Unit	1,000,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	SMPN 3 Nubatukan Satap Paobokol,SMPN 3 Wulandoni Satap Labala	1 Ruang	1,101,038,000.00		1 Ruang	1,101,038,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	SMPS St.Donbosko Aliroba, SMPN 2 Nubatukan, SMPN 3 Nubatukan, SMN 3 Wulandoni	1 Ruang	512,592,000		1 Ruang	512,592,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	SMPK Ampera waipukang	Ruang	300,000,000		1 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium Komputer dan IPA	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	SMPK St.Don Bosco Aliroba,SMPN 2 Nubatukan, SMPN 3 Wulandoni Satap Labala.	1 Ruang	512,592,000.00		1 Ruang	512,592,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	SMPK Don Bosco Alioroba, SMPK St.Pius lewoleba, SMP Sint Petrus Lolondolor, SMPN 1 Nagawutung,SMPN 2 Nubatukan, SMPN3 Wulandoni satap Labala	1 Unit	725,139,000.00		1 Unit	725,139,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	SMPK St.Petrus Lewoleba, SMPK St.Don Bosco Lewoleba,SMPK Ampera Waipukang, SMPN 1 Buyasuri	1 Unit	565,578,000		1 Unit	565,578,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMP Sint.Piter Lolondolor,SMPN 1 Buyasuri, SMPN 1 Ile Ape Timur,SMPN 3 Ile Ape, SMPN 1 Omesuri, SMP Apiis Lamalera	1 Ruang	2,307,336,000		1Ruang	2,307,336,000	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMPN 1 Ile Ape(1 ruang), SMPN SATAP Holoriang (4) ruang	5 Ruang	1,602,255,000.00		1 Ruang	1,602,255,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMPN 1 Buyasuri, SMPN 3 Ile Ape	1 Ruang	640,902,000		1 Ruang	640,902,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMPN 1 Wulandoni, SMPN Pasir Putih	1 Unit	435,084,000		1 Unit	435,084,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMPS Apis Lamalera, SMPN 2 Buyasuri, SMPN SATAP Tobotani, SMPS Lolondolor	1 Unit	1,245,336,000.00		1 Unit	1,245,336,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	SMP Donbosco Aliuroba, SMP APIS Lamalera,SMPK Ampera waipukang	1 Paket	200,000,000		1 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Pengadaan Komputer SMP St.Pius X(5 unit), SMP SATAP Ile Wutung	1 Paket	875,000,000.00		1 Paket	875,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	52 Satuan Pendidikan	2000 Peserta Didik	42,651,780		2000 Peserta Didik	42,651,780	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Lomba MIPA,FL2SN,O2SN	45 Orang	100,000,000		45 Orang	175,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Semua satuan Pendidikan (52 sekolah)	57 Satuan Pendidikan	66,939,580		57 Satuan Pendidikan	66,939,580	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Semua satuan Pendidikan (52 sekolah)	57 Satuan Pendidikan	9,992,457,300.00		57Satuan Pendidikan	9,992,457,300	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**1,466,447,300**			**2,472,790,000**	**Dinas Pendidikan**
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Waienga, Baopana, Seranggorang, Banitobo	1 Unit	856,836,000		1 Unit	856,836,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TKN 3 Holoriang, TK Ade Irma Riangbao, TK Tewaowutung	1 Unit	182,032,000.00		1 Unit	182,032,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	TKN 3 Holoriang,Tk Ade Irma Riangbao,TK Nubanuli	1 Paket	200,000,000		1 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Waienga, Baopana, Seranggorang, Banitobo	1 Paket	75,000,000		1 Paket	1,081,343,600	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Bolibean, Idalolong	Bidang GTK	68,755,900		72 Orang	68,755,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Satuan Pendidikan	33,823,400		Satuan Pendidikan	33,823,400	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orang	50,000,000		Orang	50,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**283,951,900**			**283,951,900**	**Dinas Pendidikan**
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peserta Didik	207,200,000		Peserta Didik	207,200,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peserta Didik	32,462,000		Peserta Didik	32,462,000	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orang	44,289,900		Orang	44,289,900	Dinas Pendidikan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				**2,796,160,722**			**2,807,237,222**	**Dinas Pendidikan**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**				**2,796,160,722**			**2,807,237,222**	**Dinas Pendidikan**
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	59,206,000		Dokumen	70,282,500	Dinas Pendidikan
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan	2,736,954,722		Laporan	2,736,954,722	Dinas Pendidikan

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pendidikan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan prioritas daerah dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah dan RPD Kabupaten Lembata 2023-2026. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah sebanyak 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 94 (sembilan puluh empat) sub kegiatan. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar **Rp.199.114.647.329,-**Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2024 sebagaimana tebel berikut ini.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah :Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Capaian Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2024			Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Unit Penanggung Jawab
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENDIDIKAN				199,114,647,329		230,111,314,596	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				199,114,647,329		230,111,314,596	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				199,114,647,329		230,111,314,596	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		20%	140,750,733,642	20%	141,683,601,543	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Dokumen	134,006,889	Dokumen	94,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	22,341,254	Dokumen	26,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	21,799,062	Dokumen	26,000,000.00	Dinas Pendidikan

1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	22,347,862	Dokumen	12,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	22,157,112	Dokumen	10,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	22,136,462	Dokumen	10,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	23,225,137	Laporan	10,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**100%**	**140,100,661,348**	**100%**	**141,140,484,307**	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 bulan	140,032,901,737	14 bulan	140,664,039,507.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	21,811,137	1 Dokumen	300,844,800.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	23,249,862	Laporan	165,600,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	22,688,612	Laporan	10,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Dokumen**	**48,284,254**	**Dokumen**	62,428,260.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	18,893,787	2 Dokumen	7,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.03	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	29,390,467	2 Laporan	55,428,260.00	Dinas Pendidikan

1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya manajemen PNS**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**100%**	**36,531,624**	**100%**	**20,084,250.00**	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	19,307,937	1 Dokumen	2,084,250.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	17,223,687	50 Orang	18,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**100%**	**75,614,337**	**100%**	**33,884,726**	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	19,375,149	1 Paket	2,151,462.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	28,956,951	1Paket	11,733,264.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	27,282,237	1 Paket	20,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	-	Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**100%**	**105,686,708**	**100%**	**136,000,000**	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	-	Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	-	Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	36,791,960	Unit	100,000,000.00	Dinas Pendidikan

1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	34,447,374	Unit	18,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	34,447,374	5 Unit	18,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**100%**	**98,268,659**	**100%**	**49,500,000**	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	28,248,687	1 Laporan	10,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	51,003,087	1 Laporan	35,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	19,016,885	1 Laporan	4,500,000.00	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksanaya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**100%**	**151,679,823**	**100%**	**147,220,000**	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Unit	76,510,075.00	33 Unit	65,300,500.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	-	Unit	-	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	-	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	17,223,687	1 Unit	18,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	17,223,687	1 Unit	18,000,000.00	Dinas Pendidikan

1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	20,448,687.00	1 Unit	30,919,500.00	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	20,273,687	1 Unit	15,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah**	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		**58,039,610,086**		**88,427,713,053**	**Dinas Pendidikan**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		**33,204,984,029**		**63,020,640,758**	**Dinas Pendidikan**
1	01	02	2.01	01	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Ruang	1,312,225,687.00	11 Ruang	1,350,260,050	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	02	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Ruang	405,264,337.00	9 Ruang	1,099,004,750.00	Dinas Pendidikan
				03	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Ruang	517,965,347.00	10 Ruang	385,730,400.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	04	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Ruang	82,750,247.00	2 Ruang	100,000,000.00	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah di rehab.	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	123,901,967.00	1 Ruang	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	577,479,077.00	1 Ruang	321,737,100	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	859,499,687.00	1 Unit	790,163,400	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	878,465,087.00	1 Unit	467,902,168.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	2,014,651,223.00	17 Ruang	2,826,548,400	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.01	10	Pembangunan Toilet/Jamban	Jumlah Toilet/Jamban yang telah dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	433,361,687.00	1 Paket	426,138,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	4,935,123,687.00	1 Paket	922,022,650	Dinas Pendidikan
				14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang Tersedia	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	2,028,600,247.00	1 Paket	922,022,650	Dinas Pendidikan
				22	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		717,217,647.00		25,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelengarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.647 Peserta Didik		2.647 Peserta Didik	-	Dinas Pendidikan
				26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 Satuan Pendidikan	493,031,273	160 Satuan Pendidikan	25,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 Satuan Pendidikan		160 Satuan Pendidikan	-	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 Satuan Pendidikan	14,165,858,425.00	160 Satuan Pendidikan	9,746,502,390	Dinas Pendidikan
				31	Rehab Ruang Guru	Jumlah Ruang Guru yang direhab	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	286,061,047.00	1 Ruang	40,711,862,800	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	2,342,695,047.00	1 Ruang	2,450,000,000	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		251,790,047.00		220,746,000	
				38	Koorinasi, Perencanaan supervisi dan evaluasi pelayanan dibiang Pendidikan		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		799,044,263.00		80,000,000	
					USULAN SPESIFIK GREN SEKOLAH DASAR		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

				01	Penambahan/Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Ruang		11 Ruang	-	Dinas Pendidikan
				02	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang		1 Ruang	-	Dinas Pendidikan
				03	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah di rehab	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang		1 Ruang	-	Dinas Pendidikan
				04	Rehab Rumah Dinas Guru	Jumlah Ruang Guru yang direhab	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang		1 Ruang	-	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		**20,390,913,172**		**17,200,720,015**	**Dinas Pendidikan**
	1	01	02		Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)	Junlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	-	1 Unit	-	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	56,935,787.00	1 Ruang	1,101,038,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	1,357,512,687.00	1 Ruang	433,155,500.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ruang	0	1 Ruang	-	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium Komputer dan IPA	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	2,700,893,587.00	1 Ruang	332,929,126.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1,419,423,687.00	1 Unit	765,287,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	160,774,687.00	1 Unit	1,070,578,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	2,014,651,223.00	1Ruang	2,826,548,400	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ruang	878,465,087.00	1 Ruang	467,902,168.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	123,901,967.00	1 Ruang	150,000,000	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	186,727,687.00	1 Unit	200,768,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	17,223,687.00	1 Unit	20,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	470,446,167.00	1 Paket	679,372,400.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	673,283,987.00	1 Paket	1,983,331,940.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2000 Peserta Didik		2000 Peserta Didik	-	Dinas Pendidikan
				39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		154,409,418.00		200,000,000	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	1,202,096,941.00	45 Orang	512,592,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 Satuan Pendidikan		57 Satuan Pendidikan	-	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 Satuan Pendidikan	8,974,166,573.00	57Satuan Pendidikan	6,457,237,481.00	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		**3,928,381,675**		**6,698,561,180**	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit		1 Unit	-	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit		1 Unit	-	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		1 Paket	-	Dinas Pendidikan

1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	331,908,562.00	1 Paket	875,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bidang GTK	559,674,737.00	72 Orang	175,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Satuan Pendidikan	48,660,937.00	Satuan Pendidikan	66,939,580.00	Dinas Pendidikan
		02	2.03	0039	Pemeliharaan Mebel Sekolah		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115,258,897.00		200,000,000.00	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,474,005,437.00		1,602,255,000.00	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		154,409,418.00		2,479,366,600.00	
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orang	1,244,463,687.00	Orang	1,300,000,000.00	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		**515,331,210**		**1,507,791,100**	**Dinas Pendidikan**
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peserta Didik	83,002,978.00	Peserta Didik	35,900,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peserta Didik		Peserta Didik	-	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Satuan Pendidikan	344,907,127.00	Satuan Pendidikan	390,547,500.00	
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orang	87,421,107.00	Orang	1,081,343,600.00	Dinas Pendidikan

1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		**324,303,601**			**Dinas Pendidikan**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**		Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		**324,303,601**		**2,690,400,000**	**Dinas Pendidikan**
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	107,002,791.00	2 Dokumen	90,400,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kab.Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	217,300,810.00	2 Laporan	2,600,000,000.00	Dinas Pendidikan

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan.

Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah.

Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai hasil pendidikan akan dimanfaatkan atau berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat. Perencanaan pembangunan dibidang pendidikan disusun berdasarkan ketersediaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan selain sebagai sarana atau pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Pendidikan Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Lewoleba, 2023
Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Lembata

Wenseslaus Ose,S.Sos,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19680819199903100 5

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 1

C. Maksud dan Tujuan 3

D. Sistimatika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2023 5

A. Analisis Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan 6

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 14

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 16

D. Review Terhadap RKPD 17

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 19

A. Telaah Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 19

B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan 21

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

BAB V PENUTUP 29

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata lima tahunan yakni tahun 2023–2026, yang disusun sesuai tugas & fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata serta berpedoman kepada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional upaya kesehatan dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan kesehatan.

Dalam upaya merealisasikan tujuan ini perlu dijabarkan dalam pelaksanaan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kerja dan rencana kinerja, serta kebijakan pembanguan kesehatan selama satu tahun.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Lembata mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang kesehatan.

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah dokumen yang berisikan program dan kegiatan yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan dan akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata pada tahun 2024 yang menjadi dasar bagi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan dalam upaya mencapai tujuan SDGs yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk semua usia.

Sebagai komitmen dalam mewujudkan tujuan tersebut diatas maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran - sasaran pembangunan

bidang kesehatan di Kabupaten Lembata khususnya dan Nasional pada umumnya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21);

10. Keputusan Bupati Lembata Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan kerja Perangkat selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Untuk Melaksanakan Sebagian Kewengangan Pejabat Pengguna Anggaran Untuk Melaksanakan Sebagian Kewengan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan tahun 2024 sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lembata.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Memudahkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024.
2. Mengendalikan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja Dinas Kesehatan;

3. Sebagai dasar pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah;
4. Sebagai dasar penyusunan instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Mempermudah proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan dan pencapaian tujuan atas urusan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, kesehatan keluarga dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata disusun dengan sistematika penuslisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU, memuat Evaluasi Renja Tahun 2022, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan , Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan , Review Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan..

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian tentang Telaah Arah Dan kebijakan, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

BAB IV. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian tentang Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024, target Kinerja dan Pendanaannya..

BAB V. PENUTUP, memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah Pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2022 dan Capaian sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dan rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen jangka menengah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan dinas kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan,

mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapai.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 telah direncanakan 5 program dan 18 kegiatan serta 66 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.84.243.657.939 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp.76.511.901.643.- atau sebesar 90,82%, dimana masuk dalam "kategori baik".

Sementara Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 telah direncanakan 05 program dan 18 kegiatan serta 66 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.89.913.247.555.- dengan realisasi sampai dengan triwulan ke 3 tahun 2023 sebesar Rp. 34.473.250.358.- atau sebesar 38,34%, dimana masih dalam "kategori kurang".

Berdasarkan perencanaan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 pencapaian target kinerja secara umum sudah baik, dimana jika diukur menggunakan rating penilaian skala capaian kinerja; begitu pula jika diukur dengan realisaasi keuangan maka dinas kesehatan masuk dalam "*kategori Baik*". Selanjutnya untuk tahun 2023 pencapaian target kinerja sampai dengan triwulan 3 secara umum masih dalam kategori kurang.

Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan ini antara lain aspek pelayanan umum belum menunjukan pencapaian yang memuaskan.

A. Analisis Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan

Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata meliputi indicator terhadap realisasi program dan

kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan dan terhadap realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2022 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar indikator belum dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator belum ada laporan hasil sesuasi target yang ditetapkan.

Pada tahun 2021 dilakukan perubahan Program dan Kegiatan dengan mengacuh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga melakukan komparasi capaian terhadap tahun sebelumnya tidak sinkron karena ada beberapa program yang tidak sesuai, begitupun kegiatan bahkan sub kegiatan; terutama tahun 2020 sampai tahun sebelumnya, karena pemberlakuan program sesuai Permendagri dimaksud terhitung sejak tahun anggaran 2021.

Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2022 sesuai indikator Kinerja Pelayaanan Dinas Kesehatan tahun 2017 – 2022 adalah 8.229,02% dimana berdasarkan skala pengukuran kinerja termasuk dalam kategori **"sangat *baik*"**, sementara untuk capaian kinerja keuangan sebesar 90,82%; dengan kategori "*baik*".

Rincian capaian tahun 2022 sesuai indikator Kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Indikator yang belum tercapai.

   Ada beberapa indikator yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan antara lain

   a. Cakupan anak dengan imunisasi dasar lengkap :94% (94%);
   b. Presentase balita Gizi Buruk : 1,80% (60,56%);
   c. Angka Kematian Bayi : 10,18/1.000 kh. (98,23%);
   d. Usia Harapan Hidup : 67 tahun (97,81%);
   e. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TBC : 54,87% (54,87%);
   f. Tingkat kematian karena Tubercolosis : 2,56/100.000. penduduk (33,08%);
   g. Prevalensi HIV AIDS dari total populasi : 0,021% (11%);

2. Indikator yang sudah tercapai.

a. Angka Kematian Ibu : 0/100.000 kh (7000%);
b. Angka kematian Neonatal : 4,5/1.000 kh (111,11%);
c. Presentase Balita Gizi Kurang : 13% (106,15%);
d. Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan : 99,60%(104,84%);
e. Tingkat prevalensi TBC per 100.000 penduduk : 73,45 (102,11%);
f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD : 100% (105,26%);
g. Cakupan penderita diare ditangani : 100% (100%);
h. Angka kejadian malaria per 100.000. penduduk : 0,5 / 100.000. penduduk (150%).
i. Tingkat kematian akibat Malaria : 0

3. Faktor Penyebab tidak tercapainya target indikator.
   a. Cakupan anak dengan imunisasi dasar lengkap;
      Hal ini disebabkan oleh kurangnya sasaran untuk akses ke sarana pelayanan posyandu dengan demikian upaya yang dilakukan untuk mengatasi dalam rangka meningkatkan pencapaian ini adalah perlu dilakukan sweeping imunisasi dengan cara petugas kesehatan turun mencari sasaran.
   b. Presentase Balita Gizi Buruk
      Masih tingginya balita gizi buruk disebabkan oleh tingkat gizi ibu selama kehamilan yang merupakan imbas dari determinan kesenjangan sosial, sanitasi lingkungan yang berimbas pada timbulnya penyakit infeksi tertentu yang mempengaruhi pola konsumsi anak. Dengan demikian selain memperhatikan gizi ibu juga diperhatikan gizi remaja sebagai calon ibu atau orang tua, selain itu ada intervensi khusus terhadap pasangan calon pengantin.
   c. Angka Kematian Bayi :
      Tingginya angka kematian bayi disebabkan oleh adanya gangguan kehamilan atau penangganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan), antara lain faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan, seperti tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan.
   d. Usia Harapan Hidup :
      Menurunnya usia harapan hidup dipebgaruhi oleh tingginya tingkat kematian bayi.

e. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TBC :
f. Tingkat kematian karena Tubercolosis : 3,67/100.000. penduduk;

Tidak tercapainya atau masih rendahnya capaian dari indikator terkait penanganan Tubercolosis antara lain pada poin e, dan poin f, disebabkan oleh belum semua masyarakat memahami gejala dari penyakit TBC, dimana sering

dianggap sebagai batuk biasa, selain itu bagi yang sudah tahu atau memahami lebih dipengaruhi oleh rasa rendah diri atau perasaan malu atau minder jika didiagnosa mengidap penyakit TBC sehingga mengurangu atensi masyarakat untuk akses ke sarana atau petugas kesehatan jika mengalami gejala yang berhubungan dengan TBC.

g. Prevalensi HIV AIDS dari total populasi :

Tingginya kasus HIV AIDS disebabkan oleh pola perilaku masyarakat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan seks bebas.

4. Implikasi yang timbul terhadap capaian proram dan kegiatan sesuai indikator dalam Renstra Tahun 2017-2022 :

Memperhatikan data diatas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan antara lain adalah :

a. Masih dimungkinkan adanya penurunan kekebalan bayi dan balita sehingga mudah sakit karena rendahnya akses terhadap imunisasi.
b. Dimungkinkan menurunnya Usia Harapan Hidup karena tingginya kasus kematian terutama pada bayi dan balita.
c. Dimungkinkan adanya peningkatan status gizi balita terutama gizi buruk yang berdampak pada peningkatan stunting.
d. Masih dimungkinkan terjadinya kematian ibu, neonatal, bayi dan balita.
e. Kasus penyakit HIV-AIDS dimungkinkan meningkat dari tahun sebelumnya jika dilakukan skreaning terhadap sasaran yang beresiko tinggi terhadap HIV.

5. Rencana Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:

a. Mengintegrasikan program kesehatan keluarga dan Gizi dengan program dan sektor terkait lainnya;
b. Peningkatan kualitas ANC (ANC terpadu berkualitas)sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi

kehamilan, kelas ibu, dan memperkuat jejaring rujukan dengan group WhatsApp;

c. Mengoptimalkan peran "PSC 119 YES" untuk melayani ibu hamil beresiko;
d. Melakukan penjaringan kasus anemia & KEK (Kekurangan Energi Kronis) sejak remaja, calon pengantin dan WUS (wanita usia subur) dengan program pemberian zink, asam folat dan tablet tambah darah bagi remaja, calon pengantin dan WUS;
e. Maksimalkan program suami siaga, pembinaan pada bidan serta mewajibkan buku KIA untuk semua ibu hamil sebagai penghubung bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kader pendamping, serta keluarga/suami;
f. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Mutu Pelayanan dan Peningkatan Mutu Pelaksanaan Akreditasi Puskesamas;
g. Membangun komitmen bersama terutama pemerintah tentang akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan Perlindungan resiko finansial warga terhadap akses pelayanan kesehatan yang dikenal dengan Universal Health Coverage (UHC).

Selanjutnya Capaian tahun 2022 sesuai dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut :

1. Indikator yang belum tercapai.

   Dari ke 12 Indikator yang ada 10 indikator yang belum mencapai target karena capaianya dibawah 100%;

   a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : 64,11%;
   b. Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin : 82,92%;
   c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : 82,92%;
   d. Pelayanan Kesehatan Balita : 59,40%;
   e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar : 98,71 %;
   f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif : 99,96%)'
   g. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi : 64,78%;
   h. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan gangguan Jiwa Berat : 57,53%;
   i. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB. : 76,04%;
   j. Pelayanan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV.: 95,14%);

2. Indikator yang sudah mencapai target :

   Indikator yang sudah mencapai target sebanyak 2 indikator yakni L

   a. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut : 100,55%;

b. Pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus : 111,24%;

3. Faktor Penyebab tidak tercapainya target indikator

Dari capaian yang diperoleh, ada 2 indikator melebihi target atau diatas 100% dimana termasuk dalam kategori sangat baik; , ada 6 indikator dengan rentang antara 75%- 100%, dimana masuk dalam kategori baik; sementara ada 4 indikator dengan capaian antara 55% - 75 %, artinya ada 4 indikator masih dalam kategori cukup.

Dari capaian yang diperoleh terhadap 12 (dua belas) indikator terdapat 8 indikator dengan rentang baik dan sangat baik, namun ada 4 indikator yang capaiannya masih di bawah 75% atau dengan kategori cukup dimana dianggap belum mencapai target antara lain :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : 64,11%;

   Rendahnya capaian ini disebabkan oleh masih ada ibu hamil yang terlambat akses ke sarana pelayanan kesehatan dimana sudah pada umur kehamilan triwulan kedua dan ketiga sehingga berdampak pada tingginga K1 Akses dibandingkan K1 murni.

b. Pelayanan Kesehatan Balita : 59,40%;

   Tingginya kesenjangan ini karena Kunjungan balita ksarana pelayanan kesehatan.

c. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi :64,78%;

   Rendahnya capaian ini dikarenakan dari target yang ditetapkan tidak semuanya akses ke fasyankes, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin (check up berkala), sementara dari yang tercakup selama ini kebanyakan dari orang yang berkunjung dengan alasan lain atau sakit lainnya.

d. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan gangguan Jiwa Berat : 57,53%

   Masih terdapat kesenjangan akibat rendahnya cakupan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan dalam program ***"Good Pagi"***

4. Implikasi yang timbul terhadap capaian program dan kegiatan sesuai indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan: Memperhatikan data diatas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan antara lain adalah :

   a. Masih dimungkinkan rendahnya kunjungan Bayi dan Balita ke fasyankes karena gangguan social.

b. Dimungkinkan masih rendahnya cakupan pelayanan usia produktif karena masih rendahnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala;
c. Dimungkinkan masih rendahnya cakupan pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa karena masih rendahnya cakupan pelacakan khusus ODGJ maupun akses melalui Good Pagi, begitupun terhadap orang TB.

5. Rencana Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perludiambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:
   a. Melakukan sosialisasi terkait gangguan social yang ada dan yang mungkin timbul serta cara menghadapinya dengan harapan dapat meningkatkan atensi masyarakat untuk akses ke fasyankes yang ada.
   b. Melakukan sosialisasi terkait penyakit tertentu yang timbul terutama pada usia produktif dan pada usia lanjut.
   c. Mengintensifkan kegiatan Good Pagi dengan melibatkan puskesmas dan dinas kesehatan secara rutin dan berkala.
   d. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Mutu Pelayanan dan Peningkatan Mutu Pelaksanaan Akreditasi Puskesamas.
   e. Membangun komitmen bersama terutama pemerintah tentangakses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, danPerlindungan risiko finansial warga terhadap akses pelayanan kesehatan yang dikenal dengan Universal HealthCoverage (UHC).

Sementara untuk Capaian tahun 2023 sesuai dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indikator yang belum tercapai.

   Dari ke 12 Indikator yang ada semuanya belum mencapai target karena semua capaian dibawah 100%;

   a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : 35,44%;
   b. Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin : 55,69%;
   c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : 50,90%;
   d. Pelayanan Kesehatan Balita : 33%;
   e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar : 11,58%;
   f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif : 73%)'
   g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut : 42%;
   h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi : 25,48%;
   i. Pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus : 37,35%;

j. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan gangguan Jiwa Berat : 43,11%;
k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB. : 74,64%;
l. Pelayanan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV.: 23,13%).

Namun ketika pencapaian ke 12 indikator ini, dibandingkan dengan waktu pelaksanaan, dimana baru pada triwulan kedua maka ada 4 indikator yang sudah mencapai target yakni

a. Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin : 55,69%;
b. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : 50,90%;
c. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif : 73%)
d. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB. : 74,64%;

2. Faktor Penyebab tidak tercapainya target indikator

Dari capaian yang diperoleh tidak terdapat indikator melebihi target atau diatas 100%, termasuk indikator dengan rentang antara 75%- 100% juga tidak ada.

Namun ketika pencapaian ke 12 indikator ini, dibandingkan dengan waktu pelaksanaan, dimana baru pada triwulan kedua maka ada 8 indikator yang belum mencapai target yakni antara lain :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : 35,44%;

   Rendahnya capaian ini disebabkan oleh masih ada ibu hamil belum melakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali, pelaporan kehamilan sudah diatas umur kehamilan triwulan kedua dan ketiga sehingga menyebabkan K1 akses lebih tinggi dari K1 Murni.

b. Pelayanan Kesehatan Balita : 33%;

   Masih rendahnya capaian indikator ini akibat dari rendahnya akses sasaran ke sarana pelayanan kesehatan, dan tidak dilakukannya sweeping ke sasaran yang belum terjangkau pada kegiatan rutin.

c. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar : 11 ,48%.

   Tingginya kesenjangan ini karena sasaran usia pendidikan dasar terbesar berada di sekolah tidak terjangkau karena beberapa sekolah belum bisa dilakukan penjaringan karena petugas menunggu siklus penjaringan;

d. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi : 25,48%;

   Rendahnya capaian ini dikarenakan dari target yang ditetapkan tidak semuanya akses ke fasyankes, hal ini disebabkan oleh

masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin (check up berkala), sementara dari yang tercakup selama ini kebanyakan dari orang yang berkunjung dengan alasan lain atau sakit lainnya.

e. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan gangguan Jiwa Berat : 57,53% dengan gap 43,11%;

   Masih tingginya kesenjangan akibat rendahnya cakupan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan melalui program ***"Good Pagi"*** sehingga kemungkinan orang dengan gangguan jiwa tidak terjangkau.

f. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB. : 21,12%, dengan gap : 78,88%;

   Masih tingginya kesenjangan ini dikarenakan rendahnya akses sasaran ke sarana pelayanan kesehatan akibat dari kurang pengetahuan terkaut tanda dan gejala TBC, serta adanya perasaan minder atau malu jika terdiagnosa TBC.

g. Pelayanan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV.: 23,13%

   Masih rendahnya capaian indikator ini dikarenakan rendahnya kesadaran orang yang beresiko terinfeksi HIV untuk akses ke fasyankes guna melakukan pemeriksaan kesehatan (check up), masih adanya stigma negatif terhadap ODHA yang menimbulkan keengganannya untuk akses kesarana kesehatan.

3. Implikasi yang timbul terhadap capaian program dan kegiatan sesuai indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan: Memperhatikan data diatas maka implikasi yang timbul terhadap capaian Rencana Kerja Dinas Kesehatan antara lain adalah :

   a. Masih dimungkinkan rendahnya kunjungan Bayi dan Balita ke fasyankes ;
   b. Dimungkinkan masih rendahnya cakupan pelayanan usia produktif karena masih rendahnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala;
   c. Dimungkinkan masih rendahnya cakupan pelayanan usia lanjut karena masih rendahnya atensi untuk akses ke posyandu dan fasyankes.
   d. Dimungkinkan masih rendahnya cakupan pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa karena masih rendahnya cakupan pelacakan khusus ODGJ maupun akses melalui Good Pagi, begitupun terhadap orang TB.
   e. Dimungkinkan masih rendahnya cakupan pelayanan Orang dengan resiko terinveksi HIV karena rendahnya kesadaran

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta akibat merasa minder dan malu.

4. Rencana Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:
    a. Melakukan sosialisasi terkait penyakit tertentu yang timbul terutama pada usia produktif dan pada usia lanjut, dengan harapan dapat meningkatkan atensi masyarakat untuk akses ke fasyankes yang ada.
    b. Mengintensifkan kegiatan Good Pagi dengan melibatkan puskesmas dan dinas kesehatan secara rutin dan berkala.
    c. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Mutu Pelayanan dan Peningkatan Mutu Pelaksanaan Akreditasi Puskesamas.
    d. Membangun komitmen bersama terutama pemerintah tentang akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan Perlindungan risiko finansial warga terhadap akses pelayanan kesehatan yang dikenal dengan Universal HealthCoverage (UHC).

Selanjutnya capaian kinerja dan realisasi keuangan untuk masing-masing program sampai dengan triwulan ketiga tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini terdiri dari 7 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.44.645.455.241.- dan realisasi keuangan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan 3 adalah sebesar Rp. 28.630.157.368.-atau sebesar 64,13%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Program ini terdiri dari 4 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.42.336.921.417.- dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.386.314.797.- atau sebesar 12,72%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

   Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.1.492.469,550..-. dan realisasi keuangan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan III sebesar Rp.25.552.640.-. atau sebesar 17,39%.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

   Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.123.544.700.- dan realisasi keuangan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan III sebesar Rp.. atau sebesar 0,00%.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.1.314.856.647.-. dan realisasi keuangan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan III sebesar Rp.197.225.553. atau sebesar 15%.

Secara keseluruhan capaian realisasi keuangan terhadap program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2023 sampai dengan triwulan 3 adalah sebesar 38,34%.,dimana sesuai Skala Pengukuran Kinerja masih termasuk dalam kategori "kurang".

Masih rendahnya realisasi capaian keuangan ini disebabkan oleh beberapa kegiatan fisik yang sedang berjalan dimana masih belum dilakukan pentahapan pencairan keuangan.

Rincian realisasi program dan kegiatan serta capaian keuangan tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.1.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Sesuai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan maka secara umum kinerja Dinas Kesehatan 2023 sampai triwulan 3 belum bisa diukur karena dari 12 (dua belas) Indikator SPM yang ada baru 4 (empat) Indikator yang mencapai target dan 8 (delapan) indikator masih belum mencapai target.

Sementara Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dengan mengacuh pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026, yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tahun 2023 ini antara lain aspek kesejateraan, kesehatan dan aspek pelayanan umum, belum menunjukan pencapaian karena belum ada laporan hasil capaian sampai dengan September 2023. Sementara analisis terhadap program dan kegiatan bahkan sub kegiatan yang termuat dalam RKPD belum maksimal menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk mewujudkan *Visi "Lembata Yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan"*.

Secara umum dapat dikatakan bahwa belum tercapainya cakupan pelayanan kesehatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM-Kesh) belum memenuhi standar diseluruh fasyankes yang ada.

   Terkait dengan sumber daya kesehatan dimana kompetensi sumber daya manusia aparatur kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan teknis yang dimiliki sudah memadai tetapi secara kuantitas berdasarkan rasio sarana kesehatan yang ada masih kurang,

sehingga penyebaran tenaga kesehatan belum bisa dialokasikan secara merata pada sarana kesehatan yang ada baik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes maupun polindes yang ada.

Dengan demikian upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan kompetensi dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional sangat dibutuhkan disesuaikan dengan perkembangan penyakit dan kompleksitas masalah kesehatan juga terhadap pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada

akhirnya dapat terpenuhi standarisasi sumber daya manusia kesehatan yang selanjutnya dapat mendukung pelaksanaan fungsi puskesmas dalam melakukan pelayanan. Selain itu rekruitmen dan penempatan tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan jumlah sarana kesehatan yang ada serta, jumlah dan tingkat persebaran penduduk di masing – masing wilayah.

2. Rendahnya sinergisitas antara bidang di Dinas Kesehatan dan dengan sector terkait lainnya.

   Sistim koordinasi yang baik sangat berpengaruh pada tingkat pencapaian suatu program dan atau kegiatan baik koordinasi internal Dinas kesehatan dalam hal ini koordinasi antar bidang maupun koordinasi lintas sektor terkait.

   Untuk merealisasikan kerja sama ini perlu dilakukan penggalangan komitmen lintas bidang dan lintas sector terkait dalam bentuk perjanjian kerja sama melalui ***"Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda)"*** yang idealnya dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yakni sebelum penyusunan Rencana Kerja dan pada akhir pelaksanaan Rencana Kerja sebagai evaluasi kegiatan terkait.

   Tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama ini adalah untuk membagi kewenangan dan pertimbangan beban alokasi anggaran dalam upaya pencapaian suatu program dan atau kegiatan sehingga lebih terinci peran dan fungsi masing – masing bidang ataupun sector terkait.

3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi kesehatan

   Data dan informasi kesehatan sangat penting dan harus digunakan sebagai alat evaluasi kinerja kesehatan berdasarkan periodesasi waktu dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan suatu kegiatan baik dasi segi implemantasi maupun dari besaran anggaran. Ketika data dan informasi terpola dalam sistim pelaporan tertentu maka nilai data dan informasi ini sangaat ditentukan oleh waktu.

Secara umum kurang ketersediaan data dan informasi yang valid dipengaruhi oleh lemahnya managemen data terkait pencatatan, pelaporan, pendistribusian dan pendokumentasian, baik di puskesmas dan jaringan maupun di Dinas kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan managemen data yang baik melalui peningkatan pengetahuan dan keahliaan terkait pengelolaan data untuk menjadi informasi yang baik dan benar serta sesuai dengan periodesasi waktu yang ditentukan. Selain itu perlu dukungan Model Sistim Informasi Kesehatan yang memadai dan terus berkembang serta alat pendukung pelaksanaan model Sistim Informasi Kesehatan dimaksud; dimana rencana kedepannya akan dikembangkan ***"Rekam Medik Elektronik (RME)"*** untuk puskesmas sehingga semua kegiatan akan terangkum dalam satu model pencacatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan ***"SATU SEHAT"***

4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan ditingkat puskesmas dan juga Dinas Kesehatan.

   Dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai terlebih yang memenuhi standar tidak hanya berpatokan pada kebutuhan puskesmas tetapi lebih pada sejauh mana peran dan fungsi puskesmas tersebut.

   Begitu juga pada tingkat Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes. berupa peralatan kesehatan yang sesuai standar guna mendukung pelaksanaan pelayanan di puskesmas dan jaringannya.

Beberapa hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dinas kesehatan perlu mendapat perhatian khusus sehingga upaya peningkatan pada beberapa aspek tersebut menjadi komitmen dan prioritas pada tahun 2024.

Capaian kinerja program tahun 2023 secara keseluruhan jika dibandingkan dengan capaian kinerja keuangan tahun 2023 masih tidak berimbang dimana realisasi kinerja belum bisa dihitung bahkan dirinci perindikator kinerja sesuai renstra, sementara

berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal ada 4 (empat) indikator yang sudah mencapai target namun 8 (delapan) indikator masuih belum mencapai target.. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi keuangan masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja program dan kegiatan karena belum menunjukan hasil yang diinginkan.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dari hasil analisis kinerja Dinas Kesehatan 2023, maka dapat dikemukakan isi-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Puskesmas dalam mendukung upaya promotif dan preventif belum terimplementasi secara maksimal dalam pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga (Goog Pagi / PIS PK);
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelayanan kesehatan belum dilakukan secara maksimal sehingga berdampak pada pemerataan dan penempatan belum sesuai dengan standar kebutuhan;
3. Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan yang belum maksimal dalam keterkaitan dengan pemenuhan standar dimana sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat;
4. Rendahnya pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas yang berdampak pada rendahnya Mutu Pelaksanaan Akreditasi Puskesamas, dimana menjadi determinan utama peningkatan fungsi puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah / BLUD Puskesmas.
5. Belum optimalnya hasil pemantauan dan evaluasi program kesehatan sebagai tolok ukur indikator keberhasilan / kinerja pembangunan kesehatan;
6. Belum adanya indicator untuk mengukur kinerja di daerah (yang dipakai selama ini adalah indikator SPM yang merupakan indikator nasional), dimana ada beberapa target dari indikator tersebut belum sesuai dengan kondisi di daerah;
7. Masih kurang tersedianya data dan informasi kesehatan baik sebagai alat evaluasi kinerja maupun sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, dimana hal ini disebabkan masih lemahnya managemen data terkait pencatatan, pelaporan, dan distribusi, baik di tingkat dinas kesehatan maupun di Puskesmas dan jaringannya;
8. Rendahnya sinergisitas dalam upaya pencapaian program pembangunan kesehatan, baik dengan sektor terkait maupun antara program di Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
9. Alokasi dana bidang kesehatan belum diprioritaskan pada upaya promotif dan preventif dan belum diarahkan untuk pencapaian prioritas program tertentu.

D. Review Terhadap RKPD.

Berkaitan dengan kewenangan Dinas Kesehatan yakni perencanaan pembangunan kesehatan daerah maka intervensi dan implementasi upaya kesehatan tahun 2024 yang relevan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kesehatan yakni "Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat dari terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat."

Partisipasi masyarakat serta sarana dan prasaran pendukung sangat diperlukan dalam proses pembangunan bidang kesehatan, baik itu dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan maupun proses evaluasi pembangunan kesehatan. Namun disisi lain Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang bertugas mengintegrasikan seluruh perencanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lembata baik antar program, antar urusan maupun antar perangkat daerah terkait, agar dapat berjalan secara terpadu dan sinergi dalam rangka mewujudkan pencapaian percepatan peningkatan pelayanan Kesehatan.

Dari uraian tersebut tugas Dinas Kesehatan pada tahun 2024 sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya manusia yang profesional disamping sumber anggaran yang tersedia. Dilihat dari kemampuan keuangan daerah pada tahun 2024 anggaran yang dialokasi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata sebesar *Rp.70.113.620.766..-*.

Dengan anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas serta ketepatan program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 harus benar sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat dilaksanakan sesuai tahapan atau periode waktu. Untuk itu Dinas Kesehatan wajib membuat suatu prioritas program dan atau kegiatan sesuai masalah yang ada yang disinkronkan dengan program kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPD

Secara rinci analisas kebutuhan terhadap RKPD tersaji pada *Tabel 2.2.*

Dari tabel analisa kebutuhan, dapat disimpulkan alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 telah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

Bahwa dalam proses penyusunan RKPD, hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program

dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan SKPD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Bahwa penyusunan Renja tetap menyesuaikan RKPD dimana terkait dengan program dan kegiatan serta perencanaan anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2024 sudah sesuai dengan RKPD Kabupaten Lembata tahun 2024.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat, sektor terkait maupun Lembaga mitra lainnya melalui Musrenbang Kecamatan untuk diakomodir melalui Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023, lebih berfokus pada kegiatan pendukung peningkatan pelayanan kesehatan khususnya sarana prasarana dan peralatan kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara untuk kegiatan rutin tetap menjadi kegiatan wajib yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Selanjutnya Dinas Kesehatan wajib berkomitmen untuk mengakomodir usulan program dan kegiatan bidang kesehatan demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melakukan memperhatikan rencana program dan kegiatan hasil usulan masyarakat, LSM, stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya dengan tetap mengacuh pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023–2026.

Bahwa pada dasarnya semua usulan kegiatan masyarakat, LSM, maupun Stakholder terkait lainnya tetap diterima sebagai masukan dan disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan tahun 2023, dimana diurutkan berdasarkan prioritas dimana program dan kegiatan yang belum terakomodir akan dijadi prioritas pertama pada perencanaan tahun berikutnya dengan tetap menyesuaikan pada menu kementerian kesehatan untuk sumber anggaran dari pusat.

Sementara program dan kegiatan rutin pada Dinas Kesehatan tetap direncanakan sesuai kebutuhan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional.

1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 – 2024.

Kebijakan umum pembangunan kesehatan sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

a. Tujuan Strategis Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020 – 2024 adalah

1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
2) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4) Peningkatan sumber daya kesehatan;
5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif;

b. Sasaran Strategis *pembangunan kesehatan sesuai Renstra Kementerian Kesehatan RI. tahun 2020 – 2024* adalah :

1) Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;

2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dan rujukan;
3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
5) Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
6) Terjaminnya pembiayaan Kesehatan;
7) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintan yang baik dan bersih;
8) Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan system informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023

a. Strategi

Agar pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna maka strategi utama pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja bidang kesehatan.
2) Mempercepat pemerataan akses, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
3) Meningkatkan sumber daya kesehatan (SDM, pembiayaan, sarana prasarana, Obat dan perbekalan kesehatan, serta pengawasan makanan minuman).
4) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.
5) Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain.
6) Meningkatkan kemitraan lintas program, lintas sektor, dan lintas wilayah;
7) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
8) Mendorong terwujudnya pengambil keputusan di tingkat desa dalam penanganan Gizi dan masalah kesehatan.
9) Meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak termasuk Keluarga Berencana dalam akselerasi penurunan angka kematian Ibu, bayi baru lahir dan Anak melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai.

b. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam mendukung strategi sesuai dengan rencana pembangunan kesehatan Propinsi NTT adalah

1) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan melalui pengembangan media dan sarana informasi kesehatan;
2) Peningkatan akses, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
3) Peningkatan sistim informasi kesehatan daerah, surveilans, monitoring dan evaluasi terpadu;
4) Pengembangan dan pemantapan kelangsungan pembiayaan dan pemeliharaan sistem jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
5) Pemenuhan jumlah, mutu, jenis dan penyebaran kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, Puskesmas dan jejaringnya termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;
6) Pemenuhan ketersediaan, mutu, dan keamanan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
7) Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) diPosyandu, UKS dan Desa Siaga serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ber PHBS dan Kadarzi;
8) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit, puskesmas dan jejaringnya ;
9) Peningkatan kualitas koordinasi lintas program dan sektor untuk perbaikan gizi masyarakat, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, peningkatan promosi dan pendidikan kesehatan.
10) Pengembangan jejaring kerjasama antar daerah dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan terutama masalah kesehatan lintas wilayah;
11) Pengembangan kegiatan penelitian sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan;
12) Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, penanggulangan akibat bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta penyehatan lingkungan;
13) Mengupayakan adanya regulasi yang mendukung upaya-upaya bidang kesehatan, termasuk pembinaan dan pemberian

perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta;

14) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai;
15) Peningkatan pelayanan kesehatan komunitas, kesehatan matra, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan khusus, dan kesehatan haji serta pemerataan pelayanan kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTP).

c. Tujuan

Tujuan Pembangunan Kesehatan Provinsi NTT adalah untuk meningkatkan Umur Harapan Hidup.

d. Sasaran

Selanjutnya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di NTT maka sasaran tujuh Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah

1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh penduduk;
2) Penurunan persentase masalah gizi balita;
3) Penurunan kasus kematian ibu dan bayi;
4) Peningkatan rasio tenaga kesehatan;
5) Pemenuhan jumlah unit layanan khusus kesehatan (fasilitas kesehatan DTPK);
6) Peningkatan persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi;
7) Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat;
8) Penurunan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan;
9) Pencapaian reformasi birokrasi;
10) Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan. Kabupaten Lembata

1. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah :

a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
b. Penguatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan;

2. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

a. Meningkatanya Status Kesehatan Masyarakat;
b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat;
c. Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar;
d. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap sarana, prasarana obat dan
vaksin, perbekalan dan alat kesehatan.

Dalam upaya merealisasikan visi daerah terutama dibidang kesehatan dan mendukung pencapaian sasaran upaya kesehatan sesuai Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023, maupun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020–2024, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata menetapkan Strategi dan Kebijakan antara lain :

1. Strategi
   a. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
   b. Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
   c. Meningkatkan Upaya Perbaikan Status Gizi Masyarakat;
   d. Meningkatkan Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   e. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas melalui Rekruitmen, Distribusi secara proporsional;

f. Melakukan Penguatan Peraturan Perundangan dalam Aspek Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi Kompetensi dan Lisensi SDM Kesehatan serta Penerapannya;
g. Meningkatkan sinergisitas lintas program dan sector serta kerjasama kemitraan melalui external agency;
h. Meningkatkan Managemen Sistim Informasi Kesehatan (SIK) secara elektronik.

2. Kebijakan

Selain strategi yang diambil dinas kesehatan juga menetapkan arah kebijakan dalam mencapai tujuan sesuai sasaran guna merealisasikan Visi daerah, dengan melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan KIA KB dalam akselerasi untuk menurunkan AKI, AKB;
b. Perbaikan gizi masyarakat;
c. Peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit;
d. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
e. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta optimalisasi sistim rujukan serta peningkatan fungsi dan pengembangan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah;
f. Penguatan Sinergisitas lintas program dan lintas sector serta kerjasama kemitraan melalui external agency;
g. Pengembangan Managemen Sistim Informasi Kesehatan (SIK) secara elektronik dan pengadaan unit pendukungnya.

Selanjutnya dapat dilihat sinkronisasi tujuan dan sasaran antara Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2020 – 2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur 2018 – 2023 sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Tujuan
   a. Adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 dengan Renstra

Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 – 2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi NTT Tahun 2018 – 2023.

Dari 7 (tujuh) tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 ada 2 (dua) tujuan yang sinkron dengan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi dan Renstra Kementerian Kesehatan yakni pada *tujuan pertama* Meningkatkan Status Gizi Masyarakat dan *tujuan keempat* Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan cakupan kunjungan masyarakat ke sarana kesehatan yang memadai.

b. Adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 – 2024.

   Terdapat 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 yang sinkron dengan Renstra Kementerian Kesehatan yakni *tujuan kelima* meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan yang bermutu dan merata; *tujuan keenam* meningkatkan sinergisitas lintas sektor; dan *tujuan ketujuh* meningkatkan manajemen perencanaan kesehatan berbasis data.

c. Adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 dengan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi NTT Tahun 2018 – 2023.

   Tidak ada tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 yang sinkron dengan Tujuan dalam Renstra Dinas Kesehatan Propinsi NTT.

d. Ada 2 tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 yang tidak sinkron dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi NTT. yakni tujuan kedua meningkatkan Promosi Kesehatan dan tujuan ketiga menggerakan pemberdayaan masyarakat;

3. Sinkronisasi Sasaran

   a. Adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 – 2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi NTT Tahun 2018 – 2023.

      Dari 9 (sembilan) sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 ada 4 (empat) sasaran yang sinkron dengan sasaran yang termuat dalam

Renstra Dinas Kesehatan Propinsi dan Renstra Kementerian Kesehatan yakni pada *sasaran pertama* menurunnya kasus balita Gizi buruk dan gizi kurang yang berdampak pada berkurangnya kasus stunting; *sasaran keempat* menurunnya AKI dan AKB; *sasaran kelima* terpenuhinya tenaga kesehatan profesional di setiap sarana kesehatan; dan *sasaran keenam* terpenuhinya sarana, prasarana obat dan perbekalan yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan.

b. Adanya sinkronisasi antara sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 dengan sasaran dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 – 2024.

   Terdapat 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 yang sinkron dengan Renstra Kementerian Kesehatan yakni sasaran ketujuh meningkatnya sinergisitas lintas sektor; *sasaran kedelapan* tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung dalam pengelolaan data; dan *sasaran kesembilan* meningkatnya kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus dan penularan penyakit.

c. Adanya sinkronisasi antara sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 dengan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Propinsi NTT Tahun 2018 – 2023.

   Tidak ada sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 yang sinkron dengan Renstra Dinas Kesehatan propinsi NTT.

d. Ada 2 sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 yang tidak sinkron dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi NTT. yakni *sasaran kedua* meningkatnya jumlah masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang yang mendorong meningkatnya Umur Harapan Hidup; dan *sasaran ketiga* meningkatnya cakupan kemandirian UKBM (Posyandu, TOGA, Desa Siaga) pada 144 Desa dan 7 Kelurahan.

BAB. IV
RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata akan melaksanakan 5 (lima) program dan 18 (delapana belas) kegiatan serta 66 (enam puluh enam) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar *Rp.70.113.620.766.-*, dimana masing-masing program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Kabupaten dengan pagu sebesar Rp.45.134.644.235.,
   a. Tujuan Program
      Meningkatkan Pelayanan Administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah
   b. Sasaran Program
      Meningkatnya cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah
   c. Target

Target cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran sebanyak 70 Dokumen.

d. Kegiatan

Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi umum perangkat daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu sebesar Rp.20.452.630.123.,

   a. Tujuan Program

      Meningkatnya usia harapan hidup

   b. Sasaran Program

      Meningkatnya usia harapan hidup.

   c. Target

      Target usia harapan hidup untuk Kabupaten Lembata tahun 2022 adalah sebesar 68 tahun

   d. Kegiatan

      Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten, Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten, Penerbitan ijin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas layanan kesehatan tingkat daerah kabupaten.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan pagu sebesar Rp.1.550.125.968.,

   a. Tujuan Program

      Meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan.

   b. Sasaran Program

      Rasio tenaga medis persatuan penduduk

   c. Target

      Target meningkatnya kapasitas SDM di 9 puskesmas

   d. Kegiatan

      Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten,

dan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten.

4. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan pagu sebesar Rp.2.487.990190.,
   a. Tujuan Program
      Menyediakan Obat dan Vaksin di puskesmas sesuai kebutuhan
   b. Sasaran Program
      Tersedianya obat dan faksin di puskesmas
   c. Target
      Target yang ingin dicapai adalah sebesar 93 %
   d. Kegiatan
      Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan Pemberian ijin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional, kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah tangga, dan kegiatan Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan pagu sebesar Rp.488.230,250.-
   a. Tujuan Program
      1) Jumlah Media Promkes yang diadakan
      2) Terlaksananya Gerakan Masyarakat sehat dan PHBS
   b. Sasaran Program
      1) Jumlah Media Promkes yang diadakan
      2) Terlaksananya Gerakan Masyarakat sehat dan PHBS
   c. Target
      Target yang ingin dicapai adalah
      1) 81 buah
      2) 9 puskesmas
   d. Kegiatan
      Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten, Pelaksanaan sehat dalam rangka promosif, preventif tingkat daerah kabupaten, dan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat tingkat daerah kabupaten.

Uraian rencana program/kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1.

BAB. V
PENUTUP

Tugas dan fungsi serta kedudukan Dinas Kesehatan selaku unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas

desentralisasi di bidang kesehatan. Dengan demikian agar tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik maka Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 wajib untuk dipedomani oleh setiap unsur yang melakukan pelayanan kesehatan di kabupaten Lembata baik bidang dan sekretariat di Dinas Kesehatan, puskesmas dan Jaringannya.

Agar optimal dalam pelaksanaannya maka hal-hal berikut harus diperhatikan antara lain:

1. Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 dengan berkonsultasi pada PPTK masing–masing yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dengan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk diverifikasi dalam kaitan dengan penyusunan RAPBD Tahun 2024.
2. Dalam penyusunan RKA untuk setiap program dan kegiatan harus berpedoman pada dokumen antara lain :
   a. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) 2017-2025;
   b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026;
   c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;

Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan dalam penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2024.

Lewoleba, Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata,

dr. Goerillya A.Huar Noning.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741114 200604 1008

LAMPIRAN

ffffftabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan

Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Bulan Juni Tahun 2022

Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Per Juni Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)x100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**					37%			37%
01.2.01	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah***	250 paket	90.7%	100%	14%	14%	100%	14%	14%
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RDPA/DPA, RDPPA/DPPA	3 Paket	66%	100%	57%	57%	100%	57%	57%
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip, LPPD, Profil SKPD	15 Unit	82.3%	100%	47%	47%	100%	47%	47%
01.2.02	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah***	1 Tahun	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK, peralatan kebersihan dan bahan pembersih.	1 Paket	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun	1 Paket	100%	100%	52%	52%	100%	52%	52%
01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	1 Tahun	100%	100%	23%	23%	100%	23%	23%
01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD yang tersusun	16 Kegiatan	98.9%	100%	67%	67%	100%	67%	67%
01.2.06.	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah***	155 PAK	90.6%	100%	12%	12%	100%	12%	12%
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia					26%			26%
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Paket	1 paket	7 paket	24%	24%	12 Unit	24%	24%
01.2.06.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 paket	0	0%	0%	8 Unit	0%	0%
02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 Paket	1 Tahun	0	0%	0%	-	0%	0%
02.12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah	5 Unit	4 Unit	0	0%	0%	3 Unit	0%	0%
02.13	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah***	9 Unit	6 Unit	3 Unit	28%	28%	3 Unit	28%	28%
02.14	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 Paket	-	-	0%	0%	1 Paket	0%	0%
02.26	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah***	2 Unit	2 Unit	-	0%	0%	-	0%	0%

6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pelayanan administrasi perkantoran dan jasa tenaga kesehatan, Jumlah penyediaan benda pos					59%			59%
6.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa Listrik, Sumber daya Air, dan Telepon	4 buah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen Laporan Barang Pengguna (LBPS dan LBPT) yang tersedia	4 Buah	100%	100%	18%	18%	100%	18%	18%
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor					0%		0%	0%
9.01	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah***	3 Dokumen	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil KIR dan pajak STNK					25%		25%	25%
12.01			4 Dokumen	100%	100%	25%	25%	100%	25%	25%
13	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Meningkatnya Angka Harapan Hidup**					6%		6%	6%
13.01	***Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Meningkatnya Angka Harapan Hidup***	2 Dokumen	100%	100%	6%	6%	100%	6%	6%
15	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibangun/direhab					5%		5%	5%
15.01	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peralatan kesehatan yang tersedia	1 Paket	88.50%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
15.02	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan dan layak digunakan	9 Kecamatan	97.60%	100%	9%	9%	100%	9%	9%
16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan perbekalan kesehatan					30%		30%	30%
16.01	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan medis habis pakai	100%	95%	100%	49%	49%	100%	49%	49%
16.03	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Meningkatnya Angka Harapan Hidup***	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
16.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dirawat berkala dari keluarga kurang mampu	100%	97.10%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
16.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil tertolong persalinan dari keluarga kurang mampu	100%	79.60%	100%	11%	11%	100%	11%	11%
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah pembinaan dan pelaksanaan MTBS, DDTK, PWS KIA dan RMP, Jumlah sasaran bayi baru lahir yang mendapat Pelayanan Dasar					0%		0%	0%
17.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah posyandu sasaran imunisasi	100%	68.10%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
17.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Sasaran Imunisasi BIAS di Sekolah	100%	84.60%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah sasaran pembinaan kegiatan usia produktif					9%		9%	9%
19.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah sasaran pembinaan kegiatan lansia	100%	21.20%	100%	17%	17%	100%	17%	17%

19.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah sasaran yang medapatkan pelayanan kesehatan bagi penderita Hipertensi	100%	70.60%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah sasaran yang medapatkan pelayanan kesehatan bagi penderita DM					5%		5%	5%
20.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah sasaran yang medapatkan pelayanan kesehatan bagi penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100%	100%	16%	16%	100%	16%	16%
20.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah sasaran yang medapatkan pelayanan kesehatan bagi terduga tuberkulosis	100%	94%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
20.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah sasaran yang medapatkan pelayanan kesehatan bagi orang dengan resiko tertular HIV	100%	76.40%	100%	0.4%	0.4%	100%	0.4%	0.4%
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah sasaran yang medapatkan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					8%		8%	8%
21.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita/Bumil KEK mendapat PMT, Jumlah dokumen KOMDAT, Jumlah kasus gisi buruk dilacak, pemantauan stunting bayi/balita	100%	94.60%	100%	20%	20%	100%	20%	20%
21.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah sasaran yang mendapat Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100%	82.20%	100%	5%	5%	100%	5%	5%
21.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah sasaran yang mendapat pelayanan kesehatan lingkungan	100%	97.30%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
22	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah sasaran yang mendapat penjaringan kesehatan siswa					15%		15%	15%
22.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah pembinaan penyehatan tradisional pembangunan Kesehatan	100%	94.40%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
22.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	99.20%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
22.04	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas dan jaringannya Jumlah Peserta BPJS	100%	84.30%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
22.05	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100%	78.30%	100%	7%	7%	100%	7%	7%
22.09	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah sasaran (lokasi) pelaksanaan Penyemprotan sarang nyamuk	100%	70.60%	100%	32%	32%	100%	32%	32%
22.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	***Meningkatnya Angka Harapan Hidup***	100%	89.50%	100%	6%	6%	100%	6%	6%
23	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan Data Kesehatan					5%		5%	5%
23.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlakansanya pengelolaan sistem Informasi Kesehatan	100%	81.90%	75%	4%	4%	75%	4%	4%
23.03	***Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Meningkatnya Angka Harapan Hidup***	100%	84.20%	100%	6%	6%	100%	6%	6%

25	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan dasar sesuai standar					4%		4%	4%
25.02			100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
25.04	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk**	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
25.06	***Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***	***Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk***	100%	100%	100%	4%	4%	100%	4%	4%
25.19	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Telaksananya Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Kesehatan	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
25.22	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk***	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
29	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Telaksananya Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teksnis Sumber Daya Kesehatan					8%		8%	8%
20.01			100%	71.70%	100%	8%	8%	100%	8%	8%
30	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas**					11%		11%	11%
30.01	***Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)***	***Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas***	75%	100%	75%	11%	11%	100%	11%	11%
31	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotik, Toko Obat dan Toko Alat kesehatan Optik dan UMOT yang berijin					0%		0%	0%
31.02	**Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas**	75%	75.60%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
32	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan industri rumah tangga					16%		16%	16%

32.01	**Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas**	75%	89.80%	75%	17%	17%	100%	17%	17%
32.02	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan industri rumah tangga	75%	61.00%	75%	0%	0%	75%	0%	0%
32.03			75%	92.90%	75%	31%	31%	100%	31%	31%
33	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Rumah Tangga Sehat**				0%	0%		0%	0%
33.01	***Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan Rumah Tangga Sehat***	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33.02	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat, Terlaksananya pelayanan dokter ahli ke puskesmas	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.01.04	***Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan Rumah Tangga Sehat***								
20	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promkes yang diadakan Terlaksananya Gerakan Masyarakat Sehat dan PHBS								
20.01	***Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan Rumah Tangga Sehat***	0	100%	0	98%	98%	0%	66%	17%
1.02.08	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya pelaksanaan promosi kesehatan berbasis masyarakat								
15	**Program Keluarga Berencana**									
15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB yang terlayani	0	49.10%	0	41%	41%	0%	30%	8%
16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**									
16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang mendapat pelayanan kesehatan	0	45.40%	0	40%	40%	0%	28%	7%

Tabel 3.1.

Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Antara Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2023 dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020 -2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023

No.	Tujuan					sinkronisasi	
	Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 -2024	No	RENSTRA Dinkes Prop. NTT Tahun 2019 -2023	No	RENJA Dinkes Kab. Lembata Tahun 2023	Ya	Tidak
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;	1	Meningkatkan Umur Harapan H	1	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	√	
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;			1	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	√	
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;			1	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	√	
4	Peningkatan sumber daya kesehatan;			8	Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan;	√	
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif;						√
				2	Penguatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;		√
							√

M	Sasaran					sinkronisasi	
	Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 -2024	No	RENSTRA Dinkes Prop. NTT Tahun 2019 -2023	No	RENJA Dinkes Kab. Lembata Tahun 2023	Ya	Tidak
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;	2	Penurunan persentase masalah gizi balita;	1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	√	
		3	Penurunan kasus kematian ibu dan bayi;	1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	√	
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dan rujukan;	5	Pemenuhan jumlah unit layanan khusus kesehatan (fasilitas kesehatan DTPK);	3	Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar		
		6	Peningkatan persentase fasilitas kesehatan yang	3	Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	√	
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;	1		1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	√	
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;	1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh penduduk;	4	Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana , obat, vaksin, perbekalan dan alat kesehatan	√	
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar;	4	Peningkatan rasio tenaga kesehatan;	3	Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	√	
6	Terjaminnya pembiayaan Kesehatan;	7	Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat;	4	Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana , obat, vaksin, perbekalan dan alat kesehatan	√	
7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintan yang baik dan bersih;						√
8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan system informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.			1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	√	

		8	Penurunan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan;	1	Meningkatnya Masyarakat	Status	Kesehatan	√	
		9	Pencapaian reformasi	1	Meningkatnya	Status	Kesehatan	√	
		10	Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan						√

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Kerja 2025		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang)
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu	
1	2				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugaskat perangkat daerah	Lawadaka	20%	Rp 33,338,764,578		Rp 33,338,764,578	20%	Rp 33,338,764,578	Dinas Kesehatan
1	02	01	02H		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugaskat perangkat daerah	4(EMPAT)	200 lembar perangko, 200 surat	Rp 93,000,000		Rp 103,300,000	200 lembar perangko, 200 surat	Rp 103,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen SKPD	Kab. Lembata,	200 lembar perangko, 200 surat	Rp 68,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 68,200,000	200 lembar perangko, 200 surat	Rp 68,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Kinerja SKPD.	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 lembar perangko, 200 surat	Rp 30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 31,000,000	200 lembar perangko, 200 surat	Rp 31,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya --Dokumen LAKIP, LPPD --Dokumen Profil, SPM	Semua Kelurahan/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 jenis selama 12 bulan	Rp 72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 82,600,000	3 jenis selama 12 bulan	Rp 82,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugaskat	4(EMPAT)	20 jenis	Rp 49,090,034,162	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 54,030,305,578	20 jenis	Rp 54,030,305,578	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	--Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	KIR dan gaji 3 mobil, STNK 28 motor	Rp 49,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 53,900,000,000	KIR dan gaji 3 mobil, STNK 28 motor	Rp 53,900,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	--Jumlah ATK yang tersedia --Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia --Terlaksananya peningkatan kinerja pegawai	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 jenis barang	Rp 423,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 444,150,000	14 jenis barang	Rp 444,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan yang tersusun	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 jenis	Rp 72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 78,720,000	40 jenis	Rp 78,720,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester SKPD yang tersusun	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000 lembar Foto HPS dan selain 6 jenis	Rp 72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 78,720,000	100.000 lembar Foto copy dan selain 6 jenis	Rp 78,720,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis realisasi anggaran SKPD yang tersusun	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 jenis	Rp 16,034,162	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 16,009,578	6 jenis	Rp 16,009,578	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja 2024				Catatan Pending	Prakiraan Maju Rencana Kerja 2025		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (Bidang)
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	01	0.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi barang perkantoran dalam mendukung tugaskal perangkat daerah	4KEC/1	2 jenis selama 12 bulan	Rp 998,493,062	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 991,519,062	2 jenis selama 12 bulan	Rp 991,519,062	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah	Kab. Lambora, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 kali dalam daerah dan 9 Kali keluar daerah	Rp 6,709,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 7,379,900	20 kali dalam daerah dan 9 Kali keluar daerah	Rp 7,379,900	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.03	06	Pemeliharaan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik daerah	Kab. Lambora, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	Rp 72,400,062	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 74,089,262	20%	Rp 74,089,262	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian dalam mendukung tugaskal perangkat daerah	4KEC/1	2 jenis selama 12 bulan	Rp 831,209,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 842,829,900	2 jenis selama 12 bulan	Rp 842,829,900	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.03	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lambora, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 kali dalam daerah dan 9 Kali keluar daerah	Rp 60,709,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 64,779,900	20 kali dalam daerah dan 9 Kali keluar daerah	Rp 64,779,900	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugaskal perangkat daerah	4KEC/1	2 jenis selama 12 bulan	Rp 333,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 348,030,000	2 jenis selama 12 bulan	Rp 348,030,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang tersedia	Kab. Lambora, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 kali dalam daerah dan 9 Kali keluar daerah	Rp 14,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 17,400,000	20 kali dalam daerah dan 9 Kali keluar daerah	Rp 17,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Kab. Lambora, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	Rp 16,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 16,800,000	20%	Rp 16,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Jumlah penggandaan	Kab. Lambora, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 unit	Rp 30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 32,500,000	12 unit	Rp 32,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.06	04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	Kab. Lambora, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 3,200,000	Dana Transfer Umum- Dana	Rp 3,430,000		Rp 3,430,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah *Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah	Kab. Lambora, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 130,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 137,300,000		Rp 137,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugaskal perangkat daerah	Lainnnnkkk	1 unit	Rp 100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp -	1 unit	Rp 200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.07	02	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel yang disalurkan	Kab. Lambora, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Rp 200,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Kerja 2025		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (Bidang)
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	01	0.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Lawonaba	1 Paket	Rp 338,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 376,425,000	1 Paket	Rp 376,425,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jasa pelayanan Administrasi perkantoran dan jasa tenaga kesehatan - Jumlah Penyediaan benda Pos	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	Rp 12,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 14,175,000	12 paket	Rp 14,175,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Tersedianya jasa telek -Tersedianya Jasa Sumber Daya Air - Tersedianya Jasa telephon	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	Rp 100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 110,000,000	3 Unit	Rp 110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Laporan Barang Pengguna (LBP) dan UPT yang tersedia	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	Rp 100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 105,000,000	3 Unit	Rp 105,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 44,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 47,300,000	1 Paket	Rp 47,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Lawonaba		Rp 10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 10,500,000		Rp 10,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.09	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil KIR dan Pajak STNK	Lawonaba	1 Paket	Rp 90,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 94,200,000	1 Paket	Rp 94,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.09	09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor	Lawonaba	1 Paket	Rp 10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 10,500,000	1 Paket	Rp 10,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)	Meningkatnya Angka/ Usia Harapan Hidup	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 23,383,894,924	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 27,497,334,419		Rp 27,498,284,419	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Meningkatnya Angka/ Usia Harapan Hidup	Lawonaba	1 Paket	Rp 11,383,894,924	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 12,412,734,419	1 Paket	Rp 12,412,734,419	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang tersedia	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp 2,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 2,000,000,000		Rp 2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah bangunan Gedung	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 110,000,000	1 Paket	Rp 110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga kesehatan	Jumlah bangunan Gedung	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 110,000,000	1 Paket	Rp 110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.01	12	Pengadaan Prasarana dan Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peralatan Kesehatan yang tersedia	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 1,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 1,100,000,000	1 Paket	Rp 1,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peralatan Kesehatan yang tersedia	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 2,383,894,924	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 2,344,984,419	1 Paket	Rp 2,344,984,419	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Jalan Kabinet	Jumlah alat yang diadakan untuk layak digunakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	Rp 30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana	Rp 33,750,000	20%	Rp 33,750,000	Dinas Kesehatan

Kode					Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja 2024				Catatan Pending		Prakiraan Maju Rencana Kerja 2025		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (Bidang)
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana			Target	Pagu	
1					2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	03	03	3.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Perbekes yang tersedia	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Org	Rp 3,600,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 3,600,000,000	3 Org	Rp 3,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	03	3.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang tersedia	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	Rp 2,300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 2,792,000,000	-	Rp 2,792,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	03	3.03		Penyelenggaraan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatnya Angka / Usia Harapan Hidup	ertgtrt	-	Rp 13,422,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp 14,222,222,000	-	Rp 14,214,100,000	Dinas Kesehatan
1	03	03	3.03	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Ekonomi lemah dan keluarga kurang mampu	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3039	Rp 500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 500,000,000	3039	Rp 500,000,000	
1	03	03	3.03	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu hamil tertolong persalinanya dari keluarga kurang mampu	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Desa Kelurahan	3039	Rp 500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 500,000,000	3039	Rp 500,000,000	
1	03	03	3.03	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Jumlah Pembinaan dan pelaksanaan MTBS, DDTK, PWS KIA dan RMP - Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir yang mendapat pelayanan dasar	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Desa Kelurahan	3039	Rp 500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 500,000,000	3039	Rp 500,000,000	
1	03	03	3.03	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita(L) sasaran imunisasi	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3039	Rp 420,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 420,000,000	3039	Rp 420,000,000	
1	03	03	3.03	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah sasaran imunisasi Bias di sekolah	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4000	Rp 500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 84,200,000	4000	Rp 84,200,000	
1	03	03	3.03	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah sasaran pembinaan Kegiatan usia produktif	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19000	Rp 500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 84,800,000	19000	Rp 84,800,000	
1	03	03	3.03	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah sasaran Pembinaan kegiatan Lansia	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000	Rp 500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 84,200,000	Rp 0	Rp 84,800,000	
1	03	03	3.03	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah sasaran yang Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi penderita Hypertensi	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37000	Rp 500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 84,800,000	Rp 0	Rp 84,800,000	
1	03	03	3.03	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Sasaran yang mendapat pelayanan kesehatan Diabetes Melitus	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000	Rp 50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 22,000,000	Rp 0	Rp 22,000,000	
1	03	03	3.03	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah sasaran ODGJ Yang mendapat pelayanan	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	388	Rp 50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 22,800,000	Rp 0	Rp 22,800,000	
1	03	03	3.03	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Sasaran yang mendapat pelayanan kesehatan Tuberculosis	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3178	Rp 50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 83,800,000	Rp 0	Rp 83,800,000	
1	03	03	3.03	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Sasaran yang mendapat pelayanan kesehatan HIV AIDS	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3812	Rp 50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 27,750,000	Rp 0	Rp 27,750,000	
1	03	03	3.03	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kesehatan Luar Biasa KLB	Jumlah sasaran yang mendapat pelayanan akibat KLB	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	RKTP	Rp 50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 27,750,000	Rp 0	Rp 27,750,000	
1	03	03	3.03	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Jumlah balita Bumi KEK mendapat PMT - Jumlah Dokumen KOMDAT - Jumlah kasus Gizi Buruk diatasi, pemantauan Stunting Bayi Balita	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	RKTP	Rp 1,000,000,000	Rp 0	Rp 1,000,000,000	Rp 0	Rp 1,000,000,000	

Kode					Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja 2024				Catatan Pending		Prakiraan Maju Rencana Kerja 2025		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (Bidang)
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana			Target	Pagu	
1					2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dan Darага	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu Darага	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp	39.000.000	Rp 0	34.000.000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah sasaran Yang mendapat pelayanan kesehatan Lingkungan	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	70.000.000		Rp	77.000.000	Rp 0	70.000.000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promkes Kesehatan	Jumlah sasaran yang mendapat pelayanan penyuluhan kesehatan	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	42.000.000		Rp	46.000.000	Rp 0	46.000.000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Akupuntur, Jauhan mandiri dan Tradisional lainnya	Jumlah pembinaan penyelenggaraan Tradisional pembangunan Kesehatan	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	60.000.000		Rp	67.760.000	Rp 0	67.760.000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilance kesehatan	Jumlah kegiatan surveilance Kesehatan	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua	PATP	60.000.000		Rp	66.760.000	Rp 0	66.760.000	
1	02	02	2.02	22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Pelayanan kesehatan penyakit Menular dan tidak menular	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp	77.000.000	Rp 0	77.000.000	
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Jaminan kesehatan Masyarakat	- Jumlah Pelayanan Kesehatan penduduk Miskin di puskesmas dan jaringan - Jumlah peserta BPJS	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Penduduk miskin	2.100.000.000			2.400.000.000	Rp 0	2.400.000.000	
1	02	02	2.02	25	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah sasaran pelayanan kesehatan	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	6.300.000.000		Rp	6.496.000.000	Rp 0	6.496.000.000	
1	02	02	2.02	26	Pelaksanaan Jiredhas Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran pelaksanaan Jiredhas Fasilitas Puskesmas	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	70.000.000		Rp	77.000.000	Rp 0	77.000.000	
1	02	02	2.02	27	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah sasaran yang melakukan Penyelidikan adanya kejadian	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	70.000.000		Rp	77.000.000	Rp 0	77.000.000	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Malaria	Jumlah Penderita Malaria yang ditiyani sesuai standar	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	70.000.000		Rp	77.000.000	Rp 0	77.000.000	
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah Penderita TB yang ditiyani sesuai standar	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	70.000.000		Rp	77.000.000	Rp 0	77.000.000	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV	Jumlah Penderita HIV yang ditiyani sesuai standar	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PATP	70.000.000		Rp	77.000.000	Rp 0	77.000.000	
	02	1	2.02		**Penyelenggaraan Sistim Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Meningkatnya Informasi Kesehatan Yang Mandiri, Berbasis, dan Akuntabilitas	Kab. Lambata,	24 kali	Rp 330.000.000		Rp	732.500.000	24 kali	Rp 732.500.000	Dinas Kesehatan
	02	1	2.02	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan data Kesehatan	Kab. Lambata,	PATP	Rp 72.000.000		Rp	82.500.000	PATP	82.500.000	Dinas Kesehatan
	02	1	2.02	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan	Kab. Lambata,	PATP	Rp 72.000.000		Rp	330.000.000	PATP	330.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan	Kab. Lambata,	PATP	Rp 400.000.000		Rp	400.000.000	PATP	400.000.000	Dinas Kesehatan

Kode					Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja 2024				Catatan Pending	Prakiraan Maju Rencana Kerja 2025		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (Bidang)
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03	03	3.03		Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatnya Angka Umur Harapan Hidup	Kab. Lambale	PKTP	Rp 125,000,000	Rp -	Rp 128,750,000	PKTP	Rp 124,950,000	Dinas Kesehatan
1	03	03	3.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Kab. Lambale, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PKTP	Rp 65,000,000		Rp 66,950,000	PKTP	66,950,000	Dinas Kesehatan
1	03	03	3.03	03	Peningkatan Mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Kab. Lambale, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PKTP	Rp 35,000,000		Rp 34,050,000	PKTP	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	03	3.03	04	penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan	Kab. Lambale, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PKTP	Rp 25,000,000		Rp 22,750,000	PKTP	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga medis Per satuan Penduduk	Kab. Lambale	PKTP	Rp 130,000,000		Rp 131,700,000	PKTP	Rp 130,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	03	3.03		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten	Rasio Tenaga medis Per satuan Penduduk	Kab. Lambale	PKTP	Rp 40,000,000		Rp 42,000,000	PKTP	Rp 40,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	03	3.03	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PKTP	Rp 40,000,000		Rp 43,000,000	PKTP	Rp 40,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	03	3.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Rasio Tenaga medis Per satuan Penduduk	Kab. Lambale	PKTP	Rp 90,000,000		Rp 92,700,000	PKTP	Rp 90,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	03	3.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupatenmua	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber daya kesehatan	Kab. Lambale, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PKTP	Rp 90,000,000		Rp 92,700,000	PKTP	Rp 90,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Ketersediaan Obat dan vaksin	Kab. Lambale	92%; 9 Apotik/toko;	Rp 82,000,000		Rp 82,450,000	92%; 9 Apotik/toko;	Rp 82,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	04	3.01		Pemberian Ijin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional.	Meningkatnya Apotik, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan, Optik dan UMOT yang berijin	Kab. Lambale	30 orang	Rp 22,000,000		Rp 22,700,000	30 orang	Rp 22,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	04	3.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotik, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan, Optik dan UMOT yang berijin	Kab. Lambale, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 PKTP	Rp 22,000,000		Rp 22,700,000	9 PKTP	Rp 22,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	04	3.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Ijin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Industri Rumah Tangga	Kab. Lambale	442 kali; 7374;420 orang;29 orang; 140 desa/kelurahan	Rp 30,000,000		Rp 31,500,000	442 kali; 7374;420 orang;29 orang; 140 desa/kelurahan	Rp 30,000,000	Dinas Kesehatan
1	03	04	3.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Industri Rumah Tangga	Kab. Lambale, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 jenis	Rp 30,000,000		Rp 31,500,000	3 jenis	Rp 30,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Kerja 2025		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (Bidang)
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	01	0.05		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Industri Rumah Tangga	Kab. Lembata	984 orang	Rp 8,000,000		Rp 8,240,000	984 orang	Rp 8,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	0.05	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Industri Rumah Tangga	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 PAKET	Rp 8,000,000		Rp 8,240,000	1 PAKET	Rp 8,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga sehat	Kab. Lembata	1 PAKET	Rp 380,000,000		Rp 391,900,000	1 PAKET	Rp 380,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten	Cakupan rumah tangga sehat	Kab. Lembata	1 PAKET	Rp 120,000,000		Rp 124,000,000	1 PAKET	Rp 120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	– Terlaksananya pelayanan kesehatan berbasis masyarakat – terlaksananya pelayanan dokter ahli ke puskesmas	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 PAKET	Rp 120,000,000		Rp 124,000,000	1 PAKET	Rp 120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.03		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten	Cakupan rumah tangga sehat	Kab. Lembata, Kecamatan, Desa/kelurahan	1 PAKET	Rp 100,000,000		Rp 103,000,000	1 PAKET	Rp 100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.03	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	– Jumlah Media Promosi yang di sebikan – Terlaksananya Gerakan Masyarakat Sehat dan PHBS	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 PAKET	Rp 100,000,000		Rp 103,000,000	1 PAKET	Rp 100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten	Cakupan rumah tangga sehat	Kab. Lembata, Kecamatan, Desa/kelurahan	1 PAKET	Rp 44,000,000		Rp 44,960,000	1 PAKET	Rp 43,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	0.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya kegiatan Promosi Kesehatan Berbasis Masyarakat	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 PAKET	Rp 43,000,000		Rp 44,960,000	1 PAKET	Rp 43,000,000	Dinas Kesehatan
Total									Rp 74,190,749,088	Rp -	Rp 83,193,238,997		Rp 83,363,048,997	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancana Kerja 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Kerja 2025		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (Bidang)
			Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

RENCANA KERJA (RENJ
TAHUN 2024

Jl. Trans Lembata No.
Email : rs

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang –undang No 25 tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan startegis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangkah menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Brdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Dalam penyusunannya Renja Perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD serta didasrkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategi tahun 2023-2027. Renja ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen RSUD

Lewoleba dalam menjalankan kebijakan, program dan kegiatan

1.2 LANDASAN HUKUM

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
3) Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2914 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SK/2003 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);

12) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031

13) (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

15) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);

16) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);

17) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);

18) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9);

19) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 7);

20) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021

21) Peraturan Bupati Lembata Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 68);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Lewoleba Tahun 2024 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan program, kegiatan, lokasi sasaran dan indikator kinerja yang terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi dan misi daerah.

Tujuan penyusunan Renja RSUD Lewoleba Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Lewoleba Tahun 2024;
2. Mengendalikan Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra RSUD Lewoleba;
3. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Rumah sakit Umum Daerah Lewoleba.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Ringkasan tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/

Kabuapetn/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalan NSPK, SPM maupun terhadap IKK.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian dan visi misi Daerah, Program Nasional, SPM dan SDGs; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Berisikan rancangan awal RKPD dibandingkan dengan hasil analis berdasarkan kebutuhan RSUD Lewoleba. Ada beberapa program dan kegiatan yang merupakan prioritas belum terakomodir sehingga dibuat penyelarasan atau review terhadap rancangan awal RKPD RSUD Lewoleba.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba tidak memiliki usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan.

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan tujuan dan sasaran Renja SKPD berkaitan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat tentang : tujuan yang ingin dicapai serta program dan kegiatan Prioritas Tahun 2024.

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesui dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2004

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Dari hasil evaluasi ini dapat diketahui bahwa Realisasi dan target pada Tahun 2023 tingkat pencapaian 94,00% atau mendekati 100%

Lebih jelasnya dapat di lihat pada ***(Lampiran I : Tabel T-C.29)***

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Guna mendukung sasaran Pemerintah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat (angka harapan hidup), maka RSUD Lewoleba berupaya menekan angka kematian yang terjadi di Rumah Sakit. Semakin rendah angka kematian, diharapkan akan memberi konstribusi terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lembata.

Net Death Rate (NDR)/Angka kemtian Bersih merupakan Indikator Kinerja Utama RSUD Lewoleba. Pada tahun 2023, NDR RSUD Lewoleba tahun 2023 mencapai 18 permil pasien, telah mencapai target yakni kurang dari 45 pasien meninggal setelah dirawat 48 jam dari setiap 1000 pasien keluar rumah sakit.

Selain NDR, kinerja pelayanan RSUD lewoleba tahun 2023 nampak dari idikator sebagai berikut :

a. *Bed Occupancy Rate* (BOR) menggambarkan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Pada tahun 2023, RSUD

   Lewoleba menambah kapasitas tempat tidurnya yang semula 106 tempat tidur (TT). Tingkat pemanfaatan tempat tidur RSUD

   Lewoleba tahun 2023 sebesar 27%. Angka yang tergolong ideal

   bagi pelayanan rumah sakit;

b. *Bed Turn Over* (BTO) merupakan rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu. Idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 - 50 kali.

   BTO RSUD Lewoleba tahun 2023 mencapai 43 kali per tahun, lebih mendekati angka ideal;

c. *Turn Over Interval* menunjukkan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati pasien. Hari kosong ini terjadi antara saat tempat tidur yang ditinggalkan oleh seorang pasien sampai digunakan lagi oleh pasien selanjutnya. Nilai idealnya 1 – 3 hari. TOI RSUD Lewoleba tahun 2023 masih di luar angka ideal, yakni 8 hari atau hanya tersedia kurang lebih 12 jam waktu tempat tidur kosong;

d. *Average Length of Stay* (ALOS) adalah rata-rata lama hari rawat pasien di rumah sakit. Idealnya, pasien dirawat selama 6 – 9 hari di rumah sakit (Depkes, 2005). ALOS RSUD Lewoleba tahun 2023 adalah 3 hari, relatif meningkat dibanding ALOS tahun sebelumnya dan lebih

pendek dibandingkan ALOS ideal. Variabel yang mempengaruhi ALOS diantaranya :

- Jenis penyakit (akut/kronis)
- Kondisi pasien saat dirawat (ada komplikasi / tidak)
- Tingkat kegawatan saat datang
- Ada tidaknya infeksi nosokomial
- Mutu pelayanan rumah sakit
- Ketersediaan alat kedokteran
- Kualitas pelayanan penunjang medis
- Ketersediaan obat dan bahan farmasi
- Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

e. Angka kematian kasar (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit. GDR RSUD Lewoleba tahun 2023 menunjukkan angka 35

per mil, Secara eksternal RSUD Lewoleba tidak dapat mengendalikan capaian GDR mengingat RSUD Lewoleba adalah rumah sakit rujukan di Kabupaten Lembata sehingga kondisi pasien yang dirujuk tergantung dari kondisi sebelum mendapat perawatan di rumah sakit. RSUD Lewoleba terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk menekan angka kematian. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel indikator khusus **(Lampiran II : Tabel SPM T-C.30)**.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Adapun Isu-isu penting yang menjadi fokus perhatian bersama dan merupakan hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Panangan Kegawatduratan Lembata;
   - Membuat Sistem Komunikasi dan Informasi Yang Terintgrasi Dalam Penangan Kegawatdaruratan
   - Membuat Sitim Pelayanan yang terintgrasi Dalam Penanganan Kegawatdaruratan dan
   - Membentuk tim Penangan Kegawatdaruratan

1. Peduli Rumah Sakit
   - Membuat Sistem Pengawasan dan Pengendalian Limbah B3 di RSUD Lewoleba
   - Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Laimbah B3 di RSUD Lewoleba

2. Kepastian Menu dan Akses Pelayanan.

.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan rancangan awal RKPD dibandingkan dengan hasil analis berdasarkan kebutuhan RSUD Lewoleba. Ada beberapa program dan kegiatan yang merupakan prioritas belum terakomodir sehingga dibuat penyelarasan atau review terhadap rancangan awal RKPD RSUD Lewoleba. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada (**Lampiran III : Tabel T-C.31**).

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

RSUD Lewoleba merupakan pelayanan kesehatan rujukan sehingga program/kegiatannya difokuskan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan di Rumah sakit. RSUD Lewoleba tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **(Lampiran IV : Tabel T-C.32)**.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2022 adalah Meningkatkan Akses dan Mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan strategi :

1. Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah dan pengembangan akreditasi fasilitas kesehatan swasta;
2. Penguatan sistem rujukan nasional, provinsi dan regional;
3. Pemenuhan sarana, prasarana, obat, tenaga dan penguatan sistem untuk penurunan kematian ibu di rumah sakit.

Salaras dengan arah kebijakan nasional tersebut, RSUD lewoleba punya strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu :

1. Perbaikan dan penguatan interna organisasi;
2. Peningkatan kualitas dan diversifikasi pelayanan guna membangun pasar potensial.
3. Peningkatan Mutu dan Sumber daya manusia.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Lewoleba Kabupaten Lembata, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam Renja RSUD Lewoleba Tahun 2024 adalah :

1. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik medis maupun non medis;
2. Meningkatkan pelayanan penunjang medik dan non medik;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia;
4. Menciptakan System Pelayanan Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit.

2. Sasaran

1. Tercapainya mutu pelayanan Medik;
2. Tercapainya Pelayanan Penunjang Medik berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Tercapaianya Sumber Daya Manusia yang Handal;
4. Terwujudnya Pelayanan Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit yang mandiri, transparan dan akuntabel.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan RSUD lewoleba Kabupaten Lembata Tahun 2024 yaitu ;

1. Pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lembata;
2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit;
3. Pengembangan Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Lembata. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka di dalam rancangan Renja RSUD Lewoleba Tahun 2024 direncanakan akan melaksanakan 2 program 11 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 47,809,482,700.- dengan rincian berdasarkan sumber

dana sesuai Rancangan Awal Renja RSUD Lewoleba Kabupaten Lembata Tahun 2024 sebagai berikut:

DAU : Rp. 40.056.476.384,-

- Dana Alokasi Khusus : Rp. ,-

Adapun Program dan kegiatan RSUD Lewoleba Tahun 2024 dapat dilihat pada **(Lampiran V : Tabel T-C.33)**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Usulan Program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan Pagu indikatif Tahun 2024 yang diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, yang tertuang dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata.

BAB V
PENUTUP

Rancangan awal renja RSUD Lewoleba Kabupaten Lembata tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pelayanan kesehatan tahunan daerah.Rancangan awal renja RSUD Lewoleba Kabupaten Lembata tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD Lewoleba Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD Lewoleba tahun 2023-2027 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagian dan bidang pada RSUD Lewoleba agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan beserta target triwulanan.
2. Diharapkan seluruh aparatur di bagian dan bidangpada RSUD Lewoleba dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian targetRenja RSUD Lewoleba, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.
4. Koordinasi dengan OPD lain yang memiliki kepentingan dalam rangka mencapai target program-program yang masih rendah capaiannya.

Dengan disusunnya dan ditetapkannya Renja Tahun 2024 RSUD Lewoleba, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisniss Anggaran (RBA) yang kemudian dikonversi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), dengan melihat KUAPPAS Dengan demikian, hasil-hasil pelayanan diharapkan dapat diterima di seluruh lapisan masyarakat, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

Lewoleba, 2023

Direktur RSUD Lewoleba,

drg. Yoseph Fremademets Paun
Pembina Tk.I
NIP 19840129 201101 1 006

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tabel. T-C.29

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA

KABUPATEN LEMBATA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja (thn_2022) pada Tahun 2022 (Akhir Periode thn_2022)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Rancaan Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		(12) Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	4	5		6			7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=8 / 12 x 100%		14=13/5 x 100%		
			k	Rp	k		Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																							
	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan																							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																							
	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ren.Ren/Ren.Ren/Ren/DPA SKPD yang tersusun			2 5			5 Dok		-	-	7 Dok		Dok		4 Dok		5 Dok						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, LPPD dan Profil SKPD yang tersusun			3			3 Dok		-	-	Dok		Dok		3 Dok		3 Dok						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD yang tersusun			4			3 Dok		-	-	Dok		Dok		5 Dok		5 Dok						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	-						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanya gaji dan tunjangan ASN			14			14 Bulan										14 Bula n						
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pengelola Keuangan SKPD			12			12 Orang		3		3 Orang		3 Orang		3 Orang		12 Orang						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD yang tersusun			3			3 Dok			-	1 Dok		6 Dok		2 Dok		3 Dok						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	-						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Administrasi Pengelola Barang Milik Daerah pada SKP Jumlah dokumen Laporan Barang pengguna (LBPB dan LBPT) yang tersedia			5			5 org 4 Dok										5 Dok 4						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-				-							-						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimte			4			10 Orang			-	Orang		8 Org		1 Orang		10 Orang						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	-						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia			9			25 Jenis										25 Jenis						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia			24			25 Dok										5 Dok						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan,Jumlah Penggandaan			150 20000			150 Buku 20000 Lbr						80 Buku Lbr		70 Buku 10000 Lbr		150 Buku 30.000 Lbr						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang dilaksanakan			5			5 Kegiatan										5 Kegiatan						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi																	-						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah AlatBahan untuk Kegiatan Kantor/Barang Pos Jumlah Tenaga Kontrak Daerah/KBO yang Dibayar			600			600 Lbr 99 Org										600 Lbr 99 Org						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendukung	Terlaksanya jasa telpon, air dan Listrik			3			3										3						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja thn 2022 (Akhir Periode thn 2022)		Realisasi Capaian Kinerja Rumah Tangga/Kabupaten/Kota Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rumah Tangga/Kabupaten/Kota yang bersangkutan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rumah Tangga/Kabupaten/Kota sd triwulan ini (Akhir Tahun Pelaksanaan Rumah Tangga/Kabupaten/Kota)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (kolom 14/kolom 9)		PJ (Penanggung jawab)
										I		II		III		IV								
	Pengadaan Mobelair	Jumlah mobelair rumah sakit yang tersedia			3		42,270,000																	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			1		155,347,321																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda Dua		333,873,391	15			15 Unit		3		4 Unit		4 Unit		4 Unit		15 Unit						
		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda Empat			5		197,799,000	5 Unit	345,810,000	2	23,040,000	2 Unit	41,490,000	2 Unit	62,072,782	2 Unit	50,332,562	5 Unit	205,931,345		408,719,388		199	
		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda Enam			1			1 Unit										-						
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1		9,804,100	1 Unit	10,135,000		-		4,407,287		126,000	1 Unit	5,479,817	1 Unit	10,022,004		19,827,104		-	
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara			1		33,520,000	2 Unit 1 Paket	69,484,500				7,200,000		54,120,480	2 Unit 1 Paket	18,013,282	2 Unit 1 Paket	78,442,832		114,982,602		-	
	Program Penurunan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								18,538,328,287		431,281,197		858,886,389					-	27,228,728,318		50,691,214,711		-	
	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								17,699,748,487		374,881,789		827,401,689					-	17,299,169,428		45,931,775,621		-	
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Bangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			1		14,898,850,000	2 Gedung 1 Paket	8,159,421,000		-				2,105,000,875	2 Gedung 1 Paket	6,191,309,219	2 Gedung 1 Paket	8,296,309,950		22,950,959,950		-	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Sumber Pendanaan	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi			21		58,341,343	1 Gedung	59,999,540		1,405,000		19,544,000		5,342,000	1 Gedung	40,952,031	1 Gedung	65,243,031		127,584,274		-	
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pendataan dan pelengkapan rumah sakit yang diadakan, jumlah pelengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan			10 51		2,217,250,006	1 Paket	288,809,200				282,535,200		-	1 Paket	99,359,400	1 Paket	399,594,600		2,808,147,805		-	
	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan		16,903,199,400	1		2,940,499,514	1 Paket	2,874,320,000		-					1 Paket	2,816,881,828	1 Paket	2,816,881,828		5,691,111,328		-	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah laporan ketersediaan yang tersedia, Jumlah Obat, BMHP dan Reagen yang tersedia		6,612,319,400	1		5,760,499,551	1 Paket	5,526,877,857		247,272,789		477,349,089		997,930,228	1 Paket	3,568,209,277	1 Paket	5,203,761,681		11,061,217,332		-	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana			50		228,449,552	1 Paket	128,115,800		28,404,000		20,975,000		37,207,963	1 Paket	96,054,809	1 Paket	171,941,572		395,091,464		-	
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi			2		740,000,000	2 Unit	37,480,000		-				19,092,000	2 Unit	9,808,800	2 Unit	37,898,800		787,898,800		-	
	Pemeliharaan Ruin dan Bentuk Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1		84,851,000	1 Paket	88,000,000				15,998,100		32,871,228	1 Paket	227,380,541	1 Paket	276,987,087		340,949,087		-	
	Penyelenggaraan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	-	8,954,871,828		8,954,871,828		-	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Media Promosi yang ditersangkan			1		33,338,190	1 Paket	38,018,190		-		3,119,240		7,480,000	1 Paket	34,702,100	1 Paket	35,981,340		69,299,130		-	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah SI UKM PPP, PPKPM, Petugas Kesehatan Jaga Pelayanan dan KBO dan yang terlayani. Jumlah tenaga Medis Yang Melakukan Pemeriksaan			1		5,402,234,957	1 Paket 109 orang	9,304,344,859		331,760,000	54 orang	1,828,637,737		2,998,718,853	1 Paket 55 orang	2,734,248,341	1 Paket 109 orang	7,343,350,929		12,648,607,688		-	
	Pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Sampel Spesimen Penyakit Potensial KLB yang diambil dan dikirim																-	-		-		-	
	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarana-sarana Logistik Rumah Sakit yang diadakan Jumlah Bahan Cetak Informasi Alat Penyuluh Rumah Sakit yang diadakan			1		2,231,471,555	1 Paket 1 Paket	1,224,202,520		160,664,525		226,324,045		561,597,260	1 Paket 1 Paket	644,860,169	1 Paket 1 Paket	1,874,726,759		3,098,195,644		-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (output)	Capaian Kinerja thn 2022 (Akhir Periode thn 2022)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d thn Perangkat Daerah tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Rencana Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran thn Perangkat Daerah yang bersangkutan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan thn Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		PIC (Penanggung jawab)
										I		II		III		IV								
	Pelayanan Ibu Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								976,888,788		97,288,378		31,884,788					-	778,487,282		778,487,282		-	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pelayanan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	terlaksananya pengendalian status RSUD Levoleka			85%		258,148,748	80 %	48,128,240	20 %	17,782,000			20 %	1,850,000	40 %	12,824,800	80 %	32,824,800		292,074,948		-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Tata kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	terlaksananya peningkatan tata kelola RS dan Fasilitas Pelayanan RSUD Levoleka			85%			80 %	32,897,200		-			40 %	940,000	40 %	24,801,282	80 %	25,741,282		25,741,282		-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan RSUD Levoleka			85%			80 %	350,429,200	20 %	8,155,820	20 %	14,532,800	20 %	31,310,580	20 %	288,080,417	80 %	272,318,617		272,318,617		-	
	Sub Kegiatan Penyajian Penurunan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pasien yang di rujuk			40 40		125,532,148	80 %	247,380,080	20 %	32,232,758	10 %	16,896,800	20 %	28,400,000	20 %	282,788,888	80 %	348,482,553		473,214,888		-	
									39,211,318,857		4,040,882,717		8,818,423,845										-	

0.00

0

379
345

Tabel T-C.31

REVIE TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pmerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				39,180,275,368				61,015,111,740	
1.02	Urusan Pmerintah Bidang Kesehatan				39,180,275,368				61,015,111,740	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung supoksi perangkat daerah*	100 %	20,958,635,356.00		*Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung supoksi perangkat daerah*		20,958,635,356.00	
1.02.01.2.01	Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	20 %	47,671,949.00		*Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	20 %	47,671,949.00	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	10,324,670.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	10,324,670.00	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	5,573,264.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	5,573,264.00	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	5,615,189.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	5,615,189.00	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	11,441,314.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	11,441,314.00	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	9,849,258.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	9,849,258.00	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	4,868,254.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	4,868,254.00	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah***	**20 %**	**19,075,961,712.00**		***Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah***	**20 %**	**19,606,742,636.00**	
1.02.01.2.01.09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	300 Orang/bulan	18,834,836,412.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	300 Orang/bulan	19,606,742,636.00	
1.02.01.2.01.10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	220,907,105.00					
1.02.01.2.01.11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	9,216,160.00					
1.02.01.2.01.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	18 Laporan	11,002,035.00					
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*	20 %	73,716,339.00		*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*	20 %	73,716,339.00	
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	2 Dokumen	8,756,785.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	2 Dokumen	8,756,785.00	
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	2 Laporan	64,959,554.00	-	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	2 Laporan	64,959,554.00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah*	20 %	20,605,635.00		*Terlaksananya penataan pegawai perangkat daeran*	20 %	20,605,635.00	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.05.0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	20,605,635.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	20,605,635.00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*	20 %	236,265,425.00		*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*	20 %	236,265,425.00	
1.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	61,221,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	61,221,000.00	
1.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	18,702,425.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	18,702,425.00	
1.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	20,900,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	20,900,000.00	
1.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	35 Laporan	135,442,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	35 Laporan	135,442,000.00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah*	20 %	455,076,940.00		*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah*	20 %	455,076,940.00	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	6 Unit	45,098,672.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	6 Unit	45,098,672.00	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	339,337,023.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	339,337,023.00	
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	7 Unit	70,641,245.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	7 Unit	70,641,245.00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	20 %	555,409,606.00		*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	20 %	555,409,606.00	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	15,604,385.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	15,604,385.00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	539,805,221.00					
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	20 %	493,927,750.00		*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	20 %	493,927,750.00	
1.02.01.2.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	19 Unit	370,409,750.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	19 Unit	370,409,750.00	
1.02.01.2.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	85,000,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	85,000,000.00	
1.02.01.2.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	20 Unit	38,518,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	20 Unit	38,518,000.00	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		***Meningkatnya Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara***	**20 %**	**9,752,750,215.00**		***Meningkatnya Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara***		**8,929,205,424.00**	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*TCakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	20 % 20 %	9,275,463,415.00		*TCakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	20 % 20 %	7,785,569,763.00	
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*	1 Unit	287,403,376.00					
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*	20 Unit	200,904,400.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*	21 Gedung	200,735,331	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	5 Unit	420,000,000.00					
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	30 Unit	250,000,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	1 Paket	200,000,000	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	1 Unit	813,641,028.00					
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	5 Paket	7,303,514,611.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	5 Paket	7,384,834,432	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	20 % 20 %	35,000,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	20 % 20 %	**803,672,461**	
1.02.02.2.01.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi*	1 Dokumen	35,000,000.00		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Paket	21,426,965	
1.02.02.2.01.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen			*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Paket	782,245,496	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	20 % 20 %	442,286,800.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			**339,967,200**	
1.02.02.2.04.004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*	1 Dokumen	442,286,800.00		*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*		339,967,200	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		*Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	20 %	7,943,394,157.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			11,276,023,784	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	20 %	7,943,394,157.00				11,276,023,784	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	450 Orang	7,943,394,157.00		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	450 orang	11,276,023,784	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		*Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	20 %	525,455,640.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			345,500,640	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	20 %	112,455,690.00				70,603,140	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	2 Dokumen	112,455,690.00		*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	2 Dokumen	70,603,140	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	20 %	413,039,950.00				274,897,500	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	413,039,950.00				274,897,500	
					39,180,275,368.00				61,015,111,740.00	

LAMPIRAN II :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD - RSUD Lewoleba
Kabupaten Lembata

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	KK	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-		Proyeksi	
				2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	n	n+1
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	16	17
1	Bed Occupancy Rate (BOR)			40%	50%	60%	60%	65%	35%	27%	40%	50%
2	Length Of Stay (LOS)	5 Hari		5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	3 hari	3 hari	5 hari	5 hari
3	Bed Turn Over (BTO)			36 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali	42 kali	43 kali	36%	40%
4	Turn Over Interval (TOI)			7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	6 hari	8 Hari	7 hari	7 hari
5	Net Death Rate (NDR)			30%	30%	30%	30%	30%	21/1000	18/1000	30%	30%
6	Gross Death Rate (GDR)			30%	30%	30%	30%	30%	29/1000	35/1000	30%	30%
	IGD											
1	Kemampuan menangani life saving	100%		80%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	80%	100%
2	Jam buka pelayanan	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24	24 Jam	24 jam	24 jam
3	Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS (masi berlaku)	100%		75%	100%	100%	100%	100%	87%	84%	75%	100%
4	Ketersediaan tenaga penanggulangan bencana	1 tim		1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1	1 Tim	1 tim	1 tim
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	5 menit		15	15	10	5	5	5 Menit	5 Menit	15	15
6	Kematian pasien ≤ 24 jam	≤ 2%		≤ 4%	≤ 4%	≤ 3%	≤ 2%	≤ 2%	13%	10%	≤ 4%	≤ 4%
7	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%
8	Kepuasan pelanggan	≥ 70%		≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	70%	0	≥ 70%	≥ 70%
	BEDAH SENTRAL											
1	Waktu tunggu operasi efektif	≤ 48 jam		≤ 48 jam	≤ 48 jam	≤ 48 jam	≤ 48 jam	≤ 48 jam	≤ 24 Jam	8,39 Jam	≤ 48 jam	≤ 48 jam
2	Kematian dimeja operasi	≤ 1%		≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	0%	0%	≤ 1%	≤ 1%
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6%		≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	0%	0	≤ 6%	≤ 6%
	RAWAT JALAN											
1	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesial										75%	100%
	a. Poli Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√	√
	b. Poli P. Dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%	78,62%	√	√
	c. Poli Kebidanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√	√
	d. Poli Bedah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√	√
2	Ketersediaan Pelayanan											
	a. Poli Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	b. Poli P. Dalam	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	c. Poli Kebidanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	d. Poli Bedah	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	e. Gigi	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	f. Mata	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	g. Gizi	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

	h. TB	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
3	Jam buka pelayanan Senin - Kamis : 08.00 - 13.00, Jumad : 08.00 - 11.00, Sabtu : 08.00 - 12.00											
	a. Senin sampai kamis 08.00 - 13.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	b. Jumad 08.00 - 11.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	c. Sabtu 08.00 - 12.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Waktu tunggu di rawat jalan			≤ 75 menit	≤ 75 menit							
	a. Poli Anak	≤ 60 menit							43,52 Menit	88,58 Menit	43,52 Menit	88,58 Menit
	b. Poli P. Dalam	≤ 60 menit							53,86 Menit	158,80 Menit	53,86 Menit	158,80 Menit
	c. Poli Kebidanan	≤ 60 menit							128,03 Menit	88,35 Menit	128,03 Menit	88,35 Menit
	d. Poli Bedah	≤ 60 menit							34,27 Menit	89,32 Menit	34,27 Menit	89,32 Menit
	e. Gigi	≤ 60 menit							53,50 Menit	77 Menit	53,50 Menit	77 Menit
	f. Mata	≤ 60 menit							44,99 Menit	28,07 Menit	44,99 Menit	28,07 Menit
	g. Gizi	≤ 60 menit							25 Menit	30 menit	25 Menit	30 menit
	h. TB	≤ 60 menit							100,5 Menit	74 Menit	100,5 Menit	74 Menit
	I. Umum	≤ 60 menit							66,93 Menit	88,33 Menit	66,93 Menit	88,33 Menit
5	Kepuasan pelanggan	≥ 90%		≥ 75%	≥ 75%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	0	80	≥ 75%	≥ 75%
6	Penanganan TB :											
	~ Penegakan diagnosis TB dengan pemeriksaan mikroskopik TB	≥ 60%		≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	100%	≥ 60%	≥ 60%
	~ Pencatatan dan pelaporan TB RS	≥ 60%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	RAWAT INAP											
	PENYAKIT DALAM											
1	Pemberian pelayanan :											
	~ Dokter / Dokter Spesialis	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	~ Perawat (Minimal D3)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penanggung jawab pasien oleh dokter	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jam visit dokter spesialis setiap hari kerja 08.00 - 14.00	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kejadian infeksi paska operasi	≤ 1,5%		4	3	2	2	1,5	0%	0%	4	3
5	Kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5%		15	10	5	2,5	1,6	0%	0%	15	10
6	Tidak adanya pasien jatuh selama perawatan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,80%	100%	100%
7	Kematian pasien ≤ 48 jam	≤ 0,5%		1,5	1	1	0,5	0,5	0%	3,82%	1,5	1
8	Kejadian pulang paksa	≤ 2%		3	2	2	2	2	0%	1,90%	3	2
9	Kepuasan pelanggan	≥ 95%		70	80	80	80	95	0%	0%	70	80
10	Penanganan TB :											
	~ Pencegahan diagnosa TB dengan pemeriksaan mikroskopik TB	≥ 80%		80	80	80	80	80	39%	82%	80	80
	~ Pencatatan dan pelaporan TB RS	100%		100	100	100	100	100	100%	100%	100	100
	RAWAT ANAK											
1	Pemberian pelayanan :											
	~ Dokter / Dokter Spesialis	100%							100%	100%	100%	
	~ Perawat (Minimal D3)	100%							93%	92,34%	100%	
2	Penanggung jawab pasien oleh dokter	100%							100,00%	98,06%	100%	
3	Jam visit dokter spesialis setiap hari kerja 08.00 - 14.00	100%							100%	100%	100%	
4	Kejadian infeksi paska operasi	≤ 1,5%							0%	0%	0%	
5	Kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5%							0%	0%	0%	
6	Tidak adanya pasien jatuh selama perawatan	100%							100%	100%	100%	
7	Kematian pasien ≤ 48 jam	≤ 0,5%							0,00%	0%	0%	
8	Kejadian pulang paksa	≤ 2%							0,01%	0%	0%	
9	Kepuasan pelanggan	≥ 95%							0,81	0%	-	
10	Penanganan TB :									-	-	
	~ Pencegahan diagnosa TB dengan pemeriksaan mikroskopik TB	≥ 80%							0%	0%	0%	
	~ Pencatatan dan pelaporan TB RS	100%							0%	0%	0%	
	RAWAT BEDAH											
1	Pemberian pelayanan :											
	~ Dokter / Dokter Spesialis	100%							100%	100%	100%	100%
	~ Perawat (Minimal D3)	100%							100%	100%	100%	100%
2	Penanggung jawab pasien oleh dokter	100%							100%	100%	100%	100%

3	Jam visit dokter spesialis setiap hari kerja 08.00 - 14.00	100%							100%	100%	100%	100%
4	Kejadian infeksi paska operasi	≤ 1,5%							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5%							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	Tidak adanya pasien jatuh selama perawatan	100%							100%	100%	100%	100%
7	Kematian pasien ≤ 48 jam	≤ 0,5%							0.01%	0.02%	0.01%	0.02%
8	Kejadian pulang paksa	≤ 2%							0.61%	0.04%	0.61%	0.04%
9	Kepuasan pelanggan	≥ 95%							-			
10	Penanganan TB :											
	~ Pencegahan diagnosa TB dengan pemeriksaan mikroskopik TB	≥ 80%							-	-		
	~ Pencatatan dan pelaporan TB RS	100%							-	-		
	RUANG PERSALINAN DAN PERINATOLOGI											
1	Kematian ibu bersalin karena											
	a. Perdarahan	≤ 1%		≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	0%	0%	≤ 1	≤ 1%
	b. Pre-eklamsi/eklamsi	≤ 30%		≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	0%	0%	≤ 30	≤ 30%
	c. Sepsis	≤ 0.2%		≤ 0.2%	≤ 0.2%	≤ 0.2%	≤ 0.2%	≤ 0.2%	0%	0%	≤ 0.2	≤ 0.2%
2	Pelayanan persalinan normal oleh : dokter Sp. OG/Dokter terlatih APN/APN?bidan TIM PONEK terlatih	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persalinan dengan penyulit oleh tim PONEK terlatih	80%		50	50	70	70	80	50%	50%	50%	50
4	Persalinan dengan tindakan operasi oleh dokter Sp.OG, dokter Sp Anak, dokter Sp. Anastesi	100%		75	75	75	100	100	94.45%	94.45%	100%	75
5	Keberhasilan penanganan BBLR 1500gr-2500gr	100%							91.12%	95.92%	100%	100%
6	Persalinan dengan Seksio Cesaria	≤20%							44.45%	45.89%	≤20%	≤20%
7	Keluarga berencana MANTAP dibandingkan semua peserta KB								77.96%	71.38%		
8	Konseling KB								100%	100%		
9	Kepuasan pelanggan	80%							-		80%	
	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)											
1	Pasien yang kembali ke Intensif dengan kausa yang sama < 72 jam	≤ 3%		≤ 3 Jam	≤ 3 Jam	≤ 3 Jam	≤ 3 Jam	≤ 3 Jam	0%	≤ 3	≤ 3 Jam	≤ 3 Jam
	Perawat di unit intensi oleh :											
	a. Dokter Spesialis Anastesi								3%	3%		
	b. Dokter spesialis sesuai dengan kasus	50%							0%	0%		
2	c. Perawatan D3 dengan sertifikat mahir	50%		30	30	30	50	75	10.07%	10.15%	30	30
	PELAYANAN RADIOLOGI											
1	Waktu tunggu hasil pelayanan torax foto	≤ 1 Jam		≤ 1 Jam	≤ 1 Jam	≤ 1 Jam	≤ 1 Jam	≤ 1 Jam	60 Menit	30 menit	≤ 1 Jam	≤ 1 Jam
2	Pelaksana eksterpasi hasil pemeriksaan rontgen oleh dokter spesialis radiologi	100%		0	0	0	100	100	0	0	0	0
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2%		≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	6.26%	4.16%	≤ 2%	≤ 2%
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	90%	90%	≥ 80%	≥ 80%
	PELAYANAN LABORATIUM											
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (kimia darah dan lab rutin)	≤ 140 menit		≤ 90 menit	≤ 90 menit	≤ 90 menit	≤ 90 menit	≤ 90 menit	83 Menit	99,8 Menit	≤ 90 menit	≤ 90 menit
2	Pelaksanaan eksterpasi hasil pemeriksaan lab oleh dokter spesialis patologi klinik	100%		0	0	0	0	100	33%	0	0	0
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 70%	≥ 70%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	70	-	≥ 70%	≥ 70%
	PELAYANAN OBAT, ALKES DAN BAHAN HABIS PAKAI											
1	Waktu tunggu pelayanan obat											
	a. Obat jadi	≤ 30 menit		≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	18,39 Menit	14,42 Menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit
	b. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian obat	≤ 60 menit		≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	43,36 Menit	29,60 Menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit
2	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian obat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	92.88%	99.86%	100%	100%
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 70%	≥ 70%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	86%	92.09%	≥ 70%	≥ 70%
	Penulisan Resep sesuai Formularium								90%	96.53%		
	PELAYANAN FISIOTERAPI											
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medic yang direncanakan	≤ 50%		≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	0%	0%	≤ 50%	≤ 50%
2	Tidak adanya kejadian kesalahan rehabilitasi medik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	-	-	≥ 80%	≥ 80%

	PELAYANAN REKAM MEDIK											
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan selesai	100%		100%	100%	100%	100%	100%	32.33%	43%	100%	100%
2	Kelengkapan Informed concent	100%		100%	100%	100%	100%	100%	82.22%	86.66%	100%	100%
3	Penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan	≤ 10 menit		≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	11.49 Menit	11,35 Menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit
4	Penyediaan dokumen rekam medik rawat inap	≤ 15 menit		≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	15,01 Menit	15,64 Menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit
	PELAYANAN DARAH											
1	Kebutuhan darah bagi setiap transfusi darah terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	90%	91.08%	100%	100%
2	Kejadian reaksi transfusi darah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK												
	PELAYANAN LOUNDRY/LINEN											
1	Tidak terjadinya kejadian linen hilang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	30.43%	36.81%	100%	100%
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	87.15%	93.39%	100%	100%
	PELAYANAN IPSRS											
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat (≤ 15 menit)	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	84.67%	84.92%	≥ 80%	≥ 80%
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	88.13%	86.08%	100%	100%
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi dalam waktu satu tahun	100%		100%	100%	100%	100%	100%	4.17%	22.33%	100%	100%
	PELAYANAN GIZI											
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	100%	100%	≥ 90%	≥ 90%
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%		≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	5.00%	5.73%	≤ 20%	≤ 20%
3	Kepuasan pelanggan	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	100%	100%	≥ 90%	≥ 90%
	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE											
1	Pelayanan ambulance atau kereta jenazah	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenasah di rumah sakit (≤ 30 menit)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%
	PELAYANAN IPAL DAN KESLING											
1	Baku mutu limbah cair											
	a. BOD	< 30 mg/l		< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	0%	0%	< 30 mg/l	< 30 mg/l
	b. COD	< 80 mg/l		< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	0%	0%	< 80 mg/l	< 80 mg/l
	c. TSS	< 30 mg/l		< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	0%	0%	< 30 mg/l	< 30 mg/l
	d. Ph	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	0%	0%	6 - 8	6 - 8
2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai aturan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN											
	Umum dan Kepegawain											
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%		50	60	100	100	100	100%	100%	50	60
2	Kelangkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥40		≥10	≥10	≥20	≥30	≥40	≥40	≥40	≥40	≥40
	Keuangan											
6	Cost Rovery	≥40		≥20	≥25	≥30	≥35	≥40	≥40	≥40	≥40	≥40
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%		100	100	100	100	100	100%	100%	100	100
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤120 menit		≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	0	0	≤120	≤120
	PPI											
1	Ada pengurus komite PPI (SK Direktur RS tentang struktur organisasi PPI)	100%		100	100	100	100	100	81%	81%	100	100
2	Anggota Tim PPI yang terlatih	75%		30	35	40	50	75	95%	95%	30	35
3	Tersedia alat pelindung diri (APD) di setiap instalasi	60%		30	35	40	50	60	100%	100%	30	35
4	Kegiatan survailance infeksi nosokomial/HAI (Health Care Associated Infektion) di rumah sakit minimal satu parameter	75%		75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	75%	75%

LAMPIRAN : IV

Tabel T-C. 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA

KABUPATEN LEMBATA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINRJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGNOSIS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						39,189,275,388.00							0.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						39,189,275,388.00							0.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						39,189,275,388.00							0.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi/ perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	-			100 %	39,189,835,388.00						-	0.00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			20 %	47,811,348.00			-	-	Masyarakat Umum	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10,334,670.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,573,264.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,815,159.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11,441,214.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9,648,235.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4,666,234.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah	-			20 %	19,075,961,712.00			-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/bulan	18,934,936,412.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	330,907,105.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9,216,160.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	11,003,039.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	-			20 %	73,718,339.00			-	-	Masyarakat Umum	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5,756,755.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	84,959,584.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penatasan pegawai perangkat daerah	-			20 %	20,809,839.00			-	-	Masyarakat Umum	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	20,809,839.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penatasan aktivitas sumber daya perangkat daerah	-			20 %	338,389,428.00			-	-	Masyarakat Umum	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61,221,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,702,428.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,900,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	135,442,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah	-			20 %	466,078,940.00			-	-	Masyarakat Umum	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Paket Meubel yang Disediakan				8 Unit	45,098,872.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	339,337,033.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	10,841,245.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			20 %	555,409,606.00			-	-	Masyarakat Umum	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15,804,385.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	539,605,221.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			20 %	493,937,750.00			-	-	Masyarakat Umum	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan disayankan Pajaknya				19 Unit	370,409,750.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	88,000,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	38,918,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Sarana Prasitas Layanan Kesehatan yang dipelihara	-			20 %	9,750,750,215.00						-	0.00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	-			20 % 20 %	9,278,483,415.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemberdayaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	287,403,276.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemberdayaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Diakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				20 Unit	200,804,400.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	430,000,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Tergelhara Sesuai Standar				20 Unit	280,000,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.03.03.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit															
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	813,841,025.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	7,303,514,611.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.03.03.2.03	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	-			20 % 20 %	35,000,000.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	38,000,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemberdayaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pemberdayaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Terselenggaranya asrama dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	-			20 % 20 %	442,288,800.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemberdayaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum dan RSUD Lewoleba	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penyajian Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	442,288,800.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemberdayaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum dan RSUD Lewoleba		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-			20 %	7,943,394,157.00						-	0.00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-			20 %	7,943,394,157.00			-	2. Pemberdayaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum dan RSUD Lewoleba	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.03.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Secara														

			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				450 Orang	7,943,334,157.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum dan RSUD Lewoleba		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4.	1.02.05	PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-			20 %	525,495,840.00							-	0.00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan rasio rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-			20 %	112,455,690.00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum dan RSUD Lewoleba	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	112,455,690.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum dan RSUD Lewoleba		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan rasio rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-			20 %	413,039,980.00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum dan RSUD Lewoleba	-	0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	413,039,980.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum dan RSUD Lewoleba		0.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	J U M L A H							39,180,275,399.00								0.00	

RENCANA KERJA
(R E N J A)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBAT TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan atas kemurahan hati-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata tahun 2024 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renstra OPD 2023 – 2026 dan dokumen perencanaan lain yang menjadi acuan kegiatan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 dikerjakan dengan fokus dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pekerjaan umum dan tata ruang.

Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata.

Lewoleba, 2023

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Lembata,

GERARDUS I. ATABURAN, ST,. MT
Pembina Tk. I
NIP.19740829 200501 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

....6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PUPR Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PUPR 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 34

3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37

BAB V PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Hal

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaiannya s/d tahun berjalan 7
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PUPR Kab. Lembata 15
3. Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2022 19
4. Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25
5. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PUPR 34
6. Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 38

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor ... Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.7
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dan Penerapan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lombata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Pelaksanaan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun Lakjuan	
											Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Lakjuan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.	03					URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung kapasitas perangkat daerah	100	%					100	100	100%
1.	03	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dok					2	2	17%
1.	03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen					2	2	17%
1.	03	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	%					5	5	25%
1.	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen					0,25	0,25	25%
1.	03	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan					0,25	0,25	25%

Kode						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026		Perkiraan Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan akhir Tahun 2027	Capaian dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Lokasi Program dan Kegiatan (Rincian Perangkat Daerah Tahun 2027)	Perkiraan Besaran Capaian Target Kinerja Terhadap Pagu Indikatif Kegiatan Berjalan	
											Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2026	Sisa Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7)	11=10/4
1	03	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56	Orang/Bulan					14	14	25%
1	03	01	2	02	01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/Bulan					14	14	25%
1	03	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1	Laporan					0.75	0.75	25%
1	03	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan					0.75	0.75	25%
1	03	01	2	05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan aktivitas sumber daya perangkat daerah	20	%					5	5	25%
1	03	01	2	05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	1	Paket					0.25	0.25	25%
1	03	01	2	05	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket					0.25	0.25	25%
1	03	01	2	05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan					0.25	0.25	25%
1	03	01	2	05		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan					3	3	25%
1	03	01	2	05	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan					3	3	300%

TENIA PUPS

Kode						Uraian/Sub-Unit Organisasi Pelaksana/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Program (Outcome)/Keluaran (Output)/Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Penyelesaian Bencana) Tahun 2026		Perkiraan Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Capaian dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Target Anggaran dan Kegiatan (Rencana Penyelesaian Bencana) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Penyelesaian Bencana Hingga Akhir Tahun Berjalan	
										Target Kinerja Penyelesaian Bencana Tahun 2025	Realisasi Kinerja Penyelesaian Bencana Tahun 2025	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025	Capaian Realisasi Terhadap Target Kinerja (%)
1						2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(8+9)	11=(10/5)
1	03	01	2	06		Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	25	%					8	1.25	25%
1	03	01	2	06	032	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit					10	1.5	15%
1	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Pemanfaatan Air Baku	10	%					4	4	35%
1	03	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air ,Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten	4	%					1	1	20%
1	03	02	2	01	##	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya penataan pagumat perangkat daerah	1	km					0	0.25	25%
1	03	02	2	02		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	4	%					1	1	25%
1	03	02	2	02	##	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5	km					0	0.125	25%
1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAS PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase Penduduk terenhsm air minum yang sehat dan layak	30	%					30	20	35%
1	03	03	2	05		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Tersedianya Jumlah Sambungan Rumah (SR)									
1	03	03	2	01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terfasilitasi melalui kegiatan Pedal Lanyo/SPAM Berbasis Masyarakat	50	SR					50	30	35%

Kode						Uraian/Sub-bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Komulatif Periode) Tahun 2025		Realisasi Kinerja Capaian Program dan Kerangka Uang Sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Kerangka Uang Program (Posisi Perubahan) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Capaian Program dan Kerangka Uang Sampai dengan Akhir Tahun Berjalan	
										Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		6	7	8=7/6	9	10	11
1	03	03	2	01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Beberapa Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu								
1	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Pelayanan sampah perkotaan/Ibu kota kecamatan yang memiliki sistem pengelolaan sampah	79.22	%				79.22	92.97	25%
1	03	04	2	01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan	1	Dokumen				0	0.25	25%
1	03	04	2	01	01	Penyusunan Kerangka, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerangka, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1	Dokumen				0	0.25	25%
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97.82	%				98.04	98.31	25%
1	03	05	2	01		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	15	%				4	3.75	25%
1	03	05	2	01	01	Penyusunan Kerangka, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerangka, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen				0.25	0.25	25%
1	03	05	2	01	06	Pembangunan/Pemeliharaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500	Rumah Tangga				125	125	25%
1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Bertambahnya Panjang tanggul dan atau kanal penyandak banjir yang dibangun	1	Km				0.25	0.25	25%
1	03	06	2	01		Kegiatan Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Drainase yang Terkaitbung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem jaringan drainase skala lingkungan, sehingga tidak terjadi genangan	0.5	Km				0.125	0.125	25%

Kode						Uraian/Sebutan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Program (Outcome)/Indikator Output Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Prestasi Pendapat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Pada Perangkat Daerah Tahun 2023	Kondisi Prediksi Capaian Tahun Periode Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
											Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=(5+9)	11=(10/4)
1	03	08	2	01	01	Penyusunan Rancana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rancana, kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang	1	Dokumen					1	0.25	25%
1	03	08	2	01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dibangun	50	Meter					10	10.5	70%
1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Jumlah gedung bangunan pemerintah yang representatif	4	Unit					1.0	1.0	25%
1	03	08	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terbangunnya Gedung Kantor untuk meningkatkan pelayanan masyarakat	25	Dokumen					0.25	0.25	25%
1	03	08	2	01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta implementasi SIMBG	Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta implementasi SIMBG	25	Unit	-				0.25	0.25	25%
1	03	08	2	01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/kota	1	Dokumen					0.25	0.25	25%
1	07	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)	47	%					11.75	11.75	25%
1	03	10	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	kondisi jalan yang terbangun	10	Km					2.5	2.5	25%
1	03	10	2	01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkini Kondisi Jalan/Jembatan	1	Dokumen					0.25	0.25	25%

KEPALA PUPR

Kode						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Hasil Program (Outcome)/Keluaran (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Periode Perampungan Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Posisi Perubahan) Daerah Tahun 2022	Kondisi Realisasi Capaian Target Kinerja Perampungan Hasil akhir periode Indikator	
											Target Kinerja Perampungan Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perampungan Daerah Tahun 2022	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan pada Tahun berjalan Tahun 2022	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
						1	2	3		4	5	6	7	8=(7/3)	9	10=(6+7+9)	11=(10/3)
1	03	09	2	01	08	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0	Km						2%	2%	20%
1	03	09	2	01	09	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1	Km						0.2	0.2	20%
1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	5	%						5	15	100%
1	03	09	2	04		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Tertib Usaha	15	%						5.25	2.75	85%
1	03	09	2	04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Laporan						0.25	0.25	25%
1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah	1	Dokumen						0.25	0.25	25%
1	03	09	2	01		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW dan RDTR dan regulasi turunannya	1	Dokumen						0.05	0.20	25%
1	03	09	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	Dokumen						0.05	0.05	25%
1	03	09	2	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang yang Terkait dalam RTR Wilayah	1	Dokumen						0.25	0.25	25%
2	03	09	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen						0.25	0.25	25%

RENJA PUPR

Kode						Uraian/Sub-sub Unsur Pelayanan Dasar/ Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Sasaran Program (Periode Pelayanan Standar) Tahun 2024	Kondisi Target Sasaran Program dan Kegiatan pada Tahun 2023	Target Sasaran Program (Periode Pelayanan Standar) Tahun 2025			Target Capaian pada Program (Periode Pelayanan Standar) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Periode Pelayanan Standar	
										Target Awal Perubahan Tahun 2025	Realisasi Pergeseran Tahun 2025	Target Akhir Perubahan Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Target Capaian Realisasi Target Kondisi (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03					Koordinasi dan Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang	1	Dokumen					0,25	0,25	25%
1	03	01	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen					0,25	0,25	25%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai denga Triwulan 2 Tahun 2023, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah PUPR
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 Tahun 2022	Tahun n-1 Tahun 2023	Tahun n Tahun 2024	Tahun n+1 Tahun 2025	Tahun n-2 Tahun 2022	Tahun n-1 Tahun 2023	Tahun n Tahun 2024	Tahun n-1 Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)			-	65.60	67.63	70	-	1.14	67.63	70	
2.	Persentase penduduk berakses air minum (%)			-	73	80	81	-	1.67	80	81	
3.	Persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)			-	73.70	73.98	74.28	-	3.15	73.98	74.28	
4.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			-	0.47	0.49	0.52	-	28.75	0.49	0.52	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
   - Rendahnya pelayanan akses air minum yang layak;
   - Belum seluruh jalan provinsi dalam kondisi mantap;
   - Rendahnya cakupan pelayanan air irigasi;
   - Ketidaksesuaian fungsi, struktur dan pola ruang;
   - Masih rendahnya daya saing sektor jasa konstruksi.
   - Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar aparatur.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
   - Tantangan :
     - Urusan Pekerjaan Umum bidang jalan dibutuhkan anggaran yang besar untuk membiayai 232,066 km (40,22%) kondisi jalan yang rusak dari total panjang jalan 577,034 km;
     - Di bidang irigasi terdapat 1565,00 ha luas areal potensial untuk cetakan sawah. Yang baru digunakan adalah 37,00 ha, sedangkan sisanya masih berupa lahan tidur dan belum dimanfaatkan;
     - Urusan Penataan Ruang masih harus menghasilkan beberapa Perda terkait Rencana Tata Ruang.
     - Tuntutan dan aspirasi semakin beragam, dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
   - Peluang :
     - Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan Pemerintah Pusat untuk mengatasi permasalahan – permasalahan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan juga atuaran – aturan lainnya yang lebih tinggi mempermudah dan membantu Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang dlam melayani masyarakat;
     - Dalam menangani dan mengatasi persoalan – persoalan yang terkait

- Dalam menangani dan mengatasi persoalan – persoalan yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata terdapat sumber – sumber pembiayaan selain APBD Kabupaten Lembata, yaitu yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi NTT;
- Semakin banyaknya program-program peningkatan sumber daya aparatur perencana dari kementerian/lembaga yang dapat diakses.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah :

- Belum tersedianya data sektoral yang lengkap dan terupdate serta terintegrasi;
- Belum tersedianya sistem pengolahan data yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran sehingga program/kegiatan yang telah direncanakan tidak semuanya ada dalam dokumen anggaran. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPD dan renstra perangkat daerah;
- Jumlah aparatur perencana yang tidak sebanding dengan dokumen/kajian terkait penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang harus dikerjakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Lampiran I

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2014 tanggal 30 [illegible]

Kabupaten Lombok

Kode	Keluaran (Output)					Hasil yang diharapkan					Catatan Teknis
	Tolok Ukur/Satuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Tahun Ini	Pagu Anggaran (Rp)	Tolok Ukur/Satuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Tahun Ini	Pagu Anggaran (Rp)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
1.03	DANA PENGEMBANGAN KEGIATAN PROGRAM DAERAH DAN PEMBINAAN DESA				30,597,191,788	DANA PENGEMBANGAN KEGIATAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMATANG [illegible]				32,313,595,000	
1.03.01	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi pemerintah dalam mendukung tugas pemerintah daerah		100	6,917,188,957	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi pemerintah dalam mendukung tugas		360	6,849,500,000	
1.03.01.2.01	Kegiatan Perumusan, Penggunaan, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggara Dokumen Perumusan, Penggunaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Lombok	12	652,532,875	Kegiatan Perumusan, Penggunaan, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggara Dokumen Perumusan, Penggunaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Lombok	12	64,460,875	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Dok. Lombok	3	180,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	Dok. Lombok	3	68,850,875	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Dokumen RKA	Dok. Lombok	1	9,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Dokumen RKA	Dok. Lombok	1	-	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Dok. Lombok	1	12,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Dokumen RKA	Dok. Lombok	1	-	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Dokumen DPA	Dok. Lombok	1	12,237,201	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Dokumen DPA	Dok. Lombok	1	-	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	Dok. Lombok	1	15,296,754	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	Dok. Lombok	1	-	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKU) dan Laporan Hasil Verifikasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKU)	Dok. Lombok	2	8,809,610	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKU)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKU) dan Laporan Hasil Verifikasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKU)	Dok. Lombok	2	-	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok. Lombok	1	3,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok. Lombok	1	-	
1.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya layanan pelayanan administrasi pemerintah dalam mendukung tugasnya**	**Kab. Lombok**	**20**	6,663,742,956	**Kegiatan Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya layanan pelayanan administrasi pemerintah dalam mendukung tugasnya**	**Kab. Lombok**	**20**	3,401,742,956	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Org. Lombok	11	5,161,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Org. Lombok	11	3,144,000,000	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok. Lombok	1	256,500,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok. Lombok	1	256,500,000	

1.03.01.2.01	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pembinaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lombok Barat**	**4**	80.666.000	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pembinaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lombok Barat**	**4**	**82.856.000**	
1.03.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lombok Barat**	**25**	**215.660.221**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lombok Barat**	**25**	**218.660.221**	
1.03.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Kab. Lombok Barat**	**25**	197.305.350	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Kab. Lombok Barat**	**25**	140.101.250	

1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Pelayanan air baku	Kab. Lombok	12	1.720.480.266	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Pelayanan air baku	Kab. Lombok	10	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	TerlindungnyaPengelolaan Sumber Daya Air ,Jaringan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten	Kab. Lombok	4	3.514.000.000	Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	TerlindungnyaPengelolaan Sumber Daya Air ,Jaringan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten	Kab. Lombok	4	
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Dokumen Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konservasi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konservasi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dok. Lombok	1	500.000.000	Penyusunan Dokumen Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konservasi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konservasi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dok. Lombok	1	
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang Dibangun	Kab. Lombok	1	716.357.000	Pembangunan Saluran Irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang Dibangun	Dok. Lombok	1	
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Jaringan dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Jaringan dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Kab. Lombok	1	833.291.000	Pembangunan Jaringan dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Jaringan dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Dok. Lombok	1	
1.03.02.2.01.21	Konservasi Sumber Daya Lainnya	Panjang Saluran yang Dikonservasi	Kab. Lombok	1	1.016.814.250	Konservasi Sumber Daya Lainnya	Panjang Saluran yang Dikonservasi	Dok. Lombok	1	
1.03.03.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaman Lainnya	Dok. Lombok	4	216.440.150	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha, dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaman Lainnya	Dok. Lombok	4	
1.03.03.2.02.06	Peningkatan Jaringan Irigasi Pemerintah	Panjang Jaringan Irigasi Pemerintah yang Ditingkatkan	Kab. Lombok	1	100.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Pemerintah	Panjang Jaringan Irigasi Pemerintah yang Ditingkatkan	Dok. Lombok	1	
1.03.03.2.02.20	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemerintah	Panjang Jaringan Irigasi Pemerintah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Lombok	1	11.544.150	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemerintah	Panjang Jaringan Irigasi Pemerintah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Lombok	1	
1.04.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Lombok	80	15.188.004.700	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	Kab. Lombok	83	
1.04.03.2.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok	20	15.188.004.700	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok	30	
1.04.03.2.03.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terpasang melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Lombok	100	15.188.004.700	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terpasang melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Lombok	200	

1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pemanfaatan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pemanfaatan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Barat	2	100.000.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pemanfaatan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pemanfaatan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Barat	1	[illegible]	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga terlayani	Kab. Lombok Barat	67,58	6.838.294.201	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga terlayani	Kab. Lombok Barat	67,03	8.521.786.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Barat	15	6.838.294.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Barat	15	8.521.786.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terfasilitasinya Panjang tanggul dan alur banjir pengendali banjir yang dibangun	Kab. Lombok Barat	0	618.818.204	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terfasilitasinya Panjang tanggul dan alur banjir pengendali banjir yang dibangun	Kab. Lombok Barat	0	1.500.000.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Barat		618.818.204	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Barat		1.500.000.000	
1.08.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terfasilitasinya Jumlah gedung bangunan pemerintah yang representatif		4	100.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terfasilitasinya Jumlah gedung bangunan pemerintah yang representatif		4	100.000.000	

	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)	(XII)
1.00.00.2.02	Penyelenggaraan Sangguan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Sangguan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Lombok	23	180.000.000	Penyelenggaraan Sangguan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Sangguan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Lombok	23	180.000.000	
1.00.00.2.03	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi [illegible]	Jumlah Penyelenggaraan Penertiban Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi [illegible]	Kab. Lombok	23	[illegible]	Penyelenggaraan Penertiban Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi [illegible]	Jumlah Penyelenggaraan Penertiban Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi [illegible]	Kab. Lombok	23	[illegible]	
1.00.00	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG LINGKUNGANNYA**	**Meningkatnya Penertiban Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**Kab. Lombok**	2	50.000.000	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Meningkatnya Penertiban Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**Kab. Lombok**	**2**	**50.000.000**	
1.00.00.2.03	**Penyelenggaraan Penertiban Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Penertiban Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lombok**	1	50.000.000	**Penyelenggaraan Penertiban Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Penertiban Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lombok**	**1**	**200.000.000**	
1.00.00.2.03.01	Evaluasi Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Berumah, Kawasan Permukiman, Kawasan Quasi Perkotaan Pedesaan dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Lombok	1	[illegible]	Pemetaan, Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Lombok	1	[illegible]	
						Pedoman Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Berumah, Kawasan Permukiman, Kawasan Quasi Perkotaan Pedesaan dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Lombok	1	[illegible]	
1.00.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten dalam (mantap) baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)	Kab. Lombok	47	52.749.390.001	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten dalam (mantap) baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)	Kab. Lombok	47	52.482.374.000	
1.00.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok	47	52.749.390.001	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok	47	52.482.374.000	
1.00.10.2.01.01	Survey Kondisi Jalan Lombok	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan Lombok	Kab. Lombok	1	500.000.000	Survey Kondisi Jalan Lombok	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan Lombok	Kab. Lombok	1	400.000.000	
1.00.10.2.01.02	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi/Rekonstruksi Jalan	Kab. Lombok	10	34.249.390.001	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi Rekonstruksi Jalan	Kab. Lombok	10	50.082.374.000	
1.00.10.2.01.19	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala	Kab. Lombok	1	1.000.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala	Kab. Lombok	1	1.000.000.000	
1.00.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyedia Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	Kab. Lombok	15	149.824.471	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyedia Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	Kab. Lombok	15	100.000.000	
1.00.11.2.02	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Lombok	25	99.825.161	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Lombok	25	-	
1.00.11.2.02.19	Pelatihan Dasar Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Kab. Lombok	25	99.825.161	Pelatihan Dasar Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Kab. Lombok	25	-	
1.00.11.2.03	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok	1	50.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok	1	-	
1.00.11.2.03.20	Pengumpulan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Bursa Kerja	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Bursa Kerja	Kab. Lombok	1	50.000.000	Pengumpulan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Bursa Kerja	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Bursa Kerja	Kab. Lombok	1	-	
1.00.11.2.04	Pengumpulan Tertib Usaha, Tertib Pengembangan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengumpulan Tertib Usaha, Tertib Pengembangan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Lombok	1	50.000.000	Pengumpulan Tertib Usaha, Tertib Pengembangan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengumpulan Tertib Usaha, Tertib Pengembangan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Lombok	1	100.000.000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat Pengurangan Sub Kegiatan dan Pengurangan pagu indikatif pada beberapa Sub Kegiatan;
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan;
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rencana awal RKPD sebesar Rp.85.807.198.788,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 83.241.838.990,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada tahun rencana 2024, terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan / Usulan Musrenbang	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
				Lokasi	Target Capa'an Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Persentase air baku	%			
	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Paket	Kali Komak/ Kel. Lewoleba Tengah. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang *Dioperasikan dan* Dipelihara	Paket	Dl. Letuboro/ Kec. Lebatukan	1	Musrembang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	%		80	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota	%	Kab. Lembata	20	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Unit	Kab. Lembata		
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Kelurahan Lewoleba Barat		SR	Kelurahan Lewoleba Barat. Kec. Nubatukan	65	Musrembang
	Pembelian spare part mesin pompa air		Paket	Desa Belobatang. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pembangunan bak resevoar di Desa Puor B		Paket	Desa Puor B. Kec. Wulandoni	1	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Lamalera A		SR	Desa Lamalera A. Kec. Wulandoni	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Lamalera B		SR	Desa Lamalera B. Kec. Wulandoni	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Pasir Putih		SR	Desa Pasir Putih. Kec. Nagawutung	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Lolong		SR	Desa Lolong. Kec. Nagawutung	25	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Atuwalupang		SR	Desa Atuwalupang. Kec. Buyasuri	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Leuburi		SR	Desa Leuburi. Kec. Buyasuri	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Atulaleng		SR	Desa Atulaleng. Kec. Buyasuri	80	Musrembang

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan / Usulan Musrenbang	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Tubungwalang		SR	Desa Tubungwalang. Kec. Buyasuri	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Benihading		SR	Desa Benihading. Kec. Buyasuri	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Meluwiting		SR	Desa Meluwiting. Kec. Omesuri	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Hingalamamengi		SR	Desa Hingalamamengi. Kec. Omesuri	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Roma		SR	Desa Roma. Kec. Omesuri	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Dolulolong		SR	Desa Dolulolong. Kec. Omesuri	25	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa *Banitobo*		SR	Desa Banitobo. Kec. Lebatukan	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Lewoeleng		SR	Desa Lewoeleng. Kec. Lebatukan	80	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Tapobali		SR	Desa Tapobali. Kec. Lebatukan	25	Musrembang
	Pengembangan jaringan distribusi dan SR di Desa Todonara		SR	Desa Todonara. Kec. Ile Ape Timur	40	Musrembang
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tinggal bersanitasi**	%			
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	%			
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD yang disusun	Dokumen	Kab. Lembata	1	Musrembang
1.03.04.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tanki septik				
	Pembangunan tanki septik skala individual minimal 50 KK di Desa Palilolon		Paket	Desa Palilolon. Kec. Ile Ape	1	Musrembang
	Pembangunan tanki septik skala individual minimal 50 KK di Desa Lamawara		Paket	Desa Lamawara. Kec. Ile Ape	1	Musrembang
	Pembangunan tanki septik skala individual minimal 50 KK di Desa Dulitukan		Paket	Desa Dulitukan. Kec. Ile Ape	1	Musrembang
	Pembangunan tanki septik skala individual minimal 50 KK di Desa Riangbao		Paket	Desa Riangbao. Kec. Ile Ape	1	Musrembang
	Pembangunan tanki septik skala individual minimal 50 KK di Desa Nubaboli		Paket	Desa Nubaboli. Kec. Lebatukan	1	Musrembang

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan / Usulan Musrenbang	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	
	Pembangunan tanki septik skala individual minimal 50 KK di Desa Banitobo		Paket	Desa Banitobo. Kec. Lebatukan	1	Musrembang
	Pembangunan tanki septik skala individual minimal 50 KK di Desa Lamalela		Paket	Desa Lamalela. Kec. Lebatukan	1	Musrembang
	Pembangunan tanki septik skala individual minimal 50 KK di Desa Benihading		Paket	Desa Benihading. Kec. Buyasuri	1	Musrembang
	Pembangunan tanki septik skala individual minimal 50 KK di Desa Meluwiting		Paket	Desa Meluwiting. Kec. Omesuri	1	Musrembang
03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Bertambahnya Jumlah gedung bangunan pemerintah yang representatif**	**Unit**			
03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Unit**			
03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	Kab. Lembata	1	Musrembang
03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Meningkatnya Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**%**			
03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**Kab. Lembata**	**1**	
03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan diKawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Kab. Lembata	1	Musrembang

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan / Usulan Musrenbang	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)**	%			
10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terselnggaranya Jalan Kabupaten/Kota**	%			
2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dok	Kab. Lembata	1	Musrembang
2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	Kab. Lembata		
	Peningkatan jalan samping gereja solavide menuju lasitarda (Segmen rumah bapak zakarias paokuma - rumah bapak yos tukan (lanjutan)		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan teknis peningkatan jalan samping gereja solavide menuju lasitarda (Segmen rumah bapak zakarias paokuma - rumah bapak yos tukan (lanjutan)		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis peningkatan jalan samping gereja solavide menuju lasitarda (Segmen rumah bapak zakarias paokuma - rumah bapak yos tukan (lanjutan)		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan jalan lingkungan depan rumah bapak Nasrun Neboq - masjid Nurul Hidayah Wangatoa		Paket	Kel. Selandoro. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan teknis peningkatan jalan lingkungan depan rumah bapak Nasrun Neboq - masjid Nurul Hidayah Wangatoa		Paket	Kel. Selandoro. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis peningkatan jalan lingkungan depan rumah bapak Nasrun Neboq - masjid Nurul Hidayah Wangatoa		Paket	Kel. Selandoro. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Roli Liman - Sp. Lasitarda (Lanjutan)		Paket	Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Roli Liman - Sp. Lasitarda (Lanjutan)		Paket	Kec. Nubatukan	1	Musrembang

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan / Usulan Musrenbang	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Roli Liman - Sp. Lasitarda (Lanjutan)		Paket	Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Lingkungan Sp. Trans Nagawutung - Sp. Trans Atadei - TK. Sta Dominika Waikomo (Lanjutan)		Paket	Kel. Lewoleba Barat. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Sp. Trans Nagawutung - Sp. Trans Atadei - TK. Sta Dominika Waikomo (Lanjutan)		Paket	Kel. Lewoleba Barat. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Sp. Trans Nagawutung - Sp. Trans Atadei - TK. Sta Dominika Waikomo (Lanjutan)		Paket	Kel. Lewoleba Barat. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Gereja Bethel - Workshop PU (Segmen Sp. Depan Rumah Bapak Hengky Kua menuju SMANSA dan Sp. Depan Tower ke aarah barat menuju SMANSA)		Paket	Kelurahan Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Gereja Bethel - Workshop PU (Segmen Sp. Depan Rumah Bapak Hengky Kua menuju SMANSA dan Sp. Depan Tower ke aarah barat menuju SMANSA)		Paket	Kelurahan Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata - Gereja Bethel - Workshop PU (Segmen Sp. Depan Rumah Bapak Hengky Kua menuju SMANSA dan Sp. Depan Tower ke aarah barat menuju SMANSA)		Paket	Kelurahan Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Lingkungan Wangatoa (Segmen Ande Peurape - Markus Suku)		Paket	Kel. Selandoro. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Wangatoa (Segmen Ande Peurape - Markus Suku)		Paket	Kel. Selandoro. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Wangatoa (Segmen Ande Peurape - Markus Suku)		Paket	Kel. Selandoro. Kec. Nubatukan	1	Musrembang

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan / Usulan Musrenbang	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	
	Peningkatan Jalan Rumah Bapak Dalen Masan - TPU Lamahora		Paket	Kel. Lewoleba Timur. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Rumah Bapak Dalen Masan - TPU Lamahora		Paket	Kel. Lewoleba Timur. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Rumah Bapak Dalen Masan - TPU Lamahora		Paket	Kel. Lewoleba Timur. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Lingkungan Rumah Bapak Begu Ibrahim menuju Rumah Bapak Anwar Sadat		Paket	Kel. Selandoro. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Rumah Bapak Begu Ibrahim menuju Rumah Bapak Anwar Sadat		Paket	Kel. Selandoro. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Rumah Bapak Begu Ibrahim menuju Rumah Bapak Anwar Sadat		Paket	Kel. Selandoro. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Pekuburan Waikomo menuju PAUD Ina Boi Bluwa (Lanjutan)		Paket	Kel. Lewoleba Timur. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Pekuburan Waikomo menuju PAUD Ina Boi Bluwa (Lanjutan)		Paket	Kel. Lewoleba Timur. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Pekuburan Waikomo menuju PAUD Ina Boi Bluwa (Lanjutan)		Paket	Kel. Lewoleba Timur. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Sp. Rumah Bapak Gaspar Lasar ke arah barat (Lanjutan)		Paket	Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Rumah Bapak Gaspar Lasar ke arah barat (Lanjutan)		Paket	Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Rumah Bapak Gaspar Lasar ke arah barat (Lanjutan)		Paket	Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Lingkar Leudanung (Rumah Ali Bungalaleng)		Paket	Desa Leudanung. Kec. Omesuri	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Leudanung (Rumah Ali Bungalaleng)		Paket	Desa Leudanung. Kec. Omesuri	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Leudanung (Rumah Ali Bungalaleng)		Paket	Desa Leudanung. Kec. Omesuri	1	Musrembang

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan / Usulan Musrenbang	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	
	Peningkatan Jalan Kawasan Eropaun (Depan Asrama CB)		Paket	Kel. Lewoleba. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kawasan Eropaun (Depan Asrama CB)		Paket	Kel. Lewoleba. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kawasan Eropaun (Depan Asrama CB)		Paket	Kel. Lewoleba. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Baopana - Nubaboli - Katakeja		Paket	Kec. Atadei	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Baopana - Nubaboli - Katakeja		Paket	Kec. Atadei	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Baopana - Nubaboli - Katakeja		Paket	Kec. Atadei	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Rumah Bapak Frans Borgias - Pekuburan Waikomo		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Rumah Bapak Frans Borgias - Pekuburan Waikomo		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Rumah Bapak Frans Borgias - Pekuburan Waikomo		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rumah Bapak Lamber Galot - Rumah Bapak Kanis Baka		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rumah Bapak Lamber Galot - Rumah Bapak Kanis Baka		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Samping Rumah Bapak Gabriel Bala Warat - Rumah Bapak Lamber Galot - Rumah Bapak Kanis Baka		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Peningkatan Jalan Sp. Pasar Timur - Depan Gereja Lamahora - Belakang RSUD - PLN - Sp. Trans Lembata (Segmen Rujab Bupati - Kantor Bupati)		Paket	Kel. Lewoleba Timur. Kec. Nubatukan	1	Musrembang

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan / Usulan Musrenbang	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Pasar Timur - Depan Gereja Lamahora - Belakang RSUD - PLN - Sp. Trans Lembata (Segmen Rujab Bupati - Kantor Bupati)		Paket	Kel. Lewoleba Timur. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Pasar Timur - Depan Gereja Lamahora - Belakang RSUD - PLN - Sp. Trans Lembata (Segmen Rujab Bupati - Kantor Bupati)		Paket	Kel. Lewoleba Timur. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
3.10.2.0110	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Paket	Kab. Lembata	1	Renja SKPD
	Pemeliharaan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watobuah		Paket	Kec. Nubatukan - Kec. Wulandoni	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watobuah		Paket	Kec. Nubatukan - Kec. Wulandoni	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Sp. Lima Wangatoa - Puor - Sp. Watobuah		Paket	Kec. Nubatukan - Kec. Wulandoni	1	Musrembang
	Pemeliharaan Jalan Kawasan SMA I Nubatukan - Komak (Segmen Jembatan Komak - Pintu Masuk SMANSA)		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kawasan SMA I Nubatukan - Komak (Segmen Jembatan Komak - Pintu Masuk SMANSA)		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Kawasan SMA I Nubatukan - Komak (Segmen Jembatan Komak - Pintu Masuk SMANSA)		Paket	Kel. Lewoleba Utara. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pemeliharaan Jalan Samping Rumah Bapak Piter Ujan - Sp. Lasitarda		Paket	Kel. Lewoleba. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Samping Rumah Bapak Piter Ujan - Sp. Lasitarda		Paket	Kel. Lewoleba. Kec. Nubatukan	1	Musrembang
	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Samping Rumah Bapak Piter Ujan - Sp. Lasitarda		Paket	Kel. Lewoleba. Kec. Nubatukan	1	Musrembang

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah:

1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Penyelenggaraan Jalan yang diturunkan pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan survey kondisi jalan/jembatan, rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jalan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja PUPR Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar	Penyediaan akses air minum layak dan aman	80%
			Penyediaan akses layanan sanitasi layak dan aman	67,63%
			Penyediaan akses jaringan jalan dalam kondisi baik	0,49%
		Meningkatnya infrastruktur ekonomi	Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan	73,98%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappelitbangda Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Tahun 2024 sebanyak 10 Program, 17 Kegiatan, 30 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 83.241.838.990,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daaerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 6.034.889,990,-.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.250.000.000,-.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 11.972.865.000,-.
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 750.000.000,-.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, terdiri dari 1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.531.706.000,-.
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.500.000.000,-
7. Program Penataan Bangunan Gedung, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-.
8. Program Penyelenggaraan Jalan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 52.452.378.000,-.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-.
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,-.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN YANG AKAN DIRENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						93.241.838.906,00							57.093.202.676,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.407.631.636,00							11.100.333.680,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						13.907.631.636,00							11.100.333.680,00	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah				100 %	775.025.030,00							828.320.000,00	
	1.03.01.2.01	Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	80.262.975,00			-	-	-		16.000.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	80.262.975,00	- Kab. Lembata, Nusatukan, Lewoleba	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	-	-		16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				33 %	219.833.999,00			-	-	-		272.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	266.520.000,00	- Kab. Lembata, Nusatukan, Lewoleba	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	-	-		256.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Akhir Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.315.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksanannya pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				4 Laporan	83.999.828,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.10.01.2.03.09	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	83.999.828,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.10.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusun aktifitas sumber daya perangkat daerah*				20 %	215.685.221,00			-	-	-		335.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.827.371,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	37.871.850,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	149.881.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				25 %	140.401.243,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	140.401.243,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	-	-		233.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (BSA)	Meningkatnya Pemanfaatan Air Baku				15 %	700.000.000,00							900.000.000,00		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengairan Pertisi pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air, Bangunan Pengairan Pertisi dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten				4 %	750.000.000,00			Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan mitigasi bencana			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.12	Pembangunan Kanal Banjir															
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				1 KM	750.000.000,00	- Kab. Lombok Barat Kecamatan Senya Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA (SPESIFIC GRANT)	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan mitigasi bencana			922.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	1.03.09	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga terlayani				57,40 %	2.221.700.000,00							7.000.000.000,00		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga terlayani (%)				18 %	8.631.700.000,00			Memperkuat kelembagaan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2.Memberikan ruang yang seimbang yang berkualitas dan berbasis luang			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur	DANA OTONOMI KHUSUS DAN URUSAN BERSAMA (SPESIFIC GRANT)	Memperkuat kelembagaan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2.Memberikan ruang yang seimbang yang berkualitas dan berbasis luang	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat															
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				500 Rumah Tangga	7.781.700.000,00	- Kab. Lombok Barat - Kab. Lombok Timur	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA INSENTIF DAERAH, DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA (SPESIFIC GRANT)	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan ma memahatkan aspek lingkungan hidup, kesehatan dan mitigasi bencana 2.Memberikan ruang yang seimbang yang berkualitas dan berbasis luang			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						853.999.000,00							0,00		

1	1.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dan/atau/Lainnya Panjang tanggul dan atau kanal pengendali banjir yang dibangun	3 %		3 %	1 Unit	500.000.000,00						3 %	3,00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.00.00.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan perkotaan baik sejak/ pembangun	2 Dokumen		0 Dokumen	0,3 KM	500.000.000,00			Mempertaha nkan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemeliharaan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial budaya dan mitigasi bencana 2. Memberdayakan SDM yang berkualitas dan bertanya yang	Masyarakat Kab Lombok	1 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.00.00.2.01.01	Penyusunan Rancana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	Mempertaha nkan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemeliharaan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial budaya dan mitigasi bencana 2. Memberdayakan SDM yang berkualitas dan bertanya yang	Masyarakat Kab Lombok		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						13.997.631.036,00							11.100.333.000,00	
	1.03.00.2.01.16	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	

											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				150 M	1.000.000.000,00	- Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Gerung Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Perbaikan gutter infrastruktur yang belum sesuai dengan ramah lingkungan Hidup, lewat system dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan infrastr Untuk Pelayanan dasar dengan ramah lingkungan Hidup, lewat system dan mitigasi bencana			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	1.00.38	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bertambahnya Jumlah gedung bangunan pemerintah yang representatif				9 Unit	550.000.000,00							600.000.000,00	
	1.00.38.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terbangunnya Gedung Kantor untuk mendukung pelayanan masyarakat				25 Unit	300.000.000,00			Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Perbaikan gutter infrastruktur yang belum sesuai dengan ramah lingkungan Hidup, lewat system dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan infrastr Untuk Pelayanan dasar dengan ramah lingkungan Hidup, lewat system dan mitigasi bencana			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.00.38.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Penataan Bangunan Gedung, serta implementasi SIMBG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENDATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengurusan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Izin Prinsip Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pendataan dan Gedung serta implementasi SIMBG				25 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA (SPESIFIC GRANT)	Mempercepat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana 1.Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA (SPESIFIC GRANT)	Mempercepat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana 1.Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)				97 %	2.000.000.000,00							1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jalan yang ditangani				12 KM	2.100.000.000,00			Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan upaya lingkungan hidup, kesehatan dan inklusi sosial 1. Meningkatkan infrastruktur untuk Pelayanan dasar dengan memperhatikan upaya lingkungan hidup, kesehatan dan inklusi sosial			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Jumlah Data dan Informasi Terhadi Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	600.000.000,00	- Kab. Lembata Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA (BERSIFAT GRANT)	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan upaya lingkungan hidup, kesehatan dan inklusi sosial 1. Meningkatkan infrastruktur untuk Pelayanan dasar dengan memperhatikan upaya lingkungan hidup, kesehatan dan inklusi sosial			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				1 KM	1.500.000.000,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DANA UTILISAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	Memperbaiki Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemeliharaan jalan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, tanggap bencana 1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi				10 %	100.000.000,00								20.000.000,00	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Tertib Usaha				10 %	100.000.000,00			Memperbaiki Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemeliharaan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tata Usaha, Tata Pengelenggaraan, dan Tata Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Lembata, Nusatenggara, Lewoleba	DANA PERIMBANGAN/ DAERAH	Mempertahankan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemilihan gunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana 1. Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah				1 Dokumen	300.000.000,00							358.251.680,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW dan RRTR dan regulasi turunannya				1 Dokumen	19.598.540,33			Mempertahankan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemilihan gunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana 1. Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Kesiapsiagaan Kesiagaan dan Penyusun Perencanaan Penanggulangan Bencana Penaliran Udara				1 Dokumen	19.983.210,00	- Sub. Lambela, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA KEGIATAN DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembuat dokumen infrastruktur yang terkait dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan infrastruktur untuk Pelayanan dasar dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang dan Kelerkaitan Antarwilayah dalam RTR Wilayah	-			1 Dokumen	215.669.220,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembuat dokumen infrastruktur yang terkait dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan infrastruktur untuk Pelayanan dasar dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana	-		161.913.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Reaktasi Ruang				Dokumen	64.743.725,00	- Kab. Lembata, Satuan Kesehatan Semua Kel/Desa	DANA INSENTIF DAERAH	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan E-comm Dan Pelayanan Dasar	3. Hambat pembangunan yang harus sesuai dengan rencana mempertimbangkan dampak lingkungan hidup, mitigasi bencana 1. Mewangkan Infrastruktur Prioritas dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, mitigasi bencana	-		78.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-						69.834.267.990,00					-		69.792.525.190,00	
5	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung layanan perangkat daerah				100 %	8.288.964.990,00							8.000.968.590,00	
	1.03.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 %	3.184.908.990,00							3.184.908.990,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang/Bulan	3.184.908.990,00	- Kab. Lembata, Kabupaten Lewolebat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	-	-		3.184.908.990,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	74.066.670,00			-	-	-		325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	74.033.973,33	- Kab. Lembata, Kabupaten Lewolebat	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	-	-		308.002.320,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Pemanfaatan air baku				10 %	303.000.000,00							100.000.000,00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				4 %	100.000.000,00			Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.30.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Termuskan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,5 KM	900.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA (SPESIFIC GRANT)	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1.03.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum				80 %	11.072.063.000,00							6.588.255.311,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terpasangnya Jumlah Sambungan Rumah (SR)				200 Unit	11.072.063.000,00			Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana 3.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.588.000.311,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	

											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Pokir Kerja/SRMI Berbasis Masyarakat				200 SR	11.929.477.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS Fisik, DANA INSENTIF DAERAH	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemberi pinan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2 Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing				5.958.206.911,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.03	Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan														
			Pembangunan Prasarana SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				12 Liter/Detik	256.395.000,00	- Kab. Lembata, Rincian akan Lewotolo	DANA OTONOMI KHUSUS-DANA URUSAN BERSAMA (SPESIFIC GRANT)	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemberi pinan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2 Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing				1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PENYEHATAHAN REGIONAL	**Meningkatnya Persentase wilayah pemukiman/ibu kota kecamatan yang memiliki sarana pengelolaan sampah**				**75,25 %**	**750.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Penyehatahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah penduduk yang dilayani melalui layanan pengurangan volume sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan				20 %	750.000.000,00			Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2 Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Penyehatahan TPA/TPST/IPAL/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Bidang Pengelolaan Persampahan TPA/TPS 3R/TPS/ 2R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	750.000.000,00	- Kab. Lembata, Kabupaten Lewotobi	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA (SPESIFIC GRANT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Penyediaan Dasar	2.Mendorong lahan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
0	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kemantapan (>60 Km/Lajur)				47 %	91.593.378.000,00							44.385.014.260,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jalan yang terbangun				10 KM	50.352.378.000,00			-	3. Pemeliharaan Infrastruktur yang terkait dengan mempertahankan kondisi lingkungan hidup, hasil asahan dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan mempertahankan kondisi lingkungan hidup, kwalitas udara dan mitigasi bencana	-		44.385.014.260,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi, Kebijakan, Strategi dan Teknis Dalam Pengelolaan Perlengkapan PRASARANA DAN SARANA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibiayai				1 Dokumen	750.000.000,00	- Kab. Lembata - Kab. Nagekeo - Lewoleba	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [DTC DAK] [GRANT]	Mempermudah Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing			93.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
0	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatkan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kewenangan (%) Kondisi				47 %	93.392.378.000,00							44.392.014.392,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jalan yang terbangun				10 KM	92.592.378.000,00				3. Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kearifan lokal dan mitigasi bencana 7. Meningkatkan efektivitas Pelayanan dasar dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kearifan lokal dan mitigasi bencana			44.392.014.392,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAAN RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TRA/TPS/TPA/TPS 3R/TPS Keterangan Kabupaten/Kota yang Ditentukan				1 Dokumen	700.000.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Kabupaten Lawoleba	DANA OTONOMI KHUSUS DANA UNUSAN BERSAMA (SPESIFIC GRANT)	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Mendorong inovasi SDM yang berkualitas dan berdaya saing			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)				47 %	90.202.275.000,00							84.355.014.390,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jalan yang ditangani				13 KM	90.202.275.000,00				2. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan mempertahankan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan mempertahankan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana				84.355.014.390,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.09	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SSFA/TPS 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	750.000.000,00	- Kab. Lombok Barat,Kab. Lombok	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA (SPESIFIC GRANT)	Mempertahankan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemasan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Meningkatnya Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)**				**47 %**	**50.352.375.000,00**							**44.355.014.395,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jalan yang terbangun				10 KM	50.352.375.000,00			-	3. Perbaikan gunan infrastruktur yang berkul anjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan infrastruktur dasar Pelayanan dasar dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana			44.355.014.395,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.09	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN PAGU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Pangang Jalan yang Diperlukan Rekonstruksi Jalan				10 KM	50.382.378.000,00	- Kab. Lamsel, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER/ KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	-	3. Perlakuan pada infrastruktur yang belum dimiliki dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasan dan nilai-nilai kearifan lokal 1. Berimplikasi pada Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasan dan nilai-nilai kearifan lokal	-	-	44.393.014.360,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	JUMLAH							93.241.630.560,00							67.693.262.879,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Lembata,

Gerardus I. Ataburan, ST.,MT
Pembina Tk. I
NIP.19740829 200501 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKA
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBA
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : 800.1.1.3/150/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan S/D Tahun 2023 (Tahun berjalan) Kabupaten Lembata

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintaahan Daerah Kabupaten/ Kota									
1.04.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD dan dokumen perubahannya	8,00	-	-	-	-	2,00	2,00	25%
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	4,00	-	-	-	-	1,00	1,00	25%
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Prubahan RKA	4,00	-	-	-	-	1,00	1,00	25%
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA	4,00	-	-	-	-	1,00	1,00	25%
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	4,00	-	-	-	-	1,00	1,00	25%
1.04.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD	8,00	-	-	-	-	2,00	2,00	25%
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja	16,00	-	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	96,00						24	24	25%
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	48,00						12	12	25%
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	4,00	-	-	-	-	1	1	1	25%
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/semester yang tersusun	72,00	-	-	-	-	18	18	18	25%
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD yg tersusun	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										
1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang milik Daerah (RKBMD)SKPD yg tersusun	4,00	-	-	-	-	1	1	1	25%
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Pengguna (LBPS dan LBPT)yg tersusun	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.03.06	Penatausaha Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang tersusun	4,00	-	-	-	-	1	1	1	25%
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										
1.04.01.2.06.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolahan administrasi Kepegawaian	4,00	-	-	-	-	1	1	1	25%
1.04.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	128,00	-	-	-	-	32	32	32	25%
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	52,00	-	-	-	-	13	13	13	25%

1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	120.000,00	-	-	-	-	30.000	30.000	25%
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Surat Kabar	8,00					-	-	-
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	460,00	-	-	-	-	115	115	25%
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
1.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Sarana Dan Prasarana yang tersedia	4,00	-	-	-	-	1	1	25%
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai	1.200,00	-	-	-	-	300	300	25%
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telephon,Meteran Air dan Meteran listrik	48,00	-	-	-	-	12	12	25%
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih	64,00	-	-	-	-	16	16	25%
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	28,00	-	-	-	-	7	7	25%
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	8,00	-	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	16,00	-	-	-	-	4	4	25%
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.01.2.09.10	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/ Rujab	Jumlah Gedung yang disewa	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02	**Program Pengembangan Perumahan**									

1.04.02.2.01	Pendataan Pengelolaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota										
1.04.02.2.01.01	Indentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah dok data rumah dilokasi rawan bencana dan lokasi yg berpotensi terkena relokasi program kab/kota	4,00	-	-	-	-	1	1	25%
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dok data rumah korban bencana Kab/kota kejadian yg blm tertangani	4,00	-	-	-	-	1	1	25%
1.04.02.2. 03	**Pembangunan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**										
1.04.02.2. 03.01	Rehabilitas Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	24,00	-	-	-	-	6	6	25%
1.04.03	**Program Kawasan Permukiman**										
1.04.03.2.01	**Penerbitan Ijin Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**										
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan per	Jumlah Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yg tersusun dan/atau terreview serta terlegalisasi	8,00	-	-	-	-	2	2	25%
1.04.04	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**										
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota**										
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dngan luas di bawah 10 Ha	Jumlah Rumah tdk laya huni yang terbangun	480,00	-	-	-	-	120	120	25%

1.04.05	**Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**									
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum diperumahan untuk menunjang fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, arana dan utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian	4,00	-	-	-	-	1	1	25%
2.10.05	**Program Penyeleaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**									
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugiaan dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,00	-	-	-	-	1	1	25%
2.10.07	**Program Penetapan Tanah Ulayat**									
2.10.07.2.01	**Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
2.10.07.2.01.03	penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen penetapan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati	4,00	-	-	-	-	1	1	25%
2.10.08	**Program Pengelolaan tanah kosong**									
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong**									
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaann inventarisasi tanah kosong	Jumlah Laporan tanah kosong yang di inventarisasi	4,00	-	-	-	-	1	1	25%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang diisi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam Tabel 2.1.

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran berdasarkan realisasi capaian kinerja hingga tahun 2023 dan perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai Tahun 2024, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan antara lain :
    a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangun. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Kegiatan ini sasaran pembagian tanah pemda hak ulayat serta pemanfaatannya. kegiatan ini tidak mencapai target karena Ada Konflik External Antara Masyarakat Pemilik Tanah Ulayat dan Pemerintah .
    b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Kota.Kegiatan ini tidak tercapai target karna kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai Tata Cara Pembentukan Kelompok Swadaya masyarakat dan Material-Marial lokal yang harus di Swadaya oleh Penerima Bantuan untuk Pembangunan Rumah layak huni. dan Kurangnya Pengawasan dari Konsultan Pengawas dan Keterlambatan Pengadaan Bahan Bangunan..
    c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Kegiatan ini tidak

tercapai target karna kurangnya pemahaman dari masyarakat Mengenai Cara Kerja Kelompok Swadaya Masyakarat (KSM) dan Keterlambatan Pengadaan Material Lokal maupun Material Non Lokal.

2. Realisasi Program / kegiatan yang memenuhi target kegiatan adalah :
    1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
            - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
            - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
            - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
            - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA
            - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA
            - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
            - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        b. Kegiatan Administrasi Keuangan
            - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
            - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
            - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
            - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
            - ✓ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
        c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
            - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
            - ✓ Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
        d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik
   - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Meubel
   - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

3. Realisasi Program dan Kegiatan yang Melebihi target Kinerja Hasil / Keluaran yang di rencanakanadalah Program / Kegiatan yang Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten kota.
4. Faktor – faktor Penyebab tidak Tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja Program/Kegiatan.adalah Terutama Masalah Keuangan terbatas dan Potongan anggaran yang terjadi di Perangkat Daerah.
5. Implikasi yang timbul terhadap Terget Capaian Kinerja Rensra Perangkat Daerah adalah Capaian Renstra yang sudah direncanakan di tahun 2020 dan

Tidak Tercapai target sehingga Capaian Kinerja Renstra tidak terealisasi sesuai target.

6. Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi Faktor-faktor tidak tercapainya target kinerja di maksud adalah:
    a. Merencanakan Penggunaan Anggaran Pengeluaran secara Efektif, Efisien dan sesuai Perioritas dalam Mendukung tupoksi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
    b. Merencanakan Program kegiatan sesuai Anggaran yang tersedia
    c. Memaksimalkan Potensi sumber daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam Melaksanakan Program / Kegiatan yang telah direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas:

"Meyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Seta Urusan pemerintahan Wajib Bidang Pertanahan Sesuai Ketentun Peraturan Prundang-Undangan yang berlaku"

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan Kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang pertanahan ;
3) Pembinaan dan Penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4) Pembinaan Administrasi perkantoran dan Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5) Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6) Koordinasi, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini membutuhkan penerapan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sampai dengan akhir anggaran belum menjadi acuan secara menyeluruh karena ada beberapa Permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam Urusan Perumahan Permukiman adalah

1. Masih terdapat banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Lembata
2. Terbatasnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menyediakan perumahan bagi penduduk miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
3. Keterbatasan data/informasi pendukung sebagai basis formula perhitungan.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dapat diikuti pada **Tabel 2.2.**

	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata Anal
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)	(11)	(12)	(1
	Jumlah Rumah Layak Huni.				125	125	125		14	125	125	
	Menurunnya Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan khusunya kota Lewoleba.				15%	20%	30%		7,50%	20,00%	30,00%	
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.				65,60%	67,63%	70,00%					Sud termut PU
	Meningkatnya Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				15%	20%	20%		7,50%	20,00%	20,00%	
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.				4,24%	4,50%	4,75%					Sud termut PU
	Persentase penduduk berakses air minum.				75,00%	80,00%	81,00%					Sud termut PU
	Jumlah sarana layanan sistem air limbah.				35,95	36,21	36,86					Sud termut PU
	Luas tanah milik Pemerintah Daerah.				10.907.177,5	10.907.177,5	10.907.177,5		5.453.589	10.907.178	10.907.178	
	Jumlah tanah Pemerintah Daerah bersertifikat.				10,00	10,00	10,00		44	10	10	
	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan olch Pemerintah Kabupaten.				15,00	15,00	25,00		15	15,00	25,00	

Dari **Tabel 2.2** di atas diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata tidak mencapai target, dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran dari pusat ke daerah melalui DAK Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilah Rendah untuk Tahun 2023 masih menunggu ketersediaan Dokumen Perencanaan RP3KP.
2. Terbatasnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menyediakan perumahan bagi penduduk miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
3. Keterbatasan data/informasi pendukung sebagai basis formula perhitungan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan :

- Belum tersedianya berbagai regulasi yang bersifat operasional tentang pertanahan milik pemda dan wilayah Permukiman kumuh;.
- Terbatasnya keterampilan teknis aparatur dalam bidang tugasnya terutama berkaitan dengan Bidang Perumahan, Permukiman dan pertanahan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
- Belum tersedianya suatu master plan maupun dokumen perencanaan yang menyeluruh di bidang Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan;
- Terbatasnya prasarana dan sarana aparatur dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran

b. Dampak terhadap paparan Visi dan Misi Bupati Lembata, terhadap capaian program nasional/ internasional seperti NSPK,SPM dan SGDs adalah:

- Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
- Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- Menjamin ketersediaan Akses rumah layak huni bagi masyarakat yang

berpenghasilan rendah;

- Meningkatnya prosentase luas kawasan yang didukung dengan PSU.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan :

- Tantangan :
  - Penataan manajemen berbasis Aplikasi di mana data terkompterisasi sangat modern;
  - Inovasi SDM yang handal dalam pengembangan program dan kegiatan;
  - Kompetensi SDM yang kurang memadai dalam mereview data dan mengaplikasikan secara komputerisasi;
  - Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat, pusat permukiman dan pusat pusat pertumbuhan wilayah.
- Peluang :
  - Teknologi, informasi dan komunikasi terkait perencanaan dan penganggaran yang semakin berkembang (*e-planning*/SIPD).
  - Semakin banyaknya program-program peningkatan sumber daya aparatur perencana dari kementerian/lembaga yang dapat diakses.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata, adalah :

- Belum tersedianya update data yang berkaitan dengan luas kawasan kumuh maupun jumlah Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Lemahnya kepastian hukum terkait kepemilikan status tanah antara Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- Belum tersedianya sistem pengolahan data yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Belum ada kesamaan interpretasi yang jelas terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata dan Dinas Pekerjaan Umum sehingga program/kegiatan yang telah direncanakan tidak semuanya ada dalam dokumen anggaran. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPD dan renstra perangkat daerah.
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tusi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Lembata sehingga kajian terhadap data dan informasi hasil monev tersebut belum memberikan kontribusi yang baik terhadap penyusunan dokumen perencanaan.

- Menimnya peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek dan diklat terkait tusi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lembata

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Pagu dana Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKINAN DAN PERTANAHAN				10.299.080.720	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKINAN DAN PERTANAHAN				10.299.080.720	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				2.499.080.720	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				2.499.080.720	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	20%	2.499.080.720	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	20%	2.499.080.720	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20%	20.000.176	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20%	20.000.176	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Lewoleba	Jumlah Dokumen Renja dan DokumenPerubahan Renja	2 dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Lewoleba	Jumlah Dokumen Renja dan DokumenPerubahan Renja	2 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	3.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Pagu dana Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Lewoleba	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Lewoleba	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA	Lewoleba	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	5.500.176	Koordinasi dan penyusunan DPA	Lewoleba	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	5.500.176	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA	Lewoleba	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA	Lewoleba	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Lewoleba	Jumlah Dokumen Lakip dan LPPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Lewoleba	Jumlah Dokumen Lakip dan LPPD	2 Dokumen	3.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lewoleba	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD yang tersusun (4 Triwulan)	4 Dokumen	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lewoleba	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD yang tersusun (4 Triwulan)	4 Dokumen	3.000.000	
	Administrasi Keuangan		**Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja SKPD**	**20%**	**2.354.080.897**	**Administrasi Keuangan**		**Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja SKPD**	**20%**	**2.354.080.897**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lewoleba	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	14 bulan	2.249.080.489	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lewoleba	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	14 bulan	2.249.080.489	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lewoleba	Terbayarnya Honorarium Adminstrator Pengelola Keuangan SKPD	12 bulan	100.000.325	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lewoleba	Terbayarnya Honorarium Adminstrator Pengelola Keuangan SKPD	12 bulan	100.000.325	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	3.600.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	3.600.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Pagu dana Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	18 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	18 Dokumen	1.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lewoleba	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD yang tersusun	2 Dokumen	1.000.083	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lewoleba	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD yang tersusun	2 Dokumen	1.000.083	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	20%	23.985.400	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	20%	23.985.400	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD yang disusun	1 dokumen	3.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD yang disusun	1 dokumen	3.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lewoleba	Jumlah dokumen Laporan Barang Pengguna (LBPS dan LBPT) yang tersedia	2 dokumen	20.985.400	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lewoleba	Jumlah dokumen Laporan Barang Pengguna (LBPS dan LBPT) yang tersedia	2 dokumen	20.985.400	
	AdministrasKepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah	1 dok	2.000.000	AdministrasKepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah	1 dok	2.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu dana Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian	Lewoleba	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	1 dok	2.000.000	Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian	Lewoleba	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	1 dok	2.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	20%	41.069.393	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	20%	41.069.393	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lewoleba	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia	32 jenis	3.027.702	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lewoleba	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia	32 jenis	3.027.702	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lewoleba	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	13 Jenis	6.602.591	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lewoleba	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	13 Jenis	6.602.591	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lewoleba	Jumlah barang cetak dan penggandaan	27000 lembar, 50 buku	5.884.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lewoleba	Jumlah barang cetak dan penggandaan	27000 lembar, 50 buku	5.884.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lewoleba,Kupang Jakarta	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	115 kali	25.555.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lewoleba,Kupang Jakarta	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	115 kali	25.555.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20%	23.988.604	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20%	23.988.604	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lewoleba	Jumlah penyediaan benda pos	300 lembar	5.008.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lewoleba	Jumlah penyediaan benda pos	300 lembar	5.008.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Lewoleba	Terbayarnya jasa telepon, listrik, air	12 bulan	15.791.304	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Lewoleba	Terbayarnya jasa telepon, listrik, air	12 bulan	15.791.304	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Pagu dana Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Pending
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lewoleba	Jumlah Bahan dan Alat Kebersihan Kantor yang Tersedia	16 jenis	3.088.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lewoleba	Jumlah Bahan dan Alat Kebersihan Kantor yang Tersedia	16 jenis	3.088.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	20%	34.056.250	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**20%**	**34.056.250**	
	Penyedisan Jasa Pemeliharaan, Baiya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lewoleba	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak Oprasi	7 unit	30.406.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lewoleba	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak Operasi	7 unit	30.406.250	
	Pemeliharaan Meubel	Lewoleba	Jumlah Meubel yang terpelihara	5 unit	-	Pemeliharaan Meubel	Lewoleba	Jumlah Meubel yang terpelihara	5 unit	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Lewoleba	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	3 unit	3.650.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Lewoleba	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	3 unit	3.650.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PRMUKIMAN				7.315.039.498	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PRMUKIMAN**				7.315.039.498	
	Program Pengembangan Perumahan		Prosentase Pembangunan Rumah **Layak Huni Untuk Masyarakat** berpenghasilan Rendah,Korban Bencanadan Rekolasi Program Pemerintah	40,77%	398.066.129	Program Pengembangan Perumahan		Prosentase **Pembangunan Rumah** Layak Huni Untuk **Masyarakat** berpenghasilan Rendah,Korban Bencanadan Rekolasi Program Pemerintah	40,77%	398.066.129	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu dana indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				398.066.129	**Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				398.066.129	
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Kecamatan Ile Ape	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab	14 unit	398.066.129	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Kecamatan Ile Ape	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab	14 unit	398.066.129	Usulan Musren Di Kec Ile Ape
	Program Kawasan Permukiman		**Prosentase Rpeermukiman yang tertata**	**25%**	**150.000.000**	**Program Kawasan Permukiman**		**Prosentase Rpeermukiman yang tertata**	**25%**	**150.000.000**	
	Penataan dan peningkatan kwalitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawa 10 ha		**Terlaksananya penyusunan dan/atau reviue serta terlegalisasinya rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman dan permukimanan kumuh**	**1 dok**	**150.000.000**	**Penataan dan peningkatan kwalitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawa 10 ha**		**Terlaksananya penyusunan dan/atau revIue serta terlegalisasinya rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman dan permukimanan kumuh**	**1 dok**	**150.000.000**	
	Penyususnan / revIue/legalisasi kebijakan bidang PKP	Lembata	Jumlah dokumen kebijakan,bidang PKP yang tersusun/terrevIue/terlegalisasi	1 dok	150.000.000	Penyususnan / revIue/legalisasi kebijakan bidang PKP	Lembata	Jumlah dokumen kebijakan,bidang PKP yang tersusun/terrevIue/terlegalisasi	1 dok	150.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Pagu dana Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Prosentase Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah,Korban Bencana dan Rekolasi Program Pemerintah		4.112.933.355	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Prosentase Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat berpeneghasilan Rendah,Korban Bencana dan Rekolasi Program Pemerintah		4.112.933.355	
	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah,Korban Bencana dan Rekolasi Program Pemerintah		4.112.933.355	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah,Korban Bencana dan Rekolasi Program Pemerintah		4.112.933.355	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan berKembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 ha		Jumlah Rumah Layak Huni yang di bangun	120 Unit	4.112.933.355	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan berKembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 ha		Jumlah Rumah Layak Huni yang di bangun	120 Unit	4.112.933.355	
	Program Peningkatan Prasarana ,Sarana dan Utilitas Umum		Prosentasi Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman yang di-dukung dengan sarana-prasarana dan utilitas umum (PSU)	45,86%	2.654.040.014	Program Peningkatan Prasarana ,Sarana dan Utilitas Umum		Prosentasi Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman yang di-dukung dengan sarana-prasarana dan utilitas umum (PSU)	45,86%	2.654.040.014	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu dana Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Prasarana,Sarana dan Utilitas yang di bangun		2.654.040.014	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Prasarana,Sarana dan Utilitas yang di bangun		2.654.040.014	
	Penyediaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi hunian	9 Kecamatan	Jumlah Sarana Air Bersih , Sanitasi Dasar dan Pebgolahan Limbah		2.654.040.014	Penyediaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi hunian	9 Kecamatan	Jumlah Sarana Air Bersih , Sanitasi Dasar dan Pebgolahan Limbah		2.654.040.014	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				484.960.502	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				484.960.502	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Meningkatnya Kualitas Penatan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0,56%	484.960.502	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Meningkatnya Kualitas Penatan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0,56%	484.960.502	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyeselesian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah		484.960.502	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyeselesian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah		484.960.502	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Nubatukan, Kec. Ile Ape dan Kec. Nagawutung	Jumlah Pengadaan Tanah, Pilar, Sertifikat, Papan Nama	2 Bidang Tanah,100 Bh Pilar, 20 Sertifikat, 10 Buah Papan Nama	484.960.502	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Nubatukan, Kec. Ile Ape dan Kec. Nagawutung	Jumlah Pengadaan Tanah, Pilar, Sertifikat, Papan Nama	2 Bidang Tanah,100 Bh Pilar, 20 Sertifikat, 10 Buah Papan Nama	484.960.502	
	- Pengadaan Tanah Posyandu	Kelurahan Lewoleba Selatan		1 paket	-	- Pengadaan Tanah Posyandu	Kelurahan Lewoleba Selatan		1 paket	-	
	Ganti Rugi Tanah Rumah Jabatan Bupati Lembata	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur		1 Bidang Tanah	3.679.191.078	Ganti Rugi Tanah Rumah Jabatan Bupati Lembata	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur		1 Bidang Tanah	3.679.191.078	
	Ganti Rugi Tanah Jalan Masuk Gelanggang Olahraga	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		1 Bidang Tanah	16.237.533	Ganti Rugi Tanah Jalan Masuk Gelanggang Olahraga	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		1 Bidang Tanah	16.237.533	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Pagu dana Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pengadaan Pilar					Pengadaan Pilar					
	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Perumahan PNS Golongan III	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Tengah		20 Buah	6.000.000	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Perumahan PNS Golongan III	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Tengah		20 Buah	6.000.000	
	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Posyandu Lamahora	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur		8 Buah	2.400.000	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Posyandu Lamahora	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur		8 Buah	2.400.000	
	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Lokasi TPU Kolikleteng	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur		48 Buah	14.400.000	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Lokasi TPU Kolikleteng	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur		48 Buah	14.400.000	
	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Lokasi GOR di Desa Pada	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		20 Buah	2.400.000	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Lokasi GOR di Desa Pada	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		20 Buah	2.400.000	
	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Lokasi Panas Bumi	Kecamatan Atadei Desa Nubahaeraka		4 Buah	1.200.000	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Lokasi Panas Bumi	Kecamatan Atadei Desa Nubahaeraka		4 Buah	1.200.000	
	Pengadaan Papan Nama					Pengadaan Papan Nama					
	SDI Lamamanu	Kecamatan Wulandoni Desa Lamamanu,		1 paket	4.000.000	SDI Lamamanu	Kecamatan Wulandoni Desa Lamamanu		1 paket	4.000.000	
	POSKESDES Lamamanu	Kecamatan Wulandoni Desa Lamamanu,		1 paket	4.000.000	POSKESDES Lamamanu	Kecamatan Wulandoni Desa Lamamanu		1 paket	4.000.000	
	SMPN Wulandoni	Kecamatan Wulandoni Desa Wulandoni		1 paket	4.000.000	SMPN Wulandoni	Kecamatan Wulandoni Desa Wulandoni		1 paket	4.000.000	
	SDI Labanobol	Kecamatan Nubatukan Desa Watokobu		1 paket	4.000.000	SDI Labanobol	Kecamatan Nubatukan Desa Watokobu		1 paket	4.000.000	
	SDI Tobitalerek	Kecamatan Nubatukan Desa Watokobu		1 paket	4.000.000	SDI Tobitalerek	Kecamatan Nubatukan Desa Watokobu		1 paket	4.000.000	
	SDI Pada	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		1 paket	4.000.000	SDI Pada	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		1 paket	4.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu dana Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Puskesmas Lewoleba di Desa Pada	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		1 paket	4.000.000	Puskesmas Lewoleba di Desa Pada	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		1 paket	4.000.000	
	Aula SDN Wangatoa	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Selandoro		1 paket	4.000.000	Aula SDN Wangatoa	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Selandoro		1 paket	4.000.000	
	SMPN I Omesuri	Kecamatan Omesuri Desa Balauring		1 paket	4.000.000	SMPN I Omesuri	Kecamatan Omesuri Desa Balauring		1 paket	4.000.000	
	SMPN I Buyasuri	Kecamatan Omesuri Desa Balauring		1 paket	4.000.000	SMPN I Buyasuri	Kecamatan Omesuri Desa Balauring		1 paket	4.000.000	
	Sertifikasi Tanah Polindes	Kecamatan Nagawutung Desa Wuakerong		1 Sertifikat	5.000.000	Sertifikasi Tanah Polindes	Kecamatan Nagawutung Desa Wuakerong		1 Sertifikat	5.000.000	
	Sertifikasi Tanah TK. Ade Irma Nasution	Kecamatan Omesuri Desa Balauring		1 Sertifikat	5.000.000	Sertifikasi Tanah TK. Ade Irma Nasution	Kecamatan Omesuri Desa Balauring		1 Sertifikat	5.000.000	
	Pemecahan Sertifikat Tanah SDI Holorian Untuk SMP SATAP Holorian dan PAUD Holorian	Kecamatan Ile Ape Desa Beutaran		3 Sertifikat	5.000.000	Pemecahan Sertifikat Tanah SDI Holorian Untuk SMP SATAP Holorian dan PAUD Holorian	Kecamatan Ile Ape Desa Beutaran		3 Sertifikat	5.000.000	
	Sertifikasi Tanah SDI Umaleu	Kecamatan Buyasuri Desa Umaleu		1 Sertifikat	5.000.000	Sertifikasi Tanah SDI Umaleu	Kecamatan Buyasuri Desa Umaleu		1 Sertifikat	5.000.000	
	Sertifikasi Tanah SDI Ile Wutung	Kecamatan Lebatukan Desa Banitobo		1 Sertifikat	5.000.000	Sertifikasi Tanah SDI Ile Wutung	Kecamatan Lebatukan Desa Banitobo		1 Sertifikat	5.000.000	
	Sertifikasi Tanah SDI Udak	Kecamatan Nubatukan Desa Udak Melomata		1 Sertifikat	5.000.000	Sertifikasi Tanah SDI Udak	Kecamatan Nubatukan Desa Udak Melomata		1 Sertifikat	5.000.000	
	Sertifikasi Tanah SDI Tobotani dan SMP Satap Tobotani	Kecamatan Buyasuri Desa Tobotani		1 Sertifikat	5.000.000	Sertifikasi Tanah SDI Tobotani dan SMP Satap Tobotani	Kecamatan Buyasuri Desa Tobotani		1 Sertifikat	5.000.000	
	Sertifikasi Tanah SDI Waowala dan SMP Satap Waowala	Kecamatan Buyasuri Desa Tobotani		1 Sertifikat	5.000.000	Sertifikasi Tanah SDI Waowala dan SMP Satap Waowala	Kecamatan Buyasuri Desa Tobotani		1 Sertifikat	5.000.000	
	Sertifikasi Tanah Pemda di 95 Lokasi					Sertifikasi Tanah Pemda di 95 Lokasi					

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.10.152.678.826,00 sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 10.299.080,720,00.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lembata

Daerah : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
2	3	4	5	6
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKINAN DAN PERTANAHAN			**7.800.000.000**	
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			**7.315.039.498**	Sesuai dengan RPJMD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PRMUKIMAN			***7.315.039.498***	
Program Pengembangan Perumahan		**Prosentase Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah,Korban Bencanadan Rekolasi Program Pemerintah**	398.066.129	
Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			398.066.129	
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Kecamatan Ile Ape	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab	398.066.129	Usulan Musren Di Kec Ile Ape
	Kecamatan Ile Ape		90.000.000	Usulan Musren Di Kec Ile Ape
	Desa Lamawara		50.000.000	Usulan Musren Di Kec Ile Ape
	Desa Bungamuda		50.000.000	usulan Musren di Kec Ile Ape
	Desa Lamawolo		40.000.000	usulan Musren di Kec Ile Ape
Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	9 Kecamatan	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di bangun	-	
Program **Kawasan Permukiman**		**Prosentase Rpeermukiman yang tertata**	**150.000.000**	
Penataan dan peningkatan kwalitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawa 10 ha		**Terlaksananya penyusunan dan/atau reviue serta terlegalisasinya rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman dan permukimanan kumuh**	**150.000.000**	
Penyususnan / reviue/legalisasi kebijakan bidang PKP		Jumlah dokumen kebijakan,bidang PKP yang tersusun/terreviue/terlegalisasi	150.000.000	
Program **Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**		**Prosentase Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah,Korban Bencana dan Rekolasi Program Pemerintah**	**4.112.933.355**	
Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		**Prosentase Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah,Korban Bencana dan Rekolasi Program Pemerintah**	**4.112.933.355**	

	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
	2	3	4	5	6
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan berKembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 ha		Jumlah Rumah Layak Huni yang di bangun	4.112.933.355	
		Kecamatan Ile Ape Desa Waowala		200.000.000	usulan Musren di Kecamatan Ile Ape
		Kecamatan Ile Ape Desa Lamawolo		120.000.000	Usulan Musren Di kecamatan Ile Ape Timur
		Kecamatan Ile Ape Desa Jontona		140.000.000	usulan Musren di Kecamatan Ile Ape Timur
		Kecamatan Nagawutung Desa Ile Boli		200.000.000	Usulan Musren di Kecamatan Nagawutung
		Kecamatan Omesuri Desa Normal		200.000.000	usulan Musren di Kecamatan Omesuri
		Kecamatan Buyasuri Desa Kalikur WL		200.000.000	usulan Musren di Kecamatan Buyasuri / Pokok Pikiran Anggota Dewan Dapil III
		Kecamatan Buyasuri Desa Umaleu		40.000.000	Pokok Pikiran Anggota Dewan Dapil III
		Kecamatan Buyasuri Desa Tobotani		40.000.000	Pokok Pikiran Anggota Dewan Dapil III
		Kecamatan Buyasuri Desa Kaohua		40.000.000	Pokok Pikiran Anggota Dewan Dapil III
		Kecamatan Buyasuri Desa Leuburi		40.000.000	Pokok Pikiran Anggota Dewan Dapil III
	Program Peningkatan Prasarana ,Sarana dan Utilitas Umum		**Prosentasi Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman yang di-dukung dengan sarana-prasarana dan utilitas umum (PSU)**	**2.654.040.014**	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Jumlah Prasarana,Sarana dan Utilitas yang di bangun**	**2.654.040.014**	
	Penyediaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi hunian	9 Kecamatan	Jumlah Sarana Air Bersih , Sanitasi Dasar dan Pebgolahan Limbah	2.654.040.014	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			**484.960.502**	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		**Meningkatnya Kualitas Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**484.960.502**	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Penyeselasian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah**	**484.960.502**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Nubatukan, Kec. Ile Ape dan Kec. Nagawutung	Jumlah Pengadaan Tanah, Pilar, Sertifikat, Papan Nama	484.960.502	
	- Pengadaan Tanah Posyandu	Kelurahan Lewoleba Sealatan		-	
	Ganti Rugi Tanah Rumah Jabatan Bupati Lembata	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba		3.679.191.076	

	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
	2	3	4	5	6
	Ganti Rugi Tanah Jalan Masuk Gelanggang Olahraga	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		16.237.533	
	Pengadaan Pilar				
	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Perumahan PNS Golongan III	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Tengah		6.000.000	
	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Posyandu Lamahora	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur		2.400.000	
	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Lokasi TPU Kolikleteng	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Lewoleba Timur		14.400.000	
	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Lokasi GOR di Desa Pada	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		2.400.000	
	Pengadaan Pilar Tanah untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Lembata di Lokasi Panas Bumi	Kecamatan Atadei Desa Nubahaeraka		1.200.000	
	Pengadaan Papan Nama				
	SDI Lamamanu	Kecamatan Wulandoni Desa Lamamanu,		4.000.000	
	POSKESDES Lamamanu	Kecamatan Wulandoni Desa Lamamanu,		4.000.000	
	SMPN Wulandoni	Kecamatan Wulandoni Desa Wulandoni		4.000.000	
	SDI Labanobol	Kecamatan Nubatukan Desa Watokobu		4.000.000	
	SDI Tobitalerek	Kecamatan Nubatukan Desa Watokobu		4.000.000	
	SDI Pada	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		4.000.000	
	Puskesmas Lewoleba di Desa Pada	Kecamatan Nubatukan Desa Pada		4.000.000	
	Aula SDN Wangatoa	Kecamatan Nubatukan Kelurahan Selandoro		4.000.000	
	SMPN I Omesuri	Kecamatan Omesuri Desa Balauring		4.000.000	
	SMPN I Buyasuri	Kecamatan Omesuri Desa Balauring		4.000.000	
	Sertifikasi Tanah Polindes	Kecamatan Nagawutung Desa Wuakerong		5.000.000	Usulan Musren Di kecamatan Nagawutung
	Sertifikasi Tanah TK. Ade Irma Nasution	Kecamatan Omesuri Desa Balauring		5.000.000	
	Pemecahan Sertifikat Tanah SDI Holorian Untuk SMP SATAP Holorian dan PAUD Holorian	Kecamatan Ile Ape Desa Beutaran		5.000.000	Usulan Musren Di kecamatan Ile Ape
	Sertifikasi Tanah SDI Umaleu	Kecamatan Buyasuri Desa Umaleu		5.000.000	
	Sertifikasi Tanah SDI Ile Wutung	Kecamatan Lebatukan Desa Banitobo		5.000.000	
	Sertifikasi Tanah SDI Udak	Kecamatan Nubatukan Desa Udak Melomata		5.000.000	
	Sertifikasi Tanah SDI Tobotani dan SMP Satap Tobotani	Kecamatan Buyasuri Desa Tobotani		5.000.000	
	Sertifikasi Tanah SDI Waowala dan SMP Satap Waowala	Kecamatan Buyasuri Desa Tobotani		5.000.000	
	Sertifikasi Tanah Pemda di 95 Lokasi				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, adalah:

1. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
2. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024, terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Lembata.	1.820
			Terlaksananya Pembangunan RLH untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Korban Bencana, Relokasi Program Kabupaten/Kota.	125
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.	Menurunnya persentase kawasan kumuh perkotaan khususnya kota Lewoleba.	35%
			Meningkatnya persentase pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	35%
			Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.	8,24

			Meningkatnya persentase Rumah Layak Huni.	65%
2.	Mengoptimalkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Meningkatnya kualitas penataan, penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah.	Luas tanah milik pemerintah daerah.	32.721.532,50
			Jumlah tanah milik pemerintah daerah bersertifikat.	517.387
			Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten/kota.	30

1.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda di Tahun 2024 sebanyak 7 Program, 20 Kegiatan, 35 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 10.299.080.720,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.444.984.146,-.
2. Program Pengembangan Perumahan, terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 398.066.129,00.
3. Program Kawasan Permukiman, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 150.000.000,00.
4. Program Perumahan dan awasan Permukiman, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 4.112.933.355,00.
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.654.040.014,00.
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 484.960.502,00.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 54.096.574,00.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

(Print Renja 2024 dari SIPD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RENCANA CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BELANJA RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						**10.299.869.720,00**							**11.235.926.015,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.769.023.644,00**							**9.635.546.006,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**9.769.023.644,00**							**9.635.546.006,00**	
	1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*	-			25 %	2.446.984.146,00						-	3.064.938.589,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	5.500.176,00			-	-		-	8.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.120.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.176,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi	-			100 % 100 %	2.349.366.814,00			-	-	Aparatur dipertahankan	-	2.784.975.586,03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	2.349.092.499,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur dipertahankan		2.692.979.986,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0012	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.000.326,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur dipertahankan		216.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

											SUMBER DANA	PROVINSI					
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan adminis sumber daya perangkat daerah	-			100 %	34.496.902,00			-	-	Aparatur Dispenkomtan	-	136.303.003,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.027.732,00	- Kab. Lombok Nubatukan Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dispenkomtan		3.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.884.100,00	- Kab. Lembata Nubatukan Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dispenkomtan		8.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.665.000,00	- Kab. Lembata Nubatukan, Bemus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dispenkomtan		122.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggara jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	16.880.104,00			-	-	Aparatur Dispenkomtan	-	27.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.791.304,00	- Kab. Lembata Nubatukan Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dispenkomtan		29.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Lembata Nubatukan Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dispenkomtan		3.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	34.098.260,00			-	-	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab Lembata	-	50.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	10.406.260,00	- Kab. Lembata Nubatukan Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab Lembata		34.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.09.0003	Pemeliharaan Mebel															
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	0,00	- Kab. Lembata Nubatukan Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab Lembata		9.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

											PROVINSI					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.450.000,00 -	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab Lembata		5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun**	-			**125 Unit**	**358.066.125,00**						-	**883.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / kota	-			25 %	0,00			Menyediakan infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang belum ada/belum dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kewaspadaan dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran	-	537.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Menyediakan infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang belum ada/belum dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kewaspadaan dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran		11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Terdata														

											PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempelkus l Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pember gunan infrastruktur yang berket anjutan dengan mempertima n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 2.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran		11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				2 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempelkus l Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pember gunan infrastruktur yang berket anjutan dengan mempertima n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 2.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran		304.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempelkus l Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2.Membang unan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran		11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

											PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi Program kabupaten undefined	-			25 % undefined undefined	399.090.129,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, tewas dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran	-	349.030.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi				125 Unit Rumah	399.089.129,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, tewas dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran		176.003.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				125 Unit Rumah	0,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, tewas dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran		176.003.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RINCIAN CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Presentase permukiman yang terlatih***	-			**35 %**	**150.000.000,00**						-	**0,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terfasilitasinya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya *Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh*	-			1 Dokumen	150.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemberdayaan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berbudaya	Desa sasaran -	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0003	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevisi/Terlegalisasi				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Lembata Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemberdayaan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berbudaya	Desa sasaran		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	*Presentase permukiman yang terlatih* *Menurunnya Presentase kawasan kumuh perkotaan* *Khususnya Kota Lembata*	-			25 % 30 %	4.113.932.089,00						-	4.145.617.030,39	

No	KODE	KODE DAN NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE DAN NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN PADA PERUBAHAN RENSTRA OPD	CAPAIAN PADA LAPORAN KINERJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.04.2.01	Pencegahan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipertahankan	-			120 rumah	4.112.833.366,00			Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berketangguhan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewaspadaan dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran	-	4.145.617.020,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipertahankan				120 Unit Rumah	4.112.833.366,00	- Kab. Lombata Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berketangguhan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewaspadaan dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran		3.945.617.020,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka penanganan terhadap Kumuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Penanganan Kumuh				25 Unit	0,00	- Kab. Lombata Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berketangguhan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewaspadaan dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	masyarakat desa sasaran		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD	HASIL KERJA CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BESAR PAGU INDIKATIF TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	*Meningkatnya Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)* *Meningkatnya Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)*	-			**20 %** **25 %**	**2.654.840.014,00**						-	**1.000.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Angkutan yang selat dan aman yang didukung dengan PSU	-			25%	2.654.840.014,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Kab. Lembata	-	1.000.053.030,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10-Lokasi	2.654.840.014,00	- Kab. Lembata Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Kab. Lembata		1.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						484.999.502,00							1.412.350.010,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						484.999.502,00							1.412.350.010,00	
1	2.10.01	**PROGRAM** PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	*Presentase penyelesaian sengketa tanah garapan* *Menurunnya sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota*	-			**25 %** **100 %**	**0,00**						-	**0,00**	

											PRIORITAS					
		KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH RENSTRA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-					0.00			Mendorong Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	masyarakat desa sasaran		0.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0.00	- Kab. Lembata Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mendorong Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	masyarakat desa sasaran		0.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	*Jumlah Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten* *Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten*	-			1 dokumen 15 Jumlah	484.860.502,00						-	1.072.398.610,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	LAPIRAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MASY RENJA OPD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya Kualitas Penyelesaian Konflik Pertanahan dan berkurangnya kasus Konflik	-			25 %	484.960.502,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kerawanan dan mitigasi bencana 7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab Lembata	-	1.072.808.610,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	484.960.502,00	- Kab. Lembata Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kerawanan dan mitigasi bencana 7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab Lembata		1.072.808.610,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah koordinasi penetapan tanah ulayat	-			1 Kali	0,00						-	5.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi dalam Perubahan RKPD	Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Lalu Lainnya Renja OPD Tahun 2022	Kondisi Kinerja Lainnya Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Letaknya dalam Daerah Kabupaten/Kota	terfasilitasinya penetapan tanah ulayat yang letaknya dalam daerah Kabupaten/Kota	-			25 %	0.00		-	-	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong penerbangan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab Lombok	-	5.550.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.07.2.01.0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku														
			Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi/Kota				1 Dokumen	0.00	- Kab. Lombok Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong penerbangan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab Lombok		5.550.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Jumlah koordinasi pengelolaan tanah kosong**	-			**1 Dokumen**	**0,00**						-	**334.500.000,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	MeningKatnya Penanfaatan Tanah Kosong	-			25 %	0.00			-	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong perkembangan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab Lombok	-	334.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PROGRAM CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Dievaluasikan				1 Laporan	0,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkeadilan serta inovasi daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab.Lombok		334.530.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	-	-						56.096.574,00							187.532.900,00	
	1.04	URUSAN PENERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						56.096.574,00							187.532.900,00	
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung lupolasi perangkat daerah	-			25 %	56.096.574,00						-	187.532.900,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penyanggaran dan Evaluasi Kinerja/Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	11.500.000,00			-	-	-	-	18.150.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Lombok Barat, Nubatukan, Lembar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	6.150.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	- Kab. Lombok Barat, Nubatukan, Lembar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	3.110.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Lombok Barat, Nubatukan, Lembar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	3.440.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Lombok Barat, Nubatukan, Lembar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	1.440.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BESARAN PENDANAAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administasi perkantoran dalam mendukung tupoksi	-			100 % 100 %	5.000.093.00							12.222.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Lombok Utara - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													5.650.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Lombok Utara - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.550.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.000.093,00	- Kab. Lombok Utara - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2.122.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pendataan/verifikasi barang milik daerah pada perangkat daerah				4 laporan	25.965.400,00							34.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Lombok Utara - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	25.965.400,00	- Kab. Lombok Utara - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					31.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.000.000,00							0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.000.000,00	- Kab. Lombok Utara - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanakannya pelayanan administrasi kantor bagi perangkat daerah	-			100 %	6.902.591,00			-	-	-	-	5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.902.591,00	- Kab. Lombok Tengah, Mataram, Lombok Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	5.902.591,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.38	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	5.000.500,00			-	-	-	-	110.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.38.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.500,00	- Kab. Lombok Tengah, Mataram, Lombok Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	110.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		JUMLAH						16.295.060.720,00							11.235.936.616,00	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini ... dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata,

SIMON EMI LANGODAY, SE.
Pembina Tk. I
NIP.19670517 198703 1 004

RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **29**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 30

3.3 Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **32**

BAB V PENUTUP **45**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lembata 7

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata 16

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lembata 20

Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lembata 28

Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran SatPol PP Kabupaten Lembata 31

Tabel 3.2. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata 33

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar **Belakang**

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Derah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 98 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satpol PP Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Satpol PP dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satpol PP Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satpol PP dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Nama Perangkat Daerah: Satpol PP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05				**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**									
1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	100 %							0%
1	05	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	48 Dokumen					12	12	25%
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen					6	6	25%
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan					2	2	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Program (Hasil Perangkat Daerah) Tahun 2020)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah**	100 %							0%
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ bulan					39	39	25%
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen					12	12	25%
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan					18	18	25%
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset**	16 Dokumen					4	4	25%
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen					2	2	25%
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan					2	2	25%
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya manajemen PNS**	100 %							0%
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket					1	1	25%
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dok					1	1	25%

Kode						Uraian Program dan Kegiatan	Keluaran Program (Output)	Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020)	Jumlah Dana Program dan Kegiatan sid Tahun 2021	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sid Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.05		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang					0	0	0%
1	**05**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**							**0%**
1	05	01	2.06		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket					1	1	25%
1	05	01	2.06		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket					1	1	25%
1	05	01	2.06		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket					1	1	25%
1	05	01	2.06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
1	**05**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**36 Unit**					**13**	**13**	**36%**
1	05	01	2.07		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit					2	2	25%
1	05	01	2.07		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit					9	9	45%
1	05	01	2.07		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit					2	2	25%
1	**05**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 Laporan**					**3**	**3**	**25%**
1	05	01	2.08		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan					1	1	25%

Kode					Uraian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Program (outcome Perangkat Daerah) Tahun 2020)	Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan					1	1	25%
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	4 Laporan					1	1	25%
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**108 Unit**					**27**	**27**	**25%**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit					18	18	25%
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit					3	3	25%
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit					1	1	25%
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit					5	5	25%
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)**	**100 %**							**0%**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah**	**Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu)**	**100 %**							**0%**

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Program (periode Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	16 Kasus					4	4	25%
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	16 Kasus					4	4	25%
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	409 Orang					100	103	25%

1	05	02	2.0	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	02	2.0	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	16 Unit					4	4	25%
1	05	02	2.0	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4 Dokuman					1	1	25%
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Tersedianya Laporan Hasil Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	28 Laporan					7	7	25%
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4 Laporan					1	1	25%
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	16 Laporan					4	4	25%
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	8 Laporan					2	2	25%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	4 Laporan					1	1	25%
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan					1	1	25%
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota**	100 %							0%
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	100 %							0%
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan					1	1	25%

Kode					Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Program (Hasil Program Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	8 Dokumen					1	1	13%
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	16 Unit					4	4	25%
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	24 Orang					8	8	25%
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	100 %							0%
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	80 Orang					20	20	25%
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	151 Desa/ Kelurahan					5	5	3%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena ada pada Renstra Tahun 2023 – 2026 tetapi tidak dianggarkan pada Renja 2024 sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya memenuhi target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat				55,00%	70,00%	85,00%			70,00%	85,00%	
2.	Persentase Penegakan Perda				100%	100%	100%			100,00%	100,00%	
3.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)				100%	100%	100%			100,00%	100,00%	
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran				40%	60%	80%			60,00%	80,00%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Satpol PP s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Satpol PP, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP:

- Angkatan kerja yang kurang produktif berdampak kepada meningkatnya pengangguran sementara lapangan pekerjaan masih relative terbatas. Berbagai persoalan pun muncul di sebabkan dengan kondisi yang dimaksud seperti timbulnya penyakit sosial masyarakat.
- Lemahnya kesadaran hukum, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang secara tidak langsung menjadi parameter bagi kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap disiplin, hukum, peraturaan dan ketentuan yang telah diundangkan pemerintah tetapi tidak menjadi jaminan bagi orang untuk berbuat sesuai aturan.. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum tetap menjadi kendala pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata karena masyarakat sering tidak mau tahu atau tidak peduli dengan tugas-tugas yang diemban satuan polisi pamong praja.
- Kemajuan teknologi informasi mengundang masyarakat untuk terlibat didalamnya. Hal ini juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk dijadikan mata pencaharian dengan mendirikan usaha-usaha dibidang penguasaan teknologi seperti warung internet. Usaha-usaha tersebut sangat digandrungi oleh pelajar kota lewoleba yang tidak mau marasa tertinggal dibidang teknologi informasi. Namun hal ini menjadi permasalahan tersendiri misalnya memanfaatkan waktu belajar disekolah untuk terus berada diwarung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi, hal ini menimbulkan keresahan ditengah masyarakat terutama orang tua si pelajar.
- Meningkatnya kebutuhan hidup, menyebabkan masyarakat mulai berusaha melakukan kegiatan-kegiatan sampingan guna mencukupi kebutuhannya. Salah satu usaha yang saat ini yang banyak dilakukan adalah berdagang. Akibatnya setiap hari semakin banyak bermunculan pedagang-pedagang kaki lima dan mereka memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum yang mengakibatkan terganggunya fungsi fasilitas umum itu sendiri.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP:

- Tantangan :
  - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perda.
  - Adanya konditre negatif yang muncul dari masyarakat terhadap keberadaan Sat Pol PP.
  - Belum optimalnya sosialisasi Perda.
  - Faktor globalisasi yang cepat berubah.
  - Masih terjadi kebakaran hutan dan pemukiman penduduk
- Peluang :
  - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dan mudah diakses.
  - Peran Satpol PP semakin strategis dan luas dalam penyelenggaraan pemerintah.
  - Adanya kewenangan yang jelas.
  - Masyarakat semakin kritis dan menuntut adanya peningkatan rasa aman dan tertib.
  - Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme aparatur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP adalah :

- Kuantitas SDM yang sesuai dengan standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi terkini sangatlah penting, sebagai penunjang aktifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan kinerja sehingga menjadi lebih terarah dan terukur. Selain itu perlu juga peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pengembangan tugas dan fungsi.
- Sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat minim.
- Masih terjadi kebakaran lahan hutan dan pemukiman penduduk.
- Perlu adaya peningkatan kualitas SDM anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Satpol PP sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Nama Perangkat Daerah: Satpol PP

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5.752.792.631	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5.752.792.631	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	4.303.970.026	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	4.303.970.026	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12**	**34.179.609**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12**	**34.179.609**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah dokumen perencanaan / perubahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana perangkat Daerah	6	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah dokumen perencanaan / perubahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana perangkat Daerah	6	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8.179.609	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8.179.609	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	5.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	100	3.197.944.602	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	100	3.197.944.602	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40	2.833.944.602	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40	2.833.944.602	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	250.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	250.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	12.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	12.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**54.650.179**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**54.650.179**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	19.650.179	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	19.650.179	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	35.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	35.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Terselenggaranya Manajemen PNS**	**100**	**12.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Manajemen PNS**	**100**	**12.500.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannnya	Kab. Lembata	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	7.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannnya	Kab. Lembata	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	7.500.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**257.276.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**257.276.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.276.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.276.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000	

	Penggandaan	Lembata	dan Penggandaan yang Disediakan	1	35.000.000	Penggandaan	Lembata	dan Penggandaan yang Disediakan	1	35.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	200.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah**	**5**	**177.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah**	**5**	**177.500.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	90.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	52.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	52.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	35.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	35.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**524.651.009**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**524.651.009**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	497.244.715	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	497.244.715	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	24.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	24.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3.406.294	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3.406.294	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**22**	**135.268.627**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**22**	**135.268.627**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	129.268.627	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	129.268.627	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	2.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	2.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kelndahan)	100	994.822.605	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kelndahan)	100	994.822.605	

	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Lembata	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4	70.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Lembata	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4	70.000.000	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Lembata	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4	40.000.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Lembata	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4	40.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	10.000.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	306.900.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	306.900.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Lembata	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	136.922.605	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Lembata	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	136.922.605	

	Pada Kata Kata antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Penegakan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lembata	Jumlah Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pada Kata antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Penegakan Kejahatan	7	35.000.000	Pada Kata antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Penegakan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lembata	Jumlah Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pada Kata antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Penegakan Kejahatan	7	35.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	22	44.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	22	44.000.000	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	10.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	10.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		**Tersedianya Laporan Hasil Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**7**	**350.000.000**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**Tersedianya Laporan Hasil Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**7**	**350.000.000**	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1	30.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1	30.000.000	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4	310.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4	310.000.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	2	10.000.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	2	10.000.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		**Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**1**	**10.000.000**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**1**	**10.000.000**	

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		CAKUPAN PELAYANAN BENCANA KABUPATEN	100	454.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		CAKUPAN PELAYANAN BENCANA KABUPATEN	100	454.000.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**254.000.000**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**254.000.000**	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	12.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	12.000.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	20.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	20.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	34	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	34	200.000.000	

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	180	200.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	180	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Lembata	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	180	200.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Lembata	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	180	200.000.000	
	Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Lembata	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya			Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Lembata	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya			

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Satpol PP, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan sama yaitu sebesar Rp. 5.875.999.676,-.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Satpol PP, yang melaksanakan urusan Pemerintahan wajib di bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Pada tahun rencana 2024, terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Perangkat Daerah : Satpol PP

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban				
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Nagawutung, Atadei, Lebatukan, Nubatukan (Kelurahan Lewoleba Barat), Omesuri, Buyasuri, Wulandoni, Ile Ape Timur	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kec. Atadei, Ile Ape Timur	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Satpol PP, adalah:

1. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas Penanggulangan Bencana. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Pencegahan, Penanggulangan; Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada Satpol PP.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya lingkungan sosial yang aman, tertib dan bermartabat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Ada
			Persentase penegakan Perda	Ada
			Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	Ada
2.	Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	Meningkatnya pelayanan penanganan kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Ada -

Program dan Kegiatan

Subbab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan prioritas, yaitu program pembangunan daerah sesuai dengan bidang urusan Satpol PP Kabupaten Lembata Tahun 2024. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Lembata sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD Kabupaten Lembata di tahun 2024.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Satpol PP Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis serta Pagu Indikatif yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Lembata di tahun 2024 berjumlah 2 program, 5 kegiatan, 17 sub kegiatan, dengan total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan strategis ini sebesar Rp. 1.784.470.900,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 3 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 784.479.900,-.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan; Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, terdiri dari 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Satpol PP Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
	I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.281.288.290,00							6.339.823.377,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*				100 %	3.495.808.290,00							4.028.734.637,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah*				100 %	30.600.000,00			-	-	Aparatur ASN Satpol PP		37.095.679,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dokumen Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		703.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.600.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		5.003.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah				100 %	2.979.217.506,00			-	-	Aparatur ASN Satpol PP		3.057.928.685,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	2.874.217.506,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		2.760.928.685,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	180.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		290.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	26.000.000,00			-	-	Aparatur ASN Satpol PP		71.115.188,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		25.115.188,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	24.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		46.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Manajemen PNS				100 %	13.000.000,00			-	-	Aparatur ASN Satpol PP		253.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	8.500.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.05	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian															

	1.05.01.2.05.08	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pegawai															
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pegawai				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lombok, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	0,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	113.500.000,00			-	-	Aparatur ASN Satpol PP		385.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.500.000,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.001,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	70.000.000,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				100 %	117.000.000,00			-	-	Aparatur ASN Satpol PP		372.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

	1.05.01.2.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12.000.000,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	- Kab. Lombok, Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45.000.000,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		132.000.003,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Laporan	34.000.000,00			-	-	Aparatur ASN Satpol PP		525.024.038,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.000.000,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		497.244.715,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		3.079.623,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	182.000.482,00			-	-	Aparatur ASN Satpol PP		165.071.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	184.088.482,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		144.473.555,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.000.000,00	- Kec. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		9.548.625,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	-	Aparatur ASN Satpol PP		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase penyelesaian penanganan pelanggaran perda/perkada terkait ketentraman dan ketertiban umum, cakupan keberhasilan petugas pembinaan masyarakat***	**100 %**			**100 %**	**784.479.900,00**							**100 %**	**776.322.609,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupatenkota Terlaksananya Penanganan Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten*	**100 %**			**100 %** **100 %**	**634.479.900,00**			-	1.Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lembata	**100 %**	**376.322.609,00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 Kasus	84.479.900,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lembata		72.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Meliputi Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperlua s Stabilitas Pelaksanaki an Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasyahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lembata		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasyahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lembata		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkaitan Pol Awas Manalo															
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				41 Orang	70.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasyahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lembata		141.322.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Pohukhumk am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 1.Meningka tkan Infrastr uktur Pelayanan dasar dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kearif ayahan dan aktifasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lembata		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				22 Unit	35.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PAJAK ROKOK	-	1.Meningka tkan Infrastr uktur Pelayanan dasar dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kearif ayahan dan aktifasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lembata		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat														

	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tersedianya Laporan Hasil penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotadan Peraturan Bupati/Walikota	28 laporan			100 %	240.000.000,00			Mempertahankan Stabilitas Pelruklamkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 1.Meningkatkan infrastr uktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, tawi ayshas dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lombok	7 laporan	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelajar (Satu/				1 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mempertahankan Stabilitas Pelruklamkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 1.Meningkatkan infrastr uktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, tawi ayshas dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lombok		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota														

	1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				1 Laporan	18.000.000,00	- Kab, Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, hasil syahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lembata		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*	4 laporan			1 Laporan 1 laporan	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, hasil syahan dan mitigasi bencana	Aparatur Sipil Negara	1 laporan	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Kualitas PPNS															

			Masyarakat yang Mengalami Perda dan Perkada														
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	733.770.961,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	100 %			100 %	500.000.000,00			-	3. Meningkatkan kehidupan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombata	100 %	533.770.961,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen RSPK Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan kehidupan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombata		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan kehidupan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombata		17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempelajari Stabilitas Polyurethanes Dan Teknologi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 3. Meningkatkan kehidupan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombata		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

	1.06.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikat Kalibrasi/Uji Teknis dan Ahlis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				6 Orang	150.000.000,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %			100 %	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok	100 %	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				160 Orang	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukkham Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.04.02	Pembinaan dan Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terlatih Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Kebakaran Lingkungan (SKL) Setiap Tahunnya				40 Desa/Kelurahan	0,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukkham Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	-						4.000.000,00							12.000.000,00	
	X.XX	-						4.000.000,00							12.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100 %			100 %	4.000.000,00						100 %	12.000.000,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembayaran Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %	4.000.000,00			-	-	-	100 %	12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

	JUMLAH							6.215.206.210,00								6.200.928.377,00	

BAB V

PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Satpol PP dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2025-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Satpol PP Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Satpol PP Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Satpol PP.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Satpol PP Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Kepala Satuan polisi Pamong Praja

Kabupaten Lembata,

Sarabiti Abd. Fatah, SH

Pembina Utama Muda

NIP.19631231 198303 1 282

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2024

BPBD KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan atas kemurahan hati-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata tahun 2024 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renstra OPD 2023 – 2026 dan dokumen perencanaan lain yang menjadi acuan kegiatan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 dikerjakan dengan fokus dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki.

Tersusunnya Rencana Kerja BPBD Tahun Anggaran 2024 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana daerah.

Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata.

Lewoleba, 2023

Plt. Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Lembata,

Stefanus Hede Wadu, S.Sos
NIP. 19700703 200012 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 24

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 24

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 26

3.3 Program dan Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29

BAB V PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
   Renja dan Pencapaiannya s/d tahun berjalan
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kab. Lembata
3. Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
   Anggaran 2022
4. Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
   Dari para pemangku Masyarakat
5. Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Adapun keterkaitan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini .

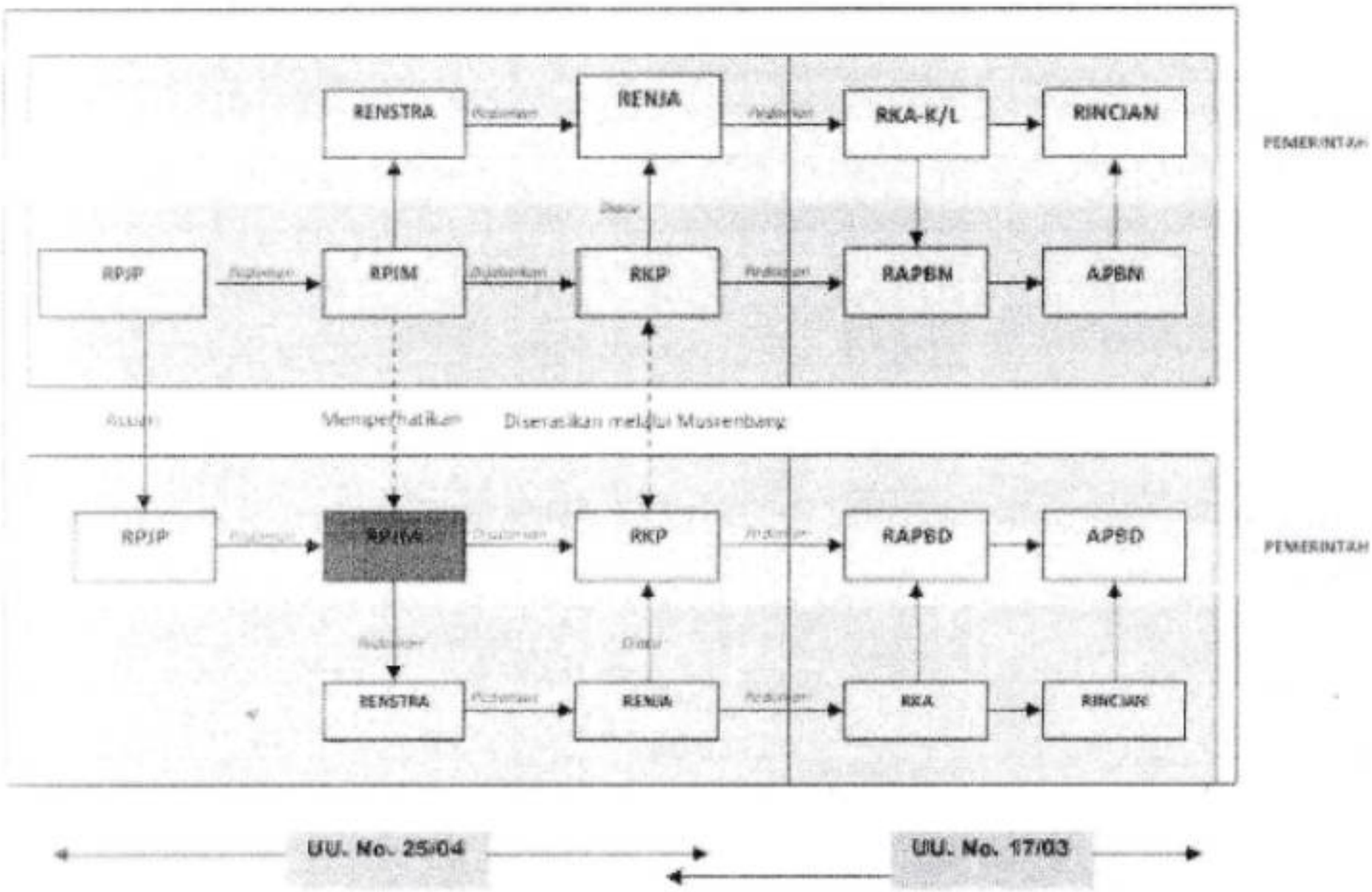

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja BPBD Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BPBD Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra BPBD dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BPBD Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPBD dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaiannya s/d Tahun Berjalan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
1	05				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %							
1	05	01	2		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi serta Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ,	32 Dok					8	8	25%
1	05	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaa Perangkat daerah	Jumlah Dokumen RENJA dan Dokumen RENSTRA	8 Dokumen					2	2	25%
1	05	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	4 Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	4 Dokumen					1	1	25%

Kode					Uraian(Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan Dokumen LPPD	8	Dokumen					2	2	25%
1	05	01	2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi.**	76	Org/Dok					19	19	25%
1	05	01	2	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	56	Orang/bulan					14	14	25%
1	05	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun yang tersusun	4	Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulan semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	12	Dokumen					3	3	25%
1	05	01	2		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penatausahan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	18	Dok/Lap					4	4	22%
1	05	01	2	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD yang disusun	4	Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Barang Pengguna (LBPS dan LBPT) yang tersedia	12	Laporan					3	3	25%
1	05	01	2	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan					0	0	0%
1	05	01	2		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah**	4	Dok					1	1	25%
1	05	01	2	03	Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen					1	1	25%

Kode					Uraian(Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(3+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksannya Penataan aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	64	dok/lap /paket					16	16	25%
1	05	01	2	01	Pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia	4	Paket					1	1	25%
1	05	01	2	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	4	Paket					1	1	25%
1	05	01	2	05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	4	Paket					1	1	25%
1	05	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	4	Dokumen					1	1	25%
1	05	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	48	Laporan					12	12	25%
1	05	01	2		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	20	Unit					5	5	25%
1	05	01	2	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20	Unit					5	5	25%
1	05	01	2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12	Laporan					3	3	25%
1	05	01	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan					1	1	25%
1	05	01	2	02	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan					1	1	25%
1	05	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Laporan		-			1	1	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perbesaran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(3+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	76	Unit					19	19	25%
1	05	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	52	Unit					13	13	25%
1	05	01	2	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	20	Unit					5	5	25%
1	05	01	2	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit					1	1	25%
1	05	03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Daerah Rawan Bencana yang Memiliki Kemampuan Manajemen Penanggulangan Bencana, Cakupan Daerah Rawan Bencana yang Ditangani**									
1	05	03	2		**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	100	%							
1	05	03	2	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2	Dokumen					1	1	50%
1	05	03	2	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	150	Orang					50	50	33%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/5)	9	10=(5+7+9)	11=(10:4)
1	05	03	2		**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Meningkatnya Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	100	%							
1	05	03	2	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen					1	1	100%
1	05	03	2	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	280	Orang					70	70	25%
1	05	03	2	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga Maupun Petugas	80	Unit					20	20	25%
1	05	03	2	05	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	4	Dokumen					1	1	25%
1	05	03	2	06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	15	Kawasan					5	5	33%
1	05	03	2	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manjerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal darurat Bencana	100	Orang					25	25	25%
1	05	03	2	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	4	Dokumen					1	1	25%
1	05	03	2	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	600	Orang					150	150	25%
1	05	03	2	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	4	Dokumen					1	1	25%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	300	KK					75	75	25%
1	05	03	2		**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Meningkatnya Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	100	%							
1	05	03	2	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	3	Laporan					1	1	33%
1	05	03	2	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12	Dokumen					3	3	25%
1	05	03	2	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi	40	Orang					10	10	25%
1	05	03	2	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	160	Orang					40	40	25%
1	05	03	2		**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	100	%							
1	05	03	2	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4	Dokumen					1	1	25%
1	05	03	2	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	4	Dokumen					1	1	25%
1	05	03	2	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4	Dokumen					1	1	25%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Program (output)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kerangka Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	04	Pengkajian dan Penerapan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	8	Dokumen					2	2	25%
1	05	03	2	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4	Laporan					1	1	25%
1	05	03	2	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	12	Dokumen					3	3	25%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2023, dapat diikuti pada lempiran tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD

Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 Tahun 2022	Tahun n-1 Tahun 2023	Tahun n Tahun 2024	Tahun n+1 Tahun 2025	Tahun n-2 Tahun 2022	Tahun n-1 Tahun 2023	Tahun n Tahun 2024	Tahun n+1 Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim		Indikator Resiko Bencana		147	140	138	0	-	140	138	
2.	Terbentuknya Desa/Kelurahan tangguh bencana yang responsif gender		Jumlah Desa tangguh bencana yang responsif gender		14	18	25	0	-	18	25	
3.	Teridentifikasi dan tersedia dokumen daerah rawan bencana		Dokumen strategis Pengurangan Resiko Bencana tingkat daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja BPBD s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan BPBD, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kekuatan (Strenght)
  1. Prosedur dirancang untuk memberi pelayanan Terhadap bencana yang berkualitas;
  2. Pemanfaatan teknologi informasi;
  3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang program penanggulangan Bencana;
  4. Adanya upaya kerjasama dengan berbagai Pihak.
- Kelemahan (Weaknesses)
  1. Kurangnya jumlah Pegawai;
  2. Kurangnya Komunikasi dan koordinasi;
  3. Terbatasnya penyediaan fasilitas fisik;
  4. Belum terbangunnya budaya kerja yang lebih baik.
- Peluang
  1. Mampu memenuhi harapan masyarakat;
  2. Pembentukan Tim kerja;
  3. Komunikasi dan koordinasi yang dibangun.
- Ancaman
  1. Struktur kependudukan yang tidak merata;
  2. Lingkungan sosial akan mengalami perubahan dimasa datang;
  3. Kemajuan teknologi yang semakin pesat;
  4. Kurangnya anggaran.

Dari hasil analisis kinerja BPBD tahun 2021 – 2022, maka dapat dikemukakan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui Pengurangan Resiko, Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2. Peningkatan kecepatan dan kualitas penanggulangan bencana dan kebakaran.
3. Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana.

Dalam Peraturan Bupati Lembata ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Sekretaris Daerah) selaku Ex-Officio. Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD adalah seorang Kepala Pelaksana selaku unsur pelaksana. Sesuai dengan UU, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai 3 fungsi utama penanggulangan bencana yakni pelaksana, koordinasi dan komando.

a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Lembata memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.

b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD teknis seperti seperti Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BKAD, DINAS PUPR, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PMD, SATPOL PP, KOMINFO, RUMAH SAKIT, PDAM, PLN serta seluruh Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan Lembaga/Instansi lain terkait di Wilayah Kabupaten Lembata. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.

c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera. Sebagai urusan bersama. penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas.

Dalam sistem penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

1) Legislasi Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjukan teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. Upaya yang dilakukan pada prioritas di Kabupaten Lembata adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;

2) Perencanaan

   Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

   a) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi;

   b) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu:

      - rencana mitigasi : disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural).
      - rencana kontijensi : disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana kontinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan.
      - rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran

   c) Kelembagaan

      Kelembagaan penanggulangan bencana dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal. Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut :

- Di tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional.

  Forum ini ditugasi untuk menyusun Hyogo Framework for Action (HFA) Reporting (ini adalah satu-satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).

- Di tingkat provinsi dan kab/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identik dengan Planas PRB hanya dilevel provinsi, kabupaten/kota. Misal : perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kabupaten/kota setempat.
- Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang disebut platform tematik (per satu jenis ancaman), contoh : dalam rangka menanggulangi banjir dibentuk Forum banjir, dst

d) Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas pada HFA (Hyogo Framework for Action) yang secara umum dikelompokkan sebagai berikut;

- ✓ kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal;
- ✓ sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat, masyarakat terlatih, relawan dsb. dan sumberdaya sarana prasarana termasuk kantor, alat komunikasi, trasnsportasi, obat-obatan dsb;
- ✓ IPTEK, penguasaan iptek di daerah, penerapan iptek terapan untuk pembangunan rumah tahan gempa bumi, sistem peringatan dini;
- ✓ Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

e) Pendanaan

Pendanaan dalam penangulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- Pendanaan dari pemerintah.

  Berdasarkan pada peruntukkannya, pendanaan tersebut dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu

1) Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana yang ada di APBD termasuk bantuan dari Pusat maupun provinsi.
2) Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL

   Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP kekeringan, DSP letusan gunung api, dll. Alokasinya digunakan untuk antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik, aktivasi 24 jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan tanggul, dll.
3) Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah. Digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (build back better and safer).

- Pendanaan dari masyarakat

  merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional. Perlu diingat bahwa pendanaan penanggulangan bencana tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan penanggulangan bencana juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, OPD teknis terkait kebencanaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BPBD Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada lampiran tabel 2.3.

Tabel 2.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,656,160,860	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,659,556,259	
	URUSAN PENUNJANG				3,656,160,860	URUSAN PENUNJANG				3,659,556,259	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	160	2,336,415,215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD		2,339,810,615	
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Terselenggaranya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Serta Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23,164,787	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Terselenggaranya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Serta Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23,164,787	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lewoleba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,982,930	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lewoleba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,982,930	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	4,181,350	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	4,181,350	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	2,100,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	2,100,000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Kinerja sesuai Renstra SKPD Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	4,101,350	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	4,101,350	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	4,379,157	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Lewoleba	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	4,379,157	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah**		**2,026,231,925**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah**		**2,026,231,925**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lewoleba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,891,813,363	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lewoleba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,891,813,363	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lewoleba	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	125,459,800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lewoleba	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	125,459,800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,533,805	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,533,805	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4,424,957	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4,424,957	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Unit/SKPD Pending
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**19,535,034**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**20,893,133**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lewoloba	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,399,901	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lewoloba	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3,750,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lewoloba	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	17,135,133	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lewoloba	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	17,135,133	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah**		**115,101,750**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah**		**116,401,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lewoloba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,240,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lewoloba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,540,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lewoloba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,361,850	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lewoloba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,361,850	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lewoloba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18,165,150	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lewoloba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18,105,150	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lewoloba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75,394,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lewoloba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75,394,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**38,876,782**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**38,876,782**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lewolebe	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	38,876,782	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lewolebe	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	38,876,782	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**36,481,168**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**37,267,168**	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lewoleba	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	10,700,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lewoleba	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	10,700,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lewoleba	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	24,537,168	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lewoleba	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	24,587,168	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lewoleba	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1,251,003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lewoleba	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	2,030,090	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**77,043,820**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**77,043,820**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lewoleba	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	68,956,245	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lewoleba	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	68,956,245	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lewoleba	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1,730,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lewoleba	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1,730,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lewoleba	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	6,357,575	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lewoleba	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	6,357,575	
	URUSAN WAJIB				**1,319,745,644**	**URUSAN WAJIB**				**1,319,745,644**	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				**1,319,745,644**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**1,319,745,644**	
	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota		**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**225,046,510**	**Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota**		**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**225,046,510**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Lampiran Peraturan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2 Dokumen	200,000,000	
	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	9 Kecamatan	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	50 Orang	25,046,510	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	9 Kecamatan	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	50 Orang	25,046,510	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		377,358,675	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		377,358,675	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	102,909,003	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	70 Orang	26,124,648	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	70 Orang	26,124,648	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	9 Kecamatan	Jumlah peralatan penyelamatan dll bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	20 Unit	32,340,271	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	9 Kecamatan	Jumlah peralatan penyelamatan dll bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	20 Unit	32,340,271	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	9 Kecamatan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	32,913,366	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	9 Kecamatan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	32,913,366	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manjerialnya	25 Orang	39,986,384	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manjerialnya	25 Orang	39,986,384	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	9 Kecamatan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	44,846,510	Penyusunan Rencana Kontijensi	9 Kecamatan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	44,846,510	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	9 Kecamatan	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	200 Orang	49,694,440	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	9 Kecamatan	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	200 Orang	49,694,440	
	Penyusunan Rancana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	9 Kecamatan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	25,720,528	Penyusunan Rancana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	9 Kecamatan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	25,720,528	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	9 Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	25,720,528	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	9 Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	25,720,528	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**208,368,026**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**208,368,029**	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	9 Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	49,040,000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	9 Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	49,040,000	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	3 Dokumen	51,226,250	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	3 Dokumen	51,226,250	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	10 Orang	53,940,000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	10 Orang	53,940,000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40 Orang	54,161,599	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40 Orang	54,161,599	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**508,972,430**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**508,972,430**	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Lewoleba	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	38,000,000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Lewoleba	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	38,000,000	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Lewoleba	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	24,872,900	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Lewoleba	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	24,872,900	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD: Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD: Target Capaian Kinerja	Rancangan Awal RKPD: Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan: Program/Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan: Indikator Kinerja	Hasil Analisis Kebutuhan: Target Capaian Kinerja	Hasil Analisis Kebutuhan: Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Lokakota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	47.405.642	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Lokakota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	47.405.642	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Lokakota	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 Dokumen	32.626.250	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Lokakota	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 Dokumen	32.626.250	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Lokakota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	26.406.642	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Lokakota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	26.406.642	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota melalui Penglajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RSP)	3 Dokumen	339.669.996	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RSP)	3 Dokumen	339.669.996	

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan BPBD Kabupaten Lembata, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 namun direncanakan pada Renja Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.3.656.160.860,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 3.659.556.259,-.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang melaksanakan unsur penunjang pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun rencana 2024, terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lembata. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada lampiran tabel 2.4.

Tabel 2.4

Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Lewoleba Timur	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
		Ile Ape Timur			Pelatihan Pemakaian Radio
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lewoleba Utara	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		Pembangunan Talud/badan jalan pesisir Pertigaan SGB - Muara Sungai
		Ile Ape Timur			Pembangunan Rumah Relokasi Dampak Bencana
		Lewoleba Utara			Pembangunan Talud/badan jalan pesisir Pertigaan SGB - Muara Sungai
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Lewoleba Barat	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manjerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal darurat Bencana		Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
		Lewoleba Barat			Pelatihan kader Jejaring Kelurahan Siaga
		17 Desa di Kecamatan Lebatukan			Pembentukan/Pelatihan TIM Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	20 Desa di Kecamatan Buyasuri	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi		Penyiapan Dokumen Kebencanaan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

a. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat dan komunitas.
b. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
c. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik di banding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Selain itu berdasarkan hasil penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana, diketahui bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana dilakukan melalui :

1. Pelayanan informasi rawan yang meliputi :
   a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota;
   b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi :
   a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
   b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
   c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
   d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
   e. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
   f. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   g. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
   h. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
   i. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang meliputi:
   a) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas;
   b) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
   c) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
   d) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana meliputi :
   a) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
   b) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
   c) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja BPBD Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indikator Resiko Bencana (point)	140
			Jumlah Desa tangguh bencana yang responsif gender	18

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata akan melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan yang terdiri dari 1 Program, 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan pada Non Urusan serta 1 Program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan pada Urusan Wajib.

1. **URUSAN PENUNJANG / Non Urusan**

   01 (Satu) Program, 09 (Sembilan) Kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan sebagai berikut:

   1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

      a. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

         - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
         - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
         - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

c. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. **URUSAN WAJIB**

1 (Satu) Program, 3 (Tiga) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

a. **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

b. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

- ✓ Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;
- ✓ Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

c. **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program yang akan di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang dapat dilihat uraian lengkap rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, pendanaan indikatif tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 BPBD Kabupaten Lembata disajikan pada lampiran tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						3.401.813.191,00							4.013.400.994,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.401.813.191,00							4.013.400.994,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.401.813.191,00							4.013.400.994,00	
1	1.06.01	PROGRAM PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung tupoksi perangkat daerah				100 %	2.291.613.191,00							2.949.695.806,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Serta Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Dokumen	63.185.000,00			-	-	Aparatur BPBD		37.736.511,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.992.920,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		42.573.513,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.191.350,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		3.352.452,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur BPBD		2.932.452,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.191.350,00	- Semua Kota/Kab, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		2.932.452,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penetapan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengesahan Dokumen Penetapan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Aparatur BPBD		3.232.452,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur BPBD		3.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Penyajian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.021.933.866,00			-	-	Aparatur BPBD		2.160.557.158,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	1.691.813.383,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur BPBD		1.918.472.612,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	120.409.800,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		132.100.712,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.535.800,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		3.925.375,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur BPBD		9.057.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3 Dokumen	19.811.805,00			-	-	Aparatur BPBD		31.388.537,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur BPBD		4.839.891,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET (RP)	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.01	Perencanaan dan Pemrograman Kegiatan Barang Milik Daerah (pada OPD)														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	10.011.005,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur SPBD		25.542.440,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01	Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pegawai Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00			-	-	Aparatur BPBD		2.407.672,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.03	Penyediaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur SPBD		2.407.672,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah				5 Kgiatan	192.101.700,00			-	-	Aparatur SPBD		184.425.790,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.240.700,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		10.079.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.291.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		33.769.169,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.155.150,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		27.676.419,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur BPBD		1.452.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	62.084.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		125.851.096,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		0 Unit	0,00			-	-	Aparatur BPBD		50.980.709,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG (BIDANG / PROGRAM) KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dioperasikan				5 Unit	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur BPBD		50.968.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	32.765.168,00	-		-	-	Aparatur BPBD		43.711.168,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.486.000,00	- Kab. Lombok Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		13.470.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24.557.103,00	- Kab. Lombok Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		20.662.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.760.500,00	- Kab. Lombok Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur BPBD		4.370.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17 Unit	607.141.920,00			-	-	Aparatur BPBD		515.495.375,50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnya				15 Unit	607.141.920,00	- Kab. Lombok Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur BPBD		82.758.967,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	0,00	- Kab. Lombok Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur BPBD		6.033.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	- Kab. Lombok Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur BPBD		14.883.333,33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.69.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Bencana yang tertangani, Logistik dan Bencana yang diberikan**	100 %		100 %	100 %	8.205.000.000,00	-		-	-	-	100 %	2.283.545.194,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAKYU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	11 Dokumen		2 Dokumen	100 %	0,00	4		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pemberdayaan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok	2 Dokumen	15.540.977,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.01	Penyelamatan Kelas Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kajian Rawan Bencana yang Disepakati				2 Dokumen	0,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pemberdayaan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok		42.994.010,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tersebut Tinggalnya				50 Orang	0,00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pemberdayaan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok		39.951.191,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Penanggulangan dan Penyelamatan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Penanggulangan dan Penyelamatan Terhadap Bencana	80 Dokumen		12 Dokumen	100 %	400.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Mengurangi Kerawanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana 5. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok	10 Dokumen	880.040.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.01	Penyelenggaraan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Disiapkan				1 Dokumen	5,00	- Kab. Lombok Barat - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur - Kab. Lombok Utara - Kota Mataram Semua Kab/Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mengurangi Kerawanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana 5. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok		32.496.190,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.02	Pusat/Sub Pengejahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penyelamatan dan Mitigasi Bencana				70 Orang	400.000.000,00	- Kab. Lombok Barat Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatn Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana Dan Penyelamatan Bcm	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kondisi wilayah dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan sarana untuk pelayanan dasar dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kondisi wilayah dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Lombok		410.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.09.2.03.04	Penyediaan Perlindungan Pemulungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah Penyediaan Penyelamatan Dll bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				20 Unit	0,00	- Kab. Lombok Barat Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatn Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana Dan Penyelamatan Bcm	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kondisi wilayah dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lombok		44.374.295,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.09.2.12.08	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RPJMD OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana yang Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				1 Dokumen	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan menerapkan aspek lingkungan hidup, kearifan lokal dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lembata		24.025.287,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.26.03.2.02.01	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Penanggulangan dan Kesiapsiagaan														
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Bencana				5 Kawasan	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan menerapkan aspek lingkungan hidup, kearifan lokal dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lembata		192.712.581,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.26.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				25 Orang	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan menerapkan aspek lingkungan hidup, kearifan lokal dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lembata		40.998.222,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.26.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi														

NO	KODE	URUSAN / SUBURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET MASA PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN ENDPUL DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL. DAN/ATAU SASARAN	PROGRAM RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mendukung Lingkungan Hidup Mengurangi Kolaborasi Berkesinambungan Dan Pendidikan Iklim	2. Pembangunan infrastruktur yang berbasis ekologis dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kualitas dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan kolaborasi dengan	Masyarakat Kabupaten Lombok		Rp 197.197.10	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.02.2.03.10	Dukungan Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana														
			Jumlah Anggota dan Ringgo Wajib yang Mengikuti Latihan Gabungan				100 Orang	0,00	Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mendukung Lingkungan Hidup Mengurangi Kolaborasi Berkesinambungan Dan Pendidikan Iklim	2. Pembangunan infrastruktur yang berbasis ekologis dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kualitas dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan kolaborasi dengan	Masyarakat Kabupaten Lombok		Rp.140.920.000,00	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.11	Pemutakhiran Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilaporkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Barat, Dinas Kesehatan, Dinas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mendukung Lingkungan Hidup Mengurangi Kolaborasi Berkesinambungan Dan Pendidikan Iklim	2. Pembangunan infrastruktur yang berbasis ekologis dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kualitas dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan kolaborasi dengan	Masyarakat Kabupaten Lombok		Rp.197.197.10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.12	Pelatihan Kebencanaan Tanggap Bencana Alam														

(0)	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN/ CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN [illegible]	PENDANAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN [illegible]	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAGJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROBITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											REGIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cakupan yang Mengikuti Pelatihan Kuliner Ciwaga Bersama ASN				150 Kelompok	0,00	Kec. Limbato, Bonwa, Kemendon, Semara Ke Utara 6	DANA TRANSFER UMUM DAN DANA KEISTIMEWAAN	Meningkatnya Lingkungan Hidup Akomodasi Pelatihan Kreatif Pelatihan Kuliner	3. Meningkatnya Jumlah Lingkungan Hidup, level analisis dan capaian berbasis 3. Meningkatnya kebijakan ekonomi daerah	Masyarakat Kelompok Lembaga		160.160.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEMISKINAN DAERAH
	1.05.03.2.05	Pelayanan Perkantoran dan Evaluasi Kinerja Semarang	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran dan Evaluasi Kinerja Semarang	05 Laporan		7 Layanan	100 %	800.000.000,00				3. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis analisis dengan level capaian berbasis 3. Meningkatnya kebijakan ekonomi daerah	Masyarakat Kelompok Lembaga	7 Layanan	867.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEMISKINAN DAERAH
	1.05.03.2.05.01	Pelayanan Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular Zoonotik Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD THN	REALISASI CAPAIAN SPM/ SPD TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN TARGET RENJA SPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TARGET/ RASIONALISASI RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi Hasil Rapat Dengar Pendapat Bidang Pertanian				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Lombok Barat di Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAU ALOKASI UMUM	-	3. Pemberian pelatihan yang berkaitan dengan rekomendasi untuk kegiatan hidup, kesehatan dan lingkungan bersama 1. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Dengan rekomendasi untuk kegiatan hidup, kesehatan dan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Lombok		231.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	1.05.03.2.03.03	Penyusunan Laporan Evaluasi Bantuan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Barang Bersama dan SPPDP yang Diterbitkan Paling Lama 1 kali dalam tahun berjalan Hasil Dokumen Laporan Akhir Opini				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Lombok Barat Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAU ALOKASI UMUM	-	3. Pemberian pelatihan yang berkaitan dengan rekomendasi untuk kegiatan hidup, kesehatan dan lingkungan bersama 1. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Dengan rekomendasi untuk kegiatan hidup, kesehatan dan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Lombok		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN KEBENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.04	Pemasukan, Pendistribusian Evaluasi Bantuan Bencana Kabupaten Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RANCANGAN DPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kritik dan Saran Untuk Peningkatan Objek Yang Diperiksa				15 Orang	0.00	Kab. Lombok Barat, Kecamatan Sekotong	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Mendorong Lingkungan Hidup, Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan infrastruktur yang terkait adaptasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial budaya dan mitigasi bencana 2. Meningkatkan kesiapsiagaan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok		60.124.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA
	1.05.01.1.01.04	Penyediaan Logistik Penyelenggaraan dan Evaluasi Kinerja Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kritik Dan Saran yang Ditindaklanjuti Objek Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Penanggulangan Bencana				11 Orang	0.00	Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Seluruh Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Mendorong Lingkungan Hidup, Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan infrastruktur yang terkait adaptasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial budaya dan mitigasi bencana 2. Meningkatkan kesiapsiagaan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok		98.777.777,78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penyusun Sistem Deteksi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Peralatan dalam Sistem Penanggulangan Bencana	20 Dokumen		9 Dokumen	135%	500.000.000,00			Mendorong Lingkungan Hidup, Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pembangunan infrastruktur yang terkait adaptasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial budaya dan mitigasi bencana 2. Meningkatkan kesiapsiagaan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok	10 Dokumen	763.242.677,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.04.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA OPD/ PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RESAIKAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN KASUS RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Perkotaan di Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mendorong terlaksananya Lingkungan Hidup, Kelestarian Kehidupan Bersama Dan Perlindungan Alam	3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis ekologi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya 2. Menanggulangi kemiskinan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lamongan		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.08.02.2.04.02	Perwujudan Kota Berkelanjutan Berbasis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mendorong terlaksananya Lingkungan Hidup, Kelestarian Kehidupan Bersama Dan Perlindungan Alam	3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis ekologi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya 2. Menanggulangi kemiskinan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lamongan		20.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.08.02.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				2 Dokumen	0,00	- Kab. Lamongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mendorong terlaksananya Lingkungan Hidup, Kelestarian Kehidupan Bersama Dan Perlindungan Alam	3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis ekologi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya 2. Menanggulangi kemiskinan ekonomi daerah	Masyarakat Kabupaten Lamongan		40.147.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.08.02.3.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	PENUNJANG CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2021	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU MENJELANG TUTUP 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Kependudukan yang Disusun				2 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Tengah Kecamatan Kantor Kel/Desa	DANA TRANSFER UNTUK DANA ALOKASI UMUM	Mendukung Lingkungan Hidup, Mitigasi Kebencanaan Berbasis Dan Pendidikan Iklim	3. Prioritas pemerintahan yang terkait urusan dengan memperhatikan kaidah lingkungan hidup, kearifan lokal dan nilai-nilai bencana 2. Meningkatkan pelayanan dasar di daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok		24.556.975.73	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.22	Penyusunan dan Pengolahan Pemeliharaan Perencanaan Bencana														
			Jumlah Laporan Hasil Review Perencanaan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	0,00	Kab. Lombok Tengah Kecamatan Kantor Kel/Desa	DANA TRANSFER UNTUK DANA ALOKASI UMUM	Mendukung Lingkungan Hidup, Mitigasi Kebencanaan Berbasis Dan Pendidikan Iklim	3. Prioritas pemerintahan yang terkait urusan dengan memperhatikan kaidah lingkungan hidup, kearifan lokal dan nilai-nilai bencana 2. Meningkatkan pelayanan dasar di daerah	Masyarakat Kabupaten Lombok		25.107.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.23	Penanganan Pascabencana di Kabupaten Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KONDISI CAPAIAN AKHIR OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB	PRAKIRAAN BEBAN KERJA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											MESOPAK	NASIONAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							5 Dokumen	Rp6.500.000.00	Kab. Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat	DANA BOSNAS					Rp5.000.000,00	KASDIN, PENGELOLA KINERJA SEKRETARIS DAERAH
		JUMLAH						Rp6.500.000.00							Rp5.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan progam dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 mempedomani Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata tahun 2023 – 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tentunya kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan setiap tahunnya masih belum mendekati harapan dalam rangka penguatan peran stakeholder. Karena itu penguatan kinerja aparatur, kelembagaan dan dukungan finansial menjadi penting demi mendekati harapan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berbagai tanggapan, kritik, serta masukan konstruktif dari berbagai pihak tentunya penting dan sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata, agar benar-benar dapat menjadi dasar evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja ini juga akan menjadi Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagi unsur aparat pengawas BPBD dalam menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan para korban bencana.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD,

Stefanus Hede Wadu, S.Sos

Pembina

NIP. 19700703 200012 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN									
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah								
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56 Dokumen					14	14	25%
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen					4	4	25%
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen					2	2	25%
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPDRealisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen					2	2	25%
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan					2	2	25%
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan					4	4	25%
2	13	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	84 Laporan					21	21	25%
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen/Laporan					1	1	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan					1	1	25%
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan					1	1	25%
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	72 Laporan					18	18	25%
2	**13**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	8 Laporan					2	2	25%
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan					2	2	25%
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah**	52 Dokumen /Laporan					13	13	25%
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket					3	3	25%
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket					1	1	25%
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket					2	2	25%
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan					7	7	25%
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12 Paket							
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Paket							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	192 Laporan					48	36	19%
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan					12	12	25%
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan					12	12	25%
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan					12		0%
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan					12	12	25%
2	13	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)**	88 Paket					22	22	25%
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit					8	8	25%
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit					10	10	25%
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit					1	1	25%
2	13	02			**Program Penataan Desa**	**Persentase Desa yang Ditata sesuai standar**	100 %							
2	13	02	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Desa yang Ditata sesuai standar**	100 %							
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	40 Desa					10		0%
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	40 Desa					10		0%

Kode					Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	40 Desa					10		0%
2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Desa					10		0%
2	**13**	**03**			**Program Peningkatan Kerja Sama Desa**	**Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa**	**100 %**							
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa**	**100 %**							
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	87 Dokumen					72	72	83%
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	15 Dokumen					-		0%
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	24 Dokumen					9		0%
2	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"**	**100 %**							
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"**	**100 %**							
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	144 Dokumen					36		0%
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	144 Dokumen					36		0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renetra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renetra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renetra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	252 Dokumen					144		0%
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20800 Dokumen					5200	5200	25%
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Jumlah aparatur yang mengikuti	36 Orang					9		0%
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	144 Dokumen					36		0%
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	144 Dokumen					36	36	25%
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	144 Laporan					36		0%
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	144 Laporan					36	36	25%
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	144 Dokumen					36		0%
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	144 Dokumen					36		0%
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	144 Dokumen					36		0%
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	JJumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang					10		0%
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	36 Desa					9		0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	144 Dokumen					36		0%
2	13	05			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK**	**100 %**								
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif	**100 %**							
2	13	05	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK**	**100 %**							
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen					1		0%
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	144 Dokumen					36		0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	umlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga					2	2	25%
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20 Unit					5		0%
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40 Dokumen					10		0%
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20 Laporan					5		0%
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	8 Laporan					2		0%
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	144 Dokumen					36	36	25%
2	13	05	2.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	144 Keluarga					36		0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	40 Keluarga					10		0%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renja /Perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKA/Perubahan RKA				100%	100%	100%		Ada	Ada	Ada	
2.	Capaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra				100%	100%	100%		Ada	Ada	Ada	
3.	Persentase Kesesuaian Indikator Kinerja pada Dokumen Renstra, Renja, RKA, Lakip dan LPPD				100%	100%	100%		Ada	Ada	Ada	
4.	Persentase Capai Sasaran Kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
5.	Persentase Desa dengan Kinerja Baik				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
6.	Posyandu Aktif				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
7.	PKK Aktif				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
8.	Jumlah BUMDES				10	10	10		10	10	10	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
   1) Keterbatasan dalam fasilitas peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan desa;
   2) Belum optimalnya Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Membangun Desa;
   3) Rumusan indicator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan selalu tdak selaras denga napa yang dirumuskan dalam dokumen penganggaran sehingga capaian kinerja sulit terukur.
b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

   Tantangan :
   1) Regulasi yang cukup banyak dan kapasitas SDM di desa yang terbatas;
   2) Masih minimnya fasilitasi, pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan di desa;
   3) Angka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Rendah karena belum optimalnya sinkronisasi indicator kinerja dalam dokumen perencanaan dan anggaran sehingga sulit dilakukan pengukuran evaluasi kinerja.

   Peluang :
   1) Adanya Undang-undang yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa maupun Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk transparan dan akuntable dalam penyelenggaraan kewenangan desa;
   2) Adanya SDM pada Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang perlu difasilitasi dan dibina;
   3) Penerapan SIPD dalam perencanaan, penganggaran dan penatausahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah :

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan Masyarakat;
2. Optimalisasi peran Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan keberdayaan Masyarakat khususnya terhadap isu nasional dan masalah daerah yang sedang berkembang;
3. Keterbukaan informasi melalui digitalisasi untuk meningkatkan daya saing desa menuju kemandirian desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.098.471.508	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.242.677.215	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100 %	2.710.408.903	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100 %	2.854.615.810	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	88.734.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	88.734.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	19.554.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	19.554.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.880.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.880.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPDRealisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	8.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPDRealisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	8.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.800.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lambata	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	**21 Laporan**	**2.190.714.432**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Lambata	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah** *	**21 Laporan**	**2.190.714.432**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lambata	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	2.035.938.552	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lambata	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	2.035.938.552	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	140.680.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	140.680.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.115.880	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.115.880	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	18 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	18 Laporan	6.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lambata	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2 Laporan**	**19.758.600**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Lambata	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2 Laporan**	**19.758.600**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	19.758.600	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	19.758.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lambata	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**140.707.578**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Lambata	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**140.707.578**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lambata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	3 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lambata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lambata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.899.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lambata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.899.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lambata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.659.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lambata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.659.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	111.149.578	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	111.149.578	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Lambata**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1 Paket	50.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Lambata**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1 Paket	100.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	*Sarana dan prasaran pendukung yang tidak memadai*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48 Laporan	191.880.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48 Laporan	191.880.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	62.280.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62.280.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	4.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Lambata**	**Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)**	**88 Paket**	**191.894.293**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lambata**	**Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)**	**88 Paket**	**198.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lambata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	87.415.093	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lambata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	150.000.000	*Kendaraan Dinas dalam kondisi kurang baik*
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit	31.020.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	31.020.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.379.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan gedung kantor
	Program Penataan Desa		Persentase Desa yang Ditata sesuai standar	100 %	75.000.000	Program Penataan Desa		Persentase Desa yang Ditata sesuai standar	100 %	75.000.000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	***Kab. Lambata, Semua Kecamatan***	**Persentase Desa yang Ditata sesuai standar**	100 %	75.000.000	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	***Kab. Lambata, Semua Kecamatan***	**Persentase Desa yang Ditata sesuai standar**	100 %	75.000.000	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Desa	20.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Desa	20.000.000	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	20.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	20.000.000	
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	10 Desa	20.000.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	10 Desa	20.000.000	
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Desa	15.000.000	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Desa	15.000.000	
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa		**Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa**	100 %	100.000.000	**Program Peningkatan Kerja Sama Desa**		**Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa**	100 %	100.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	***Kab. Lambata, Semua Kecamatan***	**Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa**	100 %	100.000.000	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	***Kab. Lambata, Semua Kecamatan***	**Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa**	100 %	100.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	35.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	35.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	35.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	35.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	30.000.000	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	100 %	890.000.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	100 %	890.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	**Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"**	100 %	890.000.000	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	**Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"**	100 %	890.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4 Dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	36 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	36 Dokumen	20.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	36 Dokumen	55.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	36 Dokumen	55.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5200 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5200 Dokumen	400.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan jumlah Desa yang Mengaplikasikan SISKEUDES dalam	9 Orang	20.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Kab. Lambata, Semua Kecamatan*	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan jumlah Desa yang Mengaplikasikan SISKEUDES dalam Pengelolaan Keuangan Desa	9 Orang	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	36 Dokumen	55.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	36 Dokumen	55.000.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	36 Dokumen	51.500.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	36 Dokumen	51.500.000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	36 Laporan	45.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	36 Laporan	45.000.000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	36 Laporan	35.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	36 Laporan	35.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	36 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	36 Dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	36 Dokumen	35.000.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	36 Dokumen	35.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	40.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	40.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	JJumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	20.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	JJumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	20.000.000	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	9 Desa	45.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	9 Desa	45.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Dokumen	18.500.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Dokumen	18.500.000	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan	100 %	223.081.800	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan	100 %	223.081.800	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif	100 %				Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif	100 %		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	100 %	223.081.800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	100 %	223.081.800	
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	10.000.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	10.000.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lambata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	umlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	25.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	umlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	25.000.000	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	20.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	20.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	10 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Dokumen	25.000.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	25.000.000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	30.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	30.000.000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarekat dan	36 Dokumen	139.757.150	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	36 Dokumen	139.757.150	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	36 Keluarga	25.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Lombata, Semua Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	36 Keluarga	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Lembata, Semua Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	18.304.455	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Lembata, Semua Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	18.304.455	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 namun direncanakan pada Renja Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.4.098.471.508,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 4.242.677.215,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang melaksanakan unsur penunjang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas BUMDes	11 Desa di Kecamatan Nubatukan dan 15 Desa di Kecamatan Wulandoni			Telah diakomodir pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
2	Sosialisasi Terpadu untuk Persehatian, Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Lebatukan, Nagawutung, Atadei dan Omesuri			Telah diakomodir pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
3	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa	17 Desa di Kecamatan Lebatukan			Telah diakomodir pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
4	Pendampingan Inventarisasi Pencatatan dan Penilaian Aset Desa	17 Desa di Kecamatan Lebatukan			Telah diakomodir pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
5	Pembangunan Gedung Kantor Desa	Desa Tewaowutung dan Penikinek di Kecamatan Nagawutung			Tidak dapat diakomodir karena bukan kewenangan Dinas PMD
6.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Pemerintahan Desa dan BPD)	Desa-desa di kecamatan Nagawutung, Buyasuri dan Ile Ape Timur			Telah diakomodir pada Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, RT dan Lembaga Adat)	Desa - desa di Kecamatan Atadei, Omesuri dan Ile Ape Timur			Telah diakomodir pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bappelitbangda.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang berdampak pada Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (sistematis, sinkron dengan dokumen daerah dan diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) yang berkontribusi terhadap Peningkatan Angka AKIP dan Opini BPK	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif	Ada
2.	Meningkatkan kulaitas tata kelola kelitbangan daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif	Ada
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan BUMDES yang Produktif	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Ada
			Meningkatnya nilai tambah dan lapangan kerja.	Ada

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2024 sebanyak 5 Program, 12 Kegiatan, 55 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 3.769.727.597,00,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.741.227.962,-.
2. Program Penataan Desa, terdiri dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 85.000.000,-.
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa, terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 65.000.000,-.
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 500.000.000,-.
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, terdiri dari 1 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 378.499.635,-.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lembata
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								3,769,727,597.00					4,192,457,459.00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3,769,727,597.00					4,192,457,459.00
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								3,769,727,597.00					4,192,457,459.00
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,741,227,962.00					2,734,180,190.00
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								45,000,000.00					52,894,000.00
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	4 Dokumen	14 Dokumen/Laporan	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15,000,000.00
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	14 Dokumen/Laporan	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10,000,000.00
2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	14 Dokumen/Laporan	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10,000,000.00
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Laporan	14 Dokumen/Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000,00
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	4 Laporan	14 Dokumen/Laporan	9.884.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.884.000,00
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.165.227.962,00					2.119.188.190,00
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	504 Orang/bulan	21 Dokumen	2.069.727.962,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	1.992.138.190,00
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	21 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	110.000.000,00
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Laporan	21 Dokumen	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.000.000,00
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Somcatoran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Somcatoran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dese	25 %	16 Laporan	21 Dokumen	8.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Somcatoran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Somcatoran SKPD	16 Laporan	7.150.000,00
2	19	01	2.08		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15.000.000,00					15.500.000,00
2	19	01	2.08	0008	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dese	25 %	2 Laporan	2 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.500.000,00
2	19	01	2.08		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15.000.000,00					15.500.000,00
2	19	01	2.08	0011	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dese	-	1 Orang	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	15.500.000,00
2	19	01	2.08		Administrasi Umum Perangkat Daerah								121.000.000,00					133.100.000,00
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dese	25 %	3 Paket	25 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	3 Paket	11.000.000,00
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dese	25 %	1 Paket	25 %	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000,00
2	19	01	2.08	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dese	25 %	2 Paket	25 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.500.000,00
2	19	01	2.08	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	7 Laporan	25 %	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	55.500.000,00
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50.000.000,00					55.000.000,00
2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Unit	1 Paket	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	55.000.000,00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								180.000.000,00					188.000.000,00
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	12 Laporan	-	190.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	209.000.000,00
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	12 Laporan	-	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.500.000,00
2	13	01	2.08	0005	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	12 Laporan	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000,00
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	12 Laporan	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.500.000,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.000.000,00					55.000.000,00
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	7 Unit	25 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	22.000.000,00
2	13	01	2.09	0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	10 Unit	25 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	22.000.000,00
2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Unit	25 Paket	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	1 Unit	11.000.000,00
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA								88.000.000,00					99.800.000,00
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa								88.000.000,00					99.800.000,00
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa													
						Persentase Desa yang Ditata sesuai standar Persentase Desa yang Ditata sesuai standar	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase Desa yang Ditata sesuai standar	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	10 Desa	25 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Desa	44.000.000,00
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa													
						Persentase Desa yang Ditata sesuai standar Persentase Desa yang Ditata sesuai standar	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Persentase Desa yang Ditata sesuai standar	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	10 Desa	25 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	22.000.000,00
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kodic Desa													
						Persentase Desa yang Ditata sesuai standar Persentase Desa yang Ditata sesuai standar	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kodic Desa	Persentase Desa yang Ditata sesuai standar	Kab. Lombata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	10 Desa	25 %	15.000.000,00	Insentif Pakal		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kodic Desa	10 Desa	16.500.000,00
2	13	02	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Persentase Desa yang Ditata sesuai standar Persentase Desa yang Ditata sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang Ditata sesuai standar	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	10 Laporan	25 %	10.000.000,00	Insentif Pakal		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	11.000.000,00
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								65.000.000,00					71.500.000,00

2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								65.000.000,00					71.500.000,00
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota													
						Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	5 Dokumen	25 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	22.000.000,00
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota													
						Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	5 Dokumen	25 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	22.000.000,00
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan													
						Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	5 Dokumen	25 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	27.500.000,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								500.000.000,00					554.999.999,00
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								500.000.000,00					554.999.999,00
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
						Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sekategori "Baik"	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sekategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	58 Dokumen	25 %	15.000.000,00	Insentif Fiskal		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	58 Dokumen	16.500.000,00
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa													
						Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sekategori "Baik"	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sekategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	58 Dokumen	25 %	15.000.000,00	Insentif Fiskal		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	58 Dokumen	16.500.000,00
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
						Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sekategori "Baik"	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sekategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	58 Dokumen	25 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	58 Dokumen	16.500.000,00

2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa												
						Persentase Desa yang Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kategori "Baik"	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	5200 Dokumen	25 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5200 Dokumen	82.500.000,00
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa												
						Persentase Desa yang Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kategori "Baik"	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Desa yang Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	9 Orang	25 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	9 Orang	22.000.000,00
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa												
						Persentase Desa yang Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kategori "Baik"	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase Desa yang Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	58 Dokumen	25 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	58 Dokumen	22.000.000,00
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa												
						Persentase Desa yang Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kategori "Baik"	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa yang Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	58 Dokumen	25 %	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	58 Dokumen	49.500.000,00
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa												
						Persentase Desa yang Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kategori "Baik"	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Desa yang Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	58 Laporan	25 %	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	58 Laporan	49.500.000,00
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa												

						Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	56 Laporan	25 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	56 Laporan	16.500.000,00
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa												
						Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	56 Dokumen	25 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	56 Dokumen	22.000.000,00
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa												
						Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	56 Dokumen	25 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	56 Dokumen	22.000.000,00
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa												
						Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	56 Dokumen	25 %	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	56 Dokumen	44.000.000,00
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD												
						Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	10 Orang	25 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	22.000.000,00
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa												

						Porsentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Porsentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	9 Desa	25 %	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	9 Desa	438.999.999,00
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
						Porsentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Porsentase Desa yang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berkategori "Baik"	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	0 Dokumen	25 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0 Dokumen	18.500.000,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								375.499.835,00					438.257.150,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta								375.499.835,00					438.257.150,00
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat													
						Porsentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif Porsentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Jumlah Dokumen Hasil identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Porsentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	1 Dokumen	25 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal		Jumlah Dokumen Hasil identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	28.000.000,00
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan													

						Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	58 Dokumen	25 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	58 Dokumen	27.500.000,00
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat													
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	2 Lembaga	25 %	38.498.888,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	20.797.150,00
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),													

						Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	5 Unit	25 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	22.000.000,00
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	10 Dokumen	25 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Dokumen	33.000.000,00
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													

						Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	5 Laporan	25 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	45.000.000,00
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	2 Laporan	25 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	22.000.000,00
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													

						Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	58 Dokumen	25 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	58 Dokumen	150.000.000,00
2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PKK	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	38 Keluarga	25 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	38 Keluarga	50.000.000,00
2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan													

						Porsentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan Kegiatan Ekonomi Produktif Porsentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PIK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Porsentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu dan PIK	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	10 Keluarga	25 %	20.000.000,00	Dana Transfor Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	22.000.000,00
											TOTAL	3.769.727.597,00					4.192.457.439,00

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lembata,

Yosep Raya, S. Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661224 199503 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

RENCANA KERJA
(RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mekanisme penyusunannya secara lengkap dan jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja terdiri dari tahap persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, tahap Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Tahapan Penetapan Renja. Penyusunan rancangan awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal renja PD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan

Dipindai dengan CamScanner

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjadi jembatan antara dokumen perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan dalam mendukung visi dan misi daerah. Selanjutnya renja ini disempurnakan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 92);
10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 39).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

a. Menjabarkan Rencana Strategis Daerah (RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2023-2026) kedalam Rencana Strategis tahunan perangkat Daerah (Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024) yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Tahunan Daerah (RKPD)
b. Mewujudkan Sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.3.2. Tujuan

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2024.
b. Menyediakan Dokumen yang komprehensif sehingga memberikan petunjuk yang jelas dalam melaksanakan program kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat Daerah, proses penyusunan Renja perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kabupaten dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tindak Lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada

Dipindai dengan CamScanner

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal dengan RKPD dengan hasil kebutuhan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Secara garis besar berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan seluruh Program /Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 dan dan perkiraan maju tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan;
c. Rencana Tindak Lanjut.

Dipindai dengan CamScanner

[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

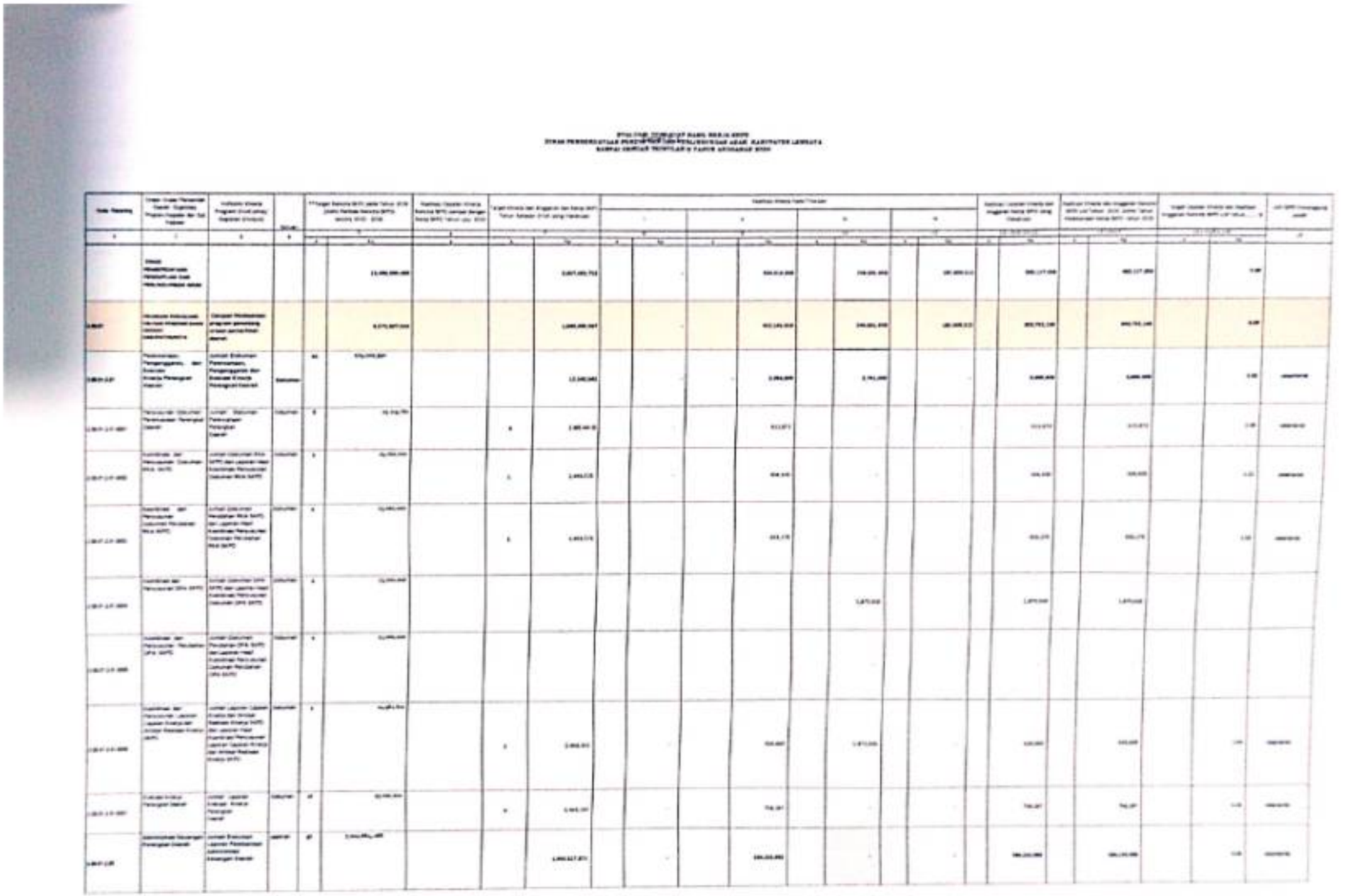

| | | |

| | | |

| | | |

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

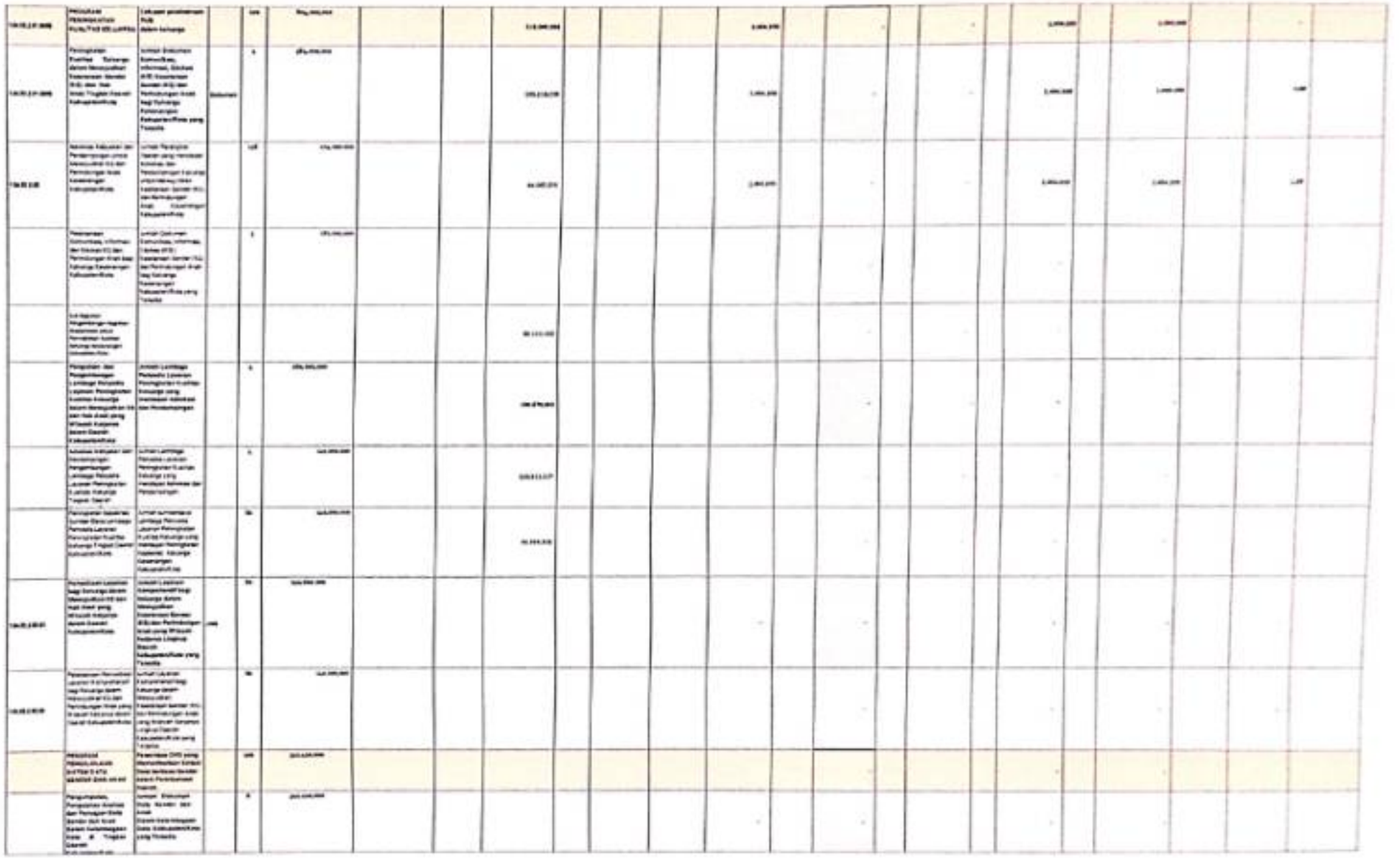

Dipindai dengan CamScanner

Dari tabel diatas nampak bahwa realisasi kinerja hingga triwulan II Tahun 2024 adalah 25 % dengan realisasi keuangan untuk Belanja Langsung sebesar 25,00% atau sebesar Rp.924.498.924,- dari total anggaran sebesar Rp.3.745.458.460,-. Adapun faktor penghambat pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah :

1. Perangkat Daerah belum mematuhi jadwal kegiatan beserta anggaran kas yang direncanakan;
2. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan;
3. Adanya perubahan kebijakan nasional berupa refocusing dan realokasi anggaran sebagai akibat dari Pandemi COVID-19.

Berdasarkan hasil evaluasi beserta faktor penghambatnya, dapat diambil langkah untuk pelaksanaan Renja sampai dengan akhir tahun maupun tahun berikutnya antara lain :

1. Agar dilakukan akselerasi/percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga realisasi keuangan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
2. Perumusan indikator kinerjanya harus konsisten mulai dari Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja serta DPPA sehingga tidak menghambat dalam proses pengukuran indikator kinerja.
3. Agar masing-masing Perangkat Daerah dalam mengusulkan kegiatan menggunakan pertimbangan yang logis, rasional dan disesuaikan dengan kesiapan pelaksanaannya sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai target.

Dipindai dengan CamScanner

2.1. Analisis Kinerja Dinas P2PA

Analisis Kinerja pada Dinas P2PA berdasarkan pada capaian kinerja pelayanan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas P2PA, yaitu :

Tabel II.2
Hasil Analisis Kinerja Dinas P2PA s/d Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir Periode Restra	Realisasi
Menigkatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial, Ekonomi	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial, dan Ekonomi	Prosentase jumlah kegiatan ormas untuk pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,social dan ekonomi	7,0%	5,5%
	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemnberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kab./Kota	Presentase jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Tingkat Daerah Kab/Kota	7,0	5,5%
Meningkatkan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya perlindungan terhadap Hak Perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Prosentase korban kekerasan Perempuan yang terlayani	100 %	100 %

Dipindai dengan CamScanner

3. Kurang memadaianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pendukung pelaksana kegiatan .
4. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Belum optimalnya pembangunan perempuan dan anak, Gender dan Pemberdayaan Perempuan sehingga masih terdapat ketimpangan pembangunan perempuan dan anak;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

		Prosentase anak Korban Kekerasan yang ditangani	100 %	100%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan, anak dan Keluarga	Presentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak yang terbentuk	40 %	25 %
		Presentase Sekolah Ramah Anak yang terbentuk	40%	25 %
	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date	Presentase tersedianya data dan indicator Gender dan anak tingkat Kabupaten per periodic	95%	80 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas P2PA Kabupaten Lembata belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Masih rendahnya kinerja dan disiplin aparatur;

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan diimplementasikan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan secara terpadu dan menyeluruh yang diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen jangka menengah daerah maupun tahunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tetap memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Tema pembangunan nasional tahun 2024 adalah : **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"** Sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup. Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health securitt*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi system perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan kedalam tujuh prioritas nasional, yaitu :

Dipindai dengan CamScanner

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki tupoksi : menyelenggarakan tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 sebanyak 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan. program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dibawa ini :

Secara garis besar program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
   - 1.1 Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
     - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangka Daerah
     - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
     - 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
     - 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - 1.1.5 Evaluasi Kinerja SKPD
   - 1.2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
     - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunann laporan Keuangan Akhir Tahun
   - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
     - 1.3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat daerah
     - 1.4.4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - 1.4.5 Penyedoiaan Barang Cetakkan dan Penggandaan
     - 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - 1.5.4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     - 1.5.5 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
     - 1.5.6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   - 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   - 2.1 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial,dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota
     - 2.1.1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

2.2.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

2.2.2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3 Program Perlindungan Perempuan

3.1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup daerah Kab/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendasmpingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

3.2 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota

3.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota

3.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah kabupaten/Kota.

3.3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanaganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanagan Kab/Kota

4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga

4.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota

4.1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota.

4.1.2. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota

4.2 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/Kota

4.2.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah Kab/Kota.

4.2.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota

5 Program Pemenuhan Hak Anak

5.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.

5.1.1. Advokasi Kebiojakan dan Pendampingan OPemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota

6 Program Perlindungan Khusus Anak

Dipindai dengan CamScanner

6.1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhada[p anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kab/Kota.

6.1.1 Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiiatan Pencegahan KTA.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan serta tolok ukur dan pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaki tahun 2024 disajikan dalam bentuk tabel. Ada 2 tabel yang disajikan yaitu tabel IV.1 merupakan matriks program dan kegiatan yang masih menggunakan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana tertuang pula dalam Renstra 2023-2026 dan juga lampiran matriks bab v pada RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024. Tabel IV.2 merupakan hasil pemetaan atau mapping terhadap program kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Bab. IV 1. Matriks Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Wulandoni Tahun 2022

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 13/2006)	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 90/2019)	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF		OPD
						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2022	2023	
1					2	3					4	5	6	7	8	9	10
		4.04.05			KECAMATAN ATADEI										1,156,648,550	1,284,309,845	Kec. Atadei
4	04	4.04.05			PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD												Kec. Atadei
4	04	4.04.05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												Kec. Atadei
4	04	4.04.05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	Kec Atadei	12 Bulan	2,600,000	2,860,000	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Kec Atadei	2 Jasa	3,000,000	3,300,000	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	01	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dimiliki dan dioperasi	Kec Atadei	8 Unit	10,200,000	11,220,000	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	01	06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Kebersihan Kantor	Kec Atadei	12 Bulan	1,500,000	1,650,000	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	01	08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kec Atadei	45 Jenis	9,918,170	10,910,987	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	01	09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Kec Atadei	24.055 Lembar	8,360,600	9,196,660	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	01	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	7	01	01	2.06	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Kec Atadei	20 Jenis	3,000,000	3,300,000	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	01	15	Penyediaan Makanan dan Minuman	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan	Kec Atadei	84 ORANG	10,775,000	11,848,500	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	01	16	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta pendampingan kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	7	01	01	2.06	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Lewoleba, Kupang dan Jakarta	151 Kali	70,800,000	77,880,000	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												Kec. Atadei
4	04	4.04.05	02	02	Pembangunan rumah jabatan/rumah dinas	7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	Kec Atadei	1 Unit	550,000,000	605,000,000	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	02	04	Pengadaan kendaraan dinas jabatan/kendaraan dinas operasional	7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Kec Atadei	1 Unit	30,000,000	33,000,000	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	02	05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Kec Atadei	2 Laptop	5,000,000	5,500,000	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	02	12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7	01	01	2.09	03	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kec Atadei	1 unit	7,794,380	8,573,818	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	02	13	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas jabatan/kendaraan dinas operasional	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Kec Atadei	2 roda empat, 7 roda 2	15,456,300	17,781,930	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	02	14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	Kec Atadei	2 Jenis (3 laptop, 2 printer)	2,088,800	2,392,400	Kec. Atadei
4	04	4.04.05	03		Program Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPPK												Kec. Atadei
4	04	4.04.05	03	01	Fasilitasi Pelaksanaan Manajemen PNS pada Perangkat Daerah	7	01	01	2.03	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	Jogjakarta	2 Orang	50,000,000	55,000,000	Kec. Atadei

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 13/2006)	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 90/2019)	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF		OPD
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2024	2025	
1	2	3					4	5	6	7	9	9	10
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.08.01.2.02.0005					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Lembata	4 laporan	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.08.01.2.03					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab Lembata	4 Laporan	Rp.497.747	Rp.497.747	Dinas PdPA
	Penyediaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						Penyediaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kab Lembata	1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA
2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.08.01.2.03.0005					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Lembata	4 Laporan	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.08.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab Lembata		Rp.000,000	Rp.000,000	Dinas PdPA
2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2.08.01.2.05.0003					Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab Lembata	1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kab Lembata	1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab Lembata	1 laporan	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Lembata	1 laporan	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA
2.08.01.2.05.0005	Administrasi Umum Perangkat daerah	2.08.01.2.05.0005					Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah	Kab Lembata				Dinas PdPA
2.08.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.08.01.2.06					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Kab Lembata		Rp.[illegible]	Rp.[illegible]	Dinas PdPA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Lembata	1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.08.01.2.06.0002					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Lembata	10 Paket	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.08.01.2.06.0005					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Lembata	10 Paket	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA
	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Lembata	1 Dokumen	[illegible]		Dinas PdPA
2.08.01.2.06.0009	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.08.01.2.06.0009					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Lembata	10 Laporan	[illegible]	[illegible]	Dinas PdPA

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 13/2006)	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 90/2019)	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF		OPD
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2024	2025	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
x.08.xx.x.xx.xxx1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	x.08.xx.x.xx.xxx1					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	Dinas PJPA
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	33 PD	75,000,000	75,000,000	Dinas PJPA
x.08.xx.x.xx.xxx8	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota**	x.08.xx.x.xx.xxx8					**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan**	Kab Lembata	33 PD	75,000,000	75,000,000	Dinas PJPA
x.08.xx.x.03	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	**x.08.xx.x.03**					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Kewenangan	Kab Lembata	25 Organisasi	65,000,000	65,000,000	Dinas PJPA
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	25 Organisasi	50,000,000	50,000,000	Dinas PJPA
x.08.xx.x.xx.xxx3	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota**	x.08.xx.x.xx.xxx3					**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota**	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang dilatih dan didampingi	Kab Lembata	25 Organisasi	25,000,000	25,000,000	Dinas PJPA
x.08.xx.x.03	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kab/Kota**	**x.08.xx.x.03**					**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota**	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab Lembata	30 LPLPP	70,000,000	70,000,000	Dinas PJPA
x.08.xx.x.03.xxxx	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kab/Kota	x.08.xx.x.03.xxxx					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab Lembata	10 LPLPP		25,000,000	Dinas PJPA

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Perwakilan/Lingkup)	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Perwakilan/Lingkup)	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF		
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Komunikasi Lintas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Penyelenggaraan Komunikasi Lintas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Lintas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab/Lembaga	29 PTP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio terhadap Kekerasan Perempuan termasuk Korban TPPO (Per 100.000 Penduduk)	Kab/Lembaga		[illegible]		[illegible]
x.x8.03	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	x.x8.03					Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab/Lembaga	29 PTP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
x.x8.03.x.xx	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	x.x8.03.x.xx					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab/Lembaga	1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga aktivitas rehabilasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab/Lembaga	29 layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
x.x8.03.x.xx.xxxx		x.x8.03.x.xx.xxxx							Kab/Lembaga	29 Layanan			
x.x8.03.x.xx	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	x.x8.03.x.xx					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Kab/Lembaga	29 Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota yang mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab/Lembaga	29 Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
x.x8.03.x.xx.xxxx	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	x.x8.03.x.xx.xxxx					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah layanan Tindak lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Kab/Lembaga	29 Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
x.x8.03.x.xy	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan/Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	x.x8.03.x.xy					Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan/Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dan bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Kab/Lembaga	29 Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan sarana Prasarana Layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabkota						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan sarana Prasarana Layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabkota	Jumlah Penyediaan Advokasi Kebijakan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Kab/Lembaga	29 Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 13/2006)	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 90/2019)	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF		OPD
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2024	2025	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	2.08.03.2.03.0002					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab Lombata				Dinas PPPA
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**2.08.04**					**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan pelaksanaan PUG dalam keluarga**	Kab Lombata		883,000,000	883,000,000	Dinas PPPA
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	2.08.04.2.01					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	**Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	Kab Lombata	1 Dokumen	98,000,000	98,000,000	Dinas PPPA
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujdkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujdkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lombata	39 PD	53,000,000	53,000,000	Dinas PPPA
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi,Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	2.08.04.2.01.0002					Pelaksanaan Komunikasi,Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota yang tersedia	Kab Lombata	1 Dokumen	45,000,000	45,000,000	Dinas PPPA
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	2.08.04.2.01.0003					Pengembangan Kegatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab Lombata	1 Lembaga			Dinas PPPA
2.08.04.2.02	**Penguatan dan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota**	**2.08.04.2.02**					Penguatan dan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan**	Kab Lombata	**1 Lembaga**	70,000,000	70,000,000	Dinas PPPA
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0001					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab Lombata	1 Lembaga	35,000,000	35,000,000	Dinas PPPA
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0002					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lombata	30 orang	35,000,000	35,000,000	Dinas PPPA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 13/2006)	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 90/2019)	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF		OPD
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Lombata		15,000,000	15,000,000	Dinas PPPA
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Lombata	10 orang	15,000,000	15,000,000	Dinas PPPA
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memanfaatkan Sistem Data berbasis Gender dalam Perencanaan Daerah	Kab Lombata		88,000,000	88,000,000	Dinas PPPA
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Lombata	1 Dokumen	88,000,000	88,000,000	Dinas PPPA
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota						Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Lombata	1 Dokumen	18,000,000	18,000,000	Dinas PPPA
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lombata	1 Dokumen	68,000,000	68,000,000	Dinas PPPA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak	Kab Lombata		470,000,000	464,589,949	Dinas PPPA
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01					Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pelaksaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lombata	25	385,000,000	337,589,949	Dinas PPPA
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0001					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab Lombata	1 Dokumen	85,000,000	85,000,000	Dinas PPPA

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 13/2006)	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 90/2019)	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF		OPD
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2024	2025	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab.Kota/Kota						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab/Lembata	1 Dokumen	300,000,000	292,389,349	Dinas PPPA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab/Lembata	1 Dokumen	105,000,000	105,000,000	Dinas PPPA
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab/Lembata	20 Layanan	30,000,000	30,000,000	Dinas PPPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab/Lembata	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	Dinas PPPA
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab/Lembata	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	Dinas PPPA
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab/Lembata	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	Dinas PPPA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Anak Korban kekerasan yang ditangani	Kab/Lembata	25	260,000,000	260,000,000	Dinas PPPA
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Tyerhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	2.08.07.2.01					**Pencegahan Kekerasan Tyerhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Kab/Lembata	33	50,000,000	50,000,000	Dinas PPPA
2.08.07.2.01.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Kewenangan Kab/Kota	2.08.07.2.01.0004					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Kewenangan Kab/Kota	Kab/Lembata	33 PD	25,000,000	25,000,000	Dinas PPPA

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 13/2006)	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri 90/2019)	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF		DPA
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2024	2025	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota						Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan anak yang memerlukan Perlindungan khusus Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	Rp.300.000	Rp.300.000	Dinas PPA

Dipindai dengan CamScanner

Tabel IV 1
MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 dan PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
2.08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,158,744,884			4,188,252,252	Dinas PePA
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah			1,634,744,884			1,371,084,000	
2.08.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Lembata	11 Dokumen	42,500,000		11 Dokumen	45,402,400	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Lembata	1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	6,213,760	
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Lembata	1 Dokumen	8,000,000		1 Dokumen	8,500,000	
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab Lembata	1 Dokumen	8,000,000		1 Dokumen	8,500,000	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Lembata	1 Dokumen	8,000,000		1 Dokumen	8,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab Lembata	1 Dokumen	8,000,000		1 Dokumen	8,500,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Lembata	2 Laporan	6,000,000		2 Laporan	6,480,600	
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Lembata	4 laporan	8,000,000		4 laporan	8,500,000	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Peleksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	Kab Lembata		**1,803,292,063**			**1,803,537,063**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Lembata	14 Dokumen	1,658,779,663		14 Dokumen	1,658,779,663	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Lembata	12 Dokumen	137,514,400		12 Dokumen	137,757,400	
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Lembata	2 laporan	7,000,000		2 laporan	7,000,000	
2.08.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab Lembata**	**2 Laporan**	**15,437,747**		**2 Laporan**	**15,437,747**	
	Penyediaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kab Lembata	1 Dokumen	6,000,000		1 Dokumen	6,000,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
2.08.01.2.05.0003	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Lembata	1 Laporan	19,437,747		1 Laporan	19,437,747	
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Kab Lembata**		**85,000,000**			**85,000,000**	
2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab Lembata	1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kab Lembata	1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab Lembata	1 laporan	35,000,000		1 laporan	35,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Lembata	1 Laporan	40,000,000		1 laporan	40,000,000	
2.08.01.2.05.0005	Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kab Lembata						
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah**	**Kab Lembata**		**180,622,071**			**158,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Lembata	1 Dokumen	2,500,000		1 Dokumen	2,500,000	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Lembata	10 Paket	38,500,000		10 Paket	38,500,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
2.08.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Lembata	10 Paket	25,000,000		10 Paket	25,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kab Lembata	1 Dokumen	1,000,000		1 Dokumen		
2.08.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Lembata	10 Laporan	148,611,071		10 Laporan	100,000,000	
2.08.01.2.08	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab Lembata**		**125,000,000**			**80,000,000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab Lembata	1 Dokumen	45,000,000		1 Dokumen		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab Lembata	1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab Lembata	1 Dokumen	30,000,000		1 Dokumen	30,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab Lembata		**37,245,000**			37,245,000	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Lembata	12 laporan	44,245,000		12 laporan	**44,245,000**	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Lembata	12 laporan	15,500,000	Jakarta	12 laporan	15,000,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu indikatif		Target	Pagu indikatif	
1.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Lembata	1 laporan	38,000,000		1 laporan	38,000,000	
1.08.01.2.03	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)**	**Kab Lembata**	**unit**	**78,000,000**		**unit**	75,000,000	
1.08.01.2.03.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Lembata	2 unit	50,000,000		2 unit	50,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab Lembata	2 unit	6,000,000		2 unit	6,000,000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang d pelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Kab Lembata	2 unit	20,000,000		2 unit	20,000,000	
1.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Prosentase anggaran yang responsif gender pada APBD**	**Kab Lembata**		**455,000,000**			**455,000,000**	
1.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah Lembaga Instansi Pemerintah tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang telah dilatih PUG**	**Kab Lembata**		**320,000,000**			**320,000,000**	
	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	85,000,000		1 Dokumen	85,000,000	
1.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	75,000,000		1 Dokumen	75,000,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Perecanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	33 PD	75,000,000		33 PD	75,000,000	
x.08.xx.2.01.0008	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk Perecanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	33 PD	85,000,000		33 PD	85,000,000	
x.08.xx.2.xx	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab Lembata**	**25 Organisasi**	**65,000,000**		**25 Organisasi**	**65,000,000**	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	25 Organisasi	30,000,000		25 Organisasi	30,000,000	
x.08.xx.2.xx.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	25 Organisasi	35,000,000		25 Organisasi	35,000,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
x.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang dilatih dan didampingi	Kab Lembata	30 LPLPP	70,000,000		30 LPLPP	70,000,000	
2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab Lembata	30 LPLPP			30 LPLPP	35,000,000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab Lembata	29 PD	35,000,000		29 PD	35,000,000	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata		35,000,000				
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio terhadap Kekerasan Perempuan termasuk Korban TPPO (Per 100.000 Penduduk)	Kab Lembata	29 PD	350,000,000		29 PD	350,000,000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	65,000,000		1 Dokumen	65,000,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	25 layanan	65,000,000		25 layanan	65,000,000	
2.08.03.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga advokasi kebijakan dan pendapingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten Kota	Kab Lembata	16 Layanan			16 Layanan		
2.08.03.2.01	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Kab Lembata	12 Layanan	110,000,000		12 Layanan	110,000,000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota yang mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab Lembata	25 Layanan	65,000,000		25 Layanan	65,000,000	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Perasanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah layanan Tindak lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	12 Layanan	45,000,000		12 Layanan	45,000,000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PerlindunganPerlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Kab Lembata	25 Layanan	175,000,000		25 Layanan	175,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan sarana Prasarana Layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah Penyediaan Advokasi Kebijakan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	25 Layanan	175,000,000		25 Layanan	175,000,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab Lembata						
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan pelaksanaan PUG dalam keluarga	Kab Lembata		103,000,000			103,000,000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Lembata	1 Dokumen	58,000,000		1 Dokumen	58,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	33 PD	55,000,000		33 PD	55,000,000	
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bag Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi(Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota yang tersedia	Kab Lembata	1 Dokumen	45,000,000		1 Dokumen	45,000,000	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Kegatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab Lembata	1 Lembaga			1 Lembaga		

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
2.08.04.2.02	Penguatan dan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab Lembata	1 Lembaga	70,000,000		1 Lembaga	70,000,000	
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab Lembata	1 Lembaga	35,000,000		1 Lembaga	35,000,000	
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	20 orang	35,000,000		20 orang	35,000,000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Lembata		35,000,000			35,000,000	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Lembata	20 orang	35,000,000		20 orang	35,000,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memanfaatkan Sistem Data berbasis Gender dalam Perencanaan Daerah	Kab Lembata		80,000,000			84,000,000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Lembata	1 Dokumen	86,000,000		1 Dokumen	88,000,000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Lembata	1 Dokumen	18,000,000		1 Dokumen	18,000,000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	68,000,000		1 Dokumen	68,000,000	
1.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak	Kab Lembata		470,000,000			482,369,942	
1.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pelaksaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	15	305,000,000		15	357,369,942	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1.08.06.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab Lembata	1 Dokumen	65,000,000		1 Dokumen	65,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	310,000,000		1 Dokumen	232,589,949	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen HasilPenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	105,000,000		1 Dokumen	105,000,000	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	20 Layanan	30,000,000		20 Layanan	30,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Lembata	1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000	
1.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Presentase Anak Korban kekerasan yang ditangani**	**Kab Lembata**	**75**	**160,000,000**		**75**	**160,000,000**	
1.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota**	**Kab Lembata**	**19**	**60,000,000**		**19**	**60,000,000**	
1.08.07.1.01.0004	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Kewenangan Kab/Kota	Kab Lembata	19 PD	35,000,000		19 PD	35,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak Kewenangan Kab/Kota		1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000	
	Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kab/Kota	**Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapat layanan pengaduan kewenangan Kab/Kota**		**20 Orang**	**100,000,000**		**20 Orang**	**100,000,000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapat layanan pengaduan kewenangan Kab/Kota		20 orang	25,000,000		20 orang	25,000,000	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		OPD
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah Layanan Tindka Lanjut Pengaduan yang memerlukan koordinasi dan Sinkronisasi bagi anak yang memerluka perlindungan khusus Kewenangan Kab/Kota		30 layanan	25,000,000		30 layanan	25,000,000	
	Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Edukasi anak yang memerlukan Perlindungan khusus kewenangan Kab/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan Perlindungan khusus Kewenangan Kab/Kota		1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan anak yang memerlukan Perlindungan khusus Kewenangan Kab/Kota		1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus Kewenangan Kab/Kota**		**1 Dokumen**	**240,000,000**		**1 Dokumen**	**240,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus Kewenangan Kab/Kota		1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan anak yang memerlukan Perlindungan khusus Kewenangan Kab/Kota		1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000	

Rekap Duma PSPA 2024

PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

a. Setiap Bidang/Seksi/Bagian, wajib menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) Tahun 2024 yang dihimpun dan diharmonisasikan oleh Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Program/Kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024

b. Dalam hal alokasi atau ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana temuat dalam Renja, maka penyusunan RDPA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2024

a. Setiap Bidang/Seksi/Bagian yang menjadi unit kerja pelaksanaan Renja harus mengevaluasi Renja tahun 2024 yakni membandingkan antara target program/kegiatan dan jumlah dana dalam Renja dengan jumlah program/kegiatan yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2024

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2024menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun berikutnya.

Dipindai dengan CamScanner

5.3 Rencana Tindak Lanjut Renja Tahun 2021

a. Setiap Bidang/Seksi/Bagian sebagai PPTK harus mendalami Renja Tahun 2024 secara sungguh-sungguh saat pembahasan perubahan anggaran.

b. Setiap Bidang/Seksi/Bagian wajib menyusun DPA dan Anggaran Kas dan disampaikan kepada TAPD untuk mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

c. Setiap Bidang/Seksi/Bagian selaku PPTK wajib melaksanakan DPA sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

d. Setiap Bidang/Seksi/Bagian wajib mengendalikan pelaksanaan DPA dan membuat laporan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rumusan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 sebagai acuan dalam penyusunan R-DPA tahun 2024 untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

Kepala Dinas P2PA,

Maria Anastasia Bara Beja, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19760911 199511 2 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan
   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal
   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupen Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Lembata Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 288);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Lembata

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD pada tahun 2026 (akhir periode RKD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023 (Triw III)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2					3	3	4		5		6		7		8		9	
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA		100	29,247,655,100	0	-	20	10,774,236,452	-	5,487,072,685	0	5,487,072,685	0	50.9
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		100	12,634,493,320	0	-	20	3,494,156,714	29	2,469,859,479	29	2,469,859,479	29	70.7
1	06	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	25	**11,694,858,900**	0	-	25	**2,978,957,078**	30	2,020,523,238	30	**2,020,523,238**	121	67.8
1	06	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya kesesuaian antara Program/kegiatan/sub kelatan serta indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	**120,000,000**	0	-	100	**11,216,100**	50	7,370,100	50	**7,370,100**	50	65.7
1	06	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	90,000,000	0	-	2	4,470,000	2	4,245,000	2	**4,245,000**	13	95.0

1	06	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	30,000,000	0	-	2	Rp6,746,100	1	3,125,100	1	3,125,100	13	46.3
1	**06**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan admnistrasi keuangan perangkat daerah	**100**	**9,567,358,900**	**0**	-	**100**	**2,561,761,043**	7.95454545	1,736,761,723	8	**1,736,761,723**	8	67.8
1	06	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	8,697,358,900	0	-	14	2,393,696,193	11	1,622,806,723	11	**1,622,806,723**	20	67.8
1	06	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrator pengelola keuangan SKPD	48	750,000,000	0	-	12	158,051,350	9	106,460,000	9	**106,460,000**	19	67.4
1	06	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	72	120,000,000	0	-	18	10,013,500	11	7,495,000	11	**7,495,000**	15	74.8
1	**06**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Meningkatnya kinerja pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**100**	**45,000,000**	**0**	-	**25**	**25,908,750**	32	15,120,000	32	**15,120,000**	32	58.4
1	06	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	45,000,000	0	-	1	25,908,750	1	15,120,000	1	**15,120,000**	9	58.4
													-					-
													-					-
1	06	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kinerja pelaksanaan admnistrasi Umum Perangkat Daerah	**100**	**765,000,000**	**0**	-	**100**	**87,863,165**	29	60,921,758	29	**60,921,758**	29	69.3
1	06	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	80,000,000	0	-	20	13,922,215	76	10,538,678	76	**10,538,678**	1262	75.7

1	06	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	60,000,000	0	-	1	2,050,000	100	2,050,000	100	**2,050,000**	2500	100.0
1	06	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	80,000,000	0	-	1	20,162,950	1	9,999,800	1	**9,999,800**	8	49.6
1	06	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	545,000,000	0	-	10	51,728,000	74	38,333,280	74	**38,333,280**	185	74.1
													-					-
													-					-
1	**06**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100**	**597,500,000**	**0**	-	**100**	**146,115,950**	42	111,492,750	42	**111,492,750**	42	76.3
1	06	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	375,000,000	0	-	12	107,482,000	9	87,700,000	9	**87,700,000**	19	81.6
1	06	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	190,000,000	0	-	12	30,161,700	9	15,320,500	9	**15,320,500**	19	50.8
1	06	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	32,500,000	0	-	12	8,472,250	6	8,472,250	6	**8,472,250**	13	100.0
1	**06**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	**100**	**600,000,000**	**0**	-	**100**	**146,092,070**	36	88,856,907	36	**88,856,907**	36	60.8
1	06	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200	570,000,000	0	-	50	138,462,070	40	81,386,907	40	**81,386,907**	20	58.8
1	06	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	30,000,000	0	-	20	7,630,000	25	7,470,000	15	**7,470,000**	19	97.9

												-					-
1	06	02			**Program Pemberdayaan Sosial**	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar	25	**145,000,000**	0	-	25	**45,107,636**	-	14,054,900	0	**14,054,900**	0	31.2
1	6	2	2.01		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	"Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)"	100	**145,000,000**	0	-	100	**45,107,636**	-	14,054,900	0	**14,054,900**	0	31.2
1	6	2	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	175	145,000,000	0	-	100	45,107,636	-	14,054,900	0	**14,054,900**	0	31.2
1	06	04			**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan serta PMKS lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25	**475,000,000**	0	-	25	**415,200,000**	34	380,504,441	34	**380,504,441**	134	91.6
1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Me ningkatnya Prosentase Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	**475,000,000**	0	-	100	**415,200,000**	27	380,504,441	27	**380,504,441**	27	91.6
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	130	150,000,000	0	-	30	125,271,500	-	107,836,441	0	**107,836,441**	0	86.1
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	175	175,000,000	0	-	40	160,695,500	40	151,015,500	40	**151,015,500**	23	94.0

						Kabupaten/Kota											
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5500	150,000,000	0	-	1000	129,233,000	1,000	121,652,500	1000	121,652,500	18	94.1
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	**25**	**319,634,420**		-	**20**	**54,892,000**	29	54,776,900	29	**54,776,900**	0	99.8
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Jumlah tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana	**100**	**319,634,420**	**0**	-	**100**	**54,892,000**	66	54,776,900	66	**54,776,900**	66	99.8
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36	319,634,420	0	-	9	54,892,000	137	54,776,900	137	**54,776,900**	380	99.8
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**100**	**16,613,161,780**	**0**	-	**25**	**7,280,079,738**	16	2,976,413,206	16	**2,976,413,206**	16	40.9
2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**	Cakupan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**25**	**330,000,000**	**0**	-	**25**	**208,800,050**	15	137,643,100	15	**137,643,100**	59	65.9

2	14	02	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	330,000,000	0	-	100	208,800,050	26	137,643,100	26	137,643,100	26	65.9
2	14	02	2.02	11	Penyediaan data dan informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	48	180,000,000	0	-	12	90,600,000	9	90,300,000	9	90,300,000	19	99.7
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	48	150,000,000	0	-	12	118,200,050	9	47,343,100	9	47,343,100	19	40.1
2	14	03			**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	Cakupan Pelayanan Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota	25	14,291,321,780	0	-	25	5,259,830,840	9	1,876,481,258	9	1,876,481,258	37	35.7
2	14	03	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	100	3,980,000,000	0	-	100	2,179,038,590	21	722,384,858	21	722,384,858	21	33.2
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	380,000,000	0	-	1	149,999,890	1	78,872,358	1	78,872,358	19	52.6
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rakordes, dan Mini Lokakarya	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	432	1,600,000,000	0		108	237,410,000	63	148,635,000	63	148,635,000	14	62.6

2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	48	1,800,000,000	0	-	12	1,396,388,700	9	494,877,500	9	**494,877,500**	19	35.4
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	48	200,000,000	0	-	12	395,240,000	-	-	0	-	0	-
2	**14**	03	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	"Meningktanya Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diikursertakan dalam penguatan kapasitas terkait Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) "	**100**	**3,299,200,000**	0	-	**100**	**428,000,000**	38	282,000,000	38	**282,000,000**	100	65.9
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4	600,000,000	0	-	1	**126,000,000**	1	100,800,000	1	**100,800,000**	25	80.0
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1208	2,699,200,000			302	302,000,000	200	181,200,000	200	**181,200,000**	17	60.0

2	14	03	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Meningktanya Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100	5,159,000,000	0	-	100	**2,287,292,250**	9	627,571,400	9	**627,571,400**	9	27.4
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	48	76,000,000	0	-	12	48,255,000	9	21,199,000	9	**21,199,000**	19	43.9
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7230	2,583,000,000	0	-	1760	1,044,280,000	646	317,260,000	646	**317,260,000**	9	30.4
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	40	2,500,000,000	0	-	10	1,194,757,250	24	289,112,400	24	**289,112,400**	60	24.2
2	14	03	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**	Meningkatnya Jumlah Organisasi dan Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100	**1,853,121,780**	0	-	100	365,500,000	21	244,525,000	21	**244,525,000**	21	66.9
2	14	03	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	92	1,853,121,780			23	365,500,000	67	244,525,000	67	**244,525,000**	73	66.9

2	14	04			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	25	**1,991,840,000**	-	-	25	**1,811,448,848**	50	1,003,088,848	50	**1,003,088,848**	200	55.4
2	14	04	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Meningkatnya tingkat Keluarga Sejahtera	100	**1,991,840,000**	0	-	100	**1,811,448,848**	44	1,003,088,848	44	**1,003,088,848**	44	55.4
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	276	140,000,000	0	-	453	**868,308,848**	200	407,588,848				-
2	14	04	2.01	02	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1812	1,851,840,000			10	943,140,000	9	595,500,000	9	**595,500,000**	0	63.1

Pada tabel 2.1, yaitu kolom 5 yang memuat realisasi target kinerja renja tahun 2022 tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 6, 7, dan 8 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan akan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel.2.2

Rencana Kinerja Pelayanan Tahun 2023-2024

No	Indikator	Target Renstra		Proyeksi Pencapaian		Hasil Analisis
		2023	2024	2023	2024	
Urusan Sosial						
1	Persentase Penduduk yang tercakup jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Target Renstra		Proyeksi Pencapaian		Hasil Analisis
		2023	2024	2023	2024	
2	Presentase PMKS yang ditangani	71,5%	71,75%	71,5%	71,75%	
3	Presentasi Pelayanan Bantuan ke Penyandang Cacat	86,75%	87,15%	86,75%	87,15%	
4	Persentase Pelayanan Bantuan kepada anak terlantar dan pekerja social	82,99%	83,16%	82,99%	83,16%	
5	Persentase Pelayanan Bantuan kepada Warga Negara Korban Bencana	92,35%	92,40%	92,35%	92,40%	
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	25%	25%	25%	25%	
7	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	90%	90%	90%	90%	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Cakupan Peserta KB Aktif	77,80%	78,25%	77,80%	78,25%	
2	Akseptor KB	13500	14250	13500	14250	
3	Presentase Keluarga Sejahtera	92,20%	94,15%	92,20%	94,15%	
4	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)	57	57	57	57	
Penunjang Urusan dalam rangka Pencapaian Tujuan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi						
	Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renja/Perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKA/Perubahan RKA	100%	100%	100%	100%	
	Capaian Evalausi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	25%	50%	25%	50%	
	Persentase Kesesuaian	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Target Renstra		Proyeksi Pencapaian		Hasil Analisis
		2023	2024	2023	2024	
	Indikator Kinerja pada Dokumen Rentra, Renja, RKA, Lakip dan LPDD					
	Persentase Capai Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	90%	90%	90%	90%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Lembata:

1. Bidang Sosial. Permasalahan yang dihadapi adalah
   - Masalah pelayanan rehabilitasi sosial
   - Masalah pemberdayaan dan bantuan sosial
2. Bidang Keluarga Berencana.

   Persoalan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Selain itu kekurangan tenaga PLKB sesuai standar pelayanan minimum dengan rasio 1 PLKB: 2 Desa. Faktanya saat ini, 1 PLKB melayani 1 kecamatan.
3. Manajemen dan koordinasi.

   Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program yang baik antar Bidang bidang, antar Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Stakeholders.
4. Personil pendukung.
   - Jumlah staf yang belum memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan analisis beban kerja pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terbatasnya jumlah petugas lapangan yaitu Peyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
   - Belum adanya uraian tugas bagi jabatan fungsional.
   - Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar aparatur.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata:

- Tantangan:

  - Keterbatasan pendanaan pemerintah dan masih lemahnya pemahaman masyarakat dan pembuat kebijakan pembangunan nasional baik tingkat pusat maupun daerah
  - Komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap program Rehabilitasi sosial dan KKBPK terutama yang terkait kebijakan, perencanaan program dan penggangaran masih lemah.
  - Tuntutan dan aspirasi semakin beragam, dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

- Peluang:
  - Teknologi, informasi dan komunikasi terkait perencanaan yang semakin berkembang (*e-planning*/SIPD).
  - Semakin banyaknya program-program peningkatan Rehabilitasi Sosial dan Pengembangan Keluarga Berencana dari kementerian/lembaga yang dapat diakses.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata, adalah:

1. *Mindset* pola perencanaan harus dirubah sehingga selaras dengan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RENSTRA, RENJA, DPA dan Perjanjian Kinerja sehingga memudahkan perhitungan dan pengukuran kinerja.
2. Perlu adanya penajaman program dan kegitan yang secara langsung menyentuh dan mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja.
3. Perlu adanya komitmen yang kuat dari Dinas Sosail, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendkung sasaran strategis dan indikator kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.
4. Belum tersedianya sistem pengolahan data yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek dan diklat

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Lembata

Kode Rekening					RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3,495,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4,498,300,838
TUJUAN. 1 .					Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				
SASARAN 1.1.					Meningkatnya Angka AKIP dan Mempertahankan Opini BPK (WTP)					Meningkatnya Angka AKIP dan Mempertahankan Opini BPK (WTP)				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25 Persen	3,035,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25 Persen	3,023,782,217
1	06	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18 Dokumen	25,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18 Dokumen	6,762,783
1	06	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata	4 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata	4 Dokumen	3,011,904
1	06	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	2 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	2 Dokumen	-
1	06	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	2 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	2 Dokumen	-
1	06	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	2 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	2 Dokumen	-
1	06	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	2 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	2 Dokumen	2,729,879

1	06	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lembata	4 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lembata	4 Laporan	-
1	06	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata	2 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata	2 Laporan	-
1	**06**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**		**33 Dokumen**	**2,460,000,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**		**33 Dokumen**	**2,638,773,437**
1	06	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lembata	14	2,300,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lembata	14	2,518,076,447
1	06	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Lembata	12 Dokumen	150,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Lembata	12 Dokumen	118,070,000
1	06	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lembata	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lembata	1 Laporan	-
1	06	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Lembata	18 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Lembata	18 Laporan	2,624,990
1	**06**	**01**	**203**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**4 Dokumen**	**20,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**4 Dokumen**	**21,719,997**
1	06	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	-
1	06	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lembata	2 Laporan	20,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lembata	2 Laporan	21,719,997
1	06	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lembata	1 Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lembata	1 Laporan	-
1	**06**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengurusan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**50 Dokumen**	**70,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengurusan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**50 Dokumen**	-
1	06	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Lembata	50 paket	50,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Lembata	50 paket	-
1	06	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lembata	50 Dokumen	5,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lembata	50 Dokumen	-

1	06	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta		
1	06	01	205	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kabupaten Lembata	1 Orang	5,000,000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kabupaten Lembata	1 Orang	-
1	06	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	3 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	3 Orang	-
1	06	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	3 Orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	3 Orang	-
1	**06**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah**		**25 Persen**	**115,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah**		**25 Persen**	**69,969,318**
1	06	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Lembata	1 Paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Lembata	1 Paket	-
1	06	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Lembata	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Lembata	1 Paket	5,000,418
1	06	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Lembata	1 Paket	5,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Lembata	1 Paket	-
1	06	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Lembata	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Lembata	1 Paket	4,999,900
1	06	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	10 Laporan	75,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	10 Laporan	59,969,000
1	**06**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**16 Unit**	**50,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**16 Unit**	**32,225,000**
1	06	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Lembata	10 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Lembata	10 Unit	-
1	06	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Lembata	5 Unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Lembata	5 Unit	32,225,000
1	06	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Lembata	1 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Lembata	1 Unit	-
1	**06**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**36 Laporan**	**165,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**36 Laporan**	**151,585,792**

1	06	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lembata	12 Laporan	105,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lembata	12 Laporan	116,592,500
1	06	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Lembata	12 Laporan	50,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Lembata	12 Laporan	29,998,952
1	06	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Lembata	12 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Lembata	12 Laporan	4,994,340
1	**06**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)**		**72 Unit**	**130,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)**		**72 Unit**	**102,745,890**
1	06	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	50 Unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	50 Unit	87,800,890
1	06	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Lembata	0	-	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Lembata	0	-
1	06	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Lembata	20 Unit	20,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Lembata	20 Unit	4,940,000
1	06	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Lembata	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Lembata	0	-
1	06	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Lembata	1 Unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Lembata	1 Unit	10,005,000
1	06	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Lembata	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Lembata	1 Unit	-
TUJUAN. 2 .					**Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)**					**Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)**				
SASARAN 2.1.					**Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**					**Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**				
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar		25 Persen	100,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar		25 Persen	241,411,380

1	06	02	201		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Jumlah KAT yang mendapatkan pelayanan**		**100 Keluarga**	**100,000,000**	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Jumlah KAT yang mendapatkan pelayanan**		**100 Keluarga**	**241,411,380**
1	06	02	201	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	25 Keluarga	50,000,000	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	25 Keluarga	-
1	06	02	201	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	25 Keluarga	50,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	25 Keluarga	241,411,380
1	06	03			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi ke Daerah**		**25 Persen**	**5,000,000**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi ke Daerah**		**25 Persen**	-
1	06	03	201		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota**		**20 Orang**	**5,000,000**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota**		**20 Orang**	-
1	06	03	201	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	5 Orang	5,000,000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	5 Orang	-
1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan serta PMKS lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**		**25 Persen**	**260,000,000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan serta PMKS lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**		**25 Persen**	**953,107,325**
1	06	04	201		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Prosentase Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial**		**25 Persen**	**240,000,000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Prosentase Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial**		**25 Persen**	**953,107,325**

1	06	04	201	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	10 Orang	5,000,000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	10 Orang	-
1	06	04	201	02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	10 Orang	5,000,000	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	10 Orang	-
1	06	04	201	01	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	5 Orang	10,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	5 Orang	-
1	06	04	201	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	0	-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	0	-
1	06	04	201	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	20 Orang	70,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	20 Orang	512,060,620
1	06	04	201	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	10 Orang	50,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	10 Orang	272,099,030
1	06	04	201	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	1500 Orang	50,000,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	1500 Orang	168,947,675
1	06	04	201	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	3018 Orang	20,000,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	3018 Orang	-

1	06	04	202		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitsi sosial**		**25 Persen**	**20,000,000**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitsi sosial**		**25 Persen**	-

1	06	04	202	6	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	16 Orang	5,000,000	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	16 Orang	-
1	06	04	202	13	Pemberian layaan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	5 Orang	5,000,000	Pemberian layaan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	5 Orang	-
1	06	04	202	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	6 Dokumen	10,000,000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	6 Dokumen	-
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial**		**25 Persen**	**25,000,000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial**		**25 Persen**	-
1	**06**	**05**	**202**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**12618 Keluarga**	**25,000,000**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**12618 Keluarga**	-
1	06	05	202	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	12618 Keluarga	25,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	12618 Keluarga	-
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		25 Persen	70,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		25 Persen	279,999,916
1	06	06	201		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		25 Persen	20,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		25 Persen	279,999,916
1	06	06	201	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Persen	10,000,000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Persen	279,999,916
1	06	06	201	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Persen	10,000,000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Persen	-

1	06	06	202		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana		40 Orang	50,000,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana		40 Orang	-
1	06	06	202	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	9 KSB	25,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	9 KSB	-
1	06	06	202	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	40 Orang	25,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lembata, Kupang, Jakarta	40 Orang	-
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,280,079,738	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4,248,605,117
TUJUAN. 3 .					Meningkatkan Keluarga Sejahtera (KS)					Meningkatkan Keluarga Sejahtera (KS)				
SASARAN.3.2.					Menurunkan laju pertumbuhan penduduk					Menurunkan laju pertumbuhan penduduk				
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Rata-rata jumlah anak per keluarga		25 Persen	1,227,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Rata-rata jumlah anak per keluarga		25 Persen	182,879,971
2	14	02	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen hasil Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		2 Dokumen	627,000,000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen hasil Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		2 Dokumen	-
2	14	02	201	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	127,000,000	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	-
2	14	02	201	06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	100,000,000	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	-
2	14	02	201	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kabupaten Lembata	10 Organisasi	50,000,000	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kabupaten Lembata	10 Organisasi	-

2	14	02	201	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kabupaten Lembata	1 Laoran	100,000,000	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kabupaten Lembata	1 Laoran	-
2	14	02	201	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		12 Kegiatan	250,000,000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		12 Kegiatan	-
2	**14**	**02**	**202**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**1 Dokumen**	**600,000,000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**1 Dokumen**	**182,879,971**
2	14	02	202	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	-
2	14	02	202	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan informasi Keluarga yang Tersedianya	Kabupaten Lembata	12 Dokumen	100,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan informasi Keluarga yang Tersedianya	Kabupaten Lembata	12 Dokumen	90,600,000
2	14	02	202	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kabupaten Lembata	12 Laporan	100,000,000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kabupaten Lembata	12 Laporan	-
2	14	02	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Lembata	12 Dokumen	100,000,000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Lembata	12 Dokumen	92,279,971
2	14	02	202	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Kabupaten Lembata	12 Laporan	100,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Kabupaten Lembata	12 Laporan	-
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern**		**25 Persen**	**5,153,435,890**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern**		**25 Persen**	**2,804,245,346**
						Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi					**Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi**			
2	**14**	**03**	**201**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB**		**25 Persen**	**1,500,000,000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB**		**25 Persen**	**1,068,304,925**
2	14	03	201	01	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Kabupaten Lembata	1 Organisasi	100,000,000	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Kabupaten Lembata	1 Organisasi	-
2	14	03	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	100,000,000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	-

						Lokal					Lokal			
2	14	03	201	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kabupaten Lembata	1 Paket	100,000,000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kabupaten Lembata	1 Paket	-
2	14	03	201	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	100,000,000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	150,000,000
2	14	03	201	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Laporan Promosi Pencitraan Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal melalui media masa dan elektronik	Kabupaten Lembata	4 Laporan	50,000,000	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Laporan Promosi Pencitraan Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal melalui media masa dan elektronik	Kabupaten Lembata	4 Laporan	-
2	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Lembata	108 Laporan	400,000,000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Lembata	108 Laporan	316,415,000
2	14	03	201	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kabupaten Lembata	12 Laporan	450,000,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kabupaten Lembata	12 Laporan	214,684,925
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Lembata	12 Laporan	200,000,000	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Lembata	12 Laporan	390,105,000
2	**14**	**03**	**202**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diikursertakan dalam penguatan kapasitas terkait Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)**		**314 Orang**	**1,300,000,000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diikursertakan dalam penguatan kapasitas terkait Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)**		**314 Orang**	**488,135,000**

2	14	03	202	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kabupaten Lembata	1 Organisasi	150,000,000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kabupaten Lembata	1 Organisasi	35,435,000
2	14	03	202	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Kabupaten Lembata	9 Balai	200,000,000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Kabupaten Lembata	9 Balai	-
2	14	03	202	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten Lembata	1 Laporan	150,000,000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten Lembata	1 Laporan	-
2	14	03	202	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Lembata	302 Orang	800,000,000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Lembata	302 Orang	453,000,000
2	**14**	**03**	**203**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**25 Persen**	**1,853,435,890**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**25 Persen**	**1,159,395,421**
2	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Lembata	12 Laporan	50,000,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Lembata	12 Laporan	32,832,375
2	14	03	203	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Lembata	1 Orang	28,435,890	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Lembata	1 Orang	-
2	14	03	203	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Lembata	1800 Orang	635,000,000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Lembata	1800 Orang	1,040,400,000
2	14	03	203	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Lembata	12 Laporan	20,000,000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Lembata	12 Laporan	-

2	14	03	203	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	-
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Lembata	10 Unit	500,000,000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Lembata	10 Unit	-
2	14	03	203	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kabupaten Lembata	375 Orang	200,000,000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kabupaten Lembata	375 Orang	-
2	14	03	203	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Lembata	10 Orang	200,000,000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Lembata	10 Orang	51,153,046
2	14	03	203	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kabupaten Lembata	12 Laporan	100,000,000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kabupaten Lembata	12 Laporan	-
2	14	03	203	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kabupaten Lembata	500 Orang	100,000,000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kabupaten Lembata	500 Orang	35,010,000
2	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi dan Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		23 Kamung KB	500,000,000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi dan Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		23 Kamung KB	88,410,000
2	14	03	204	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Lembata	1 Dokumen		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Lembata	1 Dokumen	
2	14	03	204	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kabupaten Lembata	23	500,000,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kabupaten Lembata	23	88,410,000
SASARAN 3.1.					**Menurunkan Keluarga Pra Sejahtera**					**Menurunkan Keluarga Pra Sejahtera**				

2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)		57 Persen	899,643,848	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)		57 Persen	1,261,479,800
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		25 Persen	899,643,848	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		25 Persen	1,261,479,800
2	14	04	201	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Lembata	69 Orang	200,000,000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Lembata	69 Orang	-
2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Lembata	453 Orang	500,000,000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Lembata	453 Orang	983,639,800
2	14	04	201	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kabupaten Lembata	10 Laporan	199,643,848	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kabupaten Lembata	10 Laporan	277,840,000

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.10.775.079.738,- sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 8.746.905.955,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata, yang melaksanakan urusan Rehabilitasi Soial dan Keluarga Berencana.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini:

NO	KECAMATAN	KEGIATAN	DESA	Keterangan
1	Ile Ape Timur	Bantuan kursi roda bagi disabilitas	Lamatokan	
		Bantuan sembako untuk masyarakat miskin	Lamatokan	Hanya untuk disabilitas, lansia
		Pengadaan KIS	Lamatokan	
		Pengalihan BPJS mandiri ke KIS/JKN	Lamatokan	
2	Nubatukan	BPJS / JKN / JAMKESDA	7 Kelurahan, 11 Desa	
3	Atadei	BPJS: JKN/Jamkesda	Seluruh Desa	
4	Nagawutun			
5	Lebatukan	Pelatihan usaha untuk disabilitas	17 Desa	
6	Wulandoni	Pendampingan/Penguatan untuk Dapur Gizi	15 Desa	
7	Ile Ae			
8	Omesuri			
9	Buayasuri			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata, adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bappelitbangda.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinsos P2KB Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang berdampak pada Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Penggangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (sistematis, sinkron dengan dokumen daerah dan diselesaikan teat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan) yang berkotribusi terhadap peningkatan Angka AKIP dan Opini BPK	Presentase Kesesuaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja/Perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKA/Perubahan RKA	100%
			Capaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	25%
			Presentase kesesuaian indikator kinerja pada Dokumen Renstra, Renja, RKA, Lakip dan LPPD	100%
			Presentase Capai Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	90%
2.	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial masyarakat	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial	25%

			Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	90%
3	Meningkatnya kualitas keluarga	Meningkatkan Keluarga Sejahtera	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)	57
			Presentase Keluarga Sejahtera	92,20%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata Tahun 2024:

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata di Tahun 2024 sebanyak 7 Program, 15 Kegiatan, 36 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 8.746.905.955,-. yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; dengan pagu sebesar Rp. 3.023.782.217
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL; dengan pagu sebesar Rp. 241.411.380
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL; dengan pagu sebesar Rp. 953.107.325
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA; dengan pagu sebesar Rp. 279.999.916
5. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK dengan pagu sebesar Rp. 182.879.971
6. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB); dengan pagu sebesar Rp. 2.804.245.346
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS); dengan pagu sebesar Rp. 1.261.479.800.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut:

(Print Renja 2024 dari SIPD)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEMBATA

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasio-nal	Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	14	15	16	19
						DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.128.746.193	8.746.905.955					9.472.541.020
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				55.000.000	4.498.300.838					4.024.975.220
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3.733.896.193	4.498.300.838					4.024.975.220
1	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar	25 %	25 %	50.000.000	241.411.380					15.000.000
	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang mendapatkan pelayanan	25 %	25 %	50.000.000	241.411.380			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	15.000.000
	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT										
							Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Keluarga	25 Keluarga	0	241.411.380	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	15.000.000

2	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi ke Daerah	25 %	25 %	5.000.000	0					20.000.000
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	5.000.000	0			-	2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	5.000.000	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan serta PMKS lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25 %	25 %	635.200.000	953.107.325					363.921.600
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	25 %	25 %	615.200.000	953.107.325			-	2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	338.921.600
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang										

							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	60.000.000
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	60.000.000
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	16.921.600
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	0	512.060.620	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	40.000.000
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	0	272.099.030	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	45.000.000

	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	1500 Orang	0	168.947.675	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	40.000.000
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3028 Orang	3028 Orang	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	72.000.000
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan									
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	5.000.000
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitsi sosial	25 %	25 %	20.000.000	0			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	25.000.000
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	25.000.000

	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	0
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemeriu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	25 %	25 %	0	0					145.936.340
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang akurat	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	145.936.340
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	145.936.340
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	90 %	90 %	300.000.000	279.999.916					159.817.210
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	300.000.000	279.999.916			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	50.000.000
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan										

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	2000 Orang	0	279.999.916	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	50.000.000
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Keslapslagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana	40 Orang	40 Orang	0	0			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	109.817.210
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana										
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung	0 Kampung	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	54.908.605
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana										
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	54.908.605
6	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	25 %	25 %	2.743.696.193	3.023.782.217					3.320.300.070

	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	10.000.000	6.762.783			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	60.000.000
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0	3.022.904	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	25.000.000
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	10.000.000
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0	3.739.879	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	15.000.000
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	5.000.000
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	5.000.000

												Semua Kel/Desa			saing	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	32 Dokumen	32 Dokumen	2.548.696.193	2.638.773.437			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	2.385.800.070
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0	2.518.078.447	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	2.148.800.070
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0	118.070.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	200.000.000
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	7.000.000
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	0	2.624.990	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	30.000.000
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	21.719.997			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	37.000.000
	1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	7.000.000
	1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0	21.719.997	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	10.000.000
	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52 Dokumen	52 Dokumen	0	0			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	140.000.000

	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	10.000.000
	1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	10.000.000
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	60.000.000
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	60.000.000
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah	25 %	25 %	35.000.000	69.969.318			-	2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	177.500.000
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	2.500.000

	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0	5.000.418	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	15.000.000
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0	4.999.900	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	0	59.969.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	120.000.000
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Paket	16 Paket	0	32.225.000			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	150.000.000
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	0

	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	32.225.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	50.000.000
	1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	100.000.000
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Dokumen	36 Dokumen	80.000.000	151.585.792			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	160.000.000
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0	116.592.500	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	100.000.000
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	29.998.952	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	50.000.000
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	4.994.340	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	10.000.000
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)	103 Paket	103 Paket	55.000.000	102.745.890			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	210.000.000
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	60 Unit	50.000.000	87.800.890	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	150.000.000
	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	10.000.000
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	0	4.940.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	10.005.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	10.000.000

	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.394.850.000	4.248.605.117					5.447.565.800
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.394.850.000	4.248.605.117					5.447.565.800
7	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	25 %	25 %	238.800.050	182.879.971					450.619.910
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen hasil implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	0			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	230.619.910
	2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	55.000.000
	2	14	02	2.01	0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan										

							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Organisasi	0 Organisasi	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1.000.000
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga										
							Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	60.000.000
	2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal										
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	54.619.910
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana										
							Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	60.000.000
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	208.800.050	182.879.971			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	220.000.000
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga										

							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	12 Dokumen	90.600.000	90.600.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	30.000.000
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga										
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0 Laporan	0 Laporan	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	150.000.000
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB										
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	118.200.050	92.279.971	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana										
							Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	0 Laporan	0 Laporan	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	10.000.000
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)										
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	10.000.000
8	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pelayanan Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota	25 %	25 %	5.311.345.950	2.804.245.346					4.298.985.890

	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	25 %	25 %	2.168.638.700	1.068.304.925			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1.300.000.000
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK										
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	12 Laporan	395.240.000	390.205.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	50.000.000
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana										
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Unit	0 Unit	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	100.000.000
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana										
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	1.385.988.700	211.684.925	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	450.000.000
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										

							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	108 Laporan	108 Laporan	237.410.000	316.415.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	400.000.000
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	100.000.000
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal										
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0 Dokumen	151 Dokumen	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	100.000.000
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja										
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi	0 Organisasi	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	100.000.000

	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang dikursertakan dalam penguatan kapasitas terkait Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	302 Orang	302 Orang	428.000.000	488.135.000			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1.044.800.000
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB										
							Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	100.000.000
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	302 Orang	302 Orang	302.000.000	453.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	644.800.000
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Uni Lapangan oleh PKB/PLKB										
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Uni Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	1 Organisasi	126.000.000	35.135.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	150.000.000
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										

							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0 Laporan	0 Laporan	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	150.000.000
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	25 %	25 %	2.349.207.250	1.159.395.421			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1.521.000.000
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	48.255.000	32.832.375	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1820 Orang	1820 Orang	1.044.280.000	1.040.400.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	650.000.000
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB										

							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	10 Unit	1.186.672.250	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	700.000.000
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan	0 Laporan	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	96.000.000
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20 Orang	20 Orang	35.000.000	51.153.046	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000
	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB									
							Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Orang	0 Orang	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	15.000.000
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan									
							Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	500 Orang	500 Orang	35.000.000	35.010.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000

	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi dan Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34 Organisasi	34 Organisasi	365.500.000	88.410.000			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	433.185.890
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas										
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Kampung	23 Kampung	365.500.000	88.410.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	433.185.890
9	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	25 %	25 %	1.844.704.000	1.261.479.800					697.960.000
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	25 %	25 %	1.844.704.000	1.261.479.800			-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	697.960.000
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutuslaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)										
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutuslaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10 Laporan	10 Laporan	100.000.000	277.840.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	200.000.000

	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	69 Orang	69 Orang	844.704.000	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.Membangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	35.000.000
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	453 Orang	453 Orang	900.000.000	983.639.800	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	462.960.000
									J U M L A H	**11.128.746.193**	**8.746.905.955**				**9.472.541.020**

BAB V
P E N U T U P

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lembata.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani. TERIMA KASIH

Lewoleba, 2023

Kepala Dinas,

Markus Labi, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199503 3 003

Rencana Kerja (RENJA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LEMBATA

Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Lembata

2024

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanga
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangk
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangk
menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ker
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu
2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 201
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera
Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembat
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daera
Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diuba
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahu
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupate
Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan da
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembara
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomo
288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 201
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacra
Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daera
Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambaha
Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahu
2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 202
Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahu
2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBAT TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

Lampiran Peraturan Bupati Lembata
Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850)
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 421);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 tahun 2019 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301);
22. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
23. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9,00*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2 11	**URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPERENCANAAN**									
2 11 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100 %**					**25,00**		
2 11 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen					2,00	2,00	25%
2 11 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan					2,00	2,00	25%
2 11 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi.**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan					14,00	14,00	25%
2 11 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen					12,00	12,00	25%
2 11 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan					1,00	1,00	25%

Kode	Uraian Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9,00	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan					18,00	18,00	25%
2 11 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**16 Laporan**					**4,00**	**4,00**	**25%**
2 11 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan					3,00	3,00	25%
2 11 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah**	**48 %**					**12,00**	**12,00**	**25%**
2 11 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang					2,00	2,00	25%
2 11 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang					2,00	2,00	25%
2 11 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan					50,00	50,00	25%
2 11 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disedinkan	40 Unit					10,00	10,00	25%
2 11 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit					3,00	3,00	25%
2 11 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit					3,00	3,00	25%
2 11 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**48 Laporan**					**12,00**	**12,00**	**25%**
2 11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan					1,00	1,00	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/5)	9,00	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan					1,00	1,00	25%
2 11 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit					10,00	10,00	25%
2 11 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit					4,00	4,00	25%
2 11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit					4,00	4,00	25%
2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPLH dan KLHS**	**4 Dokumen**					**1,00**	**1,00**	**25%**
2 11 02 2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**4 Dokumen**					**1,00**	**1,00**	**25%**
2 11 02 2.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 02 2.01 0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 02 2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Ketersediaan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**4 Dokumen**					**1,00**	**1,00**	**25%**
2 11 02 2.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	8 Dokumen					2,00	2,00	25%
2 11 02 2.02 0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	8 Dokumen					2,00	2,00	25%
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 03 2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisesi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	36 Dokumen					9,00	9,00	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Realisasi (%)	Kinerja (Kinerja Perangkat Daerah Tahun	Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2022	Target Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9,00	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 03 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	8 Dokumen					2,00	2,00	25%
2 11 03 2.01 0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	36 Dokumen					9,00	9,00	25%
2 11 03 2.01 0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	36 Laporan					9,00	9,00	25%
2 11 03 2.01 0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	40 Lokasi					10,00	10,00	25%
2 11 03 2.01 0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	4 Laporan					1,00	1,00	25%
2 11 03 2.01 0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	4 Dokuman					1,00	1,00	25%
2 11 03 2.01 0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	40 Paket					10,00	10,00	25%
2 11 03 2.01 0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	8 Unit					2,00	2,00	25%
2 11 03 2.01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	400 Dokumen					100,00	100,00	25%
2 11 03 2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 03 2.02 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan					1,00	1,00	25%
2 11 03 2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Hasil Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Hasil Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9,00	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 03 2.03 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	20 Dokumen					5,00	5,00	25%
2 11 03 2.03 0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0,04 Ha					0,01	0,01	25%
2 11 03 2.03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 Kegiatan					2,00	2,00	25%
2 11 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 04 2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Ha					1,00	1,00	25%
2 11 04 2.01 0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,04 Unit					0,01	0,01	25%
2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	**Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3**	60 Laporan					**15,00**	**15,00**	**25%**
2 11 05 2.01 0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan					1,00	1,00	25%
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya**	4 Dokumen					**1,00**	**1,00**	**25%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Kinerja Hasil Program dan Kerangka Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Kegiatan (Kerja Perangkat Daerah Tahun	Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9,00*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4,*
2 11 05 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 06 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 06 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40 Dokumen					10,00	10,00	25%
2 11 06 2.01 0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 Badan Usaha					10,00	10,00	25%
2 11 06 2.01 0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	8 Orang					2,00	2,00	25%
2 11 06 2.01 0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	8 Orang					2,00	2,00	25%
2 11 07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Cakupan Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 07 2.01	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Cakupan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rupiah) Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun Kegiatan Tahun 2023	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9.00*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2 11 07 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 08 2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 08 2.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	720 Orang					180,00	180,00	25%
2 11 08 2.01 0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	400 Keluarga					100,00	100,00	25%
2 11 08 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	12 Lembaga					3,00	3,00	25%
2 11 09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 09 2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyaraka**	**12 Dokumen**					**3,00**	**3,00**	**25%**
2 11 09 2.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha /Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas					5,00	5,00	25%
2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Anggaran (Rencana Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9,00	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 10 2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 10 2.01 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan					1,00	1,00	25%
2 11 10 2.01 0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	20 Perkara					5,00	5,00	25%
2 11 10 2.01 0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Perkara					1,00	1,00	25%
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase wilayah perkotaan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Sampah yang dikelolah**	**100 %**					**25,00**	**25,00**	**25%**
2 11 11 2.01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok					1,00	1,00	25%
2 11 11 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	4 Dokumen					1,00	1,00	25%
2 11 11 2.01 0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	400 Ton					100,00	100,00	25%
2 11 11 2.01 0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	4 Ton					1,00	1,00	25%
2 11 11 2.01 0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	16 Unit					4,00	4,00	25%
2 11 11 2.01 0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	400 Ton					100,00	100,00	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Kegiatan (Ranja Perangkat Daerah Tahun	Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9,00*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2 11 11 2.01 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampch di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	400 Ton					100,00	100,00	25%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup sampai denga Triwulan 2 Tahun 2023, dapat diikuti pada tabel 2.2.1

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata mempunyai tugas pokok di bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Beberapa faktor yang menentukan isu – isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata memiliki jumlah personil sebanyak 24 (dua puluh lima) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 18 (delapan belas) orang berstatus Pegawai Pemerintah Non PNS. Adapun kualifikasi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

   Tabel 2.3 Kualifikasi Pendidikan Aparatur DLH

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	2
2	Strata Satu (S1)	20
3	Diploma III (DiII)	2
4	Diploma II (DII)	-
5	Diploma I (DI)	-
6	SLTA	10
7	SMP	1
8	SD	1
Total		36

2. Keberadaan Sarana dan Sarana Pendukung

   Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

   a) Mobil Laboratorium Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) unit dan 2 (dua) unit bentor, kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) sebanyak 12 (dua belas) unit dengan rincian 1 (satu) unit Toyota, 2 (dua) unit sepeda motor Honda NF 100 SLD, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 160 D, 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Revo dan 4 (empat) unit sepeda motor CB 150 R.

b) Peralatan kerja untuk mendukung operasional organisasi yang terdiri dari: 5 (lima) unit personal computer, 12 (dua belas) unit Laptop, dan 25 (dua puluh lima) unit printer. Semua peralatan kerja yang disebutkan di atas semuanya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena beberapa alat tersebut telah rusak.

c) Peralatan pengujian kualitas air.

d) Tempat Pembuangan Akhir Sampah berlokasi di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan.

3. Permasalahan dan hambatan:

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dijumpai Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian kinerja pelayanan antara lain:

a) Adanya keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah sebagai salah satu kensekuensi menjadi daerah otonom. Dengan adanya keterbatasan anggaran ini maka perangkat harus mampu menetapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Dengan demikian tidak semua program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak sepenuhnya diakomodir. Selain itu diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi program yang ada.

b) Timbulnya beberapa permasalahan seperti pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam lingkup internal dan kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup menyebabkan terganggungnya pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program pada tingkat atas.

c) Keterbatasan tenaga teknis yang berkaitan dengan tugas dan pelayanan khususnya di bidang Laboratorium.

4. Tantangan dan Peluang:

Tantangan dan peluang merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa tantangan tersebut di antaranya:

a) Jumlah penduduk Kabupaten Lembata yang terus meningkat dari tahun ke tahun disertai meningkatnya aktivitas pembangunan untuk memenuh

kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan mengeksploitasi sumberdaya alam;

b) Tingkat kesadaran dan partisipasi *stakeholders* dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berbeda - beda;
c) Masih belum konsistennya penerapan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
d) Lambatnya penanganan kasus – kasus lingkungan akibat kurangnya produk hukum yang mendukung penindakan pelanggaran;
e) Belum dikelolanya limbah domestik, limbah B3, limbah medis, serta belum berperannya teknologi dalam pengolahan sampah domestik baik sampah rumah tangga maupun sampah pasar;
f) Tingginya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis, menurunnya kuantitas dan kualitas air baik air tanah maupun air permukaan;
g) Menurunnya kualitas lingkungan hidup baik lingkungan darat, laut maupun udara termasuk juga masih lemahnya penataan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir;
h) Rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran sumber – sumber air.

Selain tantangan, ada juga peluang – peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata antara lain :

a) Kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan terus berkembang dan menjadi isu global yang harus dilaksanakan oleh seluruh sektor;
b) Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan terciptanya lingkungan yang bersih dan berkualitas;
c) Dunia usaha memiliki potensi dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
d) Semakin berkembangnya Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok masyarakat yang berpotensi melakukan partisipasi sosial dan kontrol dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas diformulasikan isu – isu penting Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, yakni:

1. Masih rendahnya kuantitas serta kualitas aparatur dalam menunjang pencapaian kinerja pelayanan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing bidang;
3. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dalam mengakomodir seluruh usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
4. Perkembangan kemajuan pembangunan yang mengakibatkan tereksplotasinya sumberdaya alam secara global tanpa didukung oleh upaya pelestarian lingkungan;
5. Masih rendahnya pasrtisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
6. Belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 3.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lombata

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
							Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	80 %	2.255.210.572		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	80 %	2.255.210.572	
	2	11	01	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	80 %	6.000.000		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	80 %	6.000.000	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000	
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.000.000	
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja SKPD	80 %	1.977.615.197		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja SKPD	80 %	1.977.615.197	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.952.753.622	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.952.753.622	
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Realisasi Biaya (Rp.)	Unit Pelaksana
						Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	122592175 Dokumen	122.592.175	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	122592175 Dokumen	122.592.175	
	2	11	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	
	2	11	01	2.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.469.200	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.469.200	
	2	11	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	80 %	24.438.050		Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	80 %	24.438.050	
	2	11	01	2.03	0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
						Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.451.250	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.451.250	
	2	11	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
						Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	21.966.800	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	21.966.800	
	2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah	30 %	20.275.900		Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah	30 %	20.275.900	
	2	11	01	2.05	0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
						Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.275.900	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.275.900	
	2	11	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Kab. Lombata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Kab. Lombata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	
	2	11	01	2.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0,00	
	2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	25 %	107.569.390		Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	25 %	107.569.390	
	2	11	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.858.500	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.858.500	
	2	11	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

Rek						Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Hasil Kinerja				Hasil Kinerja Kebijakan				Ket
							Lokasi	Indikator Proksi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Proksi	Target Capaian	Kebijakan Baru (Rp.)	
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.084.955	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.084.955	
	2	11	01	2.06	0009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.792.950	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.792.950	
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	51.822.925	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	51.822.925	
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 %	27.620.300		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 %	27.620.300	
	2	11	01	2.07	0008	Pengadaan Mebel									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	
	2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.633.825	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.633.825	
	2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	6.986.475	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	6.986.475	
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	44.026.950		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	44.026.950	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.975.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.975.000	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.082.750	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.082.750	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.969.200	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.969.200	
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	47.474.845		Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	47.474.845	
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

								Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	46.474.045	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	46.474.045	
	2	11	01	2.09	009 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
								Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0,00	
	2	11	01	2.09	009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
								Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.000.000	
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPLH dan KLHS	1 Dokumen	445.000.000		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPLH dan KLHS	1 Dokumen	445.000.000	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	95.000.000		Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	95.000.000	
	2	11	02	2.01	002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota										
								Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	
	2	11	02	2.01	005	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota										
								Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	75.000.000	
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Ketersediaan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000		Ketersediaan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000	
	2	11	02	2.02	002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD										
								Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	250.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	250.000.000	
	2	11	02	2.02	006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup										
								Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25 %	485.000.000		Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25 %	485.000.000	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25 %	445.000.000		Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25 %	445.000.000	
	2	11	03	2.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RPPO					Hasil Kinerja Kebijakan			
							Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kalkulasi Data (Rp.)	Catatan Penting
							Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	9 Dokumen	20.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	9 Dokumen	20.000.000	
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									
							Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	15.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	15.000.000	
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK									
							Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	9 Dokumen	20.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	9 Dokumen	20.000.000	
	2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut									
							Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	9 Laporan	20.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	9 Laporan	20.000.000	
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
							Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10 Lokasi	30.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10 Lokasi	30.000.000	
	2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan									
							Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	20.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	20.000.000	
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah									
							Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokuman	120.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokuman	120.000.000	
	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan									
							Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	10 Paket	20.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	10 Paket	20.000.000	
	2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota									
							Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	2 Unit	80.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	2 Unit	80.000.000	
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									
							Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	100 Dokumen	100.000.000	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	100 Dokumen	100.000.000	
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25 %	30.000.000		Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25 %	30.000.000	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									

No	Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Hasil Evaluasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja	Target Capaian	Perubahan Pagu (Rp.)	Catatan Penting
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	30.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	30.000.000	
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Cakupan Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota	25 %	10.000.000		Cakupan Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota	25 %	10.000.000	
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Tertanginya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	5 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Tertanginya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	5 Dokumen	0,00	
	2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0.01 Ha	5.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0.01 Ha	5.000.000	
	2	11	03	2.03	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	5.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	5.000.000	
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	25 %	110.000.000		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	25 %	110.000.000	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	25 %	110.000.000		Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	25 %	110.000.000	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	60.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	60.000.000	
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	50.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	50.000.000	
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	25 %	50.000.000		Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	25 %	50.000.000	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15 Laporan	20.000.000		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15 Laporan	20.000.000	
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	20.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	20.000.000	

	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	30.000.000	Lokasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	30.000.000	
	2	11	05	2.02	02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	30.000.000	
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH	25 %	120.000.000		Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH	25 %	120.000.000	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH	25 %	120.000.000		Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH	25 %	120.000.000	
	2	11	06	2.01	02.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen	30.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen	30.000.000	
	2	11	06	2.01	02.0 b	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	20.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	20.000.000	
	2	11	06	2.01	02.0 c	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang diberituk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 Orang	30.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang diberituk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 Orang	30.000.000	
	2	11	06	2.01	02.0 d	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	40.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	40.000.000	
7	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Persentase Cakupan Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	25 %	30.000.000		Persentase Cakupan Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	25 %	30.000.000	

No	Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran / Output	Target Keluaran	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Hasil / Outcome	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Cakupan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	25 %	30.000.000		Cakupan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	25 %	30.000.000	
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	30.000.000	
8	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	25 %	400.000.000		Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	25 %	400.000.000	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 %	400.000.000		Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 %	400.000.000	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000	
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	100.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	100.000.000	
	2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	10 Keluarga	100.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	10 Keluarga	100.000.000	
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	100.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	100.000.000	
9	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 %	10.000.000		Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 %	10.000.000	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyaraka	3 Dokumen	10.000.000		Dokumen Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyaraka	3 Dokumen	10.000.000	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
							Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	10.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	10.000.000	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RPPO: Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan: Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
10	2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten	25 %	25.000.000		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten	25 %	25.000.000	
	2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25 %	25.000.000		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25 %	25.000.000	
	2	11	10	2.01	0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
						Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	10.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	10.000.000	
	2	11	10	2.01	0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
						Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	10.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	10.000.000	
	2	11	10	2.01	0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
						Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	5.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	5.000.000	
11	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase wilayah perkotaan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan	25 %	370.400.000		Persentase wilayah perkotaan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan	25 %	370.400.000	
	2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah		Persentase Sampah yang dikelolah	25 %	370.400.000		Persentase Sampah yang dikelolah	25 %	370.400.000	
	2	11	11	2.01	0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
						Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	20.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	20.000.000	
	2	11	11	2.01	0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									
						Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	30.000.000	
	2	11	11	2.01	0021 Penanganan sampah melalui pengangkutan									
						Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	100 Ton	50.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	100 Ton	50.000.000	
	2	11	11	2.01	0021 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah									
						Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	1 Ton	50.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	1 Ton	50.000.000	
	2	11	11	2.01	0021 Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya									

								Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	10 Unit	50.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	10 Unit	50.000.000	
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah, TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan										
								Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	100 Ton	50.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	100 Ton	50.000.000	
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional										
								Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	100 Ton	120.400.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	100 Ton	120.400.000	

Rencana Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumbata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				75,35	75,82	79,89		75,35	75,82	79,89	
2.	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan				1	1	1		1	1	1	
3.	Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah				55%	65%	75%		55%	65%	75%	
4.	Meningkatnya Persentase wilayah perkotaan dan kecamatan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan				79,00%	79,25%	79.60%		79,00%	79,25%	79.60%	
5.	Meningkatnya cakupan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan				10,00%	20,00%	30%		10,00%	20,00%	30%	
6.	Persentase peran serta masyarakat/kelompok/lembaga Peduli Lingkungan				20,00%	30%	40%		20,00%	30%	40%	
7.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah				75%	80%	90%		75%	80%	90%	

Berdasarkan tabel diatas diketahui masih adanya penyesuaian terhadap terhadap program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi serta pendanaan yang merupakan kebutuhan ril pada Dinas Lingkungan Hidup. Penyesuaian ini dilakukan agar perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Untuk tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan Rp. 4.699.459.912 dengan rincian delapan (8) Program dan dua puluh satu (21) kegiatan pada non urusan serta tujuh (7) Program dan dua puluh empat (24) kegiatan pada urusan wajib.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup, yang melaksanakan bidang urusan Lingkungan Hidup.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kabupaten Lembata Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3		4	5
1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nagawutung, Nubatukan, Lebattuka	Nagawutung, Nubatukan, Lebattuka	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	3 Lokaso
2	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat**				
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Nagawutung dan Ile Ape Timur	Nagawutung dan Ile Ape Timur	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang

No	Program Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3		4	5
3	**Program Pengelolaan Persampahan**				
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Nubatukan	Nubatukan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyaraka	2 Orang

Berdasarkan uraian tersebut diatas, program kegiatan yang diusulkan masyarakat dalam musrenbang RKPD tingkat kecamatan sudah diakomodir dalam rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, namun tetap memperhatikan lokasi kegiatan yang menjadi sasaran utama sesuai dengan usulan dan pengkajian teknis.

Selain itu pada musrenbang RKPD Tahun 2024, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup juga memperhatikan usulan program dan kegiatan hasil penelaan pokok – pokok pikiran DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Kabupaten Lembata

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Misi ke 4 Presiden 2020 – 2024	Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Agenda Pembangunan ke 5 Presiden 2020 – 2024	RPJMN Tahun 2020 – 2024
2	Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi melalui upaya melanjutkan kebijakan satu peta	Kebijakan Lingkungan dan Kehutanan 2020 – 2024	Mengoptimalkan setiap Program/kegiatan berbasis SIG
3	Mitigasi perubahan Iklim melalui Pencegahan Kebakaran hutan		Dijabarkan melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, serta Pengelolaan Persampahan
4	Penanaman kembali lahan-lahan kritis		Dijabarkan melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
5	Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan		
6	Konservasi lahan gambut		Dijabarkan melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
7	Mengurangi emisi karbon dan		Dijabarkan melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, serta Pengelolaan Persampahan
8	Meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan serta	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,35
			Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan	1
			Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55%
			Meningkatnya Persentase wilayah perkotaan dan kecamatan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan	79,00%
			Meningkatnya cakupan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	10,00%
2	Meningkatkan peran serta masyarakat peduli lingkungan	Meningkatnya peran serta masyarakat peduli lingkungan terhadap perubahan iklim	Persentase peran serta masyarakat/kelompok/lembaga Peduli Lingkungan	20,00%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi bidang lingkungan hidup	Terwujudnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel,transparan serta partisipatif bidang lingkungan hidup	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	75%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata pada tahun 2024 yang merupakan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari Program-program wajib terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan program penunjang yang terdiri dari satu (1) program dan 8 (delapan) kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 4,300,610,572,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan pagu sebesar Rp.2.255.210.572.
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.6.000.000.
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.1.000.000.
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD dengan pagu sebesar Rp.1.000.000.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD dengan pagu sebesar Rp.1.000.000.
- Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD dengan pagu sebesar Rp.1.000.000.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD dengan pagu sebesar Rp.1.000.000.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu sebesar Rp.1.000.000.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.1.977.815.197.
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu sebesar Rp.1.852.753.822.
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu sebesar Rp.122.592.175.
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu sebesar Rp.1.000.000.
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan pagu sebesar Rp.1.469.200.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.24.438.050.
   - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu sebesar Rp.2.451.250.
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu sebesar Rp.21.986.800.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.20.275.900.
   - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan pagu sebesar Rp.20.275.900.
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu sebesar Rp.0.
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan dengan pagu sebesar Rp.0.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.107.559.330.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu sebesar Rp.3.858.500.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu sebesar Rp.42.084.955.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu sebesar Rp.9.792.950.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu sebesar Rp.51.822.925.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp.27.620.300.
   - Pengadaan Mebel dengan pagu sebesar Rp.0.
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu sebesar Rp.20.633.825.
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu sebesar Rp.6.986.475.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp.44.026.950.
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu sebesar Rp.7.975.000.
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu sebesar Rp.28.082.750.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu sebesar Rp.7.969.200.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp.47.474.845.
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu sebesar Rp.46.474.845.
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu sebesar Rp.0.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu sebesar Rp.1.000.000.

2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP dengan pagu sebesar Rp.445.000.000.
   a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.95.000.000.

- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.20.000.000.
- Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.75.000.000.

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.350.000.000.
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan pagu sebesar Rp.250.000.000.
- Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup dengan pagu sebesar Rp.100.000.000.

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP dengan pagu sebesar Rp.485.000.000.

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.445.000.000.
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan pagu sebesar Rp.20.000.000.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan pagu sebesar Rp.15.000.000.
- Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK dengan pagu sebesar Rp.20.000.000.
- Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut dengan pagu sebesar Rp.20.000.000.
- Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan pagu sebesar Rp.30.000.000.
- Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan pagu sebesar Rp.20.000.000.
- Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah dengan pagu sebesar Rp.120.000.000.
- Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan dengan pagu sebesar Rp.20.000.000.
- Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dengan pagu sebesar Rp.80.000.000.

- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota dengan pagu sebesar Rp.100.000.000.

b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.30.000.000.
   - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan pagu sebesar Rp.30.000.000.
c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.10.000.000.
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dengan pagu sebesar Rp.0.
   - Pelaksanaan rehabilitasi dengan pagu sebesar Rp.5.000.000.
d. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi dengan pagu sebesar Rp.5.000.000.

4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) dengan pagu sebesar Rp.110.000.000.
   a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.110.000.000.
      - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan pagu sebesar Rp.60.000.000.
      - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan dengan pagu sebesar Rp.50.000.000.
5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) dengan pagu sebesar Rp.50.000.000.
   a. Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan pagu sebesar Rp.20.000.000.
   b. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan pagu sebesar Rp.20.000.000.
   c. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.30.000.000.
   d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan dengan pagu sebesar Rp.30.000.000.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) dengan pagu sebesar Rp.120.000.000.
   a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.120.000.000.
      - Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan pagu sebesar Rp.40.000.000.
7. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH dengan pagu sebesar Rp.30.000.000.
   a. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH dengan pagu sebesar Rp.30.000.000.
      - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisionai dan Hak MHA Terkait dengan PPLH dengan pagu sebesar Rp.30.000.000.
8. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT dengan pagu sebesar Rp.400.000.000.
   a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.400.000.000.
      - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan pagu sebesar Rp.100.000.000.
      - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup dengan pagu sebesar Rp.100.000.000.
      - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat dengan pagu sebesar Rp.100.000.000.
      - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat dengan pagu sebesar Rp.100.000.000.

9. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT dengan pagu sebesar Rp.10.000.000.
   a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.10.000.000.
   b. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pagu sebesar Rp.10.000.000.
10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP dengan pagu sebesar Rp.25.000.000.
   a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.25.000.000.
      - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.10.000.000.
      - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan pagu sebesar Rp.10.000.000.
      - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan pagu sebesar Rp.5.000.000.
11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN dengan pagu sebesar Rp.370.400.000.
   a. Pengelolaan Sampah dengan pagu sebesar Rp.370.400.000.
      - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan pagu sebesar Rp.20.000.000.
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu sebesar Rp.30.000.000.
      - Penanganan sampah melalui pengangkutan dengan pagu sebesar Rp.50.000.000.
      - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah dengan pagu sebesar Rp.50.000.000.
      - Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya dengan pagu sebesar Rp.50.000.000.

- Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan pagu sebesar Rp.50.000.000.

Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional dengan pagu sebesar Rp.120.400.000.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata [illegible] Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								7.762.167.168
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								7.762.167.168
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								7.762.167.168
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		80 %	2.255.210.572		-	80 %	3.376.926.008
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		80 %	6.000.000		-	80 %	90.000.000
2 11 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000
2 11 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000
2 11 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000
2 11 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000
2 11 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000
2 11 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	15.000.000
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja SKPD		80 %	1.977.815.197		-	80 %	2.405.260.807
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	1.852.753.822	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Orang/bulan	2.219.532.907
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122592175 Dokumen	122.592.175	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		122592175 Dokumen	151.853.000
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	22.193.900
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	1.469.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Laporan	11.681.000
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah		80 %	24.438.050		-	80 %	30.000.000
2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.451.250	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	21.986.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Laporan	15.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah		30 %	20.275.900		-	30 %	125.000.000
2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.275.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	25.000.000
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	2 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	50.000.000
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	50.000.000
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah		25 %	107.559.330		-	25 %	303.706.000
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.858.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	35.043.000
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	42.084.955	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	58.405.000
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.792.950	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	35.043.000
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	51.822.925	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Laporan	175.215.000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25 %	27.620.300		-	25 %	142.615.201
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	55.362.000
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	20.633.825	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)		3 Unit	35.043.000
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	6.986.475	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	54.210.201
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Laporan	44.026.950		-	12 Laporan	105.129.000
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.975.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	58.405.000
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	28.082.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	35.043.000
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.969.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	11.681.000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %	47.474.845		-	80 %	175.215.000
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	46.474.845	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	151.853.000
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	11.681.000
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	11.681.000
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPLH dan KLHS		1 Dokumen	445.000.000		-	1 Dokumen	410.000.000
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	95.000.000		-	1 Dokumen	110.000.000
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	110.000.000
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota								
						Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokuman	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokuman	0,00
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Ketersediaan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	350.000.000		-	1 Dokumen	300.000.000
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD								
						Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	150.000.000
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup								
						Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	150.000.000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		25 %	485.000.000		-	25 %	764.441.160

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perkiraan Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		25 %	445.000.000		-	25 %	300.000.000
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	20.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		9 Dokumen	100.000.000
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	15.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		2 Dokumen	100.000.000
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK								
						Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	20.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		9 Dokumen	0,00
2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut								
						Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	20.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		9 Laporan	0,00
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
						Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Lokasi	30.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		10 Lokasi	0,00
2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan								
						Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1 Laporan	0,00
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah								
						Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokuman	120.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokuman	0,00
2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perubahan Mapi Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	20.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		10 Paket	0.00
2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota								
						Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	80.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		2 Unit	0.00
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota								
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		100 Dokumen	100.000.000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		25 %	30.000.000		-	25 %	200.000.000
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat								
						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1 Laporan	200.000.000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota		25 %	10.000.000		-	25 %	264.441.160
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	94.441.160
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi								
						luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.01 Ha	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0.01 Ha	170.000.000
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Baru Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kegiatan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Kegiatan	0,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		25 %	110.000.000		-	25 %	900.000.000
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		25 %	110.000.000		-	25 %	900.000.000
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ha	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Ha	600.000.000
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan								
						Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	300.000.000
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		25 %	50.000.000		-	25 %	260.000.000
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		15 Laporan	20.000.000		-	15 Laporan	130.000.000
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3								
						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	130.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya		1 Dokumen	30.000.000		-	1 Dokumen	130.000.000
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1 Dokumen	130.000.000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH		25 %	120.000.000		-	25 %	330.000.000
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH		25 %	120.000.000		-	25 %	330.000.000
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemerintah Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH								
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	145.000.000
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Perubahan Mapi Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Badan Usaha	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Badan Usaha	85.000.000
2	11	06	2.01	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup								
						Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	0.00
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup								
						Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	100.000.000
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH		25 %	30.000.000		-	25 %	710.000.000
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Cakupan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		25 %	30.000.000		-	25 %	710.000.000
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	710.000.000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		25 %	400.000.000		-	25 %	380.800.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kngiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25 %	400.000.000		-	25 %	380.800.000
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup								
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Dokumen	180.800.000
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup								
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		100 Orang	100.000.000
2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat								
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		10 Keluarga	0.00
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat								
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lembaga	100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		2 Lembaga	100.000.000
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25 %	10.000.000		-	25 %	120.000.000
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyaraka		3 Dokumen	10.000.000		-	3 Dokumen	120.000.000
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Entitas	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Entitas	120.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten		25 %	25.000.000		-	25 %	115.000.000
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		25 %	25.000.000		-	25 %	115.000.000
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Pengaduan	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Pengaduan	15.000.000
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota								
						Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perkara	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Perkara	70.000.000
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota								
						Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Perkara	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Perkara	30.000.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase wilayah perkotaan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan		25 %	370.400.000		-	25 %	395.000.000
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang dikelolah		25 %	370.400.000		-	25 %	395.000.000
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kelompok	20.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1 Kelompok	70.000.000
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1 Dokumen	95.000.000
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan								
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Ton	50.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		100 Ton	0,00
2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah								
						Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ton	50.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1 Ton	0,00
2	11	11	2.01	0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya								
						Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	50.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		10 Unit	30.000.000
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank								
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Ton	50.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		100 Ton	200.000.000
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional								
						jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Ton	120.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		100 Ton	0,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan progam dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024. Selain itu, mengingat keterbatasan dana serta tuntutan pembangunan yang berkesinambungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup akan bekerjasama dengan berbagai organisasi sosial masyarakat, LSM/NGO terkait ataupun melakukan pengajuan proposal program/kegiatan yang nantinya dapat diakomodir dalam APBN maupun APBD I.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup. Agar optimal dalam pelaksanaannya maka diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Masing-masing Bidang dan Sekretariat wajib mempedomani Rencana Kerja ini untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.
2. RKA yang telah disusun oleh masing-masing bidang dan sekretariat, selanjutnya dihimpun oleh sub bagian Administrasi Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan untuk didiskusikan bersama guna menghasilkan Rencana Kerja Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2024 yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk diverifikasi dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024.

Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata tahun 2024 ini, dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lembata tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Christianus Rimbaraya, SE, MM

NIP. 197911162006041007

RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LEMBATA

TAHUN 2024

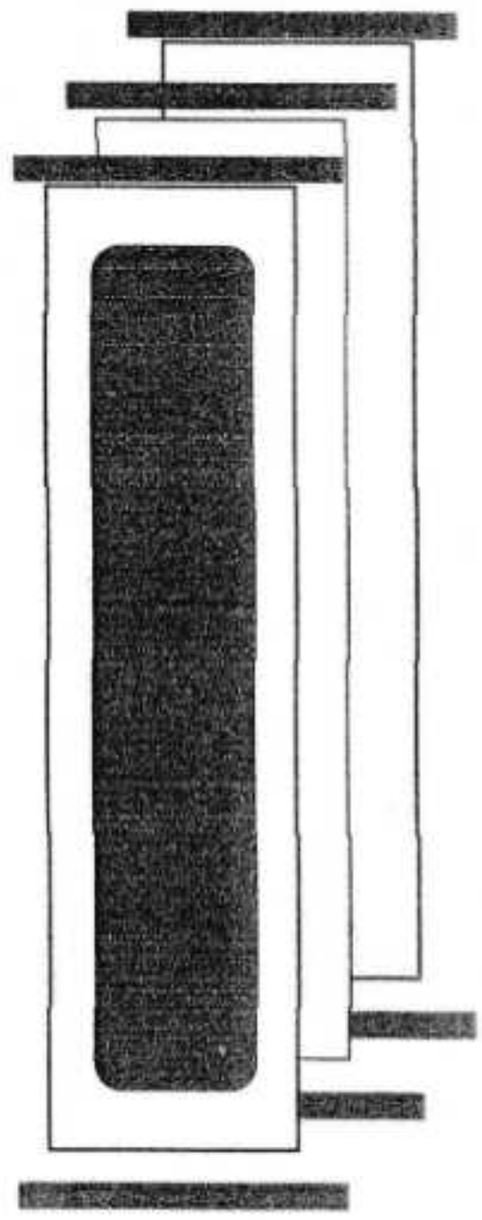

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan Perumusan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2024, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujutnya Pelayanan Publik yang Prima.

Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki,untuk mempertanggungjawabkan tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradikma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi . Namun demikian,disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok rencana tersebut sangat diharapkan,sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih,semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Lewoleba, 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lembata,

SIPRIANUS SUYA, SH
Pembina Tk
NIP. 19711231 200012 1 032

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....i

Kata Pengantar.....ii

Daftar Isi.....iii

Daftar Tabel.....iv

Daftar Gambar.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang.....1
1.2. Landasan Hukum.....3
1.3. Maksud dan Tujuan.....5
1.4. Sistematika penulisan.....5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian renstra.....8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....14
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....23

3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional.....23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....23
3.3. Program dan Kegiatan.....25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....26

BAB V PENUTUP.....36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023.....7-10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata 12

Tabel 2. 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024 15-19

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....21-22

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangakt Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....27-35

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 84);

15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2					**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
2	12				**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
2	12	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD**	**100 %**							
2	12	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48 Dok/lap**					**12**	**12**	**25%**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen					2	2	25%
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen					1	0	0%
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	4 Dokumen					1	1	25%
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan					2	2	25%
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	16 Laporan					4	2	13%
2	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan administrasi keuangan PD**	**100 %**					**100**	**50**	**50%**
2	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 bulan					14	8	14%
2	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen					12	6	13%
2	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan					1	1	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	64 Laporan					16	8	13%
2	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen					2	2	25%
2	01	01	2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada PD**	**8 Laporan**					2	1	13%
2	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**8 Laporan**					2	1	13%
2	01	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**4 Laporan**					4		
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang					4		
2	12	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**4 Laporan**					1		
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket					1	1	25%
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket					1	0,5	13%
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket					1		
2	12	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan					30	20	17%
2	01	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**54 unit**					10		
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit					1	0	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	20 Unit					4	0	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit					5		
2	01	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 Laporan**					1	0.5	13%
2	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan					12	6	13%
2	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan					12	6	13%
2	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan					12	6	13%
2	01	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**					100%	25	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 unit					14	6	11%
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit					10		
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit					12	7	15%
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit							
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasanara Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit							
5	**01**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan**	**100 %**					**100%**	**0,5**	50%
5	**01**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendafaran Penduduk**	**Jumlah laporan pelayanan pendaftaran penduduk**	**6100 dok**					1700	1000	16%
5	01	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitaan Dokumen Kependudukan	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	6100 Dokumen					1700	1000	16%
2	12	02			**Penataan Pendafaran Penduduk**	Jumlah laporan pelayanan pendaftaran penduduk	4 Paket					1		
2	12	02	2.01		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendafaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-El,formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	4 Paket					100%		
2	12	02	2.01	02	**PenyelenggaraanPendaftaran Penduduk**	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %					10		
2	**12**	**02**	**2.02**		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah di kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	40 Laporan					1		
2	12	02	2.02	02	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan yang dapat dipertanggungjawaban	Jumlah data penduduk yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftran Penduduk yang tersedia	4 Dokumen					12		
2	**12**	**02**	**2.03**		**Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**48 Laporan**					12		
2	12	02	**2.03**	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendafraraan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	48 Laporan					12		
2	12	03			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Pelayanan Administrsal Dokumen Pencatatan Sipil untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**100 %**					**100%**	15	15

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	03	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah laporan Pelayanan Pencatatan Sipil**	100 %					100%	15	15
2	12	03	2.01	01	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan,penatausahan dan penertiban dokumen atas pelaporan peristiwa penting	2600 Dokumen					600	400	15,38
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan sipil yang ditingkatkan	2600 Dokumen					600	400	15,38
2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	45 Laporan					13		
2	12	04	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36 Laporan					9		2,8
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	36 Laporan					9	1	2,8
2	12	04	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	19 Laporan					4	1	5,26
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	19 Laporan					4	1	5,26
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya dokumen profil kependudukan Kabupaten Lembata**	4 Dokumen					1	1	25
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya dokumen profil kependudukan Kabupaten Lembata	4 Dokumen					1	1	25
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	4 Dokumen					1	1	25

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasiona	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Rasio Penduduk Ber-KTP-el				100%	100%	100%		50	100%	100%	
2.	Rasio Bayi Berakta Kelahiran				90	100	100		55	100	100	
3.	Rasio Pasangan Berakta Nika				100	100	100		100	100	100	
4.	Penerapan KTP-el Berbasis NIK				ada	ada	ada		ada	ada	ada	
5.	Capaian Penerepan KTP-el				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
6.	Cakupan Penerbitaan Akta Kelahiran				90%	100%	100%		100%	100%	100%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
   - Dukungan Anggaran terhadap pelayanan Dokumen Kependudukan sangat Minim yang mengakibatkan realsasi target tidak sesaui dengan target yang sudah ditetapkan pada Renstra.
   - Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan.
   - Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur khususnya Adminstator Data Base Kependudukan dan Operator SIAK.
   - Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia/ aparatur Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   - Terbatasnya Sarana Prasarana Perekam dan Pencetak KTP-el

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
   - Tantangan :
     - Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
     - Rendahnya Koordinasi Aparatur Tingkat Bawah sehingga banyak peristiwa penting kependudukan yang tidak dilaporkan ke Dinas sehingga banyak penduduk yang sudah meninggal tetapi tidak diterbitkan akta kematian sehingga yang bersangkutan masih tetap terdaftar sebagai penduduk lembata.
     - Banyak Penduduk Kabupaten Lembata yang mutasi keluar dan masuk tidak melapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga banyak Masyarakat Kabupaten Lembata yang sudah menetap di kabupaten lain namun masih terdata sebagai penduduk Kabupten Lembata, dan sebaliknya banyak Masyarakat yang sudah menetap di Kabupeten Lembata namun masih ber-KTP-el Kabupaten lain.

♦ Peluang

- Pasal 79 poin A Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) yang mengisyartkan bahwa Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut Biaya.
- Adanya kemudahan untuk aparatur tingkat bawah untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan secara online.
- Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melayani mutasi pindah datang secara online.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah :

- Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan akan pengakuan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- Penerapan KTP-el merupakan salah satu program dan strategi pemerintah secara nasional untuk penertibaan Administrasi Kependudukan
- Dalam rangka meringankan beban waktu dan biaya kepengurusan akta catatan sipil yang seringkali diperlukan dengan landasan hukum berupa keputusan pengadilan negeri atau pengadilan agama, maka perlu didorong agar kedua lembaga tersebut dapat berkoordinasi secara baik

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

TABEL 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

Rancangan Awal 2024						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	2	5	3	9	10	11
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					4.327.138.924	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4.350.139.676	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%		100	3.342.138.924	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	3.690.139.676	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Dok/lap	Kab. Lembata	12	**41.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	12	**39.000.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Daerah	Dokumen	Kab. Lembata	2	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah dokumen perencanaan Daerah	2	8.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	Dokumen	Kab. Lembata	1	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	1	5.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	Kab. Lembata	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1	5.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Lembata	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1	5.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Lembata	1	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	8.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Laporan	Kab. Lembata	2	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	4.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Renja Per Triwulan) yang disusun	Laporan	Kab. Lembata	4	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Renja Per Triwulan) yang disusun	4	2.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah**	**Laporan**	Kab. Lembata	1	**2.367.342.724**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Jumlah laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah**	*1*	**2.641.992.996**	

Rancangan Awal 2024						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
2	3	4	5	6	7	2	5	3	9	10	11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	Kab. Lembata	14	2.270.702.724	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	2.497.772.996	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Dok	Kab. Lembata	12	77.640.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12	123.720.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kab. Lembata	1	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	7.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Kab. Lembata	16	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD .	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	14	7.500.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Kab. Lembata	2	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	5.500.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**dokumen**	Kab. Lembata	2	**23.678.800**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya Laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	2	26.046.680	
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahan Barang Milik daerah pada SKPD	Laporan	Kab. Lembata	2	23.678.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahan Barang Milik daerah pada SKPD	2	26.046.680	
Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	**Terselanya laporan penataan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah**	**Laporan**	Kab. Lembata	1	**120.000.000**	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Terselanya laporan penataan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah**	1	**120.000.000**	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	Kab. Lembata	4	120.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1	**120.000.000**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya laporan penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**laporan**	Kab. Lembata	1	**162.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	1	**175.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Kab. Lembata	1	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	15.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	Kab. Lembata	1	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1	40.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Kab. Lembata	1	17.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	20.000.000	
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab. Lembata	12	100.000.000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	100.000.000	
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	Kab. Lembata	11	**300.000.000**	**Pengadaan Bsrang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	11	390.000.000	

Rancangan Awal 2024						Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	2	5	3	8	10	11
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	Kab. Lembata			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	90.000.000	
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang disediakan	Unit	Kab. Lembata	10	50.000.000	Pengadaan Meubel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Meubel yang disediakan	10	50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	unit	Kab. Lembata	1	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	1	250.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Laporan**	Kab. Lembata	*1*	**202.617.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	12	211.100.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat menyurat	Laporan	Kab. Lembata	*12*	156.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat menyurat	12	156.100.000	
Penyidaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Kab. Lembata	*12*	41.517.400	Penyidaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, ,sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	50.000.000	
Penydiaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyedisan jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	Laporan	Kab. Lembata	*12*	5.000.000	Penydiaan jasa Pelayanan Umum kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12	5.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilakukan pemeliharaan**	**Unit**	Kab. Lembata	*48*	**125.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Lembata	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilakukan pemeliharaan**	100	87.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Kab. Lembata	*15*	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	70.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	Kab. Lembata	*10*	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab.	Jumlah Mebel yang dipelihara	8	4.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	Kab. Lembata	*20*	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	8.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara dipelihara/rehabilitasi	unit	Kab. Lembata	*1*	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara dipelihara/rehabilitasi	1	5.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara dipelihara/rehabilitasi	unit	Kab. Lembata	*2*		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara dipelihara/rehabilitasi	2	10.000.000	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan**	%	Kab. Lembata	*100*	**530.000.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kab. Lembata	**Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan**	100	287.000.000	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah laporan pelayanan pendaftaran penduduk**	laporan	Kab. Lembata	*1*	**120.000.000**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Lembata	**Jumlah laporan pelayanan pendaftaran penduduk**	1	52.000.000	
Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen hasil Pencatatan,Penatausahan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen	Kab. Lembata	*5000*	120.000.000	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen hasil Pencatatan,Penatausahan dan penerbit an dokumen atas pendaftaran penduduk	1	52.000.000	*Usulan musrenbangcam Nubatukan, Naga, buyasuri, Iltim*
Penataan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah laporan Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Laporan**	Kab. Lembata	*1*	200.000.000	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Lembata	**Jumlah laporan Penataan Pendaftaran Penduduk**	1	150.000.000	

Rancangan Awal 2024						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
2	3	4	5	6	7	2	5	3	9	10	11
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir,dan buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-El,formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Dokumen	Kab. Lembata	*1*	200.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir,dan buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-El,formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	*1*	150.000.000	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlha laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**laporan**	Kab. Lembata	*1*	**200.000.000**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Lembata	**Jumlha laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	1	**75.000.000**	
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah di kabupaten/Kota dalam penerliban pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	Kab. Lembata	*1*	100.000.000	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran penduduk	Kab. Lembata	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah di kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	*10*	40.000.000	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah data penduduk yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftran Penduduk yang tersedia	Dokumen	Kab. Lembata	*1*	100.000.000	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Lembata	Jumlah data penduduk yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftran Penduduk yang tersedia	*1*	35.000.000	***usulan musrenbangcam Atadei***
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk**	Laporan	Kab. Lembata	*12*	**10.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Lembata	**Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk**	*12*	**10.000.000**	
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftraan Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Laporan	Kab. Lembata	*12*	10.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftraan Penduduk	Kab. Lembata	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	*12*	10.000.000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan Pelayanan Administrsai Dokumen Pencatatan Sipil untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**%**	Kab. Lembata	**100%**	**310.000.000**	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Lembata	**Cakupan Pelayanan Administrsai Dokumen Pencatatan Sipil untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**100%**	**183.000.000**	
Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah laporan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Laporan**	Kab. Lembata	*1*	**130.000.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kab. Lembata	**Jumlah laporan Pelayanan Pencatatan Sipil**	1	**183.000.000**	
Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan,penatausahan dan penertiban dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Dokumen	Kab. Lembata	*3000*	100.000.000	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Lembata	Jumlah dokumen hasil pencatatan,penatausahan dan penertiban dokumen atas pelaporan peristiwa penting	*3000*	150.000.000	***Usulan musrenbangcam Nubatukan, Naga, buyasuri, Iltim***
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan	Kab. Lembata	*18*	30.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Lembata	Jumlah Pelayanan Pencatatan sipil yang ditingkatkan	*600*	33.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Laporan	Kab. Lembata	*1*	**180.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Kab. Lembata	**Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	*1*	**200.000.000**	
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan Teknis terkait pencatatan sipil	Laporan	Kab. Lembata	*45*	180.000.000	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Lembata	Jumlah laporan hasil bimbingan Teknis terkait pencatatan sipil	*50*	200.000.000	***Usulan musrenbangcam Atadei***
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**Laporan**	Kab. Lembata	*13*	**80.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kab. Lembata	**Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan**	*13*	**125.000.000**	

Rancangan Awal 2024						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
2	3	4	5	6	7	2	5	3	9	10	11
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Kab. Lembata		-	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kab. Lembata			45.000.000	
Sosialisasi terkait Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil sosialisasi pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Laporan	Kab. Lembata			Sosialisasi terkait Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan hasil sosialisasi pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	9	45.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan	**Jumlha laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan**	**laporan**	Kab. Lembata	*5*	**80.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan**	Kab. Lembata	**Jumlha laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan**		**80.000.000**	
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	Kab. Lembata	*5*	80.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	*4*	80.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Tersedianya dokumen profil kependudukan Kabupaten Lembata**	dokumen	Kab. Lembata	*1*	**65.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Kab. Lembata	**Tersedianya dokumen profil kependudukan Kabupaten Lembata**	*1*	**65.000.000**	
Penyusunan Profil Kependudukan	**Tersedianya dokumen profil kependudukan Kabupaten Lembata**	dokumen	Kab. Lembata	*1*	**65.000.000**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Kab. Lembata	**Tersedianya dokumen profil kependudukan Kabupaten Lembata**	*1*	**65.000.000**	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	dokumen	Kab. Lembata	*1*	65.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Lembata	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	*1*	65.000.000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sub kegiatan yang ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Sub Kegiatan pada Analisis Sesuai Kebutuhan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.4.327.138.924,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 4.350.139.676,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang melaksanakan unsur Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada tahun rencana 2024, terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4

Usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2024

Kabupaten Lembata

Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
1	Prorgam Pendaftaran Penduduk				
	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitaan atas dokumen kependudukan	Semua Desa di Kec Nubatukan,Nagawutung, Buyasuri, Ile Ape Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitaan atas dokumen kependudukan	1000 Dok	
	Penyajian Data Penduduk yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Desa di kecamatan Atadei	Jumlah Penyajian Data Penduduk yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	15 Dok	
2	Program Pencatatan Sipil				
	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitaan atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Desa di Kec	Pencatatan, Penatausahaan, dan	1.200 Dok	

		Nubatukan,Nagawutung, Buyasuri, Ile Ape Timur	Penerbitaan atas Pelaporan Peristiwa Penting		
3	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Semua Desa di kecamatan Atadei	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Sain, dengan Kegiatan Prioritas Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelolah Kependudukan, yaitu Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan, Integrasi Sistim Administrasi kependudukan. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Kependudukan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk Ber-KTP-el Persatuan Penduduk	100
			Persentase Bayi Berakta Kelahiran	90
			Persentase Pasangan Berakta Nikah	100
			Jumlah Ketersediaan Data Base Penduduk Skala Kabupaten / Kota	Ada
			Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tahun 2024 sebanyak 4 Program, 9 Kegiatan, 11 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 519.000.000,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 131.000.000,-.
2. Program Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 335.000.000,-.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 38.000.000,-.
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, terdiri dari 1 Kegitan dan 1 sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 15.000.000,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.200.702.366,00							4.319.342.442,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.200.702.366,00							4.319.342.442,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.200.702.366,00							4.319.342.442,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*	-			100 %	2.681.702.366,00						-	3.812.174.792,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			12 Dokumen	29.500.000,00			-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	39.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokuman Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah*	-			1 Laporan	2.362.342.710,00			-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3.278.929.294,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.270.702.710,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.134.709.294,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	77.640.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		123.720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	7.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			2 Dokumen	23.678.800,00			-	-	-	-	23.225.538,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	23.678.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.225.538,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah Tersedianya laporan penataan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah*	-			1 Laporan 1 Laporan	0,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Sipil Negara		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah Tersedianya laporan penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*	-			1 Laporan 1 Laporan	85.000.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	134.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah*	-			11 unit 16 Unit	76.663.456,00			-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	80.019.960,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		30.019.960,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	18.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	58.663.456,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		56.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* *Tersedianya Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			1 Laporan 1 Laporan	39.517.400,00			-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.517.400,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			45 unit	65.000.000,00			-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	97.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	40.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	10.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	-	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	10.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan***	-			**100 %**	**131.000.000,00**						-	**217.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah laporan pelayanan pendaftaran penduduk*	-			1 Laporan	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata	-	52.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1000 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		52.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah laporan Penataan Pendaftaran Penduduk*	-			1 Dokumen	51.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata	-	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	51.000.000,00	- Kab. Lambata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	-			1 Laporan	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata	-	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk*	-			12 Laporan	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk				12 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lambata		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	***Cakupan Pelayanan Administrsai Dokumen Pencatatan Sipil untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah***	-			100 %	335.000.000,00						-	126.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah laporan Pelayanan Pencatatan Sipil*	-			1 Laporan	35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Masyarakat Kabupaten Lambata	-	126.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				1000 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Masyarakat Kabupaten Lambata		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				18 Layanan	15.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lambata		66.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	-			1 Laporan	300.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				60 Laporan	300.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan***	-			**3 Laporan**	**38.000.000,00**						-	**140.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Bease Kependudukan*	-			3 Laporan	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata	-	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-			3 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	0,00			-	5.Pembangunan sumber daya manusia unggulan	Masyarakat Kabupaten Lembata	-	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Tarkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5.Pembangunan sumber daya manusia unggulan	Masyarakat Kabupaten Lembata		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	-			1 Laporan	18.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	18.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Tersedianya dokumen profil kependudukan Kabupaten Lembata***	-			**1 Dokumen**	**15.000.000,00**						-	**24.167.650,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersedianya dokumen profil kependudukan Kabupaten Lembata*	-			1 Dokumen	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata	-	24.167.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		24.167.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		JUMLAH						**3.200.702.366,00**							**4.319.342.442,00**	

BAB V

PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lembata,

Siprianus Suya, SH

Pembina Tkt. I

NIP.19711231 200012 1 032

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024

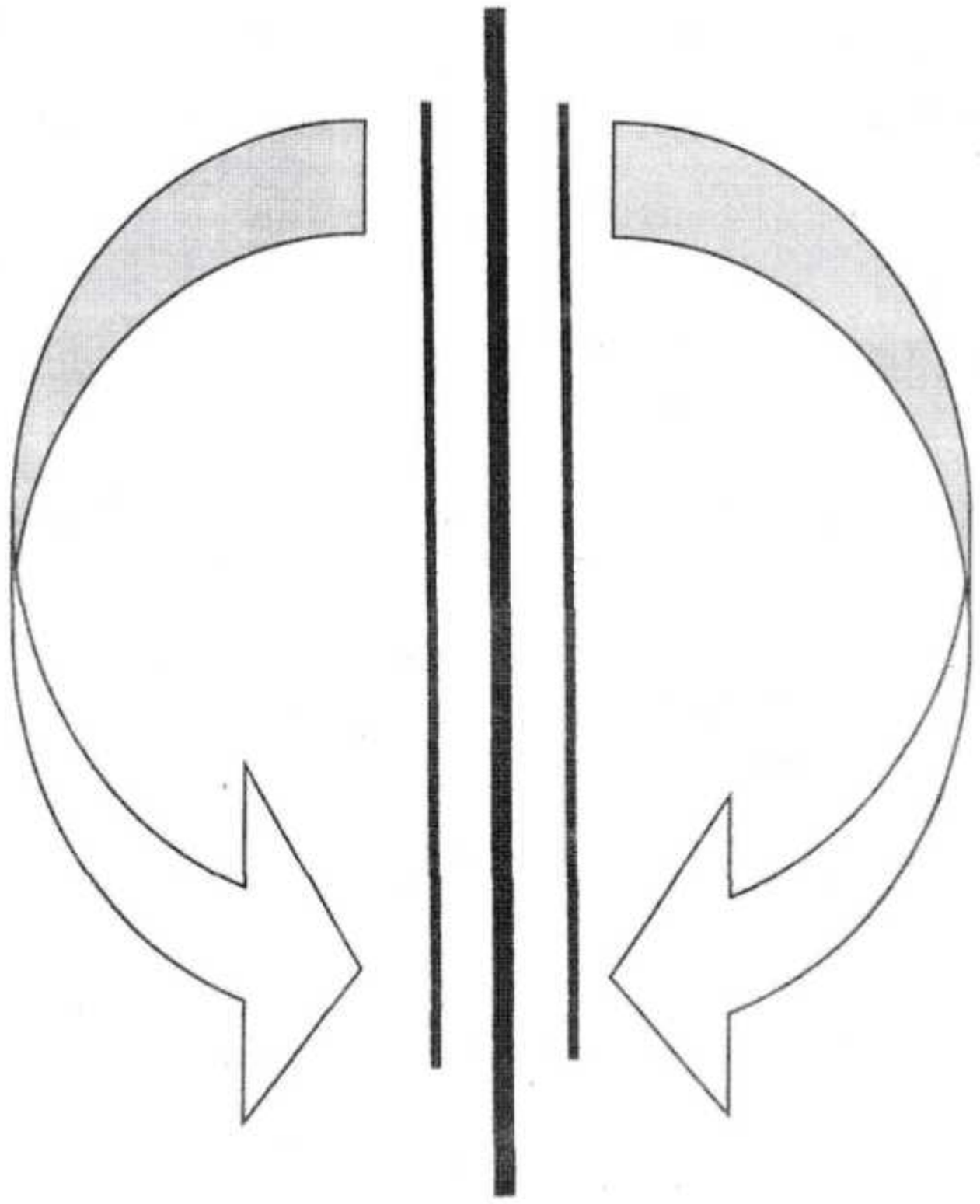

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangar Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBAT TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dishub Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang serta usulan dari berbagai pihak yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024, serta sebagai acuan untuk tahap pembangunan tahun selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Lembata,

YOHANES BERCHMANS D DAI, S.Ip

Pembina Tingkat I

NIP. 19731125 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Lampiran Keputusan Kepala SKPD

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... BAB I 1

1.2 Landasan Hukum ..... BAB I 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... BAB I 3

1.4 Sistematika Penulisan ..... BAB I 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah ..... BAB II 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... BAB II 5

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... BAB II 11

2.4 Rekomendasi Strategis Untuk Ditindaklanjuti ..... BAB II 15

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... BAB II 15

BAB III. TUJUAN DAN SASRAN

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... BAB III 22

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2023 ..... BAB III 23

3.3 Program dan Kegiatan ..... BAB III 28

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ..... BAB IV 31

BAB V. PENUTU

5.1 Catatan Penting dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ..... BAB IV 45

5.2	Kaidah Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2023	.....	BAB IV	45
5.3	Rencana Tindak Lanjut Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023	.....	BAB IV	46

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor ... Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Perhubungan dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Lembata

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Cakupan Pelayanan Admministrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	100 %					100%	53.16%	1%
2	15	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	48 Dok /lap				8 Dok./ Lap.	8 Dok./Lap.	17%
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	8%
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan				2 Laporan	2 Laporan	25%
2	15	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat**	**Terlaksananya penataan administrasi**	80 Dok				2 Doku	2 Dokume	3%

					Daerah	**keuanganPD**							**men**	**n**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan					14 Bulan	14 Bulan	25%
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Laporan					18 Laporan	18 Laporan	25%
2	15	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**16**	**Laporan**					**4 Dok./ Lap.**	**4 Dok./Lap.**	**25%**
2	15	01	2.03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD yang disusun	8	Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	25%
2	15	01	2.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD yang disusun	8	Laporan					2 Laporan	2 Laporan	25%
2	15	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**4**	**Dokumen**					**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**25%**
2	15	01	2.05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	4	Dok					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2	15	01	2.05	04	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undang	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2	Orang					1 Orang	1 Orang	50%
2	15	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**100**	**Dokumen**					**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**25%**
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket					1 Paket	1 Paket	25%
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1 Paket	1 Paket	25%
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket					1 Paket	1 Paket	25%
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen					12 Dokumen	12 Dokumen	25%
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan					10 Laporan	10 Laporan	25%
2	15	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**52**	**Unit**					-	-	-

					Daerah									
15	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebeler yang Diadakan	40	Unit					-	-	-
15	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	12	Unit					-	-	-
15	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**Lap.**					**3 Laporan**	**3 Laporan**	**25%**
15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
15	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**41**	**Unit**					**11 Unit**	**7 Unit**	**17%**
15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanx	9	Unit					5 Unit	5 Unit	56%
15	01	2.09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Meubel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	Unit					4 Unit	0 Unit	0%
15	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	Unit					2 Unit	2 Unit	10%
15	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Meningkatnya Keselamatan Transportasi**	**100**	**%**					**100**	**22**	**22%**
15	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penetapan *Rencana Induk Jaringan* LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota**	**1**	**dok**					-	-	-
15	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota	1	Dokumen					-	-	-
15	**02**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia**	**60**	**Unit**					**15 Unit**	**0 Unit**	**0%**
15	02	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	60	Unit					15 Unit	0 Unit	0%
15	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah terminal (Fsilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara**	**2**	**Unit**					**2 Unit**	**2 Unit**	**100%**
15	02	2.03	11	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (Fsilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	2	Unit					2 Unit	2 Unit	100%
15	**02**	**2.05**		**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji**	**525**	**Unit**					**518 Unit**	**251 Unit**	**48%**
15	02	2.05	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang	2	Orang					1 Orang	1 Orang	50%

						ditingkatkan kapasitasnya								
2	15	02	2.05	03	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	525	Unit					518 Unit	251 Unit	48%
2	15	02	2.05	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1000	Unit					518 Unit	518 Unit	52%
2	15	02	2.05	07	Sub Kegiatan Pemeliharaan SARPRAS Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	1	Unit					1 Unit	0 Unit	0%
2	15	02	2.05	08	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	2	Laporan					1 Laporan	1 Laporan	50%
2	**15**	**02**	**2.09**		**Kegiatan Penyediaan Angkt Umum untuk Jasa Angkt Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten**	**4**	**Unit**					**0 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0%**
2	15	02	2.09	01	Sub Kegiatan Pengendalian Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Untuk Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Desa yang Diadakan dan terpelihara	4	Unit					-	-	-
2	15	02	2.09	02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (DAU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Desa yang Diadakan dan terpelihara	1	Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Meningkatnya Pelayanan Pelabuhan Laut Kabupaten Lembata**	**100**	**%**					**100%**	**1.89**	**2%**
2	**15**	**03**	**2.12**		**Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun beroperasi dan terpelihara**	**8**	**Unit**					**8 Unit**	**0 Unit**	**0%**
2	15	03	2.12	02	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	1	Unit					0 Unit	0 Unit	0%
2	15	03	2.12	03	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal (DAK)	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	7	Unit					1 Unit	0 Unit	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata, dan Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata, Dinas Perhubungan diberikan mandat dan tugas untuk menyelenggarakan urusan wajib yakni **Urusan Perhubungan** serta tugas lain yang dipercayakan oleh Bupati. Selanjutnya, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata adalah:

"Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Untuk merumuskan faktor-faktor penting dalam merencanakan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka pengukuran kinerja terhadap target sasaran dan program pada Renstra Perhubungan periode lalu penting untuk dilakukan. Dengan mengukur capaian sasaran/target pada renstra periode lalu dan/atau indikator kinerja lainnya, akan didapatkan rumusan potensi dan permasalahan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan renja periode berikutnya.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan sampai denga Triwulan 2 Tahun 2023, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa terhadap target yang ditetapkan terdapat kinerja pelayanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata tidak mencapai target, kondisi ini disebabkan karena keterbatasan Anggaran.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Tersedianya Angkutan Umum yang melayani Wilayah yang telah tersedia				2 Unit	2 Unit	2 Unit		-	2 Unit	2 Unit	
2.	Terbangunnya jaringan transportasi darat, laut dan udara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan darat, laut dan udara, pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan very, pelabuhan udara dan terbangunnya fasilitas dan peningkatan jaringan transportasi darat, laut dan udara.				8 Unit	8 Unit	8 Unit		1 Unit	1 Unit	8 Unit	
3.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek				1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	
4.	Tersedianya Armada Pelayaran Rakyat yang melayani Wilayah yang telah Tersedia				2 Unit	2 Unit	2 Unit		-	-	2 Unit	
5.	Tersedianya Dermaga untuk naik turun penumpang/Bongkar Muat yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	
6.	Terpenuhinya Standart Keselamatan Kapal dengan ukuran dibawah 7 GT				1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	

7.	Tersedianya angkutan umum dengan Standar Keseelamatan yang memenuhi				1 Unit	1 Unit	1 Unit		-	2 Unt	1 Unit	
8	Tersedianya Rambu, Marka dan Guardrill dan Penerangan Jalan Umum (PJU)				Marka 250 M dan 250 Unit Rambu (PJU)	Marka 250 M dan 250 Unit Rambu (PJU)	Marka 250 M dan 250 Unit Rambu (PJU)		110 Unit PJU	250 Unit PJU	Marka 250 M dan 250 Unit Rambu (PJU)	
9	Tersedianya Pengujian Kendaraan bermotor yang memenuhi Syarat				1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mendukung RPD Tahun 2023-2026, maka dapat dikemukakan isu – isu penting yang akan ditangani melalui Renja Dinas Perhubungan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Adapun isu internal sebagai berikut:

1. Belum efektifnya proses kebijakan daerah dan instrumen hukum lainnya dalam penyelenggaraan desentraisasi dan otonomi daerah.
2. Koordinasi administratif secara berkesinambungan kepada perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah belum optimal.
3. Pemantauan dan evaluasi administratif terhadap pelaksanaan kebijakan daerah belum dilakukan secara optimal oleh Sekretariat Daerah selaku Advisor Kebijakan Daerah dan Instrumen hukum lainnya.
4. Pelayanan administratif kepada komponen pelaku pembangunan secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah belum optimal.
5. Pembinaan ASN khususnya di bidang akuntabilitas kinerja, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan akuntabilitas jabatan PNS dan Non PNS dalam kerangka manajemen ASN belum dilakukan secara optimal.
6. Belum optimalnya kapasitas manjemen perkantoran secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi internal satuan kerja.

Adapun Isu eksternal sebagai berikut

1. Globalisasi

   Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya *(virtual)* belum dapat diikuti oleh SDM Aparatur yang berdaya saing tinggi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparatur.

2. Peraturan Perundang-Undangan.

   Gerakan reformasi di segala bidang yang berdampak pada perubahan regulasi yang cepat, sulit diikuti dan diterjemahkan oleh aparatur yang masih memiliki kompetensi yang terbatas dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan isu – isu penting pelayanan Dinas Perhubungan tersebut maka permasalahan yang dihadapi dan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

a) Proses kebijakan pemerintahan daerah, yang meliputi penyusunan, pemantauan dan evaluasi belum dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Hal ini disebabkan kapabilitas tim penyusun, tim evaluasi dan tim revisi kebijakan pemerintahan daerah masih kurang.
b) Realisasi kinerja sesuai target sulit dicapai karena masih rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah, kualitas sumber daya aparatur, motivasi kerja aparatur yang rendah, pola pikir dan budya kerja belum mengikuti paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah.
c) Pemahaman pegawai terhadap pekerjaan masih rendah.
d) Belum optimalnya fasilitasi organisasi kemasyarakatan sebagai pihak yang turut serta dalam pembangunan daerah.
e) Keterbatasan sumber dana yang dialokasikan dari APBD sehingga banyak program/kegiatan prioritas yang direncanakan tetapi belum dapat dilaksanakan.
f) Peralatan dan sarana serta prasarana belum memadai.
g) Belum berkembangnya kerjasama antar daerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kurangnya minat Pemerintah Daerah lain dan pihak ketiga untuk melakukan kerjasama.
h) Sistem pelayanan pengujian yang terintegrasi belum berbasis website.

i) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelaikan kendaraan bermotor demi keselamatan dalam berkendara.

j) Kurangnya fasilitas utama dan fasilitas pendukung terminal angkutan.

k) Masih adanya penggunaan jalan diluar fungsinya (badan jalan digunakan untuk parkir).

l) Kurang terpenuhi kebutuhan perlengkapan jalan dibandingkan dengan jaringan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan dan Papan nama jalan.

m) Rendahnya disiplin pengguna jalan mengakibatkan tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Dampak yang timbul akibat dari adanya isu-isu Internal dan Eksternalserta masalah yang dihadapi adalah Sebagai berikut:

- Ketidakselarasan dan ketidakserasian dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD dengan RKA-SKPD dan RAPBD karena masih rendahnya sumber dana untuk membiayai program/kegiatan prioritas daerah.
- Selain itu, poduktivitas kerja aparatur rendah sebagai akibat dari keterbatasan Sarana dan prasarana pendukung dan capaian kinerja sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan belum mencapai target yang ditetapkan. Hanya sebagian kecil program dan kegiatan yang mencapai target yang ditetapkan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan yang meliputi Jenis Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan, Pelayanan dan arahan lokasi, pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, maka tantangan dan peluang dalam melaksanakan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan adalah Sebagai berikut:

a) Tantangan Utama

- Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja;
- Tuntutan pelayanan publik yang berkualitas menuntut perlunya pembenahan kinerja dan disiplin aparatur, sistem pengawasan yang semakin baik, serta sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang sehat, kondusif dan baik.
- Tuntutan masyarakat untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mempercepat implementasi otonomi daerah.
- Adanya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima

b) Peluang Utama

- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menetapkan peningkatan sadar hukum masyarakat, peningkatan pembangunan infrastruktur energi, penataan Aparatur Sipil Negara sebagai agenda prioritas, memberikan peluang yang semakin besar bagi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten dan DPRD;
- Hubungan yang baik dengan Instansi Vertikal;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN ANGGARAN 2024

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN LEMBATA

DINAS PERHUBUNGAN

NO.					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**20,252,554,291**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**54,982,728,397**	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lembata	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	3,412,497,291	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lembata	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	4,542,497,291	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Dok.**	**52,293,100**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Dok.**	**52,293,100**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Lembata	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.	2 Dok.	10,566,400	Penyusunan Dokumen Perencanaa Perangkat daerah	Kab. Lembata	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.	2 Dok.	10,566,400	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen RKA	1 Dok.	5,384,200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen RKA	1 Dok.	5,384,200	
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1 Dok.	5,384,200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1 Dok.	5,384,200	

2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen DPA	1 Dok.	10,413,600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen DPA	1 Dok.	10,413,600	
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	1 Dok.	10,413,600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	1 Dok.	10,413,600	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok.	10,131,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok.	10,131,100	
2	15	01	2.01	09	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok.	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok.	-	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja SKPD**	25	**3,066,776,316**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja SKPD**	25	**3,066,776,316**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Lembata	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2,907,497,291	Penyediaan gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Lembata	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2,907,497,291	
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dok.	139,447,975	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dok.	139,447,975	
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Lap.	7,504,458	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Lap.	7,504,458	

							tahun SKPD								
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulan semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap.	12,326,591	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulan semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Lap.	12,326,591	
2	**15**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**3 Lap & Dok**	**40,565,416**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**3 Lap & Dok**	**40,565,416**	
2	15	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok.	7,504,458	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok.	7,504,458	
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	33,060,958	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	33,060,958	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah**	**25%**	**5,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah**	**25%**	**85,000,000**	
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok.	5,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok.	5,000,000	
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang.	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang.	40,000,000	

2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	40,000,000	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Terlaksannya Penataan aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	25 %	**83,460,164**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Terlaksannya Penataan aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	25 %	**83,460,164**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,084,647	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab, Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,084,647	
2	15	01	2.06	02	Penydiaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,861,517	Penydiaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,861,517	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	5,535,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	5,535,000	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Kupang dan Jakerta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	51,979,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata , Kupang dan Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	51,979,000	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25 %**	**6,000,000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab . Lembata**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25 %**	**36,000,000**	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	6,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	6,000,000	

2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	30,000,000	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**74,166,510**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**74,166,510**	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7,875,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7,875,000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	51,249,760	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	51,249,760	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	15,041,750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	15,041,750	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanga Urusan Pemerintah daerah**	**25 %**	**84,235,786**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanga Urusan Pemerintah daerah**	**25 %**	**1,104,235,786**	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Lembata	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	74,904,286	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Lembata	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	74,904,286	
2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	2 Unit	7,141,500	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	2 Unit	7,141,500	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Kab. Lembata	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	2,190,000	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Kab. Lembata	Terlaksanaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	2,190,000	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	1,000,000,000	

2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	20,000,000	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kab. Lembata**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**1 Dokumen**	**1,854,549,885**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kab. Lembata**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**1 Dokumen**	**2,454,723,991**	
2	**15**	**02**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**20,000,000**	**Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**100,000,000**	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**15 Unit**	**92,834,286**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**15 Unit**	**500,000,000**	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	92,834,286	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	500,000,000	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara**	**2 Unit**	**26,273,608**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara**	**2 Unit**	**100,000,000**	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Lembata	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	26,273,608	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Lembata	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	100,000,000	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji**	**518 Unit**	**191,630,541**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji**	**518 Unit**	**220,912,541**	

2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lembata	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkela Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	18,031,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lembata	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	40,000,000	
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	518 Unit	8,326,308	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab, Lembata	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	518 Unit	8,326,308	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dok.	20,300,875	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dok.	20,300,875	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	132,285,358	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	132,285,358	
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	12,687,000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	20,000,000	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**1 Unit**	**1,523,811,460**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**1 Unit**	**1,533,811,460**	

2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	1,513,811,450	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	1,513,811,450	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap.	10,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap.	20,000,000	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Kab. Lembata**	**Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran**	**1 Dok.**	**14,985,507,115**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Kab. Lembata**	**Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran**	**1 Dok.**	**47,985,507,115**	
2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun, Beroperasi dan Terpelihara**	**2 Unit**	**14,985,507,115**	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun, Beroperasi dan Terpelihara**	**2 Unit**	**47,985,507,115**	
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Lembata	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Dokumen	-	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Lembata	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Dokumen	33,000,000,000	
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Lembata	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	14,985,507,115	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Lembata	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	14,985,507,115	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 6 (Enam) sub kegiatan yang tidak ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 namun berdasarkan hasil analisis kebutuhan sangat dibutuhkan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.20.252.554.291-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 54.982.728.397-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata banyak menerima masukan/usulan baik dari masyarakat luas pada umumnya maupun dari kalangan tertentu pemangku kepentingan. Usulan dan masukan berbagai sumber tersebut diperoleh baik dari saluran resmi berupa musrenbang maupun disampaikan langsung/tidak langsung melalui berbagai media (surat resmi, surat kabar maupun kunjungan). Dari beberapa usulan dan masukan tersebut ada beberapa diantaranya yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata seperti pengadaan satana transportasi pedesaan, pengadaan lampu penerangan jalan umum, pengadaan papan nama jalan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pembuatan marka jalan, pembuatan zebra cross, penataan terminal, penyediaan fasilitas halte bus dan sebagainya. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Rancangan Awal RKPD				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume (Rp)	
	DINAS PERHUBUNGAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		

	* Pengadaan Lampu PJU dalam Kota Lewoleba dalam Rangka Penataan Kota	Nubatukan		50 Unit	Usulan Masyarakat dan Pokir DPRD
	* Pengadaan Rambu Lalu Lintas	tersebar		10 Unit	Usulan Masyarakat dan Pokir DPRD
	* pengadaan Rambu papan nama jalan	tersebar		20 Unit	Usulan Masyarakat dan Pokir DPRD
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RPD, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

RPD Tahun 2024 telah ditetapkan dengan tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dan terdapat 5 (lima) program prioritas nasional yaitu:

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan
5. Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tupoksi Dinas Perhubungan terdapat pada prioritas kedua dimana beberapa arah kebijakannya yaitu Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektifitas dimana dengan melakukan konektifitas antar wilayah akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap wilayah. Selaras dengan kebijakan nasional tersebut maka dalam kebijakan daerah yang tertuang dalam RPD 2023-2026 yakni Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Kebijakan-kebijakan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan

berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dishub yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra dalam mendukung pencapain target kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam RPD kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lembata maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata akan turut aktif dalam hal perencanaan. Berdasarkan pada Renja Dishub maka tujuan dan Sasaran dari Dishub pada tahun 2024 yaitu: **"Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar"** Adapun sasaran yang akan dicapai adalah **"Terbangunnya jaringan transportasi darat, laut dan udara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan darat, laut dan udara, pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan very, pelabuhan udara dan terbangunnya fasilitas dan peningkatan jaringan transportasi darat, laut dan udara."**

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Terbangunnya jaringan transportasi darat, laut dan udara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan darat, laut dan udara, pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan very, pelabuhan udara dan terbangunnya fasilitas dan peningkatan jaringan transportasi darat, laut dan udara.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis yang Dibangun dan dipelihara	8 Unit
			Jumlah fasilitas terminal tipe C yang tersedia dibagi dengan jumlah fasilitas terminal penumpang sesuai SPM dikali 100	2 Unit
			Tersedianya Angkutan Umum yang melayani Wilayah yang telah tersedia	2 Unit
			Tersedianya Rambu, Marka dan Guardrill dan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Marka 250 M dan 250 Unit Rambu (PJU)
			Tersedianya Pengujian Kendaraan bermotor yang memenuhi Syarat	1 Unit

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.

b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026.

c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran maka dirumuskan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah. Rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2024 mengacu dan mempedomani RPD 2023-2026, Renstra dan RKPD tahun 2024.

Adapun gambaran mengenai rekapitulasi rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2024 terdiri dari 3 program dan 14 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah terdiri dari 2 program 6 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan antara lain:
   a. Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan dan
   b. Program Pengelolaan Pelayaran
2) Program/kegiatan di tingkat Perangkat Daerah yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan wajib ada pada setiap Perangkat Daerah untuk pemenuhan kebutuhan kinerja aparatur dalam menigkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, terdiri dari 1 program 8 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2024 adalah Rp.20.252.554.291,00. Pagu indikatif pada Renstra untuk tahun 2024 sebesar Rp.4.150.080.637,00. Kondisi ini menunjukkan ketidak konsisten pagu indikatif pada Renja dengan Pagu Indikatif pada Renstra, yang mana dapat di kemukakan bahwa perubahan yang terjadi sebagai dampak dari meningkatnya alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasih Khusus (DAK).

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Perhubungan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, adalah:

1) Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023.
2) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan.
3) Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan.
4) Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Perhubungan.
5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu potensi dari hasil retribusi parkir, pelabuhan penyeberangan, terminal angkutan dan pengujian kendaraan bermotor.

Uraian lengkap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata disajikan pada tablel berikut ini

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						20.252.554.291,00							4.868.732.364,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.252.554.291,00							4.868.732.364,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						20.252.554.291,00							4.868.732.364,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas/ol perangkat daerah*	-			100 %	3.412.497.291,00						-	3.868.366.430,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	52.293.100,00			-	-	ASN pada Dinas Perhubungan	-	71.724.982,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.588.400,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		20.302.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.364.200,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		10.151.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.364.200,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		10.818.982,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.413.600,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		10.151.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.413.600,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		10.151.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10.131.100,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		10.151.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja SKPD*	-			25 %	3.086.779.315,00			-	-	ASN pada Dinas Perhubungan	-	2.830.935.839,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.907.497.281,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		2.751.005.979,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	139.447.875,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		159.824.660,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.504.458,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		10.151.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	12.328.591,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		10.151.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	-			4 Laporan	40.563.418,00			-	-	ASN pada Dinas Perhubungan	-	25.377.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7.504.458,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		10.151.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0008	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	33.060.958,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		15.226.500,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah*	-			25 %	5.000.000,00			-	-	ASN pada Dinas Perhubungan	-	40.604.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Lembata, Nebelukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		40.604.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah*	-			25 %	63.460.184,00			-	-	ASN pada Dinas Perhubungan	-	124.348.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.084.847,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		17.764.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.891.517,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		20.302.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		10.151.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.535.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		10.151.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	61.670.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		85.961.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			25 %	6.000.000,00			-	-	ASN pada Dinas Perhubungan	-	25.377.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	6.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		25.377.500,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Bulan	74.166.510,00			-	-	ASN pada Dinas Perhubungan	-	380.814.156,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.875.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		265.270.242,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	61.249.765,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		112.656.164,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	16.041.750,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		12.668.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*	-			25 %	94.235.788,00			-	-	ASN pada Dinas Perhubungan	-	88.201.913,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	74.994.288,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		33.371.413,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0025	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	7.141.500,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		20.302.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0026	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.160.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		36.528.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	-	-			-	**1.054.549.555,00**						-	**749.880.192,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah *Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	20.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan Intrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Lambeta, Nubakukan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1.Meningkatkan Intrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-			15 Unit	82.834.286,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana 7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong perkembangan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	Masyarakat Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	472.227.430,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				15 UNI	82.834.286,00	- Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dosa	RENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana 7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	Masyarakat Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		472.227.430,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Penduking) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	-			2 Unit	28.273.608,00			Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral kewilayahan dan lintas serta investasi daerah	Masyarakat Pengguna Fasilitas Terminal	-	28.412.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	28.273.608,00	- Kab. Lembata, Nubelukan, Lewoleba Timur - Kab. Lembata, Nubelukan, Lewoleba Barat	INSENTIF FISKAL	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral kewilayahan dan lintas serta investasi daerah	Masyarakat Pengguna Fasilitas Terminal		28.412.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji*	-			518 Unit	191.830.541,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	ASN pada Dinas Perhubungan dan Pemilik Kendaraan Bermotor	-	172.198.962,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0032	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kayaadanya				2 Orang	18.031.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	ASN pada Dinas Perhubungan dan Pemilik Kendaraan Bermotor		18.785.962,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				518 Unit	5.328.306,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	ASN pada Dinas Perhubungan dan Pemilik Kendaraan Bermotor		19.053.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Build Luka Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Build Luka Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 Dokumen	20.300.675,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	ASN pada Dinas Perhubungan dan Pemilik Kendaraan Bermotor		25.412.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.08.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	132.285.356,00	- Kab. Lembata, Nubelikan, Lewoleba Utara	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong perkembangan sektorsi sekunder dan tersier serta investasi daerah	ASN pada Dinas Perhubungan dan Pemilik Kendaraan Bermotor		83.830.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	12.087.909,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong perkembangan sektorsi sekunder dan tersier serta investasi daerah	ASN pada Dinas Perhubungan dan Pemilik Kendaraan Bermotor		25.413.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*	-			1 Unit	1.523.811.450,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1.Meningkatan infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Pengguna Angkutan Umum di Kabupaten Lembata	-	80.047.609,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1.Meningkatan infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Pengguna Angkutan Umum di Kabupaten Lembata		12.706.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Unit	1.513.611.490,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1.Meningkatkan Infrastruktur untuk Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, sevitasyahan dan mitigasi bencana	Pengguna Angkutan Umum di Kabupaten Lembata		67.541.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran***	-			**1 Dok**	**14.965.807.115,00**						-	**130.465.752,00**	
	2.15.03.2.12	Perbaiguran, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun, Beroperasi dan Terpelihara*	-			5 Unit	14.965.507.115,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong perkembangan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	Masyarakat Penggana Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	130.465.752,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				5 Unit	14.965.507.115,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan daya saing daerah dengan mendorong perkembangan sektoral sekunder dan tersier serta investasi daerah	Masyarakat Penggana Pelabuhan Pengumpan Lokal		130.465.752,00	DINAS PERHUBUNGAN
		JUMLAH						**20.252.684.291,00**							**3.665.732.264,00**	

Lembata, Juli 2023
Kepala Dinas,

YOHANES [illegible], S.Sos, M.Si
NIP. 19731125 200012 1 001

Penjelasan singkat Tabel:

Pada tabel tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa Total pagu untuk Anggaran pada Tahun 2024 adalah Rp. 20.252.554.291,00 dengan 3 program dan 14 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan program unggulan (*dedicated*) Daerah yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 terdiri dari 2 program 6 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan antara lain:
   a. Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan dan
   b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program/kegiatan di tingkat Perangkat Daerah yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan wajib ada pada setiap Perangkat Daerah untuk pemenuhan kebutuhan kinerja aparatur dalam menigkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, terdiri dari 1 program 8 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan issue dan permasalahan yang timbul saat ini, serta memuat rancangan program kegiatan, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber - sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program pemerintah daerah.

5.1 Catatan Penting dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024

a. Setiap Kepala bidang wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 yang dihimpun dan diharmonisasikan oleh Sub Bagian Perencanaan untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.
b. Para Kepala Bidang harus saling berkoordinasi untuk menjamin sinergitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
c. Dalam hal alokasi atau ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana temuat dalam Renja, maka penyusunan Rencana Kerja Anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2024

a. Setiap Bagian yang menjadi unit kerja pelaksanaan Renja harus mengevaluasi Renja tahun 2023 yakni membandingkan antara target program/kegiatan dan jumlah dana dalam Renja dengan jumlah program/kegiatan yang disetujui DPRD dan ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2023.
b. Hasil evaluasi Renja Tahun 2023 sebagai acuan dalam penyusunan Renja Tahun 2024 sebagai input dalam pelaksanaan musrenbang tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024

a. Setiap Kepala Bidang harus mendalami Renja Tahun 2023 secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan persetujuan komisi DPRD sebagai mitra SKPD pada saat pembahasan anggaran.
b. Setiap Kepala Bidang berkoordinasi dengan TAPD untuk penyerasian final dalam RAPBD setelah disetujui oleh komisi DPRD terkait dan Badan Anggaran DPRD.
c. Setiap Kepala Bidang wajib menyusun DPA/DPPA dan Anggaran Kas setiap triwulan dan disampaikan kepada TAPD untuk mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
d. Setiap Kepala Bidang wajib melaksanakan DPA/DPPA sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.
e. Setiap Kepala SKPD wajib mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA dan membuat laporan kepada Sekda sebagai pengguna Anggaran setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2024 memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
2. Dalam hal rencana kerja tahun 2024 yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegaiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian Renja melalui penyusunan Perubahan Renja yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Tahun 2024.

Rencana Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian perumusan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata tahun 2024 sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam penyusunan RKA tahun 2024 untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Lewoleba, 11 JULI 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lembata,

YOHANES BERCHMANS D DAI, S.Ip
Pembina Tingkat I
NIP. 19731125 200012 1 001

RENJA

RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2024

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata Tahun 2023, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Lewoleba, 2023

Kepala Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten Lembata

PETRUS DEMONG, S. Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19700709 200312 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Kominfo 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 26

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 26

3.2 Tujuan dan Sasaran 27

3.3 Program dan Kegiatan 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

BAB V PENUTUP 42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan PencapaianRenstra s/d Tahun Berjalan 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata..... 15

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 18

Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 28

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 31

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor ... Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata;

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENJELASANNYA S/D TAHUN BERJALAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 - 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran SKPD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program /Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%							
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32 Dok/Lap					8 Dok/Lap	8 Dok/Lap	25%
2 16 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	25%
2 16 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	25%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 - 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran SKPD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program /Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		208 Dok/Lap/Bulan					52 Dok/Lap/Bulan	52 Dok/Lap/Bulan	25%
2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan					14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	25%
2 16 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
2 16 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan					18 Laporan	18 Laporan	25%
2 16 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	72 Dokumen					18 Dokumen	18 Dokumen	25%
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2 16 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan					3 Laporan	3 Laporan	25%
2 16 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan					3 Laporan	3 Laporan	25%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 - 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran SKPD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program /Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2 16 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		20 Dok/Orang					5 Dok/Orang	5 Dok/Orang	25%
2 16 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	25%
2 16 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang					2 Orang	2 Orang	25%
2 16 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**32 Paket/Dok/Lap**					**8 Paket/Dok/Lap**	**8 Paket/Dok/Lap**	**25%**
2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket					4 Paket	4 Paket	25%
2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket					1 Paket	1 Paket	25%
2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket					1 Paket	1 Paket	25%
2 16 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
2 16 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**52 Unit**					**13 Unit**	**13 Unit**	**25%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 - 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran SKPD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target program /Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perbandingan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2 16 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit					3 Unit	3 Unit	25%
2 16 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit					10 Unit	10 Unit	25%
2 16 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**12 Laporan**					**3 Laporan**	**3 Laporan**	**25%**
2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	25%
2 16 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**88 Unit**					**22 Unit**	**22 Unit**	**25%**
2 16 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit					10 Unit	10 Unit	25%
2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit					4 Unit	4 Unit	25%
2 16 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit					4 Unit	4 Unit	25%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 - 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran SKPD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program /Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2 16 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit					4 Unit	4 Unit	25%
2 16 02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**100%**							
2 16 02 2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**16 Dok/Orang**					**4 Dok/Orang**	**4 Dok/Orang**	**25%**
2 16 02 2.01 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 02 2.01 0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik									
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	8 Orang					2 Orang	2 Orang	25%
2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**100%**							
2 16 03 2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**76 Domain/Unit**					**19 Domain/Unit**	**19 Domain/Unit**	**25%**
2 16 03 2.01 0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	48 Domain					12 Domain	12 Domain	25%
2 16 03 2.01 0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah									
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	28 Unit					7 Unit	7 Unit	25%
2 16 03 2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**68 Dok/Unit**					**17 Dok/Unit**	**17 Dok/Unit**	**25%**
2 16 03 2.02 0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 - 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran SKPD s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kelompok Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program /Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2 16 03 2.02 0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah									
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	52 Unit					13 Unit	13 Unit	25%
2 16 03 2.02 0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 03 2.02 0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 16 03 2.02 0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE									
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**100%**								
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**12 Dok/Unit**						**3 Dok/Unit**	**3 Dok/Unit**	**25%**
2 20 02 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 20 02 2.01 0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral									
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25%
2 20 02 2.01 0005	Pengembangan Infrastruktur									
		Jumlah Infrastruktur Statistik	4 Unit					1 Unit	1 Unit	25%
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**100%**								
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**						**1 Laporan**	**1 Laporan**	**25%**

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2023, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Tersedianya infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi			25%	25%	25%	25%	25%		25%	25%	
2.	Tersedianya Akses Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat			25%	25%	25%	25%	25%		25%	25%	
3.	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi untuk mencapai lembata satu data			25%	25%	25%	25%	25%		25%	25%	
4.	Terpenuhinya Sumber Daya untuk pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Daerah			25%	25%	25%	25%	25%		25%	25%	
5.	Tersedianya tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif yang berbasis elektronik			25%	25%	25%	25%	25%		25%	25%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, inaka dengan menggunakan pola analisis SWOT dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kekuatan *(Strengths)* :
  1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM ASN bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian dan Statistik yang memadai;
  2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatikayang strategis dalam penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
- Kelemahan *(Weaknesses)* :
  1. Belum optimalnya kualitas SDM ASN;
  2. Manajemen data dan informasi yang masih belum optimal;
  3. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana kantor;
  4. Belum berfungsi secara optimal penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- Peluang *(Opportunities)* :
  1. Adanya regulasi yang mengatur peran Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah;
  2. Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memperkuat good governance dalam bidang Komunikasi dan Informatika;
- Ancaman *(Threats)* :
  1. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap Komunikasi dan Informatika belum optimal;
  2. Program dan kegiatan untuk mendukung penggunaan Internet Sehat bagi Masyarakat di Kabupaten Lembata belum optimal;

  SDM ASN Bidang Komunikasi dan Informatika masih lemah.

Dari hasil analisis tersebut di atas, maka dapat dikemukakan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Belum optimalnya pencapaian kinerja pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Meningkatnya pengguna dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan berbagai kegiatan sehari – hari. Kondisi seperti ini harus dibarengi dengan peran dan kontrol Pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara sehat dan tetap berjalan di jalur yang tepat.

3. Penguatan Sumber Daya Manusia.

   Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya di era transformasi digital harus dibarengi dengan Sumber Daya Manusia yang handal dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
		Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								3,259,852,340								3,155,646,472
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3,259,852,340								3,155,646,472
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								3,081,037,340								3,019,826,713
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,575,042,459								2,648,618,928
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								24,199,165								12,803,450
2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	2 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	2 Dokumen	12 Dokumen	1,975,900
2 16 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	12 Dokumen	1,976,200
2 16 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan (RKA-SKPD)																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	12 Dokumen	2,048,500
2 16 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	12 Dokumen	7,189,165	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	12 Dokumen	2,540,600
2 16 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	12 Dokumen	7,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	12 Dokumen	2,832,000
2 16 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	3 Laporan	12 Dokumen	4,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	3 Laporan	12 Dokumen	1,448,300
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,089,556,444								2,010,417,740
2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, lewoleba Tengah	25 %	14 Orang/bulan	100 %	1,776,056,444	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	14 Orang/bulan	100 %	1,897,003,840
2 16 01 2.02 0002	Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																

		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	100 %	202,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	100 %	111,111,111
2 16 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Laporan	100 %	2,340,000
2 16 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	18 Laporan	100 %	3,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	18 Laporan	100 %	592,800
2 16 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	12 Dokumen	100 %	3,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	18 Dokumen	100 %	592,800
2 16 01 2.09	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								11,500,000									21,784,700
2 16 01 2.09 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksanannya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	4 Laporan	-	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksanannya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	4 Laporan	944,700
2 16 01 2.09 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanannya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	3 Laporan	4 Laporan	1,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanannya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	3 Laporan	4 Laporan	944,700
2 16 01 2.09 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanannya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	3 Laporan	4 Laporan	10,500,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanannya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	3 Laporan	4 Laporan	19,895,300
2 16 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								11,500,000									1,500,000
2 16 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksanannya penataan pegawai perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksanannya penataan pegawai perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000
2 16 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksanannya penataan pegawai perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	2 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksanannya penataan pegawai perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	2 Dokumen	1 Dokumen	500,000
2 16 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	

2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								87,975,000									
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	4 Paket	100 %	1.650.000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	4 Paket	100 %	1.237.950	147,251,875
2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Paket	100 %	20,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Paket	100 %	22,846,275	
2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Paket	100 %	11,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Paket	100 %	5,096,750	
2 16 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	
2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Laporan	100 %	59,325,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Laporan	100 %	126,112,000	
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
2 16 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								34,500,000									
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	3 Unit	25 %	14,662,500	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	3 Unit	25 %	45,300,000	92,701,500
2 16 01 2.07 0009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	10 Unit	25 %	19,837,500	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	10 Unit	25 %	47,201,500	
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								242,861,850									
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Laporan	12 Laporan	229,861,850	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Laporan	12 Laporan	2,716,875	25,253,943
2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Laporan	12 Laporan	81,600,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lombata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Laporan	12 Laporan	20,592,468	

		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Dioptimalkan	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	4 Laporan	25 Laporan	1.000.000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Dioptimalkan	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	4 Laporan	25 Laporan	1.000.000
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53,900,000								136,907,600
2 16 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	10 Unit	100 %	27,500,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	10 Unit	100 %	85,687,800
2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	4 Unit	100 %	8,000,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	4 Unit	100 %	8,870,000
2 16 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	4 Unit	100 %	17,400,000	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	4 Unit	100 %	40,218,800
2 16 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	4 Unit	100 %	-	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	4 Unit	100 %	3,630,000
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								184,000,000								130,619,675
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								129,000,000								130,619,675
2 16 02 2.01 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	55,000,000	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	85,620,000
2 16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik																
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	100,000,000	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	14,999,925
2 16 02 2.01 0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Orang	25 %	29,000,000	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Orang	25 %	19,999,750
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								321,394,881								450,566,130
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/								40,250,000								146,663,600
2 16 03 2.01 0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																
		Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	12 Domain	25 %	10,000,000	Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	25 %	12 Domain	25 %	46,663,600

2 16 01 2.02 0002	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																
		Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Unit	25 %	31,734,841	Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Unit	25 %	101,883,040
2 16 01 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								281,734,841								101,524,510
2 16 01 2.02 0003	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
		Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	31,734,841	Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	31,672,735
2 16 01 2.02 0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																
		Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	13 Unit	25 %	31,734,841	Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	13 Unit	25 %	50,090,000
2 16 01 2.02 0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																
		Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	188,285,159	Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	181,587,260
2 16 03 2.02 0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																
		Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	25 %	20,000,000	Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Dokumen	25 %	18,327,250
2 16 03 2.02 0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																
		Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	20,000,000	Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	18,327,250
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								103,500,000								61,324,975
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								103,500,000								61,324,975
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								103,500,000								61,324,975
2 20 02 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																
		Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik dan Informasi Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	4 Buku	50,000,000	Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik dan Informasi Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	4 Buku	18,419,375
2 20 02 2.01 0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																
		Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik dan Informasi Daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	4 Buku	40,000,000	Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik dan Informasi Daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	4 Buku	21,462,600
2 20 02 2.01 0005	Pengembangan Infrastruktur																

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Keterangan Kosong	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Keluaran Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Keluaran Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Ketersedian Dokumen Statistik dan Informasi Daerah	Jumlah Infrastruktur Statistik	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Unit	4 Buku	13.500.000	Persentase Ketersedian Dokumen Statistik dan Informasi Daerah	Jumlah Infrastruktur Statistik	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Unit	4 Buku	21.452.800
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								75.325.000								74.294.784
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								75.325.000								74.294.784
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								40.250.000								37.355.900
2 21 02 2.01 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Laporan	25 %	40.250.000	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	25 %	1 Laporan	25 %	37.355.900
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								35.075.000								36.938.884
2 21 02 2.02 0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	5 Perangkat Daerah	25 %	35.075.000	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	5 Perangkat Daerah	25 %	36.938.884
								TOTAL	3.259.852.340							TOTAL	3.256.446.472

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang tidak ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 namun direncanakan pada Renja Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp. 3.259.852.340,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 3.155.446.472,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang melaksanakan unsur penunjang Komunikasi dan Informatika.

Pada tahun rencana 2024, terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.	9 Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Penyedia Layanan Telekomunikasi dalam Rangka Pembangunan BTS untuk Peningkatan Jaringan Telekomunikasi	18 BTS	Usulan Masyarakat 9 Kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah:

1. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lembata

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perlunya peningkatan daya saing daerah dengan meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi	Meningkatnya daya saing daerah dengan tersedianya infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi	Tersedianya infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi	25%
		Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat	Tersedianya Akses Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat	25%
	Belum terpenuhi kualitas serta kuantitas data yang terintegrasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral untuk mencapai Lembata satu data	Meningkatnya kualitas serta kuantitas data yang terintegrasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral untuk mencapai Lembata satu data	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi untuk mencapai lembata satu data	25%
	Belum terpenuhinya Sumber Daya untuk pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Daerah	Meningkatknya Sumber Daya untuk pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sumber Daya untuk pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Daerah	25%
	Belum terwujudnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif yang berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif yang berbasis elektronik	Tersedianya tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif yang berbasis elektronik	25%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2024 sebanyak 4 Program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 706,827,544,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 120,619,675,-.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, terdiri dari 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 450,588,110,-.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 61,324,975,-.
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 74,294,784,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

TABEL 3.1

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						3,155,446,472.00							3,471,880,934.00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,155,446,472.00							3,471,880,934.00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						3,010,830,713.00							3,124,000,846.00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100%		25 %	25 %	1,448,638,928.00						25 %	2,597,288,997.00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	48 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12,801,450.00			-	-	ASN Dinas Kominfo	12 Dokumen	24,683,148.00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1,975,900.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	2 Dokumen	2,026,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokuman RKA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1,974,500.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Dokumen	2,026,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2,085,550.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Dokumen	2,026,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2,540,600.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Dokumen	7,662,148.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2,612,000.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Dokumen	7,091,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1,449,200.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	2 Laporan	4,052,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	100%		100 %	100 %	2,010,417,740.00			-	-	ASN Dinas Kominfo	100 %	2,302,389,662.00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan		14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	1,897,003,840.00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Kominfo	14 Orang/Bulan	1,795,145,178.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	111,715,000.00	- Kab. Lombok Nutamukan, Lewonaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			ASN Dinas Kominfo	1 Dokumen	291,984,084.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1,140,000.00	- Kab. Lombok Nutamukan, Lewonaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Laporan	5,065,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	558,900.00	- Kab. Lombok Nutamukan, Lewonaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	18 Laporan	3,549,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran														
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	72 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	906,000.00	- Kab. Lombok Nutamukan, Lewonaba Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Kominfo	18 Dokumen	4,039,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**36 Laporan**		**4 Laporan**	**4 Laporan**	**21,784,700.00**			-	-	**ASN Dinas Kominfo**	**4 Laporan**	**11,790,000.00**	
	2	16	01	2.05	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	994,700.00	- Kab. Lombok Nutamukan, Lewonaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Dokumen	1,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	944,700.00	- Kab. Lombok Nutamukan, Lewonaba Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Kominfo	3 Laporan	5,030,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12		3 Laporan	3 Laporan	20,895,300.00	- Kab. Lombok Nutamukan, Lewonaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	3 Laporan	3,750,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah**	**4 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1,500,000.00**			-	-	**ASN Dinas Kominfo**	**1 Dokumen**	**11,790,000.00**	
	2	16	01	2.06	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500,000.00	- Kab. Lombok Nutamukan, Lewonaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Dokumen	2,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	500,500.00	- Kab. Lombok Nutamukan, Lewonaba Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Kominfo	2 Dokumen	2,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.05	0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		2 Orang	2 Orang	500,000.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Kominfo	2 Orang	5,730,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanahya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**100%**		**100 %**	**100 %**	**147,251,975.00**					**ASN Dinas Kominfo**	**100 %**	**88,734,500.00**	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pendirangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket		4 Paket	4 Paket	1,237,950.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	4 Paket	1,871,450.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	12,845,275.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Paket	17,942,889.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	5,056,750.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Paket	4,976,126.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2,040,000.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Dokumen	2,026,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	126,112,000.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM, DANA ALOKASI	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Laporan	54,018,225.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**		**25 %**	**25 %**	**92,703,500.00**					**ASN Dinas Kominfo**	**25 %**	**93,190,000.00**	
	2	16	01	2.07	0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		3 Unit	3 Unit	45,500,000.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Kominfo	3 Unit	14,919,863.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		10 Unit	10 Unit	47,203,500.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Kominfo	10 Unit	20,216,137.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**48 Laporan**		**12 Laporan**	**12 Laporan**	**25,253,963.00**					**ASN Dinas Kominfo**	**12 Laporan**	**288,170,087.00**	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,716,875.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Laporan	232,799,606.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,592,488.00	- Kab. Lombok Barat, Nubatukan, Lewolaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Laporan	82,010,800.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1,944,600.00	- Kab. Lombok Barat, Nubatukan, Lewolaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kominfo	1 Laporan	3,357,863.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**		**100 %**	**100 %**	**130,907,600.00**			-	-	**ASN Dinas KOMINFO Kab. Lombok**	**100 %**	**53,958,000.00**	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		10 Unit	10 Unit	80,667,800.00	- Kab. Lombok Barat, Nubatukan, Lewolaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas KOMINFO Kab. Lombok	10 Unit	20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		4 Unit	4 Unit	8,970,000.00	- Kab. Lombok Barat, Nubatukan, Lewolaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas KOMINFO Kab. Lombok	4 Unit	8,474,300.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit		4 Unit	4 Unit	40,239,800.00	- Kab. Lombok Barat, Nubatukan, Lewolaba Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas KOMINFO Kab. Lombok	4 Unit	17,626,200.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit		4 Unit	4 Unit	8,630,000.00	- Kab. Lombok Barat, Nubatukan, Lewolaba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas KOMINFO Kab. Lombok	4 Unit	7,857,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**2**	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**100%**		**25 %**	**25 %**	**120,619,675.00**						**25 %**	**937,680,000.00**	
	2	**16**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**25 %**	**25 %**	**120,619,675.00**			**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**	**3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif**	**Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok**	**25 %**	**937,680,000.00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Proksiasi Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85,620,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Dokumen	158,620,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,925.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Dokumen	150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
							Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	8 Orang		2 Orang	2 Orang	19,999,750.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	Orang	20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9	2	16	05			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika	100%		25 %	25 %	450,588,130.00							25 %	388,935,447.00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Proktorsin Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Annual dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Perioda Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		25 %	25 %	146,663,600.00			Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah Kabupaten Lombata	25 %	63,055,000.00	
	2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	48 Domain		1. Domain	17 Domain	46,663,600.00	- Kab. Lombata, Nubetukan, Lewoleba Tengah	INSENTIF FISKAL	Memperkuat infrestruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah Kabupaten Lombata	17 Domain	10,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	05	2.01	0005	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	28 Unit		7 Unit	7 Unit	100,000,000.00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat infrestruktur Untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah Kabupaten Lombata	7 Unit	53,055,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

					Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		25%	25%	809,926,510.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	25%	327,880,667.00	
2	10	10	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31,672,750.00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Dokumen	21,800,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	10	10	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	32 Unit		13 Unit	13 Unit	50,064,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	13 Unit	52,110,909.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Proyeksi Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	09	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	180,397,260.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Dokumen	203,209,538.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	09	2.02	0010	Pengelolaan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18,927,250.00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Dokumen	30,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	09	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4		1 Dokumen	1 Dokumen	18,927,250.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Dokumen	20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						61,824,975.00							59,067,090.00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik dan Informasi Daerah	100%		25%	25%	61,324,975.00						25%	59,067,090.00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB	10 Buku		4 Buku	4 Buku	61,324,975.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok	4 Buku	59,067,090.00	
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18,448,875.00	- Kab. Lombok Barat, Kecamatan Semua Kel/Desa - Kab. Lombok Tengah, Kecamatan Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok	1 Dokumen	25,515,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0009	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
							Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	1 Dokumen	31,452,800.00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok	1 Dokumen	19,067,090.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	20	02	2.01	0001	Pengembangan infrastruktur														
							Jumlah Infrastruktur Statistik	6 Unit		1 Unit	1 Unit	21,452,800.00	- Kab. Lombok Nubatukan, Lewoleba Tengah	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Unit	33,570,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						74,294,784.00							88,793,000.00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%		25%	25%	74,294,784.00							25%	88,793,000.00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		25%	25%	27,355,900.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	25%	33,016,500.00	
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27,355,900.00	- Kab. Lombok Nubatukan, Lewoleba Tengah	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Laporan	33,016,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Proyeksian Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	21	02	2.02			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		25%	25%	46,938,834.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintuh dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	25%	35,776,500.00	
	2	21	02	2.02	0001		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kauupaten/Kota														
								Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	20 Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	46,938,834.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	5 Perangkat Daerah	35,776,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
													JUMLAH	3,155,946,472.00						3,471,880,934.00	

BAB V

PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lembata,

PETRUS DEMONG, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19700709 200312 1 005

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LEMBATA

TAHUN 2024

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN
KABUPATEN LEMBATA
2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

(...)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : 800.1.5.1/90/Bappl/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.3. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Disdagperindag Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang- undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang- undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

3. Undang- undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang – undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
5. Undang- undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
17. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
18. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Diskoperindag Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Diskoperindag Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Diskoperindag Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Diskoperindag dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Diskoperindag Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Diskoperindag Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Diskoperindag dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/Kota
Renja SKPD Dinas Koperindag Kabupaten Lembata
Periode Pelaksanaan : Juli s.d September (Triwulan III) 2023

Indikator dan Target Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada sasaran RKPD :

Kode Rekening					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV							
2					3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=8+12		14	
								k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
[redacted]																											
[redacted]																											
[redacted]																											
2	17	01	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.735.791.443		781.244.436		1.283.264.951		951.425.023									
2	17	01	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Dokumen	100	16.781.463.061			20	4.472.154.209	5	781.244.436	5	1.211.130.340	5	949.165.140			15	2.941.539.911	15,00	2.941.539.911	15,00	17,53
2	17	01	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran perangkat Daerah	Dokumen	40	200.000.000			12	65.120.925	3	21.476.800	3	32.466.250	4	10.702.550			10	64.646.1	10,00	65.646.1	25,00	32,82
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	40.000.000			6	10.864.250	2	3.646.625	4	7.217.625					6	10.864.250	6,00	10.864.250	25,00	27,16
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20.000.000			1	4.861.925	-	3.612.325	1	1.249.600					1	4.861.925	1,00	4.861.925	25,00	24,31
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20.000.000			1	5.267.750	-	-			1	5.267.750			1	5.267.750	1,00	5.267.750	25,00	26,34
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	40.000.000			1	14.099.450		7.996.000		1.902.500		2.449.150			1	12.347.650	1,00	12.347.650	25,00	30,87
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	40.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	40.000.000			2	9.999.550	1	5.227.550	-	2.000.300	1	2.769.800			2	9.997.650	2,00	9.997.650	25,00	24,99
2	17	01	2.02	0	Admin...inasi keuangan Perangk...Daerah	Meningkatnya Efektifitas anggaran Belanja Perangkat Daerah	Persentase	100	14.737.024.081			100	3.498.774.843	25	631.307.206	25	1.141.033.140	25	631.241....			75	2.901.581....	75,00	2.901.581....	75,00	19,68
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	13.933.904.081			14	3.371.621.343	3	611.127.206	5	1.027.868.940	3	921.625.148			11	3.350.621....	11,00	3.350.621....	19,64	24,04
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	743.120.000			17	119.720.000	3	19.167.000	2	18.770.000	4	18.556.210			9	56.493.210	9,00	56.493.210	18,75	7,60
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	28.000.000			7	1.411.300	-	-	7	7.411.300					7	7.411.300	7,00	7.411.300	9,72	26,47
2	17	01	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksa nya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah	Laporan	15	116.720.000			3	30.481.000	1	5.000.000	1	10.481.000	1	10.000.000			3	25.481.000	3,00	25.481.000	20,00	21,83
2	17	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	28.000.000																		
2	17	01	2.03	06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	30.720.000			1	10.481.000	1	5.000.000	1	10.481.000	1	10.000.000			3	25.481.000	3,00	25.481.000	20,00	21,83
2	17	01	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksa nya Pelatihan Pegawai Perangkat Daerah	Laporan	8	80.000.000																		
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40.000.000																		
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	Orang	8	12.000.000																		
2	17	01	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksa nya Pelayanan Administrasi Kantor dan Rumah Tangga	Paket Kegiatan	100	116.720.000																		
[redacted]																											

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian (%) (9a/8a) Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)
														I		II		III		IV						
2					3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=4+12		14=13/7*100
								k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	40.000.000			1	19.731.900		6.130.000		3.734.000		7.437.000				17.301.000		17.301.000,00	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4.000.000																	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	200.000.000			3	85.299.000	1	19.567.324		12.177.757		31.706.186			1	63.454.451	1,00	63.454.451,00	33,00
2	17	01	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	220.000.000			100	15.484.350													
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	50.000.000																	
2	17	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	40.000.000			6	15.484.350													
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	60.000.000																	
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000																	
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	60.000.000																	
2	17	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48	599.818.800			12	309.977.500	3	83.240.300	2	70.807.250	4	93.997.450			9	248.044.900	5,00	194.854.900,00	1,67
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	492.472.000			12	251.710.000	3	46.150.000	2	64.630.000	4	84.680.000			9	195.360.000	5,00	195.360.000,00	1,88
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	97.948.520			12	55.657.400	3	9.090.109	2	5.890.600		7.745.000			5	22.725.709	5,00	22.725.709,00	23,19
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	10.000.000			12	2.569.700	3		2	897.250	7	1.572.450			12	2.469.700	12,00	2.469.700,00	100,00
2	17	01	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	496.402.250			100	149.070.830	25	44.803.300	25	31.311.650	25	42.903.460			75	119.017.910	75,00	119.017.910,00	75,00
2	17	01	2.09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	436.302.200			18	134.179.060	5	41.868.300	3	26.876.150		41.552.410			7	110.296.860	8,00	110.296.860,00	82,00
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	10.000.000																	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	20.000.000			10	3.518.490	7	2.735.060			2	750.000			9	3.485.060	9,00	3.485.060,00	99,00
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000																	
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	20.000.000			1	11.573.564	1			4.435.500					1	4.435.500	10,00	4.435.500,00	38,00
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	10.000.000																	
2	17	03	0	0	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	92	40.000.000																	
2	17	03	2.01	0	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0	%	92	40.000.000																	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kelayakan, Kesehatan, Rencana Bisnis, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kelayakan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	Unit Usaha	595	40.000.000																	
2	17	01	0	0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	92	1.200.000.000			70,10	400.180.614													
2	17	01	2.01	0	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	%	92	1.200.000.000			70,10	400.180.614													

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah: Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja R... Realisasi Anggaran Renst... Perangkat Daerah sd/d tahu... 2025 (%)	
														I		II		III		IV							
2					3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=8+12		14=13/[illegible]	
								k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
2	17	01	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	105	1.200.000.000			80	300.280.614			20	16.000.000	20	76.430.794			40	92.430.794	40,00	92.430.794,00		
2	17	06	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	82	40.000.000																		
2	17	06	2.01	0	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Kompetitif di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	82	40.000.000																		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	105	40.000.000																
2	17	07	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persentase	100	550.000.000			87	60.000.000			20	4.506.350	35	17.315.193			55	21.821.383	55,00	21.821.383,00	55,00	[illegible]
2	17	07	2.01	0	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Obyektif untuk Pelatihan, Konsultasi, Konsultasi Perbankan, Pengurus Perizinan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	0	IT	100	550.000.000			87	60.000.000			20	4.506.350	35	17.315.193			55	21.821.383	55,00	21.821.383,00	55,00	[illegible]
2	17	07	2.01	01	Pendataan Profesi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar	Unit Usaha	450	40.000.000																		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Profesi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	450	510.000.000			390	60.000.000			30	4.506.350	120	17.315.193			150	21.821.383	150,00	21.821.383,00	33,33	[illegible]
2	17	07	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persentase	100	510.000.000			87	203.316.620			20	57.756.322	40	18.525.030			60	76.281.352	60,00	76.281.352,00	60,00	[illegible]
2	17	07	2.01	0	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Pengelolaan Usaha Untuk Menjadi Usaha Kecil	0	0	100	510.000.000				203.316.620				57.756.322		18.525.030				76.281.352		76.281.352,00		[illegible]
2	17	07	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	450	510.000.000			390	203.316.620			78	57.756.322	40	18.525.030			118	76.281.352	118,00	76.281.352,00	30,26	[illegible]
3	20	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT	0	0	100	2.940.000.000				1.789.493.540				122.804.273		580.553.340				[illegible]		[illegible]		[illegible]
3	20	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	0	100	2.940.000.000				1.789.493.540				122.804.273		580.553.340				[illegible]		[illegible]		[illegible]
3	20	02	0	0	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tersedianya Dokumen Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	Laporan	1	100.000.000			1	94.885.258					1	1.000.000			1	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	02	2.02	0	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Pengecer Langsung Minuman Beralkohol	0	0	1	100.000.000				94.885.258						1.000.000				[illegible]		[illegible]		[illegible]
3	20	02	2.02	03	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Kommen Persetujuan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern	Dokumen	12	100.000.000			12	94.885.258					1	1.000.000			1	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	09	0	0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Sarana distribusi Perdagangan	Persentase	80	200.000.000			80	1.089.013.297				831.940	80	616.785.141			80	[illegible]	80,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	09	2.02	0	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	0	0	80	200.000.000				1.089.013.297				831.940	1	616.785.141			1	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	09	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	8	200.000.000			8	1.089.013.297				831.940	1	616.785.141			1	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	09	0	0	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata Kelompok Pedagang	Persentase	100	250.000.000			100	183.809.975			50	87.661.974	70	45.777.124			70	[illegible]	70,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	09	2.03	0	Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	100	250.000.000				183.809.975				87.661.974		45.777.124				[illegible]		[illegible]		[illegible]
3	20	09	2.03	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12	250.000.000			12	183.809.975			3	87.661.974	3	45.777.124			6	[illegible]	6,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	04	0	0	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rata Kelompok Pedagang	Persentase	100	2.390.000.000			100	531.747.010			10	[illegible]	80	[illegible]			70	[illegible]	70,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	04	2.01	0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0	0	100	2.390.000.000			100	531.747.010			10	[illegible]	80	[illegible]			70	[illegible]	70,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	04	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Utera Lainnya	Unit	500	2.250.000.000			500	458.201.642			1	[illegible]	70	[illegible]			70	[illegible]	70,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	04	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Diuji	Orang	80	[illegible]			100	44.581.168			10	[illegible]	80	[illegible]			70	[illegible]	70,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	20	04	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	80	[illegible]																		
3	31	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	0	4	[illegible]				[illegible]				[illegible]		[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]
3	31	02	0	0	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Rata Kelompok Pengrajin	Persentase	4	[illegible]			2,00	[illegible]				[illegible]		[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]
3	31	02	2.01	0	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0	0																				
3	31	02	2.01	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12	[illegible]																		
3	31	02	2.01	02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12	[illegible]																		
3	31	02	2.01	03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12	[illegible]																		

Kode Rekening					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
														I		II		III		IV							
2					3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
								k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
3	31	04	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persentase	3,337006	40.000.000			2,96	13.624.683	-	-	1	8.688.433	-	1.376.250	-	-	-	-	1	8.064.683		
3	31	04	2,01	0	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0		40.000.000				13.624.683				8.688.433		1.376.250						8.064.683		
3	31	04	2,01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	Dokumen	12	40.000.000			1	13.624.683				8.688.433		1.376.250						8.064.683		
																						Rata - rata Capaian Kinerja (%)		55,59038741			
																						Predikat Kinerja		Cukup			

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :

Faktor Penghambat : ***OPD terlambat melakukan eksekusi Anggaran karena banyak anggaran yang dilarang direalisasikan menunggu pengesahan dan petunjuk lebih lanjut.***

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya : ***dengan kerjasama yang baik, proses pelaksanaan realisasi kinerja dan anggaran menjadi semakin baik***

Disusun
Lembata, Oktober 2023
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan Kab. Lembata

Longginus Lega, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196311091994031005

Dievaluasi
Lembata, Oktober 2023
Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Lembata

drh. Mathias A.B. Beyeng
Pembina Utama Muda
NIP. 19780514 200003 1 007

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Diskoperindag Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Diskoperindag, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Diskoperindag Kabupaten Lembata mencapai target yang diterapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Diskoperindag s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Diskoperindag, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda :

- Belum ada regulasi tingkat kabupaten terkait penelitian dan pengembangan.
- Belum adanya uraian tugas bagi jabatan fungsional.
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar aparatur.
- Belum adanya aparatur dengan jenjang pendidikan S3, serta sangat terbatasnya aparatur dengan jenjang pendidikan S2.
- Terbatasnya data dan informasi perencanaan.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Diskoperindag :

- Tantangan :
  - Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah.
  - Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan.
  - Tuntutan dan aspirasi semakin beragam, dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
- Peluang :
  - Teknologi, informasi dan komunikasi terkait perencanaan yang semakin berkembang (*e-planning*/SIPD).
  - Semakin banyaknya program-program peningkatan sumber daya aparatur perencana dari kementerian/lembaga yang dapat diakses.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskoperindag, adalah :

- Belum tersedianya data sektoral yang lengkap dan terupdate serta terintegrasi untuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Belum tersedianya sistem pengolahan data yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Minimnya ketersediaan data dan informasi terkait kelitbangan, yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan dan kelitbangan.
- Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran sehingga program/kegiatan yang telah direncanakan tidak semuanya ada dalam dokumen anggaran. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPD dan renstra perangkat daerah.
- Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kajian terhadap data dan informasi hasil monev tersebut belum memberikan kontribusi yang baik terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
- Jumlah aparatur perencana yang tidak sebanding dengan dokumen/kajian terkait penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang harus dikerjakan.
- Jumlah aparatur yang memahami penelitian dan pengembangan masih minim.
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek dan diklat terkait perencanaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Diskoperindag sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan			
				Rencana Tahun 2024			OPD Penanggungjawab
				Lokasi	Target	pagu indikatif	
	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					5.147.862.554	DisKOPERINDAG
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Dokumen		25%	4.122.862.554	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran perangkat Daerah	Dokumen		12	50.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		2	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah	Persentase		100	3.639.202.804	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		14	3.439.322.804	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	185.880.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		18	7.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksanannya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah	Laporan		4	29.680.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2	7.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		2	22.680.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah	Laporan		1	10.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		1	10.000.000	

[illegible] 05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				-	
[illegible] 2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah**	**Persentase**			**100**	**82.500.000**	
[illegible] 2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diserliakan	Paket			1	2.500.000	
[illegible] 2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	20.000.000	
[illegible] 2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1	10.000.000	
[illegible] 2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen			0	-	
[illegible] 2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			1	50.000.000	
[illegible] 2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**			**25**	**40.000.000**	
[illegible] 2.07	22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				-	
[illegible] 2.07	25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				10.000.000	
[illegible] 2.07	26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				30.000.000	
[illegible] 2.07	20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				-	
[illegible] 2.07	22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				-	
[illegible] 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**			**12**	**149.954.200**	
[illegible] 2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			12	123.118.000	
[illegible] 2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	24.336.200	
[illegible] 2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			1	2.500.000	
[illegible] 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**			**100**	**121.525.550**	
[illegible] 2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			18	106.525.550	
[illegible] 2.09	02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit				-	
[illegible] 2.09	04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				5.000.000	
[illegible] 2.09	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	5.000.000	
[illegible] 2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				5.000.000	
[illegible] 2.09	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				-	
[illegible]		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persentase			78,95	10.000.000	
[illegible]		Penyelenggaraan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi dan Pra Koperasi yang dibina dan melaksanakan RAT	Unit Usaha			90	10.000.000	

2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha			**90**	10.000.000	
2	17	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi Aktif**	**Persentase**			**78,95**	**300.000.000**	
2	17	05	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pelatihan dan pendampingan bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi**	**orang**			**90**	**300.000.000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang			90	300.000.000	
2	17	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**	**Persentase**			**78,95**	**10.000.000**	
2	17	06	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM yang Dibina**	**orang**			**90**	**10.000.000**	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang			90	10.000.000	
2	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persentase**			**88,89**	**150.000.000**	
2	17	07	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah UMKM yang didata**	**Unit Usaha**			**400**	**150.000.000**	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha			400	10.000.000	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	Unit Usaha				140.000.000	
2	17	07			**PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persentase**			**88,89**	**140.000.000**	
2	17	07	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil**	**UMKM**			**400**	**140.000.000**	
2	17	07	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha			400	140.000.000	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
2	18				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
2	18	02			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Tersedianya Dokumen Perijinan dan Pendaftaran Perusahan**	**Laporan**			**1**	**30.000.000**	
2	18	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	**Terlaksananya monitoring dan pengawasan peredaran minuman beralkohol**	**Kali**			**12**	**30.000.000**	
2	18	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen				30.000.000	

3	30	03			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Cakupan Sarana distribusi Perdagangan**	**Persentase**			**80**	**50.000.000**	
3	30	03	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Pasar Yang Dikelola**	**Pasar**			**4**	**50.000.000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen			1	50.000.000	
3	30	04			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Bina Kelompok Pedagang**	**Persentase**			**100**	**75.000.000**	
3	30	04	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksanya Pengawasan Stabilitas Harga**	**Persentase**			**100**	**75.000.000**	
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan			12	75.000.000	
3	30	06			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Bina Kelompok Pedagang**	**Persentase**			**100**	**105.000.000**	
3	30	06	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Terselenggaranya Sidang ter/tera Ulang**	**Persentase**			**100**	**105.000.000**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit			125	65.000.000	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang			125	20.000.000	
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit			125	20.000.000	
3	31				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							
3	31	02			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**	**Persentase**			**2,95**	**145.000.000**	
3	31	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Berkembangnya IKM**	**Persentase**			**2,95**	**145.000.000**	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen			1	60.000.000	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen			1	60.000.000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen			1	25.000.000	
3	31	06			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**	**Persentase**			**2,95**	**10.000.000**	
3	31	06	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Data Industri**	**Dokumen**			**1**	**10.000.000**	
3	31	06	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen			1	10.000.000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Diskoperindag, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 namun direncanakan pada Renja Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.5.147.862.554, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 7.639.434.258,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Diskoperindag, yang melaksanakan Urusan Koperasi, UKM, Perdagangan dan perindustrian

Pada tahun rencana 2024, terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Diskoperindag. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

NO	Kecamatan	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Akomodir APBD	Diluar APBD
	Nubatukan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Pendampingan/Pelatihan Tenun Ikat	Kelompok Tenun Ikat	11 Desa, Kel. Lewoleba Barat, Kel. Lewoleba Timur		Dinas Koperindag	√	
	Nubatukan	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Fasilitasi/Pendampingan Produksi / ir	Masyarakat	Desa Paubokol		Dinas Koperindag	√	
	Nubatukan	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Fasilitasi Pembinaan dan pendampingan UP2K PKK (Program Pokok PKK)	Masyarakat/Pelaku Usaha	11 Desa, 7 Kelurahan		Dinas Koperindag	√	
	Nubatukan	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Pengembangan olahan jagung/pisang/ubi-ubian. dll	Masyarakat/Pelaku Usaha	Desa Pada, Bakalerek		Dinas Koperindag		√
	Nubatukan	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Pengembangan usaha kerajinan/industri rumah tangga	Masyarakat/Pelaku Usaha	Desa Pada, Watokobu		Dinas Koperindag		√
	Lebatukan	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Pengembangan dan Pendampingan Tambak Garam dan tambak ikan	Masyarakat	Balurebong, Tapobaran, Banitobo, merdeka	3 Unit	Dinas Koperindag	√	
	Lebatukan	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Pendampingan, pelatihan, penguatan, promosi Tenun Ikat	Masyarakat	17 Desa se Kecamatan Lebatukan	17 paket	Dinas Koperindag		√
	Lebatukan	PENGEMBANGAN UMKM	Pendampingan, pelatihan, penguatan, promosi Anyaman bambu	Masyarakat	17 Desa se Kecamatan Lebatukan	17 paket	Dinas Koperindag	√	
	Lebatukan	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Pembangunan/Rehibilitasi 1 unit bangunan pasar, Pembangunan Lapak, Mck dan Parkiran	Masyarakat, pasar desa	Lewoleng,Tapolangu	1 Paket, 3 unit	Dinas Koperindag	√	
	Nagawutung	Program Pengembangan UKM dan Wirausaha	Pelatihan untuk kelompok tenun ikat, kerajinan rotan dan bambu, meubeler, otomotif, kelompok	Terlaksananya pelatihan	18 Desa	1 paket	Dinas Koperindag	√	
	Nagawutung	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Pelatihan Iodiumnisasi garam Lolong	Terlaksananya pelatihan	Lolong	1 paket	Dinas Koperindag		√
	Nagawutung		Bantuan Sarana Prasarana Kelompok Tenun Ikat	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	Babokerong	1 kelompok	Dinas Koperindag		√
	Nagawutung		Bantuan Peralatan Tenun Ikat	Tersedianya peralatan tenun ikat	Liwutegang	1 paket	Dinas Koperindag		√
	Nagawutung	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Pembangunan pasar desa	Tersedianya pasar desa	Babokerong, Atawai	2 unit, 1 unit	Dinas Koperindag		√
	Atadei		Pengadaan Peralatan Tenun Ikat dan Produksi Minyak Kelapa, mesin Pipil Jagung, Mesin Pakan Ternak	Katakeja	Katakeja	1 Set	Dinas Koperindag		√
	Atadei		Pengadaan Peralatan Tenun Ikat dan Produksi Minyak Kelapa, mesin Pipil Jagung, Mesin Pakan Ternak	Lewogroma	Lewogroma	1 Paket	Dinas Koperindag		√
	Atadei		Pengadaan Peralatan Tenun Ikat dan Produksi Minyak Kelapa, mesin Pipil Jagung, Mesin Pakan Ternak	Nubaboli	Lewogroma	1 Paket	Dinas Koperindag		√
	Atadei		Bantuan Tempat Duduk tenun , Bendang dan Mesin Jahit	Lewogroma	Lewogroma	1 Paket	Dinas Koperindag		√
	Atadei	Program Pengembangan UKM dan Wirausaha	Pelatihan Kelompok Rentan (tenun Ikat, Pengelolaan Jus BuahZan	Nubaboli	Nubaboli	2 Kelompok	Dinas Koperindag		√
	Atadei	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Hidupkan kembali Pasar Barter (Pasar Bao)	Nubaboli	Nubaboli	1 Paket	Dinas Koperindag		√
	Atadei	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Peningkatan Sarana Pasar	masyarakat	Katakeja	1 Paket	Dinas Koperindag		√
	Atadei	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Peningkatan Sarana Pasar	masyarakat	Atakore	1 Paket	Dinas Koperindag		√
	Atadei	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Pembangunan Pasar	masyarakat	Kimokile	1 Paket	Dinas Koperindag		√
	Omesuri	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	Tera Ulang alat Ukur Timbang		22 Desa	1 Paket	Dinas Koperindag	√	
	Omesuri	Program Pengembangan UKM dan Wirausaha	Pelatihan Kelompok Ketrampilan Bambu		Desa Meluwting I	1 Paket	Dinas Koperindag	√	
	Boleo	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Pembangunan Pasar wairiang		Desa Umaleu	1 Paket	Dinas Koperindag	√	
	Boleo	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Rehabilitasi Pasar Bean		Desa Bean	1 Unit	Dinas Koperindag		√
	Pulauan		Pengadaan Peralatan Tenun Ikat		Desa Kalikur Wl.	1 Kmp	Dinas Koperindag		√
	Boleo		Pendampingan Kelompok Tenun Ikat		Desa Kalikur	1 Unit	Dinas Koperindag	√	
	Boleo	Program Pengembangan UKM dan Wirausaha	Pelatihan Kelompok Tenun Ikat		Desa Kalikur dan Kalikur Wl.	2 Kelompok	Dinas Koperindag		√
	Ile Ape	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUS	Peningkatan / Rehabilitasi Pasar Desa	3 Desa	Waipukang	3 Paket	Dinas Koperindag		√
	Ile Ape	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUS	Peningkatan / Rehabilitasi Pasar Desa		Dulitukan		Dinas Koperindag		√
	Ile Ape	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUS	Peningkatan / Rehabilitasi Pasar Desa		Amakaka		Dinas Koperindag		√
	Ile Ape	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUS	Pembangunan Pasar Waisesa		Waisesa	1 Paket	Dinas Koperindag		√
	Ile Ape	Program Pengembangan UKM dan Wirausaha	Pengembangan Sarana Prasarana Tenun Ikat/ Pelatihan tenun ikat	17 Desa	17 Desa	68 Kelompok	Dinas Koperindag		√
	Ile Ape	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Peningkatan Pembuatan Garam Tradisional	7 Desa	Watodiri, Mutuoria, Lamahutun, Kolontobo, Riangbao, Pailolon, Kolipadan	7 Paket	Dinas Koperindag	√	
	Ile Ape		Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Perempuan di bidang Tenun Ikat	17 Desa	17 Desa	17 Kelompok	Dinas Koperindag		√

	Ile Ape	PENGEMBANGAN UMKM	Pelatihan Usaha Kerajinan anyaman lokal	17 Desa	17 Desa	17 Kelompok	Dinas Koperindag		√
	Ile Ape	PENGEMBANGAN UMKM	Pelatihan Usaha Kerajinan Tangan bagi Karang Taruna Desa	17 Desa	17 Desa	17 Kelompok	Dinas Koperindag		√
	Wulandoni	PENGEMBANGAN UMKM	Pengadaan Mesin Pengolaha i (Pisan	Kelompok	15 Desa	15 Unit	Dinas Koperindag		√
	Wulandoni		Pengadaan Mesin Pecah Kamiri	Kelompok	Puor, Puor B, Imulolong dan Atalili	4 Unit	Dinas Koperindag		√
	Wulandoni	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tambak Garam	Masyarakat	Imulolong	1 Paket	Dinas Koperindag		√
	Wulandoni	PENGEMBANGAN UMKM	Tenun Ikat, Kerajinan Bambu dan Sou	Kelompok	15 Desa	15 Paket	Dinas Koperindag	√	
	Wulandoni	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Penguatan SDM Koperasi dan BUMD	Desa	15 Desa	15 Kali	Dinas Koperindag	√	
	Wulandoni	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Pembangunan Pasar Desa	Masyarakat	Puor B, Lamaiura B, Wulandoni dan Atakera		Dinas Koperindag		√
	Wulandoni	PENGEMBANGAN UMKM	Pelatihan dan Pendampingan Tenun I	Kelompok	15 Desa		Dinas Koperindag		√
	Ile Ape Timur	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Monitoring & evaluasi perkembangan kooperasi desa dan kelompok usaha lainnya	Koperasi Lota Pito	9 Desa		Dinas Koperindag	√	
	Ile Ape Timur	PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan kelompok usaha kecil menengah desa	kelompok	9 Desa		Dinas Koperindag		√
	Ile Ape Timur	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Pembinaan Pasar Desa	2 Pasar	Lamatokan & Lamaau		Dinas Koperindag		√

BAB IH

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Diskoperindag, adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bappelitbangda.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Diskoperindag Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	Meningkatkan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya tata kelola koperasi yang mampu mewadahi aktifitas ekonomi anggotanya	Persentase koperasi aktif	45,61	78,95
	Mengembangkan UMKM yang berdaya saing	Meningkatnya UMKM yang tangguh dan mandiri dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	82,22	88,89
	Peningkatan tertib niaga	Terbinanya kelompok pedagang dalam rangka perlindungan konsumen	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100,00	100,00
	Peningkatan Peran IKM dalam Perekonomian daerah	Menguatnya kelompok IKM	Cakupan bina kelompok pengrajin	1,77	2,95

Tujuan dan Sasaran Renja Diskoperindag Kabupaten Lembata

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappelitbangda Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Diskoperindag di Tahun 2024 sebanyak 18 Program, 13 Kegiatan, 41 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 7.785.443.793.-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, 3.922.194.209
2. Bidang Koperasi terdapat 3 Progran yang terdiri dari 3 Kegiatan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 320.000.000-.
3. Bidang UKM terdapat 1 Progran yang terdiri dari 1 Kegiatan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp197.770.000

4. Bidang Perdagangan terdapat 3 Program yang terdiri dari 3 Kegiatan 3 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp 3.300 480.243
5. Bidang Metrologi terdapat 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 131.178.010
6. Bidang Perindustrian terdapat 2 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp.54.999.341,

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK PENANGG
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**7.785.443.793,00**							**7.595.845.624,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**4.429.964.209,00**							**6.135.845.624,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						**4.429.964.209,00**							**6.135.845.624,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah***	-			**100 %**	**3.922.194.209,00**						-	**4.225.845.624,00**	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	45.129.925,00			-	-	Aparatur	-	50.000.000,00	DINAS KOPE PERINDUST PERDAGANG
01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10.864.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS KOPE PERINDUST PERDAGANG
01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.881.925,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS KOPE PERINDUST PERDAGANG
01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.287.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS KOPE PERINDUST PERDAGANG
01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	14.096.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS KOPE PERINDUST PERDAGANG
01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS KOPE PERINDUST PERDAGANG
1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA PENA
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	9.999.550,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIND PERDA
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah*	-			100 %	3.498.774.643,00			-	-	Aparatur	-	3.725.105.874,00	DINAS PERIND PERDA
02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.371.621.343,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		3.525.305.874,00	DINAS PERIND PERDA
02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	119.720.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		185.880.000,00	DINAS PERIND PERDA
02.0005	Kobrdinasi dan Penyusunan Lapcran Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PERIND PERDA
02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Lapuran Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	7.433.300,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PERIND PERDA
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah*	-			4 Laporan	36.461.000,00			-	-	Aparatur		29.680.000,00	DINAS PERIND PERDA
03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PERIND PERDA
03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	36.461.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		22.680.000,00	DINAS PERIND PERDA

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PI PE
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah*	-			4 Laporan	0,00			-	-	Aparatur	-	10.000.000,00	DINA PERI PERI
05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINA PERI PERI
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah*	-			100 %	117.296.671,00			-	-	Aparatur	-	82.500.000,00	DINA PERI PERI
06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.324.800,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.500.000,00	DINA PERI PERI
06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.940.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		20.000.000,00	DINA PERI PERI
06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.731.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur			
06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	65.299.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur			
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			25 %	15.484.350,00			-	-	Apratur			
07.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	15.484.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Apratur			
07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua	DANA TRANSFER			Apratur			

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PER PEN
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Apratur		10.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Apratur		30.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Laporan	59.977.100,00			-	-	Aparatur	-	149.954.200,00	DINAS PERIN PERDA
08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.750.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		123.118.000,00	DINAS PERIN PERDA
08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55.657.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		24.336.200,00	DINAS PERIN PERDA
08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.569.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.500.000,00	DINAS PERIN PERDA
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	149.070.520,00			-	-	Apratur	-	128.525.550,00	DINAS PERIN PERDA
09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				72 Unit	134.178.060,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Apratur		106.525.550,00	DINAS PERIN PERDA
09.0005	Pemeliharaan Mebel														
		Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Apratur		5.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PER PEN
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.518.496,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Apratur		0,00	DINAS PERIN PERDA
09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.373.964,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Apratur		5.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Apratur		5.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Apratur		7.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	***Persentase koperasi aktif***	-			**78,95 Persen**	**0,00**						-	**10.000.000,00**	
01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi dan Pra Koperasi Yang dibina dan melaksanakan RAT*	-			105 Unit Usaha	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejchteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Koperasi	-	10.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				90 Unit Usaha	0,00	Keb. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Koperasi		10.000.000,00	DINAS PERIN PERDA

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PER PEN
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	***Persentase koperasi aktif***	-			**78,95 Persen**	**10.000.000,00**						-	**510.000.000,00**	
01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang Dibina*	-			90 Orang	10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha	-	510.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				90 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha		510.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	***Persentase koperasi aktif***	-			**78,95 Persen**	**300.000.000,00**						-	**900.000.000,00**	
01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terfaksananya pelatihan dan pendampingan bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi*	-			90 Orang	300.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Anggota koperasi	-	600.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				90 Orang	300.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketanaman ekonomi daerah	Anggota koperasi		600.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	***Persentase usaha mikro dan kecil***	-			**88,89 Persen**	**197.770.000,00**						-	790.000.000,00
01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah UMKM yang didata*	-			400 UMKM	197.770.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha	-	790.000.000,00
01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro													
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				400 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha		
01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PER PEN
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				400 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha		590.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				400 Orang	157.770.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha		140.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						**3.355.479.584,00**							**1.460.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						**3.300.480.243,00**							**1.400.000.000,00**	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	***Tersedianya dokumen perizinan dan pendaftaran perusahaan***	-			**1 Laporan**	**34.883.258,00**							**400.000.000,00**	
05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Terlaksananya monitoring dan pengawasan peredaran minuman beralkohol*	-			12 kali	34.883.258,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha			
05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PE PEN
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	34.883.258,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha		280.000.000,00	DINAS PERIN PERD
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	**3.000.000.000,00**						-	**300.000.000,00**	
01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Pordagangan	*Tersedianya sarana Distribusi Perdagangan*	-			3 Pasar	3.000.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha	-	0,00	DINAS PERIN PERD
01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3.000.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), INSENTIF FISKAL	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha			

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PE PEN
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pasar Yang Dikelola*	-			4 Pasar	0,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningk atan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha	-	300.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1. Pemben gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningk atan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	***Cakupan bina kelompok pedagang***	-			**100 Persen**	**133.809.975,00**						-	**325.000.000,00**	
01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksanya Pengawasan Stabilitas Harga*	-			100 %	133.809.975,00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningk atan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha	-	325.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PE PE
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	133.809.975,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha		325.000.000,00	DINAS PERIN PERD
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	***Cakupan bina kelompok pedagang***	-			**100 Persen**	**131.787.010,00**						-	**400.000.000,00**	
01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Terselenggaranya Sidang tera/tera Ulang*	-			100 %	131.787.010,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha dan Konsumen	-	400.000.000,00	DINAS PERIN PERD
01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang														
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				125 Unit	58.205.842,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha dan Konsumen		290.000.000,00	DINAS PERIN PERD
01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PER PEN
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				125 Orang	73.581.168,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha dan Konsumen		60.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
01.0003	Penyidikan Metrologi Legal														
		Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				125 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	pelaku usaha dan Konsumen		50.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						**54.999.341,00**							**155.000.000,00**	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	***Cakupan bina kelompok industri kecil/pengrajin***	-			**2,95 %**	**41.374.658,00**						-	**145.000.000,00**	
01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Berkembangnya IKM*	-			2,95 %	41.374.658,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha	-	145.000.000,00	DINAS PERIN PERDA
01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PI PE
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	13.169.658,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha		60.000.000,00	DINA PERI PERI
01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha		60.000.000,00	DINAS PERIN PERI
01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	28.205.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha		25.000.000,00	DINAS PERIN PERIN
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	***Cakupan bina kelompok industri kecil/pengrajin***	-			2,95 %	13.624.683,00							10.000.000,00	

ODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA PENA
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data Industri*	-			1 Dokumen	13.624.683,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha	-	10.000.000,00	DINAS PERIND PERDA
01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	13.624.683,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha		10.000.000,00	DINAS PERIND PERDA
JUMLAH							7.785.443.793,00							7.595.845.624,00	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Diskoperindag dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Diskoperindag Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Diskoperindag Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Diskoperindag.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Diskoperindag Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Lembata,

DONATUS BOLI,AKS,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700123 19303 1 007

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

TAHUN 2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin

kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);

13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47;
15. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah untuk : Mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata di Tahun 2024
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; hasil Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional; uraian tujuan dan sasaran Renja serta Program dan Kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan perangkat daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana kerja dan rencana pendanaan yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPD.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dan capaian Renstra perangkat daerah

Periode Pelaksanaan Triwulan II 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelurahan Kegiatan s/d dengan tahun (n-1)

Kode Rekening					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Tahun		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				PD Penanggung Jawab
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8=(7/6)*100		9		10		10=(9:5)*100		11
								x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				20,275,995,697		2,120,436,554		2,020,055,482				2,102,104,810		291,888,178			Dinas PM-PTSP
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintah Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	%	100	11,383,882,941	20	1,799,888,734	80	1,804,334,912			20	1,799,112,034	0	291,888,178			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Serta Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	200,000,000	20	7,040,000	80	7,020,920			20	7,040,000	0	2,220,000			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang Tersusun	Dokumen	10	50,000,000	2	4,457,000	8	4,457,000	100		2	4,466,500	-	2,220,000			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Dokumen	10	110,000,000	2	2,575,000	8	2,575,000	100		2	2,575,000	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja SKPD	%	100	14,946,992,941	20	1,380,787,974	80	1,328,881,812			20	1,486,737,290	0	210,408,870			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	70	14,083,992,941	14	1,348,995,354	56	1,209,712,259	87		14	1,386,004,830	3	210,328,070			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pengelola keuangan SKPD	Orang Bulan	1,800	755,000,000	360	120,657,960	1,440	117,217,500	97		360	118,787,960	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	Dokumen	15	120,000,000	3	1,984,000	12	1,951,000	98		3	1,984,000	1	457,800			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	10	200,000,000	2	10,000,000	8				2	10,000,000	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen aplusan barang Penguna (LBPS dan LBPT) yang tersedia	Laporan	10	200,000,000	2	10,695,000	8	9,995,000	94		2	10,695,000	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah	%	100	240,000,000	20	-	80				20	-	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Orang	20	240,000,000	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-			Dinas PM-PTSP
2	17	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah	%	100	695,000,000	20	81,836,720	80				20	81,837,720	0	10,376,480			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	20	15,000,000	4	888,120	24	888,000	100		4	888,120	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Jenis	185	140,000,000	37	18,180,870	111	18,179,310	100		37	18,180,870	0	3,188,500			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Lembar	500,000	120,000,000	50,000	20,732,750	300,000	20,731,800	100		50,000	20,732,750	2,100	874,800			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Bulan	120	10,000,000	24	-	72	-	-	-	24	-	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang dilaksanakan	Kali	100	600,000,000	264	44,044,000	200	43,960,400	100		264	44,140,000	54	9,240,000			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	240,000,000	20	10,000,000	80				20	10,000,000								Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit Tahun	10	240,000,000	4	10,695,000		10,695,000	100		4	10,695,000	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	220,000,000	20	167,306,000	80				20	112,139,000	0	20,387,504			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat-surat	Lembar	1,000	20,000,000	200	143,453,210	1,000	143,453,000	100		200	97,877,210	70	14,288,000			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telepon, listrik, tagihan jasa listrik dan air	Jenis Bulan	120	170,000,000	24	21,043,280	96	18,030,004	86		24	21,043,280	0	4,788,608			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia	Jenis	60	20,000,000	12	2,489,340	48	2,490,000	100		12	2,489,340	2	1,040,000			Dinas PM-PTSP
2	17	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Sarana dan Prasarana Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	280,000,000	20	49,815,100	80				20	49,815,100	0	3,810,000			Dinas PM-PTSP

2	18	01	2.09	01	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang wajib pajak	Unit/Tahun	480	80.000.000	08	3.800.000	384	1.873.480		92	08	3.800.000	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.09	02	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat yang wajib pajak	Unit/Tahun	480	140.000.000	08	41.810.100	384	41.130.600		98	08	41.810.100	24	4.804.800			Dinas PM-PTSP
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sedang dan Fasilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perawatan dan pelengkapan gedung kantor yang terpelihara	Unit/Tahun	60	100.000.000	12	4.480.000	48	4.080.212		98	12	4.480.000	2	728.000			Dinas PM-PTSP
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				2.882.882.888		421.827.888						423.991.788		-			Dinas PM-PTSP
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	Investor	5	815.157.202	-	14.440.000	4				-	14.440.000	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen penyelenggaraan promosi penanaman modal	Dokumen	5	815.157.202	-	14.440.000	4				-	14.440.000		-			Dinas PM-PTSP
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	5	815.157.202	3	14.440.000	4	14.440.000		100	3	14.440.000	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Lamanya Proses Perizinan	Hari	5	1.378.845.484	5	24.420.420	5				5	24.420.420		-			Dinas PM-PTSP
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu.	Hari	5	1.378.845.484	5	24.420.420	5				5	24.420.420		-			Dinas PM-PTSP
2	18	04	2.01	01	Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang menerapkan pelayanan terpadu perizinan dan non berusaha berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku	5.000	878.845.484	1.000	7.880.000	4.000	7.850.000		99	1.000	7.880.000	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	04	2.01	02	Pemerikasaan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang mendapat Pemeriksaan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan	5	200.000.000	1	10.038.180	4	10.038.850		100	1	10.038.180	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	04	2.01	03	Penyelesaian Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah orang yang memperoleh pelayanan konsultasi dan terlaksananya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	250	300.000.000	50	8.098.310	200	8.098.310		100	50	8.098.310	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Lamanya Proses Perizinan	Hari	5	380.880.888	5	380.884.788	5				5	380.884.926		-			Dinas PM-PTSP
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Lamanya Proses Perizinan	Hari	5	380.880.888	5	380.884.788	5				5	380.884.926		-			Dinas PM-PTSP
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Penyusunan LKPM Online oleh Pelaku Usaha	Perusahaan/Tahun	50	200.000.000	10	197.397.810	40	183.208.174		93	10	207.488.870	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelimpahan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha, Kepuasan Pelaku Usaha dan Realisasi	Perusahaan/Tahun	50	150.000.000	10	82.374.000	40	68.790.300		84	10	83.727.290	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha, Kepuasan Pelaku Usaha dan Realisasi	Perusahaan/Tahun	50	180.000.000	10	80.382.800	40	65.436.100		79	10	75.511.200	-	-			Dinas PM-PTSP
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Lamanya Proses Perizinan	Hari	5	980.000.000	5	13.072.940	5				5	15.438.280		-			Dinas PM-PTSP
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lamanya Proses Perizinan	Hari	5	980.000.000	5	13.072.940	5				5	15.438.280		-			Dinas PM-PTSP
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya informasi perizinan dan non perizinan	Dokumen	5	600.000.000	1	13.072.940	4	13.052.100		100	1	15.438.280	-	-			Dinas PM-PTSP

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Target RPJPD	Target SKPD	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Kondisi Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)				3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	133.3	133.3	125.0	125.0	
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)				40.000.000.000	42.000.000.000	43.000.000.000	44.000.000.000	46.000.000.000	36.562.868.790	38.590.714.678	114.918.485.612	71.062.859.926	70.814.484.314	91.5	90.5	267.3	161.48	156.92
3.	Jumlah Perijinan & Non Perijinan				400	400	400	400	280	367	1.586	775	305	280	336.8	371.8	193.8	83.3	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dan analisis kinerja pelayanan dinas maka permasalahan yang dihadapi, peluang dan tantangan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:
   1. Iklim berinvestasi di Lembata yang belum kondusif.
   2. Pemanfaatan aset daerah untuk pengembangan investasi yang belum optimal.
   3. Fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan investasi yang belum optimal.
   4. Promosi dan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal yang belum efektif.
   5. Investor yang membangun kemitraan dengan UMKM dan Masyarakat belum dapat difasilitasi dengan baik.
   6. Kualitas pelayanan publik baik secara elektronik maupun non Elektronik masih rendah.
   7. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketetuan perudangan yang berlaku.
   8. Penyelenggaraan sistem dan prosedur pelayanan penanaman modal masih belum optimal.
   9. Teknologi informasi sebagai sarana promosi belum dimanfaatkan secara optimal.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

   - Tantangan:
     - ✓ Dengan adanya kemudahan pelayanan perijinan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Lembata harus melakukan inovasi terkait dengan teknologi dan informasi, sumber daya

- ✓ UMKM Kabupaten Lembata harus meningkatkan kualitas produknya sesuai dengan permintaan pasar agar bisa tumbuh sehat dan dapat bersaing dipasar dalam negeri.
- ✓ Belum termanfaatkannya peluang dan potensi investasi secara optimal

2. DPMPTSP harus meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi pelayanan penanaman modal.
   - ➢ Peluang
     - ✓ Adanya pelayanan perijinan melalui PTSP dan sistem *online* yang mempermudah masyarakat dan para investor mengurus legalitas usahanya.
     - ✓ Adanya kemudahan dalam hal pelayanan publik yang akan mewujudkan Kabupaten Lembata sebagai Kabupaten tujuan investasi
     - ✓ Produk-produk UMKM Kabupaten Lembata mampu tumbuh sehat dan bersaing di pasar dalam negeri dan luar negeri.
     - ✓ Besarnya potensi investasi bagi investor untuk menanam modal di Lembata
     - ✓ Sumber daya dan infrastruktur pendukung penanaman modal yang tersedia.
     - ✓ Tersedianya UMKM potensial daerah yang dapat dikembangkan

b. Isu-isu penting yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 adalah :

- ✓ Iklim berinvesatsi di Lembata yang belum kondusif.
- ✓ Pemanfaatan aset daerah untuk pengembangan investasi yang belum optimal.
- ✓ Fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan investasi yang

belum optimal.

- ✓ Promosi investasi dan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal yang belum efektif.
- ✓ investor yang membangun kemitraan dengan UMKM dan masyarakat belum dapat difasilitasi dengan baik.
- ✓ Kualitas pelayanan publik baik seara elektronik maupun non elektronikmasih rendah.
- ✓ Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketetuan perundangan yang berlaku.
- ✓ Penyelenggaraan sistem dan prosedur pelayanan penanaman modal masih belum optimal.
- ✓ Teknologi informasi sebagai sarana promosi belum dimanfaatkan secara optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun riview terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana terlihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			OPD Penanggungjawab
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**2,694,960,516**			**2,694,960,516**		**DPMPTSP**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**DPMPTSP**
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**2,694,960,516**			**2,694,960,516**		**DPMPTSP**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1,905,359,466**		**100**	**1,905,359,466**		**DPMPTSP**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPperangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**	**50,000,000**		**12**	**50,000,000**		**DPMPTSP**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	10,000,000	Kab Lembata	6	10,000,000	Kab Lembata	**DPMPTSP**
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5,000,000	Kab Lembata	1	5,000,000	Kab Lembata	**DPMPTSP**
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5,000,000	Kab Lembata	1	5,000,000	Kab Lembata	**DPMPTSP**
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	10,000,000	Kab Lembata	1	10,000,000	Kab Lembata	**DPMPTSP**
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10,000,000	Kab Lembata	1	10,000,000	Kab Lembata	**DPMPTSP**
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10,000,000	Kab Lembata	2	10,000,000	Kab Lembata	**DPMPTSP**
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**1,532,922,706**		**100**	**1,532,922,706**		**DPMPTSP**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	1,400,154,746	Kab Lembata	14	1,400,154,746	Kab Lembata	**DPMPTSP**
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	118,767,960	Kab Lembata	12	118,767,960	Kab Lembata	**DPMPTSP**
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,000,000	Kab Lembata	1	7,000,000	Kab Lembata	**DPMPTSP**

2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	7,000,000	Kab Lembata	18	7,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Laporan**	**4**	**17,696,000**		**4**	**17,696,000**		**DPMPTSP**
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	7,000,000	Kab Lembata	2	7,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	10,696,000	Kab Lembata	2	10,696,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah**	**Laporan**	**1**	**10,000,000**		**1**	**10,000,000**		**DPMPTSP**
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10,000,000	Kab Lembata	1	10,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	Kab Lembata	-	-	Kab Lembata	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**%**	**100**	**84,500,000**		**100**	**84,500,000**		**DPMPTSP**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,500,000	Kab Lembata	1	2,500,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20,000,000	Kab Lembata	1	20,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	Kab Lembata	1	10,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	2,000,000	Kab Lembata	-	2,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	50,000,000	Kab Lembata	5	50,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**16**	**38,000,000**		**16**	**38,000,000**		**DPMPTSP**
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	1,000,000	Kab Lembata	3	1,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	10,000,000	Kab Lembata	6	10,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	14,000,000	Kab Lembata	7	14,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23	13,000,000	Kab Lembata	23	13,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Laporan**	**12**	**112,130,660**		**12**	**112,130,660**		**DPMPTSP**
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	87,677,310	Kab Lembata	12	87,677,310	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	21,953,350	Kab Lembata	12	21,953,350	Kab Lembata	DPMPTSP

2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,500,000	Kab Lembata	12	2,500,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**60,110,100**		**100**	**60,110,100**		**DPMPTSP**
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	45,110,100	Kab Lembata	5	45,110,100	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	Kab Lembata	-	-	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5,000,000	Kab Lembata	1	5,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5,000,000	Kab Lembata	1	5,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5,000,000	Kab Lembata	1	5,000,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	Kab Lembata	-	-	Kab Lembata	DPMPTSP
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**PMDN/ PMA**	**3**	**92,050,000**		**3**	**92,050,000**		**DPMPTSP**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**3**	**92,050,000**		**3**	**92,050,000**		**DPMPTSP**
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	3	92,050,000	Kab Lembata	3	92,050,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**PMDN/ PMA**	**5**	**349,225,810**		**5**	**349,225,810**		**DPMPTSP**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Pelayanan Pelaku Usaha yang Mendapatkan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu**	**Pelaku Usaha**	**250**	**349,225,810**		**250**	**349,225,810**		**DPMPTSP**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	250	134,872,810	Kab Lembata	250	134,872,810	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	250	138,753,000	Kab Lembata	250	138,753,000	Kab Lembata	DPMPTSP

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	250	75,600,000	Kab Lembata	250	75,600,000	Kab Lembata	DPMPTSP
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**PMDN/ PMA**	**274**	**321,058,510**		**274**	**321,058,510**		**DPMPTSP**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Kegiatan Usaha**	**274**	**321,058,510**		**274**	**321,058,510**		**DPMPTSP**
2	18	05	2.01	01	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	12	102,306,436	Kab Lembata	12	102,306,436	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	05	2.01	02	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	250	86,359,537	Kab Lembata	250	86,359,537	Kab Lembata	DPMPTSP
2	18	05	2.01	03	Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha, kali	12	132,392,537	Kab Lembata	12	132,392,537	Kab Lembata	DPMPTSP
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Lamanya Perijinan**	**Hari**	**1**	**27,266,730**		**1**	**27,266,730**		**DPMPTSP**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi**	**Dokumen**	**1**	**27,266,730**		**1**	**27,266,730**		**DPMPTSP**
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	27,266,730	Kab Lembata	1	27,266,730	Kab Lembata	DPMPTSP

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.2.694.959.515,75,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 2.475.516.670,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang melaksanakan unsur pelayanan penanaman modal.

Pada tahun rencana 2024, terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

TABEL 2.4. USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

NO	Kecamatan	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Akomodir APBD	Diluar APBD
1	Nubatukan	*PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL*	Sosialisasi dan Konsultasi Publik tentang SIUP (tidak berlaku lagi), NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Nomor Induk Pelaku Usaha	Masyarakat/Pelaku Usaha	11 Desa, 7 Kelurahan		Dinas Penanaman Modal dan PSP	√	
2	Nubatukan	*PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL*	Sosialisasi Perijinan Berbasis Resiko	Masyarakat/Pelaku Usaha	11 Desa, 7 Kelurahan		Dinas Penanaman Modal dan PSP	√	
3	Nubatukan	*PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL*	Fasilitasi Pendataan Potensi Daerah		11 Desa, 7 Kelurahan		Dinas Penanaman Modal dan PSP	√	
4	Atadei	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Sosialisasi dan Pembuatan Surat Ijin Berdagang (NIB)	Desa Se Kec Atadei	Desa Se Kec Atadei	1 Paket	Dinas Penanaman Modal dan PSP	√	
5	Buyasuri		Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)		20 Desa	1 Paket	Dinas Penanaman Modal dan PSP	√	
6	Ile Ape		Sosialisasi dan Bimtek bagi pelaku usaha yang berizin.	17 Desa	17 Desa	17 Kelompok	Dinas Penanaman Modal dan PSP	√	

Usulan program dan kegiatan diatas merupakan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Tingkat Kecamatan dan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten yang telah sesuai dengan prioritas daerah serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang Akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang dimaksudkan adalah Tahun 2024. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program Perangkat Daerah.Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yaitu :

Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatkan kinerja penanaman modal yang berdaya saing, dengan sasaran meningkatnya jumlah realisasi investasi, diukur capaiannya yang Indikator : Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional, dan Jumlah Investor Berskala Nasional

2. Meningkatkan kualitas, efektifitas, dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan sasaran terwujudnya kepuasan layanan publik, diukur dengan indikator : Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata Tahun 2023 beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas DPM-PTSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	Meningkatkan penanaman modal yang berdaya saing	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	8
			Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	70,500,000,000
			Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1 Milyard

3.3. Program dan Kegiatan Priorias

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program, kegiatan dan sub
b. Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah:
   1) Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
   2) Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub Kegiatan serta pagu indikatif sebagai berikut : Program sebanyak 5, Kegiatan Sebanyak 12, Sub Kegiatan sebanyak 39, dengan Total Pagu Indikatif sebesar Rp. 2.475.516.670,- yang dapat diuraiakan sebagai berikut :
   1. Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.893.328.483,-.
   2. Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 10.088.425,-.
   3. Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 39.999.960,-
   4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 Kegian dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 532.099.802
   5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 00,-.

BAB IV

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026. Rumusan rencana program, kegiatandan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini.

Rencana Kerja organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**2.476.616.670,00**							**2.743.564.034,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.476.616.670,00**							**2.743.564.034,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**2.476.616.670,00**							**2.743.564.034,00**	
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*	-			**100 Persen**	**1.893.328.483,00**						-	**1.963.963.884,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	45.898.432,00			-	-	Aparatur	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	9.454.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	4.818.216,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				1 Dokumen	4.935.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	9.454.774,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*													

	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokuman	7.824.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.437.034.524,00			-	-	Aparatur	-	1.567.926.574,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	2.18.01.2.02.0001	Penyelisan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	1.408.216.777,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		1.435.159.814,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyelisan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelisan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	175.296.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		118.767.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
	2.18.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	1.304.387,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	2.316.862,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksanannya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah	-			4 Laporan	14.342.980,00			-	-	Aparatur	-	17.496.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3.840.560,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10.496.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.496.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanya Perataan Pegawai Perangkat Daerah	-			1 Laporan	4.054.774,00			-	-	Aparatur	-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	4.054.774,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				0 Orang	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah	-			100 Persen	63.836.322,00			-	-	Aparatur	-	64.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.643.350,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.902.022,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.469.050,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12.892.000,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			25 Persen	28.137.180,00			-	-	Aparatur	-	15.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan				6 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	28.137.180,00	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DAN	-	-	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur		500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	25.151.791,00			-	-	Aparatur	-	143.221.310,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.035.491,00	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		118.767.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.486.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		21.959.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.026.500,00	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada setingkat Dinas Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			4 Laporan 100 Persen	74.730.500,00			-	-	Aparatur	-	65.110.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnya				6 Unit	60.487.500,00	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		45.110.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	14.245.000,00	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Lombok, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-			**6 Investor**	**10.088.420,00**						-	**92.050.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	10.088.420,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Aparatur	-	92.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.088.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Aparatur		92.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Lamanya pelayanan	-			**1 Hari**	**39.999.960,00**						-	**237.739.542,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpeliaranya Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-			4 Dokumen	39.999.960,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Aparatur	-	237.739.542,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1 Pelaku Usaha	9.999.974,00	Kab. Lombok, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Aparatur		27.299.790,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.16.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Lembata, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempunyai Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana	Aparatur		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				250 Kegiatan Usaha	25.906.980,00	Kab. Lembata, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempunyai Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.Meningkatkan infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kawasan dan mitigasi bencana	Aparatur		134.872.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	**2.16.06**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-			**6 Investor**	**602.099.802,00**						-	**321.067.810,00**	
	2.16.06.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			12 Laporan	602.099.802,00			Mempunyai Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha	-	321.067.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.06.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				12 Kegiatan Usaha	205.454.564,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Mempunyai Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha		102.909.727,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.06.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				250 Pelaku Usaha	205.891.348,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Mempunyai Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha		86.359.240,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.06.2.01.0000	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan				12 Kegiatan Usaha	115.763.900,00	Kab. Lembata, Semua	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Pelaku Usaha		132.391.037,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	*Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)*	-			**6 Investor**	**0,00**						-	**138.763.900,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Bagi Pelaku Usaha*	-			200 Pelaku Usaha	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.Meningkatkan Infrastruktur untuk Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kelestarian dan mitigasi bencana	Pelaku Usaha	-	138.763.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.Meningkatkan Infrastruktur untuk Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kelestarian dan mitigasi bencana	Pelaku Usaha		138.763.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	JUMLAH							**2.476.616.670,00**							**2.743.664.034,00**	

BAB V
PENUTUP

Demikian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024. Terima kasih.

Lewoleba, 25 oktober 2023

Kepala Dinas PMPTSP

Benediktus Leuobi, S.Sos

NIP. 19701222 200012 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah *(system top down)* maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi dan aspirasi/usulan kegiatan masyarakat ini terakomodir dalam penyelenggaraan musyawarah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan *system bottom up* yang sangat diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024 dan Renstra SKPD. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijabarkan berdasarkan RPD Kabupaten Lembata 2023 – 2026 dan menjadi acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), sehingga menjadi pedomaan untuk menyusun RKA SKPD, selanjutnya menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten Lembata tahun 2024.

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan di berikut.

Bagan 1.1.

Bagan Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

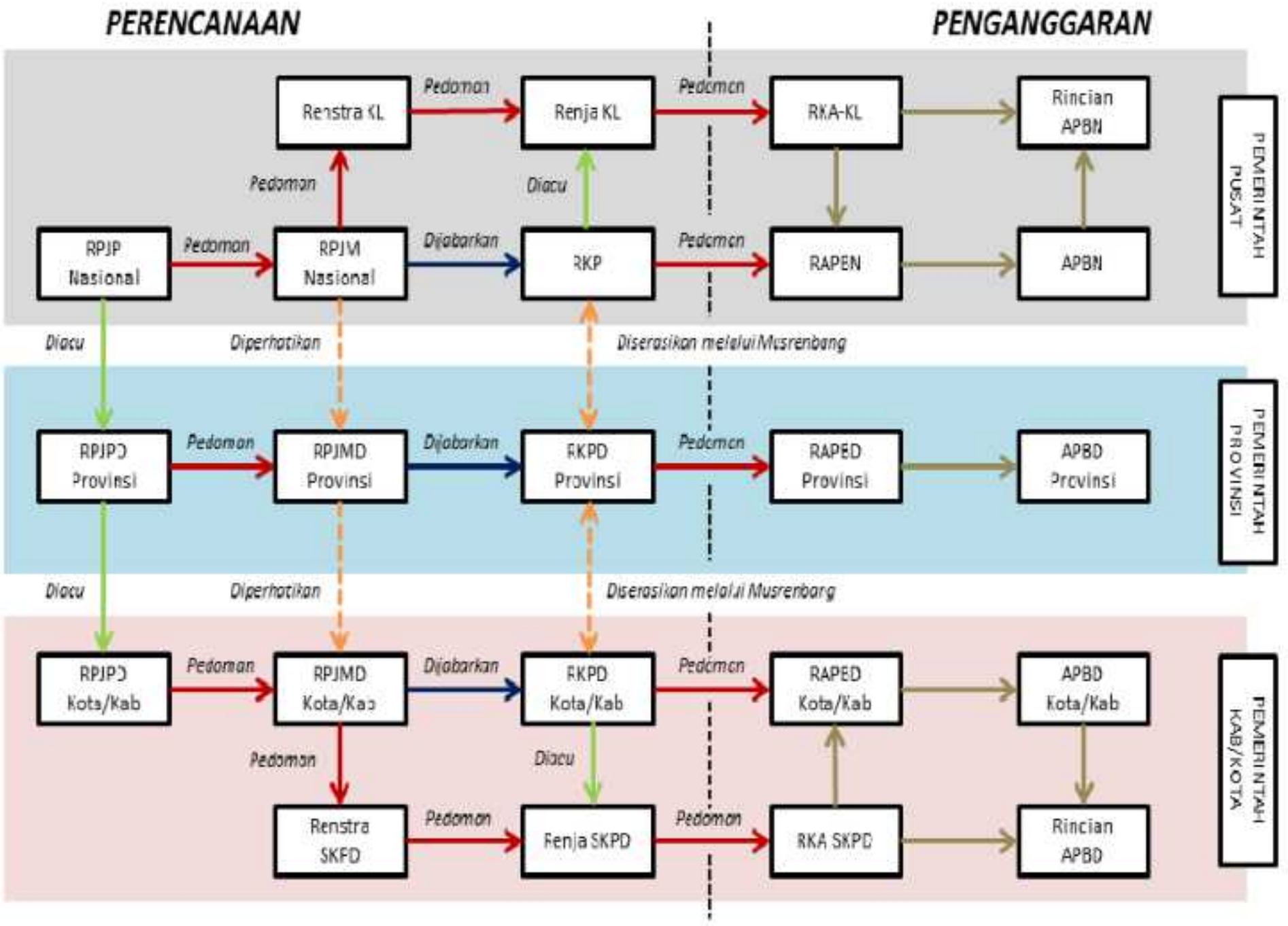

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. Renja SKPD ini disusun sebagai acuan untuk menentukan arah dan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama satu tahun dengan indikasi pendanaannya. Arah perencanaan hingga pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dimaksudkan untuk rangka mewujudkan *visi* dan *misi* Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026 .

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Nomor 039);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata;
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata disusun dengan maksud untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur, penetapan target kinerja dan hasil yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023.

2. Tujuan

   Penyusunan Renja ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

   a. Sebagai pedoman Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan selama tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2023 – 2026.
   b. Menjadi pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan secara terukur, terpadu, terarah berdasarkan target kinerja yang direncanakan melalui penyusunan RKA 2024 .
   c. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja dalam rangka perencanaan program/kegiatan / subkegiatan serta perumusan kebijakan yang tepat pada tahun- tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Sistematika dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PORABUD TAHUN 2023

Memuat materi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, dan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat materi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Porabud Tahun 2024.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat materi tentang rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Porabud Tahun 2024 serta pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan & subkegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Tahapan evaluasi pelaksanaan kegiatan TA 2023 didasarkan pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepemudaan Tahun 2022. Proses evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan target indikator program, kegiatan & subkegiatan dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2023 serta tingkat capaian indikator sesuai target Renstra Perangkat Dearah.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel. 2.1

Kajian (Review) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, dan Olahraga**									
2.19.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota**	**Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran**	**60**	**36**	**12**	**12**	**100**	**12**	**60**	**100**
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun**	**35**	**21**	**7**	**7**	**100**	**7**	**35**	**100**
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA, RDPA, DPA, RDPPA, DPPA, RENJA dan Evaluasi Renja yang tersusun	35	21	7	7	100	7	35	100
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran**	**100**	**52**	**26**	**26**	**100**	**26**	**100**	**100**
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	70	42	14	14	100	14	70	100
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrator Pengelola Keuangan SKPD	60	36	12	12	100	12	60	100
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran**	**60**	**36**	**12**	**12**	**100**	**12**	**60**	**100**
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	40	24	8	8	100	8	40	100
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Buku yang dijilid dan barang cetakan & penggandaan	80	40	20	20	100	20	80	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jml Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	75	30	30	30	100	15	75	100
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran**	**60**	**36**	**12**	**12**	**100**	**12**	**60**	**100**
2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/kendaraan dinas operasional yang diadakan	10	3	2	2	100	0	5	50
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60	20	10	10	100	2	32	64
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran**	**60**	**36**	**12**	**12**	**100**	**12**	**60**	**100**
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelayanan Jasa Telepon, Listrik dan Air	60	36	12	12	100	12	60	100
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia	60	36	12	12	100	12	60	100
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	**39.74**	**0**	**33.1**	**16,4**	**49,53**	**39.74**	**16,4**	**41,27**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	**39.74**	**0**	**33.1**	**16,4**	**49,53**	**39.74**	**16,4**	**41,27**
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang terbina	10	4	2	2	100	2	8	80
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah siswa terseleksi yang melakukan kegiatan pelatihan PASKIBRA dan Kepramukaan	350	210	70	70	100	6	286	82
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Jml Cabang olahraga yang dibina**	**8**	**8**	**4**	**4**	**100**	**1**	**1**	**62,5**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jml Cabang olahraga yang dibina**	**8**	**8**	**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**12,5**
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	7	2	2	2	100	2	6	86
2.19.03.2.02	**Penyelenggaran Kejuaraan dan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Jml Cabang olahraga yang dibina**	**8**	**8**	**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**12,5**
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaran Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Terselenggaranya ETMC	1					1	1	100
		Jumlah Atlet yang Berprestasi	75	15	17	17	100	30	62	83
		Jml Cabang olahraga yang dibina	8	6	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Prestasi Olahraga	17	3	0	0	0	17	0	0
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**									
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Jumlah Organisasi di Bidang Budaya**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100**	**1**	3	**300**
2.22.03.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masy pelakunya dlm Daerah Kab/Kota**	**Jml festival yang diselenggarakan dan diikuti.**	**6**	**1**	**0**	**0**	**100**	**1**	**2**	33
2.22.03.2.02.01	Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jml festival yang diselenggarakan dan diikuti.	6	2	2	2	100	1	5	83
		Jumlah Organisasi di Bidang Seni dan Budaya	1	1	1	1	100	5	7	700
2.22.03.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yg Penganutnya dalam Daerah Kab/Kota**	**Jumlah komunitas adat dan budaya yang dibentuk dan difasilitasi.**	**9**	**9**	**9**	**9**	100	**7**	**9**	100
2.22.03.2.03.01	Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah komunitas adat dan budaya yang dibentuk dan difasilitasi.	9	9	9	9	100	7	9	100
2.22.03	**Program Pengembangan Kesenian Tradisonal**	**Jumlah Organisasi di Bidang Seni dan Budaya**	**1**	**5**	**1**	**5**	500	**1**	**1**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian Tradisional yang Masy pelakunya dlm Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Organisasi di Bidang Seni dan Budaya**	**1**	**5**	**1**	**5**	500	**1**	**1**	100
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan Alat Tatong dan Tenun Ikat	70	20	30	0	0	0	20	28.6
		Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	3	3	3	1	33.3	1	1	33.3
2.22.05	**Program Perelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Jumlah Organisasi di Bidang Budaya**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	**1**	**1**	100
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	Jumlah situs/Cagar Budaya yang dilestarikan	9	9	9	9	100	9	9	100
2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Museum yang dibangun	1				0	0		0
		Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	10	2	10	2	20	10	2	20

Dari data table hasil review di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Pada pelaksanaan Renja Tahun 2023 terdapat 2 (dua) kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau dengan hasil kinerja rendah antara lain:

   1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

      Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; dengan indicator Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif. Capaian indicator ini mencapai 16,4 % dari target 33,1% Tahun 2021 dan capaian indicator tahun 2022 masih berkisar 16,4% dari target 39,7%. Rendahnya capaian indicator ini karena keterbatasan anggaran untuk membiayai pelaksanaan pendataan yang tersebar pada 9 kecamatan.

   2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

      - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja: Jumlah Cabang olahraga yang dibina. Realisasi indikator pada tahun 2023 sebesar 1 (satu) cabang olahraga dari target 1 (satu) cabang olahraga, namun jika dibandingkan jumkah target renstra maka hanya mencapai 12,5% dari target 8 cabang olahraga. Hal ini, menandakan bahwa cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi dari anggaran Pemerintah Daerah hanya 1 cabang olahraga yakni Sepak Bola. Sedangkan pembinaan 8 (delapan) cabang olahraga lainnya bersifat mandiri oleh pengurus cabang olahraga berkenaan.

   3. Program Pengembangan Kesenian Tradisonal

      Kegiatan Pembinaan Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dengan subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelathan SDM Kesenian Tradisional; dengan indikator kinerja sebagai berikut:

      - Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan Alat Tatong dan Tenun Ikat.

      Secara akumulatif tingkat capaian indikator berdasarkan target renstra, maka realisasi indikator kinerja ini sebesar 28,6 % atau mencapai 20 orang dari target 70 orang selama 5 tahun. Sedangkan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 0% karena karena tidak dilaksanakannya pelatihan alat musik tradisional akibat masih adanya pandemi COVID-19.

- Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
  Realisasi indikator kinerja ini sebesar 33,3 % atau mencapai 1 karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dari target 3 karya budaya.

4. Program Perelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota memiliki 1 subkegiatan yakni Subkegiatan Perlindungan Cagar Budaya; dengan indikator kinerja kegiatan: Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu. Capaian indikator kinerja subkegiatan sebesar 20% atau meencapai 2 (dua) cagar budaya yang dikelola.

b. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota:
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 1 subkegiatan yakni Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD; dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 %.
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dengan 2 subkegiatan antara lain:
     1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dengan capaian kinerja sebesar 100 %
     2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian kinerja sebesar 100 %
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; dengan 3 subkegiatan antara lain:
     1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dengan capaian kinerja sebesar 100 %
     2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; dengan capaian kinerja sebesar 100 %
     3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD; dengan capaian kinerja sebesar 100 %
   - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ; dengan 3 subkegiatan antara lain:
     1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dengan capaian kinerja sebesar 100 %
     2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dengan capaian kinerja sebesar 100 %
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dengan 2 (dua) subkegiatan antara lain:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dengan capaian kinerja sebesar 100 %
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; dengan capaian kinerja sebesar 100 %

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan Penyelenggaran Kejuaraan dan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; memiliki 1 subkegiatan yakni Penyelenggaran Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota; dengan indicator cabang olahraga yang terbina. Capaian indicator pada subkegiatan ini adalah 1 cabang olahraga atau 100%

3. Program Pengembangan Kebudayaan
   - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kab/Kota; dengan subkegiatan Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya. indicator subkegiatan ini adalah Jumlah Organisasi di Bidang Seni dan Budaya. Capaian indicator ini sebesar 7 organisasi atau 100%.
   - Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dengan subkegiatan Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat. Indikator subkegiatan ini adalah Jumlah komunitas adat dan budaya yang dibentuk dan difasilitasi; dengan capaian kinerja komunitas atau sebesar 100 %.

c. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan *(Tidak Ada)*.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya kinerja program/ kegiatan yaitu :
   - Terbatasnya tingkat pemahaman aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan sesuai rencana kerja tahunan;
   - Belum efektifnya koordinasi pelaksanaan tugas antar ASN, antar OPD maupun dengan *stakeholder* terkait.;
   - Adanya pendemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan/subkegiatan ditunda/ditangguhkan pelaksanaannya.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

   a) Implikasi yang timbul akibat capaian kegiatan tidak memenuhi target Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
      - Menurunnya tingkat kualitas berwirausaha bagi pemuda pemula.
      - Menurunnya prestasi olahraga.

b) Implikasi yang timbul akibat capaian kegiatan memenuhi target Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti festival budaya.
- Meningkatnya pembinaan kesenian masyarakat.

2. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

- Meningkatkan koordinasi antar bidang dan seksi terkait dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi/ lembaga/ *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan tupoksi atau mendukung percepatan pelaksanaan program/kegiatan.
- Meningkatkan kapasitas ASN agar semakin memahami tupoksinya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis terhadap kinerja pelayanan pada Dinas Kepemudaan, olahraga dan kebudayaan Kabupaten Lembata berdasarkan Indikator Kinerja berdasarkan bidang urusan sebagaimana dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian Indikator Kinerja yang berkaitan dengan urusan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan dijabarkan sebagai berikut:

1. Presentase Wirausaha Muda;

   Capaian Indikator ini sampai dengan tahun 2023 tidak tercapai atau tidak memenuhi target. Hal ini disebabkan beberapa factor penghambat diantaranya adalah tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dan juga belum dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap wirausaha muda di Kabupaten Lembata

2. Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif

   Capaian Indikator ini sampai dengan tahun 2023 sebesar 16,4% dari target 33,1 %. Sedangkan tahun 2022 masih berkisar 16,4%. Hal ini menandakan bahwa pemuda yang aktif dalam dalam organisasi social dan kemasayarakatan masih rendah. Walaupun capaian indicator belum memenuhui target namun upaya pemerintah terus mendorong terutama pemberdayaan terhadap organisasi social dan kemasayarakatan tetap menjadi sarana memgembangkan dan menyalurkan inovasi para pemuda.

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

   Capaian Indikator ini sampai dengan tahun 2023 sebesar 41,7% dari target 6,0 %. Sedangkan tahun 2022 masih berkisar 16,4%. Hal ini menandakan indicator ini hanya mencapai 5 cabang olahraga yang aktif melakukan pembinaan dari target 12 cabang olahraga yang ada di Kabupaten.

4. Cakupan Pelatih Pelatih yang Bersertifikat

   Capaian Indikator ini sampai dengan tahun 2021 sebesar 66,7% dari target 50,0 %. Sedangkan tahun 2022 masih berkisar 67,7%. Hal ini menandakan indicator ini hanya mencapai 8 pelatih yang bersertifikat dari jumlah 12 pelatih cabang cabang olahraga yang ada di Kabupaten.

5. Jumlah Atlet yang Berprestasi.

   Capaian Indikator ini hanya mencakup prestasi pada tingkat provinsi dengan capaian tahun 2021 sebanyak 0 atlet dari target 50 atlet, dan realisasi

indicator tahun 2022 sebesar 30 atlet. walaupun realisasi indicator ini memenuhi target, namun hanya dicapai pada 1 cabang olahraga yakni untuk pembinaan atlet sepak bola pada penyelengaraan Liga 3 ETMC XXXI di Kabupaten Lembata. Sedangkan jumlah atlet berprestasi pada tingkat nasional tidak ada.

6. Jumlah Prestasi Olahraga.

   Capaian Indikator ini sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6 cabang olahraga dari target 6 cabang olahraga yang dipertandingkan. Walaupun capaian indicator telah memenuhui target namun berprestasi olaghraga ini hanya diperlombakan pada tingkat kabupaten.

7. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

   Capaian Indikator tahun 2022 adalah 1 even festival seni dan budaya, sedangkan capaian tahun 2021 tidak ada karena tidak diselenggarakannya festival akibat pandemic Covid-19. Dari capaian ini perlu dilakukan pendataan secara menyeluruh dan pembinaan secara berkelanjutan.

8. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

   Capaian Indikator tahun 2021 sebanyak 186 BCB dari target 46 BCB dan tahun 2022 sebanyak 186 BCB dari target 47 BCB.

9. Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi

   Capaian Indikator tahun 2021 dan 2022 sebanyak 1 karya budaya yakni alat music Tatong dari target 3 karya budaya.

10. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu

    Capaian Indikator tahun 2021 dan 2022 sebanyak 2 cagar budaya yakni cagar budaya di Kampung Lewohala dan Lamalera.

11. Jumlah Organisasi di Bidang Seni dan Budaya

    Capaian Indikator tahun 2022 sebanyak 186 adalah 1 even festival seni dan budaya, sedangkan capaian tahun 2021 tidak ada karena tidak diselenggarakannya festival akibat pandemic Covid-19. Dari capaian ini perlu dilakukan pendataan secara menyeluruh dan pembinaan secara berkelanjutan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Dinas Kepemudaan, olahraga dan kebudayaan berdasarkan target Renstra SKPD dapat dijabarkan pada table 2.2.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Dinas Kepemudaan, olahraga dan kebudayaan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%			33.1	39.7	34	35	16.4	16.4	34	35	
2	Persentase Wirausaha Muda	%			3.25	4.25	5	5	0	0	5	5	
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%			6	6	50	50	41.7	41.7	50	50	
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%			50	60	20	25	66.7	66.7	20	25	
5	Cakupan Pembinaan Altet Muda	%			100	110	1	1	30	30	1	1	
6	Jumah Atlet Berprestasi (Nasional)	Atlet			1	1	0	0	0	0	0	0	
7	Jumah Atlet Berprestasi (tkt Provinsi)	Atlet			15	17	3	3	0	30	3	3	
8	Jumlah Prestasi Olahraga (Provinsi)	Atlet			6	6	1	1	0	1	1	1	
9	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival			3	3	0	1	0	1	0	1	
10	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	BCB			46	47	188	188	186	186	188	188	
11	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya			3	3	1	1	1	1	1	1	
12	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	Cagar Budaya			10	10	2	2	2	2	2	2	
13	Jumlah organisasi dibidang seni dan budaya	organisasi			1	1	10	10	5	5	10	10	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Perkembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan

   Pelaksanaan tupoksi Dinas Porabud secara *de jure* baru berjalan sejak Bulan Maret 2021, namun perkembangan pelayanan urusan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan membutuhkan sinkronisasi dan sinergisitas program/kegiatan antar kebutuhan, usulan masyarakat dan kebijakan kepala daerah serta koordinasi kegiatan tingkat provinsi.

   Beberapa penyelenggaraan urusan olahraga yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi adalah terkait penyelenggaraan Liga III Eltari Memorial Cup (ETMC) XXXII di Rote Ndao, dan Penyelenggaraan Soetatin U-17 di Ngada, dan Penyelenggaraan Soetatin U-15 di Sumba Timur dimana kegiatan tersebut akan diselenggarakan ditahun 2023. Olehnnya itu, sangat dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dan sangat membutuhkan anggaran yang besar. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan dimaksud Pemerintah Kabupaten Lembata mempersiapkan diri antara lain telah pembinaan para atlet muda untuk mengikuti kegiatan tersebut.

2. Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Tupoksi SKPD.

   Dalam pelaksanaan tupoksi bidang kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan diantaranya:

   a) Kurangnya Kapasitas Sumber Daya ASN;
   b) Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan khususnya pusat pelatihan dan pembinaan para atlit serta kegiatan kepemudaan;
   c) Belum adanya kelompok binaan kewirausahaan;
   d) Belum adanya *database* bidang kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan;
   e) Kurangnya pendanaan pemerintah dan masyarakat dalam mengikutsertakan olahragawan untuk mengikuti kejuaraan olahraga tingkat daerah dan regional.
   f) Kurangnya penyelenggaraan turnamen sebagai momen pembinaan atlit; dan
   g) Pembinaan atlit dilaksanakan tidak secara rutin atau berkelanjutan.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

   Dalam pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Dinas PORABUD, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung pelayanan SKPD bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan. Analisis ini dilakukan baik terhadap lingkungan internal yang berkaitan dengan kekuatan

dan kelemahan SKPD maupun lingkungan eksternal yang berkaitan dengan peluang dan ancaman terhadap pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan

Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang, dilakukan dengan *Metode Analisis SWOT,* digambarkan sebagai berikut:

1. Analisis Faktor Lingkungan Internal

   a. Kekuatan (*Strengths*)

      Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dianalisis berdasarkan 3 (tiga aspek) antara lain:

      - Kelembagaan

        Adanya regulasi yang menjadi dasar dan pedomaan kerja bagi Dinas PORABUD dalam pelaksanaan tupoksi antara lain:

        1) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
        2) Peraturan Bupati Lembata Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata

      - Sumber Daya Aparatur

        Adanya sasaran, target dan penilaian kinerja ASN yang menuntut adanya peningkatan kinerja berdasarkan tupoksi.

      - Anggaran: tersedianya anggaran untuk membiayai berbagai program dan kegiatan sesuai tupoksi Dinas PORABUD.

   b. Kelemahan (*Weaknesses*)

      Secara garis besar faktor-faktor kelemahan yang menjadi penghambat pelayanan SKPD adalah:

      - Kelembagaan :
        1. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Keolahragaan.
        2. Kewenangan bidang teknis belum seluruhnya dijabarkan secara lengkap dalam rencana kerja tahunan dan pelaksanaan tupoksi Dinas PORABUD.
        3. Belum adanya pedoman teknis tentang pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
      - Sumber Daya Aparatur :
        1. Kurangnya Jabatan Fungsional Tertentu untuk melaksanakan tupoksi perangkat daerah sesuai bidang urusan.

2. Belum adanya Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
3. Pejabat struktural belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan berjenjang sebagai salah satu syarat menduduki jabatan struktural.
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap waktu kerja, disiplin kerja, mengubah sikap, pengetahuan dan keahlian untuk mencapai kinerja yang efektif.
5. Kurangnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan internal yang melekat.

- Anggaran/Dana;
  1. Terbatasnya anggaran pembinaan, pengembangan bidang olahraga, layanan kepemudaan dan urusan kebudayaan.
  2. Terbatasnya anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran.
- Sarana dan prasarana:
  1. Belum memiliki gedung kantor permanen;
  2. Terbatasnya sarana/fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan operasional perkantoran.
- Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
   - Belum maksimalnya pembinaan berupa bimtek/diklat tentang kewirausahaan.
   - Belum maksimalnya pendataan/pemetaan terhadap organisasi kepemudaan yang bergerak dibidang kewirausahaan.
   - Belum optimalnya perhatian pemerintah daerah pada pengembangan kewirausahaan kaum muda karena terbatasnya anggaran.
   - Belum maksimalnya pengembangan olahraga pada sentra pendidikan dan masyarakat.
2. Bidang Kebudayaan
   - Belum maksimalnya pendataan/pemetaan terhadap organisasi dibidang seni dan budaya
   - Belum maksimalnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kelompok-kelompok seni budaya khususnya pembinaan dan pelatihan tarian dan alat music tradisional daerah.

2. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal
   a. Peluang (*Oppurtunites*) : Adanya animo masyarakat / pemuda dalam kegiatan olahraga.
   b. Ancaman (*Threast*):
      - Pemberdayaan kepemudaan sangat terbatas
      - Adanya ancaman prilaku berisiko dikalangan pemuda
      - Olahraga belum dipandang sebagai gaya hidup atau kebutuhan untuk menunjang kebugaran dan kesehatan jasmani dan peningkatan prestasi.
      - Rendahnya partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat dalam berolahraga.
      - Rendahnya kapasitas sumber daya manusia.

Isu –isu stretegis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan organisasi kepemudaan;
2. Rendahnya inovasi, kreatifitas, produktivitas dan jiwa wirausaha serta daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian;
3. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap pergaulan bebas yang disebabkan pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan perkembangan IPTEK yang pesat;
4. Rendahnya peran serta organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kapasitas pemuda dalam pengembangan kewirausahaan;
5. Rendahnya peran kelembagaan/organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga serta belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi dalam mewujudkan prestasi olahraga;
6. Rendahnya kapasitas SDM kepemudaan dan keolahragaan dalam penyelenggaran manajemen kelembagaan dan program;
7. Rendahnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga, hal ini dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi belum berjalan dengan baik dan berkelanjutan dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan olahraga pada masyarakat luas belum berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan;
8. Belum adanya pembangunan sarana dan prasarana pembinaan olahraga terpadu dan terpusat; dan

9. Belum optimalnya pembinaaan dan pengembangan prestasi keolahragaan serta pemberdayaan kepemudaan.
10. Belum optimalnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui budaya dan kearifan local.

Atas isu-isu strategis di atas, maka beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan kegiatan dan subkegiatan selanjutnya adalah:

b. Intervensi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
c. Meningkatkan pembinaan terhadap olahraga pendidikan dan olahraga prestasi
d. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan
e. Meningkatkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah, stakeholder dan masayrakat dalam mendukung pembangunan bidang olahraga, kebudayan dan kebudayaan.
f. Perlu adanya penetapan peraturan daerah tentang keolahragaan, peraturan teknis, standard serta Standar Oprasional Prosedur terkait pembinaan dan penyelenggaraan olahraga di daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan rancangan dokumen yang disusun sebagai rujukan awal untuk membuat telaahan program/kegiatan/subkegiatan pada setiap SKPD dan selanjutnya dianalisis secara menyeluruh sesuai kebutuhan.

Telahaan rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja setiap tahun.

Review terhadap rancangan awal RKPD ini, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan/subkegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan untuk Dinas Porabud. Pada tahapan Review Rancangan awal RKPD 2023, Dinas Porabud mengusulkan 4 program, 11 kegiatan dan 17 subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.2,810,460,302,-

Penelahaan terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Porabud Tahun Anggaran 2023 dapat djabarkan pada Table 2.3.

Tabel. 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN				**2.810.460.302**	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN**				**2.335.026.205**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.810.460.302**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.335.026.205**	
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**2.334.175.052**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**1.907.527.624**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**100%**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100%**		**1.830.724.324**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan**	**6 dok**	**12.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan**	**6 dokumen**		**9.728.750**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Lewoleba	Jumlah dokumen perencanaan Penrangkat Daerah	6 dok	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Lewoleba	Jumlah dokumen perencanaan Penrangkat Daerah	6 dok	9.728.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lewoleba	**Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran** Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**12 Bulan** 25 org	**2,641,551,500** 2,407,671,500	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lewoleba	**12 Bulan** Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 org	**1.628.101.538** 1.616.797.538	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lewoleba	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	233,880,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lewoleba	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	113.040.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**	**12 Bulan**	**90.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**			**47.102.826**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lewoleba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lewoleba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.376.426	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lewoleba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lewoleba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.279.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lap	55.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lap	32.447.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**	**12 Bulan**	**30.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**		**16.587.500**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lewoleba	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lewoleba	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	16.587.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**	**12 Bulan**	**176.112.600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bul**	**Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**	**12 Bulan**	**95.856.710**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lewoleba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	86.712.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lewoleba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	33.558.010	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lewoleba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	89.400.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Lap	62.298.700	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**	**5 Unit**	**25.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**	**5 Unit**	**33.347.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lewoleba	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		33.347.000	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda		126,349,669	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda		106.953.296	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		126,349,669	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		106.953.296	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	35 orang	50,901,230						

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	75 orang	75,448,439	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Lembata, Nubatukan,Le woleba	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	20 orang	106.953.296	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota		**178,166,541**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota		**218.809.285**	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pedidikan	4 unit	60.739.650	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pedidikan		35.904.403	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 unit	60.739.650	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 unit	35.904.403	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prestasi Olahraga	*1 Dok*	117.426.891	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Prestasi Olahraga	*1 Dok*	182.904.882	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	*1 Dok*	117.426.891	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (ETMC, Soeratin, Piala Bupati)	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	*4 Dok*	182.904.882	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				***171.769.040***	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**76.803.300**	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	*4 Even*	***171.769.040***	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah utk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional		**76.803.300**	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang didilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan**	***156 OPK***	**110.000.000**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang didilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan**	**Kab. Lembata, Nubatukan, Lewol**		***156 OPK***	**76.803.300**	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	*156 OPK*	*50.000.000*	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	*156 OPK*	47.119.875	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 orang	60.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 orang	29.683.425	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Lembata, Nubatukan , Lewoleba**	**Jumlah Objek Kebudayaan yang di dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan**	***156 OPK***	***61.769.040***						
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Kab. Lembata, Nubatukan,	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	*156 OPK*	*61.769.040*						

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemajuan Tradisi Budaya	Lewoleba	Pengembangan dan Pemanfaatan								

Berdasarkan table 2.3. dapat di jelaskan bahwa terdapat perbedaan total anggaran sebelumnya Rp. 2.810.460.302,00 dengan 4 program, 11 kegiatan dan 17 subkegiatan mengalami pengurangan menjadi Rp. 2.335.026.205,00 dengan4 program, 10 kegiatan dan 15 subkegiatan. Perbendaan ini antara rancangan awal RKPD dengan total kebutuhan akhir rencana anggaran. perbedaan ini diakibatkan keterbatasan anggaran daerah dengan prioritas anggaran untuk dana mandatory pendidikan 20%, kesehatan dan pembayaran hutang daerah. Dampak dari pengurangan anggaran ini menyebabkan beberapa subkegiatan tidak dapat dianggarkan pelaksanaannya pada tahun 2023. Rincian subkegiatan yang tidak dapat dianggarkan pelaksanaannya diuraikan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, semula direncanakan penganggarannya pada RKPD sebesar Rp. 50,901,230, dengan target capaian indicator Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya sebesar 35 orang
- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, semula direncanakan penganggarannya pada RKPD sebesar Rp. 61,769,040, dengan target capaian indicator Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan sebanyak 186 Objek.

2.5. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Usulan pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD yang berhubungan tugas pokok dan fungsi Dinas Porabud, dilakukan melalui kegiatan musrenbang tingkat kecamatan. Usulan ini sangat penting dalam rangka penyediaan fasilitas olahraga untuk pembinaan olahraga dan membudayakan olahrag di desa, namun setelah dianalisis berdasarkan aspek kewilayahan (lokasi desa) dan kepemilikan asset tanah (tanah desa), maka usulan ini tidak dapat diakomodir. Daftar usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat disajikan pada table 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Usulan Pokok-Pokok pikiran DPRD Tahun 2024

No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Kecamatan Omesuri (Walangsawah), Kec. Buyasuri (Tubung walang)	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	2 Paket	Usulan Pokok – Pokok Pikiran DPRD

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pokok-pokok kebijakan bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan tergambar dalam agenda pembangunan RPJMN pada Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2024. Agenda dan arah kebijakan pembangunan tersebut berdasarkan visi Presiden dan misi Nawacita Periode 2021-2024 serta peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan .

1. Kebijakan nasional bidang kepemudaan dan olahraga

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan Pemuda dan Olahraga dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Selaras dengan tujuan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga, maka pemerintah melalui penetapan bebijakan nasional bidang kepemudaan dan olahraga yang dijabarkan dalam 5 Program Prioritas Kemenpora tahun 2020 - 2024 antara lain:

a. Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan public.
b. Pemberdayaan Pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
c. Penguatan ideology Pancasila, karakter, serta budaya bangsa dikalangan pemuda.
d. Pemassalan dan pemasyarakatan yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar dikalangan masyarakat
e. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

2. Arah Kebijakan bidang kebudayaan

Agenda pembangunan bidang kebudayaan sebagaimana tercantum dalam RPJMN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2024 adalah Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi NTT

Berdasarkan arah dan kebijakan nasional, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2019-2024 antara lain:

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2019-2024.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
Mewujudkan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa	Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Peningkatan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi
Mewujudkan peran aktif pemuda termasuk kelompok disabilitas	Meningkatnya peran aktif pemuda termasuk kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah serta dalam menumbuhkembangkan	Meningkatkan pelibatan pemuda termasuk kelompok disabilitas dalam proses pembangunan daerah dan	Peningkatan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
dalam pembangunan daerah, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan
Mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*	Meningkatkan pemajuan olahraga tradisional dan pemassalan olahraga rekreasi	Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pemajuan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi sebagai daya tarik dan peningkatan ekonomi masyarakat
Mewujudkan olahraga prestasi dan paralympic tingkat regional, nasional dan internasional	Meningkatnya olahraga prestasi pada level nasional/ internasional	Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi di sentra olahraga pendidikan, terutama terkait pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penerapan *sport science* dan kurikulum pendidikan dan pembinaan	Peningkatan prasarana dan sarana olahraga pendidikan dan prestasi yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga serta penerapan *sport science* dan kurikulum pendidikan dan pembinaan
	Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional / internasional	Meningkatkan pembudayaan olahraga bagi kaum difabel/ berkebutuhan khusus	Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pembinaan atlet penyandang disabilitas secara terpusat (PPLPD)

Dalam rangka menjaga sinkronisasi dan sinergitas antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi NTT dengan implementasi program/kegiatan/ subkegiatan di daerah, maka ditetapkannya arah kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan bidang kepemudaan, olahraga dan kepemudaan sebagaimana tertuang dalam Strategi dan Kebijakan dalam mewujudkan Misi Kesatu - RPJMD Kab. Lembata Tahun 2017 - 2023 yakni ***"Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah".*** Penjabaran misi ini melalui ini arah kebijakan jangka menengah daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : ***"Kabupaten Lembata yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing"***
Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.
Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan kelembagaan serta keolahragaan. 2. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Disporabud

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan, Dinas PORABUD Kabupaten Lembata menjalankan agenda pembangunan berdasarkan *Visi* Kabupaten Lembata sebagaimana dijabarkan dalam RPD Kab. Lembata Tahun 2023 – 2026 yakni ***"Kabupaten Lembata yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing".*** Pelaksanaan agenda pembangunan ini dijabarkan melalui Misi Kedua Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Visi : ***"Kabupaten Lembata yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing"***			
Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan berdaya saing	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Strategi 9. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional
		Strategi 11. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan kelembagaan serta keolahragaan

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Program dan Kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2023 – 2026. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan. Untuk Tahun 2023 merencanakan 4 program, 11 kegiatan dan 17 subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.810.460.302,00, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel. 3.2. Matriks Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**2,638,691,262**					**4,606,575,562**
2	**19**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,334,175,052**					**2,490,839,213**
2	**19**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**12,000,000**					**12,000,000**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokuman Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	6 Dokumen	6 dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	12,000,000
2	**19**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,001,062,452**					**2,047,926,613**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	25 Orang/bul	100 Persen	1,874,566,452	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	1,921,430,613
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	1 Dokumen	100 Persen	126,496,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	126,496,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**19**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**90,000,000**					**147,000,000**
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	3 Paket	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	30,000,000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	2 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	12,000,000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	105,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**19**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**30,000,000**					**77,000,000**
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	5 Unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	77.000,000
2	**19**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**30,000,000**					**30,000,000**
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100%	2 Laporan	100 %	86,712,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	76,512,000
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	2 Laporan	100 %	89,400,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	100,400,600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**19**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25.000.000**					**30.000.000**
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mandukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	5 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	30.000,000
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**126,349,669**					**454,349,669**
2	**19**	**2**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader**								**126,349,669**					**454,349,669**
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan wirausaha	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	3 Kelompok	35 Orang	30 orang	50,901,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda	3 Kelompok	175,901,230
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan wirausaha	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	3 Kelompok	75 Orang	30 orang	75,448,439	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda	3 Kelompok	278,448,439

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**178,166,541**					**1,661,386,680**
2	**19**	**3**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**60,739,650**					**1,101,023,180**
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	4 Laporan	4 Unit	80 %	60,739,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	4 Laporan	1,101,023,180
2	**19**	**3**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**117,426,891**					**560,363,500**
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (ETMC, Soeratin, Piala Bupati)	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	4 Laporan	2 Dokumen	2 Kejuaraan	117,426,891	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	4 Laporan	560,363,500
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**171,769,040**					**623,394,550**
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**171,769,040**					**623,394,550**
2	**22**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**110,000,000**					**331,254,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Even	156 Objek	156 Objek	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	4 Even	286,254,000
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	4 Even	1 Orang	156 Objek	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	4 Even	45,000,000
2	**22**	**2**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**61,769,040**					**292,140,550**
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional Dalam Daerah Kabupaten	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Even	156 Objek	1 kegiatan	61,769,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	4 Even	292,140,550
												TOTAL	**2,810,460,302**					**5,229,970,112**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2024 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata merencanakan 4 program, 11 kegiatan dan 17 subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.2,810,460,302,00. Rincian rencana program dan kegiatan/subkegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; terdiri atas 1 subkegiatan yaitu: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; terdiri atas 2 subkegiatan yakni:
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; terdiri atas 3 subkegiatan yaitu:
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; terdiri atas 1 subkegiatan yaitu: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; terdiri atas 2 subkegiatan yaitu:
      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; terdiri atas 1 subkegiatan yaitu: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan:
   a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; terdiri atas 2 subkegiatan yaitu:
      - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula.
      - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera.
   b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; terdiri atas 1

subkegiatan yaitu: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

- Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; terdiri atas 1 subkegiatan yaitu:Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Kebudayaan:
   a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; terdiri atas 2 subkegiatan yaitu:
      - Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
      - Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
   b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; terdiri atas 1 subkegiatan yaitu:
      - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Dari uraian di atas, maka rincian pendanaan masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel Pendanaan Program dan Kegiatan berikut.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang menjadi pedomaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Penyusunan Renja ini berdasarkan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2024. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 berjalan secara optimal maka hal-hal berikut harus diperhatikan antara lain:

1. Renja Dinas PORABUD sebagai pedomaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PORABUD Tahun Anggaran 2024
2. Renja Dinas PORABUD Tahun 2024 memuat berbagai prioritas program dan kegiatan/subkegiatan, indikator kinerja, sumber dana serta besarnya alokasi anggaran yang bersifat indikatif. Selain itu memuat tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2023 - 2026.
3. Dinas PORABUD berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan/subkegiatan dan didukung oleh seluruh *stakeholder* yang ada maupun seluruh masyarakat Lembata.
4. Penyusunan Renja Dinas PORABUD tahun 2024 telah diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Lembata tahun 2024 dan RPD Kabupaten Lembata tahun 2023 – 2026.
5. Proses perencanaan dan pelaksanan program dan kegiatan harus menganut prinsip trasnparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan serta menganut asas manfaat kepada masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran, disiplin para ASN dan didukung oleh seluruh masyarakat dan komponen *stakeholder* yang ada. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan tersebut diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lembata dan demi kesejahteran rakyat Lembata.

Lewoleba, Januari 2024

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan

Kabupaten Lembata,

Apolonaris Mayan, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710723 199903 1 007

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2024

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KABUPATEN LEMBATA

TAHUN 2023

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan
   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal
   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 24);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(3+7+9)	11=(10/4)
3					**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**										
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	200	Persentase	100	100	100		100	76	38%
3	26	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedinaya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	Dokumen	12	16	16		12	44	61%
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32	Dokumen	6	6	6		6	18	56%
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen		1	1		1	2	50%
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	4	Dokumen		1	1		1	2	50%
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4	Dokumen		1	1		1	2	50%
3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen		1	1		1	2	50%
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	2	2	2		2	6	38%
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD yang tersusun	8	Dokumen	4	4	4			12	150%
3	**26**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah**	252	**Persentase**	**100**	**100**	**100**		**100**	**300**	**119%**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104	Orang/bulan	14	14	14		14	42	40%
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96	Dokumen	12	12	12		12	36	38%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan					1		
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	Laporan					18		
3	**26**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah**	**8**	**Laporan**	**2**	**2**	**2**		**4**	**6**	75%
3	26	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Dokumen							
3	26	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Laporan	2	2	2		2	6	
3	**26**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**41**	**Laporan**					**1**		
3	26	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21	Dokumen					1		
3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang							
3	**26**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah**	**100**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100%**
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1		
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	1	1	1		1	3	38%
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	1	1		1	3	75%
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2	2	2			6	300%
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1	1	1		1	3	75%
3	**26**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**52**	**Persentase**	**25**				**25**		**0%**
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit							
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Unit					5		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Unit					7		
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit							
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	Unit							
3	**26**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**386**	**Laporan**	**12**	**12**	**12**		**12**	**12**	**3%**
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	292	Laporan	12	12	12		12	36	12%
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	59	Laporan	12	12	12		12	36	61%
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35	Laporan	1	1	1		1	3	9%
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**544**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**		**100**	**100**	**18%**
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	256	Unit	14	14	14		14	42	16%
3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14	Unit							
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76	Unit	7	7	7		5	21	28%
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	Unit					1		
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	Unit					1		
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	102	Unit							
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan Wisata**		**Orang**	**4.000**	**4.000**	**4.000**		**4.000**		
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata**	**16**	**Lokasi**	3				3		
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata Kabupaten / Kota	12	Dokumen	2	2	2		2	6	50%
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1				1	1	25%
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata**	**36**	**Kawasan**	**1**	**1**	**1**		**1**		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kaluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	12	Kawasan	1				1	1	8%
3	26	02	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata**	16	Lokasi	3				3		
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi	12	Lokasi	3				3	3	25%
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	12	Unit	3				3	3	25%
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Lama kunjungan wisata**	**4**	**hari**	**3**				**3**	**3**	
3	26	03	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	4	Laporan	1				1	1	25%
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalu Media Cetak, Elektronik dan Media Lainaya Baik Dalam dan Luar Negeri	16	Dokumen	4	4	4		4	12	75%
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	Laporan	1				1	1	25%
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabuopaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	12	Dokumen	3	3	3		3	9	75%
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4	Dokumen	1				1	1	25%
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Lama Kunjungan Wisata**	**4**	**Hari**	**3**				**3**		
3	26	05	2.01		**Pelakeanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terlakeananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	400	Orang	100	100	100		100		
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	320	Orang	80				80	80	25%
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	280	Orang	70	70	70		70	210	75%
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4	Laporan	1	1	1		1	3	75%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif	120	Orang	30				30		
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	120	Orang	30				30	30	25%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata tidak mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Kunjungan Wisata (Orang)			3.913	4.000	4.500	6.000	12.649		12.649	12.649	
2.	Lama Kunjungan Wisata			3	3	3	4	3		3	3	
3.	PAD Sektor Pariwisata			18.144.000	50.000.000	65.000.000	75.000.000	160.301.625	7.980.000	35.000.000	50.000.000	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda :
   - Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan daya tarik wisata unggulan berbasis kemitraan
   - Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan ekonomi kreatif unggulan
   - Belum Optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata dan ekraf berbasis kemitraan
   - Keterbatasan kapasitas SDM serta Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda :
   - ♦ Tantangan :
   - Status Tanah di beberapa lokasi destinasi wisata, milik hulayat dan menjadi persoalan
   - Tidak tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan kopetensi untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
   - Beberapa lokasi wisata berada dalam lokasi rawan bencana
   - Keanekaragaman daya tarik wisata dan ekonomi kreatif belum dikelola secara sinergis
   - Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat masyrakat sekitar, akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat yang berpotensi menimbulakan konflik sosial
   - Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif belum masksimal
   - Promosi dan pemasaran pariwisata daerah belum optimal

c. Peluang :
   - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lembata menjadikan pariwisata *leading* sektor
   - Potensi keanekaragaman budaya, kerajinan dan keterampilan masyarakat serta sumber daya alam

- Meningkatnya teknologi promosi secara online, kemudahan akses informasi secara online, penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata
- Terjalinnya kerjasama yang kondusif dengan mitra industri pariwisata

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda, adalah :

- Pengembangan dan Pengelolaan daya tarik wisata unggulan berbasis kemitraan
- Pengembangan dan Pengelolaan ekonomi kreatif unggulan
- Promosi dan pemasaran pariwisata dan ekraf berbasis kemitraan
- Pengembangan kapasitas SDM serta Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 namun direncanakan pada Renja Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.7.312.235.719,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 7.477.235.719,-.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				5.269.872.966	**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					3.251.120.448	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi	100	3.293.322.588	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Lembata	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi	100		2.103.732.296	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Tersedinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Tersedinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	30.374.106	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Laporan	5.953.216	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.746.688	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.959.288	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.137.368	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.552.368	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	6.026.158	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah**	**100**	**2.461.288.916**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah**			**1.866.679.149**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	2.274.616.356	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	1.753.752.111	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	172.842.560	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	112.927.038	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah**	**4**	**43.333.320**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah**	**8**	**Laporan**	**26.619.135**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rancana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	7.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rancana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	36.333.320	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	26.619.135	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**1**	**10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**1**	**Laporan**	**8.850.145**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Laporan	8.850.145	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah**	**100**	**82.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**94.305.861**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.577.520	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.760.341	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	11.100.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	50.868.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25**	**40.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	25	Persen	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**456.256.200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Laporan**	**23.878.900**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	473.112.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	20.660.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	16.716.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	3.412.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**80.135.150**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**53.045.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	80.135.150	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	51.645.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	1.400.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Kab. Lembata**	**Jumlah Kunjungan Wisata**	**4.000**	**627.523.510**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Kunjungan Wisata**	**13.000**	**Orang**	**934.348.166**	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	3	152.523.510	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	3	Lokasi		
	Pengadaan /Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata			Pengadaan /Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	4	Lokasi		
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata Kabupaten / Kota	2	102.523.510	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata Kabupaten / Kota				
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata**	**1**	**100.000.000**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata**	**4**	**Kawasan**	**-**	
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	100.000.000	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	Unit		
	Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah lokasi yang menrapkan destinasi pariwisata berkelanjuta dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota			Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah lokasi yang menrapkan destinasi pariwisata berkelanjuta dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata**	**3**	**375.000.000**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata**	**3**	**Lokasi**	**804.348.166**	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sesui dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi	3	300.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sesui dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi	3	Lokasi	10.000.000	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3	75.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata/kota	4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata/kota	4	Laporan	794.348.166	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Kab. Lembata**	**Lama kunjungan wisata**	**3**	**658.679.300**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kab. Lembata**	**Lama kunjungan wisata**	**3**	**Hari**	-	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	658.679.300	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5	Laporan		
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Periwusata Kabuopaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	3	33.744.300	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Periwusata Kabuopaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri				
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	25.000.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	300.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalu Media Cetak, Elektronik dan Media Lainaya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	299.935.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalu Media Cetak, Elektronik dan Media Lainaya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	Promosi		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Kab. Lembata**	**Lama Kunjungan Wisata**	**3**	**780.147.470**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kab. Lembata**	**Lama Kunjungan Wisata**	**3**	**Hari**	**342.019.966**	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**100**	**552.483.000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**100**	**Orang**	**242.019.966**	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		75.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Laporan		
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Lembata	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Lembata	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	Orang	197.957.309	
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Lembata	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan Kapasitasnya Berbasarkan pada SKKNI			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Lembata	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	30	Orang		
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kab. Lembata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pebinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kab. Lembata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pebinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	70	Orang		
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30	Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Laporan	46.062.677	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Lembata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	80	250.000.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Lembata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	70	257.485.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**30**	**187.562.470**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**30**	**Orang**	**100.000.000**	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30	187.562.470	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30	Orang	100.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang melaksanakan unsur Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Pada tahun rencana 2024, terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN MASYARAKAT

NO	Kecamatan	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Akomodir APBD	Diluar APBD	Keterangan
	Nubatukan		Fasilitasi Pengembangan Agro Wisata Sawah Bendungan	Pelaku UMKM	Lewoleba Barat		Dinas Parekraf	√		Penyusunan Road Map calon Desa Wisata
	Nubatukan		Fasilitasi Pengembangan Pariwisata Ebak Srikan	Masyarakat	Desa Paubokol		Dinas Parekraf	√		Penyusunan Road Map calon Desa Wisata
	Lebatukan		Penataan, taman, rehabilitasi tugu dan situs Polo Ama	Masyarakat	Lodotodokowa, Seranggorang	1 Paket	Dinas Parekraf			Dinas Porabud
	Lebatukan		Pembangunan & Pengembangan Pariwisata bunga waiduli	Masyarakat	Banitobo	1 paket	Dinas Parekraf		√	
	Lebatukan		Bantuan bagi usaha ekonomi kecil/menengah	Masyarakat	17 Desa se Kecamatan Lebatukan	17 paket	Dinas Parekraf			Dinas Koperindag
	Lebatukan		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Budaya	Masyarakat, Kelompok Sanggar	17 Desa se Kecamatan Lebatukan	17 paket	Dinas Parekraf / Porabud			Dinas Porabud
	Lebatukan		Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan yang Difokuskan pada Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa	Masyarakat	17 Desa se Kecamatan Lebatukan	17 paket	Dinas Parekraf			Dinas Pertanian
	Lebatukan		Survei Pariwisata Kuburan Belanda di Tiwa Ua dan Gua Jepang	Masyarakat	Lamadale, Hadakewa	2 Paket	Dinas Parekraf			Dinas Porabud
	Nagawutung	Program Pengembangan Pariwisata	Pengembangan pariwisata desa	Terlaksananya pengembangan	Tewaowutung	1 paket	Dinas Parekraf	√		Interkoneksi Aktifitas Wisata di Desa dengan Event Rally Wisata Bahari
	Nagawutung		Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebuyaan, keagamaan	Terselenggaranya festival kesenian dll	Wuakerong	1 paket	Dinas Parekraf	√		Interkoneksi Aktifitas Wisata di Desa dengan Event Rally Wisata Bahari
	Nagawutung		pembangunan ekowisata dan agrowisata desa	Terlaksananya pembangunan	Penikenek	1 paket	Dinas Parekraf		√	
	Nagawutung		Pembuatan peta jalan pariwisata desa (Road Map)	Tersedianya Road Map	Penikenek	1 paket	Dinas Parekraf	√		Penyusunan Road Map calon Desa Wisata

NO	Kecamatan	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Akomodir APBD	Diluar APBD	Keterangan
	Nagawutung		Pembangunan Sarpras Pariwisata milik desa (wisata terapi garam dan pantai santigi)	Tersedianya Sarpras pariwisata desa	Lolong	2 paket	Dinas Parekraf	√		Interkoneksi Aktifitas Wisata di Desa dengan Event Rally Wisata Bahari
	Nagawutung		Pengembangan lokasi wisata air panas wai knating	Terlaksananya Pengembangan	Labalimut	1 paket	Dinas Parekraf		√	
	Nagawutung		Pembuatan tempat parkiran dan kuliner di Pariwisata Lodovavo	Tersedianya tempat parkiran	Atawai	1 paket	Dinas Parekraf		√	
	Nagawutung		Pembangunan pariwisata desa	Terlaksananya pembangunan pariwisata desa	Bolibean	1 paket	Dinas Parekraf		√	
	Nagawutung		Lanjutan/Peningkatan wisata air terjun Lodovavo	Terlaksananya peningkatan wisata air terjun	Atawai	1 paket	Dinas Parekraf	√		Interkoneksi Aktifitas Wisata di Desa dengan Event Rally Wisata Bahari
	Omesuri		Pelatihan Pengelolaan BUMDES		22 Desa	1 Paket	Dinas Parekraf			Dinas PMD
	Omesuri		Pengadaan Mesin Jahit		Desa Leubatang	1 Paket	Dinas Parekraf			Dinas Koperindag
	Omesuri		Pemberian Ijin Usaha/ SITU/SUP untuk Kelomok Usaha		22 Desa	1 Paket	Dinas Parekraf			Dinas Perijinan
	Ile Ape		Peningkatan Lokasi Wisata Pantai dan Kawasan Mangrov	10 Desa	Muruona, Waipukang, Kolontobo, Riangbao Petuntawa, Beutaran Tagawiti , Dulitukan, Kolipadan dan Palilolon,Waowala		Dinas Parekraf		√	
	Ile Ape		Peningkatan Lokasi Wisata Budaya Kampung Adat Lewotolok	Komunitas Lewotolok	Amakaka		Dinas Parekraf			Dinas Porabud
	Ile Ape		Pembangunan Jeti Wisata Mangrov	10 Desa	Muruona, Waipukang, Kolontobo, Riangbao Petuntawa, Beutaran Tagawiti , Dulitukan, Kolipadan dan Palilolon		Dinas Parekraf		√	
	Wulandoni		Destinasi Pariwisata	Desa	Lamalera A, Lamalera B, Wulandoni dan Tapobali		Dinas Parekraf	√		Interkoneksi Aktifitas Wisata di Desa dengan Event Rally Wisata Bahari Pesona 4 Teluk

NO	Kecamatan	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Akomodir APBD	Diluar APBD	Keterangan
	Wulandoni		Ekowisata	Desa	Puor dan Puor B		Dinas Parekraf		√	
	Wulandoni		Promosi Pariwisata	Desa	Lamalera A dan B		Dinas Parekraf	√		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya
	Wulandoni		Lampu Jalan Wisata	Desa	Lamalera A dan B		Dinas Parekraf		√	
	Ile Ape Timur	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Ili Lolo	Todanara		Dinas Parekraf	√		1. Interkoneksi Aktifitas Wisata di Desa dengan Event Rally Wisata Bahari Pesona 4 Teluk 2. Penyusunan Road Map calon Desa Wisata
	Ile Ape Timur	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/Desa	Pantai Pasir Putih	Bao Lali Duli		Dinas Parekraf	√		Penyusunan Road Map calon Desa Wisata
	Ile Ape Timur	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembanagan Sanggara seni	kelompok	Lamatokan		Dinas Parekraf	√		1. Interkoneksi Aktifitas Wisata di Desa dengan Event Rally Wisata Bahari Pesona 4 Teluk 2. Penyusunan Road Map calon Desa Wisata
	Ile Ape Timur	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/Desa	Renovasi Lopo Wei Metin	Jontona		Dinas Parekraf	√		1. Interkoneksi Aktifitas Wisata di Desa dengan Event Rally Wisata Bahari Pesona 4 Teluk 2. Penyusunan Road Map calon Desa Wisata

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Baseline	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja	Kunjungan Wisata (orang)	2.649	4.500
			Lama kunjungan Wisata (hari)	3	3
			PAD sektor pariwisata (Rp)	160.301.625	65.000.000

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Tahun 2024 sebanyak 4 Program, 14 Kegiatan, 48 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 3.251.120.448,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri, dari 8 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.103.752.296,-.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, terdiri dari 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 804.348.166,-.
3. Program Pemasaran Pariwisata, terdiri dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 0,-.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 343.019.986,-.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						5.261.120.440,00							6.333.758.276,00	
	0	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.261.120.440,00							6.333.758.276,00	
	5.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						5.261.120.440,00							6.333.758.276,00	
1	5.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*	-			100 %	2.103.792.296,00						-	3.037.237.866,00	
	5.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			12 Laporan	30.374.100,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	5.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5.959.219,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	5.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.745.688,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	5.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.559.268,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	5.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.137.368,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	5.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.562.368,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	5.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	6.026.138,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.866.679.148,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	2.518.126.320,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.733.752.111,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM,DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara		2.331.461.765,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	112.927.039,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		172.042.360,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya pendatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			5 Laporan	26.619.130,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	43.333.320,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.03.0008	Pendatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Pendatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	26.619.130,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		36.333.320,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah*	-			1 Laporan	8.850.140,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	8.850.140,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*	-			100 Persen	84.305.861,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	84.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.577.520,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		2.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.760.341,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.100.000,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		2.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60.868.000,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	-			20 Persen	0,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Laporan	29.878.900,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	496.295.200,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.700.000,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		473.112.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.716.400,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		20.583.200,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.412.500,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		2.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Paket	53.065.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	85.130.100,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	51.845.000,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara		80.130.100,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Meber														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.450.000,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		5.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah kunjungan wisata**	-			**13600 Orang**	**804.345.186,00**						-	**927.623.510,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata**	-			3 Lokasi	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat	-	152.623.510,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0005	Pengelolaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan lokal 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		102.023.510,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.36.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata*	-			4 Kawasan	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.36.02.2.02.0004	Pengelolaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbuat dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.36.02.2.02.0007	Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Lokasi	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata*	-			3 Lokasi	804.348.166,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat	-	675.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	10.000.000,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	784.346.166,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Lama kunjungan wisata***	-			**3 Hari**	**0,00**						-	**365.679.300,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	-			5 Laporan	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat	-	358.679.300,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		33.744.300,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		149.035.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	**3.26.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Lama kunjungan wisata***	-			**3 Hari**	**343.019.999,00**						-	**700.147.470,00**	
	3.26.06.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*	-			100 Orang	243.019.999,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	552.485.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.06.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi/ Konsumsi, dan Konservasi/ Ekonomi Kreatif				0 Laporan	0,00	Kab. Lomboata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha		70.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.06.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM/ Ekonom/ Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	197.957.300,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				30 Orang	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				75 Orang	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha		217.485.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				30 Orang	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	45.062.677,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Terlaksananya Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif*	-			30 Orang	100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	107.962.470,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha		107.962.470,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	JUMLAH							3.201.120.446,00							6.033.758.276,00	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Lembata,

Yakobus Andreas Wuwur, SP. Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19730718 199903 1 008

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, hasil penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata adalah perangkat daerah yang melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

Dokumen perencanaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah rencana strategis dan rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dokumen perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk 4 (empat) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja

   Meliputi pembentukan Tim Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim, penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja

   Rancangan Awal Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata disusun berpedoman pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Hasil Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Lembata tahun lalu (Tahun 2022) dan hasil Evaluasi Renja tahun berjalan (Tahun 2023).

3. Penyusunan Rancangan Renja

   Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah Nomor :

   tanggal 09 Maret 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrembang RKPD di Kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir Renja

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukan pada gambar 1.1. di bawah ini

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah:

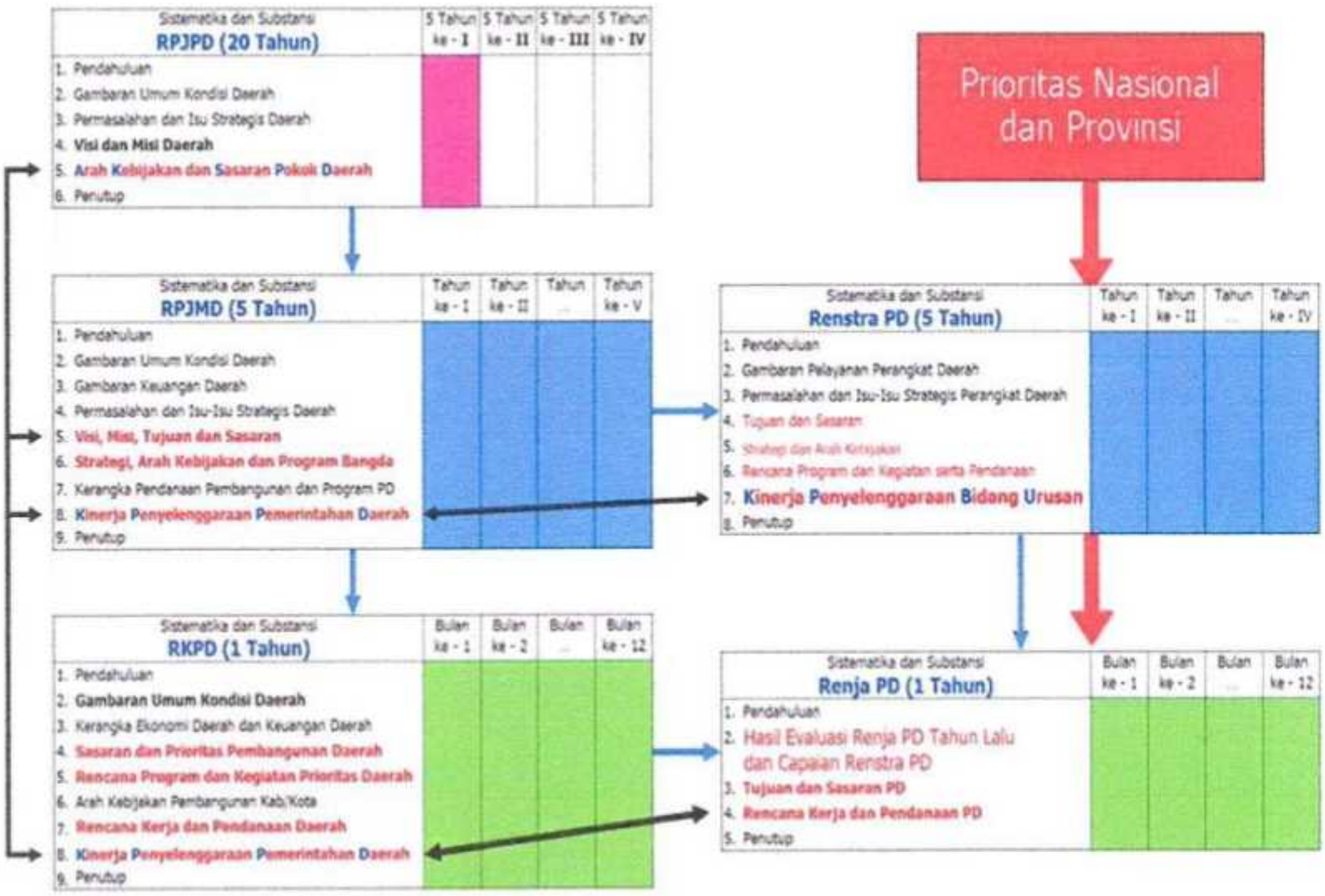

Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja Perangkat Daerah hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 Tindak Lanjut Renja Dalam Penyusunan APBD:

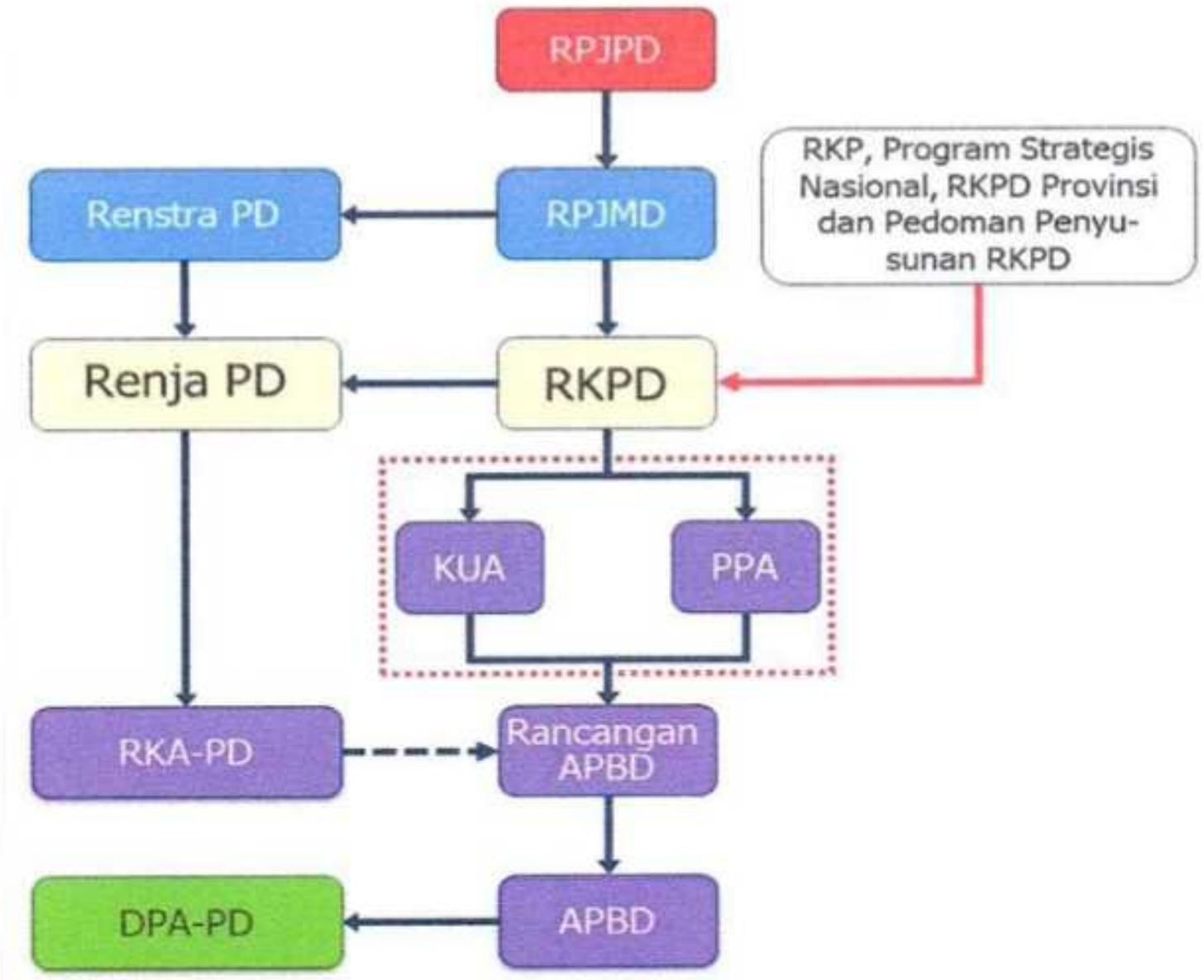

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Nomor 92 Tahun 2023);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata. (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 25).
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 24).
15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 24).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan RPJMD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur pengawasan urusan pemerintahan dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan Renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi tidak perlu lagi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 dapat dilihat pada **tabel 2.1** berikut ini:

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten /Kota
Renja SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata
Periode Pelaksanaan Triwulan IVTahun Anggaran 2022

Kode Rekening						Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Peran (gunting) oleh
													I		II		III		IV									
1							2		3	4	5				6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=6+12		14 = 13/5 x 100%		15
								k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k			DKP
							DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		101,311	36,728,498,958	25,727	32,857,993,729	34,238	4,979,805,276	21	469,014,935	9,672	1,540,675,731	75,590,930	622,371,434	76,958,109	600,754,837	152,574,832	3,452,716,837	152,984,559	36,283,572,467		0.99	
3	33						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		20,995	20,295,543,216	2,749	19,331,764,066	8,500	963,779,150	-	-	9,509	992,640,950	2,000	61,137,206	-	-	8,000	963,778,150	11,249	20,295,542,216	0.38	1.00	
3	33					Tersalurkannya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG PERPUSTAKAAN	Meningkatkan Pengelolaan perpustakaan Daerah	20,995	20,295,543,216	1	19,331,764,066	8,500	963,779,150	-	-	9,509	992,640,950	2,000	61,137,206	-	-	8,000	963,778,150	8,501	20,295,542,216	0.28	1.00	
3	33	2	2.01				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikelola	20,010	10,003,953,141	1	9,040,172,091	8,500	963,779,150	-	-	8,509	992,640,950	2,000	61,137,206	-	-	8,000	963,778,150	8,501	10,003,951,141	0.28	1.00	
3	33	2	2.01	01			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	####	

Kode Rekening					Uraian Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Paraf [illegible] evalu
														I		II		III		IV								
1			2		3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=6+12		14 = 13/5 x 100%		15
								k		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	K	Rp	DKP
2	23	2	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam rangka pelaksanaan standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangannya	eks	500	2.558.809.440	4.000	2.558.809.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500	2.558.809.440	9.00	1.00	
2	23	2	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah kabupaten/kota	orang	1.000	198.429.657	62	198.429.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	198.429.657	0.01	1.00	
2	23	2	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/kota yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	perpust	45	408.226.750	702	408.226.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702	408.226.750	15.60	1.00	

Kode Rekening						Uraian/Sub Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Ponan ggung awab
															I		II		III		IV								
1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=9+12		14 = 13/5 x 100%		15
									k		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	K	Rp	OK/*
2	23	2	2 01	26		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Diolah dan Dikembangkan untuk Meningkatkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eks	23,000	6,760,445,590	40,000	3,001,666,445	5,000	963,779,150	-	-	5,300	992,040,300	2,000	61,137,200	-	-	5,500	963,779,150	15,300	6,705,444,595	0.66	1.00	
2	23	2	2 01	28		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	desa	63	73,041,595	0	72,041,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	72,041,595	0.00	1.00	
2	23	2	2 02	-		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta gemar membaca di Daerah		5,385	16,291,091,075	0	14,291,091,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16,291,091,075	-	1.00	
2	25	2	2	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Upaya pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan khusus serta masyarakat	orang	1665	491,535,075	1	491,535,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	491,535,075	0.00	1.00	
2	23	2	2	02		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kabupaten/Kota	unit	3,000	9,800,056,000	1,200	9,800,056,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	9,800,056,000	0.37	1.00	

Kode Rekening						Uraian/Sub Uraian Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Paran ng/ung awab
															I		II		III		IV								
1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =6+8+10+11		13=6+12		14 = 13/5 x 100%		15
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	R	Rp	DKP
2	34					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			121,316	17,606,364,437	4	13,999,358,309	25,716	3,197,035,128	21	469,016,535	172	638,937,791	75,578,050	771,134,254	76,986,100	680,764,037	152,580,532	2,520,940,687		15,998,330,271	-	0.84	
2	34	0 1			Pelaksanaan pelayanan pelayanan administrasi pemerintahan dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		121,285	15,958,057,001	20,417	13,026,734,133	25,716	3,029,322,848	21	467,644,535	172	638,937,791	7,572	771,134,254	7,781	675,183,679	15,019	2,451,990,329		13,997,694,462	-	0.93	
2	34	0 1	01 .0 1.	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		70	137,320,720	1	108,883,690	14	26,450,030	1	1,725,000	8	20,562,200	4	5,073,250	2	1,000,000	15	28,410,450	68	137,291,140	0.97	1.00	
2	34	0 1	01 .0 1.	01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaan perangkat daerah	dok	15	47,571,585	9	42,568,675	3	4,992,810	1	600,000	1	3,099,000	1	1,293,600	-	-	3	4,981,000	12	47,909,675	0.80	1.00	
2	34	0 1	01 .0 1.	02		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dok	5	13,054,995	4	8,120,735	1	4,925,260	0.10	675,000	0.50	3,104,000	0.30	1,130,000	0.10	-	1	4,909,000	5	13,029,735	1.00	1.00	
2	34	0 1	01 .0 1.	04		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dok	5	17,741,300	4	12,327,530	1	5,413,770	0.25	400,000	0.50	4,012,500	0.25	400,000	0.25	-	1	5,412,500	5	17,740,030	1.00	1.00	

Kode Rekening						Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Paraf koordinasi perangkat daerah
																I		II		III		IV								
1						2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=6+12		14 = 13/5 x 100%		15
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	K	Rp	OKP
2	24	0 1	01 .0 1.	05			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dok	5	20,270,299	4	12,408,429	1	8,861,860	-	-	0.78	4,219,709	0.22	1,617,290	0.22	1,000,000	1	5,843,450	5	20,251,870	1.84	1.00	
2	24	0 1	01 .0 1.	06			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	20	19,467,516	16	16,319,506	4	3,160,660	-	-	3	2,767,000	1	370,500	-	-	4	3,167,000	20	19,486,006	1.00	1.00	
2	24	0 1	01 .0 1.	07			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	20	19,205,245	16	16,107,515	4	3,097,730	-	-	2	2,797,000	1	300,000	1	-	4	3,097,000	20	19,204,515	1.00	1.00	
2	24	0 1	01 .0 3.				**kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah**		140	11,303,116,262	4	9,137,633,544	28.00	2,164,482,338	6.00	419,701,907	5.36	853,952,373	10.60	643,877,694	6.10	438,915,760	28	2,356,537,044	140	11,194,270,588	1.00	0.99	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022 yang direvisikan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direvisikan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Paraf Koordinasi dan/atau
															I		II		III		IV								
1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=8+12		14 = 13/5 x 100%		15
									a.		a.	Rp.	a.	Rp.	a.	Rp.	a.	Rp.	a.	Rp.	a.	Rp.	a.	Rp.	a.	Rp.	K	Rp.	OKP
1	24	01	01.02.	01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang maretima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	70	10,770,159,605	56	8,757,251,737	14	2,089,877,938	2	496,411,937	0	942,452,373	3	569,242,604	3	280,780,980	14	1,331,332,894	70	10,668,324,631	1.00	0.99	
2	24	01	01.02.	02		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honor yang dibarma dalam pelaksanaan tugas ASN	Bulan	60	434,152,061	48	297,302,061	12	136,750,000	3	13,380,000	-	-	6	72,930,000	3	50,440,000	12	136,750,000	60	434,152,061	1.00	1.00	
3	24	01	01.02.	06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	dok	1	79,960,934	4	83,846,084	1	16,114,850	-	-	0.35	11,460,000	0.65	3,004,800	0.10	1,649,800	1	16,114,600	5	79,960,934	1.00	1.00	
3	24	01	01.02.	07		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	dok	5	11,833,092	4	9,134,042	1	2,699,550	-	-	-	-	1	2,699,550	-	-	1	2,699,550	3	11,833,592	1.00	1.00	
4	24	01	01.03.			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		10	95,753,010	4	52,718,370	2	37,064,640	1	3,600,000	1	3,612,500	1	19,448,000	1	10,200,000	2	37,860,500	20	99,778,870	2.00	1.00	
5	24	01	01.03.	05		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Pengguna (LBPG dan Laporan Barang Pengguna (LBPT) yang Tersedia	dok	10	99,760,010	8	52,718,370	2	37,064,640	0.50	3,600,000	0.50	3,612,500	0.50	19,448,000	0.50	10,200,000	2	37,860,500	10	99,778,870	1.00	1.00	

Kode Rekening						Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Penan ggung jawab
																I		II		III		IV							
1						2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=8+12		14 = 13/5 x 100%		15
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	R	Rp	OKP
3	24	01	2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4	409,567,868	3	409,567,868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	409,567,868	2.00	1.00	
2	24	01	2.04	01			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	tersedianya mesin absensi	unit	1	110,000,000	1	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	110,000,000	1.00	1.00	
1	24	01	2.04	17			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	3	299,567,000	1	299,567,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	299,567,000	0.33	1.00	
3	24	01	2.06				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		120,913	946,120,746	-	705,819,198	25,250	99,301,656	5	4,400,000	55	32,170,680	7,326	9,369,980	7,560	44,326,176	15,145	90,237,750	15,553	848,064,946	0.13	1.00	
4	24	01	2.06	01			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	100	12,147,480	67	10,117,480	32	2,030,000	-	-	9	291,000	-	-	21	1,739,000	30	2,030,000	117	12,137,480	0.73	1.00	
5	24	01	2.06	02			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	820	81,700,344	267	65,571,944	156	16,214,300	-	-	33	8,470,300	23	2,710,000	23	5,021,000	79	16,201,300	346	81,773,244	0.39	1.00	
6	24	01	2.06	05			Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	ltr	120,000	72,202,122	78	52,097,892	29,529	12,104,230	-	-	-	-	7,500	1,345,000	7,500	8,758,750	15,000	10,103,750	19,076	72,201,632	0.53	1.00	
7	24	01	2.06	06			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	jenis	10	37,640,000	4	37,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	37,640,000	0.40	1.00	

Kode Rekening						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Paran (gunag evalu
															I		II		III		IV								
1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=4+12		14 = 13/5 x 100%		15
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	K	Rp	DKI*
2	24	01	2.08	09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	123	642,344,880	3	580,391,880	37	61,953,000	5	4,480,000	12	22,480,000	3	5,336,000	16	30,617,400	37	61,930,700	40	642,248,580	0.33	1.00	
2	24	01	2.07			**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**		15	790,755,080	12	321,767,080	1	408,992,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	321,767,080	0.41	0.41	
2	24	01	2.07	20		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	unit	6	120,000,000	1	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120,000,000	0.10	1.00	
2	24	01	2.07	22		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	6	180,000,000	6	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	180,000,000	0.75	1.00	
2	24	01	2.07	24		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	paket	3	510,755,000	1	41,767,000	1	468,992,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41,767,000	0.33	0.08	
2	24	01	2.08			**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		2,530	904,161,628	1,852	706,179,268	425.0	167,982,360	5	23,670,228	160	21,580,000	134	54,125,000	151	68,606,668	438	167,981,336	2,270	494,160,564	0.56	0.60	
2	24	01	2.08	01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan benda pos	lembar	2500	169,056,643	1,500	80,553,843	400	88,502,800		-	100	21,580,000	100	23,000,000	170	43,922,400	380	88,502,400	2,100	169,056,243	0.87	1.00	
2	24	01	2.08	02		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	bln	60	283,769,661	23	207,914,121	12	75,854,580	5	23,670,228	-	-	6	27,000,000	6	24,603,668	58	75,853,896	58	283,768,017	0.83	1.00	

Kode Rekening						Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Penerima (gender awal)
																I		II		III		IV									
1						2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=8+12		14 = 13/5 x 100%		15
										k		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	R.	Rp	DHP
1	24	0 1	2 08	04			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	jenis	70	31,330,294	39	27,711,294	15	3,825,000	-	-	-	-	12	3,825,000	-	-	15	3,825,000	52	31,536,294	0.74	1.00	
2	24	0 1	2. 08				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		129	595,217,747	79	453,167,757	10	72,045,000	5	14,337,500	3	8,969,108	7	39,280,000	2	12,988,891	17	71,633,259	96	364,801,016	0.74	1.00	
2	24	0 1	2 08	01			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak Pakai, kecuali/selain pajak kendaraan bermotor	unit	74	423,121,400	49	355,331,400	15	67,789,550	5	14,337,500	3	8,969,108	4	39,280,000	2	12,988,891	14	67,393,259	93	422,714,709	0.89	1.00	
2	24	0 1	2 08	06			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis	55	82,096,347	30	77,836,347	3	4,260,000	-	-	-	-	3	4,250,000	-	-	3	4,250,000	33	82,086,347	0.80	1.00	
2	24	0 2				Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah		112	1,981,327,426	29	1,603,624,176	22	77,700,250	-	1,490,000	-	-	-	-	20	75,570,000	20	78,360,358		1,830,635,849	-	0.92	
2	24	0 2	2. 01				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya arsip dinamis kabupaten/kota		2	50,061,354	1	50,061,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,061,354	0.50	1.00	
2	24	0 2	2. 01	02			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Instansi Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	lok	2	50,061,354	1	50,061,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,061,354	0.50	1.00	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Perlu upaya khusus
															I		II		III		IV								
1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=4+12		14 = 13/5 x 100%		15
									k		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	K	Rp	Ket
3	24	0 3	2 02	-		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya arsip statis kabupaten/kota		180	228,141,064	1	180,088,854	20	48,052,210	-	-	-	-	-	-	19	47,336,858	19	47,336,858	19	227,425,712	0.10	1.00	
3	24	0 3	2 02	-	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang diakuisisi, Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	rak	180	228,141,064	1	180,088,854	20	48,052,210	-	-	-	-	-	-	19	47,336,858	19	47,336,858	19	227,425,712	0.10	1.00	
3	24	0 3	2 03	-		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip Tingkat kabupaten/kota		18	1,653,188,293	23	1,623,505,243	2	29,681,050	-	1,410,000	-	-	-	-	2	28,233,500	2	29,643,500	5	1,653,148,743	0.40	1.00	
3	24	0 3	2 03	-	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN	kegiatan	5	226,997,143	1	209,426,193	1	10,060,550	-	-	-	-	-	-	1	10,060,500	1	10,060,500	2	220,386,693	0.20	1.00	
3	24	0 3	2 03	-	02	Pembinaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota	ote	5	1,432,768,150	2	1,414,079,050	1	10,500,100	-	1,410,000	-	-	-	-	1	17,273,000	1	18,083,000	3	1,432,762,050	0.60	1.00	

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagi berikut:

1. Tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan realisasi fisik sebesar 100%, adalah sebagai berikut:
   a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
      1). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
         ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
         ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
      2). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
         ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Tidak ada program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan.
4. Tidak ada program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan.
5. Implikasi merupakan dampak atau kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut:
   - Terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Lembata pada umumnya.
   - Terhadap program kegiatan yang ralisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak pada Laporan Kinerja keuangan Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Kabupaten Lembata.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:
   - Bidang Perencanaan dan Keuangan perlu meningkatakan kompetensi sumber daya aparatur pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
   - Mengoptimalkan fungsi koordinasi antar bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
   - Optimalisasi ketersediaan dan pemafaatan sarana dan prasana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan walaupun belum memadai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hingga tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 2.2** di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan			Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	
2.	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah buku perpustakaan			Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	
3	Jumlah Taman Baca/Perpustakaan.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah taman bacaan.			Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	
4	Arsip yang Terpelihara	Meningkatnya Usaha Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.			100%	100%	100%			100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata, mencakup :

a) Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD antara lain :

Dinas perpustakaan dan kearsipan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberdayakan sumber daya mausia yang meliputi :

1. Kepala Dinas 1 orang
2. Sekretaris 1 orang
3. Kepala Bidang 4 orang
4. Kasubag 1 orang
5. Kelompok Jabatan Fungsional 9 orang
6. Staf 21 orang (PNS 13 orang dan KSO 8 orang)

Sumber daya manusia tersebut dapat memberikan pelayanan prima terutama menggiatkan sosialisasi tentang minat dan budaya baca, agar dapat mengurangi kebodohan dan keterbelakangan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan terhadap pengelolaan kearsipan yang baik dan benar bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi antara lain :

a. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur khusus di Bidang Kearsipan (Arsiparis;
b. Belum adanya pelayanan berbasis digital
c. Belum tertatanya sistem administrasi kearsipan;
d. Belum terdatanya dan tertatanya dokumen/arsip daerah;
e. Kurang sarana dan prasarana penyimpan arsip;

f. Masih rendahnya kualitas pelayanan informasi di bidang kearsipan;

g. Rendahnya kualitas Pelayanan Administrasi Perdinasan;

c) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata antara lain:

1. Tantangan
   - Keterbatasan Sarana/Prasarana di daerah;
   - Terbatasnya dana yang dialokasikan dari APBD untuk melaksanakan Program/ Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan;
   - Sumber daya manusia Pengelola Kearsipan (Arsiparis) masih rendah.
   - Belum ada dukungan dari pemerintah desa dalam mengoptimalkan perpustakaan desa.
2. Peluang
   - Animo masyarakat terhadap minat baca semakin membudaya;
   - Ketersediaan anggaran melalui APBD II meningkat dalam pengembangan perpustakaan daerah;
   - Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan semakin meningkat;
   - Partisipasi masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan dan pengelolaan perpustakaan;
   - Peran serta masyarakat semakin meningkat dalam menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

d) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan perpustakaan masih manual hal ini tidak releval lagi dengan era digitalisasi sekarang ini.
2. Terbatas kapasitas dan kapabilitas Sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan kearsipan.

3. Belum terdata dan tertatanya dokumen kearsipan
4. Rendanya minat baca masyarakat karena kurangnya promosi perpustakaan
5. Pengelolaan perpustakaan belum maksimal.
6. Belum adanya dukungan dari pemerintah desa untuk mengoptimalkan perpustakaan desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sebagaimana tersaji pada **Tabel 2.3** berikut ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analsis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				4,080,514,426					6,193,654,876	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			25%	720,955,931				25%	2,815,761,822	
2	23				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			25%	720,955,931	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			25%	2,815,761,822	
2	23	2	2.01.		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lewoleba, 9 kec.	Jumlah perpustakaan yang dikelolah	30 layanan, 188 perpustakaan, 23.000 eksmplar	405,509,555	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lewoleba, 9 kec.	Jumlah perpustakaan yang dikelolah	31 layanan, 188 perpustakaan, 24.000 eksmplar	2,500,000,000	
2	23	2	2.01.	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Lewoleba	Jumlah Layanan pepustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK berbasis IS020000 (ITSM : Information Technology Service Management	1 layanan	200,000,000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Lewoleba	Jumlah Layanan pepustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK berbasis IS020000 (ITSM : Information Technology Service Management	1 layanan	200,200,000	Renja SKPD
2	23	2	2.01.	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.	Lewoleba, 9 kecamatan	Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	46 perpustakaan * untuk perpustakaan sekolah	10,048,425	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.	Lewoleba, 9 kecamatan	Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 pustakaan	10,058,473	Renja SKPD, usulan masyarakat

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	23	2	2.01.	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lewoleba	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapatkan sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198 orang	107,721,880	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lewoleba	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapatkan sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 orang	107,829,602	Renja SKPD, usulan masyarakat
2	23	2	2.01.	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Lewoleba, 9 kecamatan	Jumlah layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui -peningkatan koleksi	29 layanan	8,246,825	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Lewoleba, 9 kecamatan	Jumlah layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui -peningkatan koleksi	30 layanan	8,255,072	Renja SKPD, usulan masyarakat
2	23	2	2.01.	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Lewoleba	Jumlah bahan perpustakaan yang dicatak dan disediahkan	23.000 eksmplar	79,492,425	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Lewoleba	Jumlah bahan perpustakaan yang dicatak dan disediahkan	24,.000 eksmplar	79,571,917	Renja SKPD
2	23	2	2.02.		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lewoleba	Gemar Membaca yang dibudayakan	46 lokus, 15 0rang, 1 perpustakaan	315,446,376	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lewoleba	Gemar Membaca yang dibudayakan	46 lokus, 15 0rang, 1 perpustakaan	315,761,822	Renja SKPD
2	23	2	2	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Lewoleba	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	64 lokus	112,303,600	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Lewoleba	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	66 lokus	112,415,904	Renja SKPD, usulan masyarakat

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	23	2	2	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Lewoleba	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15 orang	134,647,965	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Lewoleba	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15 orang	134,782,613	Renja SKPD
2	23	2	2	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inkusi Sosial	Lewoleba	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	48 perpustakaan	68,494,811	Pengembangan Literasi Berbasis Inkusi Sosial	Lewoleba	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	60perpustakaan	68,563,306	Renja SKPD, usulan masyarakat
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**			**25%**	**3,359,558,495**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**			**25%**	**3,377,893,053**	
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**		**CAKUPAN PELAYANAN ADMISITRASI PERKANTORAN DAN DALAM MENDUKUNG TUPOKSI PERANGKAT DAERAH**	**25%**	**3,126,945,988**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**		**CAKUPAN PELAYANAN ADMISITRASI PERKANTORAN DAN DALAM MENDUKUNG TUPOKSI PERANGKAT DAERAH**	**25%**	3,130,072,934	
2	**24**	**01**	**01, 02.**		**kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Lewoleba**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**24 orang/bulan,2 dokumen, 1 laporan**	**1,985,174,652**	**kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Lewoleba**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**24 orang/bulan,2 dokumen, 1 laporan**	1,987,159,827	
2	24	01	01. 02.	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lewoleba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/14 bln	1,829,462,516	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lewoleba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/14 bln	1,831,291,979	Renja SKPD

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analsis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	24	01	01. 02.	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lewoleba	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 ndok.	118,788,670	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lewoleba	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok.	118,907,459	Renja SKPD
2	24	01	01. 02.	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lewoleba,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap.	36,923,466	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lewoleba,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap.	36,960,389	Renja SKPD
2	**24**	**01**	**01. 03.**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Lewoleba**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 laporan**	**86,127,583**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Lewoleba**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 laporan**	86,213,711	
2	24	01	01 03.	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	86,127,583	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lewoleba	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap.	86,213,711	Renja SKPD
2	**24**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Lewoleba**	**Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**38 paket, 20 laporan**	**53,505,967**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Lewoleba**	**Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**38 paket, 20 laporan**	53,559,473	
2	24	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lewoleba	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediahkan	36 paket	13,465,715	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lewoleba	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediahkan	36 paket	13,479,181	Renja SKPD
2	24	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lewoleba	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediahkan	2 paket	30,030,252	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lewoleba	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediahkan	2 paket	30,060,282	Renja SKPD

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	24	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lewoleba, 9 kec, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	10,010,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lewoleba, 9 kec, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	10,020,010	Renja SKPD
2	**24**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Lewoleba**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**1 unit**	**798,214,417**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Lewoleba**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**1 unit**	799,012,631	
2	24	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Lewoleba	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	798,214,417	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Lewoleba	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	799,012,631	Renja SKPD
2	24	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Lewoleba**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 laporan**	**112,561,849**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Lewoleba**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 laporan**	112,674,411	
2	24	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kounikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	Lewoleba	TJumlah laporan Penyediaan Jasa Kounikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik yang disediahkan	*2 laporan*	112,561,849	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kounikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	Lewoleba	TJumlah laporan Penyediaan Jasa Kounikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik yang disediahkan	*2 laporan*	112,674,411	Renja SKPD
2	**24**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Lewoleba**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**13 unit**	**91,361,520**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Lewoleba**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**13 unit**	91,452,882	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analsis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	24	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lewoleba	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	91,361,520	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lewoleba	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 jenis	91,452,882	Renja SKPD
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**MENINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH**	**25%**	**207,612,507**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**MENINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH**	**25%**	207,820,120	
2	**24**	**02**	**2.01.**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota**	**Lewoleba, 9 kec.**	**Presentase peningkatan sistem pengelolaan arsip dinamis**	**50 laporan**	**10,155,145**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota**	**Lewoleba, 9 kec.**	**Presentase peningkatan sistem pengelolaan arsip dinamis**	**55 laporan**	10,165,300	
2	24	02	2.01.	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	9 kecamatan	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	50 laporan	10,155,145	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	9 kecamatan	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	55 laporan	10,165,300	Renja SKPD
2	**24**	**02**	**2.02.**		**Pengelolaan Arsip Statis Kabupaten/Kota**	**Lewoleba, 9 kec.**	**presentase peningkatan pengelolaan arsip statis daerah**	**25 arsip**	**67,052,130**	**Pengelolaan Arsip Statis Kabupaten/Kota**	**Lewoleba, 9 kec.**	**presentase peningkatan pengelolaan arsip statis daerah**	**25%**	67,119,182	
2	24	02	2.02.	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Lewoleba, 9 kec.	Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	25 arsip	67,052,130	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Lewoleba, 9 kec.	Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	25 arsip	67,119,182	Renja SKPD

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analsis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	24	02	2.03.		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Lewoleba, 9 kec,**	**Presentase peningkatan layanan arsip melalului Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)**	**144 penggu na, 1 laporan**	**130,405,232**	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Lewoleba, 9 kec,**	**Presentase peningkatan layanan arsip melalului Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)**	**144 penggu na, 1 laporan**	130,535,637	
2	24	02	2.03.	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	144 desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kabupaten/kota Melalui JIKN	144 penggun a	60,500,227	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	144 desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kabupaten/kota Melalui JIKN	144 penggun a	60,560,727	Renja SKPD
2	24	02	2.03.	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Lewoleba, 9 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota	9 laporan	69,905,005	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Lewoleba, 9 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota	1 laporan	69,974,910	Renja SKPD, usulan masyarakat
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**PRESENTASE SISTEM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**25%**	**25,000,000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**PRESENTASE SISTEM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**25%**	**40,000,000**	
2	**24**	**3**	**2.01.**		**Pemusnahan Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Lewoleba**	**Jumlah OPD yang melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun**	**1 arsip, 1 berkas**	**25,000,000**	**Pemusnahan Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Lewoleba**	**Jumlah OPD yang melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun**	**1 arsip, 1 berkas**	**40,000,000**	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analsis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	24	3	2.01.	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Lewoleba	Jumlah OPD yang melakukan penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	1 arsip	15,000,000	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Lewoleba	Jumlah OPD yang melakukan penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	1 arsip	20,000,000	Renja OPD
2	24	3	2.01.	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Lewoleba	Jumlah OPD yang melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	1 berkas	10,000,000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Lewoleba	Jumlah OPD yang melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	1 berkas	20,000,000	Renja OPD

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Renja 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4,080,514,426 terjadi Penurunan target dan beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan yang karena kekurangan dan sehingga tidak bisa dilaksanakan di Tahun 2024 sehingga pagunya menjadi Rp. 6,193,654,876

2. Pada Renja 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdapat 4 program, 11 Kegiatan dan 16 sub kegiatan dimana pada saaat Musrenbang Tingkat Kecamatan ada usulan masyarakat yaitu Pembinaan perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Bimtek Perpustakaan), Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat, Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial, Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah (Bimtek Kearsipan dii semua Desa di Kecamatan Nagawutung yaitu 18 desa.

   Untuk kecamatan wulandoni mengusulkan Perpustakan Keliling dan Digital dan dan Bimtek Pengelola Perpustakaan di semua desa yaitu 15 desa.

   Untuk kecamatan Ile Ape Timur mengusulkan Bimtek pustawan untuk semua desa yaitu 9 desa dan semua seko;ah se kecamatan Ile Ape Timur.

   Untuk Kecamatan Lebatukan mengusulkan pembangunan monumen Stetmen 7 maret (Patung) di Desa Hadakewa namun tidak diakomodir di Renja Dinas Kearsipan dan Perpustkaan Tahun 2024 karena bukan menjadi ranah Dinas Kearsipan dan Perpustkaan.

   Untuk semua semua usulan masyarakat ada dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga semuanya di akomodir namun untuk gusulan pembangunan

monumen Stetmen 7 maret (Patung) di Desa Hadakewa tidak diakomodir, dengan usulan masyarakat di beberapa kecamatan tersebut menambah target capaian dan lokasi pada Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program /kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat Musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan tersebut disesuaikkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata, yang mana melaksanakan urusan pemerintah bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun rencana 2024, terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, seperti termuat pada **tabel 2.4**. dibawah ini:

Tabel 2.4
Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			25%	
2	23				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			25%	
2	**23**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Lewoleba, 9 kec.**	**Jumlah perpustakaan yang dikelolah**	**30 layanan, 188 perpustakaan, 23.000 eksmplar**	
2	23	2	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.	Lewoleba, 9 kecamatan	Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	46 perpustakaan * untuk perpustakaan sekolah	Renja SKPD, usulan 18 Desa se Kecamatan Nagawutung.
2	23	2	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lewoleba	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapatkan sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198 orang	Renja SKPD, usulan 18 Desa se Kecamatan Nagawutung, usulan 15 Desa se Kecamatan Wulandoni, usulan 9 Desa dan 11 sekolah dari Kecamatan Wulandoni.
2	23	2	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Lewoleba, 9 kecamatan	Jumlah layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui -peningkatan koleksi	29 layanan	Renja SKPD, usulan, usulan 15 Desa se Kecamatan Wulandoni.

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6
2	23	2	2	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Lewoleba	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	64 lokus	Renja SKPD, usulan 18 Desa se Kecamatan Nagawutung.
2	23	2	2	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inkusi Sosial	Lewoleba	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	48 perpustakaan	Renja SKPD, usulan 18 Desa se Kecamatan Nagawutung.
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**			**25%**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**MENINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH**	**25%**	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Lewoleba, 9 kec,**	**Presentase peningkatan layanan arsip melalului Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)**	**144 pengguna, 1 laporan**	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Lewoleba, 9 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota	9 laporan	Renja SKPD, usulan masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun terahir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan merupakan tahap terakhir/keempat pelaksanaan RPJPD 2005-2025.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah **"Pemantapan SDM yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, fokus pembangunan diarahkan kepada sumber daya manusia, perekonomian masyarakat, infrastruktur wilayah dan lingkungan serta tata kelola pemerintahan, dengan sasaran dan target yang harus dicapai",** yang diterjemahkan ke dalam 6 (enam) prioritas kebijakan strategis yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
4. Pembangunan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
5. Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Penigkatan pendapatan Daerah..

Adapun agenda pembangunan dan program/kegiatan Prioritas Nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
terdapat pada agenda pembangunan ke empat, yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan", dengan Program prioritas yaitu "Peningkatan Budaya Literasi, dengan kegiatan perioritas yaitu Peningkatan Budaya Literasi serta agenda pembangunan kelima, yaitu "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar", dengan Program Prioritas yaitu transformasi digital, dengan kegiatan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ **Bidang Kearsipan**

  Perlu menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) -TIK dan menjadi simpul jaringan serta mengimplementasikan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, yaitu sebagai berikut:

  1) Penerarapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKNDI) sebagai terobosan baru dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
  2) Mengidentifikasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang belum menerapkan SIKD-TIK, termasuk permasalahannya;
  3) Mendorong pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menerapkan SIKD-TIK dengan menerbitkan suatu kebijakan;
  4) Mengidentifikasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang belum menjadi simpul JIKN;

  5). Memastikan ketersediaan seluruh perangkat yang diperlukan, misalnya Arsiparis, infrastruktur, Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan lain-lain.

✓ **Bidang Perpustakaan**

Perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan perpustakaan digital (e-library);
2. Memfasilitasi masyarakat/pelajar/siswa dalam mendorong ekonomi masyarakat dan mengembangkan bakat pelajar/siswa melalui kegiatan-kegiatan;
3. Kerja sama pegiat literasi dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat;
4. Pengembangan koleksi bahan perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Peningkatan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga perpustakaan daerah;
7. Penguatan kerjasama antar organisasi pemerintah daaerah yang dengan kerangka regulasi daerah;
8. Pemasyarakat kegemaran membaca melalui sosialisasi, pusling, pembinaan pada perpustakaan desa/sekolah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan perwujudan Sasaran Prmbangunan Daerah yang lebih spesifik dan teratur, yang mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada **tabel 3.1** di bawah ini::

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya peningkatan Index literasi masyarakat	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan.	Ada
2.	Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah buku perpustakaan	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Ada
3		Meningkatnya Minat Baca Masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya pembinaan jumlah taman bacaan	Jumlah Taman Baca/Perpustakaan.	Ada
4	Terwujudnya pengelolaan arsip yang lestari.	Meningkatnya pelestarian arsip daerah	Arsip yang Terpelihara	100%

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian tersebutvDinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki inovasi-inovasi yang tertuang di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain : ***1). Sambal Terasi, 2). E-Pus dan 3). Srikandi.*** Selanjutnya rancangan awal SKPD program/kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunya 3 (tiga) rumusan program, 11 (sebelas) kegiatan program, 17 (tujuh belas) sub kegiatan, berikut adalah rangkain program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan.

BAB IV
RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata dan RPJMD Kabupaten Lembata.

Berikut rumusan program. Kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata, dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

MATRIKS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				5,132,322,387			5,676,597,960
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			25%	2,463,631,927		25%	3,005,238,809
2	23				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH		25%	2,463,631,927		25%	3,005,238,809
2	**23**	**2**	**2.01.**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perpustakaan yang dikelolah**	**Lewoleba, 9 kec.**	**31 layanan, 23.000 eksmplar**	**1,958,897,852**		**31 layanan, 25.000 eksmplar**	**2,500,000,000**
2	23	2	2.01.	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan pepustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management	Lewoleba	1 layanan	11,688,076	Renja SKPD	1 layanan	11,699,764
2	23	2	2.01.	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui - peningkatan koleksi	Lewoleba, 9 kecamatan	30 layanan	183,781,301	Renja SKPD, usulan masyarakat	30 layanan	183,965,082
2	23	2	2.01.	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujdkan keberagaman koleksi perpustakaan	Lewoleba	23.000 eksmplar	1,763,428,475	Renja SKPD	25,.000 eksmplar	1,765,191,903
2	**23**	**2**	**2.02.**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Gemar Membaca yang dibudayakan**	**Lewoleba**	**64 lokus, 150rang, 48 perpustakaan**	**504,734,075**	**Renja SKPD**	**64 lokus, 180rang, 48 perpustakaan**	**505,238,809**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	23	2	2	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lewoleba	64 lokus	165,354,075	Renja SKPD, usulan masyarakat	64 lokus	165,519,429
2	23	2	2	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Lewoleba	15 orang	191,663,265	Renja SKPD	18 orang	191,854,928
2	23	2	2	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inkusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Lewoleba	48 perpustakaan	147,716,735	Renja SKPD, usulan masyarakat	48 perpustakaan	147,864,452
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**			**25%**	**2,668,690,460**		**25%**	**2,671,359,150**
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PELAYANAN ADMISITRASI PERKANTORAN DAN DALAM MENDUKUNG TUPOKSI PERANGKAT DAERAH**		**25%**	**2,641,381,424**		**25%**	**2,644,022,805**
2	**24**	**01**	**01. 01.**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Lewoleba**	**2 dok**	**70,785,550**	**2 dok**	**2 dok**	**70,856,338**
2	24	01	01. 01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lewoleba	6 dok	70,785,550	Renja SKPD	2 dok	70,856,338
2	**24**	**01**	**01. 02.**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Lewoleba**	**29 orang/bulan,2 dokumen, 1 laporan**	**2,246,550,875**		**24 orang/bulan,2 dokumen, 1 laporan**	2,248,797,426
2	24	01	01. 02.	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lewoleba	29 orang/ bln	2,133,868,425	Renja SKPD	29 orang/ bln	2,136,002,293

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	24	01	01. 02.	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lewoleba	1 dok.	100,080,000	Renja SKPD	1 dok.	100,180,080
2	24	01	01. 02.	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lewoleba,	1 lap.	12,602,450	Renja SKPD	1 lap.	12,615,052
2	**24**	**01**	**01. 03.**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Lewoleba**	**2 laporan**	**96,183,840**		**2 laporan**	96,280,024
2	24	01	01. 03.	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyuaunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Lewoleba	2 laporan	96,183,840	Renja SKPD	2 lap.	96,280,024
2	**24**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Lewoleba**	**36 paket, 20 laporan**	**19,005,000**		**38 paket, 20 laporan**	**19,024,005**
2	24	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dann perlengkapan kantor yang disediakan	Lewoleba, 9 kec, Kupang, Jakarta	36 ;paket	10,000,000	Renja SKPD	36 ;paket	10,010,000
2	24	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lewoleba, 9 kec, Kupang, Jakarta	20 laporan	9,005,000	Renja SKPD	20 laporan	9,014,005
2	**24**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**Lewoleba**	**1 unit**	**32,225,000**		**3 unit**	32,257,225
2	24	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Lewoleba	1 unit	32,225,000	Renja SKPD	3 unit	32,257,225
2	24	01	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Lewoleba**	**2 laporan**	**112,560,572**		**2 laporan**	112,673,133

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	24	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kounikasi, Sumber Daya Air dan Listik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kounikasi, Sumber Daya Air dan Listik yang disediahkan	Lewoleba	*2 laporan*	112,560,572	Renja SKPD	*2 laporan*	112,873,133
2	**24**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Lewoleba**	**13 unit**	**64,070,587**		**13 unit**	64,134,658
2	24	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Lewoleba	13 unit	64,070,587	Renja SKPD	13 jenis	64,134,658
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**MENINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH**		**25%**	**27,309,036**		**25%**	27,336,345
2	**24**	**02**	**2.01.**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota**	**Presentase peningkatan sistem pengelolaan arsip dinamis**	**Lewoleba, 9 kec.**	**50 laporan**	**15,008,675**		**50 laporan**	15,023,684
2	24	02	2.01.	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	9 kecamatan	50 laporan	15,008,675	Renja SKPD	50 laporan	15,023,684
2	**24**	**02**	**2.02.**		**Pengelolaan Arsip Statis Kabupaten/Kota**	**presentase peningkatan pengelolaan arsip statis daerah**	**Lewoleba, 9 kec.**	**25 arsip**	**12,300,161**		**25 arsip**	12,312,461
2	24	02	2.02.	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Lewoleba, 9 kec,	25 arsip	12,300,161	Renja SKPD	25 arsip	12,312,461

Lewoleba, 26 September 2023
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,

Anselmus Asan Ola, AP,M.Si
NIP. 19720709 199311 1 002

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2023 adalah merupakan penyusunan Rencana Pembangunan satu tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut :

1. Catatan penting dalam pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2023;
   a) Setiap Kepala Bidang bersama Kasubag dan Jabatan Fungsional dibawah koordinasi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.
   b) Para Kepala Bagian harus saling berkoordinasi untuk menjamin sinergitas penyusunan RENJA Tahun 2023 dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 agar semua program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENJA Tahun 2023 dapat dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 dan dilaksanakan.
   c) Berkaitan dengan pendanaan untuk pembiayaan program/kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata tahun 2023 namun tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2. Kaidah – kaidah pelaksaan sebagai berikut :

   a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2023 serta diserasikan dengan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023.

   b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupatern Lembata berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023

   c. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2023 serta diserasikan dengan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023.

3. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2023:

   a. Setiap Kepala Bagian sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan harus mendalami RENJA Tahun 2023 secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan persetujuan komisi DPRD sebagai mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

   b. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai koordinator berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penyerasian final dalam RAPBD setelah disetujui oleh komisi DPRD terkait dan Badan Anggaran DPRD.

   c. Kepala Bidang dan Sekretaris menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas setiap Triwulan dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengesahan dari Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah.

d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

e. Mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan membuat laporan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata sebagai Pengguna Anggaran setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lewoleba, 26 September 2023

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Anselmus Asan Ola, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19720709 199311 1 002

Rencana Kerja (RENJA)

TA. 2024

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LEMBATA 2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Dinas Perikanan untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Perikanan dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.

b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perikanan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3					**DINAS PERIKANAN**								4.171.452.358	564.421.366	14%
3	25	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	100	Persentase					3.039.440.802	561.601.366	18%
3	25	1	02:01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	48	Dokumen					17.628.780	-	0%
3	25	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen					4.670.000		0%
3	25	1	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen					8.461.680		0%
3	25	1	02:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen					4.408.500		0%
3	25	1	02:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen							0%
3	25	1	02:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen							0%
3	25	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan					8.098.680		0%
3	25	1	02:02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	100	Persentase					2.475.644.782	462.525.510	19%
3	25	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Orang/bulan					2.847.219.162	462.865.510	16%
3	25	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen					122.412.610	30.170.000	25%
3	25	1	02:02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan					2.894.880		0%

3	25	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Laporan					6.118.630		0%
3	**25**	**1**	**02:03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**16**	**Laporan**					**26.542.530**	**7.115.000**	**27%**
3	25	1	02:03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dokumen							0%
3	25	1	02:03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Laporan					26.542.530	7.115.000	27%
3	**25**	**1**	**02:05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya penataan pegawai perangkat daerah**	**4**	**Laporan**					**5.089.630**	-	0%
3	25	1	02:05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen					5.089.630		0%
3	25	1	02:06	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Orang							0%
3	**25**	**1**	**02:06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**100**	**Persentase**					**199.989.880**	**22.680.000**	**11%**
3	25	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1.463.600		0%
3	25	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket					23.216.880		0%
3	25	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket					23.495.400		0%
3	25	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen							0%
3	25	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan					151.814.000	22.680.000	15%
3	**25**	**1**	**02:07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**25**	**Persentase**					**7.200.000**	-	0%
3	25	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit							#DIV/0!
3	25	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	Unit							#DIV/0!
3	25	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	Unit					7.200.000		0%

3	25	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit							0%
3	25	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit							0%
3	**25**	**1**	**02:08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**48**	**Laporan**					219.495.200	54.607.106	25%
3	25	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan					195.600.000	52.500.000	27%
3	25	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan					22.340.200	2.107.106	9%
3	25	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan					1.555.000	-	0%
3	**25**	**1**	**02:09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persentase**					**87.850.000**	**14.673.750**	17%
3	25	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	Unit					74.160.000	9.748.750	13%
3	25	1	02:09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit							0%
3	25	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit					10.250.000	4.975.000	49%
3	25	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit							0%
3	25	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52	Unit					2.150.000	350.000	16%
3	25	1	02:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit					1.280.000		0%
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**9500**	**Ton**					**695.495.102**	**2.820.000**	0%
3	**25**	**3**	**02:01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**terwujudnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**9500**	**Ton**					**300.000.100**	**2.820.000**	1%
3	25	3	02:01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	Dokumen							0%
3	25	3	02:01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	80	unit					300.000.100	2.820.000	1%

3	25	3	02:01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20	Unit								0%
3	**25**	**3**	**02:02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**terwujudnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	120	**orang**					395.495.002	-		0%
3	25	3	02:02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	120	Orang					395.495.002			0%
3	25	3	02:02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0	Unit Usaha								0%
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	9500	**Ton**					436.516.454	-		0%
3	**25**	**04**	**2.03**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Kelompok**					436.516.454	-		0%
3	25	04	2.05	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	200	Kelompok					825.000.108			0%
3	25	3	02:02	02	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	200	Kelompok					111.516.346			0%
3	**25**	**4**	**02:03**		**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	100	**persentase**								0%
3	25	4	02:03	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	40	Rekomendasi								0%
3	**25**	**4**	**02:04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**terlaksananya pembudidayaan ikan**	9500	**Ton**								0%
3	25	4	02:04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokuman								0%
3	25	4	02:04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40	unit								0%
3	25	4	02:04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	120	Orang								0%
3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial**	5/10	**Point**								0%
3	**25**	**5**	**02:01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota**	**terlaksanya pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota**	100	**Persentase**								0%

3	25	5	02:01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	16	Dokumen							0%
3	25	5	02:01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	16	Dokumen							0%
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Konsumsi Ikan**	4750	**Ton**							0%
3	**25**	**6**	**02:01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha**	200	**Dokumen**							0%
3	25	6	02:01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	200	Dokumen							0%
3	**25**	**6**	**02:02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanna bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil**	120	**unit usaha**							0%
3	25	6	02:02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	120	Unit Usaha							0%
3	**25**	**6**	**02:03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**tersedianya bahan baku industri pengolahan iken**	8	**jenis**							0%
3	25	6	02:03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.750	Ton							0%
3	25	6	02:03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	120	Pelaku Usaha							0%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi program dan kegiatan tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
1.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (Persentase)				10,19	11,2	12,33		10,19	11,2	12,33	
2.	Produksi perikanan (ton)				8000	8500	9000		8000	8500	9000	
3.	Rasio kawasan lindung perairan (Point/M2)				20/492,80	20/492,80	20/492,80		20/492,80	20/492,80	20/492,80	
4.	Konsumsi ikan dan Cakupan bina kelompok nelayan				50	50	50		50	50	50	
5.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan				90/400	90/400	90/400		90/400	90/400	90/400	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perikanan s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan :
   - Belum optimalnya produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan;
   - Belum optimalnya produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan;
   - Belum meningkatnya pengawasan dan perlindungan perikanan berbasis kearifan lokal;
   - Regulasi Pengawasan Kelautan tidak ada mengakibatkan maraknya terjadi pencurian ikan;
   - Belum optimalnya kapasitas pengolahan dan pemasaran perikanan menuju industrialisasi perikanan.
b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda :
   - Tantangan :
   - Terjadinya ilegal fishing yang semakin marak karena kewenangan penanganan masalah ini merupakan kewenangan propinsi;
   - Terjadinya *transhipment* dimana transaksi ikan terjadi ditengah laut dan mengakibatkan tidak terhitungnya total produksi perikanan secara lebih tepat;
   - Keterbatasan bahan baku pengolahan perikanan;
   - Tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan karena semakin ketatnya persaingan pasar perikanan.
c. Peluang :
   - Dukungan Pemerintah dalam kebijakanan dan implementasinya pada sub sektor perikanan sebagai sektor basis semakin besar;
   - Teknologi dan inovasi perikanan yang semakin berkembang;
   - Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil perikanan semakin tinggi;
   - Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang perikanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, adalah :

- PDRB sub sektor perikanan belum optimal;
- Produksi perikanan tangkap belum maksimal;

- Penyediaan sarana prasarana perikanan budidaya belum memadai;
- Pengawasan dan perlindungan perikanan berbasis kearifan lokal belum maksimal;
- Kapasitas pengolahan dan pemasaran perikanan menuju industrialisasi perikanan belum optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perikanan sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Review Terhadep Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PERIKANAN				5.601.203.053	**DINAS PERIKANAN**				4.577.862.263	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lembata	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	100 Persen	3.230.819.053	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Lembata	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	100 Persen	2.865.840.602	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	60.000.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	17.628.780	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	4.670.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.461.630	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.403.200	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	5.093.650	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	100 Persen	2.530.679.303	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	100 Persen	2.476.644.782	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	2.351.121.992	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	2.347.219.162	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	165.486.390	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	122.412.610	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.894.380	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	3.116.630	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100 Persen**	**86.992.800**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100 Persen**	**26.842.830**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		59.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	21.992.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	26.842.830	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Terlaksananya penatan pegawai perangkat daerah**	**100 Persen**	**10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Terlaksananya penatan pegawai perangkat daerah**	**100 Persen**	**5.089.630**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	5.089.630	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Terlaksananya penatan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**100 Persen**	**182.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Terlaksananya penatan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**100 Persen**	**199.989.880**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.463.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	23.216.880	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	23.495.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	151.814.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**40.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**7.200.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	60.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	7.200.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**288.908.200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**26.896.200**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	232.072.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24.536.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	22.240.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.656.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	101.840.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Lembata	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	107.880.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	41.840.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	94.160.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara			Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	10.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	2.150.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1.290.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Lembata	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**5000 ton**	**645.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Kab. Lembata	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**5000 ton**	**909.641.827**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lembata	**terwujudnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**5000 ton**	**467.000.000**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Lembata	**terwujudnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**5000 ton**	-	

	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Lembata	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		30.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Lembata	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Lembata	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 unit	350.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Lembata	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 unit	-	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Lembata	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		72.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Lembata	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	**terwujudnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**30 orang**	**186.000.000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Lembata	**terwujudnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**30 orang**	**939.641.827**	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Lembata	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 orang	99.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Lembata	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 orang	939.641.827	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Lembata	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		87.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Lembata	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Lembata	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**8000 ton**	**367.354.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Kab. Lembata	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**8000 ton**	**740.788.173**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Lembata	**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil**	**9 kelompok**	-	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Kab. Lembata	**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil**	**9 kelompok**	740.788.173	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Lembata	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	4 kelompok	-	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Lembata	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	4 kelompok	530.788.173	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Lembata	Jumlah Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 kelompok	-	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Lembata	Jumlah Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 kelompok	210.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	**terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		50.000.000	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Lembata	**terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Procedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		50.000.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Procedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Lembata	**terlaksananya pembudidayaan ikan**		307.354.000	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Kab. Lembata	**terlaksananya pembudidayaan ikan**		-	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		55.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		766.354.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Lembata	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		56.000.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Lembata	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Lembata	**Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial**		40.000.000	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Kab. Lembata	**Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial**		-	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	**terlaksanya pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**		40.000.000	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Kab. Lembata	**terlaksanya pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**		-	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		20.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		20.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kab. Lembata	**Konsumsi Ikan**		720.000.000	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Kab. Lembata	**Konsumsi Ikan**		31.611.456	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kab. Lembata	**terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha**		60.000.000	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Kab. Lembata	**terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha**		-	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		90.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Lembata	**terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanna bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil**		80.000.000	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Kab. Lembata	**terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanna bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil**		31.611.456	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Lembata	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang pendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 unit usaha	80.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Lembata	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang pendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		31.611.456	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lembata	**tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan**		650.000.000	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Lembata	**tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan**		-	

	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		200.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		430.000.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi			

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Perikanan, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di dalam rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran kebutuhan SKPD.
2. Adanya perubahan indikator dan target kinerja. Hal ini disebabkan karena penyesuaian kembali indikator untuk lebih tepat dan akuntabel.
3. Adanya perubahan sasaran kegiatan
4. Adaya perubahan lokasi kegiatan
5. Adanya perubahan Pagu indikatif

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Perikanan, yang melaksanakan unsur penunjang Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Kecamatan	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Akomodir APBD	Diluar APBD
Nubatukan	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Alat Tangkap (Gillnet)	Masyarakat/Nelayan	Pada, Selandoro, Lewoleba Timur, Lewoleba Utara, Waijarang, Lewoleba Tengah, Nubamado		Dinas Perikanan	√	
Nubatukan	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Pengadaan Bibit Udang dan Ikan Air Tawar	Masyarakat	Desa Pada, Paubokol		Dinas Perikanan	√	
Nubatukan	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*	Fasilitasi Pengolahan Pasca Panen Hasil Perikanan	Kel. Dasa Wisma	Bour, Waijarang, Pada		Dinas Perikanan	√	
Lebatukan	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Bantuan Peralatan Pembudidayaan bagi kelompok Nelayan Lokal (Rumpong,blutu dll)	Klpk. Nelayan, Masyarakat	Desa Pesisir Se Kecamatan Lebatukan	1 Paket	Dinas Perikanan		
Lebatukan	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Perlindungan Ekosistem Laut	Masyarakat	Desa Pesisir Se Kecamatan Lebatukan	1 Paket	Dinas Perikanan		√
Lebatukan	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (bodi/sampan,lempara, ketingting viber)	Klpk. Nelayan, Masyarakat	waienga, Tapolangu, banitobo, lamalela	16 unit	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan/penyuluhan pengolahan budidaya rumput laut	Meningkatnya keterampilan kelompok budidaya	Wuakerong	1 paket	Dinas Perikanan	√	

Nagawutung	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Pengembangan Budidaya Ikan	Terlaksananya pelatihan	Penikenek	1 paket	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan bagi kelompok pemelihara ikan		Ileboli	1 paket	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Bantuan Sarpras bagi kelompok nelayan tangkap dan budibaya rumput laut	Tersedianya Sarpras pariwisata desa	Wuakerong	1 paket	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Bantuan peralatan tangkap ikan	Tersedianya Pelatan	Tewaowutung	1 paket	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Bantuan Sarpras penangkapan ikan (bodi 1 GT)	Tersedianya Sarpras (bodi 1 GT)	Babokerong	15 unit	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Bantuan alat tangkap bagi kelompok nelayan	Tersedianya sarana penangkapan perikanan	Pasir Putih	4 kelompok	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Bantuan peralatan penangkapan ikan: perahu 1 GT (2), mesin tempel 24 PK (2), pukat hanyut 2 in (80pc), tali rompong (8 ball), tali rompong 6 mill (8 ball), pelampung rompong/gabus (8 buah)	Tersedianya Peralatan	Penikenek	1 paket	Dinas Perikanan	√	√
Nagawutung	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Bantuan Sarpras penangkapan ikan (Kapal motor, pukat, Rumpon, dll)	Tersedianya Sarpras	Baobolak	2 unit	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Bantuan sampan fiber		Riabao	20 unit	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Bantuan bibit rumput laut	Tersedianya bibit rumput laut	Baobolak	1 paket	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Bantuan pengembangan budidaya rumput laut	Terlaksananya pengembangan budidaya rumput laut	Babokerong	5 kelompok	Dinas Perikanan	√	

Nagawutung	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Bantuan Sarpras budidaya rumput laut	Tersedianya Sarpras	Riabao	5 Kelompok	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Bantuan bibit rumput laut dan alat bantu	Tersedianya bibit dan alat bantu	Wuakerong	1 paket	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Bantuan Cool Box	Tersedianya Cool Box	Wuakerong, Penikenek	1 paket	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Bantuan budidaya rumput laut (peralatan dan bibit rumput laut)	Tersedianya peralatan dan bibit rumput laut	Duawutun	2 kelompok	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Bantuan/Pengadaan perahu penampung ikan	Tersedianya perahu penampung ikan	Penikenek	1 paket	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Bantuan Sarpras penangkapan ikan (pukat, rumpon, bubu, tali, sampan dll)	Tersedianya sarpras penangkapan ikan	Lolong	1 paket	Dinas Perikanan	√	
Nagawutung	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Pengembangan tambak garam	Tersedianya tambak garam	Lolong	1 paket	Dinas Perikanan		√
Atadei	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	Katekeja	Katekeja	1 Paket	Dinas Perikanan	√	
Atadei	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Pengadaaan Ikan Air Tawar	Nubaboli	Nubaboli	1 Paket	Dinas Perikanan	√	
Atadei	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Kapal Nelayan 5-10GT dan alat tangkap untuk Kelompok Nelayan	Lewogroma	Lewogroma	1 Paket	Dinas Perikanan		√
Atadei	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Kapal Nelayan 5-10GT dan alat tangkap untuk Kelompok Nelayan	Dulir	Dulir	1 Paket	Dinas Perikanan		√
Atadei	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Kapal Nelayan 5-10GT dan alat tangkap untuk Kelompok Nelayan	Nuba Atalojo	Nuba Atalojo	1 Paket	Dinas Perikanan		√

Omesuri	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Fiber Kepiting untuk Kelompok Nelayan		Desa Balauring, Wowowong, Leuwauang Normal I	15 Unit	Dinas Perikanan		√
Omesuri	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Armada dan Alat Tangkap		Desa Balauring, Wowowong, Leuwauang Normal I	15 Unit	Dinas Perikanan	√	
Buyasuri	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Alat Tangkap (Proposa)		Desa Kalikur	1 Paket	Dinas Perikanan	√	
Buyasuri	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Alat Tangkap (Proposa)		Desa Tobotani	1 Paket	Dinas Perikanan	√	

Buyasuri	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Alat Tangkap (Proposa)		Desa Kalikur WL	1 Paket	Dinas Perikanan	√	
Buyasuri	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Alat Tangkap (Proposa)		Desa Bareng	1 Paket	Dinas Perikanan	√	
Buyasuri	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Alat Tangkap (Proposa)		Desa Rumang	1 Paket	Dinas Perikanan	√	
Buyasuri	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Pengadaan Alat Tangkap (Proposa)		Desa Umaleu	1 Paket	Dinas Perikanan	√	
Buyasuri	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Pengembangan Rumput Laut		Desa Bean	1 Paket	Dinas Perikanan	√	
Ile Ape	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Bantuan Armada Nelayan Tangkap	17 Desa	17 Desa	17 Desa	Dinas Perikanan	√	
Ile Ape	*Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Pelatihan Pengelolaan Ikan	17 Desa	17 Desa	17 Kelompok	Dinas Perikanan	√	
Ile Ape	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberdayaan Kelompok Usaha Budidaya Rumput Laut/Sistim Keramba Jaring Apung	17 Desa	17 Desa	17 Desa	Dinas Perikanan	√	
Ile Ape	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*	Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Karang Taruna dalam Pengelolaan dan pemasaran hasil ikan	17 Desa	17 Desa	17 Kelompok	Dinas Perikanan	√	
Wulandoni	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Freezer	Desa	Lamalera B dan A	2 Unit	Dinas Perikanan	√	
Wulandoni	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Coll Box	Desa	Pantai Harapan, Alap Atadei, Tapobali dan Leworaja	20 Unit	Dinas Perikanan	√	

Wulandoni	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Budidaya Ikan Tawar	Desa	Puor dan Puor B		Dinas Perikanan	√	
Ile Ape Timur	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap/Gilnet	Kelompok	9 Desa	9 Kelompok	Dinas Perikanan	√	
Ile Ape Timur	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kelompok	9 Desa		Dinas Perikanan	√	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2023 tersebut, maka arah kebijakan RKP yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan adalah arah kebijakan 1, 3, dan 4 yakni Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim; Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*; dan Mendorong pemulihan dunia usaha. Maka dari itu, untuk menjabarkan arah kebijakan 1,3 dan 4, dinas perikanan merumuskan dalam program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan di*breakdown* kedalam sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil; Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil; dan Pemberiaan Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Penegetahuaan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya perikanan sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya ekonomi sektor perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (Persentase)	11,2%
			Produksi perikanan (ton)	8500
2.	Mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan (Point/M2)	20/492,80
3	Meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan	Meningkatnya daya saing produk perikanan menuju industrialisasi	Konsumsi ikan dan Cakupan bina kelompok nelayan	50%
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	90/400

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappelitbangda Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan di Tahun 2024 sebanyak 5 Program, 16 Kegiatan, 47 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 4.577.852.258,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri dari 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 939.641.827,-.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 740.758.173,-.
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 0,-.
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan, terdiri dari 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 0,-.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						**4.677.362.260,00**							**6.349.951.152,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.677.362.260,00**							**6.349.951.152,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**4.677.362.260,00**							**6.349.951.152,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung layanan perangkat daerah*				**25 Persen**	**2.588.540.302,00**							**3.281.987.152,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Pengonggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 Dokumen	17.628.780,00			-	-	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	4.670.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.481.630,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.403.500,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 Persen	2.475.544.782,00			-	-	Aparatur		2.580.356.433,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.347.219.162,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.409.360.043,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	122.412.610,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		165.456.390,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.894.360,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.119.630,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				4 Laporan	26.542.530,00			-	-	Aparatur		56.952.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	26.542.530,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		21.952.500,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah*				1 Laporan	5.085.630,00			-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.085.630,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*				100 Persen	169.989.880,00			-	-	Aparatur		184.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.463.600,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.219.880,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.495.400,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	151.814.500,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				20 persen	7.200.000,00			-	-	Aparatur		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.500.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7.200.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terselenya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 laporan	25.865.200,00			-	-	Aparatur		258.908.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		232.072.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22.240.200,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		24.336.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.655.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	107.850.000,00			-	-	Aparatur		61.640.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	54.160.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		41.640.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	10.250.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	2.150.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.250.000,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Produksi perikanan kelompok nelayan***	**8500 ton**			**8500 ton**	**908.841.227,00**						**9000 ton**	**845.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Terkelolanya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	9500 Ton			8500 Ton	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan	9000 Ton	757.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Dokumen	0,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				0 Unit	0,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				0 Unit	0,00	- Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		72.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota*	120 orang			60 orang	935.841.627,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan	30 orang	195.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	930.541.827,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0 Unit Usaha	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		87.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	*Produksi perikanan kelompok nelayan*	**8500 ton**			**8500 ton**	**740.765.170,00**						**8000 ton**	**1.046.554.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Produksi perikanan kelompok nelayan (Jumlah)*				8500 Ton	740.765.173,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				20 Kelompok	630.758.173,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelanggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	210.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	100 Persen			100 Persen	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan	100 Persen	30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Rekomendasi	0,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengolaan Pembudidayaan Ikan	terlaksananya pembudidayaan ikan	8000 ton			8000 ton	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan	8000 ton	515.384.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		374.384.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.05	Pemonaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Orang	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		86.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.26.00**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	*Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial*	**20/492,30 M2**			**20/492,30 M2**	**0,00**						**20/492,30 M2**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*terlaksanya pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*	100 Persen			100 Persen	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan	100 Persen	40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Rasio konsumsi ikan***	**60 %**			**60 %**	**31.811.488,00**						**60 %**	**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*terlaksanaanya penerbitan tanda daftar usaha*	50 persen			50 persen	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan	50 persen	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*tersedianya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil*	120 unit usaha			30 unit usaha	31.611.456,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan	30 unit usaha	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				30 Unit Usaha	31.611.456,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan*	6 jenis			2 jenis	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan	2 jenis	680.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Ton	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				0 Pelaku Usaha	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Nelayan		590.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	JUMLAH							**4.077.362.250,00**							**6.348.921.100,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perikanan dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Perikanan.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Lembata,

Lambertus Lengari, S.Pi., MM

Pembina Tk. I

NIP.19671211 200212 1 003

RENCANA KERJA
TAHUN 2024

DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LEMBATA
2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Perangkat
Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata Tahun
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);

10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu

dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN									
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	09				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
2	09	03			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**90 %**							
2	09	03	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam**		**90 %**							
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen							-
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit							-
2	09	03	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**									
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan							-
2	09	04			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**60 %**					60	10	17%
2	09	04	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**									
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	8 Dokumen					2	1	13%
2	09	04	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**									
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen					1	-	-
2	09	05			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**90 %**					90		-
2	09	05	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**									
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen					-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100 %					100	50	50%
3	27	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100 %					100	50	50%
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen					6	3	50%
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen					1	-	-
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen					1	-	-
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen					1	-	-
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen					1	-	-
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan					2	-	-
3	27	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja perangkat daerah**	100 %					100	50	50%
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan					14	6	43%
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen					12	6	50%
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan					1	-	-
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18 Laporan					18	-	-
3	27	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	100 %					100	50	50%
3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen					2	-	-
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan					2	1	50%
3	27	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertaksananya penataan pegawai perangkat daerah**	100 %					100	-	-
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen					1	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang					-	-	-
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**100 %**					**100**	**20**	**20%**
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1	1	100%
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1	-	-
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket					1	-	-
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen					-	-	-
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan					3	1	100%
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**					-	-	-
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit					-		-
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit					-	-	-
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit					-	-	-
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit					-	-	-
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit					-	-	-
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**					**100**	**60**	**60%**
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, Jasa Administrasi dan Jasa	12 Laporan					12	6	50.00%
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan					12	6	50.00%
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan					12	-	-
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan**	**100 %**					**100**	**25**	**25.00%**
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit					34	25	73.53%
3	27	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit						-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit					2		-
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit					1	-	-
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit					1	-	-
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit					1	-	-
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Sektor Pertanian**	**80,900 Ton**					**76,200**	**32,663**	**40.37%**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**									
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan					12	6	50.00%
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme**									
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen					9	5	41.67%
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya**									
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	50 Ekor					-	-	-
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,000 Ton					-	-	-
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Produksi sektor pertanian**	**80,900 Ton**					**76,200**	**32,663**	**40%**
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**									
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	12 Dokumen					12	5	42%
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**									
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit					-	-	-
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100 %**					**100**	**40**	**40%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	04	2.01		**Penanganan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah**									
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan					12	5	42%
3	27	04	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**									
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan					-	-	-
3	27	05			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman**	**100 %**					**100**	**50**	**50%**
3	27	05	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**									
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9 Ha					100	25	278%
3	27	06			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Izin Usaha Pertanian/Peternakan**	**12 Dokumen**					-	-	-
3	27	06	2.02		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Balai Kesehatan Hewan/Pos Kesehatan Hewan**									
3	27	06	2.02	01	Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Balai Kesehatan Hewan/Pos Kesehatan Hewan	Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Balai Kesehatan Hewan/Pos Kesehatan Hewan	12 Dokumen					-	-	-
3	27	07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**100 %**					**90**	**50**	**50%**
3	27	07	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Tertaksananya Penyuluh dan Pelatihan Bagi Petani**	**100 %**					**90**	**50**	**50%**
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Unit					9	6	67%
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Unit					9	4	44%
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	9 Unit					-	-	-
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	4 Unit					1	3	75%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB %			38,21	38,34	38,44	38,54	36,61		38,44	38,54	
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			5	5.25	5.50	5.75	31		5.50	5.75	
3	Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Berkelanjutan (ha)			300	500	700	900	58,972		700	900	
4	Produksi Sektor Pertanian (ton)			71,856	76,200	77,700	79,300	88,082		77,700	79,300	
5	Produksi Sektor Perkebunan (ton)			6,333	6,700	7,000	7,400			7,000	7,400	
6	Produksi Sektor Peternakan (Kg)			25,755	28,330	31,162	34,279	316,661		31,162	34,279	
7	Ketersediaan Energi Per Kapita (%)			174.5	175	175.5	176	219.30		175.50	176	
8	Ketersediaan Protein Per Kapita (%)			185.5	190	190.5	191	155.80		190.5	191	
9	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)			50.76	50.85	50.90	50.95	50		50.9	50.95	
10	Penguatan Cadangan Pangan (%)			60	62	64.5	66.5	100		64.5	66.5	
11	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)			60	60	60	60	44.3		60	60	
12	Stabilitas Harga dan Pasok Pangan (%)			78.10	80	80	80			80	80	
13	Pola Pangan Harapan (poin)			82.4	82.75	82.95	83.15	90.53		82.95	83.15	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:
   - Kurangnya ketersediaan benih dan bibit
   - Kurangnya prasarana dan sarana pertanian
   - Belum maksimal Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
   - Masih rendah tingkat derajat kesehatan hewan maupun kesehatan masyarakat veteriner
   - Terbatasnya kapasitas kelembagaan penyuluh dan petani
   - Belum optimal penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan Hasil
   - Rendahnya promosi dan perluasan jaringan pemasaran produk pertanian
b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:
   - Tantangan :
     - Sistem usahatani masyarakat masih bersifat subsisten
     - Produksi dan produktivitas pertanian belum mencapai target atau masih rendah
     - Masih adanya sistem tebas bakar dalam membuka lahan pertanian yang dapat mengancam kelestarian lingkungan
     - Terbatasnya sarana produksi pertanian di tingkat usahatani
     - Alih teknologi pertanian masih kurang dan belum tepat sasaran
     - Rendahnya usahatani yang berwawasan lingkungan
     - Posisi tawar dan nilai jual produk pertanian masih rendah
     - Dampak perubahan iklim global
     - Ancaman penyakit hewan
     - Pemasukan hewan dan bahan asal hewan dari luar
     - Adanya pasar bebas
   - Peluang :
     - Potensi sumber daya alam yang mendukung pembangunan pertanian dan peternakan cukup tinggi
     - Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat
     - Produktivitas masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan teknologi produksi

- Prasarana dan sarana pertanian dan ketahanan pangan yang tersedia
- Permintaan akan produk pertanian terus meningkat
- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tranparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja pelayanan di bidang pertanian dan peternakan
- Adanya harmonisasi dan kerjasama antara tingkat pusat, provinsi dan kabupaten / kota
- Kabupaten Lembata bebas dari penyakit menular strategis nasional yaitu Antraks , Bersolosis, Flu Burung
- Jejaring pelayanan/penyuluh pertanian, peternakan dan kesehatan hewan tersedia pada 9 BPP, 1 Puskeswan dan 8 Poskeswan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adalah :

- Ketersediaan benih dan bibit masih kurang.
- Prasarana dan sarana pertanian masih kurang.
- Pengendalian organisme pengganggu tanaman belum maksimal.
- Tingkat derajat kesehatan hewan maupun kesehatan masyarakat veteriner masih rendah.
- Kapasitas kelembagaan penyuluh dan petani belum optimal.
- Penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil belum optimal.
- Promosi dan perluasan jaringan pemasaran produk pertanian masih rendah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				***17,396,371,441***	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**				***17,396,371,441***	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**231,545,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**231,545,000**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**231,545,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**231,545,000**	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Kab. Lembata**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**90 Persen**	**150,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Kab. Lembata**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**90 Persen**	**150,000,000**	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah**	**90 Persen**	**150,000,000**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah**	**90 Persen**	**150,000,000**	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Lembata	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	12 Laporan	90,000,000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Lembata	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	12 Laporan	90,000,000	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Lembata	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang di kembangkan	9 Unit	-	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Lembata	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang di kembangkan	9 Unit	-	
	Pemantauan Stok Pangan	Kab. Lembata	Informasi Stok Pangan	4 Dokumen	15,000,000	Pemantauan Stok Pangan	Kab. Lembata	Informasi Stok Pangan	4 Dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab. Lembata	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	12 Laporan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab. Lembata	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	12 Laporan	-	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Lembata	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	12 Dokumen	45,000,000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Lembata	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	12 Dokumen	45,000,000	
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal**	**12 Laporan**	-	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal**	**12 Laporan**	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Lembata	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Loka	12 Laporan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Lembata	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Loka	12 Laporan	-	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Kab. Lembata**	**Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**60 Persen**	**53,320,000**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Kab. Lembata**	**Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**60 Persen**	**53,320,000**	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Kab. Lembata**	**Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**60 Persen**	**53,320,000**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Kab. Lembata**	**Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**60 Persen**	**53,320,000**	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Lembata	Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanaan Pangan yang di Muktahirkan	2 Dokumen	53,320,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Lembata	Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanaan Pangan yang di Muktahirkan	2 Dokumen	53,320,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenagan Kabupaten Kota	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenagan Kabupaten Kota**	**50 Persen**	**20,000,000**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenagan Kabupaten Kota**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenagan Kabupaten Kota**	**50 Persen**	**20,000,000**	
	Pelaksaanan Pengadaan Pengelolaan dan Penyuluhan Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	Pelaksaanan Pengadaan Pengelolaan dan Penyuluhan Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	9 Laporan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	9 Laporan	-	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Kab. Lembata**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**50 Persen**	**28,225,000**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Kab. Lembata**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**50 Persen**	**28,225,000**	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan Keamanan Pangan**	**50 Persen**	**28,225,000**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan Keamanan Pangan**	**50 Persen**	**28,225,000**	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	28,225,000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	28,225,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Lembata	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Laporan	-	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Lembata	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Laporan	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**17,164,826,441**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**17,164,826,441**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				**17,164,826,441**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**17,164,826,441**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Lembata**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**13,197,765,959**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Lembata**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**13,197,765,959**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**47,711,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**47,711,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15,855,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15,855,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,078,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,078,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,423,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,423,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,678,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,678,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,766,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,766,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9,689,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9,689,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**12,685,001,959**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**12,685,001,959**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 OB	12,495,701,959	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 OB	12,495,701,959	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	163,920,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	163,920,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,450,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,450,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	21,930,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	21,930,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**53,115,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**53,115,000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7,655,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7,655,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	51,460,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	51,460,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**2,345,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**2,345,000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,949,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,949,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah**	**100 Persen**	**116,197,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah**	**100 Persen**	**116,197,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,618,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,618,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	73,079,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	73,079,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25 Persen**	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25 Persen**	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Laporan**	**80,167,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Laporan**	**80,167,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,820,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,820,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54,847,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54,847,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,500,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**222,625,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**222,625,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	182,625,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	182,625,000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Unit	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,000,000	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gadung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gadung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	- Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gadung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gadung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	- Unit	-	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Kab. Lambata**	**Produksi Sektor Pertanian**	**77700 Ton**	**597,841,832**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Kab. Lambata**	**Produksi Sektor Pertanian**	**77700 Ton**	**597,841,832**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Kab. Lambata**	**Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**3 Komoditi**	**573,221,832**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Kab. Lambata**	**Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**3 Komoditi**	**573,221,832**	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Lambata	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	573,221,832	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Lambata	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	573,221,832	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Lambata**	**Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan**	**9 Kecamatan**	**24,620,000**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Lambata**	**Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan**	**9 Kecamatan**	**24,620,000**	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Lambata	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	9 Dokumen	24,620,000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Lambata	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	9 Dokumen	24,620,000	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Kab. Lambata**	**Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**5 Komoditi**	**-**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Kab. Lambata**	**Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**5 Komoditi**	**-**	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lambata	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1000 Ton	-	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lambata	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1000 Ton	-	
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lambata	Jumlah Benih / Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain,	20 Dosis	-	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lambata	Jumlah Benih / Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain,	20 Dosis	-	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Kab. Lambata**	**Produksi sektor pertanian**	**77700 Ton**	**258,342,000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Kab. Lambata**	**Produksi sektor pertanian**	**77700 Ton**	**258,342,000**	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**Kab. Lambata**	**Meningkatanya Prasarana Pertanian**	**3 Ha**	**258,342,000**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Kab. Lambata**	**Meningkatanya Prasarana Pertanian**	**3 Ha**	**258,342,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	100,000,000	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Lambata	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	12 Dokumen	158,342,000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Lambata	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	12 Dokumen	158,342,000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Kab. Lambata**	**Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian**	**6 Paket**	**-**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Kab. Lambata**	**Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian**	**6 Paket**	**-**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Lambata	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Lambata	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Kab. Lambata**	**Cakupan pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**	**100 Persen**	**173,575,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Kab. Lambata**	**Cakupan pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**	**100 Persen**	**173,575,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Lombata**	**Terjaminya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular**	**100 Persen**	**173,575,000**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lombata**	**Terjaminya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular**	**100 Persen**	**173,575,000**	
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kab. Lombata	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	9 Wilayah	-	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kab. Lombata	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	9 Wilayah	-	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombata	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	9 Laporan	173,575,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombata	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	9 Laporan	173,575,000	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Pengawasan, Pemasukan, Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**	**12 Laporan**	-	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Pengawasan, Pemasukan, Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**	**12 Laporan**	-	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Lombata	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 Laporan	-	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Lombata	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 Laporan	-	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Kab. Lombata**	**Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100 Persen**	-	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Kab. Lombata**	**Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100 Persen**	-	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lombata	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	9 Laporan	-	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lombata	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	9 Laporan	-	
	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Lombata	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	12 Dokumen		Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Lombata	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	12 Dokumen		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Kab. Lombata**	**Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan**	**100 Persen**	**25,826,650**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Kab. Lombata**	**Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan**	**100 Persen**	**25,826,650**	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Kab. Lombata**	**Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**25,826,650**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Kab. Lombata**	**Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**25,826,650**	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Lombata	Jumlah Luas Serangan Orginisme Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	90 Ha	25,826,650	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Lombata	Jumlah Luas Serangan Orginisme Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	90 Ha	25,826,650	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Kab. Lombata**	**Izin Usaha Pertanian/Peternakan**	**2 Dokumen**	-	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Kab. Lombata**	**Izin Usaha Pertanian/Peternakan**	**2 Dokumen**	-	
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	**Kab. Lombata**	**Izin Usaha Pertanian/Peternakan**	**2 Dokumen**	-	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Kab. Lombata**	**Izin Usaha Pertanian/Peternakan**	**2 Dokumen**	-	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Lembata	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	2 Dokumen	-	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Lembata	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	2 Dokumen	-	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Kab. Lembata**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**50 Persen**	**2,511,075,000**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Kab. Lembata**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**50 Persen**	**2,511,075,000**	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penyuluh dan Pelatihan Bagi Petani**	**9 Gapoktan**	**2,511,075,000**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya Penyuluh dan Pelatihan Bagi Petani**	**9 Gapoktan**	**2,511,075,000**	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Lembata	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Unit	103,500,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Lembata	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Unit	103,500,000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Lembata	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	5,975,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Lembata	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	5,975,000	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lembata	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	15 Unit	2,801,600,000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lembata	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	15 Unit	2,801,600,000	
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Lembata	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Unit	-	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Lembata	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Unit	-	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perubahan indikator dan target kinerja. Hal ini disebapkan adanya penyesuaian kembali indikator untuk lebih tepat dan akuntabel
2. Adanya perubahan sasaran kegiatan
3. Adanya perubahan lokasi kegiatan
4. Adanya perubahan pagu indikatif

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang melaksanakan urusan bidang pangan dan urusan bidang pertanian.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2023 tersebut, maka arah kebijakan RKP yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah arah kebijakan 1, 3, dan 4 yakni Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim; Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*; dan Mendorong pemulihan dunia usaha

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Lembata

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)
1	Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya Pertanian sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani	1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	38.44
			2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5.50
			3	Nilai Tukar Petani (indeks)	103.00
			4	Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Ha)	700
			5	Produksi sektor pertanian (ton)	77,700
			6	Produksi sektor perkebunan (ton)	7,000
			7	Produksi sektor peternakan (kg)	31,162
			8	Cakupan bina kelompok petani (%)	50.90
2	Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1	Penguatan cadangan pangan (%)	64.5
			2	Ketersediaan energi per kapita(%)	175.5
			3	Ketersediaan protein per kapita (%)	190.5
			4	Penanganan daerah rawan pangan (%)	60
			5	Stabilitas harga dan pasok pangan (%)	80
			6	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (poin)	82.95

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Tahun 2024 sebanyak 9 Program, 17 Kegiatan, 38 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 17.396.371.441-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 150.000.000,-.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 53.320.000,-.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 28.225.000,-.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 13.197.765.959,-.
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 597.841.832,-.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaran Pertanian, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 258.342.000,-.
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 173.975.000,-
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 25.826.650,-.
9. Program Penyuluh Pertanian, terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.911.075.000,-.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKASI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						17.209.271.441,00							21.209.442.566,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						221.949.000,00							1.428.699.372,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						221.949.000,00							1.428.699.372,00	
1	2.09.03	PROGRAM PENGURAIAN DISTRIBUSI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	-			50 Persen	150.000.000,00						-	827.895.102,00	
	2.09.03.2.01	Pengadaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	-			50 Persen	150.000.000,00			Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Untuk Mencukupi Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan penguatan hak-hak ekonomi masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Petani	-	827.895.102,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Pengadaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Untuk Mencukupi Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan penguatan hak-hak ekonomi masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Petani		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Diberdayakan				5 Unit	5.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	FALAH KOKOK	Memperkuat Kelahanan Ekonomi Untuk Hasil Pembangunan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kelahanan ekonomi daerah	Pelaku		822.209.100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemberdayaan Stok Pangan														
			Informasi Stok Pangan				4 Dokumen	79.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	FALAH KOKOK	Memperkuat Kelahanan Ekonomi Untuk Hasil Pembangunan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kelahanan ekonomi daerah	Pelaku		90.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Stok, Cadangan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				12 Laporan	5.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Kelahanan Ekonomi Untuk Hasil Pembangunan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kelahanan ekonomi daerah	Pelaku		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERMASALAHAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKEMBANGAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Gerakan Beras Sehat Nasional (NBM)				12 Dokumen	dst.000.000.000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOKOR	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Hasil Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas ekonomi masyarakat yang berkualitas dan inovasi 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani		94.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03	Pemantauan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pemantauan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	-			12 Laporan	0,00			Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Hasil Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas ekonomi masyarakat yang berkualitas dan inovasi 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				12 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Hasil Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas ekonomi masyarakat yang berkualitas dan inovasi 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	2.09.04	PENGUKUR PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan Daerah Rawan Pangan	-			50 Paket	22.220.000,00						-	201.650.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERSENTASE MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.05.04.2.01	Penyusunan Pola Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Pola Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	-			80 Persen	33.320.000,00			Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Petani	-	276.602.020,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.05.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Pola Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Pola dan Analisa Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				2 Dokumen	33.320.000,00	Kab. Lembata Seminut Kecamatan, Seminut Kel/Desa	PAJAK HOKOH	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Petani		276.602.020,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.05.04.2.02	Penanganan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	-			90 Persen	20.000.000,00			Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah	Petani	-	25.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.05.04.2.02.0002	Pemberdayaan Pengadaan, Pengolahan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerentanan Pangan yang Menyebuh (lebih 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERMASALAHAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERMASALAHAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TANGGAL	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kewenangan Pangan yang Mencakup Lebih 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HONDA	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Hasil Industri Yang Berkualitas dan Berkesaitan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.05.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				5 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER USUR-DANA ALOKASI UMUM	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Hasil industri Yang Berkualitas dan Berkesaitan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani		29.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.05.05	PROGRAM PENGUATAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan Pangan	-			50 Persen	20.225.000,00						-	306.110.250,00	
	2.05.05.2.01	Pemeliharaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan, Pemeliharaan Keamanan Pangan	-			50 Persen	20.225.000,00			Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Hasil industri Yang Berkualitas dan Berkesaitan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani	-	306.110.250,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.05.05.2.01.0004	Rekomendasi Kesehatan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kesehatan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Rangka PKRT				5 Dokumen	38.220.000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK, RETRIBUSI	Memperhatikan Kesehatan Ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesehatan ekonomi daerah	Petani		398.170.250.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.09.09.2.01.0008	Koordinasi dan administrasi kesehatan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kesehatan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				12 Laporan	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperhatikan Kesehatan Ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesehatan ekonomi daerah	Petani		0.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						17.134.020.441,00							19.232.583.195,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN						17.134.020.441,00							19.232.583.195,00	
1	3.27.01	PENDIDIKAN PARIWIJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Fasilitasi Perangkat Daerah	-			100 Persen	13.127.798.280,00						-	14.249.428.008,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	47.711.000,00			-	-	Aparatur	-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	19.999.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HONOR, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7 Dokumen	6.018.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.400.000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		4.000.000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.515.000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.165.000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	8.665.000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah	-			100 Persen	12.978.051.359.00			-	-	Aparatur	-	12.709.741.359.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/Bulan	12.439.701.959.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		12.439.701.959.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	199.000.000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		200.000.000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.450.000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERMASALAHAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKEMBANGAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				78 Laporan	27.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendayagunaan barang milik daerah pada perangkat Daerah	-			6 Laporan	68.719.000,00			-	-	Aparatur	-	68.719.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.03.0006	Pemeliharaan/Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	51.450.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		34.725.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pegawai Perangkat Daerah	-			7 Laporan	2.660.000,00			-	-	Aparatur	-	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.06.0003	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.340.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.06.0017	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Sumber Daya Perangkat Daerah	-			720 Perseo	119.197.000,00			-	-	Aparatur	-	69.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.600.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.676.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERMASALAHAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKEMBANGAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	13.078.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			25 Persen	0,00			-	-	Aparatur	-	80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Layanan	951.167.000,00			-	-	Aparatur	-	912.014.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERMASALAHAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKEMBANGAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Layanan	2.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		862.638.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Layanan	34.841.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		87.078.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0004	Penyediaan Jasa Perawatan Untuk Kantor														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Perawatan Untuk Kantor yang Disediakan				1 Layanan	2.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	233.629.000,00			-	-	Aparatur	-	765.479.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	150.629.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		722.479.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Meja yang Dipelihara				5 Unit	5.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penstiking Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERMASALAHAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKEMBANGAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirawat/Dijaga				0 Unit	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Benih Pertanian	-			77700 ton	227.041.022,00						-	1.836.258.286,00	
	3.27.03.2.01	Penyelenggaraan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Penyelenggaraan Penggunaan Sarana Pertanian	-			3 Kabupaten	573.221.832,00			-	1. Pembiayaan pemerintah sebagian dari penting kalikan bisa ajakhasaan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkat akan kelahiran ekonomi daerah	Petani	-	857.069.282,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0002	Pemberdayaan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	573.221.832,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HALAN KOMOR-DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembiayaan pemerintah sebagian dari penting kalikan bisa ajakhasaan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkat akan kelahiran ekonomi daerah	Petani		857.069.282,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	-			9 Kecamatan	24.820.000,00			Meningkatkan Kelahiran Ekonomi Untuk Partisipasi Yang Berkualitas dan Berkesetaraan	1. Pembiayaan pemerintah sebagian dari penting kalikan bisa ajakhasaan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkat akan kelahiran ekonomi daerah	Petani	-	200.131.748,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TANGGAL	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				5 Dokumen	38.800.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOKDA	Mempertahankan Kelestarian Ekosistem Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas sejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kelestarian ekonomi daerah	Petani		292.737.146,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.09	Pemeliharaan Kesehatan Ternak dan Higiene Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksanya Pemiliharaan Ternak dan Higiene Pakan Ternak	-			5 Kumulatif	0,00			Mempertahankan Kelestarian Ekosistem Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas sejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kelestarian ekonomi daerah	Petani	-	600.958.478,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.09.0002	Pengadaan Higiene Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah Higiene Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1000 Ton	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER LUSUR-DANA ALLOKASI UMUM	Mempertahankan Kelestarian Ekosistem Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas sejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kelestarian ekonomi daerah	Petani		118.345.978,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.09.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TANGGAL	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kerjasama yang sumbernya dari dalam negeri/antar lain				20 Dokumen	0,00	Kab. Lombata Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Hasil Tetap Tetap Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani		752.374.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1	1.27.01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi sektor pertanian	-			77700 Ton	298.342.000,00						-	1.405.733.052,00	
	1.27.01.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Prasarana Pertanian	-			3 Ha	298.342.000,00			Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Hasil Tetap Tetap Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani	-	885.733.052,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lombata Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOKOR, DAN CUKAI HASIL TEMBAKAU (DHT)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Hasil Tetap Tetap Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani		885.733.052,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.27.01.2.01.0004	Pengamanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan(KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LCP2B di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan(KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LCP2B) yang dilindungi				7.Dokumen	148.340.000,00	Kab. Lembata Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOKDA	Memperkuat kelestarian Ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberian prioritas ekonomi dan penting kalbar bisa sejahterakan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kelestarian ekonomi daerah	Petani		800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.27.03.2.02	Pemberdayaan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pemberdayaan Prasarana Pertanian	-			6 Paket	0,00			Memperkuat kelestarian Ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberian prioritas ekonomi dan penting kalbar bisa sejahterakan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kelestarian ekonomi daerah	Petani	-	810.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0,00	Kab. Lembata Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BAGIAN PUSAT	Memperkuat kelestarian Ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberian prioritas ekonomi dan penting kalbar bisa sejahterakan masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kelestarian ekonomi daerah	Petani		810.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
-	2.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN KEHUTANAN MASYARAKAT Ve (Utama)	Cakupan pengendalian hutan dan kebakaran masyarakat setempat	-			100 Persen	172.675.000,00						-	300.225.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERSENTASE MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Pengendalian Kesehatan Hewan, Penyidikan dan Pemberdayaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendali Kesehatan Hewan, Penyidikan dan Pemberdayaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	-			100 Persen	1.73.875.000,00			Mempertahankan Kesehatan Ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkesetiaan sosial 2. Meningkatkan kesehatan ekonomi daerah	Petani	-	000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				9 Wilayah	0,00	Kab. Lembata, Dentuk Kecamatan, Dentuk Kel/Desa	-	Mempertahankan Kesehatan Ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkesetiaan sosial 2. Meningkatkan kesehatan ekonomi daerah	Petani		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0006	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis (lebih 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				9 Kecamatan	1.73.875.000,00	Kab. Lembata, Dentuk Kecamatan, Dentuk Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DBHP, ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Mempertahankan Kesehatan ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkesetiaan sosial 2. Meningkatkan kesehatan ekonomi daerah	Petani		000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERSENTASE MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.02	Pengelolaan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan, Pemasukan, Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	-			12 Laporan	0,00			Mempertahankan Kedaulatan Ekonomi Untuk Peningkatan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberian prioritas ekonomi dan penting kalbar bisa sejahterakan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengelolaan atau Fasilitasi Pengelolaan Pemasukan Lainnya untuk Pemasukan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (PHT)														
			Jumlah pengawasan pemasukan pengeluaran ternak untuk pemasukan dan pengeluaran HPH				12 Laporan	0,00	Kab. Landak, Sambut Kecamatan, Sambut Kab/Desa	-	Mempertahankan Kedaulatan Ekonomi Untuk Peningkatan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberian prioritas ekonomi dan penting kalbar bisa sejahterakan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pemasukan dan Pengawasan Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-			100 Persen	0,00			Mempertahankan Kedaulatan Ekonomi Untuk Peningkatan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberian prioritas ekonomi dan penting kalbar bisa sejahterakan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani	-	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERMASALAHAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELOKASI/ DASAKAN	PERMASALAHAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hasil dan Produk Hewan				5 Laporan	0,00	Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah	Perlam		260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0008	Pengelolaan Pemantauan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikasi Veteriner dan KESMAVET Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPHK)														
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikasi Veteriner dan Zoosanitary atau				12 Dokumen	0,00	Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah	Perlam		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA/KEAMANAN	Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	-			100 Persen	25.025.650,00						-	330.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-			100 Persen	25.025.650,00			Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu ditindaki Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah	Perlam	-	330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TANGGAL	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				80 Ha	29.828.840,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	FISIK KONDIS	Memperbaiki Kelahiran Ekonomi Untuk Hasil Hidup Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas aplikasi masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani		330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
II	3.27.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERTANIAN	Izin Usaha Pertanian/Peternakan	-			2 Dokumen	0,00						-	55.000.000,00	
	3.27.09.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Izin Usaha Pertanian/Peternakan	-			2 Dokumen	0,00			Memperbaiki Kelahiran Ekonomi Untuk Hasil Hidup Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas aplikasi masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani	-	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.09.2.02.0001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan														
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				2 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UNTUK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memperbaiki Kelahiran Ekonomi Untuk Hasil Hidup Yang Berkualitas dan Berkesetiaan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kelas aplikasi masyarakat yang berkualitas sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Petani		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
I	3.27.07	PROGRAM PENYELUHAN PERTANIAN	Cakupan kios kelompok tani	-			20 Paket	2.211.278.000,00						-	1.540.567.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluh dan Petani/Pekebun	-			0 Dokumen	2.077.019.000,00			Memperkuat kelembagaan Ekonomi Untuk Petani Inklusif Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Penyuluh dan Petani	-	7.640.647.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	103.400.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KE/LUAR DAERAH (BANTUAN KEUANGAN UMUM)	Memperkuat kelembagaan Ekonomi Untuk Petani inklusif Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Penyuluh dan Petani		283.202.970,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	3.870.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat kelembagaan Ekonomi Untuk Petani inklusif Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah	Penyuluh dan Petani		28.368.263,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Pemberdayaan dan Pendayagunakan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sasaran Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Berdaerah				74 Unit	3.857.600.000,00	Kab. Lombata Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempertaha n Ketahanan Ekonomi Untuk Mem ndukan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdaya an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningk atkan ketahanan ekonomi daerah	Penyuluh dan Petani		1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	5.27.07.2.01.0008	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			Jumlah Kelembagaan ekonomi Petani yang dibentuk				2 Unit	0,00	Kab. Lombata Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDA	Mempertaha n Ketahanan Ekonomi Untuk Mem ndukan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemberdaya an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Meningk atkan ketahanan ekonomi daerah	Penyuluh dan Petani		17.508.441,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	JUMLAH							17.308.371.441,00							21.358.448.500,00	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Lembata,

P. Kanisius Tuaq, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19690424 200003 1 008

RENJA 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan

menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

a. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lembata (Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur 020/2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Persatutan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
19. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
20. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata;
21. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
22. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
23. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

b. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

c. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lembata

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6		7		8=(7/6)		9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	%								100	30	0.30
2	07	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	48	Dokumen								100	23	0.48

2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	24	Dokumen								6	3	**0.13**
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen								2	2	**0.50**
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen								1	-	-
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen								1	-	-
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan	4	Dokumen								1	-	-

						DPA-SKPD											
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8	Laporan								2	-	-
2	**07**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Perangkat Daerah**	**100**	**%**								**100**	**31**	**0.31**
2	07	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56	Orang/ Bulan								14	14	**0.25**
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	Dokumen								12	6	**0.13**
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	Laporan								1	-	-

2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	72	Laporan								18	6	**0.08**
2	**18**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Laporan**								**100**	**1**	**0.25**
2	18	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2	Dokumen								2	1	**0.50**
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2	Laporan								2	-	-
2	**07**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**4**	**Laporan**								**100**	-	-
2	07	01	2,05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawain	4	Dokumen								1	-	-

2	07	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3	Orang								-	-
2	**07**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**100**	**%**							**100**	**32**	**0.32**
2	07	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket							1	1	0.25
2	07	01	2,06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket							1	-	-
2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	Paket							1	-	-
2	07	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4	Dokumen							1	-	-
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	4	Laporan							4	-	-

						konsultasi SKPD											
2	**07**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**								**100**	-	-
2	07	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	Unit								1	-	-
2	07	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6	Unit								6	-	-
2	07	01	2,07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7	Unit								7	-	-
2	07	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit								8	-	-
2	07	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit									-	-
2	**07**	**01**	**2,08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Tersedianya Jasa Penunjang**	**48**	**Laporan**								**100**	**3**	**0.06**

					Pemerintah Daerah	**Urusan Pemerintah Daerah**											
2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48	Laporan							12	3	**0.06**
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	Laporan							12	6	**0.13**
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	22	Laporan							12	6	**0.27**
2	**07**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**							**100**	**18**	**0.18**
2	07	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6	Unit							6	2	**0.33**
2	07	01	2,09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	Unit								-	-
2	07	01	2,09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	Unit							6	-	-

2	07	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit								1	-	-
2	07	01	2,09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	Unit								13	-	-
2	07	01	2,09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30	Unit									-	-
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**													**#DIV/0!**
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Tingkat partisipasi angkatan kerja**	**100**	**%**								**100**		-
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan**	**4**	**Dokumen**										-
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK mikro	4	Dokumen								1		-
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS**	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan**	**100**	**%**								**100**		-

					TENAGA KERJA	**pelatihan berbasis kompotensi**											
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompotensi**	**160**	**Orang**									-
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi pada tahun n	80	Orang							20		-
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	80	Kali							20	-	-
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	4	paket							1	-	-
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang**	**44,5**	**%**							**100**	-	**#VALUE!**

						ditempatkan											
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Tersedianya data informasi pasar kerja manual dan online**	**48**	**Dokumen**							**100**		-
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir Hub)	400	Orang							100		-
2	**07**	**04**	**2,04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja**	**200**	**Orang**							**100**	-	-
2	07	04	2,04	01	Peningkatan perlindungan dan Kompetisi Calon Pekerja Migran Indonesia(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingatkan kompotensinya	200	Orang							50	6	**0.03**
2	07	04	2,04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	48	kelompok							12	-	-
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Angka sengketa pengusaha/pekerja pert ahun**	**37,2**	**Point**							**100**	**6**	**#VALUE!**

2	**07**	**05**	**2,01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan**	**20**	**Dokumen**							**100**	-	-
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	120	Laporan							10	-	-
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial**	**40**	**Kasus**							**100**	**4**	**0.10**
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	40	Kasus							10	4	**0.10**

					Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	8	Perusahaan								2	-	-
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**													**#DIV/0!**
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase transmigran swakarsa**	**10**	**%**									-	-
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penataan sebaran penduduk**	**40**	**Orang**									-	-
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	Laporan								1	-	-

3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	120	Orang								30	-	-

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				55,69	59,39	63,30		55,69	59,39	63,30	
02	Tingkat Pengangguran Terbuka				4,05	3,20	2,52		4,05	3,20	2,52	
03	Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas				0,21	0,23	0,25		0,21	0,23	0,25	
04	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun				53,2	42,5	42,5		53,2	42,5	42,5	

05	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				50,1	50,3	50,5		50,1	50,3	50,5	
06	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan				43	43,5	44		43	43,5	44	
07	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek				37,2	37,5	38,2		37,2	37,5	38,2	
08	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi				100	100	100		100	100	100	
09	Persentase transmigran swakarsa				10	10	10		10	10	10	
10	Keselamatan dan Perlindungan				42,6	45,2	47,9		42,6	45,2	47,9	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
   - Kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja berdasarkan klaster kompetensi
   - Belum tersedianya sistem informasi pasar kerja online
   - Belum optimalnya perencanaan tenaga kerja
   - Belum optimalnya hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja
   - Kurangnya pendidikan dan pelatihan transmigran
   - Belum optimalnya pembangunan dan penataan kawasan transmigrasi

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

- Tantangan :
  - Kurang tersedianya lapangan kerja
  - Angka pengangguran masih tinggi
  - Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah
  - Masih tingginya kasus sengketa tenaga kerja
  - Kurangnya kompotensi angkatan kerja
  - Belum adanya pembangunan dan penataan kawasan transmigrasi.

- Peluang :
  - Tersedianya sistem informasi pasar kerja
  - Adanya kerjasama dengan BLK swasta
  - Adanya jaminan sosial tenaga kerja
  - Adanya pelatihan/magang ketenagakerjaan yang bersifat online.
  - Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan
  - Tersedianya kawasan transmigrasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah :

- Lapangan kerja terbatas
- Perluasan kesempatan kerja masih rendah
- Angka pengangguran masih tinggi
- Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah
- Kasus sengketa tenaga kerja masih tinggi
- Perlindungan tenaga kerja belum optimal
- Kompotensi angkatan kerja masih rendah
- Pembangunan dan penataan kawasan transmigrasi belum optimal
- Pengembangan kompotensi dan keterampilan transmigran belum optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				2,214,509,285	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				2,214,509,285	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,164,509,469	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,164,509,469	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2,164,509,469	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2,164,509,469	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat	98	1,967,527,443	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat	98	1,967,527,443	

			Daerah					Daerah			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12**	**28,618,815**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12**	**28,618,815**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	8,694,366	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	8,694,366	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4,316,704	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4,316,704	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	3,801,454	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	3,801,454	

			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3,990,633	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3,990,633	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	4,683,404	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	4,683,404	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2	3,132,254	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	2	3,132,254	

			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah**	**45**	**1,682,947,511**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah**	**45**	**1,682,947,511**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Lembata**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1,573,910,612	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Lembata**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1,573,910,612	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	88,790,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	88,790,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5,059,562	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5,059,562	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	15,187,337	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	15,187,337	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Terlaksanya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah**	**4**	**20,927,037**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Terlaksanya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah**	**4**	**20,927,037**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	4,207,250	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	4,207,250	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kab. Lembata**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	16,719,787	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kab. Lembata**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	16,719,787	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**1**	**5,276,737**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**1**	**5,276,737**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Kab. Lembata**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1	5,276,737	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Kab. Lembata**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1	5,276,737	

			Administrasi Kepegawaian					Administrasi Kepegawaian			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah**	**4**	**89,315,443**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah**	**4**	**89,315,443**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kab. Lembata**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1,956,150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kab. Lembata**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1,956,150	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan	1	9,428,063	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan	1	9,428,063	

			Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	8,323,230	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	8,323,230	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	1,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	1,200,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	68,408,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	68,408,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang**	1	37,325,000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Kab. Lembata	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang**	1	37,325,000	

			Urusan Pemerintah Daerah			**Pemerintah Daerah**		**Urusan Pemerintah Daerah**			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kab. Lembata**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kab. Lembata**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	37,325,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	37,325,000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25**	**69,469,150**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25**	**69,469,150**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	19,490,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	19,490,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15,108,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15,108,200	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	34,870,950	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	34,870,950	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6**	**33,647,750**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6**	**33,647,750**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	33,647,750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	33,647,750	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kab. Lembata**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kab. Lembata**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	

			Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Lembata	**Tingkat Partisipasi Angkatan kerja**	-	-	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Kab. Lembata	**Tingkat Partisipasi Angkatan kerja**	-	-	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Lembata	**Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan**	-	-	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Kab. Lembata	**Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan**	-	-	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Lembata	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	0	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Lembata	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	0	-	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Lembata	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	20	149,999,934	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Kab. Lembata	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	20	149,999,934	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Lembata	**Terlaksanya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	20	149,999,934	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Kab. Lembata	**Terlaksanya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	20	149,999,934	

	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Lembata	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20	149,999,934	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Lembata	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20	149,999,934	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Lembata	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0	-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Lembata	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0	-	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Lembata	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	-	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Lembata	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	-	

	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Lembata	**Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	50	21,518,758	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Kab. Lembata	**Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	50	21,518,758	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Lembata	**Tersedianya data Informasi Pasar Kerja Manual dan Online**	-	-	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Kab. Lembata	**Tersedianya data Informasi Pasar Kerja Manual dan Online**	-	-	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lembata	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0	-	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Lembata	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0	-	
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lembata	**Terlaksanya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah**	50	21,518,758	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Lembata	**Terlaksanya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah**	50	21,518,758	

			Kabupaten/ Kota					**Kabupaten / Kota**			
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Lembata	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50	21,518,758	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Lembata	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50	21,518,758	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Lembata	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0	-	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Lembata	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0	-	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Lembata	**Angka sengketa pengusaha/ pekerja per tahun**	13	25,463,334	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Kab. Lembata	**Angka sengketa pengusaha / pekerja per tahun**	13	25,463,334	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lembata	**Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan**	1	9,999,901	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Lembata	**Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan**	1	9,999,901	

	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Kab. Lembata	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	5	2,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Kab. Lembata	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	5	2,000,000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Lembata	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	9,999,901	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Lembata	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	9,999,901	

	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lembata	**Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial**	12	15,463,433	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Lembata	**Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial**	12	15,463,433	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10	15,463,433	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10	15,463,433	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lembata	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2	-	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lembata	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Lembata		30	49,999,816	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	Kab. Lembata		30	49,999,816	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Kab. Lembata		30	49,999,816	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	Kab. Lembata		30	49,999,816	

	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Lembata	**Persentase transmigran swakarsa**	30	49,999,816	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Kab. Lembata	**Persentase transmigran swakarsa**	30	49,999,816	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	**Tersedianya Dokumen Penataan Sebaran Penduduk**	30	49,999,816	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Lembata	**Tersedianya Dokumen Penataan Sebaran Penduduk**	30	49,999,816	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	-	
	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lembata	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluha	30	49,999,816	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lembata	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluha	30	49,999,816	

n
n

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 namun direncanakan pada Renja Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.3.224.095.245,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 7.477.235.719,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang melaksanakan unsur tenaga kerja dan untuk transmigrasi.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu :

1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4) penguatan daya saing usaha
5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara
8) pelaksanaan pemilu 2024.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota. Program Hubungan Industrial dengan Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Program prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program prioritas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. Program Pilihan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan Penyuluhan Transmigrasi. Program dan kegiatan prioritas nasional maupun pilihan ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Perencanaan Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja.	Terciptanya Lapangan Kerja Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.2
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	58
2.	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja.	Terciptanya Transmigran yang mandiri	Persentase transmigran swakarsa	10

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata.

b. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Tahun 2024 sebanyak 6 Program, 14 Kegiatan, 27 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.412.840.585,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota, terdiri dari 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.660.773.452,-.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 249.675,-.
3. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 649.999.985,-.
4. Program Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan Pagu sebesar Rp. 705.692,-.
5. Program Hubungan Industrial, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan Pagu sebesar Rp. 1.111.900,-.
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan Pagu sebesar Rp. 99.999.881.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**2,851,509,535.00**							**3,202,576,487.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,751,509,535.00**							**3,188,158,127.00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**2,751,509,535.00**							**3,188,158,127.00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Cakupan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah***	-			**100 Persen**	**1,967,527,443.00**						-	**1,962,013,207.00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan,*	-			12 Dokumen	28,618,815.00			-	-	Aparatur	-	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			pengang garan dan evaluasi kinerja perangk at daerah													
	2.07.0 1.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah				6 Dokume n	8,694,36 6.00	Kab. Lembata , Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10,000,00 0.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
	2.07.0 1.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokume n RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan Dokume n RKA-SKPD				1 Dokume n	4,316,70 4.00	Kab. Lembata , Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5,000,000. 00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
	2.07.0 1.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokume n Perubah an RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordin				1 Dokume n	3,801,45 4.00	Kab. Lembata , Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5,000,000. 00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI

			asi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,990,633.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,683,404.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3,132,254.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja perangkat daerah*	-			100 Persen	1,682,947,511.00			-	-	Aparatur	-	1,630,939,897.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,573,910,612.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	Aparatur		1,502,442,577.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

										ALOKASI UMUM						
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	88,790,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		114,497,320.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,059,562.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	15,187,337.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			4 Laporan	20,927,037.00			-	-	Aparatur	-	18,449,330.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	4,207,250.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

									Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	16,719,787.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		11,449,330.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan pegawai perangkat daerah*	-			1 Laporan	5,276,737.00			-	-	Aparatur	-	10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	5,276,737.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan aktivitas sumber daya perangkat daerah*	-			100 Persentase	89.315.443.00			-	-	Aparatur	-	109.500.000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.956.150.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.500.000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,428,063.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		20,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,323,230.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,200,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	68,408,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		75,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Teredianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	-			25 Persentase	37,325,000.00			-	-	Aparatur	-	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	37.325,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		30,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Laporan	69,469,150.00			-	-	Aparatur	-	30,931,340.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	19,490,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		1,800,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,108,200.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		18,835,400.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	34,670,950.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10,295,940.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persentase	33,647,750.00			-	-	Aparatur	-	62,192,640.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	33,647,750.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		42,192,640.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	Aparatur		5,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

									Semua Kel/Desa	UMUM						
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun				0 Unit	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			an Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Tingkat partisipasi angkatan kerja***	-			**59,37 Persen**	**0.00**						-	**16,257,730.00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan*	-			1 Dokumen	0.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahan	Masyarakat	-	16,257,730.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

												an ekonomi daerah				
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				0 Orang	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	Masyarakat		16,257,730.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Besaran tanaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasi***	-			**100 Persen**	**650,000,000.00**						-	**581,585,170.00**	

			s kompet ensi													
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	-			40 Orang	650,000,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat	-	581,585,170.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				60 Orang	650,000,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan	asyarakat		562,403,730.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

												ekonomi daerah				
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				0 Lembaga	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat		6,156,910.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														

			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				0 Unit	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat		13,024,530.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan***	-			**44 Persen**	**106,518,758.00**						-	**562,041,140.00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Tersedianya data Informasi Pasar Kerja Manual dan Online*	-			12 Bulan	10,000,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan	asyarakat	-	10,629,590.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

												ekonomi daerah				
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kanir Hub)				50 Orang	10,000,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat		10,629,590.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota*	-			50 Orang	96.518,758.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat	-	551,411,550.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				50 Orang	96.518,758.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat		546,411,550.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														

			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				0 Orang	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat		5,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun***	-			**42,5 Point**	**27,463,334.00**						-	**66,260,880.00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan*	-			5 Dokumen	11,999,901.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan	asyarakat	-	9,012,220.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

												ekonomi daerah				
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	11,999,901.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat		9,012,220.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial*	-			10 Kasus	15,463,433.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat	-	7,248,660.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	15,463,433.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat		9,350,480.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				0 Lembaga	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat		7.898.180.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**100,000,000.00**							**4,418,360.00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**100,000,000.00**							**4,418,360.00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase transmigran swakarsa***	-			**10 Persen**	**100,000,000.00**						-	**4,418,360.00**	

	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Penataan Sebaran Penduduk*	-			1 Dokumen	100,000,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat	-	4,418,360.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat		5,662,600.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi														

			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				30 Kepala Keluarga	100,000,000.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Meningkatan ketahanan ekonomi daerah	asyarakat		8,755,760.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	JUMLAH							**2,851,609,535.00**							**3,202,576,487.00**	

BAB V

PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, Oktober 2023

Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi,
Kabupaten Lembata,

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rafael Betekeneng, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681023 199403 1 006

RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2024

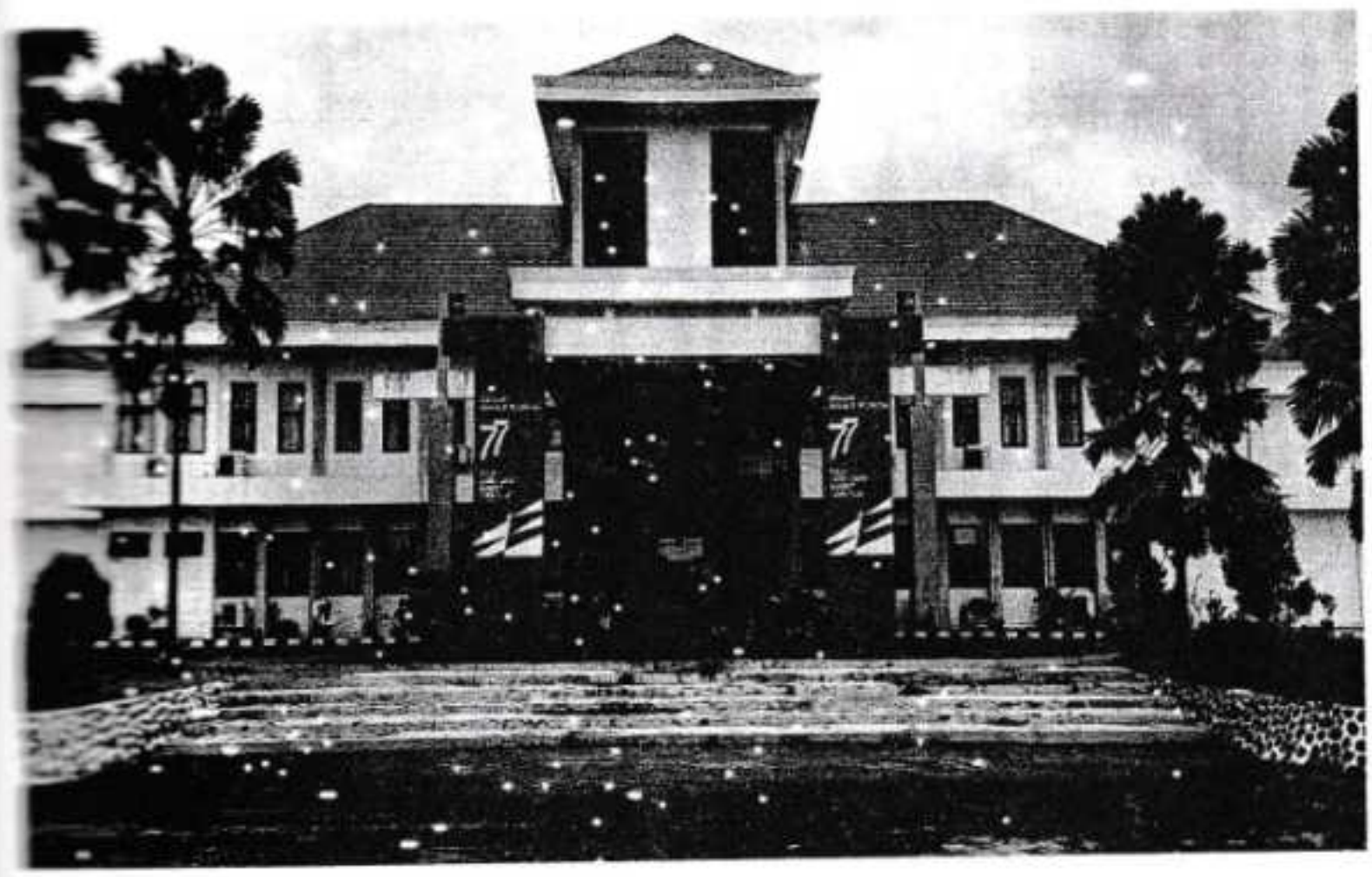

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

: 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

[illegible]pican : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKA
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBAT
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 34

3.3 Program dan Kegiatan 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37

BAB V PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Kompilasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lembata 8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata 18

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lembata 22

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lembata 31

Tujuan dan Sasaran sesuai Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata 35

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 38

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah, mengacu dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat daerah. Dalam waktu operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, dievaluasi dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2025-2026, hasil evaluasi renja tahun berjalan.

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil evaluasi renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedomaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor [illegible];

Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.

b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Lembar : 1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01				SEKRETARIAT DAERAH										
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	%							
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	Dokumen					10	10	25
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen					6	6	25
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4	Dokumen					1	1	25
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4	Dokumen					1	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**							
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	Orang/bln					115	115	25
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen					12	12	25
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan					1	1	25
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Laporan					18	18	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Managemen PNS**	**100**	**%**							
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen					1	1	25
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**							
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket					1	1	25
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen					1	1	25
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan					1	1	25
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan					1	1	25
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen					1	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit					2	2	17
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit					1	1	25
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit					1	1	100
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**laporan**					3	3	25
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan					1	1	25
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan					1	1	25
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan					1	1	25
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**340**	**Unit**					**138**	**138**	**41**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	*	Unit					1	1	25
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	64	Unit					64	64	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80	unit					20	20	25
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184	Unit					50	50	27
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit					1	1	25
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit					1	1	25
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit					1	1	33
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**%**							
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Orang/bulan					1	1	25
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4	Paket					1	1	25
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Orang					1	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Organisasi**	**552**	**Dokumen**					**138**	**138**	25
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	480	Dokumen					120	120	25
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	32	Laporan					8	8	25
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	32	Dokumen					8	8	25
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8	Dokumen					2	2	25
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**12**	**Laporan**					**3**	**3**	25
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keorotokolan	4	Laporan					1	1	25
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4	Laporan					1	1	25
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Laporan					1	1	25
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**%**							
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	32	Dokumen					8	8	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	Dokumen					3	3	25
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**12**	**Dokumen**					**3**	3	25
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	Dokumen					1	1	25
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	Dokumen					1	1	25
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	Dokumen					1	1	25
4	01	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Hukum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Hukum	100	%							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Hukum	11	Kasus					2	2	18
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasikan	36	Dokumen					1	1	3
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**5**	Dokumen					1	1	20
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5	Dokumen					1	1	20
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan**	**100**	**%**							
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**40**	**Dokumen**					**10**	**10**	**25**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8	Dokumen					2	2	25
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16	Laporan					4	4	25
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	16	Dokumen					4	4	25
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	64	Dokumen					16	16	25
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4	Dokumen					1	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	48	Laporan					12	12	25
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**209**	**Dokumen**					**52**	**52**	25
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Dokumen					1	1	25
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	4	Dokumen					1	1	25
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200	Orang					50	50	25
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**8**	**Dokumen**					**2**	**2**	25
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dokumen					1	1	25
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	4	Dokumen					1	1	25

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini dikarenakan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan kinerja 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada renja tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan. Jika dilihat dari tingkat capaian realisasi target renstra, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena rencana target kinerja yang direncanakan pada Renstra tahun 2023 lebih tinggi dari target kinerja pada Renja yang disusun Tahun 2023.

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan permasalahan yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis capaian berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.

Untuk mengukur pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata baru bisa disusun

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat				77.8	82.65	88,3			82,65	88,3	
2.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah				49,21	49,36	49,52			49 36	49,52	
3.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah				2756,36	2754,05	2751,73			2754,05	2751,73	

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai tahun 2022 dan Renja Setda dalam mendukung Pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 , maka dapat dikemukakan isu – isu penting yang akan ditangani melalui Renja Setda dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah :

- Belum adanya Pelatihan/Bimtek dalam rangka penguatan kapasitas bagi Fungsional pada Sekretariat Daerah
- Peralatan dan sarana serta prasarana belum memadai.
- Keterbatasan sumber dana yang dialokasikan dari APBD sehingga banyak program/kegiatan prioritas yang direncanakan tetapi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal
- Belumnya koordinasi dan kerjasama antar aparatur.
- Terbatasnya data dan informasi perencanaan. Pembinaan ASN khususnya di bidang akuntabilitas kinerja, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan akuntabilitas jabatan PNS dan Non PNS dalam kerangka manajemen ASN belum dilakukan secara optimal
- Kompotensi SDM Aparatur yang masih minim
- Tingginya Kepala Bagian (1 tahun lebih) sangat berpengaruh pada kinerja dan disiplin
- Belum adanya peralihan jabatan structural menjadi fungsional belum mengarah pada prioritas yang jelas tentang pola karir dan kesejahteraan pejabat funfsional (legal culture)

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah :

- Tantangan :

- Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja
- Tuntutan pelayanan publik yang berkualitas menuntut perlunya pemberdayaan kinerja dan disiplin aparatur, sistem pengawasan yang semakin baik, serta sistem kelembagaan dan ketataklaksanaan yang lebih kondusif dan baik
- Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan.
- Tuntutan masyarakat untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mempercepat implementasi otonomi daerah
- Adanya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima
- Kompetensi SDM Aparatur yang masih minim di Bagian Kesra
- Fasilitas pendukung kerja tidak memadai (Leptop dan Printer)
- Kekosongan Kepala Bagian (1 tahun lebih) sangat berpengaruh pada kinerja dan disiplin
- Belum jelasnya posisi pejabat fungsional dalam struktur koordinasi dan pelaksanaan tugasnya
- Belum adanya aplikasi khusus untuk Absensi, yang harus beroperasi pada tahun 2024, melalui seorang Admin Setda

- Peluang :

- Perkembangan informasi dan komunikasi terkait pengembangan dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas ASN dengan mengunakan media yang semakin terbuka.
- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menetapkan peningkatan pembangunan infrastruktur energi, penataan Aparatur Sipil Negara sebagai agenda prioritas, memberikan peluang yang cukup besar bagi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
- Tersedianya banyaknya program-program peningkatan sumber daya melalui perencana dari kementerian/lembaga yang dapat diakses.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, adalah :

- Keterbatasan sumber dana yang dialokasikan dari APBD sehingga banyak program/kegiatan prioritas yang direncanakan tetapi belum dapat dilaksanakan
- Keterbatasan dan sarana serta prasarana belum memadai.
- Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam rangka optimalisasi kinerja pemerintah daerah
- Belum tersedianya sistem pengolahan data yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kajian terhadap data dan informasi hasil monev tersebut belum memberikan kontribusi yang baik terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek dan diklat terkait tugas masing-masing ASN

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lembata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH				20,605,970,073	SEKRETARIAT DAERAH				22 029,174,727	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	18,941,785,339	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	20 297,779,993	Persentase
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	65,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	90,000,000	Dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	30,000,000	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10,000,000	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	10,000,000	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	20,000,000	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10,000,000	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	10,000,000	Laporan
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	13,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	13,200,000	Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	9,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	9,000,000	Laporan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**87,991,427**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**87,991,427**	**Dokumen**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	7,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	7,000,000	Dokumen
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	80,991,427	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	80,991,427	Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Terselenggaranya Manajemen PNS**	**100**	**10,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Manajemen PNS**	**100**	**10,000,000**	**Persentase**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	10,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	10,000,000	Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**596,550,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**646,550,000**	**Persentase**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15,000,000	Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	20,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	20,000,000	Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	150,144,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	150,144,000	Paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	64,872,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	64,872,000	Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2,000,000	Dokumen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	15	40,000,000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	15	460,000,000	Unit
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	250,000,000	Unit
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	10,000,000	Unit
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	10,000,000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	30,000,000	Unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	10,000,000	Unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	150,000,000	Paket
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	10,000,000	Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	3	1,843,517,807	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	3	2,188,557,807	Laporan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1,254,360,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1,599,400,000	Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	567,157,807	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	567,157,807	Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	22,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	22,000,000	Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122**	**648,331,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122**	**948,331,000**	**Unit**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lembata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	162,751,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lembata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	162,751,000	Unit

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	45,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200,000,000	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50,000,000	Unit
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		**Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**635,043,734**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**635,043,734**	**Persentase**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	374,839,494	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	374,839,494	Orang/bulan
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	60,204,240	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	60,204,240	Paket
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical *Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	200,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical *Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	200,000,000	Orang
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		**Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**2**	**2,514,806,206**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**2**	**2,514,806,206**	**Paket**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2	2,514,806,206	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2	2,514,806,206	Paket
	Penataan Organisasi		**Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Organisasi**	**138**	**308,213,000**	**Penataan Organisasi**		**Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Organisasi**	**138**	**267,843,000**	**Dokumen**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	120	90,370,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	120	50,000,300	Dokumen
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8	137,300,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8	137,300,300	Laporan
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8	54,543,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8	54,543,300	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	28,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	28,000,000	Dokumen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	18,700,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	18,700,000	Laporan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Cakupan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**25%**	**1,191,361,734**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Cakupan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**25%**	**1,203,761,734**	**Dokumen**
	Administrasi Tata Pemerintahan		**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**	**3**	**437,269,000**	**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**	**3**	**449,669,000**	**Dokumen**
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	3,920,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	10,000,000	Dokumen
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	18,680,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	25,000,000	Dokumen
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	414,669,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	414,669,000	Dokumen
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**3**	**394,225,734**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Kabupaten Lembata	**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**3**	**394,226,734**	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	79,680,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	79,680,000	Dokumen
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	301,546,734	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan	1	301,546,734	Dokumen
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Keluarga, Perkelahi, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kepolisian Umum	1	13,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Keluarga, Perkelahi, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kepolisian Umum	1	13,000,000	Dokumen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Lambata	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	207,421,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Lambata	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	207,421,000	Kasus
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kabupaten Lambata	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	9	20,685,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kabupaten Lambata	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	9	20,685,000	Dokumen
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		**Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**1**	**50,000,000**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**1**	**50,000,000**	**Dokumen**
	Fasilitasi kerjasama dalam Negeri	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	50,000,000	Fasilitasi kerjasama dalam Negeri	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	1	50,000,000	Dokumen
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		**Cakupan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan**	**100**	**472,823,000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Cakupan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan**	**100**	**527,633,000**	**Persentase**
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**10**	**125,340,000**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**10**	**129,340,000**	**Dokumen**
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	6,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	10,000,000	Dokumen
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Lambata	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	18,836,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Lambata	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	18,836,000	Laporan
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	100,504,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	100,504,000	Dokumen
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**20**	**61,095,000**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**20**	**96,320,000**	**Dokumen**
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	11,135,000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	20,000,000	Dokumen
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Lambata	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3	26,320,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Lambata	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3	26,320,000	Laporan
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Lambata	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	23,640,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Lambata	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	50,000,000	Laporan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		**Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**8**	**[illegible]**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**8**	**[illegible]**	**Dokumen**
	Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa			1					1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		**Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	2	36,083,000	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**2**	**36,083,000**	**Dokumen**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	10,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	10,000,000	Dokumen
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dar Air	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	26,083,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	26,083,000	Dokumen

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Sekretariat Daerah, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat satu Sub Kegiatan yang ada pada hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah, tetapi tidak ada dalam Rancangan Awal RKPD.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp. 20.605.970.073,-. Sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.22.029.174.727,-. Terjadi selisih sebesar Rp. 661.130.000,- hal ini dapat digambarkan sub – sub kegiatan yang mempunyai pagu lebih besar dari Rancangan Awal RKPD sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Penataan Administrasi Pemerintahan
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dapat dijelaskan bahwa terdapat 19 sub kegiatan mempunyai pagu lebih besar dari pagi RKPD hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing sub kegiatan pada organisasi perangkat daerah dan juga kondisi harga barang yang mengalami kenaikan saat ini.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Sekretariat Derah, yang melaksanakan unsur pendukung Urusan Pemerintah.

Pada tahun rencana 2024, terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Nama Perangkat Daerah: **Sekretariat Daerah.**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Cakupan koordinasi dan pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**		
	~ Bantuan Rumah Ibadah	Desa Katakeja			Proposal dimasukan sesuai jadwal
	~ Bantuan Rumah Ibadah	Desa Doripewut			Proposal dimasukan sesuai jadwal
	~ Bantuan Pembangunan Gereja St Petrus Ohe dan Waowala	Waowala			Proposal dimasukan sesuai jadwal
	~ Bantuan Pembangunan Masjid Almaskur Kolontobo	Kolontobo			Proposal dimasukan sesuai jadwal
	~ Rehabilitasi Rumah Ibadah	17 Desa se-Kecamatan Lebatukan			Proposal dimasukan sesuai jadwal
	~ Belanja Bantuan Untuk Rumah Ibadah (Gereja)	Desa Watokobu, Waijarang, Lite Ulumado dan Kel. Lewoleba			Proposal dimasukan sesuai jadwal
	~ Pembangunan pagar rumah ibadah	Desa Pada			Proposal dimasukan sesuai jadwal
	~ Pembangunan Lanjutan gedung gereja stasi Belang	Desa Watokobu			Proposal dimasukan sesuai jadwal
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		**Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		**Jumlah kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum**		
	~ Sosialisasi / penyuluhan tentang kesadaran hukum	Nagawutung 18 Desa			Akomodir
	~ Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasikepada Masyarakat di Bidang Hukumdan Perlindungan Masyarakat	Omesuri 22 Desa			Akomodir

Tabel.2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Cakupan koordinasi dan pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**		
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		**Tersedianya Dokumen hasil pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayaan		**Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayaan**		
	~ Pemekaran wilayah Kecamatan Nagawutung	(Bollbean Ilieboli, Liwulagang, Labalimut, Belobaja, Atawai) Nagawutung			Tidak Akomodir, ganti dengan sosialisasi/rapat koordinasi (moratorium)
	~ Pemetaan Ulang Wilayah Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur	(Ile Ape dan Ile Ape Timur) Kecamatan Ile Ape			Akomodir, tahun 2023 sedang berproses titik koordinat batas desa
	~ Persehatian Batas antar Kecamatan	(Kecamatan Lebatukan, Omesuri, Atadei, Ileape, Nubatukan) Kec.Lebatukan			Akomodir
	~ Pemekaran Kecamatan Baru: Kecamatan Leragere/NubaButo	(8 Desa Leragere dan Ieraiodo) Kec.Lebatukan			Tidak akomodir, sedang berproses pemekaran kec suriwula dan loyobuya (moratorium)
	~ Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan	(Omesuri - Lebatukan dan Omesuri - Buyasuri) Kec.Omesuri			Akomodir
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		**Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**		
	~ Bantuan sarana dan prasarana gereja	Boli an			Proposal dimasukan sesuai jadwal
	~ Pembangunan / Bantuan rumah dan prasarana ibadat pengabdi Allah	Wulalang			Proposal dimasukan sesuai jadwal
	~ Bantuan Rumah Ibadat	Ilee Ile Ape			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terhadap Kebijakan Nasional

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam

kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional tengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **Percepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah prioritas ketujuh yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik". Prioritas Nasional ini diturunkan dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan 2 (dua) kegiatan prioritas yakni Kegiatan Transformasi Pelayanan Publik dan Kegiatan Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel.3.1

Tujuan dan Sasaran sesuai Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata

Sekretariat Daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /sasaran	Target Kinerja 2024
1	Tercapainya Layanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	8.25
2	Tercapainya Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	49.36
3	Tercapainya Nilai Eavaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,754.05

Kegiatan

Sub bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan prioritas, yaitu pembangunan daerah sesuai dengan bidang urusan Sekretariat Daerah Lembata Tahun 2024. Program Pembangunan Daerah Kabupaten adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP Lembata sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Kabupaten Lembata di tahun 2024.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2024 :

tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.

tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023-

indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan strategis serta Pagu indikatif yang oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata di tahun 2024 program, 8 kegiatan, 21 sub kegiatan, dengan total kebutuhan dana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan strategis ini sebesar Rp. 4,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 4 kegiatan dan kegiatan, dengan pagu sebesar Rp.2.995. 508.834,-.

Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub dengan pagu sebesar Rp. 428.739.190,-.

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata dalam [illegible] 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						17,466,931,967							27,380,304,727	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						17,466,931,967							27,380,304,727	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						17,466,931,967							27,380,304,727	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*				100 persentase	14,042,663,943							25,716,119,993	
	4.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 dokumen	91,462,925			-	-	ASN		65,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	25,299,075	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokuman	9,202,125	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9,270,025	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.04	Penyusunan LKIP SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	-	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	D.\NA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI U/MUM	-	-	ASN		5,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah*				100 persentase	8,845,708,832			-	-	ASN		11,811,100,819	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/bulan	8,291,428,182	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		10,632,720,819	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	534,066,450	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	-	ASN		956,180,000	SEKRETARIAT D^ERAH
	4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12,311,375	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		13,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	7,902,525	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN . PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	63,414,700	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		80,991,427	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Management PNS*				100 persentase	7,000,000			-	-	ASN		10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	7,000,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Teredianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persentase	547,678,401			-	-	ASN		596,550,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,905,885	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,219,697	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN		20,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	42,170,500	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		64,872,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	-	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		2,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	95,813,880	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		78,749,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	12,501,639	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		15,765,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				15 unit	584,846,856			-	-	ASN		3,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	-	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	57,964,133	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12,360,000	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	444,582,723	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DH)	-	-	ASN		150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3 Laporan	541,767,217			-	-	ASN		1,496,527,807	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,157,000	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		907,370,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	525,106,167	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		567,157,807	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	152,736,470	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		152,751,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				72 Unit	250,000,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	-	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		5,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	10,850,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		30,580,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,141,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	14,940,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		5,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah*				100 persentase	425,766,138			-	-	ASN		635,043,734	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	331,822,438	Kab. Lembata, Semua kecamatan, Semua kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	ASN		374,839,484	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	80,000,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah*				2 Paket	1,000,000,000			-	-	ASN		4,314,606,206	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	1,000,000,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		2,514,606,206	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	-	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		1,800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Tersedianya Fasilitas Penataan Organisasi*				138 dokumen	694,260,568			-	-	ASN		258,213,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				120 Dokumen	150,000,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	ASN		40,370,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				6 Laporan	218,464,818	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		137,300,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				6 Dokumen	300,000,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		54,543,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	12,053,463	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		18,655,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	751,230,725	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	ASN		800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	12,016,650	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		18,700,000	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Cakupan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat***	**100 %**			**25 %**	**2,995,598,834**						**25 %**	**1,191,361,734**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan*	36 Dokumen			10 Dokumen	399,461,300			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat	10 Dokumen	437,269,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	5,000,000	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan	ASN dan Masyarakat		3,920,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	20,000,000	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		18,650,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	374,461,300	- Kab. Lambata, Semua kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		414,669,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat*	27 Dokumen			3 dokumen	2,383,515,096				4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat	8 Dokumen	394,226,734	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Kas Umum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1,950,000,000	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		79,680,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	405,450,746	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		301,546,734	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketahanan Pangan				1 Dokumen	8,084,350	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		13,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum*	1131 Dokumen			100 presPresentase	222,796,400			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat	283 Dokumen	309,866,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				271 Dokumen	175,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lambata, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		81,780,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	37,796,400	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		207,421,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan informasi Hukum yang Didokumentasi				9 Dokumen	10,000,000	- Kab. Lambeta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politk. ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarkat		20,685,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Tersedianya dokumen hasil fasilitasi kerjasama daerah*	5 Dokumen			1 dokumen	9,736,038			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politk. ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarkat	5 Dokuman	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	9,736,038	- Kab. Lambeta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politk. ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarkat		50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	*Cakupan koordinasi dan pelayanan administrasi perekonomian dan pembangunan*	100 %			100 persentase	428,739,190						25 %	472,823,000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*	40 Dokumen			10 dokumen	100,000,000			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas polik, ket entraman, ketertiben umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat	10 Dokumen	125,340,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	10,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		8,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	15,000,000	- Kab. Lembata Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiben umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		18,838,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2125		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	75,000,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		100,504,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*	60 Dokumen			100 persentase	51,407,750			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat	20 Dokumen	61,095,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	10,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		11,135,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	21,000,000	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		26,320,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				16 Laporan	20,407,750	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		23,640,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	24 Dokumen			6 dokumen	251,860,065			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat	7 Dokumen	250,305,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	40,370,250	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		44,939,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	204,146,265	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		195,951,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Orang	7,343,550	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		9,415,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*	5 Dokumen			2 dokumen	25,471,375			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat	5 Dokumen	36,083,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	91,462,925	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evalusi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	17,743,100	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat		26,063,000	SEKRETARIAT DAERAH
		JUMLAH						17,466,931,967							27,380,304,727	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah dan RPD Kabupaten Lembata tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan rencana sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan skala prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki Sekretariat Daerah.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk menjelaskan tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini untuk dipedomani.

Lewoleba, 11 Juli 2023
Kepala Sekretariat Daerah
Kabupaten Lembata,

Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19740415 199412 1 001

Rencana Kerja

(RENJA)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun 2024

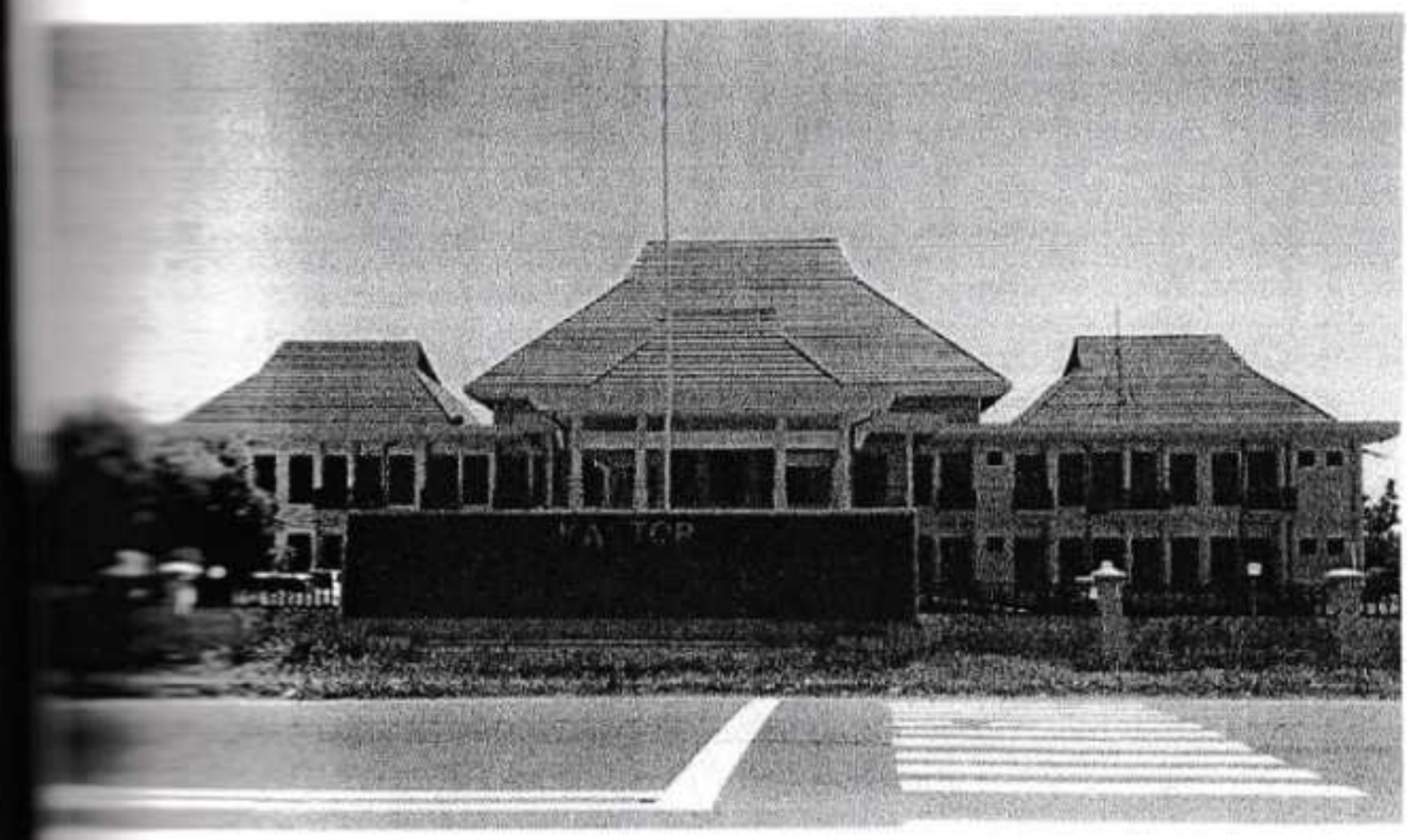

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

TAHUN 2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

adalah Kabupaten Lembata.

ntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.

adalah Bupati Lembata.

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan ngunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten bata.

ana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah en Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.

ana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra- adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

ana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja ngkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah unan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

a Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen ncanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

a Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari stra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

...an Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ...Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

... Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan

... Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

... Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika ...an sebagai berikut:

: PENDAHULUAN

: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

: PENUTUP

... Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ...at (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan ...ibat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

... Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi ... Renja Perangkat Daerah.

... dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ... dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda ...fikasi.

cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PETRUS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 25

3.1 Penelaahan terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 26

3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28

BAB V PENUTUP 65

DAFTAR TABEL

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lembata 7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata 14

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lembata 17

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lembata 24

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata 26

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lembata Tahun 2024 29

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah PD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

Penyusunan

orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

Rancangan Awal

Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

Rancangan

Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : 050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- Penyempurnaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

- Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor [illegible] Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

- Penetapan

Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah menyusun RKA Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor [illegible];

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-[illegible] Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 24);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata Tahun [illegible] adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan [illegible] Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata [illegible] ini adalah :

[illegible] pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target [illegible] Renstra Sekretariat DPRD dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun [illegible].

[illegible] instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan [illegible] dalam laporan penyelenggaraan bidang unsur pendukung [illegible] pemerintahan Sekretariat DPRD dan Laporan Kinerja.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten [illegible] Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang pada penyusunan perencanaan.

Berikut hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan pencapaian perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut

Kode					Uraian/Nomenklatur Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Program (hasil) dan Kegiatan (keluaran) Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	02				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH									
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %							
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	48 Dok/lap					12	12	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen					6	6	25%
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan					2	2	25%

4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/ bulan					35	35	25%
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Orang/ bulan					12	12	25%
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Dokumen					1	1	25%
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Laporan					18	18	25%
4	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset**	**4**	**Dok**					**4**	**4**	**100%**
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dok					2	2	25%
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Dok					2	2	25%
4	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya manajemen PNS**	**4**	**Dok**					1	1	
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok					1	1	25%
4	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**							
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
4	02	01	2.06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan					1	1	25%
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan					1	1	25%

							88 Unit					11	11	
4	02	01	2.07	08	Pengadaan Mebel	Jumlah Pakai Mebel yang Disediakan	4 Unit					1	1	25%
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit					1	1	25%
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit					10	10	25%
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit					1	1	25%
4	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	12 Laporan					3	3	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan					1	1	25%
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan					1	1	25%
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan					1	1	25%
4	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	120 Unit					30	30	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit					3	3	25%
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 Unit					22	22	25%
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit					1	1	25%
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit					1	1	25%
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit					1	1	25%
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit					1	1	25%
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit					1	1	25%

4	02	01	2.15		[illegible]	[illegible]	100 %						
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/bln				25	25	25%
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket				1	1	25%
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	25 Orang				25	25	25%
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD**	**100 %**						
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan				1	1	25%
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan				1	1	25%
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket				1	1	25%
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100 %**						
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Dokumen Ranperda yang Dibahas**	**28 Dok**				**7**	**7**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dok				1	1	25%
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dok				5	5	25%
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dok				1	1	25%

4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dok					1	1	25%
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dok					1	1	25%
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Laporan					1	1	25%
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Laporan					1	1	25%
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	8 Laporan					2	2	25%
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen					1	1	25%
4	02	02	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Tersedianya Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**32 Laporan**					**8**	**8**	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan					1	1	25%
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan					1	1	25%
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan					1	1	25%
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan					1	1	25%
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan					1	1	25%
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Laporan					1	1	25%
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Laporan					1	1	25%
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dok					1	1	25%

4	02	02	2.04	02	Publikasian Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Publikasian Tugas DPRD	4 Dok					1	1	25%
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dok					1	1	25%
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dok					1	1	25%
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4 Dok					1	1	25%
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**20 Dok**					**5**	**5**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Dok					1	1	25%
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dok					1	1	25%
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 Dok					3	3	25%
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Fasilitasi Tugas DPRD**	**16 Dok**					**4**	**4**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dok					1	1	25%
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4 Dok					1	1	25%
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Msuyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dok					1	1	25%
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dok					1	1	25%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan indikator sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan perkiraan 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata mencapai target yang direncanakan.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1.	Tersedianya rencana kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota				Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	
2.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan Perda, dan fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen				Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD. s/d ester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan tariat DPRD, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata :

- Program/kegiatan yang direncanakan tidak didukung dengan pendanaan yang maksimal.
- Personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang belum memadai serta penataan administrasi yang belum optimal.
- Pelaksanaan kegiatan DPRD yang belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang ditetapkan.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD :

- Tantangan :
  - Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekrretariat DPRD dalam menunjang kegiatan DPRD.
  - Kurangnya fasilitas pelayanan. Kondisi riil yang dihadapi adalah masih banyak hal yang perlu di benahi baik sarana maupun prasarana.
  - Kurangnya dana (biaya sangat terbatas). Anggaran yang disusun memprioritaskan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sedangkan untuk urusan Sekretariat menjadi urusan yang kurang mendapat perhatian.
- Peluang :
  - Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
  - Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukug kinerja DPRD.
  - Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yg harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya aparatur.
  - Semakin meningkatnya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kab. Lembata adalah :

- Program/kegiatan yang direncanakan tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
- Personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang belum memadai serta penataan administrasi .

Pelaksanaan kegiatan DPRD yang belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang ditetapkan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DPRD				23,838,207,422	SEKRETARIAT DPRD				23,838,207,422	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi**	**100**	**17,393,537,422**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi**	**100**	**17,393,537,422**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12**	**50,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12**	**50,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2,791,311,077**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat**	**100**	**2,791,311,077**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	2,574,181,077	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	2,574,181,077	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	202,130,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	202,130,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	10,000,000	

	Penyelenggaraan Pemeliharaan Kebaikan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Rencana Kebaikan Barang Milik Daerah SKPD	2	10,000,000	Penyelenggaraan Pemeliharaan Kebaikan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Rencana Kebaikan Barang Milik Daerah SKPD	2	10,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	40,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	40,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Terselenggaranya Manajemen PNS**	**1**	**50,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Manajemen PNS**	**1**	**50,000,000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	50,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**193,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**193,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	11,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	11,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	25,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	25,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	45,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	45,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	48,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	48,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	10,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lembata,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lembata,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	4,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	4,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16**	**925,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16**	**925,000,000**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	3	750,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	3	750,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10,000,000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10,000,000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1	55,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1	55,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**731,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**3**	**731,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	500,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	500,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	125,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	125,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	106,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	106,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30**	**589,600,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30**	**589,600,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kabupaten Lembata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	3	269,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kabupaten Lembata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	3	269,600,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	100,000,000	
	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	10,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	10,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	50,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kabupaten Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kabupaten Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	50,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kabupaten Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kabupaten Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	50,000,000	

	Penyelenggaraan Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1	387,600,000	Penyelenggaraan Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1	387,600,000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	390,300,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	390,300,000	
	Layanan Administrasi DPRD		**Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD**	**100**	**1,230,000,000**	**Layanan Administrasi DPRD**		**Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD**	**100**	**1,230,000,000**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	10,000,000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	10,000,000	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1	250,000,000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1	250,000,000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1	30,000,000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1	30,000,000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	940,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kabupaten Lambata	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	940,000,000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		**Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100**	**6,444,670,000**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100**	**6,444,670,000**	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kabupaten Lambata	**Jumlah Dokumen Ranperda yang Dibahas**	5	**678,000,000**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Kabupaten Lambata	**Jumlah Dokumen Ranperda yang Dibahas**	5	**678,000,000**	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	10,000,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	10,000,000	
	Pembahasan Rancangan Perda	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5	568,000,000	Pembahasan Rancangan Perda	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5	568,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2	100,000,000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kabupaten Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2	100,000,000	

	Pembahasan KUA dan PPAS	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	20,000,000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	20,000,000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	20,000,000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	20,000,000	
	Pembahasan APBD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	95,000,000	Pembahasan APBD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	95,000,000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	95,000,000	Pembahasan APBD Perubahan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	95,000,000	
	Pembahasan Laporan Semester	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	10,000,000	Pembahasan Laporan Semester	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	10,000,000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	120,000,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	120,000,000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		**Tersedianya Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**8**	**190,000,000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Tersedianya Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**8**	**190,000,000**	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	65,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	65,000,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	65,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	65,000,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	10,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	10,000,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	10,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	10,000,000	

	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	10,000,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	10,000,000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	10,000,000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	10,000,000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		**Tersedianya Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD**	**3**	**1,402,670,000**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Tersedianya Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD**	**3**	**1,402,670,000**	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	1,337,670,000	Pendalaman Tugas DPRD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	1,337,670,000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	60,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	60,000,000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	5,000,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	5,000,000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		**Tersedianya Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**5**	**2,959,000,000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Tersedianya Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**5**	**2,959,000,000**	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	150,000,000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	150,000,000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	19,000,000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	19,000,000	
	Pelaksanaan Reses	Kabupaten Lembata	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	2,790,000,000	Pelaksanaan Reses	Kabupaten Lembata	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	2,790,000,000	
	Fasilitasi Tugas DPRD		**Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD**	**4**	**855,000,000**	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD**	**4**	**855,000,000**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	800,000,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	800,000,000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	5,000,000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	5,000,000	

	Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Perkebunan dan Pangan	2	230,000,000	Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Perkebunan dan Pangan	2	230,000,000	
		Kabupaten Lembata					Kabupaten Lembata				
	Pengembangan Inovasi dan Tekhnologi	Kabupaten Lembata	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2	177,472,690	Pengembangan Inovasi dan Tekhnologi	Kabupaten Lembata	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2	177,472,690	
	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	130,000,000	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	130,000,000	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	47,472,690	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	47,472,690	

perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian sub kegiatan.

indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis sama yaitu sebesar Rp. 23.838.207.422,-.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan perangkat daerah Sekretariat DPRD, yang melaksanakan unsur urusan pemerintahan.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Tabel program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terhadap Kebijakan Nasional

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah **epat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 program prioritas nasional yaitu :

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

an.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Mempercepat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Dasar.

4. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah:

2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas Penguatan Kapasitas Demokrasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Sekretariat DPRD.

dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 terlihat pada berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
2	*3*	*4*	*5*
Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Tersedianya rencana kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada
		Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan Perda, dan fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

ram dan Kegiatan

Subbab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan prioritas, yaitu pembangunan daerah sesuai dengan bidang urusan Sekretariat DPRD paten Lembata Tahun 2024. Program Pembangunan Daerah Kabupaten bata adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten Lembata sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai RPD Kabupaten Lembata di tahun 2024.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan ram, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator nerja daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis serta Pagu Indikatif yang ksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata di tahun 2024 berjumlah 1 program, 6 kegiatan, 28 sub kegiatan, dengan total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan strategis ini sebesar Rp. 530.000,- yang diuraikan hanya pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata dalam [illegible]024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

	4	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						23,838,207,422.00								26,333,764,886.00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						23,838,207,422.00								26,333,764,886.00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	-	17,393,537,422.00							-	18,182,918,036.00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	50,000,000.00							6 Dokumen	57,500,000.00	
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	10,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	6 Dokumen	11,500,000.00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok		Dok	1 Dok	10,000,000.00	- Kab, Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	
	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

	4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok		D o k	1 Dok	5,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengem bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE);serta Inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik;yang efektif, akuntabel, transperan serta partisipatif	-	1 Dokumen	5,750,000.00
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah*	%		%	100 %	2,791,311,077.00						35 Orang/bulan	3,210,007,739.00
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	35 Orang/bulan	2,574,181,077.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transperan serta partisipatif	-	35 Orang/bulan	2,960,308,239.00
	4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap		Lap	1 Lap	5,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengem bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meni ngkatkan Kinerja Birokrasi. 6.Peningkat an tatakelola p emerinngga raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Laporan	5,750,000.00
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset	Dok		Dok	4 Dok	50.000.000,00						2 Dokumen		
	4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok		Dok	2 Dok	10.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	2 Dokumen		
	4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya manajemen PNS	%		%	100 %	50,000,000.00						1 Dokumen		
	4.02.01.2.05.03	Pencatatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok		Dok	1 Dok	50,000,000.00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengem bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	193,000,000.00						1 P a	221,950,000.00	
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik,yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Paket	
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	49,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengambangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Paket	
	4.02.01.2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	50,000,000.00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Laporan	57,500,000.00
	4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	Unit		Unit	Unit	925,000,000.00						3 Unit	201,250,000.00
	4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit	750,000,000.00	- Kab. Lambata, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengem bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	3 Unit	0.00
	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														

													6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif			
	4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	55,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dess	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengem bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi 6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Unit	63,250,000.00
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	Lap		Lap	3 Lap	731,000,000.00						1 Laporan	840,650,000.00
	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap		Lap	1 Lap	125,000,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Laporan	143,750,000.00
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

													6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif			
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	Unit		Unit	50 Unit	589,600,000.00						3 Unit	678,040,000.00
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	3 Unit	269,600,000.00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengem bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi 6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	3 Unit	310,040,000.00
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

	4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	10,000,000.00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dess	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Unit	11,500,000.00
	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

													6.Peningkatan tatakelola pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif			
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	287,000,000.00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Paket	330,550,000.00
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD*	%		%	100 %	1,230,000,000.00						1 Dokumen	1,459,850,000.00
	4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dok		Dok	1 Dok	10,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	11,500,000.00
	4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD													

	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Lap		Lap	1 Lap	30,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Laporan	40,000,000.00
	4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														

2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	*Jumlah dokumen RANPERDA yang disetujui DPRD*	Dok		D e k	5 Dok	6,444,670,000.00						5 Dokumen	7,150,836,850.00
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen Ranperda yang Dibahas*	Dok		D e k	5 Dok	678,000,000.00						1 Dokumen	779,700,000.00
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dok		D e k	1 Dok	10,000,000.00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	5. Pengem bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	11,500,000.00
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													

														pemerintah dan pelayanan publik,yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif			
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademi															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik,yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	2 Dokumen	115,000,000.00
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran*	Dok		Dok	7 Dok	360,000,000.00						1 Dokumen	414,000,000.00
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS															

	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah *Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	Dok		Dokumen	1 Dokumen	20,000,000.00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	23,000,000.00
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD														

													6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif			
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dok		Dok	1 Dok	95,000,000.00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	109,250,000.00
	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester														

	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dok		Dok	1 Dok	120,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penggembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	138,000,000.00
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Tersedianya Dokumen/Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	Dok		Dok	8 Dok	180,000,000.00						1 Laporan	218,500,000.00
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Lap		Lap	1 Lap	65.000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengem bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi 6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik,yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Laporan	
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														

													pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif			
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian															
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lap		Lap	1 Lap	10,000,000.00	- Kab, Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatalaksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Laporan	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam															

	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dok		Dok	1 Dok	10,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran														

Renja Sekretariat DPRD

													6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaydnan publik.yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif			
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dok		Dok	1 Dok	10,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Tersedianya Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD*	Dok		Dok	4 Dok	1,402,670,000.00						1 Dokumen	1,352,536,850.00
	4.02.02.2.04.02	Penataan Tugas DPRD														

	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dok		Dok	1 Dok	60,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengem bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE);serta Inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	69,000,000.00
	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD														

	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	Dok		Dok	5 Dok	2,956,000,000.00						1 Laporan	3,402,850,000.00
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Lap		Lap	1 Lap	150,000,000.00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	5. Pengam bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkat an tatakelola p enyelengga raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Laporan	172,500,000.00
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

													6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif			
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pulaksanaan Reses	Dok		D o k	3 Dok	2,790,000,000.00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	3 Dokumen	3,208,500,000.00
	4.02.02.2.06	Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Dok		Dok	4 Dok	855,000,000.00						1 Dokumen	963,250,000.00
	4.02.02.2.06.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

													Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkat an tatakelola p enyelenggа raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif				
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	5. Pengem bangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pe merintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meni ngkatkan kinerja Birokrasi. 6.Peningkat an tatakelola p enyelenggа raan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	-	1 Dokumen	29,750,000.00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Sekretariat DPRD.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Sekretaris DPRD
Kabupaten Lembata,

Nasrun Neboq, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19680612 20012 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

: 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

BASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah [illegible]rahkan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan [illegible]ana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian [illegible] Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.

Renja Bappelitbangda Kabupaten Lembata Tahun 2024 merupakan [illegible]k komitmen nyata Bappelitbangda dalam mengimplementasikan sebagaimana [illegible]antkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang [illegible]enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [illegible] Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan [illegible]psi yang nebegaskan proses penyelenggaraan Negara harus didahului dari [illegible]es perencanaan.

Kinerja Bappelitbangda dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) [illegible]juan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan [illegible]s pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai perencana Pembangunan daerah [illegible] dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip good govermance, [illegible] dalam rangka terwujudnya perencanaan Pembangunan yang [illegible]sinambungan, transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian RENJA Bappelitbangda Tahun 2024 disusun semoga dapat [illegible]akan sebagai sumber informasi yang cukup bagi pihak – pihak yang [illegible]pentingan khususnya untuk pencapaian kinerja Organisasi.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Lembata,

dr. L. Mathias A. K. Beyeng
★ Pembina Utama Muda
NIP.19720702 199803 1 009

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah [illegible]rahkan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan [illegible] Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian [illegible]engembangan Daerah Kabupaten Lembata.

Renja Bappelitbangda Kabupaten Lembata Tahun 2024 merupakan [illegible] komitmen nyata Bappelitbangda dalam mengimplementasikan sebagaimana [illegible]rkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang [illegible]ggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [illegible] Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan [illegible] yang nebegaskan proses penyelenggaraan Negara harus didahului dari [illegible] perencanaan.

Kinerja Bappelitbangda dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) [illegible]juan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan [illegible] pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai perencana Pembangunan daerah [illegible] dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip good govermance, [illegible] dalam rangka terwujudnya perencanaan Pembangunan yang [illegible]sinambungan, transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian RENJA Bappelitbangda Tahun 2024 disusun semoga dapat [illegible]makan sebagai sumber informasi yang cukup bagi pihak – pihak yang [illegible]pentingan khususnya untuk pencapaian kinerja Organisasi.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Lembata,

drh. Mathias A. K. Beyeng

Pembina Utama Muda

NIP.19720702 199803 1 009

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
Daftar Tabel	.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	.....	**1**
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	.....	**6**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	19
2.3 *Isu -isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan* Fungsi Perangkat Daerah	.....	*22*
2.4 Review Terhadap Rencangan Awal RKPD	.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyrakat	.....	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	.....	**41**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	42
3.3 Program dan Kegiatan	.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	.....	**44**
BAB V PENUTUP	.....	**69**

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Lembata	20
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 Kabupaten Lembata	24
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lembata	40
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Lembata	42
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD)	45

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bappelitbangda Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Bappelitbangda dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Bappelitbangda Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Nama Perangkat Daerah: Bappelitbangda

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5	01				PERENCANAAN									
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Admministrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	100 %							
5	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dok/lap					12	12	25%
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen					2	2	25%
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%

5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan					2	2	25%
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	16 Laporan					4	4	25%
5	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan administrasi keuangan PD**	**4 dok/lap/ bulan**					**25%**	**25%**	**6%**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan					14	14	100%
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen					14	14	29%
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan					1	1	25%

							Laporan Realisasi SKPD dan Laporan Koreksi Penyisihan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
5	0 1	0 1	2.0 2	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8	Dokumen					2	2	25%
5	**0 1**	**0 1**	**2.0 3**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada PD**	**8**	**Laporan**					**2**	**2**	25%
5	0 1	0 1	2.0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Laporan					2	2	25%
5	**0 1**	**0 1**	**2.0 5**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**4**	**Laporan**							
5	0 1	0 1	2.0 5	0 3	Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	20	dok							
5	0 1	0 1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 0	Orang							
5	**0 1**	**0 1**	**2.0 6**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**4**	**Laporan**					**1**	**1**	25%
5	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket					1	1	25%
5	0 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
5	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
5	0 1	0 1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%

5	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah	35	%					20%	20%	20%
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	Unit							
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		Unit							
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31	Unit					5	5	16%
5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit							
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200	Unit							
5	**01**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Laporan**					**1**	1	25%
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan					12	12	25%
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan					12	12	25%
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan					1	1	2%
5	**01**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**23**	**%**					**23**	**23**	**100%**
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya		unit							
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit					14	14	**100%**
5	01	01	2.09	02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit							

[illegible]					Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit							
5	0 1	0 1	2 0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit							
5	**0 1**	**0 2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**	**48**	**Dokume n**					**13**	**13**	**27%**
5	**0 1**	**0 2**	**2.0 1**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**30**	**dok**					**8**	**7**	**23%**
5	0 1	0 2	2.0 1	0 2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	8	Dokumen					2	2	**25%**
5	0 1	0 2	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4	Berita Acara					1	1	**25%**
5	0 1	0 2	2.0 1	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4	Berita Acara					1	1	**25%**
5	0 1	0 2	2.0 1	0 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4	Berita Acara					1	1	**25%**
5	0 1	0 2	2.0 1	0 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	10	Dokumen					3	2	**20%**
5	**0 1**	**0 2**	**2.0 2**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**8**	**Dok**					**4**	**4**	**50%**
5	0 1	0 2	2.0 2	0 1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunana Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4	Dok							

5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah buku Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	4	Buku						6%
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**28**	**Dok**					**5**	**5**	**18%**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	16	Laporan					5	5	**31%**
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	4	Kerja Sama							
5	01	02	2.03	03	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	Laporan							
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**%**					**13**	13	25%
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**52**	**Laporan**					**1**	**1**	**2%**
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dokumen					2	2	**20%**

5	0 1	0 3	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan					2	2	25%
5	0 1	0 3	2.0 1	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan					1	1	25%
5	0 1	0 3	2.0 1	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunanannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) .	10 Dokumen					2	2	20%
5	0 1	0 3	2.0 1	0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunana Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan					1	1	25%
5	0 1	0 3	2.0 1	0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan					2	2	25%
5	0 1	0 3	2.0 1	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan					1	1	25%
5	**0 1**	**0 3**	**2.0 2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (SDA)**	**Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang perekonomian dan sumber daya alam**	**52 Laporan**					**12**	**12**	**23%**

					[illegible]	[illegible]								
5	01	03	2.02	02	Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Laporan					1	1	25%
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8	Laporan					2	2	25%
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Perekononiam	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perkenomian	4	Laporan					1	1	25%
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD,RPJMD DAN RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunanannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dokumen					2	2	20%
5	01	03	2.02	06	Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam	4	Laporan					1	1	25%
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	8	Laporan					2	2	25%

[illegible]					[illegible]	[illegible]								
5	0 1	0 3	2.0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang infrastruktur dan kewilayahan	52	Laporan					12	12	23%
5	0 1	0 3	2.0 3	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur yang dikoordinir penyusunanannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dokumen					2	2	20%
5	0 1	0 3	2.0 3	0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	4	Laporan					1	1	25%
5	0 1	0 3	2.0 3	0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8	Laporan					2	2	25%
5	0 1	0 3	2.0 2	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastuktur	4	Laporan					1	1	25%
5	0 1	0 3	2.0 3	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunanannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dokumen					2	2	20%

5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayanah	8	Laporan					2	2	25%
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4	Laporan					1	.1	25%
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Cakupan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**100**	**%**					**25%**		**0%**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan**	**25**	**laporan**					**2**	**2**	**8%**
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	**1**	Laporan					1	1	**100%**
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	**4**	Laporan					1	1	**25%**

						Pengendalian Bidang Kelembagaan dan Pelatalaksanaan									
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	4	Laporan							0%
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	4	Laporan					2	2	50%
5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	4	Laporan					1	1	25%
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4	Laporan					1	1	25%
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian bidang Sosial dan Kependudukan**	**4**	**dokumen**					**2**	**2**	**50%**
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4	Dokumen					1	1	25%
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitan dan Pengembangan Kesehatan	4	Dokumen					1	1	25%
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah**	**4**	**Dokumen**					3	3	75%

5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	3	Dokumen					1	1	50%
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4	Dokumen					2	2	**50%**
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Tekhnologi**	**Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**8**	**Dok/Lap**					**1**	**1**	**13%**
5	05	02	2.04	01	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4	Dokumen					1	1	**25%**
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4	Laporan					1	1	**25%**

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA				Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA				Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD dan Perubahannya yang telah ditetapkan dengan PERKADA				Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD				100%	100%	100%		100%	100%	100%	

6.	Laporan hasil kelitbangan (buku)											
7.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.				-	100%	100%		-	100%	100%	

Isu-isu **Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Bappelitbangda s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda :
   - Belum ada regulasi tingkat kabupaten terkait penelitian dan pengembangan.
   - Belum adanya uraian tugas bagi jabatan fungsional.
   - Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
   - Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan.
   - Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar aparatur.
   - Belum adanya aparatur dengan jenjang pendidikan S3, serta sangat terbatasnya aparatur dengan jenjang pendidikan S2.
   - Terbatasnya data dan informasi perencanaan.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda :
   - Tantangan :
     - Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah.
     - Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan.
     - Tuntutan dan aspirasi semakin beragam, dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
   - Peluang :
     - Teknologi, informasi dan komunikasi terkait perencanaan yang semakin berkembang (*e-planning*/SIPD).
     - Semakin banyaknya program-program peningkatan sumber daya aparatur perencana dari kementerian/lembaga yang dapat diakses.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda, adalah :

- Belum tersedianya data sektoral yang lengkap dan terupdate serta terintegrasi untuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Belum tersedianya sistem pengolahan data yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Minimnya ketersediaan data dan informasi terkait kelitbangan, yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan dan kelitbangan.
- Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran sehingga program/kegiatan yang telah direncanakan tidak semuanya ada dalam dokumen anggaran. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPD dan renstra perangkat daerah.
- Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kajian terhadap data dan informasi hasil monev tersebut belum memberikan kontribusi yang baik terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
- Jumlah aparatur perencana yang tidak sebanding dengan dokumen/kajian terkait penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang harus dikerjakan.
- Jumlah aparatur yang memahami penelitian dan pengembangan masih minim.
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek dan diklat terkait perencanaan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bappelitbangda sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Nama Perangkat Daerah:
Bappelitbangda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Pen
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(1
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				*7.368.531.499*	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				*7.533.531.499*	
	PERENCANAAN				6.720.654.186	PERENCANAAN				6.885.654.186	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Cakupan Pelayanan Admministrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	100	3.719.369.796	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Cakupan Pelayanan Admministrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	100	3.884.369.796	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	26.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	26.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3.500.000	

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32	2.733.369.796	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32	2.733.369.796	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	2.554.369.796	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	2.554.369.796	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	170.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	170.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18	3.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1.000.000	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	40.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	40.000.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**5**	**150.000.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**5**	**250.000.000**	
	Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	5	-	Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	5	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	250.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Jumlah dokumen Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**27**	**314.500.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Jumlah dokumen Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**27**	**314.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	2.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	2.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	250.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Lembata**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**161**	**300.000.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**161**	**365.000.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	100.000.000
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	32 unit	15.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	150.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150	100.000.000

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	8.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	80.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Lembata**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	77	65.000.000	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lembata**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	77	65.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	55.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54	5.000.000

	[illegible]		[illegible] dipelihara/direhabilitasi			[illegible]		[illegible] dipelihara/direhabilitasi		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Kab. Lembata**	**Ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**		**2.167.541.560**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Lembata**	**Ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**		**2.167.541.560**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Kab. Lembata**	**Dipelihara/Direhabilitasi**	**8**	**1.784.950.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kab. Lembata**	**Dipelihara/Direhabilitasi**	**8**	**1.784.950.000**
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2	34.950.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2	34.950.000
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Lembata	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	50.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Lembata	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	50.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	50.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	50.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	150.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	150.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3	1.500.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3	1.500.000.000

	[illegible]		[illegible] Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			[illegible] Daerah		[illegible] Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	4	35.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	4	35.000.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Lembata	Tersedianya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7	291.295.780	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Lembata	Tersedianya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7	291.295.780	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/kota	**Kab. Lembata**	**Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**	**5**	**56.295.780**	**Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/kota**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**	**5**	**56.295.780**	
	Pengendalian Kerjasama Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	32.000.000	Pengendalian Kerjasama Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	32.000.000	
	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	24.295.780	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	24.295.780	

	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Kab. Lembata**	**Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	1	310.400.000	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kab. Lembata**	**Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1**	**310.400.000**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	70.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	70.000.000
	Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	25.000.000	Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	25.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	25.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	25.000.000

			Bidang Pemerintahan					Bidang Pemerintahan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunanannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	90.400.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunanannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	90.400.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunana Manusia	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	25.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunana Manusia	Kab. Lembata	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/RenjaBidang Pembangunan Manusia	1	25.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	25.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	25.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	25.000.000	

	[illegible]		Pembangunan Bidang perekonomian dan sumber daya alam			[illegible]		Pembangunan Bidang perekonomian dan sumber daya alam		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(RPJPD,RPJMD DAN RKPD)	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunanannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	55.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(RPJPD,RPJMD DAN RKPD)	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunanannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	55.000.000
	Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	25.000.000	Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	25.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	25.342.830	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	25.342.830
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Perekononiam	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perkenomian	1	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Perekononiam	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perkenomian	1	25.000.000

			[illegible] pengusulannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					[illegible] pengusulannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lembata	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam	1	25.000.000	Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lembata	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam	1	25.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	2	25.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	2	25.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	25.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Kab. Lembata**	**Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**1**	**263.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kab. Lembata**	**Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**1**	**263.000.000**	

			penyusunanannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					penyusunanannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lembata	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	1	25.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lembata	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	1	25.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	28.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	28.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastuktur	1	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastuktur	1	25.000.000	

			yang dikendaki penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			dan RPPLH)		yang dikendaki penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	1	25.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	1	25.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayanah	1	25.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayanah	1	25.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	25.000.000
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**Kab. Lembata**			**647.877.313**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Kab. Lembata**			**647.877.313**
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Kab. Lembata**	**Cakupan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**25**	**647.877.313**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kab. Lembata**	**Cakupan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**25**	**647.877.313**

	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Lembata	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	50.404.623	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Lembata	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	50.404.623
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Kab. Lembata**	**Jumlah Dokumen Penelitian bidang Sosial dan Kependudukan**	**1**	**190.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Dokumen Penelitian bidang Sosial dan Kependudukan**	**1**	**190.000.000**
	Penelitian dan Aspek-aspek Sosial	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	190.000.000	Penelitian dan Aspek-aspek Sosial	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	190.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Kab. Lembata**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah**	**2**	**230.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Kab. Lembata**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah**	**2**	**230.000.000**
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2	230.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2	230.000.000

	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	130.000.000	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	130.000.000
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	47.472.690	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	47.472.690

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Bappelitbangda, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 namun direncanakan pada Renja Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.7.312.235.719,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 7.477.235.719,-.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Bappelitbangda, yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Perangkat Daerah : Bappelitbangda

Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda, adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bappelitbangda.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan . Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
	Meningkatkan tata kelola perencanaan,	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan,	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada

	pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada
			Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD dan Perubahannya yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%
2.	Meningkatkan kulaitas tata kelola kelitbangan daerah	Meningkatnya kualitas kinerja kelitbangan daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	-
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100%

Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappelitbangda Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda di Tahun 2024 sebanyak 3 Program, 13 Kegiatan, 70 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 4.786.424.284,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 260.000.000,-.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 6 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 615.000.000,-.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari 4 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.965.200.000,-.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Lembata dalam 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						7.957.413.782,00							6.351.801.101,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.011.189.478,00							6.351.801.101,00	
	5.01	PERENCANAAN						4.045.989.478,00							6.303.583.786,00	
1.	5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD***	-			100 %	3.170.989.478,00						-	3.358.995.178,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	19.500.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda	-	26.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.500.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		3.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

											PRIORITAS						
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	2.832.189.478,00			-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda	-	2.822.195.178,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.758.832.686,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		2.614.195.178,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	66.356.792,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			2 Laporan	23.000.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda	-	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	23.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

											PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan penataan kepegawaian PD*	-			1 Laporan	3.500.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda	-	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	3.500.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	143.000.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda	-	312.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah*	-			41 Unit	15.000.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda	-	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				32 Unit	15.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Laporan	89.800.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda	-	82.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	52.800.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah PD yang Dilakukan Pemeliharaan*	-			23 Unit	45.000.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda	-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	40.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah undefined undefined Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah***	-			**19 Dok 4 Orang 6 Laporan 8 Dokumen**	**260.000.000,00**						-	**2.111.245.780,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			3 Dokumen	160.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum	-	1.784.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														

NO	KODE	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4, Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		34.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4, Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4, Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4, Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			1 Dokumen	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum	-	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				4 Orang	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			7 Laporan	60.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum	-	291.295.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF RENJA OPD TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		235.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		24.295.780,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah***	-			**25 %**	**615.000.000,00**						-	**833.742.830,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			1 Dokumen	205.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra	-	310.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN BESARAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BESARAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4, Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4, Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4, Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF RENJA OPD TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		90.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RENJA OPD TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Dokumen Perancanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	-			1 Dokumen	205.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra	-	260.342.830,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perancanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.342.830,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	INDIKATOR HASIL / OUTCOME PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														

										PRIORITAS			TAHUN 2024		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang infrastruktur dan kewilayahan*	-			1 Dokumen	205.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra	-	263.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan*	-			1 Dokumen	205.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra	-	263.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4, Reformasi birokrasi 4,Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4, Reformasi birokrasi 4,Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**2.965.200.000,00**							**647.877.313,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Cakupan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah***	-			**25 %**	**2.965.200.000,00**						-	**647.877.313,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan*	-			1 Laporan	1.335.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4, Reformasi birokrasi 4,Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum	-	50.404.823,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4, Reformasi birokrasi 4,Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				1 Laporan	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				1 Laporan	400.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa														
			Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa				1 Laporan	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 Laporan	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	185.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab, Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		50.404.623,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penelitian bidang Sosial dan Kependudukan*	-			1 Dokumen	250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	ASN dan Masyarakat Umum	-	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi, Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	ASN dan Masyarakat Umum		190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	ASN dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah*	-			1 Dokumen	1.130.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	ASN dan Masyarakat Umum	-	230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	230.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6.Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	ASN dan Masyarakat Umum		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	400.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	-			2 Dokumen	250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum	-	177.472.690,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Umum		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6.Peningkatan tatskelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	ASN dan Masyarakat Umum		47.472.690,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
								946.224.284,00							0,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan*	-			1 Laporan	946.224.284,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BESAR KEBUTUHAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	946.224.284,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	JUMLAH							7.957.413.762,00							6.951.861.181,00	

BAB V

PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Bappelitbangda dan RPD Kabupaten Lembata di 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan rencana sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk menjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pembangan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipergunakan.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Lembata,

drh. Mathias A. K. Beyeng

Pembina Utama Muda

NIP.19720702 199803 1 009

RENCANA KERJA

(RENJA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,karena berkat dan rahmat serta karuniaNya, Rencana Kerja(RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 dapat tersusun.

Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BKAD Kabupaten Lembata tahun 2023 – 2026.

Proses penyusunan Renja dimulai dengan penyusunan rancangan awal Renja yang mengacu pada rencana strategis, rancangan awal Rencana Kegiatan Perangkat Daerah yang difokuskan pada pengkajian eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta analisis kebutuhan riil perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Lukman Suksin,SE

Pembina Utama Muda

NIP: 19700424 200012 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul .....

Daftar Isi .....

Daftar Tabel .....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Landasan Hukum.....

1.3 Maksud dan Tujuan.....

1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah....

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah...

3.3 Program dan Kegiatan.....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....

BAB V PENUTUP.....

DAFTAR TABEL

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....

Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....

Tujuan dan Sasaran Renja BKAD.....

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.....

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu 2019 tentang Pengelollaan keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

FORM

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Lombok

Nama Perangkat Daerah: **Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	02				**KEUANGAN**										
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100	%							0%
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	48	Dokumen					12	12	25%
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen					2	2	25%
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	4	Dokumen					1	1	25%
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	4	Dokumen					1	1	25%
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25%
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25%
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan					2	2	25%
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	16	Laporan					4	4	25%
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatasan administrasi keuangan perangkat daerah**	**1**	**Laporan**					1	1	25%
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Orang/bulan					14	14	25%
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	Dokumen					2	2	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tinghat Realisasi (%)			
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan					1	1	25%
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	72	Laporan					18	18	25%
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen					1	1	25%
5	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**16**	**Laporan**					4	4	25%
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dokumen					2	2	25%
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Laporan					2	2	25%
5	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**12**	**Laporan**					3	3	25%
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen					1	1	25%
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	Orang					2	2	25%
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	4	**Laporan**					**1**	**1**	**25%**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket					2	2	25%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen						0	0%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	48	Laporan					12	12	25%
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**16**	**Unit**					**4**	**4**	**25%**
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit						0	0%
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit					1	1	25%
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit					3	3	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit						0	0%
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit							0%
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Laporan**					**25**	**25**	**25%**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan					12	12	25%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan					12	12	25%
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4	Laporan					1	1	25%
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	**468**	**Unit**					**117%**	**117**	**25%**
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	184	Unit					46	46	25%
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit						0	0%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	280	Unit					70	70	25%
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit					1	1	0%
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit							0%
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku**		**%**							
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah**	**Persentase RKA Perangkat Daerah yang benar sesuai ketentuan dan penetapan Perda APBD dan Perda P-APBD tepat waktu**	**40**	**Laporan**					**10**	**10**	**25%**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8	Dokumen					2	2	0%
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8	Dokumen					2	2	0%
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8	Dokumen					2	2	0%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Program dan Kegiatan	
										Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	8	Dokumen					2	2	0%
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8	Dokumen					2	2	0%
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase tertib administrasi SPM Perangkat Daerah sesuai ketentuan sebagai dasar penerbitan SP2D tepat waktu**	**100**	**Dokumen**					**25**	**25**	**25%**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48	Dokumen					12	12	25%
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	48	Dokumen					12	12	25%
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	48	Dokumen					12	12	25%
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan secara benar dan tepat waktu**	**92**	**Laporan**					**23**	**23**	**25%**
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	72	Laporan					18	18	25%
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	8	Laporan					2	2	25%
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	8	Dokumen					2	2	25%
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	Dokumen					1	1	25%
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100**	**Laporan**					**2**	**2**	**25%**
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	Laporan					1	1	25%
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	Laporan					1	1	25%

Kode					Uraian/Sub-Uraian Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku**	100	LAporan					10	10	25%
5	02	03	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku**	100	Laporan					10	10	25%
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	8	Dokumen					2	2	25%
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	8	Dokumen					2	2	25%
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Laporan					1	1	25%
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	Laporan					2	2	25%
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan					2	2	25%
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4	Laporan					1	1	25%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Opini BPK Terhadapa Laporan Keuangan Daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.	Penyususnn Dokumen RKA				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
3.	Penyusunan Dokumen DPA				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
4.	Penyusunan Dokumen APBD				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
5.	Persentase Belanja Pendidikan (20%)				20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
6.	Perentase Belanja Kesehatan (10%)				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
7.	Bagi Hasil Kab/Kota dan Desa (11%)				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	
8	Penetapan APBD				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
9	Persentase Penyampaian dan Penetapan dokumen Aset Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Badan Keuangan dan Aset Daerah s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah :
   - Masih terbatasnya Norma, *Standar,Prosedur,Penganggaran,Penatausahaan* maupun Pelaporan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.
   - Belum optimalnya koordinsi,integrasi,sinkronisasi,penganggaran,penatausaan maupun pelapran Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.
   - Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi ASN pengelola Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah :
   - Tantangan :
     - Masih terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur dari segi kuantitas maupun kualitas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
     - Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah yang berbasis Teknologi Informasi yang belum optimal.
   - Peluang :
     - Teknologi, informasi dan komunikasi terkait pengelolaan Keuangan yang semakin berkembang (*e-financial*/SIPD).
     - Semakin banyaknya program-program peningkatan sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dari kementerian/lembaga yang dapat diakses.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan keuangan dan Aset Daerah , adalah :

- Belum optimalnya koordinasi,intergasi,sinkronisasi penganggaran,penatausahaan maupun pelaporan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah antar perangkat daerah.
- Adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi mulai dari perencanaan,penganggaran,penatausahaan dan pelaporan keuangan

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				242,428,335,727	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				242,428,335,727	
	KEUANGAN				242,428,335,727	KEUANGAN				242,428,335,727	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100	31,915,941,894	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100	31,915,941,894	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12	50,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12	50,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2	10,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	4	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	4	-	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya penataan administrasi keuangan perangkat daerah**	1	30,676,898,082	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya penataan administrasi keuangan perangkat daerah**	1	30,676,898,082	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tuejangan ASN	14	28,948,818,910	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	28,948,818,910	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1,714,079,172	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1,714,079,172	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	7,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18	3,500,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	3,600,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	3,600,000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat**	**1**	**34,156,760**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada**	**1**	**34,156,760**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	7,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	7,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	27,156,760	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	27,156,760	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**1**	**210,000,000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**1**	**210,000,000**	
	Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1	10,000,000	Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1	10,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	200,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	200,000,000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**25**	**390,000,000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**25**	**390,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	100,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	25,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	250,000,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Lembata**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**25**	**57,500,000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**25**	**57,500,000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	10,000,000			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	10,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	30,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	30,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	17,500,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	17,500,000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Lembata**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**25**	**375,837,372**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lembata**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**25**	**375,837,372**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	272,906,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	272,906,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	100,431,372	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	100,431,372	

(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(7)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2,600,000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Lambata**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**25**	**121,549,880**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lambata**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**25**	**121,549,880**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lambata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	106,549,880	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lambata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	106,549,880	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	5,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lambata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Kab. Lambata**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku**	**25**	**209,342,966,499**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kab. Lambata**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku**	**25**	**209,342,966,499**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Lambata	**Persentase RKA Perangkat Daerah yang benar sesuai ketentuan dan penetapan Perda APBD dan Perda P-APBD tepat waktu**	**25**	**15,198,469,758**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Kab. Lambata	**Persentase RKA Perangkat Daerah yang benar sesuai ketentuan dan penetapan Perda APBD dan Perda P-APBD tepat waktu**	**25**	**15,198,469,758**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Lambata	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	42,293,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Lambata	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	42,293,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lambata	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	42,293,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lambata	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	42,293,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	2	438,982,790	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	2	438,982,790	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	2	396,845,040	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	2	396,845,040	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	14,278,055,928	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	14,278,055,928	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Lambata	**Persentase tertib administrasi SPM Perangkat Daerah sesuai ketentuan**	**25**	**299,907,676**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Kab. Lambata	**Persentase tertib administrasi SPM Perangkat Daerah sesuai ketentuan**	25	**299,907,676**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		141,488,378	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		141,488,378	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		69,139,410	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		69,139,410	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Kab. Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,		89,279,888	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Kab. Lambata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,		89,279,888	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Lambata	**Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan**	**25**	**786,459,928**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Kab. Lambata	**Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan**	25	**786,459,928**	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	29,666,454	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	29,666,454	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	1	97,044,370	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lambata	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	1	97,044,370	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Kab. Lambata	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	2	314,631,820	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Kab. Lambata	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	2	314,631,820	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban/Pelaksanaan APBD	Kab. Lombata	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan	1	348,117,284	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban/Pelaksanaan APBD	Kab. Lombata	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan	1	348,117,284	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lembata	Terlaksananya kegiatan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	2	193,068,129,137	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lembata	Terlaksananya kegiatan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	2	193,068,129,137	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	184,846,616,003	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	184,846,616,003	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	8,211,513,134	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	8,211,513,134	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Lembata	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku	25	1,169,427,334	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Lembata	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku	25	1,169,427,334	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku	25	1,169,427,334	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku	25	1,169,427,334	
	Penyusunan Standar Harga	Kab. Lembata	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	60,382,150	Penyusunan Standar Harga	Kab. Lembata	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	60,382,150	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	10,392,672	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	10,392,672	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	628,810,076	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	628,810,076	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	400,198,445	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	400,198,445	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	31,793,260	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	31,793,260	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	37,850,531	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	37,850,531	

namun dalam implementasinya belum optimal.

- Kapasitas SDM aparatur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan tidak terdapat perbedaan, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.242.428.335.727,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 242.428.335.727,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang melaksanakan unsur penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan asset Daerah. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan pendalaman sektor keuangan .Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah pada BKAD.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah pada BKAD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja BKAD Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
			Penyusunan Doken RKA	Tepat Waktu
			Penyusunan Doken DPA	Tepat Waktu
			Penyusunan Doken APBD	Tepat Waktu
			Persentase Belanja Pendidikan (20%)	20%
			Persentase Belanja Kesehatan (10%)	10%
			Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa (11%)	11%
			Penetapan APBD	Tepat Waktu
		Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan dokumen asset daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Tahun 2024 sebanyak 2 Program, 5 Kegiatan, 20 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 178.128.800.484,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 4 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 177.156.763.821,-.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 970.036.663,-.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						197.067.116.344,00							223.356.876.735,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						197.067.116.344,00							223.356.876.735,00	
	5.02	KEUANGAN						197.067.116.344,00							223.356.876.735,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah*	-			100 %	18.940.315.860,00						-	35.193.099.867,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			12 Dokumen	53.300.000,00			-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata	-	50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.500.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.900.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Pemerintah Kabupaten Lambata		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.900.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lambata		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan Perangkat daerah*	-			1 Laporan	17.522.600.000,00			-	-	Pemerintah Kabupaten Lambata	-	33.942.056.055,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	17.100.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	Pemerintah Kabupaten Lambata		32.213.976.883,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	400.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lambata		1.714.079.172,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lambata		7.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lambata		3.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3.500.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		3.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			1 Laporan	27.156.760,00			-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata	-	34.156.760,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		7.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	27.156.760,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		27.156.760,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan kepegawaian perangkat daerah*	-			1 Laporan	200.000.000,00			-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata	-	110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	200.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan aktivitas sumber daya perangkat daerah*	-			25 %	432.500.000,00			-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata	-	134.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.500.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		2.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		2.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	300.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	-			25 %	100.000.000,00			-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata	-	420.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			25 %	446.064.093,00			-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata	-	375.837.372,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	272.906.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		272.906.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	155.678.093,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		100.431.372,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		2.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanantya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			25 %	159.275.007,00			-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata	-	125.549.680,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	100.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		105.549.680,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	20.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24.275.007,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pemerintah Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.***	-			**25 %**	**177.188.763.821,00**						-	**186.896.349.534,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase RKA Perangkat Daerah yang benar sesuai ketentuan dan penetapan Perda APBD dan Perda P-APBD Tepat waktu.*	-			25 %	11.927.188.257,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lombata	-	11.961.754.257,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lombata		42.293.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lombata		42.293.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	438.962.790,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan tranaformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lombata		438.962.790,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	396.845.040,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lambata		396.845.040,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	11.041.340.427,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lambata		11.041.340.427,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase tertib administrasi SPM Perangkat daerah sesuai ketentuan sebagai dasar penerbitan SP2D tepat waktu*	-			25 %	1.299.907.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lambata	-	299.907.676,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	141.488.378,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lambata		141.488.378,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	69.139.410,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lambata		69.139.410,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	1.069.279.888,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lambata		89.279.888,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Presentase Perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan secara benar dan tepat waktu*	-			25 %	591.342.644,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lambata	-	786.459.929,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	29.666.454,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lambata		29.666.454,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	97.044.370,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		97.044.370,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	314.631.820,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		314.631.820,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		345.117.284,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya kegiatan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-			2 Laporan	163.338.345.244,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata	-	173.948.227.673,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK PENANG
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	162.533.611.348,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA DESA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		170.946.616.003,00	BADAN KEU ASET DAER
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	804.733.896,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		3.001.611.670,00	BADAN KEU ASET DAER
3.	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku***	-			**25 %**	**970.036.663,00**						-	**1.167.427.334,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Prosentase laporan barang milik daerah dan barang milik perangkat daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu*	-			25 %	970.036.663,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata	-	1.167.427.334,00	BADAN KEU ASET DAER
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		80.382.150,00	BADAN KEU ASET DAER
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	10.392.872,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		10.392.872,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	500.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		626.810.076,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	350.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		400.198.445,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	31.793.260,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		31.793.260,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	37.850.531,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		37.850.531,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	JUMLAH							197.057.116.344,00							223.356.876.735,00	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Badan Keuangan dan asset Daerah.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Kepala Badan Keuangan dan asset Daerah

Kabupaten Lembata,

Lukman Suksin,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19700424 200012 1 005

RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024

LEWOLEBA
2023

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah *Bupati Lembata*.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mekanisme penyusunannya secara lengkap dan jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja terdiri dari tahap persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, tahap Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Tahapan Penetapan Renja. Penyusunan rancangan awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal renja PD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjadi jembatan antara dokumen perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan dalam mendukung visi dan misi daerah. Selanjutnya renja ini disempurnakan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015

tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Lembata Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 85);
18. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

19. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Lingkup Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

a. Menjabarkan Rencana Strategis Daerah (RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026) kedalam Rencana tahunan perangkat Daerah (Renja Badan Pendapatan Daerah) yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Tahunan Daerah (RKPD)
b. Mewujudkan Sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan pada Badan Pendapatan Daerah.

1.3.2. Tujuan

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2024.
b. Menyediakan Dokumen yang komprehensif sehingga memberikan petunjuk yang jelas dalam melaksanakan program kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat Daerah, proses penyusunan Renja perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kabupaten dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tindak Lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja perangkat Daerah sudah disahkan..

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal dengan RKPD dengan hasil kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Secara garis besar berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan seluruh Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan dan perkiraan maju tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan;
c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap hasil rencana perangkat daerah bertujuan mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan daerah. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun berikutnya.

Mengevaluasi renja dalam pelaksanaan teknisnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD/DPA SKPD. Karena Rencana Kerja yang termuat dalam dokumen perencanaan diwujudkan dalam rencana kerja anggaran dan dokumen anggaran. Dengan kata lain, instrument pelaksanaan rencana kerja adalah pelaksanaan anggaran.

Hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		target renstra thn terakhir 2026					isi target renja 2023dasi sipd		
5	02				KEUANGAN									
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Admministrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	100 %					100%		
5	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dokumen					12		
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen					2	2	25%
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen					1	0	0%
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen					1	0	0%
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan					2	2	25%
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	16 Laporan					4	4	25%
5	02	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan administrasi keuangan PD**	100 %							
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan					14	3	5%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan					1	0	0%
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan					18	11	15%
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen					1	1	25%
5	02	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada PD**	**20 Dokumen/ Laporan**							
5	02	01	2.03	06	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dokumen					1	1	13%
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan					1	1	13%
5	02	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**25 %**					**25%**		
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	4 Dokumen					1	1	25%
5	02	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**25 %**					**25%**		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket					1	1	25%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket					1	1	25%
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket					1	0	0%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen					2	0	0%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan					12	8	17%
5	02	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**25 %**					**25%**		
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit					1	0	0%
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 Unit					6	0	0%
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit					2	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	4 Laporan					25%		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan					12	8	17%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan					12	8	17%
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan					1	1	25%
5	02	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	100 %					25%		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	50 unit					23	23	46%
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit					5	0	0%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit					5	0	0%
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit					1	1	25%
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasanara Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit					1	0	0%
5	02	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**								
5	02	04	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	100 %					25%		
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah	4 Dokumen					1		
5	02	02	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen					1		
5	02	02	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan					1		
5	02	02	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Unit					5		
5	02	02	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak D	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan					1		
5	02	02	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan					1		
				07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan dengan NJOP nya	3 Laporan					1100		
				08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen					1		
				09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4 Layanan					1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen					1		
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen					1		
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen					1		
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen					1		
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	4 Laporan					1		
15	Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan					1		

Berdasarkan table diatas, dapat dijelaskan bahwa :

Pelaksanaan Rencana Kerja belum menghasilkan Kinerja yang signifikan antara Target dan Realisasi. Hal ini disebabkan Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan Tahun Pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan baru terimplementasi dalam 3 (tiga) bulan tahun berjalan

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian indicator kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata hingga tahun berjalan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inaspektorat Daerah
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Targer PAD			Rp.43.427.259.576,00	Rp.56.918.987.968,00	Rp.60.582.625.272,00	Rp. 64.595.490.694,00	Rp.41.272.074.504,00		Rp.60.582.625.272,00	Rp. 64.595.490.694,00	95,03%
2.	Presentase PAD dari Total Pendapatan			5,22%	5,32%	5,36%	5,64	5,22%		5,36%	5,64	

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata , dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :

1. Kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak semakin baik;
2. Adanya perbaikan dan pembaharuan tata kerja pendataan dan penagihan pajak dan retribusi;
3. Semaikn baiknya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2023, capaian kinerja Renstra dan Analisis Kinerja Pelayanan badan maka dalam rangka meningkatkan kinerja, diperlukan langkah-langkah dan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media, baik konvensional maupun digital, yang pada akhirnya diharapkan mampu membangun tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
2. Mengoptimalkan informasi teknologi (IT) agar pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas horizontal dan vertikal untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. V.1

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		OPD
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					BADAN PENDAPATAN DAERAH					**7,363,187,394**			**5,916,505,122**	BPD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**									
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	**%**	Kab. Lembata	100	**4,234,680,294**		100	**4,346,147,712**	BPD
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	Kab. Lembata	12	**44,200,000**		12	**50,000,000**	BPD
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Lembata	2	10,000,000		2	10,000,000	BPD
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kab. Lembata	1	4,300,000		1	5,000,000	BPD
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kab. Lembata	1	4,300,000		1	5,000,000	BPD
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Lembata	1	4,600,000		1	10,000,000	BPD
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Lembata	1	11,000,000		1	10,000,000	BPD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		OPD
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kab. Lembata	2	5,000,000		2	5,000,000	BPD
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kab. Lembata	4	5,000,000		4	5,000,000	BPD
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya laporan penataan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Laporan**	Kab. Lembata	1	**3,621,108,634**		1	**3,913,030,032**	BPD
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	Kab. Lembata	14	3,472,887,984		14	3,745,553,272	BPD
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kab. Lembata	12	134,220,650		12	149,476,760	BPD
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kab. Lembata	1	5,000,000		1	7,000,000	BPD
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Kab. Lembata	18	5,000,000		18	7,000,000	BPD
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	Kab. Lembata	2	4,000,000		2	4,000,000	BPD
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Laporan**	Kab. Lembata	2	**31,381,764**		1	**22,367,260**	BPD
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kab. Lembata	2	5,000,000		2	7,000,000	BPD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		OPD
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kab. Lembata	2	26,381,764		1	15,367,260	BPD
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**Laporan**	Kab. Lembata	1	**10,000,000**		1	**10,000,000**	BPD
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Kab. Lembata	1	10,000,000		1	10,000,000	BPD
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kab. Lembata		-			-	BPD
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya laporan penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**Laporan**	Kab. Lembata	1	**131,606,000**		1	**82,500,000**	BPD
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Lembata	1	2,500,000		1	2,500,000	BPD
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Lembata	1	35,000,000		1	20,000,000	BPD
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab. Lembata	1	8,500,000		1	10,000,000	BPD
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab. Lembata		-				BPD
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab. Lembata	12	85,606,000		12	50,000,000	BPD
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	Kab. Lembata	15	**106,154,600**			**47,000,000**	BPD
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kab. Lembata	2	50,154,600			6,000,000	BPD
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kab. Lembata	8	25,000,000		5	10,000,000	BPD
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kab. Lembata	5	31,000,000		5	31,000,000	BPD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		OPD
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**laporan**	Kab. Lembata	1	**159,229,296**		1	**155,691,020**	BPD
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab. Lembata	12	141,729,296		12	137,256,000	BPD
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab. Lembata	12	14,000,000		12	15,935,020	BPD
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab. Lembata	12	3,500,000		12	2,500,000	BPD
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilakukan pemeliharaan**	**Unit**	Kab. Lembata	39	**131,000,000**		39	**65,559,400**	BPD
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kab. Lembata	23	85,000,000		23	50,559,400	BPD
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Kab. Lembata	10	5,000,000		10	5,000,000	BPD
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab. Lembata	5	5,000,000		5	5,000,000	BPD
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Lembata	1	36,000,000		1	5,000,000	BPD
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Lembata						BPD
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Lembata		-				BPD
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah**	**%**	Kab. Lembata	25	**3,128,507,100**		25	**1,570,357,410**	BPD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		OPD
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah**	**%**	Kab. Lembata	25	**3,128,507,100**		25	**1,570,357,410**	BPD
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	Kab. Lembata	1	50,000,000		1		BPD
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Kab. Lembata	3	150,000,000		3	11,794,670	BPD
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Kab. Lembata	9	90,000,000	Usulan musrenbangcam	9	8,074,310	BPD
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Kab. Lembata	51	1,250,000,000		51	166,134,630	BPD
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Kab. Lembata	1	350,000,000	Usulan musrenbangcam	1	579,838,430	BPD
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Kab. Lembata	2	180,000,000		2	76,592,310	BPD
5	**02**	**04**	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	OP	Kab. Lembata	1500	300,000,000	Usulan musrenbangcam	1500	300,000,000	BPD
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Kab. Lembata	3	30,000,000		3	30,000,000	BPD
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Kab. Lembata	500	345,822,600		500	301,753,130	BPD
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Kab. Lembata	12	10,000,000		12	17,897,500	BPD
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Kab. Lembata	12	52,684,500		12	52,684,500	BPD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		OPD
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Dokumen	Kab. Lembata	12	50,000,000		12		BPD
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak daerah	Dokumen	Kab. Lembata	12	50,000,000		12	25,587,930	BPD
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Kab. Lembata	1	220,000,000		1		BPD

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa perbedaan yang ditemukan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutukan. Perbedaan dimaksud adalah :

1) Adanya rumusan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di dalam Rancangan Awal RKPD. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan berdasarkan analisis sektoral.
2) Adanya perubahan pagu indikatif penyesuaian alokasi anggaran bersasarkan kapasitas fiskal daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	17 Desa di Kecamatan Nubatukan dan 18 Desa di Kecamatan Nagawutung	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	1500 OP	
2.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak di Desa	22 Desa di Kecamatan Omesuri	Jumlah Laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Desa di Kecamatan Ile Ape Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	

Usulan Program dan kegiatan diatas merupakan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Tingkat Kecamatan dan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten yang telah sesuai dengan prioritas daerah serta menjawabi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan diimplementasikan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan secara terpadu dan menyeluruh yang diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen jangka menengah daerah maupun tahunan daerah (RPD dan RKPD) dengan tetap memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Tema pembangunan nasional tahun 2024 adalah : **""Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan"**

pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prioritas Nasional Tahun 2024 adalah :

1. PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkadilan.
2. PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
6. PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Terhadap 7 (tujuh) prioritas nasional tersebut diatas, maka jika dikaitkan dengan tupoksi perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah yang menjalankan urusan Keuangan diarahkan untuk mendukung **Prioritas Nasional 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkadilan. .**

Peningkatan Pendapatam Asli Daerah merupakan salah satu upaya dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas serta berkeadilan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran perangkat daerah Bapenda tetap berpedoman pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah jangka menengah yang secara operasional dituangkan dalam Renstra, yaitu :

Tabel.3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024
1.	Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	• Jumlah PAD	Rp.60.582.625.242
			• Prosentase PAD dari Total Pendapatan	5,36 %

3.3. Program dan Kegiat+an

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sebagai perwujudan dalam mendukung pencapaian Tujuan Daerah dalam RPD 2023-2026, Program dan kegiatan yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah harus mendukung pencapaian tujuan Daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan Keuangan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka Badan ini menjalankan program/kegiatan untuk mendukung Tujuan 6 yaitu Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapenda Kabupaten Lembata Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan ini adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan total pagu anggaran sebesar Rp.732.333.767,00.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta tolok ukur dan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**4.543.408.059,86**								
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.543.408.059,86**							**8.442.874.183,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**4.543.408.059,86**							**8.442.874.183,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah***	-			**7 Dokumen**	**3.811.074.292,86**						-	**5.015.926.443,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			12 Dokumen	38.622.323,00			-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata	-	48.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.218.004,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.586.351,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		4.730.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.302.351,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		4.730.309,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.631.039,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9.309.389,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		12.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4.893.826,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.681.364,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.122.214.747,86			-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata	-	3.983.219.497,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.968.407.053,86	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		3.820.176.782,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	134.220.650,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		147.642.715,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.023.550,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4.234.238,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	8.329.250,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		4.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	32.549.693,00			-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata	-	34.519.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				14 Dokumen	6.186.925,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	26.356.764,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		29.019.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.427.601,00			-	-	-	-	11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.427.601,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan				0 Orang	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	146.990.480,00			-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata	-	144.766.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.977.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		2.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.262.680,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		38.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.224.800,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		9.350.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.400.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	96.126.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		84.166.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	240.071.400,00			-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata	-	474.610.180,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	98.165.850,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		165.510.180,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	31.860.825,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		275.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	110.044.725,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		34.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	26.373.985,00			-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata	-	175.152.226,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.319.295,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		155.902.226,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.771.589,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		15.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.293.100,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		3.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	198.830.063,00			-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata	-	144.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	162.631.323,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		93.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4.721.250,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.470.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	36.007.490,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab.Lembata		39.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab Lambata		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Bapenda Kab Lambata		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah***	-			**25 %bd268**	**732.333.767,00**						-	**3.426.945.740,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	732.333.767,00			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lambata	-	3.426.945.740,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	22.571.272,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lambata		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	45.204.615,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lambata		125.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				9 Laporan	20.148.505,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		99.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				51 Unit	91.004.820,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		1.375.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	42.457.778,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		385.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	18.542.625,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		198.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	19.093.463,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lambata		330.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				3 Dokumen	8.167.825,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lambata		33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				500 Layanan	345.822.600,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lambata		380.404.860,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	13.192.625,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lambata		11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	54.039.301,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, kat entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		57.952.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2..01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	13.192.925,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, kat entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2..01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	22.426.925,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, kat entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2..01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	7.526.925,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, kat entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		25.587.930,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2..01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	8.842.063,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Lembata		242.000.000,00	SADAN PENDAPATAN DAERAH
	JUMLAH							4.543.406.059,86							8.442.874.183,00	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

a. Setiap Bidang wajib menyusun RKA Tahun 2024 yang dihimpun dan diharmonisasikan oleh Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Program/Kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Dalam hal alokasi atau ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana temuat dalam Renja, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

a. Setiap Bidang yang menjadi unit kerja pelaksanaan Renja harus mengevaluasi Renja tahun 2024 yakni membandingkan antara target program/kegiatan/sub kegiatan dan jumlah dana dalam Renja dengan jumlah program/kegiatan yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

a. Setiap Bidang sebagai PPTK harus mendalami Renja Tahun 2024 secara sungguh-sungguh saat pembahasan perubahan anggaran.

b. Setiap Bidang wajib menyusun DPA dan Anggaran Kas dan disampaikan kepada TAPD untuk mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

c. Setiap Bidang selaku PPTK wajib melaksanakan DPA sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

d. Setiap Bidang wajib mengendalikan pelaksanaan DPA dan membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rumusan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai acuan dalam penyusunan RKA tahun 2024 untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lembata,

Thomas Tip Des Lelangrian, SH., M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19651230 199312 1 002

2023

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA KERJA
2024

LEWOLEBA
JULI 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD, sebagai bagian dari penjabaran atas Dokumen Rencana Strategis OPD yang disusun untuk waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis OPD tahun 2023-2026. Penyusunan RENJA tersebut menyajikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Program dan kegiatan yang disajikan dalam perubahan RENJA selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD yakni urusan kepegawaian dan kediklatan pegawai. Selain itu menyajikan pula program/kegiatan non urusan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian pembangunan di bidang kepegawaian dimasa transisi ini yakni periode 2023-2026 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026. Mengingat hal tersebut diatas, maka seluruh pimpinan dan staf lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata harus melaksanakannya secara akuntable dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja *(better performance).*

Lewoleba, 11 Juli 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata

SAID KOPONG, S.SOS.,M.Si
NIP. 19720702 199803 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan 1

1.1. Latarbelakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun Lalu 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 29

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 29

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 30

3.2. Program dan Kegiatan 31

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 32

Bab V Penutup 37

Lampiran :
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi

kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lembata

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5	03				**KEPEGAWAIAN**									
5	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100 %**	-	-	-	-	-		
5	03	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45 Dok/lap**	-	-	-	-	**12**	**16**	**25**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	-	-	-	-	2	2	40
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	-	-	-	-	2	2	25
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	16 Laporan	-	-	-	-	4	4	25
5	**03**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	**168 Dok/lap/ bulan**	-	-	-	-	**36**	**36**	**21**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	48 Laporan/ bulan	-	-	-	-	6	6	13
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	-	-	-	-	12	12	25
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	64 Laporan		-	-	-	16	16	25
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25
5	**03**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**	-	-	-	-	**2**	**2**	**50**
5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
5	**03**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**104 Dokumen**	-	-	-	-	**1**	**1**	**25**
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	4 dok	-	-	-	-	1	1	25
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	-	-	-	-	-	-	-
5	**03**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Adminisrasi Umum Perkantoran Yang Tersedia pada Perangkat Daerah**	**20 %**	-	-	-	-	**16**	**20**	**25**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	-	-	-	-	2	2	25
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	1	1	25
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	1	1	25
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	-	-	-	-	12	12	150
5	**03**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17 paket**	-	-	-	-	**32**	**17**	**25**
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	-	-	-	32	32	640
5	**03**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36 Laporan**	-	-	-	-	**36**	**36**	**25**
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	-	-	-	12	12	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12	12	100
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12	12	100
5	**03**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (Setelah**	**74 paket**	-	-	-	-	-	**14**	**25**
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	-	-	-	-		4	13
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	-	-	-	-		10	25
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-		-	-
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kaantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-		-	-
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes) Rasio Pegawai Fungsional (Tenaga Guru dan Nakes) Presentase ASN Yang Mengikuti DiklTa Formal,**	**25 %**	-	-	-	-		**25**	**25**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**113 Dokumen**	-	-	-	-	**11**	**6**	25
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	-	-	-	-	2	2	200
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	-	-	-	-	1	1	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Admir	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 Dokumen	-	-	-	-	1	1	1
5	03	02	2.01	0008	Koordinasi Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN Yang Difasilitasi	1 Lembaga	-	-	-	-	1	1	100
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	-	-	2	2	200
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	-	-	-	-	2	2	50
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan	-	-	-	-	2	2	50
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN**	**900 Dokumen**	-	-	-	-	**113**	**5**	**25**
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan ASN	200 Dokumen	-	-	-	-	25	25	13
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	-	-	-	-	63	63	13
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen	-	-	-	-	25	25	13
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi ASN**	**350 orang**	-	-	-	-	**70**	**120**	**25**
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitasnya	132 orang	-	-	-	-	38	38	29
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	178 orang	-	-	-	-	28	28	16
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25
5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi	32 orang	-	-	-	-	2	2	6
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**308 Dokumen**	-	-	-	-	**77**	**77**	**25**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Penghargaan	200 orang	-	-	-	-	50	50	25
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100 Kasus	-	-	-	-	25	25	25

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Berdasarkan matriks (table) 2.1.Capaian semua sub kegiatan dari target yang ditetapkan 80 % dan sisanya belum dapat diukur karena kegiatan terjadi pada pertengahan tahun anggaran.

2. Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Dari 47 sub kegiatan yang direncanakan sebahagian besarnya baru terealisasi 50% dari target yang ditetapkan.

3. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Berdasarkan matriks (table) 2.1. yang ditampilkan tidak ada sub kegiatan yang realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan karena pengukuran untuk tahun berjalan (2023) hanya terjadi untuk 1 (satu) semester saja. Selain itu terdapat beberapa sub kegiatan yang terserapannya bisa maksimal diakhir tahun sesuai rencana anggaran kasnya.

4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan.

   Beberapa factor yang mengakibatkan tidak tercapainya atau melebihi target kinerja baik program, kegiatan, sub kegiatan walaupun data yang ditampilkan tidak ada sub kegiatan yang melampaui target dan juga tidak tercapai adalah kurangnya komitmen dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan serta rendahnya intervensi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tarsebut.

5. Dampak yang timbul terhadap target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Dampak yang akan timbul terhadap tercapainya target program, kegiatan, sub kegiatan yakni SKPD akan memperoleh kinerja baik dan sebaliknya jika tidak tercapai target program, kegiatan, sub kegiatan yang telah direncanakan SKPD akan memperoleh kinerja tidak baik (buruk).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dapat diikuti pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Manajemen ASN				70,90	80,46	-	70,90	-	80,46	-	

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang digambarkan pada table 2.2. tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Manajemen ASN dari target yang ditetapkan sebesar 70,90 untuk Rencana Kerja Tahun 2023 (Tahun I Renstra) belum dapat diukur karena terjadi dipertengahan tahun, selanjutnya penilaian NSPK dilakukan di awal tahun berikutnya oleh pihak Badan Kepegawaian Negara RI.
2. Adapun point-point penilaian Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Manajemen ASN meliputi :
   - Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
   - Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
   - Pengangkatan ASN
   - Jabatan
   - Pangkat
   - Pola Karier
   - Pengembangan Karier ASN
   - Mutasi
   - Penilaian KInerja
   - Penghargaan
   - Disiplin
   - Cuti
   - Kode Etik
   - Pemberhentian
   - Jaminan Pensiun dan Hari Tua
   - Pengganjian, Tunjangan dan Fsilitasi
   - Pensiun
   - Perlindungan

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja Renstra dan analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah :

- Rendahnya pemahaman aturan kepegawaian serta implementasinya di lingkungan instansi pemerintah.
- Belum adanya uraian tugas yang jelas bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan.
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur terkait peningkatan kapasitas kinerja dan pengembangan karier.
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar aparatur.
- Belum adanya aparatur dengan jenjang pendidikan S3, serta sangat terbatasnya aparatur dengan jenjang pendidikan S2.
- Data dan informasi kepegawaian belum terupdate secara maksimal .

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :

♦ Tantangan :

- Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah.
- Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan.
- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam, dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

♦ Peluang :

- Teknologi, informasi dan komunikasi terkait perencanaan yang semakin berkembang (*e-planning*/SIPD).
- Semakin banyaknya program-program peningkatan sumber daya aparatur perencana dari kementerian/lembaga yang dapat diakses.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, adalah :

- Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran sehingga program/kegiatan yang telah direncanakan tidak semuanya ada dalam dokumen anggaran. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target program/kegiatan yang telah

ditetapkan dalam RPD dan renstra perangkat daerah.

- Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kajian terhadap data dan informasi hasil monev tersebut belum memberikan kontribusi yang baik terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
- Jumlah aparatur perencana yang tidak sebanding dengan dokumen/kajian terkait penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang harus dikerjakan.
- Jumlah aparatur yang memahami penelitian dan pengembangan masih minim.
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek dan diklat terkait perencanaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: BKPSDMD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**					
	Kepegawaian					**Kepegawaian**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pelayanan Admministrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Cakupan Pelayanan Admministrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	-		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	-		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	-		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	34 Dokumen		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	34 Dokumen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14 Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14 Bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan	18 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan	Kab.	Jumlah Laporan Keuangan	18 Dokumen		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	-		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	-		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	-		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengurusan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengurusan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lembata	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lembata	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Lembata	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Lembata	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia	25		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia	25		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	-		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Dokumen		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Dokumen		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah paket mebel yang disediakan	-		Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah paket mebel yang disediakan	-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		
	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		
	Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Dokumen		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Dokumen		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)	8 unit		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)	8 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit		
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		**Rasio Pegawai Fungsional (Non Guru dan Nakes)**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Rasio Pegawai Fungsional (Non Guru dan Nakes)**			
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	8 Dokumen		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	8 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Lembata	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Dokumen		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Lembata	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Dokumen		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		
	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		
	Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	5 Dokumen		Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	5 Dokumen		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen		Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat A	Kab. Lembata	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen		Pengelolaan Kenaikan Pangkat A	Kab. Lembata	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen		
	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		
	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Lembata	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi ASN	120 orang		Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Lembata	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi ASN	120 orang		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Lembata	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (UDIN dan PIM)	110 orang		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Lembata	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (UDIN dan PIM)	110 orang		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Lembata	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (TUBEL)	5 orang		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Lembata	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (TUBEL)	5 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Orientasi PPPK dan Latsar CPNSD)	250 Dokumen		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Orientasi PPPK dan Latsar CPNSD)	250 Dokumen		
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Lembata	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	5 orang		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Lembata	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	5 orang		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32 Dokumen		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32 Dokumen		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Lembata	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 orang		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Lembata	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 orang		
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Dokumen		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Dokumen		

Dari tabel 2.3 terkait perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 namun direncanakan pada Renja Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.7.312.235.719,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 7.477.235.719,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/ kegiatan /sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan tersebut, disesuaikan/ dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang melaksanakan unsur penunjang kepegawaian.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN				
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				
	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	NIHIL			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian				
	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN				
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat				

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	NIHIL			
	Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bappelitbangda.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Terwujudnya Kualitas Manajemen ASN Yang Profesional dan BerAKHLAK Opini BPK	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Yang Profesional dan BerAKHLAK Opini BPK	Indeks Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Manajemen ASN	87,42

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di Tahun 2025 sebanyak 2 Program, 12 Kegiatan, 45 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 5.253.145.257, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah, terdiri dari 4 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.874.369.922.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp.3.378.775.335.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata dalam Renja 2025, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH TAHUN 2024

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						5.957.409.283,00							33.440.916.223,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						5.957.409.283,00							33.440.916.223,00	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25	3.324.260.546	Kab. Lembata					25	4.509.575.930	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Dokumen	30.204.371	Kab. Lembata					16	50.000.000	
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13.436.491	Kab. Lembata					4	10.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	-	Kab. Lembata					2	5.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	-	Kab. Lembata					2	5.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	16.767.880	Kab. Lembata					2	10.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				-	-	Kab. Lembata					2	10.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	-	Kab. Lembata					4	5.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	Kab. Lembata					2	5.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah				34 Dokumen	2.982.921.934	Kab. Lembata					34	3.240.670.288	
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	2.833.723.521	Kab. Lembata					14	3.005.345.738	BKPSDMD
	5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	118.549.714	Kab. Lembata					12	221.324.550	BKPSDMD
	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	11.141.211	Kab. Lembata					1	7.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				18 Dokumen	19.507.487	Kab. Lembata					18	7.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4 Dokumen	33.725.992	Kab. Lembata					4	31.608.100	
	5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-	-	Kab. Lembata					1	5.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.03.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	-	Kab. Lembata					2	-	BKPSDMD
	5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	33.725.992	Kab. Lembata					1	26.608.100	BKPSDMD
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengurusan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-	Kab. Lembata					2	10.000.000	
	5.03.01.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						Kab. Lembata						-	BKPSDMD
	5.03.01.2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-	-	Kab. Lembata					50	10.000.000	BKPSDMD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						5.957.409.282,09							22.440.916.223,00	
	5.03.01.2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-		Kab. Lembata					50	-	BKPSDMD
	5.03.01.2.05	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				-	-	Kab. Lembata					-	-	BKPSDMD
	5.03.01.2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	-	Kab. Lembata					-	-	BKPSDMD
	5.03.01.2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-	Kab. Lembata					-	-	BKPSDMD
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah				25	105.547.599	Kab. Lembata					25	152.500.000	
	5.03.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2	4.196.960	Kab. Lembata					2	2.500.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2	20.670.189	Kab. Lembata					2	20.000,000	BKPSDMD
	5.03.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	-	Kab. Lembata					1	-	BKPSDMD
	5.03.01.2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2	21.433.450	Kab. Lembata					2	10.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				-	-	Kab. Lembata					2	20.000,000	BKPSDMD
	5.03.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Dokumen	59.247.000	Kab. Lembata					10	100.009.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				229	-	Kab. Lembata					17	543.230.775	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	-	Kab. Lembata						-	BKPSDMD
	5.03.01.2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				-	-	Kab. Lembata					5	10.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-		Kab. Lembata					-	-	BKPSDMD
	5.03.01.2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	Kab. Lembata					-	-	BKPSDMD
	5.03.01.2.07	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	Kab. Lembata					1	10.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.07	Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	Kab. Lembata					1	30.000,000	BKPSDMD
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36 Dokumen	81.579.550	Kab. Lembata					36	215.143.167	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	-	Kab. Lembata					12	175.400.860	BKPSDMD
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Dokumen	41.633.800	Kab. Lembata					12	34.742.307	BKPSDMD
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	39.945.750	Kab. Lembata					12	5.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)				8 unit	90.281.100	Kab. Lembata					16	113.423.600	
	5.03.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 unit	90.281.100	Kab. Lembata					50	93.423.600	BKPSDMD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		OPD Penanggung jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						**5.957.409.282,00**							**11.449.916.223,00**	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	-	Kab. Lembata					50	5.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	-	Kab. Lembata					-	-	BKPSDMD
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				-	-	Kab. Lembata					1	5.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				-	-	Kab. Lembata					1	5.000.000	BKPSDMD
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				-	-	Kab. Lembata					1	5.000.000	BKPSDMD
	TUJUAN. 2.	**Terwujudnya budaya kerja dan etos kerja ASN yang akuntabel dan produktif**														
	SASARAN 2.1.	**Meningkatnya penataan dan kinerja ASN**	***Persentase penempatan ASN sesuai Kompetensi***				**25**							**25**		
			Persentase Pelanggaran Disiplin				**7**							**6**		
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Pegawai Fungsional (Non Guru dan Nakes)**				**25**	**2.633.148.736**						**25**	**6.931.340.293**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				8 Dokumen	421.632.441	Kab. Lembata					8 Dokumen	457.244.998	
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	20.847.577	Kab. Lembata					1	19.980.850	BKPSDMD
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	198.844.867	Kab. Lembata					2	303.534.680	BKPSDMD
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	35.972.000	Kab. Lembata					1	38.454.960	BKPSDMD
	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Dokumen	17.575.275	Kab. Lembata					1	20.221.040	BKPSDMD
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	102.201.231	Kab. Lembata					1	25.907.680	BKPSDMD
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	33.219.064	Kab. Lembata					1	33.847.858	BKPSDMD
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	13.072.427	Kab. Lembata					1	15.297.930	BKPSDMD
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN				5 Dokumen	352.325.426	Kab. Lembata					5 Dokumen	317.852.870	
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				3 Dokumen	37.571.975	Kab. Lembata					3	24.072.830	BKPSDMD
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	63.290.125	Kab. Lembata					1	30.084.000	BKPSDMD
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	251.463.326	Kab. Lembata					1	263.696.040	BKPSDMD
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi ASN				120 orang	1.755.632.977	Kab. Lembata					120	6.073.850.025	
	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (UDIN dan PIM)				110 orang	509.986.450	Kab. Lembata					110	1.000.000.000	BKPSDMD
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (TUBEL)				5 orang	160.000.000	Kab. Lembata					5	275.000.000	BKPSDMD
	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Orientasi PPPK dan Latsar CPNSD)				250 Dokumen	841.553.800	Kab. Lembata					250	3.498.850.025	BKPSDMD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						5.957.409.282,00							22.440.916.223,00	
	5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				5 orang	244.092.727	Kab. Lembata					5	1.300.000.000	BKPSDMD
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				32 Dokumen	103.557.892	Kab. Lembata					32 Dokumen	82.392.400	
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	36.160.591	Kab. Lembata					1	10.645.280	BKPSDMD
	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	18.514.112	Kab. Lembata					1	16.251.410	BKPSDMD
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				50 orang	16.089.809	Kab. Lembata					50	17.488.040	BKPSDMD
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				25 Dokumen	32.793.389	Kab. Lembata					25	38.007.670	BKPSDMD

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,
Kabupaten Lembata,

SAID KOPONG, S.SOS.,M.SI
Pembina Utama Muda
NIP.19720702 199803 1 009

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RENJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH
TA. 2024

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I. PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang.....1
1.2. Landasan Hukum.....2
1.3. Maksud dan Tujuan.....3
1.4. Sistematika Penulisa.....5

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....7

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....8

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....11

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....12

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....13

3.1. Telaahan Terhadap Kibijakan Nasional.....13

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....14

3.3. Program dan Kegiatan.....15

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....16

Bab V. PENUTUP 17

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Inspektorat Daerah.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. *Rumusan Rancangan Akhir*

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Inspektorat Daerah untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 *Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);*
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (*Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran* Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Inspektorat Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Lombata

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	1				INSPEKTORAT DAERAH									
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDA	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %							
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanRKA-SKPD, Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dok/lap					12	12	25%
6	1	1	2.01	1	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen					2	2	11%
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen					1	1	33%
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	3 Dokumen					1	1	33%
6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	3 Dokumen					1	1	33%
6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen					1	1	33%
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan					2	2	33%
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	12 Laporan					4	4	33%
6	1	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan administrasi keuangan PD**	**4 Laporan**					1	1	25%
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan					4	4	7%
6	1	1	2.02	2	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen					12	12	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan					1	1	25%
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Laporan					18	18	25%
6	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan danAnalisis Prognosis RealisasiAnggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16	Dokumen					4	4	25%
6	1	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaer**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada PD**	**8**	**Laporan**					**2**	**2**	25%
6	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	**Laporan**					2	2	25%
6	1	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**15**	**Laporan**					**6**	**6**	**40%**
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan administrasi pegawai	15	ORANG					6	6	40%
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24	Orang					0	0	0%
6	1	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**4**	**Laporan**					**1**	**1**	25%
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket					1	1	25%
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket					**1**	1	25%
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Laporan					0	0	0%
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	**48**	**Paket**					12	12	25%
6	1	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**25**	**%**					0.25		0%
6	1	1	2.07	02	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional	8	Unit					0	0	0%
6	1	1	2.07	05	Pengadaan Meubeler	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	Unit					0	0	#DIV/0!
6	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan Mesin	Jumlah Peralatan Mesin yang Disediakan	0	Unit					0	**0**	#DIV/0!
6	1	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	4	Unit					1	1	25%
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**4**	**Laporan**					1	1	25%
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan					12	12	25%

Tabel 2.1 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan					12	12	25%
6	1	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanP**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	48	Unit					26	26	54%
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0					0	0	#DIV/0!
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah jasa Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	64	unit					16	16	25%
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit					10	10	100%
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Meningkatnya Persentase Audit Kinerja dan Keuangan**	**25**	**%**					**25**	**25**	100%
6	**1**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI**	**84**	**Unit**					**4**	**4**	5%
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja PemerintahDaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52	Laporan					8	8	15%
6	1	2	2.01	2	Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24	Laporan					4	4	17%
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	JJumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	40	Laporan					2	2	5%
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	32	Dokumen					8	8	25%
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	144	Berita Acara					62	62	43%
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi TindakLanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIdan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP	Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16	Berita Acara					4	4	25%
6	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**4**	**Laporan**					**1**	**1**	25%
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Hasil Pengawasan dengan tujuan Tertentu	25	Laporan					5	5	20%
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan TujuanTertentu	Jumlah Laporan hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**40**	**Laporan**					10	10	25%
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAPINGAN DAN ASISTENSI**	**Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap pengaduan Masyarakat**	**1**	**Dokumen**					**1**	**1**	100%
6	1	3	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan d**	**Jumlah Rekomendasi Kebujakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun**	**4**	**Dokumen**					1	1	25%
6	1	3	2.02	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebujakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	4	Dokumen					1	1	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6	**1**	**3**	**2.02**		**Pendampngan dan Asitensi**	**Meningkatnya Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat**	4 Dokumen					1	1	25%
6	1	3	2.02	02	Pendampngan, Asitensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	4 OPD					1	1	25%
6	1	3	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Kegiatan					2	2	25%
6	1	3	2.02	04	Pendampngan, asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan					1	1	25%

Tabel 2.1 Inspektorat Daerah

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dapat/Lingkup

Kabupaten Lombok

	NPM / standar nasional	SOP	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				100%	100%	100%		41,98%	50.00%	73%	
				32,037,867,226.98	32,037,867,226.98	32,037,867,226.98		32,037,867,226.98	32,037,867,226.98	32,037,867,226.98	
				100%	100%	100%		0.39	0.52	0.63	
				3	3	3		2	3	3	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Inspektorat Daerah s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah :
   - Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang – undangan;
   - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok pengawasan;
   - Masih banyak obyek pemeriksaan yang belum dilakukan pengawasan;
   - Belum maksimalnya pengawasan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan;
   - Belum maksimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
   - Masih kurangnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu khususnya pada Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
   - Masih kurangnya kepedulian obyek pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan.

b. Tantangan dan Peluang.

   Sejalan dengan semakin luas dan kompleksitasnya tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan bermartabat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang baik, bersih, efisien, efektif dan partisipatif, seiring dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Inspektorat Daerah ke depan diharuskan dapat menjalanakan tugas pokok dan fungsi sebagai staf penunjang utama Kepala Daerah di Bidang Pengawasan Daerah. Tantangan dan Peluang pengawasan yang akan dihadapi berkaitan dengan kondisi yang diinginkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata adalah:

1) Tantangan Utama

a. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) oleh para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah rendah;

Sistem Pengendalian Intern terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan / ketaatan aparat dalam menjalanakan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan. Pemimpin Organisasi Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu, perlu ada pemahaman bahwa pimpinan OPD mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern, karena SPI harus menjadi sarana utama sebelum pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

b. Adanya tuntutan memiliki sosok aparatur Inspektorat yang profesional.

Keberhasilan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan tidak terlepas dari peran seluruh aparatur pengawas. Keberhasilan dari implementasi berbagai program pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih mutlak membutuhkan aparatur pengawas yang profesional, yang mampu menjawab berbagai tantangan dan perubahaan paradigma pengawasan.

c. Rendahnya komitmen sebagian Pemimpin Organisasi Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti berbagai temuan hasil pemeriksaan. Berbagai temuan hasil pemeriksaan yang direkomendasikan oleh aparat pemeriksa sebagian besar belum ditindaklanjuti oleh sebagian pimpinan OPD, dimana salah satu indikator yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah

tingkat penyelesaian berbagai temuan yang berkaitan dengan nilai kerugian daerah tersebut.

2) Peluang

a. Adanya Jabatan Fungsional Auditor sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya serta pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;

b. Adanya perubahaan paradigma Inspektorat yang bukan lagi berperan sebagai *watch dog* akan tetapi lebih ditekankan sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan maupun *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa eksternal.

Berdasarkan gambaran permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata maka dapat dirumuskan isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata adalah :

a. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, aparat pengawasan, dukungan peraturan perundangan serta kesadaran hukum masyarakat.

b. Belum sinerginya sistem pengawasan internal pemerintah yang menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih

pemeriksaan/pengawasan. Hal ini perlu adanya koordinasi antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

c. Masih terbatasnya tenaga profesional di bidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dimana masih adanya kesulitan dalam tingkat kelulusan yang masih tergantung dari rekomendasi dari BPK.

d. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.

e. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaian berbagai kerugian daerah/negara.

f. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Inspektorat Daerah, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan tidak ada perbedaan, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.6.651.709.948, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 6.651.709.948,.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Inspektorat Daerah, Pengawasan.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Nama Perangkat Daerah: inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	INSPEKTORAT DAERAH				**6,651,709,948**	**INSPEKTORAT DAERAH**				**6,651,709,948**	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				**6,651,709,948**	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**6,651,709,948**	
	INSPEKTORAT DAERAH				**6,651,709,948**	**INSPEKTORAT DAERAH**				**6,651,709,948**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lembata	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	100	**5,441,186,948**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Lembata	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	100	**5,441,186,948**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**12**	**29,094,370**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**12**	**29,094,370**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2,594,370	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2,594,370	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	3,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1	3,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2	8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2	8,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	4	4,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	4	4,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan penataan administrasi keuangan perangkat daerah**	1	**4,544,588,622**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan penataan administrasi keuangan perangkat daerah**	1	**4,544,588,622**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	4,363,056,822	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	4,363,056,822	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	167,531,800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	167,531,800	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5,744,388	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5,744,388	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18	3,323,265	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18	3,323,265	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	4,932,347	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	4,932,347	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2**	**70,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2**	**70,000,000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	70,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	70,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan penataan kepegawaian PD**	**1**	**240,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan penataan kepegawaian PD**	**1**	**240,000,000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata	umlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	180,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata	umlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	180,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	60,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	60,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**1**	**212,059,410**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**1**	**212,059,410**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	2,059,410	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	2,059,410	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	40,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	40,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	20,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	150,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**3**	**78,494,546**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**3**	**78,494,546**	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Paraf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	70,431,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	70,431,000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	8,063,546	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	8,063,546	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**160,950,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**160,950,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	117,950,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	117,950,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	40,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	40,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	**Jumlah barang miliki daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilakukan pemeliharaan**	**22**	**106,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Lembata	**Jumlah barang miliki daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilakukan pemeliharaan**	**22**	**106,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	100,000,000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara			Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Lembata	**PERSENTASE Penyelesaian TINDAK LANJUT hasil pengawasan**	**25**	**1,040,523,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Kab. Lembata	**PERSENTASE Penyelesaian TINDAK LANJUT hasil pengawasan**	**25**	**1,040,523,000**	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan hasil pengawasan internal**	**64**	**890,523,000**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan hasil pengawasan internal**	**64**	**890,523,000**	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	102,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	102,000,000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4	109,500,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4	109,500,000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10	134,273,000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10	134,273,000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8	214,750,000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8	214,750,000	
	Pengawasan Desa	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30	250,000,000	Pengawasan Desa	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30	250,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4	80,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4	80,000,000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**22**	**150,000,000**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Kab. Lembata	**Tersedianya laporan penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**22**	**150,000,000**	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10	50,000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10	50,000,000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	100,000,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	100,000,000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Lembata	**Tersedianya hasil PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1**	**170,000,000**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Kab. Lembata	**Tersedianya hasil PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1**	**170,000,000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Lembata	**Tersedianya rekomendasi kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**1**	**50,000,000**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Kab. Lembata	**Tersedianya rekomendasi kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**1**	**50,000,000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Lembata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pergawasan yang Disusun	1	50,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Lembata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	50,000,000	
	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Lembata	**Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi**	**8**	**120,000,000**	**Pendampingan dan Asistensi**	Kab. Lembata	**Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi**	**8**	**120,000,000**	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Lembata	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3	50,000,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Lembata	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3	50,000,000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi	Kab. Lembata	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi	5	60,000,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi	Kab. Lembata	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi	5	60,000,000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Lembata	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	5	10,000,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Lembata	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	5	10,000,000	

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas Nasional yang relevan dengan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, adalah :

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola, dengan kegiatan prioritas prioritas Transformasi Pelayanan Publik, Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa APIP	100 %
			Jumlah temuan BPK	32.037.667.226.98
			Persentase pelangran pegawai	100%
2.	Meningkatnya kapabilitas APIP yang berintegritas, kompoten dan profesional	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan intern	Level kapabilitas APIP	3

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024:

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah di Tahun 2024 sebanyak 2 Program, 4 Kegiatan, 12 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 1.076.223.160,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 program dan 8 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp.872.0000,-.
2. Program perumusan kebijakan, pendapingan dan Asitensi, terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp.204.223.166,-.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						**6.011.505.348,00**							**7.460.475.154,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.011.505.348,00**							**7.460.475.154,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**6.011.505.348,00**							**7.460.475.154,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah***				**100 %**	**4.935.282.182,00**							**5.096.075.174,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Dokumen	29.500.000,00			-	-	ASN Inspektorat		29.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat		3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat		3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat		3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	4.461.682.182,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		4.544.588.622,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	4.361.505.882,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Inspektorat Daerah		4.363.056.622,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	109.176.300,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		167.531.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		5.744.388,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		3.323.265,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		4.932.347,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				2 Laporan	24.000.000,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	24.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Penata Kepegawaian Perangkat daerah*				1 Orang	80.000.000,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Penataan Aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah*				1 Laporan	162.000.000,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		162.010.339,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Inspektorat Daerah		2.059.410,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		18.330.929,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		16.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		125.120.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Unit	0,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Laporan	52.600.000,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		54.976.213,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		6.726.213,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		8.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan pemeliharaan*				16 Unit	106.000.000,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		175.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	100.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Inspektorat Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Inspektorat Daerah		25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Prosentase Temuan dan Penyelesaian Hasil Pengawasan APIPdan BPK***	**25 %**			**100 %**	**872.000.000,00**						**25 %**	**2.074.399.968,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Internal*	148 Laporan			122 Laporan	662.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Refermasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata	148 Laporan	1.824.399.968,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				8 Laporan	102.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		206.813.450,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	125.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		260.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	120.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		278.171.213,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				8 Laporan	110.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		260.638.617,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				88 Dokk / Laporan	115.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		270.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	90.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		328.576.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu*	17 Laporan			1 Laporan	210.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata	17 Laporan	450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				10 Laporan	110.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Tersedianya Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi***	**100 %**			**1 Rekomendasi**	**204.223.166,00**						**25 %**	**300.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Tersedianya Rekomandasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi	104.223.166,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata	1 Rekomendasi	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	104.223.166,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lembata, Nubetukan, Lewoleba Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi*	10 Perangkat Daerah			1 OPD	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata	10 Perangkat Daerah	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				3 perangkat daerah	50.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	40.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				5 perangkat daerah	10.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		JUMLAH						6.011.505.348,00							7.460.475.154,00	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Inspektorat Daerah.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 11 Juli 2023

Inspektur Daerah
Kabupaten Lembata,

Patrisius Emi Ujan, S.Sos., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680610 199703 1 009

RENCANA KERJA (R E N J A)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN NUBATUKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan KaruniaNya serta bimbinganNya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Nubatukan Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan Nubatukan untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya. Rencana Kerja ini secara garis besar mengakomodir tentang Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lembata melalui program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Lewoleba, 2023

Camat Nubatukan

YOSEF DIONISIUS OLA, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19720523200012100l

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1-2
	1.2	Landasan Hukum	2-4
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	4-5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		6
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	6-7
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
	2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	8-10
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10-11
	2.5	Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		12
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	12-13
	3.2	Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	13
	3.3	Program dan Kegiatan	14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		15
BAB V	PENUTUP		16-17

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Kecamatan Nubatukan.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan
   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal
   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Kecamatan Nubatukan untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Nubatukan dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Nubatukan dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Nubatukan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5	01				PERENCANAAN									
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	100 %							
5	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dok/lap					12	12	25%
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen					2	2	25%
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	4 Dokumen					1	1	25%
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	4 Dokumen					1	1	25%
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen					1	1	25%
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan					2	2	25%
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	16 Laporan					4	4	25%
5	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan administrasi keuangan PD								
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan					14	14	100%
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen					12	12	25%
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan					1	1	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	64 Laporan					16	16	25%
5	**01**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada PD**	**16 Laporan**							
6	01	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Laporan					2	2	25%
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan					2	2	25%
5	**01**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan kepegawaian PD**	**4 Laporan**							
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelangkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelangkapannya	40 Paket					5	5	13%
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang					5	5	13%
5	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**4 Laporan**					1	1	25%
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket					5	5	25%
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket					10	10	25%
6	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	25000 Paket					625	625	3%
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket					2	2	25%
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan					15	15	25%
5	**01**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**25 %**					25%	25%	100%
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	40 Unit					10	10	25%
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit					10	10	25%
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit					10	10	25%
5	**01**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 Laporan**					1	1	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan					12	12	25%
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan					12	12	25%
5	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan					1	1	25%
5	**01**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**					25%	25%	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	304 unit					76	76	25%
5	01	01	2.09	02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit					5	5	25%
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit					10	10	25%
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit					8	8	25%
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit					2	2	25%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**									
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**15**							25%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	16 Laporan					4	4	25%
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**4 dok**							25%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan					1	1	25%
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Dok**							25%
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Dok**							
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	24 Lembaga Kemasyarakatan					6	6	25%
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Mayarakat yang dilakukan deh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Mayarakat yang dilakukan deh	8 Dokumen					2	2	25%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 Laporan					10	10	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03	2.01	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	16	Laporan							
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	24	Lembaga Kemasyarakatan					6	6	25%
7	01	03	2.03	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	56	Unit					14	14	25%
7	01	03	2.03	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	140	Pokmas/Ormas					35	35	25%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100**	**%**					**25%**	25%	25%
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**8**	**Laporan**					1	1	25%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	Laporan					2	2	100%
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**8**	**Laporan**							**100%**
7	01	4	2.02	01	Koordinasisinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasisinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8	Laporan					2	2	100%
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100**	**%**					1	1	100%
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**										
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	600	Orang					150	150	25%
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	48	Laporan					12	12	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	06	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	Dokumen					12	12	25%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa										
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	44	Dokumen					11	11	100%
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	44	Dokumen					11	11	100%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	44	Dokumen					11	11	100%
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerpan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	44	Dokumen					11	11	100%
5	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	44	Dokumen					11	11	100%
5	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksannaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pelaksannaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	44	Dokumen					11	11	100%
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	44	Dokumen					11	11	100%
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Rencana Pembangunan Daeah dan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Rencana Pembangunan Daeah dan Pembangunan Desa	44	Dokumen					11	11	100%
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	44	Dokumen					11	11	100%
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa	44	Dokumen					11	11	100%
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Partisipatif	44	Dokumen					11	11	100%
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	44	Dokumen					11	11	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	44 Dokumen					11	11	100%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nubatukan, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 dokumen	8,000,000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	11 dokumen	10,000,000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	11 dokumen	15,757,500	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	11 dokumen	8,000,000	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan perdesaan	11 dokumen	25,000,000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan perdesaan	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 dokumen	25,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11 dokumen	25,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	11 dokumen	25,000,000	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 dokumen	30,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 dokumen	3,062,000	

2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Nubatukan s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Nubatukan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nubatukan :

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Nubatukan sebagai berikut:

- Peraturan Perundang-Undangan sering mengalami perubahan

  Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hokum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap peraturan perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi (penyimpangan makna).

- Belum optimalnya peran serta masyarakat (Partisipasi)

  Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya Musrenbang, namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang mengahadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nubatukan. Keberadaan sumber daya Kecamatan Nubatukan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan

lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Nubatukan:

- Belum memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki

  Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal). Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara memadai.
- Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya belum sepenuhnya berbasis kinerja.

  Keterbatasan anggaran dibeberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan.

  Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja.

  Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaianya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan dan Sub Kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Nubatukan :

   - Letak Kecamatan Nubatukan yang berada di Pusat Kota Lewoleba yang merupakan ibu kota kabupaten maka ketersediaan sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk menopang kehidupan masyarakat yang berciri khas perkotaan.

- Sebagai tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan kelurahan sebagai perangkat dari kecamatan maka sangat diharapkan tidak terjadi pengurangan alokasi anggaran seperti sebelumnya yang mana kelurahan menjadi SKPD yang berdiri sendiri, sehingga kecamatan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kinerja di kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan secara lebih optimal.

2.3.1. Isu – Isu Penting

- Pemerataan Pengalokasian Anggaran untuk 7 Kelurahan untuk mengurangi kesenjangan antara Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- Pemerataan Pembangunan Fisik untuk meminimalisir kesenjangan antar wilayah pusat perkotaan dan pinggiran.
- Jumlah aparatur perencana yang tidak sebanding dengan dokumen/kajian terkait penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang harus dikerjakan.
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek dan diklat terkait perencanaan.

2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Nubatukan sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Nubatukan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				**12,455,676,924**	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				**11,318,472,667**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	100	8,950,334,344	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	100	8,137,497,838	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Presentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi atas kinerja perangkat daerah**	**25%**	**21,716,613**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Presentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi atas kinerja perangkat daerah**	**25%**	**14,535,255**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,827,760	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,028,600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,125,350	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,750,775	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,091,910	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	701,175	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,924,010	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,360,650	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	6,916,160	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	8,151,710	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2 Dokumen	1,166,160	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2 Laporan	730,400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	4 Laporan	1,686,160	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	4 Laporan	831,975	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Lembata**	**Presentase Ketersediaan dokumen keuangan**	**25%**	**7,500,590,357**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata**	**Presentase Ketersediaan dokumen keuangan**	**25%**	**7,010,631,351**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang	7,160,262,927	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/bulan	6,770,012,646	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	333,676,160	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	235,790,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,751,110	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,080,375	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5,716,160	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5,762,350	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Presentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	2,982,330	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Presentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	23,125,553	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1,166,160	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1,359,775	
	Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	1,816,160	Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	21,765,775	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25%**	110,300,000	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25%**	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lembata	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	60,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lembata	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	
	Sembangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Sembangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	49,500,000	Sembangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Sembangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lembata	**Presentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	153,307,470	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Lembata	**Presentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	171,620,310	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 paket	5,686,160	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 paket	2,940,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	82,005,210	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	82,005,210	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 paket	15,642,160	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 paket	15,642,160	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	56,169,010	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	56,714,550	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	5 dokumen	720,760	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	5 dokumen	570,600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	31,181,770	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	13,740,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lembata	**Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	140,455,525	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Lembata	**Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	47,252,063	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 unit	42,879,279	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	51,288,825	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	25,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	-	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Kab. Lembata	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	10 unit	46,286,825	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Kab. Lembata	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	10 unit	22,260,063	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lembata	**Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	25%	425,797,305	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Lembata	**Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	721,914,400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	371,817,969	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	642,525,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44,206,960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66,865,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	9,672,160	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	12,726,000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Lembata**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah**	**25%**	**105,243,570**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lembata**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah**	**25%**	**140,391,419**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 unit	144,102,410	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 unit	106,310,000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	5 jenis	5,500,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	5 jenis	6,242,400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	5,666,160	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	8,981,019	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 unit	18,500,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 unit	2,257,400	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Lembata**	**Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**503,732,370**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Lembata**	**Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**670,963,700**	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kab. Lembata**	**Presentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**40,975,260**	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kab. Lembata**	**Presentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**16,229,200**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	40,975,260	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	4 laporan	16,229,200	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Lembata**	**Presentase tanaesanaya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**25%**	**328,774,110**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Lembata**	**Presentase tanaesanaya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**25%**	**651,754,500**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kab. Lembata	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan	328,774,110	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kab. Lembata	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan	651,754,500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Lembata**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan**	**25%**	**3,104,427,280**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Lembata**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan**	**25%**	**3,281,431,743**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kab. Lembata**	**Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa**	**25%**	**127,552,220**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Lembata**	**Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa**	**25%**	**32,878,328**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lembata	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 Lembaga	4,196,960	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lembata	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 Lembaga	4,196,960	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	2 Dokumen	58,299,200	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	2 Dokumen	16,532,261	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	65,166,160	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	10,156,167	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lembata	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	25%	3,956,785,159	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lembata	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	25%	2,222,752,495	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Lembata	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	12,952,810	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Lembata	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6 Lembaga	12,952,810	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	34 unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	34 unit	706,821,406	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Poktan dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	10 Poktan/Ormas	3,038,166,160	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Poktan dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan	10 Poktan/Ormas	1,501,979,219	
	Evaluasi Kelurahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	5,990,160	Evaluasi Kelurahan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	-	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	25%	-	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	25%	134,880,920	
	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	-	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	134,880,920	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Lembata	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	10,667,370.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Lembata	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	13,661,000.00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lembata	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	25%	6,162,810	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lembata	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	25%	6,390,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6,162,010	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6,390,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Lembata	Persentase pelaksanaan kegiatan penerapan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	25%	4,505,360	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Lembata	Persentase pelaksanaan kegiatan penerapan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	25%	7,471,000	
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	4,505,360	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	7,471,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Lembata	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**91,661,033**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kab. Lembata	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	25%	**61,976,586**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Lembata	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**25%**	**91,661,033**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kab. Lembata	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	25%	**61,976,586**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	41,159,160	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	25,597,986	
	Penanganan Konflik Sosial sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0 Laporan	7,886,160	Penanganan Konflik Sosial sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0 Laporan	6,850,150	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	42,835,710	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	26,528,550	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Lembata**	**Persentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**269,154,460**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Lembata**	**Persentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**42,942,000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lembata	**Persentase Desa yang terfasilitasi, terekomendasi dan terawasi**	**25%**	**269,154,460**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kab. Lembata	**Persentase Desa yang terfasilitasi, terekomendasi dan terawasi**	25%	**42,942,000**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 dokumen	17,500,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 dokumen	3,000,000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	13,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11 dokumen	40,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11 dokumen	10,000,000	
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	11 dokumen	12,936,960	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat desa yang dilaksanakan	11 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat desa yang dilaksanakan	11 dokumen	11,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 dokumen	8,000,000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	11 dokumen	10,000,000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	11 dokumen	15,757,500	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	11 dokumen	8,000,000	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan perdesaan	11 dokumen	25,000,000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan perdesaan	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 dokumen	25,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11 dokumen	25,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	11 dokumen	25,000,000	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Lembata	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	11 dokumen	-	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 dokumen	30,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 dokumen	3,062,000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Nubatukan, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 namun direncanakan pada Renja Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp. 12.485.876.924,-, sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 11.319.472.657,-.

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Nubatukan, yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nubatukan yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Nubatukan

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nubatukan yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Kecamatan Nubatukan.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kecamatan Nubatukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nubatukan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Nubatukan Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Nubatukan
Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25%
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	25%
		Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah kerja Kecamatan	
		Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	
3.	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi penyelenggaraan Ketantraman dan Ketertiban Umum	25%
4.	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggarsan Pemerintahan Umum	25%
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanaya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Dokuman
		Terlaksanaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11 Dokumen

3.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Nubatukan Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Nubatukan Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nubatukan di Tahun 2024 sebanyak 6 Program, 18 Kegiatan, 60 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 11.509.612.396,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.434.612.666,-.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 571.561.345,-.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.383.970.481,-.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp.13.821.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp.61.976.586,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp.43.662.318,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 11 (sebelas) desa dan 7 (tujuh) Kelurahan di kecamatan Nubatukan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN NUBATUKAN KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BESAR RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN NUBATUKAN						9.100.282.078,00							9.972.143.080,00	
	7	URUSAN PEMERINTAHAN						9.100.282.078,00							9.972.143.080,00	
	7.01	KECAMATAN						9.100.282.078,00							9.972.143.080,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung optimal perangkat daerah	-			100 %	9.031.316.197,00						-	9.878.008.842,00	
	7.01.01.2.01	Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	-			20 %	17.824.110,00			-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan	-	19.317.810,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.026.800,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		1.131.480,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.750.775,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		3.029.333,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		777.333,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.380.800,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		1.888.716,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RALOKTOR SASARAN	PERKIRAAN MAJU BERCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perjadwal DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perjadwal DPA-SKPD				2 Dokumen	10.761.710.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (TKUD) PENGENDALIAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		8.999.991.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	720.900.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		803.440.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	801.315.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		892.113.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	-			20 %	7.888.888.881.00			-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan	-	7.717.194.221.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				113 Orang/Bulan	7.040.960.336.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENGENDALIAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		7.447.013.333.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	220.000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		256.789.000.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.088.575.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		4.473.013.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELOKASI/ PERGESERAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Rekonsiliasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.762.240,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		9.339.999,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Keterandalan Gunaan Barang Milik Daerah	-			25 %	4.719.115,00			-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan	-	23.442.305,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Pemanfaatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD)														
			Jumlah Barang Pendayagunaan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	1.368.775,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		1.406.750,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.03.0008	Pemeliharaan/Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3.368.400,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		23.998.750,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			5 orang 0 pakai 25 %	0,00			-	-	Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Nubatukan	-	0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	- Kab. Lembata, Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Nubatukan		0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				0 Orang	0,00	- Kab. Lembata, Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Nubatukan		0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keterandalan Administrasi Umum Perkantoran	-			25 %	23.648.041,00			-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan	-	93.999.990,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PELAKSANA SASARAN	PERKIRAAN MAJU SEBAGAI TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 (Paket)	2.940.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (TUNJANGAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		3.234.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	X.01.01.2.08.0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	24.000.121,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (TUNJANGAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		25.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	X.01.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				312 Paket	6.162.160,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (TUNJANGAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		6.600.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	X.01.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17.334.440,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (TUNJANGAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		20.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	X.01.01.2.08.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		833.160,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	X.01.01.2.08.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1K Laporan	13.143.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (TUNJANGAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		19.117.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	X.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keterjadian Barang Milik Daerah	-			25 %	10.200.000,00			-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan	-	44.311.355,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	X.01.01.2.07.0009	Pengadaan Mobil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PELAKSANA SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkembangan yang Dievaluasi				0 Unit	0,00	- Kab. Lombok Tengah, Kabupaten, Semua Kecamatan	-	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		0,00	KECAMATAN PRAYA TIMUR
	7.01.01.2.01.0008	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10.000.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		10.000.000,00	KECAMATAN PRAYA TIMUR
	7.01.01.2.01.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lombok Tengah, Kabupaten, Semua Kelurahan	-	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		0,00	KECAMATAN PRAYA TIMUR
	7.01.01.2.01.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	220.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan		24.011.200,00	KECAMATAN PRAYA TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kelancaran Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			25 %	41.615.000,00			-	-	-	-	44.995.800,00	KECAMATAN PRAYA TIMUR
	7.01.01.2.08.0007	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	9.424.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN PRAYA TIMUR
	7.01.01.2.08.0009	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	33.668.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN PRAYA TIMUR
	7.01.01.2.08.0010	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	12.798.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.888.800,00	KECAMATAN PRAYA TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			25 %	34.400.000,00			-	-	Aparatur Kecamatan dan Tujuh (7) Kelurahan	-	120.400.000,00	KECAMATAN PRAYA TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PELAKSANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	Rp 729.000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tokoh (*) Kelurahan		Rp 000.000.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0009	Pemeliharaan Mobil														
			Jumlah Mobil yang Dipelihara				10 Unit	900.000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tokoh (*) Kelurahan		8.999.940.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12.600.000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tokoh (*) Kelurahan		7.619.787.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0020	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	78.600.000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tokoh (*) Kelurahan		55.340.000.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	300.000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan dan Tokoh (*) Kelurahan		2.400.740.00	KECAMATAN NUBATUKAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUBLIK	*Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	-			25 %	571.569.345.00						-	738.952.076.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			25 %	19.229.000.00			-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat	-	27.142.120.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	19.229.000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN,DBH PERIMBANGAN	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		27.142.120.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Presentase Terlaksanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	-			25 %	552.340.745.00			-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat	-	715.920.840.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN AWAL CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU BERCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENDANAAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pencairan Keuangan Lain yang Diinginkan				1 Laporan	552.340.749,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN &R.DANA REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		178.920.250,00	KECAMATAN NUBATUKAN
3	7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	-			25 %	228.010.040,00						-	104.513.173,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			25 %	33.018.840,00			-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat	-	38.198.161,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	4.220.112,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Kamca Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN &REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		4.800.348,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	19.332.281,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Kamca Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN &REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		21.380.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	12.132.181,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Kamca Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN &REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		11.173.108,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			25 %	0,00			-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat	-	0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	0,00	- Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Pemberdayaan Kegiatan Masyarakat (010100)	-	-			-	115.000.000,00			-	-	Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Nubatukan	-	146.347.612,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.06.0001	Penanggulangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELOKASI/ SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PINDAHAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kecamatan				1 Dokumen	175.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Desa dan Kecamatan Nubatukan		149.347.013,00	KECAMATAN NUBATUKAN
4.	7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			25 %	10.831.000,00						-	18.247.160,00	
	7.01.06.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			25 %	6.350.000,00			-	-	-	-	7.020.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	6.350.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		7.020.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-			25 %	7.477.000,00			-	-	-	-	8.218.700,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.02.0007	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kejaksaan Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Kerjasama/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kejaksaan Negara Republik Indonesia				2 Laporan	7.477.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		8.218.700,00	KECAMATAN NUBATUKAN
4.	7.01.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*	-			25 %	61.076.500,00						-	68.179.245,00	
	7.01.08.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Penugasan Kepala Daerah	*Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			25 %	61.076.500,00			-	-	-	-	68.179.245,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.08.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kesatuan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemantapan dan Pemaliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (%)	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELOKTOR SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemantapan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				740 Orang	29.167.695.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DSH SUMBER DAYA ALAM EX HUTANAN/DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		29.167.675.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Kewenangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Kewenangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	8.000.700.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DSH SUMBER DAYA ALAM EX HUTANAN/DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		7.000.700.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	29.526.000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DSH SUMBER DAYA ALAM EX HUTANAN/DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		32.461.405.00	KECAMATAN NUBATUKAN
4	7.01.06	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGUMUMAN PENGEMBANGAN DESA	Presentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi	-			20 %	43.992.218.00						-	48.029.950.00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	-			20 %	43.992.218.00			-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat	-	48.029.950.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	3.000.000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DSH SUMBER DAYA ALAM EX HUTANAN/DANA REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		3.000.000.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		0.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	10.000.000.00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DSH SUMBER DAYA ALAM EX HUTANAN/DANA REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		11.000.000.00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN SAMPAI DGN TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PELAKSANA SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi dalam rangka Penerapan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				0 Laporan	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				11 Dokumen	11.400.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		12.780.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				11 Dokumen	8.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		8.800.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				11 Dokumen	8.000.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		8.800.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Asistasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				11 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
			Jumlah Dokumen Asistasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penataan dan Penggunaan Bukti Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN AWAL CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENDANAAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Desa, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Kuwu Desa serta Perangkat dan Penegasan Batas Desa				4 Dokumen	3.082.376.00	- Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TUNGGU DATA ALAM DJ. HUTANAS DAN R KEUDESAS (DR)	-	-	Aparatur Kecamatan Nubatukan dan Masyarakat		3.000.000.00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA BARAT						332.120.885.00							415.700.000.00	
	7	URUSAN KEWILAYAHAN						332.120.885.00							415.700.000.00	
	7.01	KECAMATAN						332.120.885.00							415.700.000.00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	27.420.422.00						-	42.700.000.00	
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	19.520.422.00			-	-	-	-	19.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	8.720.422.00	- Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				313 Paket	1.600.000.00	- Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.01.2.08.0009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			-				-	9.870.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.01.2.01	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.000.000.00			-	-	-	-	2.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.01.2.01.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.000.000.00	- Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.720.000.00			-	-	-	-	11.200.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.01.2.08.0007	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	600.000.00	- Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.01.2.08.0008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENDANAAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.250.000.00	- Kab. Lombata, Nubatukan, Selma Kei Dawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.900.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.01.2.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.444.000.00			-	-	-	-	6.900.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	6.445.000.00	- Kab. Lombata, Nubatukan, Selma Kei Dawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.900.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	204.831.280.00						-	373.000.000.00	
	7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	204.831.280.00			-	-	-	-	373.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.03.2.03.0007	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	2.431.280.00	- Kab. Lombata, Nubatukan, Selma Kei Dawa	DAK SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		2.900.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.03.2.03.0003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	120.240.760.00	- Kab. Lombata, Nubatukan, Selma Kei Dawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.900.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	7.01.03.2.03.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Fasilitasi dan Dinas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Fasilitasi / Dinas	221.240.230.00	- Kab. Lombata, Selma, Kecamatan, Kelurahan	DAK SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		250.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
		KELURAHAN LEWOLEBA						250.550.125.00							257.700.000.00	
	7	URUSAN KEWILAYAHAN						250.550.125.00							257.700.000.00	
	7.01	KECAMATAN						250.550.125.00							257.700.000.00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	30.819.972.00						-	38.200.000.00	
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	19.373.972.00			-	-	-	-	18.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	REALISASI CAPAIAN SPM S/D TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENDANAAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pelayanan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.203.672,00	- Kab. Lombok Barat, Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.900.000,00	KELURAHAN LOKOLOLEA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				972 Paket	1.400.000,00	- Kab. Lombok, Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.400.000,00	KELURAHAN LOKOLOLEA
	7.01.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.870.000,00	- Kab. Lombok, Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN LOKOLOLEA
	7.01.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	KELURAHAN LOKOLOLEA
	7.01.01.2.01.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.000.000,00	- Kab. Lombok, Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN LOKOLOLEA
	7.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	3.700.000,00	KELURAHAN LOKOLOLEA
	7.01.01.2.08.0007	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Layanan	500.000,00	- Kab. Lombok, Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000,00	KELURAHAN LOKOLOLEA
	7.01.01.2.08.0009	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Layanan	2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN LOKOLOLEA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.149.000,00			-	-	-	-	7.900.000,00	KELURAHAN LOKOLOLEA
	7.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	7.149.000,00	- Kab. Lombok, Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.900.000,00	KELURAHAN LOKOLOLEA
2.	7.01.22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	288.031.250,00						-	321.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN TERAKHIR RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELOKASI/ PERGESERAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	320.031.245,00			-	-	-	-	321.900.000,00	KELURAHAN LOKOLEBA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	2.421.245,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN (DAN A HKHORSAS (DR)	-	-	-		2.900.000,00	KELURAHAN LOKOLEBA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	51.900.000,00	- Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENGUMAAN SAID KELURAHAN	-	-	-		62.000.000,00	KELURAHAN LOKOLEBA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Perhimpunan Dinas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				21 Lembaga / Dinas	226.000.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN (DAN A HKHORSAS (DR)	-	-	-		267.000.000,00	KELURAHAN LOKOLEBA
		KELURAHAN SELANDORO						340.374.355,00							354.200.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						340.374.355,00							354.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN						340.374.355,00							354.200.000,00	
6.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	20.240.122,00						-	22.200.000,00	
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	11.298.122,00			-	-	-	-	18.000.000,00	KELURAHAN SELANDORO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.128.122,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN SELANDORO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				313 Paket	1.500.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.900.000,00	KELURAHAN SELANDORO
	7.01.01.2.08.0009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.670.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN SELANDORO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MULAI RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.000.000,00			-	-	-	-	13.700.000,00	KELURAHAN SELARODIRO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Layanan	600.000,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Sumbawa, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Lombok Utara, - Kota Mataram, - Kota Bima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000,00	KELURAHAN SELARODIRO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Layanan	12.000.000,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Sumbawa, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Lombok Utara, - Kota Mataram, - Kota Bima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (TENGAHTAN KOLI DALIHAN ITAU)	-	-	-		13.000.000,00	KELURAHAN SELARODIRO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.040.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	KELURAHAN SELARODIRO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	1.040.000,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Sumbawa, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Lombok Utara, - Kota Mataram, - Kota Bima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN SELARODIRO
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**214.031.280,00**						-	**215.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	214.031.280,00			-	-	-	-	215.000.000,00	KELURAHAN SELARODIRO
	7.01.03.2.03.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	2.631.280,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Sumbawa, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Lombok Utara, - Kota Mataram, - Kota Bima	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN SELARODIRO
	7.01.03.2.03.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	98.152.726,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Sumbawa, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Lombok Utara, - Kota Mataram, - Kota Bima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		98.000.000,00	KELURAHAN SELARODIRO
	7.01.03.2.03.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	225.447.275,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Sumbawa, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Lombok Utara, - Kota Mataram, - Kota Bima	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		226.000.000,00	KELURAHAN SELARODIRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN TERAKHIR RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH						338.945.075,00							341.200.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						338.945.075,00							341.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN						338.945.075,00							341.200.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	89.714.153,00						-	18.200.000,00	
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	19.360.722,00			-	-	-	-	18.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.139.722,00	- Kab. Lembata, Kelurahan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		9.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				313 Paket	7.940.000,00	- Kab. Lembata, Kelurahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.960.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH
	7.01.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.870.000,00	- Kab. Lembata, Kelurahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH
	7.01.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH
	7.01.01.2.01.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4.000.000,00	- Kab. Lembata, Kelurahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	3.700.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	600.000,00	- Kab. Lembata, Kelurahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Lembata, Kelurahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN AWAL CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MULAI SEBAB TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.349.000,00			-	-	-	-	6.900.000,00	KELURAHAN LOWOLEBA TENGAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	6.349.000,00	- Kab. Lembata, Kabupaten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.900.000,00	KELURAHAN LOWOLEBA TENGAH
2.	7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	305.830.245,00						-	308.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	308.830.245,00			-	-	-	-	308.000.000,00	KELURAHAN LOWOLEBA TENGAH
	7.01.02.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	2.421.000,00	- Kab. Lembata, Kabupaten, Semua Kel/Desa	Dari SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (DR)	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN LOWOLEBA TENGAH
	7.01.02.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	95.115.250,00	- Kab. Lembata, Kabupaten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.000.000,00	KELURAHAN LOWOLEBA TENGAH
	7.01.02.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pelimpahan Dimas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pelimpahan / Dimas	210.264.336,00	- Kab. Lembata, Kabupaten, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENGANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		210.000.000,00	KELURAHAN LOWOLEBA TENGAH
		KELURAHAN LAWOLABA TIMUR						**323.393.275,00**							**327.700.000,00**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**						**323.393.275,00**							**327.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**323.393.275,00**							**327.700.000,00**	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	33.871.837,00						-	35.200.000,00	
	7.01.01.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	19.822.467,00			-	-	-	-	19.000.000,00	KELURAHAN LOWOLEBA TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Pasal Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	9.252.457,00	- Kab. Lembata, Kabupaten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.900.000,00	KELURAHAN LOWOLEBA TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	REALISASI CAPAIAN SPM S/D TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA SPM TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PELAKSANA SASARAN	PERKIRAAN MASA SEKARANG TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				212 Paket	1.000.000,00	– Kab. Lombok Tengah, – Kab. Lombok Timur, – Kab. Lombok Barat, – Kab. Sumbawa, – Kab. Dompu, – Kab. Bima, – Kab. Sumbawa Barat, – Kab. Lombok Utara, – Kota Mataram,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN LOYOLISA TIMUR
	7.01.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.870.000,00	– Kab. Lombok Tengah, – Kab. Lombok Timur, – Kab. Lombok Barat, – Kab. Sumbawa, – Kab. Dompu, – Kab. Bima, – Kab. Sumbawa Barat, – Kab. Lombok Utara, – Kota Mataram,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN LOYOLISA TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.204.200,00			-	-	-	-	11.700.000,00	KELURAHAN LOYOLISA TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	– Kab. Lombok Tengah, – Kab. Lombok Timur, – Kab. Lombok Barat, – Kab. Sumbawa, – Kab. Dompu, – Kab. Bima, – Kab. Sumbawa Barat, – Kab. Lombok Utara, – Kota Mataram,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000,00	KELURAHAN LOYOLISA TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.804.200,00	– Kab. Lombok Tengah, – Kab. Lombok Timur, – Kab. Lombok Barat, – Kab. Sumbawa, – Kab. Dompu, – Kab. Bima, – Kab. Sumbawa Barat, – Kab. Lombok Utara, – Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	KELURAHAN LOYOLISA TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.340.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	KELURAHAN LOYOLISA TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Digunakan dan Biaya/Pajak Pajak dan Perizinannya				7 Unit	8.340.000,00	– Kab. Lombok Tengah, – Kab. Lombok Timur, – Kab. Lombok Barat, – Kab. Sumbawa, – Kab. Dompu, – Kab. Bima, – Kab. Sumbawa Barat, – Kab. Lombok Utara, – Kota Mataram,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN LOYOLISA TIMUR
2	**7.01.23**	**PENDIDIKAN (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**280.231.876,00**						-	**287.300.000,00**	
	7.01.23.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	280.231.876,00			-	-	-	-	287.300.000,00	KELURAHAN LOYOLISA TIMUR
	7.01.23.2.02.0007	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	2.931.200,00	– Kab. Lombok Tengah, – Kab. Lombok Timur, – Kab. Lombok Barat, – Kab. Sumbawa, – Kab. Dompu, – Kab. Bima, – Kab. Sumbawa Barat, – Kab. Lombok Utara, – Kota Mataram,	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DAN PERIKANAN (DR)	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN LOYOLISA TIMUR
	7.01.23.2.02.0008	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN AWAL CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENDANAAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tersedia				2 Unit	83.775.175,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Barat, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Lombok Utara, - Kab. Sumbawa, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Kota Mataram, - Kab. Kota Bima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.000.000,00	KELURAHAN LOMBOK TIMUR
	7.01.05.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Rukun Warga dan Dusun yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 (Rukun / Dusun	204.021.730,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Barat, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Lombok Utara, - Kab. Sumbawa, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Kota Mataram, - Kab. Kota Bima	DBH TAMBAHAN DUKUNGAN PENGHARAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		209.000.000,00	KELURAHAN LOMBOK TIMUR
		KELURAHAN LEMBOLAMA UTARA						**338.472.185,00**							**342.800.000,00**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**						**338.472.185,00**							**342.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**338.472.185,00**							**342.800.000,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENURUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	**37.841.922,00**						-	**42.700.000,00**	
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	16.326.922,00			-	-	-	-	18.000.000,00	KELURAHAN LOMBOK UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 (Paket)	8.199.922,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Barat, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Lombok Utara, - Kab. Sumbawa, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Kota Mataram, - Kab. Kota Bima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.900.000,00	KELURAHAN LOMBOK UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				312 (Paket	1.600.000,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Barat, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Lombok Utara, - Kab. Sumbawa, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Kota Mataram, - Kab. Kota Bima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN LOMBOK UTARA
	7.01.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 (Paket)	2.870.000,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Barat, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Lombok Utara, - Kab. Sumbawa, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Kota Mataram, - Kab. Kota Bima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN LOMBOK UTARA
	7.01.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	KELURAHAN LOMBOK UTARA
	7.01.01.2.01.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Lombok Tengah, - Kab. Lombok Barat, - Kab. Lombok Timur, - Kab. Lombok Utara, - Kab. Sumbawa, - Kab. Sumbawa Barat, - Kab. Dompu, - Kab. Bima, - Kab. Kota Mataram, - Kab. Kota Bima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN LOMBOK UTARA
	7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.733.000,00			-	-	-	-	11.200.000,00	KELURAHAN LOMBOK UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	REALISASI CAPAIAN SPM S/D TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PELAKSANA	PERKIRAAN MASA SEBELUM TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000.00	– Kab. Lembata, Nubatukan, Selma Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	–		700.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA UTARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Layanan	10.200.000.00	– Kab. Lembata, Nubatukan, Selma Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.400.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.440.000.00			-	-	-	-	8.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	8.440.000.00	– Kab. Lembata, Nubatukan, Selma Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	–		8.400.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA UTARA
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	230.000.261.00						-	300.700.000.00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	–			–	230.000.261.00			-	-	–	–	300.700.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA UTARA
	7.01.03.2.02.0007	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	600.000.00	– Kab. Lembata, Nubatukan, Selma Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN REBOISASI (DR)	-	-	–		600.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA UTARA
	7.01.03.2.02.0009	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	30.034.000.00	– Kab. Lembata, Nubatukan, Selma Kel/Desa	–	-	-	–		30.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Rumah dan Ormas yang Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				21Rumah / Ormas	229.365.700.00	– Kab. Lembata, Nubatukan, Selma Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENGANAAN BAGI KELURAHAN, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN REBOISASI (DR)	-	-	–		240.000.000.00	KELURAHAN LEWOLEBA UTARA
		KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN						**232.877.595.00**							**327.700.000.00**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**						**232.877.595.00**							**327.700.000.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**232.877.595.00**							**327.700.000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	REALISASI CAPAIAN SPM/2 OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	29.548.133,00						-	35.200.000,00	
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	16.380.133,00			-	-	-	-	18.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	8.220.133,00	- Kab. Lembata, Nubalikan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.900.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				312 Paket	1.920.000,00	- Kab. Lembata, Nubalikan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.870.000,00	- Kab. Lembata, Nubalikan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			-				-	5.000.000,00	-	-	-	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.411.200,00			-	-	-	-	3.200.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	- Kab. Lembata, Nubalikan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.011.200,00	- Kab. Lembata, Nubalikan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.749.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PELAKSANA SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Biayanya Tiap dan Perawatannya				8 Unit	8.144.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Selma Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	201.231.280,00						-	202.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	201.231.280,00			-	-	-	-	202.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	2.431.280,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Selma Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A-KEHUTANAN (DR)	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	198.800.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Selma Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	7.01.03.2.03.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Perempuan Dinas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pelayanan / Dinas	194.331.000,00	- Kab. Lembata, Nubatukan, Selma Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A-KEHUTANAN (DR)	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	JUMLAH							11.565.912.396,00							11.541.143.986,00	

BAB V

PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Nubatukan yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Nubatukan yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Nubatukan yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Kecamatan Nubatukan yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Camat Nubatukan,

Yosef Dionisius Ola,SE
Pembina Tk.I
NIP.19720523 200012 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA)
KECAMATAN LEBATUKAN
TAHUN 2024

KECAMATAN LEBATUKAN
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

COVER i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematikan Penulisan 5

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

2.4 Review terhadap Rencana Awal SKPD 18

2.5 Penelitian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32

3.3 Program dan Kegiatan 34

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** 35

BAB V **PENUTUP** 60

DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lembata 8

2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata 14

2.3. Review terhadap Rencangan Awal RKPD Tahun 2024 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata 33

4.1 Program Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Lebatukan Tahun 2024 36

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Kecamatan Lebatukan.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Kecamatan Lebatukan untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran

target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Lebatukan dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Lebatukan dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Lebatukan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
5	01				PERENCANAAN										
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Admministrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	100	%						25%	25%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%						25%	25%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	12	Dokumen					3	3	25%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen					1	4	100%

7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen					1	4	100%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan					2	2	25%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64	Laporan					4	16	25%
5	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan administrasi keuangan PD**	**100**	**%**					**25%**	25%	25%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan					14	14	100%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	24	Dokumen					6	6	25%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan					2	2	25%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Laporan					6	6	25%
5	**01**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada PD**	**100**	**%**						25%	25%
7	**01**	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**4**	**Laporan**					1	**1**	25%
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**8**	**Laporan**					2	**2**	25%

7	01	01	2.06	01	Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	20	Paket					5	5	25%
7	01	01	2.06	02	Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	20	Paket					5	5	25%
7	01	01	2.06	04	Peny ediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6000	Paket					1500	1500	25%
7	01	01	2.06	05	Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	Laporan					5	5	25%
7	01	01	2.06	09	Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan					10	10	25%
5	01	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	%						25%	25%
7	01	01	2.08	01	Peny ediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	Laporan					5	5	25%
7	01	01	2.08	02	Peny ediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan					12	3	25%
7	01	01	2.08	03	Peny ediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	Laporan					12	6	25%
5	01	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	100	%					25%	25%	25%
5	01	01	2.09	02	Peny ediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	unit						9	25%
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit						3	25%
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	100	%						25%	25%

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100	%						50%	50%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	20	Dokumen					5	5	25%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan	20	Berita Acara					5	5	25%
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Keelurahan**	**100**	**%**						25%	25%
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**						25%	25%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4						1	1	25%
7	**01**	**03**	**2,05**		**Koordinasi, dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**Prosentase Koordinasi, dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**100**	**%**						25%	25%
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4						1	1	25%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Umum**	**100**	**%**						25%	25%
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Umum**	**100**	**%**						25%	25%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan					1	1	25%

7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Derah**	100	%						25%	25%
7	**01**	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	Orang					50	50	25%
7	**01**	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4						1	1	25%
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Pemerintahan Desa yang terbina dan Terawasi**	**100**	**%**						25%	25%
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi**	100	%						25%	25%
7	**01**	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Perdes dan Perka des	8						2	2	25%

0

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lebatukan, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lebatukan
Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Prosentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2.	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100%	100%	100%		100%	100%	100%	

3.	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
4.	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
5.	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Lebatukan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Lebatukan, sebagai berikut :

a. Peraturan Prundang-Undangan sering mengalami perubahan.
   Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari, bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
   Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kantor Camat Lebatukan di antaranya, Keberadaan sumber daya Kantor Camat Lebatukan yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Lebatukan, sebagai berikut :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

   Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal), sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah. Oleh sebab itu, diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik, maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas secara memadai.

b. Keterbatasan anggaran dan pengelolaannya belum sepenuhnya Berbasis Kinerja.

Keterbatasan anggaran dibeberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan. Selain itu, permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Disisi lain, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai

sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Lebatukan sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN LEBATUKAN				**2.316.232.926**	**KECAMATAN LEBATUKAN**				**2.230.243.793**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata	**Kantor Camat Lebatukan**	**Cakupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**25%**	**2.161.762.926**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata**	**Kantor Camat Lebatukan**	**Cakupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**25%**	**2.186.920.831**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Lebatukan	Ketersediaan Dokumen yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam kaitan dengan perencanaan dan penganggaran	25%	22.830.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Lebatukan	Ketersediaan Dokumen yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam kaitan dengan perencanaan dan penganggaran	25%	11.834.969	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.260.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.365.575	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 dokumen	3.770.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 dokumen	2.374.119	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 dokumen	2.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 dokumen	2.931.269	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 dokumen	3.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 dokumen	2.900.544	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.628.972	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	2.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	1.030.490	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kantor Camat Lebatukan**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**25%**	**1.931.792.926**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Lebatukan**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**25%**	**1.920.694.501**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang / bulan	1.828.292.926	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	1.854.452.026	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	95.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	64.933.325	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	4.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan		
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Kantor Camat Lebatukan**	**Persentase ketersediaan dokumen barang milik daerah**	**25%**	**18.300.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Lebatukan**	**Persentase ketersediaan dokumen barang milik daerah**	**25%**	**20.779.876**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	2.300.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	-	
	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	16.000.000	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.779.876	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kantor Camat Lebatukan**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**14.050.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Lebatukan**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	5.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	-	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Lebatukan	Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran	25%	73.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Lebatukan	Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran	25%	16.840.219	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	2.150.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	1.281.269	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diadakan	5 paket	13.650.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diadakan	5 paket	9.375.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.500 paket	24.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1500 paket	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	9.300.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	6.183.150	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	24.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	-	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	16.250.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Di sediakan	0	-	
	Pengadaan Mebel	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 unit	3.500.000	Pengadaan Mebel	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	20 unit	47.549.655	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	8.700.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di sediakan	9 unit	47.441.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kantor Camat Lebatukan**	**Persentasi ketersediaan jasa penunjang perkantoran**	**25%**	**21.640.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Camat Lebatukan**	**Persentasi ketersediaan jasa penunjang perkantoran**	**25%**	**87.567.629**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 Laporan	10.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 Laporan	79.556.250	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	8.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	3 Laporan	7.532.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Lebatukan	Persentasi pemeliharaan barang milik daerah	25%	51.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Lebatukan	Persentasi pemeliharaan barang milik daerah	25%	34.212.982	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Kendaraan Roda Empat, 8 Kendaraan Roda Dua	36.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Kendaraan Roda Empat, 8 Kendaraan Roda Dua	21.374.192	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	4.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	2.840.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 unit	3.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	9.998.790	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	3.675.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Lebatukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kecamatan Lebatukan**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**51.370.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Lebatukan**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**32.969.931**	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentasi jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tinhkat Kecamatan**	**25%**	**36.870.000**	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentasi jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tinhkat Kecamatan**	**25%**	**24.673.103**	

	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Lebatukan	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	19.650.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	9.223.103
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentasi terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke pada Camat**	**25%**	**14.500.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentasi terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**8.296.828**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan	14.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan	8.296.828
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Lebatukan**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**34.550.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Lebatukan**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**7.410.864**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa**	**25%**	**25.800.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa**	**25%**	**7.410.864**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	2 Lembaga	8.400.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	2 Lembaga	7.410.864

	di Wilayah Kerja Kecamatan		di Wilayah Kerja Kecamatan			di Wilayah Kerja Kecamatan		Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	-	
	Kegiatan Koordinasi, dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa**	**25%**	**8.750.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa**	**25%**	-	
	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan Pencegahan Covid, Data Stanting, Kemiskinan Ekstrim	1 Laporan	8.750.000	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan Pencegahan Covid, Data Stanting, Kemiskinan Ekstrim	1 Laporan	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kecamatan Lebatukan**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**13.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Lebatukan**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**890.239**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**25%**	**2.500.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**25%**	**890.239**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	890.239	

	Peraturan Kepala Daerah	kan	daerah dan peraturan kepala daerah			dan Peraturan Kepala Daerah		peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peenegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peenegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	10.500.000	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peenegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peenegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kecamatan Lebatukan**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**18.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Lebatukan**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**865.314**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Darah	Kecamatan Lebatukan	**Persentasi terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**18.300.000**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Darah	Kecamatan Lebatukan	**Persentasi terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**865.314**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	1.500.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	865.314

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kecamatan Lebatukan**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	37.250.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Lebatukan**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**1.186.614**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahain Desa	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi dan terawasi**	**25%**	37.250.000	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Lebatukan**	**Persentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi dan terawasi**	**25%**	**1.186.614**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 dokumen	7. 200.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 dokumen	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	2 dokumen	112.450.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	2 dokumen	1.186.614	
	Failitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen fasilitasi rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat desa yang dilaksanakan	2 dokumen	3. 500.000	Failitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen fasilitasi rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat desa yang dilaksanakan	2 dokumen	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 dokumen	3. 500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 dokumen	-	

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dokumen	2.750.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dokumen		
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan pedesaan	1 dokumen	2.350.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen fasilitasi lokasi pembangunan kawasan pedesaan	1 dokumen	-	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasann Batas Desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemenfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasann Batas Desa	2 dokumen	2.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemenfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasann Batas Desa	Kecamatan Lebatukan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemenfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasann Batas Desa	2 dokumen	-	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Lebatukan, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 namun direncanakan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp. 2.316.232.926,- sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 2.230.243.973,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Lebatukan didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2022 di Kecamatan Lebatukan, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Lebatukan dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lebatukan dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Lebatukan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lebatukan, adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) Program pada Kecamatan Lebatukan, antara lain :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lebatukan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Lebatukan Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
2	3		4	5
	Meningkatkan kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25%
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25%
		Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25%
	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%
	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	25%
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25%
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25%

Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Lebatukan Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Lebatukan Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lebatukan di Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.230.243.793,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.186.920.831,-.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 32.969.931,-.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 21 (satu) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 7.410.864,-.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 890.239,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 865.314,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 1.186.614,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 17 (tujuh belas) Desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Lembata

Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN LEBATUKAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN LEBATUKAN

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						KECAMATAN LEBATUKAN							2.497.198.774,00					2.361.511.239,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN							2.497.198.774,00					2.361.511.239,00
7	01					KECAMATAN							2.497.198.774,00					2.361.511.239,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.305.798.774,00					2.196.093.039,00
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							18.830.000,00					23.973.750,00
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam kaitan dengan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	2 Dokumen	25 %	2.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.425.000,00

						Tugas Perangkat Daerah		pengangg aran										
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam kaitan dengan perencanaan dan penganggaran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	20 Dokumen	25 %	2.770.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	3.958.750,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam kaitan dengan perencanaan dan penganggaran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	20 Dokumen	25 %	2.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 Dokumen	4.987.500,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

						Pelayanan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam kaitan dengan perencanaan dan penganggaran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	20 Dokumen	25 %	2.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	3.780.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam kaitan dengan perencanaan dan penganggaran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	20 Dokumen	25 %	2.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	3.780.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerahCakupan Pelayanan Acimnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketersediaan Dokumen yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam kaitan dengan perencanaan dan penganggaran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	2 Laporan	25 %	2.182.098.774,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.960.015.539,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Acimnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam kaitan dengan perencanaan dan penganggaran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	16 Laporan	25 %	3.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	2.940.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.182.098.774,00					1.960.015.539,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Acimnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	28 Orang/bulan	25 %	2.172.198.774,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	1.85x.340.539,00	
7	01	01	2.02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Acimnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	6 Dokumen	25 %	3.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	99.750.000,00	

															(PEN BKB)				
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	2 Laporan	25 %	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	41.042.500,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	18 Laporan	25 %	2.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	22.882.500,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									3.050.000,00					18.945.000,00
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

						Pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerahCakupan Pelayanan Acimnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %25 %	2 Dokumen	25 %	1.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	16.800.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Acimnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	2 Laporan	25 %	1.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	16.800.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2.000.000,00					14.752.500,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	1 Orang	25 %	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	11.670.000,00
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	2 Orang	25 %	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	9.082.500,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								45.105.000,00						74.447.500,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	5 Paket	25 %	2.135.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.257.500,00

						Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah											
7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	5 Paket	25 %	11.345.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.500.000,00
7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	150 Paket	25 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket	25.200.000,00
7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												

						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	10 Paket	25 %	11.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5.725.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerahCakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	25 %25 %	10 Laporan	25 %	9.875.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	25.725.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								13.375.000,00					30.412.500,00
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Unit	25 %	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	17.602.500,00

7	01	01	2.01.7	1.01.05	Pengadaan Mebel																
						Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	5 Unit	25 %	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	3.675.000,00

					Pengisian Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	5 Unit	25 %	1.875.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9.135.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									20.010.000,00					22.722.000,00

7	01	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	5 Laporan	25 %	1.185.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	11.025.000,00
7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerahCakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %25 %	3 Laporan	25 %	7.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	8.925.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %25 %	6 Laporan	25 %	11.374.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2.772.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								21.330.000,00					50.824.250,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %25 %	9 Unit	25 %	14.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	9 Unit	38.587.500,00

						tu; oksi perangkat da erah	Pajak dan Perizinannya									Pajak dan Perizinannya			
7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Ca kupan Pe layanan Ac lmnistrasi Pe rkantoran da lam Mendukung Tu poksi Pe rangkat Daerah Ca kupan pe layanan ad ministrasi pe rkantoran dalam me ndukung tu; oksi perangkat da erah	Jum lah Per alatan dan Me sin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	8 Unit	25 %	2.450.000,00	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Un it	4.410.000,00
7	01	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

						Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 % 25 %	3 Unit	25 %	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	13.950.000,00	
7	01	01	2.09	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamat	25 % 25 %	2 Unit	25 %	2.350.000,00	PENDAPATAN		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2 Unit	3.836.750,00	

						dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		ain, Semua Kel/Desa					ASLI DAERAH (PAD)		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3.500.000,00					47.102.500,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								2.300.000,00					31.877.500,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
						Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	5 Laporan	25 %	1.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	11.245.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
						Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	5 Dokumen	25 %	1.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	20.632.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								1.200.000,00					15.225.000,00

			4	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Telah Menjadi Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												
						Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Laporan	25 %	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	15.225.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								179.627.000,00					47.560.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								4.627.000,00					47.380.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa undefined	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Lembaga Kemasyarakatan	25 % undefined undefined	1.222.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	29.110.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
						Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa undefined	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 % undefined undefined	1.365.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah	1 Dokumen	5.250.000,00

							di Wilayah Kerja Kecamatan									di Wilayah Kerja Kecamatan		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa undefined	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Laporan	25 % undefined undefined	2.040.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	13.020.000,00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								175.000.000,00					180.000,00
7	01	03	2.05	0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan													
						Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	-	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	180.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2.559.000,00					13.650.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								1.395.435,00					2.625.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

						Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Laporan	25 %	1.305.435,00	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Lapo ran	[illegible]
7	01	04	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								1.163.565,00					11.025.000,00
7	01	04	2.0 2	00 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Laporan	25 %	1.163.565,00	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Lapo ran	11.025.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								1.915.000,00					19.215.000,00
7	01	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								1.915.000,00					19.215.000,00

7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
						Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	25 %	50 Orang	25 %	1.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	1.575.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

						Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase Terselenggaraan ya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	765.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	17.640.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								3.799.000,00					37.890.700,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								3.799.000,00					37.890.700,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	25 %	163.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	7.323.840,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	25 %	723.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	12.664.140,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													

						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	25 %	638.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	3.560.200,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	25 %	590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	3.560.200,00
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	25 %	685.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	3.560.200,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	25 %	490.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	[illegible]
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	25 %	360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	22.390.420,00
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	2 Dokumen	25 %	150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	22.034.400,00
												TOTAL	**2.497.198.774,00**					**2.361.511.239,00**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Lebatukan dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Lebatukan Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Lebatukan.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Hadakewa , Oktober 2023

Camat Lebatukan,

Moses Museng, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19680407 199903 1 006

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Kecamatan Omesuri.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Kecamatan Omesuri untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Omesuri dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Omesuri dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100**	-	-	-	-	**7,90**	**7,90**	**100%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	-	-	-	-	**20,45**	**20,45**	**100%**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100**	-	-	-	-	**12,22**	**12,22**	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	-	-	-	-	14	14	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	-	-	-	-	3	3	25%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	-	-	-	-	4	4	25%
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang**	**Prosentase Ketersediaan**	**100**	-	-	-	-	**5,00**	**5,00**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Dokumen Barang Milik Daerah**								
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100**	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**	-	-	-	-	**0,06**	**0,06**	**100%**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	-	-	-	3	3	25%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10.000 Paket	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 Paket	-	-	-	-	3	3	15,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
		disediakan								
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100**	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	16 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	16 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100**	-	-	-	-	**21,03**	**21,03**	**100%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	384 Laporan	-	-	-	-	96	96	25%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	3 Laporan	-	-	-	-	4	4	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Air dan Listrik	dan Listrik yang disediakan								
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	6	6	25%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100**	-	-	-	-	**4,44**	**4,44**	**100%**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	-	-	-	-	8	8	25%
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	-	-	-	-	**12,50**	**12,50**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	PELAYANAN PUBLIK	**dan Pelayanan Publik**								
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	2 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	-	-	-	-	3	3	25%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	-	-	-	-	30	30	25%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100**	-	-	-	-	**6,67**	**6,67**	**100%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat**	**100**	-	-	-	-	**6,67**	**6,67**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Rekomendasi dan Terawasi**								
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa								

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Omesuri, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
2	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
3	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
4	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
5	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25%	25%	25%		25%	25%	25%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Omesuri tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Omesuri, sebagai berikut :

a. Peraturan Perundang-Undangan sering mengalami perubahan.
   Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari, bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
   Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kantor Camat Omesuri di antaranya, Keberadaan sumber daya Kantor Camat Omesuri yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Omesuri, sebagai berikut :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
   Sumber Daya Manusia yang tersedia belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Omesuri. Oleh sebab itu, diharapkan agar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara memadai.
b. Keterbatasan anggaran dan pengelolaannya belum sepenuhnya Berbasis Kinerja.
   Keterbatasan anggaran dibeberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan. Selain itu, permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Disisi lain, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Omesuri sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN OMESURI				2,934,147,339					2.417.276.342	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2,934,147,339					2.417.276.342	
	KECAMATAN				2,934,147,339					2.417.276.342	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100%	2.480.394.339	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100%	2.198.276.342	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	25%	34.014.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	25%	22.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Omesuri, Semua Kel/Desa					Omesuri, Semua Kel/Desa				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**1,982,821,499**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.098.276.342**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	1,885,671,499	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	2.092.276.342	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	85,150,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	2.500.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**19,469,990**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**2.500.000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	7,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12,469,990	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**25,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**2.000.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	15,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**85,500,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**27.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Lembata,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	2,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab. Lembata,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bangunan Kantor	Omesuri, Semua Kel/Desa	yang Disediakan			Kantor	Omesuri, Semua Kel/Desa	yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	15,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	6.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	7,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	9,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	40,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**114,014,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**8.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	25,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	1.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	20,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	1.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	22,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	4.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	25,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	21,514,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**130,719,500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**12.500.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	122,328,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	5,891,100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	5.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	2,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	2.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**89,369,370**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**25.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	61,869,370	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5,500,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	3.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	5,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	3.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	5,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	3.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	5,500,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**115.781.510**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**8.000.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**89.680.510**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**4.000.000**	
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	89.680.510	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	2.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	2.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**26.081.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**2.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	26.081.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	2.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**44.991.470**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**177.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**44.991.470**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**2.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	44.991.470	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000	
	-	-	-	-	-	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**				**175.000.000**	
	-	-	-	-	-	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	175.000.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**9.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**4.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**4.500.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**2.000.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	4.500.000	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	2.000.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	4.500.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	2.000.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**38.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**8.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	25%	38.000.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	25%	8.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	8.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	8.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	30.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**246.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**24.000.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	**246.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	**24.000.000**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	32.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Omesuri,	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	29.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Omesuri,	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	31.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	3.000.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	29.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	38.000.0000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	29.600.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	29.500.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	3.000.000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Omesuri, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 namun direncanakan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp. 2.934.147.339,- sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 2.417.276.342,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Omesuri didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2022 di Kecamatan Omesuri, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Omesuri dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Omesuri dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Omesuri.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Omesuri, adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) Program pada Kecamatan Omesuri, antara lain :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Omesuri yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Omesuri Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25%
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25%
		Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25%
3.	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%
4.	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	25%
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25%
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Omesuri Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Omesuri Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Omesuri di Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.417.276.342,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.198.276.342,-.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 6.000.000,-.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 177.000.000,-.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 4.000.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 8.000.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 24.000.000,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 22 (dua puluh dua) Desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Omesuri Kab. Lembata
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								2.417.276.342							2.960.289.126	
								2.417.276.342							2.960.289.126	
								2.417.276.342							2.960.289.126	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung kgiatan perangkat daerah				100%	2.338.276.342							2.469.523.646	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah				25%	33.500.000					Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		37.500.000	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.500.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		4.500.000	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		4.000.000	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		4.500.000	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		6.000.000	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		6.000.000	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.500.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		3.000.000	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan				25%	2.095.276.342					Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		2.009.960.206	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/Bulan	2.092.276.342	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		1.932.813.206	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		69.160.000	
	7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		7.000.000	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan				12 Laporan	2.500.000	Kab. Lembata,	PENDAPATAN	-	-	Pegawai pada		8.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Omeuri, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Omeuri			
	7.01.01.2.08	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**				**25%**	**2.500.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Omeuri**		**12.469.960**	
	7.01.01.2.08.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		6.000.000	
	7.01.01.2.08.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.500.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		12.469.960	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**				**25%**	**3.000.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Omeuri**		**26.000.000**	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	1.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		10.000.000	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	1.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		16.000.000	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**				**25%**	**27.500.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Omeuri**		**51.500.000**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		2.000.000	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				9 Paket	9.500.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		10.000.000	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Paket	1.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		8.000.000	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2500 Paket	2.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		5.000.000	
	7.01.01.2.06.08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				5 Paket	5.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		8.000.000	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		2.000.000	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		21.000.000	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**				**25%**	**5.000.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Omeuri**		**70.000.000**	
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				2 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		20.000.000	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				4 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		10.000.000	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				5 Unit	4.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		10.000.000	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				4 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		10.000.000	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				3 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omeuri		19.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pemerintahan**				**25%**	**52.500.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**130.233.500**	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		122.828.400	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				3 Laporan	5.500.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.891.100	
	7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				5 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		2.000.000	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**				**25%**	**25.000.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**76.883.270**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	10.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		41.869.270	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	3.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		3.000.000	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				5 Unit	5.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		3.000.000	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	3.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		3.000.000	
	7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	3.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		3.000.000	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**			**25%**	**6.000.000**						**25%**	**69.275.510**	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**			**25%**	**4.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri**	**25%**	**46.394.510**	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tarkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tarkait				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 6.Memperkuat Stabilitas polhik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		23.680.510	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 6.Memperkuat Stabilitas polhik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		22.014.000	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksanaya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada**	**100%**			**25%**	**2.000.000**					**Masyarakat Desa di**	**25%**	**20.081.000**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Camat										Kecamatan Omasuri			
	7.01.03.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang ditimpahkan				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lambata, Omasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketahtanan, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omasuri		30.091.000	
	7.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan kelayanan desa/kelurahan	100%			25%	171.000.000						25%	564.991.470	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%			25%	2.000.000					Masyarakat Desa di Kecamatan Omasuri	25%	30.991.470	
	7.01.04.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lambata, Omasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketahtanan, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omasuri		30.991.470	
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100%				170.000.000					Masyarakat Desa di Kecamatan Omasuri		134.000.000	
	7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokuman Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokuman	170.000.000	Kab. Lambata, Omasuri, Semua Kel/Desa	DANA TRASFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketahtanan, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omasuri		134.000.000	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%			25%	4.000.000						25%	10.000.000	
	7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%			25%	2.000.000					Masyarakat Desa di Kecamatan Omasuri	25%	5.000.000	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lambata, Omasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketahtanan, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omasuri		5.000.000	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Prosentase Pelaksanaan kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	100%			25%	2.000.000					Masyarakat Desa di	25%	5.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Daerah	dan Peraturan Kepala Daerah										Kecamatan Omesuri			
	7.01.04.2.01.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		5.500.000	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%			25%	5.000.000						25%	43.000.000	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%			25%	5.000.000					Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri	25%	43.000.000	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	5.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		5.000.000	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		88.000.000	
	7.01.06	PROGRAM PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	100%			25%	24.000.000						25%	246.000.000	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	100%			25%	24.000.000					Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri	25%	246.000.000	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	3.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		30.000.000	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	3.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		32.500.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan Berkeadilan	umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				3 Dokumen	3.000.000	Kab. Lombata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omeuri		28.000.000	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				3 Dokumen	3.000.000	Kab. Lombata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omeuri		31.000.000	
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3 Dokumen	3.000.000	Kab. Lombata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omeuri		28.000.000	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perancangan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perancangan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	3.000.000	Kab. Lombata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omeuri		33.000.000	
	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				3 Dokumen	3.000.000	Kab. Lombata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omeuri		29.000.000	
	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				3 Dokumen	3.000.000	Kab. Lombata, Omeuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman,	Masyarakat Desa di Kecamatan Omeuri		29.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkualitas dan Berkeadilan	kelestarian umum, dan transformasi pelayanan publik				

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Omesuri dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Omesuri Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Omesuri.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Balauring, 2023

Camat Omesuri,

Ade Hasan Yusup, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19730609 200012 1 001

Pemerintah Kabupaten Lembata

Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Buyasuri

Tahun 2024

Kecamatan Buyasuri

KATA PENGANTAR

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. pemerintah daerah dan masyarakat didaerah lebih diberdayakan sekaligus diberitanggungjawab. yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi **kecamatan** yang sebelumnya merupakan **perangkat wilayah** dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi **perangkat daerah** dalam kerangka asas desentralisasi.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut if dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan

peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintahlainnya diwilayah kecamatan.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan yang memadai bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.

CAMAT BUYASURI,

Lambertus Charles, SH

NIP. 19661028 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.4. Sistimatika Penulisan..... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2023..... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Capaian Program..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 17

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 21

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 29

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 30

3.1. TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi..... 30

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD..... 31

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas..... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 34

BAB V PENUTUP..... 43

DAFTAR TABEL

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Capaian Program..... 7-15
2. Capaian Kinerja Pelayanan..... 18
3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 22-28
4. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wulandoni..... 32
5. Program dan Kegitan Tahun 2024..... 36-61

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor ... Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Kecamatan Buyasuri.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Kecamatan Buyasuri untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Buyasuri dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Buyasuri dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,90**	**7,90**	**100%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,45**	**20,45**	**100%**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
		SKPD								
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	-	-	-	4	4	25%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,22**	**12,22**	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	-	-	-	-	14	14	25%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Bulan	-	-	-	-	3	3	25%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	72 Laporan	-	-	-	-	4	4	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
		SKPD								
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,00**	**5,00**	**100%**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,06**	**0,06**	**100%**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	-	-	-	3	3	25%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10.000 Paket	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	-	-	-	-	3	3	15,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100**	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100**	-	-	-	-	**21,03**	**21,03**	**100%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	384	-	-	-	-	96	96	25%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	96	-	-	-	-	4	4	25%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	-	-	-	-	6	6	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100**	-	-	-	-	**4,44**	**4,44**	**100%**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	-	-	-	-	8	8	25%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	-	-	-	-	**12,50**	**12,50**	**100%**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	20 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Instansi Vertikal Terkait	Terkait								
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan								
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	-	-	-	-	3	3	25%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
		Daerah								
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**25**	**100%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**25**	**100%**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	-	-	-	-	30	30	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100**	-	-	-	-	**6,67**	**6,67**	**100%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100**	-	-	-	-	**6,67**	**6,67**	**100%**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa								
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buyasuri, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
2	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
3	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
4	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
5	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25%	25%	25%		25%	25%	25%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Buyasuri tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Buyasuri, sebagai berikut :

a. Peraturan Prundang-Undangan sering mengalami perubahan.
   Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari, bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
   Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kantor Camat Buyasuri di antaranya, Keberadaan sumber daya Kantor Camat Buyasuri yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Buyasuri, sebagai berikut :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

   Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal), sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah. Oleh sebab itu, diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik, maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas secara memadai.

b. Keterbatasan anggaran dan pengelolaannya belum sepenuhnya Berbasis Kinerja.

   Keterbatasan anggaran dibeberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan. Selain itu, permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Disisi lain, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Buyasuri sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN BUYASURI				**3.276.566.961**					**2.475.357.110**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**3.276.566.961**					**2.475.357.110**	
	KECAMATAN				**3.276.566.961**					**2.475.357.110**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100%**	**2.881.704.624**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100%**	**2.283.857.110**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	**51.627.520**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	**21.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.321.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.709.190	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.554.850	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	7.417.850	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	9.228.340	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2 Laporan	9.370.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan	3.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kel/Desa	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			SKPD	Kel/Desa	Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6.025.690	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.400.311.545,**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.155.857.110**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	2.253.786.753	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	2.150.357.110	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	135.068.000,	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.180.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	5.276.792	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**6.253.986**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**4.000.000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	2.200.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	2.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.053.986	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**55.560.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**200.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	11.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	100.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Buyasuri,	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	44.060.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Buyasuri,	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**88.295.956**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**21.300.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.785.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	20.453.245	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1500 Paket	10.685.920	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	4.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	10.277.115	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	6.300.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	45.094.676	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	6.300.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**74.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**5.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1Unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	1.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	21.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	1.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	23.000.000,	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	1.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka	1 Unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka	1 Unit	1.000.000,	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**107.623.875,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**16.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	92.743.875	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	5.209.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	9.670.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	3.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**98.031.742**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**30.500.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	77.820.944	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	20.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	6.210.798	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	3.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	8.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	5.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	3.500.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**94.394.529**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**8.500.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat**	**25%**	**71.811.993**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan**		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**4.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan		**Kecamatan**			**di Tingkat Kecamatan**					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	77.743.875	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	2.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	71.811.993	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	2.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**22.582.536**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**4.500.000,**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	22.582.536	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	4.500.000,	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**30.202.070**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**181.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**30.202.070**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**6.000.000,**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Laporan	9.402.070	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan	2.000.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Laporan	10.900.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Laporan	2.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.900.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000	
	-	-	-	-	-	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**				**175.000.000**	
	-	-	-	-	-	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Kel/Desa				
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**9.833.505**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**4.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**5.499.585**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**2.000.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.499.585	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	**4.333.920**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	**2.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	4.333.920	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	2.000.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**18.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**12.000.000,**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**18.500.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**12.000.000,**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	7.650.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	2.000.000,	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.850.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**241.932.233**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**16.000.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	**241.932.233**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	**16.000.000**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	49.675.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	48.630.000,	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	27.545.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	26.950.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	27.850.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	27.490.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	17.367.233,	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	16.425.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	2.000.000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Buyasuri, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 namun direncanakan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp. 3.276.566.961,- sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 2.475.357.110,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Buyasuri didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2022 di Kecamatan Buyasuri, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Buyasuri dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Buyasuri dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Buyasuri.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buyasuri, adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) Program pada Kecamatan Buyasuri, antara lain :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Buyasuri yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Buyasuri Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25%
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25%
		Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25%
3.	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%
4.	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	25%
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25%
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Buyasuri Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Buyasuri Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Buyasuri di Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.475.357.110,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 32 (tiga Dua) .Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.253.857.110,-.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 8.500.000,-.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 4 (dua) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 181.000.000,-.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 4.000.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 12.000.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 16.000.000,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 20 (dua puluh) Desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata [illegible] Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Kecamatan Buyasuri Kab. Lembata

Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								2.475.357.110							3.359.248.553	
								2.475.357.110							3.359.248.553	
								2.475.357.110							3.359.248.553	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100%**	**2.253.857.110**							**2.914.877.074**	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**				**25%**	**21.000.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**38.405.731**	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		5.624.403	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		6.008.269	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		6.013.941	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	3.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		5.000.000	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	3.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		7.103.008	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		3.403.541	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		5.252.569	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**				**25%**	**2.155.857.110**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**2.540.629.298**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/Bulan	2.150.357.110	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		2.379.270.856	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	1.500.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		151.006.800	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		5.173.962	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				6 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		5.177.679	

			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**				**25%**	**4.000.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**9.870.000**	
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		4.870.000	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		5.000.000	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**				**25%**	**200.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**26.000.000**	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	100.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		5.000.000	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	100.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		10.000.000	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**				**25%**	**21.300.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**101.574.272**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		3.828.500	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Paket	3.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		24.045.325	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2500 Paket	4.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		12.068.592	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				5 Paket	6.300.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		12.027.712	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	5.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		49.604.144	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**				**25%**	**5.000.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**30.000.000**	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				2 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				4 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		10.000.000	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				5 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		20.000.000	
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				4 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				5 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**				**25%**	**16.000.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**70.244.600**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	10.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		52.800.000	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				3 Laporan	3.000.000	Kab. Lembata,	PENDAPATAN ASLI	-	-	Pegawai pada		6.020.980	

						LAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan						Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)			Kantor Camat Buyasuri			
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				6 Laporan	3.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		11.423.620	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**				**25%**	**30.500.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**109.153.174**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	20.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		84.782.094	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				8 Unit	3.500.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		8.671.079	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3.500.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		9.650.000	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	3.500.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		6.050.000	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**			**25%**	**6.000.000**						**25%**	**66.275.510**	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**			**25%**	**4.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**150.846.272**	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		66.665.073	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		84.181.199	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**			**25%**	**4.500.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**15.000.000**	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan				1 Laporan	4.500.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		15.000.000	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam**	**100%**			**25%**	**181.000.000**						**25%**	**169.940.307**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**													
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**			**25%**	**6.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**35.940.207**	
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		22.940.207	
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		6.500.000	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		6.500.000	
	7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100%**				**175.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**		**134.000.000**	
	7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	175.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		134.000.000	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**4.000.000**						**25%**	**10.000.000**	
	7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**2.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**5.500.000**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		5.500.000	

										PRIORITAS					
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								-			dan Berkeadilan	umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**			25%	**2.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**4.500.000**	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		4.500.000	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**			**25%**	**12.000.000**						**25%**	**31.500.000**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggarannya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**			**25%**	**12.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**31.500.000**	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		6.500.000	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	10.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		25.000.000	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100%**			**25%**	**16.000.000**						**25%**	**67.085.000**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi rsendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100%**			25%	**16.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**67.085.000**	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		16.085.000	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam				2 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat	4.Reformasi	Masyarakat Desa di		30.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BIAYA KEGIATAN TAHUN BERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dan Pendayagunaan Aset Desa	rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Buyasuri, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Buyasuri			
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		29.500.000	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		3.500.000	
29	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		3.500.000	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		3.500.000	
	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		3.500.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Suyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Suyasuri		3.500.000	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Buyasuri dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Buyasuri Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Buyasuri.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Wairiang, 2023

Camat Buyasuri,

Lambertus Charles, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19661028 200012 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Kantor Camat Buyasuri

Alamat : Jl. Trans Buyasuri-Lewoleba - Lembata

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA BARANG

NOMOR : PPK.07 /BASTB-BM.Personal Komputer/Kec.Buyasuri/2023

Tanggal, 30 November 2023

PROGRAM :

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Paket Pekerjaan :

Belanja Modal Personal Computer

Penyedia :

PT. CHEYLINDO NUSA PERSADA

TAHUN ANGGARAN 2023

PT. CHERYLINDO NUSA PERSADA

Alamat : Jl. Hati Mulia I/1, Kota Kupang
Telepon : 0380 – 8431651
e-mail : cheryl73@yahoo.com
Website : https://yusungtech.co.id
NPWP : 92.950.460.3-922.000

Kupang, 28 November 2023

Nomor : 06/PT.CERLINDO NP/PHO/XI/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Pemeriksaan Barang**

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kecamatan .Buyasuri

di - Tempat

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan kepada Bapak bahwa pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Personal Computer Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah selesai 100%, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan dan Selanjutnya dilakukan Serah Terima Pekerjaan paket tersebut.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Penawar
PT. CHEYLINDO NUSA PERSADA

SUANIH KRISCHARA
Direktris

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA-PD)

KECAMATAN ATADEI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kantor Camat Atadei Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mekanisme penyusunannya secara lengkap dan jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjadi jembatan antara dokumen perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan dalam mendukung visi dan misi daerah. Selanjutnya renja ini disempurnakan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan RAPBD.

Demikian RENJA-PD ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak- pihak yang berkepentingan khusus untuk peningkatan kincrja di masa mendatang.

Tubukrajan, 2023

Camat Atadei

Marianus Demoor, S.Sos
Pembina Tk 1/IV b
NIP.197512082000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sstematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 28

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 29

3.3 Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

BAB V PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Atadei
Kabupaten Lembata 14

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 18

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata 30

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Lembata Tahun 2024 33

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR [redacted] TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Kecamatan Atadei.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan *kelompok sasaran*.

5. *Rumusan Rancangan Akhir*

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Kecamatan Atadei untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Atadei);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Atadei dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, scrta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Atadei dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	100	-	-	-	-	**7,90**	**7,90**	**100%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	100	-	-	-	-	**20,45**	**20,45**	**100%**
		Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	100	-	-	-	-	**12,22**	**12,22**	**100%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	-	-	-	-	14 Bulan	14 Bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	-	-	-	-	3	3	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	-	-	-	-	4	4	25%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	100	-	-	-	-	5,00	5,00	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	100	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	100	-	-	-	-	0,06	0,06	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Paket	-	-	-	-	6	6	25%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	-	-	-	3	3	25%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10.000 Paket	-	-	-	-	80	80	25%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	-	-	-	-	5	5	15,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	100	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Bangunan Lainnya	disediakan								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20 Unit	-	-	-	-	5	5	25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100**	-	-	-	-	**21,03**	**21,03**	**100%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25	-	-	-	-	12	12	25%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	15	-	-	-	-	12	12	25%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	-	-	-	-	6	6	25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan	10	-	-	-	-	3	3	25%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100**	-	-	-	-	**4,44**	**4,44**	**100%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	-	-	-	-	8	8	25%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	-	-	-	-	3	3	25%
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	-	-	-	-	**12,50**	**12,50**	**100%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	-	-	-	-	2	2	25%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Kecamatan									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	100	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	100	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	100	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100	-		-	-	**25**	**25**	**100%**
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
	Koordinasi Penerapan dan	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi**	100	-	-	-	-	**25**	**25**	**100%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	100	-	-	-	-	25	25	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100	-	-	-	-	25	25	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	-	-	-	-	30	30	25%
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Dokumen Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	25%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100**	-	-	-	-	**6,67**	**6,67**	**100%**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100**	-	-	-	-	**6,67**	**6,67**	**100%**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%
	Failitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen yang difasilitasi rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang - Undangan	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakaten	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ke Tiga	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ke Tiga	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Atadei, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
2	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
3	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
4	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
5	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25%	25%	25%		25%	25%	25%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Atadei s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Atadei, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Atadei tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Atadei sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-Undangan sering mengalami perubahan

   Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

   Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Atadei. Keberadaan sumber daya Kecamatan Atadei yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Atadei :

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal). Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas secara memadai.

2. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja.

Keterbatasan anggaran dibeberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan.

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program –

program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Atadei sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
Kab. Lembata
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000
KECAMATAN ATADEI

No	Rancangan Awal RKPD				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)			(2)		(3)	(4)			
	KECAMATAN ATADEI					2.655.962.174,00	KECAMATAN ATADEI					2.655.962.174,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**			**2.445.962.174,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**			**2.445.962.174,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah**			**13.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah**			**13.000.000,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20 Dokumen	2.000.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	20 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	20 Dokumen	2.000.000,00	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.335.962.174,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					2.335.962.174,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33 Orang/ bulan	2.330.962.174,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.330.962.174,00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6 Dokumen	1.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6 Dokumen	1.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000,00	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					5.000.000,00	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**2.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**2.000.000,00**	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4 Orang	1.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4 Orang	1.000.000,00	

	[illegible] implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	[illegible] yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	[illegible] yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**31.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**31.000.000,00**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	2.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	2.000.000,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	10.000.000,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	6.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	6.000.000,00	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5 Paket	8.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5 Paket	8.000.000,00	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**13.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**13.000.000,00**	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4 Unit	1.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4 Unit	1.000.000,00	
2	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4 Unit	1.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4 Unit	1.000.000,00	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5 Unit	10.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5 Unit	10.000.000,00	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5 Unit	1.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5 Unit	1.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					23.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.000.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7 Laporan	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7 Laporan	8.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**23.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**23.000.000,00**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9 Unit	7.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9 Unit	7.000.000,00	
2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10 Unit	1.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10 Unit	1.000.000,00	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8 Unit	5.000.000,00	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8 Unit	5.000.000,00	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8 Unit	5.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**4.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**4.000.000,00**	

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**6.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**6.000.000,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	Anggaran	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	Anggaran
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**					
1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	1 Dokumer	175.000.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**2.000.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**2.000.000,00**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	2.000.000,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**					
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1 Laporan	2.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**6.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**6.000.000,00**

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah						
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	30 Orang	2.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	30 Orang	2.000.000,00	
2	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Masyarakat	2.000.000,00	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Masyarakat	2.000.000,00	
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**13.000.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**13.000.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8 Dokumen	1.000.000,00	
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	

3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	
4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	9 Laporan	1.000.000,00	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	9 Laporan	1.000.000,00	
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	
6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	
7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	
8	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	
9	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	
10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	
11	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	
12	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	11 Dokumen	1.000.000,00	

	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Atadei, Serwaru Kel/Desa	Fasilitasi dalam rangka penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Peregasan Batas Desa				Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Atadei, Serwaru Kel/Desa	Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pencayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Atadei, maka dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp.2.655.962.174,-, *sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan* sebesar Rp. 2.655.962.174,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Atadei.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Atadei.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Atadei, adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Kecamatan Atadei.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kecamatan Atadei.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Atadei yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Atadei Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitastatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wikayah Kecamatan	1.1. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahandan Pelayanan Publik	Jumlah Desa/Kelurahan Sasaran Pendampingan danMonitoring	100%
		Meningkatnya Tata kelola Penyelenggarahan Kepemerintahan	Persentase kualitas Administrasi Pengelolaan Keuangan secara Tertib dan Baik.	100%
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa danKelurahan	*Meningkatnya* Partisipasi Masyarakat dalam 2.1. Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Keluarahan	100%
		Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan 2.2. Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi ProgramKerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%
		Meningkatnya efektifitas Kegiatan 2.3. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan* Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%
3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta penyelenggaraan Pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase penanganan laporan pengaduan/konflik social	100%

Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Atadei Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Atadei Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Atadei di Tahun 2024 sebanyak 6 Program, 16 Kegiatan, 58 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.959.880.138,00,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.445.962.174,-.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 6.000.000,-.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 181.000.000,-.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 4.000.000,-.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 6.000.000,-.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 13.000.000,-.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 15 (lima belas) Desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dalam [illegible] 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut : *(Print Lampiran Final Penetapan Renja [illegible] pada SIPD).*

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Lembata
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000
KECAMATAN ATADEI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN ATADEI

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN ATADEI								2.655.962.174,00					2.959.880.138,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								2.655.962.174,00					2.959.880.138,00
7	01				KECAMATAN								2.655.962.174,00					2.959.880.138,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.445.962.174,00					2.695.680.138,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13.000.000,00					31.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Lembata

Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000
KECAMATAN ATADEI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN ATADEI

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN ATADEI								2.655.962.174,00					2.959.880.138,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								2.655.962.174,00					2.959.880.138,00
7	01				KECAMATAN								2.655.962.174,00					2.959.880.138,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.445.962.174,00					2.695.680.138,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13.000.000,00					31.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

7	01	01	2.02	0002	Penyedi-an Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase ketersediaan dokumen keuangan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	25 %	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	83.361.716,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen keuangan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	25 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen keuangan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	7.000.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5.000.000,00					35.000.000,00
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen barang milik daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	25 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00

						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Layanan Perkantoran dan Barang Milik Daerah yang Tersedia	Prosentase ketersediaan dokumen barang milik daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	25 %	2.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Jumlah Layanan Perkantoran dan Barang Milik Daerah yang Tersedia	4 Paket	10.000.000,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2.000.000,00					10.000.000,00
7	01	01	2.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
7	01	01	2.05	0001		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase ketersediaan dokumen kepegawaian	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	4 Orang	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	5.000.000,00
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
7	01	01	2.05	0002		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase ketersediaan dokumen kepegawaian	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	2 Orang	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	5.000.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								11.000.000,00					110.000.000,00
7	01	01	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
7	01	01	2.06	0001		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan admin strasi umum perkantoran	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	5 Paket	25 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
7	01	01	2.06	0002		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan administrasi umum perkantoran	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	5 Paket	25 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
7	01	01	2.06	0004		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan administrasi umum perkantoran	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	5 Paket	25 %	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000,00

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam n endukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase ketersediaan administrasi umum perkantoran	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	5 Paket	25 %	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase ketersediaan administrasi umum perkantoran	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	25 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	25.000.000,00
													13.000.000,00					100.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Prosentase ketersediaan barang milik daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prosentase ketersediaan barang milik daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prosentase ketersediaan barang milik daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	25 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

					Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Prosentase ketersediaan barang milik daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	80.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							23.000.000,00						64.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	25 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	8.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	25 %	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	25 %	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	30.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							23.000.000,00						96.700.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

						Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lambata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	5 Laporan	25 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	25.000.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
						Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lambata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	5 Dokumen	25 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2.000.000,00					25.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
						Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Lambata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	1 Laporan	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	25.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								181.000.000,00					97.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								6.000.000,00					47.000.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
						Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Lambata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	2 Lembaga kemasyarakatan	25 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

							Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	7.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	1 Laporan	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000,00
																						50.000.000,00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)									175.000.000,00								
7	01	03	2.05	0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																	
							Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	175.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000,00
																						25.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									4.000.000,00								10.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum									2.000.000,00								
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase pelaksanaan Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	1 Laporan	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]							2.000.000,00					15.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
						Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase pelaksanaan Kegiatan penerapan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	1 Laporan	25 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	15.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								6.000.000,00					42.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								6.000.000,00					42.000.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													

						Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	8 Orang	25 %	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketaharan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	7.000.000,00
7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila															
						Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Prosentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Darah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	1 Lembaga Masyarakat	25 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	1 Lembaga Masyarakat	15.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
						Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase terselenggararya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Darah	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								13.000.000,00					48.700.000,00		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								13.000.000,00					48.700.000,00		

7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	8 Dokumen	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	2.500.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel./Desa	25 %	11 Dokumen	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	2.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	11 Dokumen	25 %	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	1.100.000,00
7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	9 Laporan	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	9 Laporan	1.100.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Prosentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	7 Dokumen	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7 Dokumen	2.500.000,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa												

						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	11 Dokumen	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 Dokumen	5.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	11 Dokumen	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	11 Dokumen	5.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	11 Dokumen	25 %	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	5.000.000,00
7	01	06	2.01	0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	11 Dokumen	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	11 Dokumen	3.500.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksansan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	11 Dokumen	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	4.000.000,00
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													

						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	11 Dokumen	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11 Dokumen	5.500.000,00
7	01	06	2.01	2024	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga											
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	11 Dokumen	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	11 Dokumen	6.500.000,00
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa											
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi, dan terawasi	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	25 %	6 Dokumen	25 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6 Dokumen	7.000.000,00
													TOTAL 2.655.967.174,00				2.959.883.138,00

BAB V

PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Atadei dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Atadei Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Atadei.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Camat Atadei

Kabupaten Lembata,

Marianus Demoor, S.Sos

Pembina Tk.1/IVb

NIP.197512082000121001

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun
2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Kecamatan Nagawutung.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Kecamatan Nagawutung untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 88);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Nagawutung dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Nagawutung dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	-	-	-	-	-	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	-	-	-	-	14	14	25%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Bulan	-	-	-	-	12	12	25%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Daerah SKPD									
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100%**	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakian Dinas Besrta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 Dokuemn					-	-	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	-	-	-	-	12	12	25%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48 Paket	-	-	-	-	12	12	25%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	48 Paket	-	-	-	-	12	12	25%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48 Paket	-	-	-	-	12	12	25%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	48 Laporan	-	-	-	-	12	12	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100%**	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Dokumen	-	-	-	-	12	12	25%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Dokumen	-	-	-	-	12	12	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan PEreIngkapan KAntor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Dokumen	-	-	-	-	-	-	25%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 Dokumen	-	-	-	-	12	12	25%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	-	-	-	-	8	8	25%
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Paket	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	-	-	-	-	**25**	**25**	**25%**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pembangunan di Desa									
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Permberdayan Masyarakat di Wilayah KEcamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100%**	-	-	-	-	25%	25%	**25%**
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	8 Laporan	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.03.2.05	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**100%**	-	-	-	-	**25**	**25**	**25%**
7.01.03.2.05.01	Penumbuhan Kesdaraan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Polah Hidup Bersih dan Sehat.	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajad Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8 Laporan	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.03.2.05.01	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah tangga	8 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI**	**Presentase Koordinasi**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	**25%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**								
7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**	**25%**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	-	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	**25%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	**25%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Daerah	**Daerah**								
7.01.05.2.01.01	Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Laporan	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100%**	-	-	-	-	25%	25%	25%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Kewajiban LEmbaga Kemasyarakatan	Jumlah Dok. Fasilitasi dalam rangka Pelak. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama dengan Pihak lain	Jumlah Dok. Fasilitasi dalam rangka Kerja sama anatar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nagawutung, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
2	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
3	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
4	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
5	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25%	25%	25%		25%	25%	25%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Nagawutung tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Nagawutung, sebagai berikut :

a. Peraturan Prundang-Undangan sering mengalami perubahan.
   Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari, bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
   Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kantor Camat Nagawutung di antaranya, Keberadaan sumber daya Kantor Camat Nagawutung yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Nagawutung, sebagai berikut :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

   Kuantitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan tugas dan fungsi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi sesuai dengan jenjang jabatan yang di emban masih sangat sedikit. Oleh sebab itu, diharapkan agar pelaksanan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Nagawutung terlaksana dengan baik, maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas secara memadai.

b. Keterbatasan anggaran dan pengelolaannya belum sepenuhnya Berbasis Kinerja.

   Keterbatasan anggaran dibeberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan. Selain itu, permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Disisi lain, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Nagawutung sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(3)	(5)	(9)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN Nagawutung				3.339.814.6469					3.339.814.6469	
	UNSUR KEWILAYAHAN				3.339.814.6469					3.339.814.6469	
	KECAMATAN				3.339.814.6469					3.339.814.6469	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	100%	2.889.494.646	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	100%	2.889.494.646	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	25%	29.400.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	25%	29.400.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.725.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.725.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.775.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.775.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.725.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.725.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5.775.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5.775.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.200.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	4.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	4.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah	Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Perangkat Daerah	Laporan		Daerah	Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Perangkat Daerah	Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.448.494.646**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.448.494.646**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	3.317.288.777	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	3.317.288.777	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	115.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	115.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.405.869	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.405.869	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**26.250.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**26.250.000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.250.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.250.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	21.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	21.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**44.100.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**44.100.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan.	1 Paket	8.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan.	1 Paket	8.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan adistrasi kepegawaian	1 Dokumen	4.200.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan adistrasi kepegawaian	1 Dokumen	4.200.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknic Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	31.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknic Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	31.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**77.700.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**77.700.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.150.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.150.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	13.650.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	13.650.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	10.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	10.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	8.400.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	8.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	42.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	42.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**130.200.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**130.200.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	82.800.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	82.800.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata,	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	31.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata,	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	31.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Nagawutung, Semua Kel/Desa					Nagawutung, Semua Kel/Desa				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	26.250.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	26.250.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	9.450.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	9.450.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	10.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	10.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**79.800.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**79.800.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	63.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	63.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	10.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	10.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	2.625.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	2.625.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	3.675.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	3.675.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**53.550.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**53.550.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kab. Lembata, Nagawutu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	36.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Lembata, Nagawut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	36.750.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ng, Semua Kel/Desa				Operasional atau Lapangan	ung, Semua Kel/Desa				
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.250.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.250.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	4.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	4.200.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	1 Unit	3.675.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	1 Unit	3.675.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	3.675.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	3.675.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**69.720.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**69.720.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**48.720.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**48.720.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	17.220.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	17.220.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	31.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	31.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**21.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**21.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	2 Laporan	21.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	2 Laporan	21.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	25%	81.900.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	25%	81.900.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	25%	50.400.000	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	25%	50.400.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Desa.	2 Laporan	8.400.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Desa.	2 Laporan	8.400.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	42.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	42.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				10.500.000	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**				10.500.000	
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	10.500.000	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	10.500.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan				21.000.000	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				21.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadara Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	10.500.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadara Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	10.500.000	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bncana Rumah Tangga	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Julah laporan keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	2 Dokumen	10.500.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bncana Rumah Tangga	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Julah laporan keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	2 Dokumen	10.500.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	25%	21.000.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	25%	21.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	25%	10.500.000	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	25%	10.500.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kab. Lembata, Nagawutu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	2 Laporan	10.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Kab. Lembata, Nagawut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	2 Laporan	10.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ng, Semua Kel/Desa	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ung, Semua Kel/Desa	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	10.500.000	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	10.500.000	
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	10.500.000	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	10.500.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	25%	21.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	25%	21.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	25%	21.000.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	25%	21.000.000	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	2 Laporan	4.200.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	2 Laporan	4.200.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	16.800.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	16.800.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Prosentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	25%	256.700.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Prosentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	25%	256.700.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	256.700.000	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	256.700.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	45.250.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	45.250.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	55.750.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	55.750.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Nagawutu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	55.250.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Nagawut	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	55.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		ng, Semua Kel/Desa					ung, Semua Kel/Desa				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	55.250.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	55.250.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	55.250.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	55.250.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	55.250.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	55.250.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.	1 Dokumen	5.250.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.	1 Dokumen	5.250.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.	1 Dokumen	4.200.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.	1 Dokumen	4.200.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	5.250.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	5.250.000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Nagawutung, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 namun direncanakan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
2. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
3. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp. 2.934.147.339,- sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 2.417.276.342,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Nagawutung didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2022 di Kecamatan Nagawutung, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Nagawutung dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Nagawutung dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Nagawutung.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nagawutung, adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) Program pada Kecamatan Nagawutung, antara lain :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nagawutung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Nagawutung Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25%
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25%
		Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25%
3.	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%
4.	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	25%
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25%
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Nagawutung Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Nagawutung Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nagawutung di Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.300.129.494.,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 (delapan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.077.599.494,-.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 14.000.000,-.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 187.000.000,-.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 1.800.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (sat) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 12.500.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 7.2000.000,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 18 (delapan belas) Desa.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Nagawutung Kab. Lembata
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								2.417.276.342							2.968.289.126	
								2.417.276.342							2.968.289.126	
								2.417.276.342							2.968.289.126	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung capaian program daerah				100%	2.098.276.342							2.439.122.146	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah				25%	21.500.000					Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		37.500.000	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		6.500.000	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		4.000.000	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		4.500.000	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	2.500.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		6.000.000	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	2.500.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		6.000.000	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.500.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		3.000.000	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		5.500.000	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan				25%	2.096.276.342					Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		2.928.963.286	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/Bulan	2.092.276.342	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		1.932.813.286	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	Pegawai pada Kantor Camat		83.150.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa	(PAD)			Nagarawung			
	7.01.01.2.02.19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.500.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		7.001.000	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	2.500.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		6.001.000	
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**				**25%**	**2.500.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung**		**25.489.990**	
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		6.001.000	
	7.01.01.2.03.06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.500.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		12.489.990	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**				**25%**	**2.000.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung**		**26.000.000**	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		10.000.000	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		16.000.000	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Pelaksanaa**				**25%**	**27.500.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung**		**51.500.000**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		2.000.000	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Paket	6.500.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		10.000.000	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Paket	2.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		3.000.000	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2500 Paket	2.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		5.000.000	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				5 Paket	5.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		8.000.000	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		2.000.000	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		21.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**				**25%**	**8.000.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Nagrewang**		**70.000.000**	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				2 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		20.000.000	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan				4 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		10.000.000	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				5 Unit	4.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		10.000.000	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				4 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		13.000.000	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				3 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		13.000.000	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**				**25%**	**12.500.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung**		**130.219.500**	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		122.228.400	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				3 Laporan	6.500.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		5.991.100	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				6 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		2.001.000	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**				**25%**	**25.000.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung**		**76.869.370**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya				8 Unit	10.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		61.869.370	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		1.001.000	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				8 Unit	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		1.001.000	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		5.000.000	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	2.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		2.001.000	
	7.01.01.2.09.13	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	2.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Serma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Nagawutung		2.001.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa							
	7.01.03	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**			**25%**	**6.000.000**						**25%**	**60.275.510**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**			**25%**	**4.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung**	**25%**	**40.184.510**	
	7.01.03.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Kebalikan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 6.Memperkuat Stabilitas politik, keteraturan, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		25.680.510	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	2.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Kebalikan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 6.Memperkuat Stabilitas politik, keteraturan, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		20.514.000	
	7.01.03.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**			**25%**	**2.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung**	**25%**	**20.081.000**	
	7.01.03.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Kebalikan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 6.Memperkuat Stabilitas politik, keteraturan, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		20.081.000	
	7.01.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam penlenggaraan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100%**			**25%**	**177.009.000**						**25%**	**264.891.470**	
	7.01.05.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**			**25%**	**2.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung**	**25%**	**30.980.470**	
	7.01.05.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Kebalikan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 6.Memperkuat Stabilitas politik, keteraturan, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		30.980.470	
	7.01.05.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pembelakuna Pembinaan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100%**				**175.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung**		**234.000.000**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.09.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	175.000.000	Kab. Lamtara, Nagawutung Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		184.000.000	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**4.000.000**						**25%**	**10.500.000**	
	7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**2.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung**	**25%**	**5.000.000**	
	7.01.04.2.01.10	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lamtara, Nagawutung Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		5.000.000	
	7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**			25%	**2.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung**	25%	**5.500.000**	
	7.01.04.2.02.10	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	2.000.000	Kab. Lamtara, Nagawutung Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		5.500.000	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**			**25%**	**8.000.000**						**25%**	**41.500.000**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**			**25%**	**8.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung**	**25%**	**41.500.000**	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemantauan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemantauan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	5.000.000	Kab. Lamtara, Nagawutung Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		8.000.000	
	7.01.05.2.01.10	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	2.000.000	Kab. Lamtara, Nagawutung Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman,	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		33.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkualitas dan Berkeadilan	keterbukaan umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100%**			**25%**	**24.000.000**						**25%**	**240.000.000**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi sendalam Koordinasi dan Terawasi**	**100%**			25%	**24.000.000**						**Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung**	**25%**	**240.000.000**
	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Kesalahan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, keterlibatan umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		10.000.000	
	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Kesalahan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, keterlibatan umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		12.500.000	
	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Kesalahan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, keterlibatan umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		29.500.000	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Kesalahan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, keterlibatan umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		11.000.000	
29	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lembata, Nagawutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Kesalahan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, keterlibatan umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagawutung		29.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lombok Nagarretang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketemtraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagarretang		35.000.000	
	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Lombok Nagarretang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketemtraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagarretang		29.500.000	
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengesan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengesan Batas Desa				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Lombok Nagarretang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketemtraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Nagarretang		29.500.000	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Nagawutung dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Nagawutung Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Nagawutung.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Loang, 2023

Camat Nagawutung,

Mustan Boli, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19770705 200801 1 039

Pemerintah Kabupaten Lembata

Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Ile Ape (KCIA)

Tahun 2024

Kecamatan Ile Ape

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistimatika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2023 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Capaian Program 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 30

3.1. TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi 30

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD 31

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 34

BAB V PENUTUP 43

DAFTAR TABEL

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Capaian Program..... 7-15
2. Capaian Kinerja Pelayanan..... 18
3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 22-2
4. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ile Ape..... 32
5. Program dan Kegitan Tahun 2024..... 36-6

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten
Lembata Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Kecamatan Ile Ape.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Kecamatan Ile Ape untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Ile Ape dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ile Ape dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN ILE APE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.					UNSUR KEWILAYAHAN										
7.	01.				KECAMATAN ILE APE										
7.	01.	01.			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keungan Yang Cepat, Tepat	100								
7.	01.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja perangkat daerah	100								0%
7.	01.	01.	2.01.	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen					2	2	25%

7 .	01 .	01 .	2.01 .	02 .	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25%
7 .	01 .	01 .	2.01 .	03 .	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25%
7 .	01 .	01 .	2.01 .	03 .	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80	Dokumen					20	20	25%
7 .	01 .	01 .	2.01 .	05 .	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	80	Dokumen					20	20	25%
7 .	01 .	01 .	2.01 .	06 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan					2	2	25%
7 .	01 .	01 .	2.01 .	07 .	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan					2	2	25%
7 .	**01 .**	**01 .**	**2.02 .**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100**								
7 .	01 .	01 .	2.02 .	01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan					14	14	100%
7 .	01 .	01 .	2.02 .	02 .	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	Dokumen					6	6	25%
7 .	01 .	01 .	2.02 .	05 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan					2	2	25%
7 .	01 .	01 .	2.02 .	07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan					2	2	25%

7.	01.	01.	2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	100									
7.	01.	01.	2.03.	01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24	Dokumen					6	6	25%
7.	01.	01.	2.03.	06.	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Laporan					12	12	25%
7.	**01.**	**01.**	**2.06.**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**								
7.	01.	01.	2.06.	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	Paket					5	5	25%
7.	01.	01.	2.06.	02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	20	Paket					5	5	25%
7.	01.	01.	2.06.	04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10000	Paket					2500	2500	25%
7.	01.	01.	2.06.	05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20	Paket					5	5	25%
7.	01.	01.	2.06.	06.	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	8	Dokumen					2	2	25%
7.	01.	01.	2.06.	06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	40	Laporan					10	10	25%
7.	**01.**	**01.**	**2.08.**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100**								
7.	01.	01.	2.08.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	24	Laporan					6	6	25%
7.	01.	01.	2.08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan					3	3	25%
7.	01.	01.	2.08.	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16	Laporan					4	4	25%
7.	**01.**	**01.**	**2.09.**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100**								
7.	01.	01.	2.09.	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	40	Unit					10	10	25%

7 .	01 .	01 .	2.09 .	06 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnnya yang dipelihara	8	Unit					2	2	25%
7 .	01 .	01 .	2.09 .	09 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit					1	1	25%
7 .	01 .	01 .	2.09 .	10 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit					1	1	25%
7 .	**01 .**	**02 .**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**								
7 .	**01 .**	**02 .**	**2.01 .**		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase terlaksananya urusan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**								
7 .	01 .	02 .	2.01 .	01 .	Koordinasi/Sinergi Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	Jumlah Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	20	Laporan					5	5	25%
7 .	**01 .**	**02 .**	**2.02 .**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Prosentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**								
7 .	01 .	02 .	2.02 .	03 .	Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan EfektifitssPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	Laporan					5	5	25%
7 .	**01 .**	**02 .**	**2.04 .**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**100**								
7 .	01 .	02 .	2.04 .	03 .	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	20	Laporan					5	5	25%
7 .	**01 .**	**03 .**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**								
7 .	**01 .**	**03 .**	**2.01 .**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**								
7 .	01 .	03 .	2.01 .	01 .	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	Lembaga Kemasyarakatan					2	2	25%

7.	01.	03.	2.01.	02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Mayarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Mayarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8	Dokumen					2	2	25%
7.	01.	03.	2.01.	03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan					2	2	25%
7.	**01.**	**03.**	**2.05.**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**								
7.	01.	03.	2.05.	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	8	Dokumen					2	2	25%
7.	**01.**	**04.**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**								
7.	**01.**	**03.**	**2.01.**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**								
7.	01.	03.	2.01.	01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	Laporan					2	2	25%
7.	**01.**	**03.**	**2.02.**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**								
7.	01.	03.	2.02.	01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	8	Laporan					2	2	25%
7.	**01.**	**05.**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terselelnggaranya urusan pemerintahan umum**	**100**								
7.	**01.**	**05.**	**2.01.**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Darah**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100**								

7 .	01 .	05 .	2.01 .	01 .	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	136	Orang					34	34	25%
7 .	01 .	05 .	2.01 .	04 .	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	136	Orang					34	34	25%
7 .	01 .	05 .	2.01 .	08 .	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	Dokumen					2	2	25%
7 .	**01 .**	**06 .**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi**	**100**								
7 .	**01 .**	**06 .**	**2.01 .**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi**	**100**								
7 .	01 .	06 .	2.01 .	01 .	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	Dokumen					2	2	25%
7 .	01 .	06 .	2.01 .	03 .	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	8	Dokumen					2	2	25%
7 .	01 .	06 .	2.01 .	05 .	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	Dokumen					2	2	25%
7 .	01 .	06 .	2.01 .	07 .	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8	Dokumen					2	2	25%

7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8	Dokumen					2	2	25%
7.01.06.2.01.09					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	8	Dokumen					2	2	25%
7.01.06.2.01.10					Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumenFasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	8	Dokumen					2	2	25%
7.01.06.2.01.15					Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8	Dokumen					2	2	25%

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ile Ape, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
2	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
3	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
4	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
5	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25%	25%	25%		25%	25%	25%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Ile Ape tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Ile Ape, sebagai berikut :

a. Peraturan Prundang-Undangan sering mengalami perubahan.
   Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari, bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
   Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kantor Camat Ile Ape di antaranya, Keberadaan sumber daya Kantor Camat Ile Ape yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Ile Ape, sebagai berikut :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

   Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal), sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah. Oleh sebab itu, diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik, maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas secara memadai.

b. Keterbatasan anggaran dan pengelolaannya belum sepenuhnya Berbasis Kinerja.

   Keterbatasan anggaran dibeberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan. Selain itu, permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Disisi lain, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Ile Ape sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah:Kec. Ile Ape

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN ILE APE				2,351,186,252					2,161,047,135	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Cepat, Tepat	25%	2,146,161,014	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Cepat, Tepat	25%	1,989,759,614	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja Perangkat Daerah	25%	15,824,525	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja Perangkat Daerah	25%	15,824,525	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perengkat Daerah	2	2,858,975	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perengkat Daerah	2	2,858,975	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. RKA SKPD	1	1,954,700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. RKA SKPD	1	1,954,700	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. RKA SKPD	1	1,954,700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. RKA SKPD	1	1,954,700	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	20	2,501,450	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	20	2,501,450	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	20	2,209,550	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	20	2,209,550	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2,390,450	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2,390,450	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD	2	1,954,700	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD	2	1,954,700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentasi Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2,034,044,152**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentasi Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**1,755,034,025**	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	2,026,186,252	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	1,670,386,125	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	6	1,500,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	6	78,290,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan	2	3,178,950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan	2	3,178,950	

			Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun					Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ prognosis SKPD dan Laporan dan Lap. keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ prognosis SKPD	2	3,178,950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ prognosis SKPD dan Laporan dan Lap. keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ prognosis SKPD	2	3,178,950	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosenase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**8,741,050**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosenase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**27,969,000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	4,299,100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	24,459,100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	4,441,950	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	3,509,900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosenase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**0%**	**500,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosenase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**0%**	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	0	500,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	0	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi**	**25%**	**38,235,614**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi**	**25%**	**46,834,614**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	5	2,935,275	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	5	2,935,275	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5	12,637,276	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5	12,976,276	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500	6,790,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500	9,050,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	11,250,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	10,250,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	2	1,623,063	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	2	1,623,063	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	3,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**1,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**2,000,000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	500,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	1,000,000	
	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	500,000	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	1,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**11,532,950**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**117,132,950**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	5,512,450	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	111,112,450	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	4,382,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	4,382,500	

			yang disediakan					yang disediakan			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	1,638,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	1,638,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**36,282,723**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**24,964,500**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	10	32,025,223	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	10	20,707,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2	2,840,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2	2,840,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	735,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	735,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	682,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	682,500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**25%**	**3,496,338**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**25%**	**6,059,738**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Prosentase jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**25%**	**789,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Prosentase jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**25%**	**3,352,400**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	5	789,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	5	1,287,200	

			Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait					Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**25%**	**1,032,600**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**25%**	**1,032,600**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	1,032,600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	1,032,600	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**25%**	**1,674,738**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**25%**	**1,674,738**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	5	1,674,738	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	5	1,674,738	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**25%**	**179,595,163**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25%**	**138,722,483**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**4,595,163**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**3,861,600**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang di Desa	2	2,745,363	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang di Desa	2	1,287,200	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan	2	562,600	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan	2	1,287,200	

			swasta di Wilayah kerja Kecamatan					swasta di Wilayah kerja Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	1,287,200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	1,287,200	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat		**Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**25%**	**175,000,000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**		**Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**25%**	**134,860,883**	
	Pencegahan Covid- 19 di Tk. Desa dan Kelurahan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	175,000,000	Pencegahan Covid- 19 di Tk. Desa dan Kelurahan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	134,860,883	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**3,424,800**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**3,424,800**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**1,643,350**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**1,643,350**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	1,643,350	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	1,643,350	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			**25%**	**1,781,450**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah**			**25%**	**1,781,450**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau POLRI	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan PD yang tugas dan fungsunya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	2	1,781,450	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau POLRI	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan PD yang tugas dan fungsunya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	2	1,781,450	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum	25%	7,472,576	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum	25%	13,142,750	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Derah**	**25%**	**7,472,576**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Derah**	**25%**	**13,142,750**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negaran RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negaran RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	34	4,685,376	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negaran RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negaran RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	34	1,287,200	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	34	1,287,200	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	34	1,287,200	
	Pelaksanaan Tugas FORKOMPIMCAM	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	1,500,000	Pelaksanaan Tugas FORKOMPIMCAM	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	10,568,350	

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen		Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum: Dana Bagi Hasil				8 Dokumen		Kecamatan Ile Ape
	7	0 1	0 1	2. 02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	2 Laporan	3.178.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	2 Laporan	3.178.950,00	Kecamatan Ile Ape
	7	0 1	0 1	2. 02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	1,266,450	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	1,266,450	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	1,278,700	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	1,266,450	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Ile Ape, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp. 2,351.186.252,- sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 2.161.047.135,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Ile Ape didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2023 di Kecamatan Ile Ape, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Ile Ape dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ile Ape dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Ile Ape.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape, adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) Program pada Kecamatan Ile Ape, antara lain :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ile Ape Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25%
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25%
		Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25%
3.	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%
4.	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	25%
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25%
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Ile Ape Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ile Ape Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ile Ape di Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan, dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.351.186.252,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.146.161.014,-.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 3.496.338,-.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 179.595.163,-.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 3.424.800,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 7.472.576,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 11.036.361,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 17 (tujuh belas) Desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Ile Ape Kab. Lembata
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Sampai dengan Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renstra OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN ILE APE						2,351,186,252							2,351,186,252	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2,351,186,252							2,351,186,252	
7	01	KECAMATAN						2,351,186,252							2,351,186,252	
7	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Cepat, Tepat				100%	2,146,161,014							2,146,161,014	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja Perangkat Daerah**				25%	15,824,525										
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	2 Dokumen	2.858.975,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	2 Dokumen	2.858.975,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	1.954.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	1 Dokumen	1.954.700,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	1.954.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	1 Dokumen	1.954.700,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	20 Dokumen	2.501.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	20 Dokumen	2.501.450,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	20 Dokumen	2.209.550,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	20 Dokumen	2.209.550,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	2 Laporan	2.390.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	2 Laporan	2.390.450,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	2 Laporan	1.954.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	2 Laporan	1.954.700,00	Kecamatan Ile Ape

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	31 Orang/bulan	2.026.186.252,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	31 Orang/bulan	2.026.186.252	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	6 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	6 Dokumen	1.500.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	2 Laporan	3.178.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	2 Laporan	3.178.950,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	2 Laporan	3.178.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	2 Laporan	3.178.950,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	6 Dokumen	4.299.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	6 Dokumen	4.299.100,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	12 Laporan	4.441.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	12 Laporan	4.441.950,00	Kecamatan Ile Ape

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	31 Orang	500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	31 Orang	500.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	2.935.275,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	5 Paket	2.935.275,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	12.637.276,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	5 Paket	12.637.276,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	2500 Paket	6.790.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	2500 Paket	6.790.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	0 1	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	11.250.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	5 Paket	11.250.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	0 1	0 1	2. 06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	2 Dokumen	1.623.063,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	2 Dokumen	1.623.063,00	Kecamatan Ile Ape
	7	0 1	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	10 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	10 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	1 Unit	500.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	1 Unit	500.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	6 Laporan	5.512.450,00	Kab. Lembata, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH			-	6 Laporan	5.512.450,00	Kecamatan Ile Ape

													Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	3 Laporan	4.382.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	3 Laporan	4.382.500,00	Kecamatan Ile Ape		
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	4 Laporan	1.638.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	4 Laporan	1.638.000,00	Kecamatan Ile Ape		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	10 Unit	32.025.223,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana			-	10 Unit	32.025.223,00	Kecamatan Ile Ape		

														Alokasi Umum							
	7	0 1	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	2 Unit	2.840.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	2 Unit	2.840.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	0 1	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	735.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	1 Unit	735.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	0 1	0 1	2. 09	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	682.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	1 Unit	682.500,00	Kecamatan Ile Ape

	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Laporan	789.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	5 Laporan	789.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak	Prosentase Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak	Prosentase Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak	5 Laporan	1.032.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	5 Laporan	1.032.600,00	Kecamatan Ile Ape

								n Yang Tidak Dilaksanaka n Unit kerja di Kecamatan	Dilaksanakan Unit kerja di Kecamatan	Dilaksanakan Unit kerja di Kecamatan											
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase Terlaksanaya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Prosentase Terlaksanaya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Prosentase Terlaksanaya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	5 Laporan	1.674.738,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	5 Laporan	1.674.738,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2.745.363,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Lembaga Kemasyarakatan	2.745.363,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Dokumen	562.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Dokumen	562.600,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Laporan	1.287.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Laporan	1.287.200,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)													
	7	01	03	2.05	0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan													

							Jumlah Dokumen Pencegahan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	175.000.000,00	Kab Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				25 %	2 Dokumen	175.000.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	1.643.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Laporan	1.643.350,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	2 Laporan	1.781.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	2 Laporan	1.781.450,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34 Orang	4.685.376,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	34 Orang	4.685.376,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34 Orang	1.287.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	34 Orang	1.287.200,00	Kecamatan Ile Ape
	7	0 1	0 5	2. 01	00 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Dokumen	1.500.000,00	Kecamatan Ile Ape
	7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	2 Dokumen	1.072.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Dokumen	1.072.600,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	2 Dokumen	2.575.411,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Dokumen	2.575.411,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	2 Dokumen	1.043.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Dokumen	1.043.850,00	Kecamatan Ile Ape

	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	2 Dokumen	1.266.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Dokumen	1.266.450,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	2 Dokumen	1.266.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Dokumen	1.266.450,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	2 Dokumen	1.266.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Dokumen	1.266.450,00	Kecamatan Ile Ape

	7	01	06	2.01	0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	2 Dokumen	1.266.450,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Dokumen	1.266.450,00	Kecamatan Ile Ape
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	Persentase Desa yang Terfasilitasi, Terekomendasi dan Terawasi	2 Dokumen	1.278.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 %	2 Dokumen	1.278.700,00	Kecamatan Ile Ape

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Ile Ape dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Ile Ape Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Ile Ape.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Ile Ape, 2023

Camat Ile Ape,

Laurensius Lebe,S.Sos,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730915 200012 1 003

Pemerintah Kabupaten Lembata

Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Wulandoni (KcWd)

Tahun 2024

Kecamatan Wulandoni

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

1. Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.
2. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

SILVESTER TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. pemerintah daerah dan masyarakat didaerah lebih diberdayakan sekaligus pertanggungjawab. yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik struktural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang fundamental yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi perangkat yang sebelumnya merupakan **perangkat wilayah** dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi **perangkat daerah** dalam kerangka asas desentralisasi.

Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, selain tugas-tugas atribusi dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan

peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintahlainnya diwilayah kecamatan.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan yang memadai bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan sebagai ciri pemerintahan pemerintahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin bupati/walikota.

CAMAT WULANDONI,

Hadi Umar, S.Pd,MT
NIP. 19710412 199903 1 016

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

AR ISI iii

AR TABEL iv

PENDAHULUAN..... 1

Belakang..... 1

asan Hukum..... 3

sud dan Tujuan..... 4

matika Penulisan..... 5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2023..... 6

Pelaksanaan Renja 2023 dan Capaian Program..... 6

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 17

Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Perangkat Daerah..... 19

Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 21

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 29

, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 30

Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi..... 30

Dan Sasaran Renja SKPD..... 31

dan Kegiatan Prioritas..... 33

KERJA DAN PENDANAAN..... 34

..... 63

DAFTAR TABEL

[illegible] Pelaksanaan Renja 2023 dan Capaian Program..... 7-15

[illegible] Kinerja Pelayanan..... 18

[illegible] Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 22-28

[illegible] dan Sasaran Renja Kecamatan Wulandoni..... 32

[illegible] dan Kegitan Tahun 2024..... 36-62

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten
Lembata Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan Daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Kecamatan masing-masing.

Perencanaan Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang mengacu pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan

Persiapan mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

b. Rancangan Awal

Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun berkenaan dan Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

Pemutakhiran

Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Kecamatan Wulandoni untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir tersebut ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada SPM untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat

Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah :

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Program OPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kegiatan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Wulandoni dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
- Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk identifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Wulandoni Kabupaten dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, identifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan anggaran, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Wulandoni dan realisasi belanja perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

		DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD								
1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan			-	-	2	2	25%
1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	-	-	-	-	2	2	25%
1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,22**	**12,22**	**12,22%**
1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	-	-	-	-	14	14	100%
1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Bulan	-	-	-	-	3	3	6,25%
1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	-	-	-	-	4	4	5,56%
1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,00**	**5,00**	**5,00%**

			4	8	9	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen							-
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan				-	1	1	12,50%
	Administrasi Perencanaan Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100**	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**	-	-	-	-	**0,06**	**0,06**	**0,06%**
1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	-	-	-	-	-	-	-
1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	-	-	-	3	3	15,00%
1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10.000 Paket	-	-	-	-	-	-	-
1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	-	-	-	-	3	3	15,00%
1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
1.2.07	**Pengadaan Barang Milik**	**Prosentase Ketersediaan**	**100**	-	-	-	-	-	-	-

				6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**25%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%

							6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**25%**
3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
3.2.01.04	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3.2.01.05	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**25%**
3.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	-	-	-	-	3	3	25%
4.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman**	**100**	-	-	-	-	**25**	**25**	**25%**

			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Ada Keterlibas Umum								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**25**	**25%**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**25**	**25%**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	120 Orang	-	-	-	-	30	30	25%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa Yang Terfasilitasi dan Terawasi	100					6,67	6,67	6,67%
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100**	-	-	-	-	**6,67**	**6,67**	**6,67%**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25%
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Dalam tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini dikarenakan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun berjalan yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Hal ini karena adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang memungkinkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak dapat digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang seharusnya sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk perbaikan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wulandoni Lembata.

Hasil pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wulandoni dapat dilihat pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa Kinerja pelayanan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata mencapai sangat memuaskan.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
2	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
3	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
4	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
5	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25%	25%	25%		25%	25%	25%	

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Wolandoni tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Wolandoni, sebagai berikut :

- Peraturan Prundang-Undangan sering mengalami perubahan.
- Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari, bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.
- Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang diundang secara umum para tokoh sehingga fungsi pengawasan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum masuk pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

- Faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Camat Wulandoni di antaranya, Keberadaan sumber daya Camat Wulandoni yang meliputi sumber daya manusia anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan laksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan ungan strategis.

ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Camat ni, sebagai berikut :

Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan gunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas kan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat non formal), sehingga untuk menghasilkan rencana yang lebih berkualitas masih sangat rendah. Oleh ini, diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan dengan baik, maka sekiranya dapat menyediakan Daya Manuasia yang berkualitas secara memadai.

anggaran dan pengelolaannya belum sepenuhnya kinerja.

anggaran dibeberapa program dan kegiatan menjadi ini kendala dalam merealisasikan capaian yang telah Selain itu, permasalahan lain yang sangat adalah pengelolaan anggaran yang belum berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang belum jelas indikator capaiannya. Disisi lain, anggaran untuk membiayai program-program dalam tidak memadai sehingga alokasi anggaran per

program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan dingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis han Kecamatan Wulandoni sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 ini :

No	Rencanaan Awal 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN WULANDONI				**2,232,577,643**					**2.061.490.361**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2,232,577,643**					**2.061.490.361**	
	KECAMATAN				**2,232,577,643**					**2.061.490.361**	
	[redacted]		[redacted]	100%	[redacted]	[redacted]		[redacted]	100%	[redacted]	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	**21,651,187**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**/**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	**41.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,313,178	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,909,776	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,992,952	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	3,597,901	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	3,193,277	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Lembata, Wulandoni	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan	3,211,527	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Lembata, Wulandoni,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan	8.000.000	

	Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Perangkat Daerah	7 Laporan	7.614.570	Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Perangkat Daerah	7 Laporan	7.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**28%**	**1,897,426,380**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**28%**	**1.744.490.361**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	1,818,474,593	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	1.736.490.361	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	70,353,466	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	60.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4,383,333	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	4,214,958	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	4.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**26,211,812**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**29.786.352**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	3,417,308	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	14.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	22,794,504	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.786.352	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**130.000.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	45.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	85.000.000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,766,734	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.413.048	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	10,480,580	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	7,193,700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	8,934,660	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	3.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	32,523,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	12.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**14,129,702**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**21.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	18.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	14,129,702	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**18,179,065**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**6.500.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	10,666,851	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	6,708,250	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	2.500.000	

	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	803,964	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	2.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**53,398,773**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**13.411.970**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	50,081,750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	6.911.970	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	386,500	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	1.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	1,759,248	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	1.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	508,200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	663,075	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2.000.000	
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**10,934,600**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**4.000.000,-**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	7,227,200	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	2.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	3,707,400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	2.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**12,463,375**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**2.000.000**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	12,453,375	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	2.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**43,144,504**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**6.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	37,034,600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab Lembata, Wulandoni, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Laporan	4,869,904	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Laporan	2.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab Lembata, Wulandoni, semua Kel/Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1,240,000	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000	
	-	-		-	-	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan**		-	
	-	-	-	-	-	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**4,105,677**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**3.539.810**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4,105,677	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.539.810	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	**29,910,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	**3.572.220**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	29,910,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	3.572.220	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**14,340,429**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**6.000.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	11,240,827	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	3.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3,099,602	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	**25,593,495**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	**17.000.000**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	3,202,573	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	3,288,600	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2,827,650	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	3,288,600	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	2.000.000	

	[illegible] Pengangkatan [illegible] Pemberhentian Perangkat	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	3,513,400	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	4,692,681	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	2,387,098	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	2.500.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	2,392,893	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	2.500.000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Wulandoni, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

Terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 namun direncanakan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target sasaran kinerja sub kegiatan.

Tolak ukur indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rawal RKPD sebesar Rp. 2,232,577,643,- sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 2.061.490.361,-.

Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menyalurkan aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wulandoni didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2022 di Kecamatan Wulandoni, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Wulandoni dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu :

Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Sosial dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang seluruhnya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.

Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Wulandoni dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Wulandoni.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai cerminan tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh semua manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai landasan pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset dan inovasi, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) penyelenggaraan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wulandoni, adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) Program pada Kecamatan Wulandoni, antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wulandoni yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wulandoni Tahun 2024 terdiri dari tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25%
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum *Musyawarah* perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan *Pemberdayaan* Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25%
		Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta *di Wilayah Kerja* Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25%
3.	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%
4.	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	25%
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan *Koordinasi Pembinaan* dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam *rangka Penyusunan* Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25%
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25%

Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Wulandoni Tahun 2024 :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wulandoni Tahun 2023-2026.
3. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wulandoni di Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 54 (lima puluh empat) Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.061.490.361,- yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.844.378.331,00,-.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 6.000.000,-.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. [illegible] 000,-.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. [illegible] 080,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. [illegible] 000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. [illegible] 000,-

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas [illegible] di atas, tersebar di 15 (lima belas) Desa.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN WULANDONI						**2.061.490.361,00**							**3.340.741.059,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.061.490.361,00**							**3.340.741.059,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.061.490.361,00**							**3.340.741.059,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah***	-			**100 %**	**1.844.378.331,00**						-	**2.887.821.878,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah*	-			25 %	14.000.000,00			-	-		-	41.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan*	-			25 %	1.744.490.361,00			-	-	-	-	2.391.609.219,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	1.736.490.361,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.323.609.219,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), KURANG BAYAR DBH PAJAK	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah*	-			25 %	19.562.352,00			-	-	-	-	29.786.352,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	4.776.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	14.786.352,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), KURANG BAYAR DBH PAJAK	-	-	-		15.786.352,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian*	-			25 %	2.000.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	1.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran*	-			25 %	23.413.648,00			-	-	-	-	67.995.160,00	KECAMATAN WULANDONI

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.413.648,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2500 Paket	3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PAD ASLI DAERAH (PAD)						KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah*	-			25 %	21.000.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	18.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran*	-			25 %	6.500.000,00			-	-	-	-	64.354.567,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

	001															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.354.567,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah*	-			25 %	13.411.970,00			-	-	-	-	73.076.580,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	6.911.970,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.076.580,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

			yang Dipelihara						Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	1.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	2.500.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
2.	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	-			**25 %**	**6.000.000,00**						-	**46.000.000,00**	

		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Pengelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*								4 Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				WULANDONI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	-			25 %	2.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		16.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

		[illegible] AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	[illegible] Partisipasi *Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n*				[illegible]							[illegible] 00	
	7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			25 %	6.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperk uat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformas i pelayanan publik	-	-	34.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03. 2.01.000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga K emasyar akat an	2.000.000,00	Kab. Lembata , Wulando ni, Semua Kel/Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperk uat stabilitas politik, ket entraman, ketertiban umum, dan transformas i pelayanan publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		4.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

		Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik			0	WULANDONI
	7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan															
			Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		134.861.108,00	KECAMATAN WULANDONI
4.	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	-			**25 %**	**7.112.030,00**						-	**11.339.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			25 %	3.539.810,00			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.04.2.01.00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3.539.810,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		5.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

		Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*									4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				KECAMATAN WULANDONI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	3.572.220,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		6.339.200,00	KECAMATAN WULANDONI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum***	-			**25 %**	**6.000.000,00**						-	**16.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			25 %	6.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta				50 Orang	3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

			dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi***	-			**25 %**	**17.000.000,00**						-	**210.718.873,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Parsentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi*	-			25 %	17.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-	-	210.718.873,00	KECAMATAN WULANDONI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		40.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik			33.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		33.300.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		30.600.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		30.300.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		34.151.640,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														

			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		4.867.233,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	-		4.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
															3.340.741.059,00	
	JUMLAH							**2.061.490.361,00**								

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Wulandoni dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Wulandoni Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Wulandoni.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Wulandoni, 2023

Camat Wulandoni,

Hadi Umar,S.Pd, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19710412 199903 1 016

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN ILE APE TIMUR
TAHUN 2024

KANTOR CAMAT ILE APE TIMUR
TAHUN 2023

Lampiran II
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2024 Lingkup
Pemerintah Kabupaten Lembata

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN ILE APE TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/BAPP/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Ile Ape Timur dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang unsur pendukung urusan pemerintahan Kecamatan Ile Ape Timur dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ile Ape Timur dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Camat Ile Ape Timur Tahun 2023 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Tareget Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Total			-	-	-	-			
1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	25%	25%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran serta Eva. Atas Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	25%	25%	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	-	-		2 Dokumen	**2 Dokumen**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	**1 Dokumen**
	Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	**1 Dokumen**
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. DPA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	**1 Dokumen**
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	**1 Dokumen**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	**2 Dokumen**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	**4 Laporan**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25%**	**25%**

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan		-	-	-	23 Orang/ Bulan	23 Orang/ Bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	**4 Dokumen**
	Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keunagan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	**1 Laporan**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap. Keuangan Bulanan/ Triwulanan dan Semesteran SKPD dan Lap. Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/ Triwulanan dan Semesteran SKPD	100 Laporan	-			-	25 Laporan	**25 Laporan**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Darah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	**3 Laporan**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	20 Orang	-	-	-	-	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	**4 Dokumen**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	-	-	-	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	-	-	-	5 Paket	**5 Paket**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18 Paket	-	-	-	-	1 Paket	**1 Paket**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	500 Paket	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	-	-	-	-	-	-	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198 Laporan	-	-	-	-	98 Laporan	**98 Laporan**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100%**	-	-	-	-	25%	**25%**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	8 unit	-	-	-	-		-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah	**Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	**2 Laporan**

	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	**3 Laporan**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Laporan	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	**1 Laporan**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jlh. kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	1 Kendaraan Roda Empat, 12 Kendaraan Roda Dua	-	-	-	-	1 Kendaraan Roda Empat, 12 Kendaraan Roda Dua	**1 Kendaraan Roda Empat, 12 Kendaraan Roda Dua**	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	8 Unit	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jemlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	5 Unit	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	-	-	-	-	-	-	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	-	-	-	-	-	-	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerinthan di tingkat Kecamatan**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal terkait	5 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	**Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**		-	-	-	**25%**	**25%**	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Prosentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**			-		**25%**	**25%**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**		-	-	-	**25%**	**25%**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga	-	-	-	-	2 Lembaga	2 Lembaga	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayak kerja Kecamatan	4 Dokumen			-		1 Dokumen	1 Dokumen	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	**Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**
	Pencegahan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajad kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penubuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajad kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Keluarga tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100 Keluarga	-	-	-	-	-	-
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**					**25%**	**25%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**		-	-	-	**25%**	**25%**

	Sinegitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**4 Laporan**	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA**	**100%**		-	-	-	**25%**	**25%**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dn fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara RI	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**					25%	**25%**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	**1 Dokumen**	
3	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100%**	-	-	-	-	**25%**	**25%**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan PERDES dan PERKADES	8 Dokumen		-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen		-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	2 Dokumen		-	-	-	-	-	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen		-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa	2 Dokumen		-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen		-	-	-	-	-	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penataan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen		-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusnan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen		-	-	-	-	-	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Dokumen		-	-	-	-	-	

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat relisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan Renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang diisi hanya kolom 4,9 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan Realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari table 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa semua sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023, dilaksanakan dengan hasil 100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ile Ape Timur, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Ile Ape Timur. s/d semester 1 Tahun 2024, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ile Ape Timur, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata :

1. Secara atributif, kecamatan menjalankan tugas dan fungsi koordinasi. Selain itu kecamatan juga melaksanakan tugas membina penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Akan tetapi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati ke camat belum banyak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Kekosongan kebijakan ini akan berimplikasi pada:
   - Peran camat dalam mengkoordinasikan lintas sektor penyelenggaraan pelayanan dasar tidak optimal.
   - Alokasi anggaran mengikuti tugas dan fungsi organisasi, maka ketidakjelasan kewenangan kecamatan menyebabkan anggaran kecamatan tidak mencukupi bagi kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas strategisnya.
   - Kecamatan memiliki keterbatasan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna mendorong akuntabilitas sosial, termasuk dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan menangani keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dasar.
   - Kesempatan kecamatan untuk memperoleh informasi pelayanan dasar juga terbatas.
   - Pelaksanaan tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pelayanan dasar di desa tidak optimal
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai serta kualifikasinya sesuai dengan analisis jabatan;
3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur pada setiap jabatan;
4. Sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi sesuai standar.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ile Ape Timur :

- Tantangan :
  - Kondisi geografis sebagian besar berbukit dan berada di bawah lereng Gunung Ile Lewotolok;
  - Masih terbatasnya layanan dasar meliputi kesehatan, pendidikan, jalan dan air bersih.
- Peluang :
  - Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayah kecamatan dan desa dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata adalah :

- Program/kegiatan yang direncanakan tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
- Personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang belum memadai serta penataan administrasi.
- Pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang ditetapkan.
- Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor.
- Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan masih kurang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Lembata
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN ILE APE TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN ILE APE TIMUR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN ILE APE TIMUR								2.482.074.432,00					2.424.648.114,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								2.474.074.432,00					2.416.448.114,00
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI								2.040.754.432,00					2.037.500.474,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.040.754.432,00					2.037.500.474,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								33.740.000,00					35.119.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamasau	25 %	2 Dokumen	25 %	4.725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.960.250,00
7	01	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamasau	25 %	1 Dokumen	25 %	4.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.250.000,00
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamasau	25 %	1 Dokumen	25 %	5.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.063.750,00
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamasau	25 %	3 Dokumen	25 %	4.725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	4.961.250,00
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Dokumen	25 %	5.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2 Dokumen	6.063.750,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Laporan	25 %	4.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.410.000,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	4 Laporan	25 %	4.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.410.000,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.710.854.432,00**					**1.747.011.474,00**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	18 Orang/bulan	25 %	1.569.704.432,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang /bulan	1.611.403.974,00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Dokumen	25 %	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	110.250.000,00
7	01	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	1 Laporan	25 %	6.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.615.000,00
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase KetersediaAn Dokumen Keuangan	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	18 Laporan	25 %	17.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18.742.500,00
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**26.250.000,00**					**27.562.500,00**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase KetersediaAn Dokumen Barang Milik Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	1 Dokumen	25 %	5.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.512.500,00
7	01	01	2.03	08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase KetersediaAn Dokumen Barang Milik Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Laporan	25 %	21.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	22.050.000,00
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**30.450.000,00**					**31.972.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	20 Paket	25 %	4.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	4.410.000,00
7	01	01	2.06	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Dokumen	25 %	4.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	4.410.000,00
7	01	01	2.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Orang	25 %	8.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	8.820.000,00
7	01	01	2.06	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	3 Orang	25 %	13.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	14.332.500,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**67.200.000,00**					**70.560.000,00**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	5 Paket	25 %	3.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.307.500,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	18 Paket	25 %	13.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	14.332.500,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase KetersediaSan Administrasi Umum Perkantoran	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	100 Paket	25 %	12.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	13.230.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	89 Laporan	25 %	37.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	39.690.000,00
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**63.000.000,00**					**77.220.000,00**
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Unit	25 %	37.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	39.690.000,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	3 Unit	25 %	12.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	13.230.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	4 Unit	25 %	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**33.300.000,00**					**35.540.000,00**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	3 Laporan	25 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	21.000.000,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	3 Laporan	25 %	9.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10.290.000,00
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	1 Laporan	25 %	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.250.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**69.000.000,00**					**72.505.000,00**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	13 Unit	25 %	61.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	66.690.000,00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Unit	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.100.000,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Unit	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.100.000,00
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Unit	25 %	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.625.000,00
7	**01**				**KECAMATAN**								**427.280.000,00**					**316.547.640,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**64.220.000,00**					**66.831.000,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**52.220.000,00**					**53.831.000,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
						Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	3 Laporan	25 %	17.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	18.081.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
						Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	3 Dokumen	25 %	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	35.750.000,00
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**12.000.000,00**					**13.000.000,00**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	1 Laporan	25 %	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	13.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								197.900.000,00					81.850.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								34.000.000,00					37.000.000,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Prosentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	8 Lembaga Kemasyarakatan	25 %	7.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
						Prosentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	1 Dokumen	25 %	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	8.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Prosentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	1 Laporan	25 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.000.000,00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								134.900.000,00					13.000.000,00
7	01	03	2.05	01	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan													
						Prosentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan dan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Dokumen	25 %	134.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	13.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**25.000.000,00**					**31.250.000,00**
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
						Prosentase Tersalenggarakanya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	- Kab. Lombaka, Ile Ape Timur, Larmaau	25 %	100 Keluarga	25 %	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	18.000.000,00
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga													
						Prosentase Tersalenggarakanya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	- Kab. Lombaka, Ile Ape Timur, Larmaau	25 %	100 Keluarga	25 %	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100 Keluarga	12.250.000,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**4.600.000,00**					**4.830.000,00**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**2.300.000,00**					**2.415.000,00**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Prosentase Tersalenggarakanya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Kab. Lombaka, Ile Ape Timur, Larmaau	25 %	1 Laporan	25 %	2.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	2.415.000,00
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**2.300.000,00**					**2.415.000,00**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	1 Laporan	undefined undefined	2.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.415.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								30.000.000,00					32.415.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								30.000.000,00					32.415.000,00
7	01	05	2.01	06	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan													
						Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Laporan	25 %	2.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	2.415.000,00
7	01	05	2.01	06	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
						Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Presentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	1 Dokumen	25 %	28.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	30.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								125.700.000,00					133.021.640,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								125.700.000,00					133.021.640,00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Tertibs dan Terawasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	25 %	2 Dokumen	25 %	2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	2.136.120,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Prosentase Pemerintahan Desa Yang Tertibs dan Terawasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Larnasu	25 %	2 Dokumen	25 %	76.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	76.000.000,00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
						Prosentase Pemerintahan Desa Yang Tertibs dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Prosentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Larnasu	25 %	2 Dokumen	25 %	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2.543.000,00
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
						Prosentase Pemerintahan Desa Yang Tertibs dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Prosentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Larnasu	25 %	2 Dokumen	25 %	2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	2.135.120,00
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
						Prosentase Pemerintahan Desa Yang Tertibs dan Terawasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Prosentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Larnasu	25 %	2 Dokumen	25 %	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	1.830.960,00
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
						Prosentase Pemerintahan Desa Yang Tertibs dan Terawasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Larnasu	25 %	2 Dokumen	25 %	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	1.830.960,00
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Larnasu	25 %	2 Dokumen	25 %	1.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	1.932.680,00
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Presentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Larnasu	25 %	2 Dokumen	25 %	2.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	2.339.560,00
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Larnasu	25 %	2 Dokumen	25 %	36.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	36.000.000,00
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Larnasu	25 %	2 Dokumen	25 %	2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	2.136.120,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Presentase Desa yang terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Larnasu	25 %	20 Laporan	25 %	2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20 Laporan	2.136.120,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
X													8.000.000,00					8.400.000,00
X	XX				-								8.000.000,00					8.400.000,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.000.000,00					8.400.000,00
X	XX	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah								6.000.000,00					6.300.000,00
X	XX	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamsau	25 %	60 Paket	25 %	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	6.300.000,00
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.000.000,00					2.100.000,00
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamsau	25 %	2 Unit	25 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.100.000,00
												TOTAL	2.462.074.432,00					2.424.845.114,00

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan adalah sama yaitu sebesar Rp. 2.482.074.432,-.

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Ile Ape Timur, yang melaksanakan unsur pendukung urusan pemerintahan.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape Timur.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN tahun 2020-2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target Pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil Pembangunan diharapkan dapat dirasakan benar-benar oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas diberbagai bidang Pembangunan. Hal ini menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi Pembangunan nasional jangka menengah perode selanjutnya (2025-2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024 ditetapkan 8 arah kebijakan Pembangunan Nasional yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industry dan pengutan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan ibu kota Nusantara serta;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape Timur adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;

   Prioritas nasional ini diturunkan dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan

kegiatan prioritas ini berkaitan dengan program Penelitian dan Pengembangan daerah pada Kecamatan Ile Ape Timur.

2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik; Prioritas nasional ini diturunkan dalam program prioritas Reformasi Biorokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan Prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah serta program koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pen=mbangunan Daerah pada Kecamatan Ile Ape Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ile Ape Timur Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tahun 2025
1.	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di willayah kecamatan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananpublik	Prosentase capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
2.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan	100%

		Pembanguanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat Desa/ Kelurahan	
		Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	100%
		Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%
3.	Meningkatkan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%
4.	Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan umum	Prosentase koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan umum	100%
5.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan des	Terlaksananya Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100%
		Terlaksananya Fasilitasi, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan desa dan Aset Desa	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program,kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Ile Ape Timur tahun 2024 :

1) Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
2) Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ile Ape Timur Tahun 2023-2026.
3) Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ile Ape Timur di Tahun 2024 sebanyak 6 Program, 14 kegiatan, 31 Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 1.834.595.772,- yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.641.061.902,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 18.142.322,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 146.323.904,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.555.000,-
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 10.200.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 kegiatan dan 5 Sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 17.312.644,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, sebagaimana tabel 4.1 berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN ILE APE TIMUR KAB. LEMBATA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											TARGET CAPAIAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024		TARGET CAPAIAN PERUBAHAN TAHUN 2024
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Selambat-lambatnya (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN			
							SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN 2024	SETELAH 2024	SESUDAH PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN ILE APE TIMUR							2.222.221.410,00	1.991.221.204,00	1.999.333.870,00	-122.556.746,00							2.255.707.956,00	
	7	URUSAN PEMERINTAHAN							2.222.221.410,00	1.991.221.204,00	1.999.333.870,00	-122.556.746,00							2.255.707.956,00	
	7.03	KEUANGAN							2.222.221.410,00	1.991.221.204,00	1.999.333.870,00	-122.556.746,00							2.255.707.956,00	
1	7.03.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah		25 %	25 %	1.719.151.410,00	1.829.661.706,00	1.841.911.560,00	137.216.956,00								1.932.321.956,00		
	7.03.01.2.01	Penyelenggaraan Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase Keterwakilan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Pemerintah Daerah		25 %	25 %	78.570.410,00	1.829.661,00	11.830.264,00	-66.376.406,00				-	-	-	-	21.052.746,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.211.000,00	525.261,00	1.211.264,00	-1.206.700,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UNLAIN-LAINA ALOKASI UMUM	-	-			2.360.000,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.971.000,00	1.271.400,00	1.211.400,00	-1.760.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UNLAIN-LAINA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.424.000,00	601.700,00	2.466.424,00	-47.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UNLAIN-LAINA ALOKASI UMUM	-	-			3.172.100,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.481.322,00	1.940.700,00	1.940.700,00	-612.172,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UNLAIN-LAINA ALOKASI UMUM	-	-			3.888.172,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.778.217,00	2.940.275,00	2.466.520,00	-2.311.700,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UNLAIN-LAINA ALOKASI UMUM	-	-			4.111.000,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.481.000,00	641.440,00	1.273.860,00	-997.700,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UNLAIN-LAINA ALOKASI UMUM	-	-			1.485.416,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.999.900,00	980.990,00	1.211.000,00	-220.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UNLAIN-LAINA ALOKASI UMUM	-	-			1.991.200,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Keterwakilan Dokumen Keuangan		25 %	25 %	1.714.151.561,00	1.991.821.193,00	1.991.821.263,00	-148.948.234,00					-	-	-	1.151.171.929,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.02.0001	Pelaksanaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19/14 Orang/Bulan	19/14 Orang/Bulan	1.104.201.416,00	1.000.970.102,00	1.000.970.102,00	-203.612.314,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Desa/Kelurahan	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UNLAIN-LAINA ALOKASI UMUM	-	-			1.104.207.416,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.02.0002	Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	2.910.000,00	64.960.991,00	64.960.991,00	-62.960.991,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UNLAIN-LAINA ALOKASI UMUM DAK-CUKAI HASIL TEMBAKAU (DHT)	-	-			66.284.417,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.606.717,00	1.964.000,00	1.964.000,00	-2.732.717,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.671.000,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (SKPD)																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	8.920.000,00	976.800,00	976.800,00	-8.421.800,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENGALIHAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UNLAIN-LAINA ALOKASI UMUM	-	-			8.920.000,00		KECAMATAN ILE APE TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN TAHUN LALU TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN TAHUN BERJALAN (ETC) TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2024		TARGET REMBULAN (Rp)			Selambat/Berkurang (12-13)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		KELOMPOK SASARAN	TARGET DANA BAJU MENCANA TAHUN 2025		PERANGKA/ UNIKAN PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RP/TU 2024	AYNG 2024	RP/TU PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		UNTUK	TAHUN BERJALAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah				20 %	20 %							-	-	-			
	1.01.01.2.02.0008	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan					Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD) PAJAK DAERAH, BAGIAN KEUNTUNGAN BADAN/USAHA MILIK DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, DANA TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, TERDIRI DARI: TRANSFER PEMERINTAH (DPH)	-	- -				
	1.01.01.2.06	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan				20 %	20 %							-	- -	-			
	1.01.01.2.06.0003	Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan				2 Dokumen	2 Dokumen					Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD)	-	- -				
	1.01.01.2.05.0004	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang					Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD)	-	- -				
	1.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Administrasi Umum Pemerintah				20 %	20 %							-	- -	-			
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Pasal Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket					Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD)	-	- -				
	1.01.01.2.08.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Pasal Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara				19 Paket	19 Paket					Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD) DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	- -				
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Pasal/Barang Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket					Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD)	-	- -				
	1.01.01.2.08.0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Pasal Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket					Kab. Lembata, Nelmas Kecamatan, Semua Kelas	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD) DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	- -				
	1.01.01.2.08.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan					Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD) PAJAK DAERAH, BAGIAN KEUNTUNGAN BADAN/USAHA MILIK DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, DANA TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, TERDIRI DARI: TRANSFER PEMERINTAH (DPH)	-	- -				
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Jasa Penunjang Pemerintahan				20 %	20 %							-	- -	-			
	1.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan					Kab. Lembata, Nelmas Kecamatan, Semua Kelas	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD) DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	- -				
	1.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan					Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD) DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	- -				
	1.01.01.2.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				20 %	20 %							-	- -	-			
	1.01.01.2.10.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diservis/rutin dan Kelengkapan Biaya dan Administrasinya				13 Unit	13 Unit					Kab. Lembata, Nelmas Kecamatan, Semua Kelas	TOTAL ANGGARAN ASLI DAERAH (TAD) PAJAK DAERAH, BAGIAN KEUNTUNGAN BADAN/USAHA MILIK DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, DANA TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, TERDIRI DARI: TRANSFER PEMERINTAH (DPH)	-	- -				
	1.01.01.2.10.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / TOLOK UKUR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME / TARGET OUTPUT KEGIATAN (TOLOK UKUR KEGIATAN)	REALISASI CAPAIAN KINERJA SPM TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN KINERJA SPM TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KOLOM/SUB KOLOM	TRANSFER BIAYA RENCANA TAHUN 2025		TERMINOLOGI URAIAN PEMANFAATAN/KEGIATAN
							TARGET 2024		TARGET REALISASI (Rp)			Sisa Target/Kekurang (12-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rancangan dan Usaha Lainnya yang Dibiayai				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Dentuk Nusantara, Tanna Kei Dewa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.700.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.03.01.2.06.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.400.000,00	2.176.760,00	2.176.760,00	-227.240,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER DAERAH ALOKASI LAINNYA	-	- -			2.424.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
2	7.07.02	PENGEMBANGAN PERSEMBANGAN PERSEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Pemenuhan Pelayanan Kecamatan				25 %	25 %	70.488.000,00	27.427.025,00	27.427.025,00	2.024.400,00							27.512.400,00	
	1.07.02.2.07	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25 %	25 %	14.000.000,00	20.000.710,00	20.000.710,00	6.700.710,00			-	- -	-		14.240.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.07.02.2.07.0001	Koordinasi/Rakorg Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.700.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER DAERAH ALOKASI LAINNYA	-	- -			8.240.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.07.02.2.07.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.674.710,00	12.674.710,00	2.674.710,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH DANA TRANSFER DAERAH ALOKASI LAINNYA	-	- -			10.400.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.07.02.2.24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				25 %	25 %	4.000.000,00	6.867.075,00	6.867.075,00	2.220.075,00			-	- -	-		6.960.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.07.02.2.24.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Perekonomian Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekonomian Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	7 Laporan	6.836.000,00	6.867.075,00	6.867.075,00	2.220.075,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER DAERAH ALOKASI LAINNYA	-	- -			6.960.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
3	7.07.03	PENGEMBANGAN KEMITRAAN KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN	Presentase terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				25 %	25 %	197.000.000,00	0,00	0,00	70.610.000,00							287.070.000,00	
	1.07.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Perkembangan Kegiatan Pemberdayaan Desa				25 %	25 %	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00			-	- -	-		17.070.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.07.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan Desa	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.130.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.07.03.2.01.0002	Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.130.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.07.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	PALING SEMUA SUMBER KONGARAAN SUMBER DI (TERPISI) Lainya TRANSFER DAERAH ALOKASI LAINNYA	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.07.03.2.25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Kegiatan Masyarakat (TPKM)	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Kegiatan Masyarakat				25 %	25 %	175.000.000,00	0,00	0,00	-1.75.000.000,00			-	2 Mendapatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2 Mendapatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		250.000.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.07.03.2.26.0001	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	-1.75.000.000,00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lembata	DANA TRANSFER DAERAH ALOKASI LAINNYA	-	2 Mendapatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2 Mendapatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			250.000.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
4	7.07.04	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Presentase terselenggaranya Program Koordinasi Pelembinaan dan Ketertiban Umum				25 %	25 %	2.300.000,00	535.075,00	535.075,00	115.000,00							2.415.000,00	
	1.07.04.2.02	Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Pelanggaran Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				25 %	25 %	2.300.000,00	535.075,00	535.075,00	-1.765.000,00			-	- -	-		2.415.000,00	KECAMATAN (LS) APIL 1 MILIR
	1.07.04.2.02.0001	Koordinasi/Rakorg dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Perda/Perkada dan Perlindungan Masyarakat serta Koordinasi Tenaga Pengawas Internal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN (ANGKA) RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KOLOMTOR SASARAN	TRANSFORMASI BIAYU KEMENKARA TAHUN 2025		TERKAITAN DENGAN PARAMETER/UMC JAWAB
							TARGET 2024		TARGET REALISASI (Rp)			Selisih/(Berkurang) (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET			ANGKA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RPJPD 2024	RPJMD 2024	RKPD TERJADWAL 2024				NASIONAL	LOKALAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan serta Ketertiban Umum				1 Laporan	1 Laporan				-1.700.000,00	Kab. Lembata, Be Ayer Timur, Lembata	[illegible]	-	-				[illegible]
5	1.01.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				25 %	25 %	2.500.000,00	725.175,00	22.725.175,00	0.100.000,00							12.500.000,00	
	1.01.08.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah				25 %	25 %	2.500.000,00	725.175,00	22.725.175,00	20.225.175,00			-	- -	-		12.500.000,00	[illegible]
	1.01.08.2.01.0008	Pembinaan Tugas Umum Kantor Camat / Penjaran di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Umum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	725.175,00	22.725.175,00	20.225.175,00	Kab. Lembata, Be Ayer Timur, Lembata	[illegible]	-	- -			12.500.000,00	[illegible]
6	1.01.09	PROGRAM PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Pemerintahan Desa Yang Sehat dan Tertata				25 %	25 %	21.750.000,00	9.850.841,00	9.850.841,00	-1.750.000,00							10.207.720,00	
	1.01.09.2.01	Fasilitasi Pembentukan dan Penataan Desa dan Penetapan Kepala Desa	Prosentase Desa yang terfasilitasi mengenai Pembentukan dan Tertatanya Desa				25 %	25 %	21.750.000,00	9.850.841,00	9.850.841,00	-1.750.000,00			-	- -	-		10.207.720,00	[illegible]
	1.01.09.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	Kab. Lembata, Be Ayer Timur, Lembata	[illegible]	-	- -			2.196.720,00	[illegible]
	1.01.09.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan / Pemberdayaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.150.000,00	4.650.841,00	4.650.841,00	-1.307.525,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[illegible]	-	- -			6.153.200,00	[illegible]
	1.01.09.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	Kab. Lembata, Be Ayer Timur, Lembata	[illegible]	-	- -			2.196.720,00	[illegible]
	1.01.09.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00	Kab. Lembata, Be Ayer Timur, Lembata	[illegible]	-	- -			2.230.955,00	[illegible]
	1.01.09.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000,00	671.666,00	671.666,00	-4.528.332,00	Kab. Lembata, Be Ayer Timur, Lembata	[illegible]	-	- -			6.598.000,00	[illegible]
	1.01.09.2.01.0017	Koordinasi Pembangunan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan Desa di Wilayahnya				20 Laporan	20 Laporan	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	Kab. Lembata, Be Ayer Timur, Lembata	[illegible]	-	- -			2.196.720,00	[illegible]
	JUMLAH								2.023.221.415,00	1.001.221.294,00	1.000.222.972,00	-1.023.000.743,00							2.230.727.395,00	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Ile Ape Timur dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Ile Ape Timur Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Ile Ape Timur.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2023

Camat Ile Ape Timur

Nikolaus Ola, S.Sos
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 2000212 1 008

RENCANA KERJA

(RENJA)

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

14/1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) berpedoman dan mengacu pada:

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 24

Lampiran
Peraturan Bupati Lembata
Nomor 24 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Kesbangpol.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan
   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal
   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : BU.050/90/Bapp/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesbangpol dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2024.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi PD	100	%							
8	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Doklap					12	12	25%
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen					6	6	25%
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25%
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25%
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25%
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen					1	1	25%
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan					2	2	25%
8	01	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	100	%					100	100	**100%**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92	Orang/ bulan					23	23	25%
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen					12	12	25%

8	01	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan					1	1	25%
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Laporan					18	18	25%
8	01	01	2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	16	Dok/Lap					4	4	25%
8	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	dokumen					2	2	25%
8	01	01	2.03	08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Laporan					2	2	25%
8	01	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Manajemen PNS**	100	%					100	100	**100%**
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	dok					1	1	25%
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	Orang					2	2	25%
8	01	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%					100	100	**100%**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket					1	1	25%
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket					1	1	25%
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen					1	1	25%
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan					1	1	25%
8	01	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	52	Unit					13	13	**25%**
8	01	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	Unit					6	6	25%

8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28	Unit					7	7	25%
8	01	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12	**Laporan**					3	3	25%
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan					1	1	25%
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan					1	1	25%
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan					1	1	25%
8	01	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	60	**Unit**					15	15	25%
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya	44	Unit					11	11	25%
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	Unit					1	1	25%
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit					1	1	25%
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit					1	1	25%
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit					1	1	25%
8	01	03			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	200	**Orang**							
8	01	02	2.01		**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	200	**Orang**					50	50	25%
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200	Orang					50	50	25%
8	01	03			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	100	**%**							

8	01	03	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4	Laporan					1	1	25%
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	Orang					50	50	25%
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	Laporan					1	1	25%
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	4	Dokumen							
8	01	04	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4	Dokumen					1	1	25%
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4	Dokumen					1	1	25%

8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	Orang								
8	01	05	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	Orang					50	50	25%	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	Orang					50	50	25%	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%								
8	01	06	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4	Dokumen					1	1	25%	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200	Orang					50	50	25%	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	Laporan					1	1	25%	

Pada tabel 2.1, kolom 5 s/d kolom 8 yaitu kolom yang memuat realisasi target kinerja n-3 (renja tahun 2021) dan n-2 (renja tahun 2022) tidak diisi. Hal ini disebabkan karena renja tahun 2021 dan renja tahun 2022 disusun berdasarkan renstra periode tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya berakhir pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang disi hanya kolom 4, 9, 10 dan 11 yaitu kolom yang memuat target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2023-2026. Selain itu, adanya perubahan regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada nomenklatur dan target kinerja program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan, sehingga tidak bisa digabungkan evaluasi 2021 dan 2022 serta 2023 dalam tabel 2.1.

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi target kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 diperkirakan tercapai sesuai target yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata.

Sejauhmana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata pada Tahun 2023 masih kosong karena akan dihitung pada akhir tahun, sedangkan proyeksi realisasi kinerja Tahun 2024 dan 2025 mencapai target yang ditetapkan.

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesbangpol s/d semester 1 Tahun 2023, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Badan Kesbangpol, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol :
   - Adanya ancaman dan gangguan terhadap empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan wawasan kebangsaan.
   - Adanya orang asing, ancaman terorisme dan gerakan radikal lainnya yang berpotensi konflik di bawah permukaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas, ketentraman dan ketertiban masyaraakat.
   - Masih lemahnya ketahanan ekonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang belum berorientasi berkelanjutan.
   - Demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang harus terus dibina dan dikembangkan.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesbangpol :

♦ Tantangan :
   - Era globalisasi dan transformasi informasi/komunikasi dunia masuk merasuki seluruh sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta hadirnya paham – paham radikal sebagai Ancaman/Gangguan/ Hambatan/Tantangan terhadap eksistensi ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
   - Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi dengan baik akan menumbuhkan sentimen kedaerahan yang membuat lemahnya kesatuan bangsa;
   - Era reformasi dan demokrasi, partisipasi politik masyarakat melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilukada yang memicu dinamisnya pergerakan politik di masyarakat;
   - Era perdagangan bebas, eksistensi bangsa/daerah yang besar, berdaulat, kuat dan mandiri di bidang sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan; Inkosistensi peraturan perundang-

undangan yang berubah.

- Peluang :
  - Kewenangan dan peran Badan Kesbangpol dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta menfasilitasi kehidupan demokratis, Presiden dalam urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada Bupati sebagai kepala pemerintahan di kabupaten sesuai amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasannya;
  - Adanya dinamika masyarakat yang menuntut penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, adalah :

- Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu : Pilar 1 Ideologi Pancasila sebagai falsafah negara, Pilar 2 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Pilar 3 NKRI, Pilar 4 Bhineka Tunggal Ika, sebagai prinsip untuk mengintegrasikan komponen bangsa, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, adat-istiadat dan antar golongan;
- Belum optimalnya pelaksanaan kewaspadaan nasional, yaitu :
  - Belum optimalnya kinerja di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama Intelkam.
  - Belum optimalnya pengawasan orang/lembaga asing dan pemetaan dan fasilitasi penanganan daerah konflik.
  - Belum optimalnya kinerja di bidang penanganaan konflik-konflik sosial di masyarakat.

- Belum efektifnya koordinasi ketahanan ekonomi dan sumber daya alam, yaitu :
  - Belum efektifnya koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk ketahanan ekonomi nasional/daerah yang kuat, mandiri dan berkelanjutan.
  - Belum efektifnya koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk ketahanan SDA nasional/daerah yang lestari dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya fasilitasi penyelenggaraan politik dalam negeri, yaitu :
  - Belum optimalnya fasilitasi pendidikan politik masyarakat.
  - Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu legislatif, Pilpres dan Pilkada yang demokratis.
  - Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat yang berkualitas dan bermartabat.
- Belum optimalnya pendataan lembaga politik, lembaga non pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kesbangpol sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesbangpol

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*5.328.674.249*	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				##########	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.328.674.249	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				43.340.674.249	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	2.554.026.003	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	2.554.026.003	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12**	**50.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12**	**50.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	10.000.000	

			Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.178.601.443**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**2.178.601.443**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	2.034.041.443	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	2.034.041.443	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	130.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	130.560.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	7.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**35.513.560**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**35.513.560**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	7.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	7.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	28.513.560	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	28.513.560	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Terselenggaranya Manajemen PNS**	**100**	**10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Manajemen PNS**	**100**	**10.000.000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	10.000.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**82.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**82.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lembata, Luar Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lembata, Luar Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**40.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**40.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Lembata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**83.881.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**83.881.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	73.032.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	73.032.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	8.349.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	8.349.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15**	**73.530.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15**	**73.530.000**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	53.530.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lembata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	53.530.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Lembata	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	5.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lembata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5.000.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		**Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**50**	**102.166.440**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**50**	**102.166.440**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**50**	**102.166.440**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**50**	**102.166.440**	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50	102.166.440	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50	102.166.440	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		**Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**100**	**673.020.220**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**100**	**38.685.020.220**	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**1**	**673.020.220**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**1**	**38.685.020.220**	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50	618.120.220	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50	38.630.120.220	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	54.900.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	54.900.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat**	**1**	**55.100.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat**	**1**	**55.100.000**	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**1**	**55.100.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**1**	**55.100.000**	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan OrmasAsing di Daerah yang Disusun	1	55.100.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Pendaftaran Ormas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan OrmasAsing di Daerah yang Disusun	1	55.100.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		**Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**50**	**100.961.650**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**50**	**100.961.650**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**50**	**100.961.650**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**50**	**100.961.650**	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	100.961.650	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	100.961.650	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		**Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik**	**100**	**1.843.399.936**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik**	**100**	**1.843.399.936**	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**2**	**1.843.399.936**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**2**	**1.843.399.936**	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50	15.136.681	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50	15.136.681	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	128.263.255	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Lembata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	128.263.255	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	1.700.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota	Kabupaten Lembata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	1.700.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Badan Kesbangpol, yang melaksanakan unsur pemerintahan umum.

Pada tahun rencana 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 termuat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesbangpol

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Berdasarkan tema RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan (8) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, selanjutnya dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, adalah:

1. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

   Prioritas nasional ini diturunkan kedalam program prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesbangpol.

2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

   Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesbangpol.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Ssaran	Target Capaian
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Jumlah masyarakat yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Persentase Pemahaman kelompok Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	32,61

3.3 Program dan Kegiatan

Sub bab ini menjelaskan tenng program dan kegiatan prioritas, yaitu program pembangunan daerah sesuai dengan bidang urusan Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata Tahun 2024. Program Pembanguna daerah Kabupaten Lembata adalah program strategis daerahyang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2024.

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol di Tahun 2024 sebanyak 6 Program, 13 Kegiatan, 36 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 39.945.707.989,-, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.569.613.835,-.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 547.950.000,-.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik , terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 35.410.887.504,-.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000,-.
5. Program Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000,-
.
6. Program Peingkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian lengkap rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, pendanaan indikatif Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata dalam Renja 2024, disajikan pada table 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PENJUMLAHAN TAHUN	CAPAIAN TAHUN ke-22	LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENCANA SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK						**39.845.707.000,00**							**5.048.999.116,00**	
	X	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**39.845.707.000,00**							**5.048.999.116,00**	
	X.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**39.845.707.000,00**							**5.048.999.116,00**	
1	**X.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	-			**100 %**	**2.698.813.000,00**						-	**2.691.340.270,00**	
	X.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			12 Dokumen	38.000.000,00			-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata	-	38.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN
	X.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN
	X.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN
	X.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahanRKA-SKPD														
			Jumlah DokumenPerubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN
	X.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	1.891.058.435,00			-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat	-	2.210.316.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1.781.330.185,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat		2.071.330.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.02.0002	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	115.728.250,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat		150.560.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat		7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat		7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			20 %	35.100.000,00			-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok	-	35.513.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.03.0000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	28.100.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		28.513.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselenggaranya mengelolah PNS*	-			100 %	10.000.000,00			-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok	-	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	162.500.000,00			-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok	-	82.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kel/Kel, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Unit	252.500.000,00			-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok	-	45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	160.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	82.500.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			25 %	23.450.450,00			-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok	-	93.961.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		73.072.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19.950.450,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		8.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			25 %	125.000.000,00			-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok	-	73.530.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	100.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		53.530.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	6.01.01.2.05.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	-			**25 %**	**547.500.000,00**						-	**105.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	-			25 %	547.500.000,00			-	4.Memenuhi standar pelayanan publik, kat ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pasyarakat, Masyarakat	-	105.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				60 Laporan	547.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Memenuhi standar pelayanan publik, kat ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Pasyarakat, Masyarakat		105.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**5.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	-			**25 %**	**30.410.857.004,00**						-	**643.020.220,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemekaran dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Terlaksananya Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemekaran dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	-			25 %	30.410.857.004,00			-	4.Memenuhi standar pelayanan publik, kat ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat	-	643.020.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemekaran dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				00 Orang	30.313.887.004,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat		333.120.228,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat		54.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**5.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	*Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	-			**25 %**	**25.000.000,00**						-	**56.100.000,00**	
	6.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	-			25 %	25.000.000,00			-	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat	-	56.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat		52.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**5.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	*Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	-			**25 %**	**100.001.650,00**						-	**100.001.650,00**	
	6.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	-			25 %	100.001.650,00			-	4.Memperkuat stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat	-	100.001.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pendayagunaan Kearifan lokal di Daerah														

			Jumlah Orang yang mengakur Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Kebudayaan di Daerah				50 Orang	105.561.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Memperkuat stabilitas politik, kat antraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat		105.561.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
C	**3.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	-			**25 %**	**1.291.395.000,00**						-	**1.551.690.379,00**	
	3.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-			25 %	1.291.299.000,00			-	4.Memperkuat stabilitas politik, kat antraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat	-	1.551.599.379,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	3.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemberdayaan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kerukunan di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	120.255.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	4.Memperkuat stabilitas politik, hukum pemerintahan, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat		15.156.561,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	1.171.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	4.Memperkuat stabilitas politik, hukum pemerintahan, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat		1.106.425.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		JUMLAH						39.942.707.906,00							5.048.926.110,00	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesbangpol dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Badan Kesbangpol.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, September 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lembata,

Petrus Kanisius Payong, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19710212 200012 1 002